



UNIVERSITAS INDONESIA

**Kala Air Tidak Lagi Menjadi Sahabat:
Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta Tahun 1911 – 1985**

DISERTASI

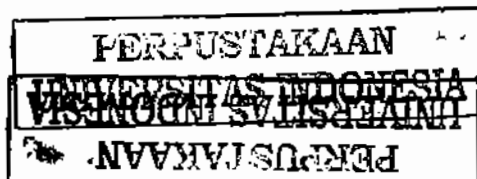
Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor
dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Sejarah
dipertahankan di hadapan Sidang Akademik Universitas Indonesia
di bawah pimpinan

Prof. Dr. der Soz Gumilar Rusliwa Somantri
pada hari Senin; 21 Juli 2008; Pukul 10.00
Di kampus Universitas Indonesia

oleh
Restu Gunawan
NPM 8704150022

D
00890

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2008

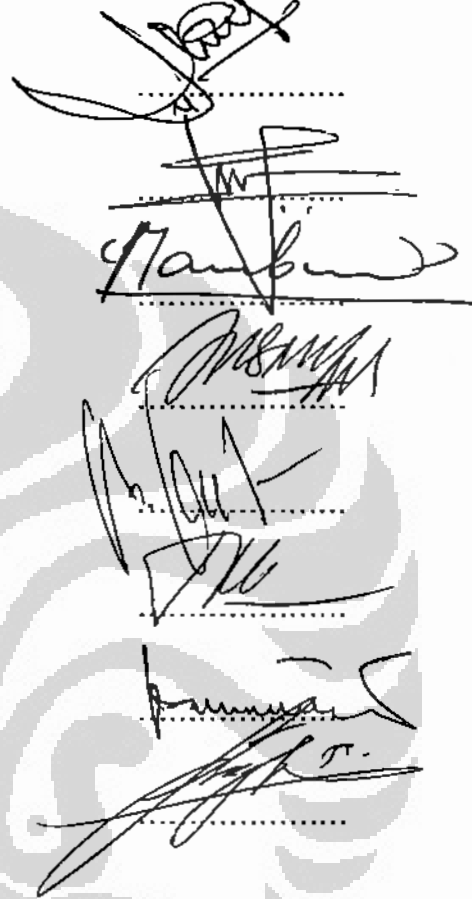


LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi ini telah diujikan pada hari Senin, 21 Juli 2008, pukul: 10.00 WIB, dengan susunan penguji sebagai berikut:

1. Dr. Priyanto Wibowo
Ketua Penguji
2. Prof. Dr. I Ketut Surajaya
Promotor
3. Dr. Rudy P. Tambunan
Kopromotor
4. Prof. Dr. Susanto Zuhdi
Kopromotor
5. Prof. Dr. R. Z. Leirissa
Anggota
6. Dr. Suharto
Anggota
7. Dr. Ir. Ruchiyat Deni Jakapermana, M. Eng.
Anggota
8. Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyono, M. Hum.
Anggota

Tanda Tangan



Disahkan oleh

Ketua Program Studi Ilmu Sejarah
Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Priyanto Wibowo
NIP. 131 689 560



UNIVERSITAS INDONESIA
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Bangung Wibawarta
131 882 265

Ucapan Terima Kasih

Tahun 1995, ketika itu penulis masih tergolong sebagai pegawai baru di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Waktu itu saya diajak rapat di ruang sidang Direktorat Jenderal Kebudayaan di Jalan Cilacap 4, Jakarta Pusat oleh Ibu Sri Sutjiatiningsih, Bu GA. Ohorella dan Pak Muchtaruddin Ibrahim. Tanpa saya sadari ternyata dalam rapat tersebut bertemu dengan Prof. Dr. Edi Sedyawati (Direktur Jenderal Kebudayaan), Dr. Anhar Gonggong (Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional), Prof. Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. AB. Lopian, Prof. Dr. RZ. Leirissa, Dr. Mukhlis PaEni, Drs. Susanto Zuhdi, M.Hum, almarhum Drs. JR. Chaniago, Drs. Nunus Supardi dan banyak lagi. Tentu beliau-beliau itu belum mengenal saya. Informasi yang saya serap dari diskusi beliau-beliau itu 'bagaikan sinar matahari pagi' yang membuka cakrawala pemikiran saya untuk lebih meningkatkan ilmu. Untuk itulah saya mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang telah menjadi 'pembuka pikiran' saya. Dan akhirnya melalui proses pergulatan pemikiran yang panjang telah mengantarkan saya untuk kuliah S3 di Universitas Indonesia. Dan alhamdulillah akhirnya proses panjang itu sekarang sudah diambang pintu ketika disertasi sudah mulai diujikan. Tentu disertasi ini tidak akan selesai tanpa arahan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Saya bersyukur mendapat promotor dan ko promotor yang menguasai bidang penelitian saya dan mampu memberikan dorongan moral yang sangat kuat sehingga saya selalu bersemangat dan menikmati pekerjaan ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. I Ketut Surajaya selaku promotor yang telah memberikan kebebasan kepada saya untuk melakukan eksperimen dalam melakukan penelitian dan penulisan ini. Di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai Sekretaris Universitas Indonesia, beliau selalu menyediakan waktunya untuk saya. Selain itu beliau juga tidak bosan-bosannya mengingatkan saya untuk terus mengerjakan tulisan ini 'pokoknya tulis saja dulu nanti baru konsultasi', itu yang selalu saya ingat. Ini merupakan kunci mengapa saya menikmati tulisan ini, karena dengan diberi kebebasan menulis, saya tidak merasa terbebani.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dr. Susanto Zuhdi. Beliau tidak hanya sebagai ko promotor tetapi juga sebagai teman diskusi yang memberi banyak wawasan. Beliau juga yang mendorong saya untuk melanjutkan kuliah sewaktu masih menjadi Direktur di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sesekali dalam suatu perbincangan Pak Santo selalu mengingatkan kepada saya bahwa kecewa dan marah adalah hal yang biasa tetapi 'ungkapkan kemarahan itu dengan sebuah karya', itu yang memotivasi saya untuk berkarya dan kuliah. Sebagai ko promotor saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan dan metodologi yang saya kira merupakan bagian yang krusial dalam setiap penulisan ilmiah. Selain itu Pak Santo yang selalu kritis dikala bimbingan

dan ujian telah memberi ingatan yang membekas bagi mahasiswanya, semoga itu tetap dipertahankan terus untuk kemajuan ilmu sejarah.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Rudy P Tambunan. Perkenalan saya dengan beliau diawali ketika saya membaca *The Jakarta Post*, yang memuat berita tentang ujian disertasi Pak Rudy. Dari membaca berita itu, saya mencari alamat Pak Rudy. Dari berbagai perbincangan akhirnya beliau berkenan menjadi salah satu penguji proposal dan selanjutnya menjadi ko promotor. Saya mendapat banyak pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan geografi, lingkungan dan perkotaan. Apalagi Pak Rudy yang mantan pejabat di DKI mengerti betul seluk beluk pembangunan di DKI, sehingga dengan mudah beliau dapat memberikan akses kepada saya terutama masalah sumber dan istilah-istilah yang berkaitan dengan perkotaan dan geografi.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. RZ. Leirissa yang telah membimbing saya sejak awal. Saya sangat berterima kasih atas bimbingannya terutama dalam kaitannya dengan metodologi penelitian. Pak Riz dengan sabar menerima saya untuk konsultasi masalah tema penelitian dan akhirnya beliau memberi kebebasan untuk memilih tema disertasi yang saya minati.

Kepada Dr. Suharto, yang telah menguji saya sejak proposal, saya ucapkan terima kasih atas segala pertanyaan kritisnya terutama hal-hal yang tadinya saya anggap sepele ternyata itu menjadi masalah penting dan harus saya baca kembali untuk memperoleh hasil yang baik.

Terima kasih kepada Dr. Ir. Ruchiyat Deni Jakapermana, M. Eng; saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dan koreksinya selama ini. Sebagai pejabat DPU yang menguasai masalah-masalah perkotaan dan hidrologi saya merasa terbantu banyak. Dan yang sangat membanggakan melalui disertasi ini telah berhasil mempertemukan berbagai ahli tidak hanya Sejarawan, tetapi juga Geograf dan *Engineer*. Mudah-mudahan ini berguna untuk perkembangan Ilmu Sejarah.

Kepada Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyono, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya menguji saya. Gayanya yang *low profile*, ternyata dikala ujian kesan itu akan hilang dengan daya kritisnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas beberapa koreksi dan perbaikan dalam disertasi ini.

Kepada Prof. Dr. Taufik Abdullah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bimbingan dan dorongannya. Pada waktu S2 beliau telah berkenan memberikan rekomendasi untuk kuliah. Dalam kaitannya dengan disertasi, beliau tidak bosan-bosannya untuk memberikan ilmunya kepada saya. Dalam berbagai kesempatan saya sering bertanya tentang metodologi dan retorika sejarah. Meskipun beliau tidak pernah mengajar saya melalui bangku kuliah dari perbincangan itulah ilmu Pak Taufik banyak yang saya serap, lebih dari sekedar kuliah. Selain itu kesempatan yang telah diberikan

Pak Taufik untuk mengikuti program NIOD (*Nederlands Institute Oorlog Documentatie*) Belanda telah banyak membantu saya. Berawal dari telepon beliau yang hanya meminta saya mengikuti pelatihan di Hotel Maharaja, ternyata akhirnya saya juga diberi kesempatan untuk mengajukan proposal penelitian dan berhasil dibiayai oleh NIOD. Tentu ini jalan awal untuk mengasah kemampuan saya dalam penelitian. Sebagai orang tua, Pak Taufik juga sering memberikan petuahnya kepada saya. Dikala saya sedang frustrasi, Pak Taufik selalu memotivasi dengan mengatakan bahwa 'kekuatan kita adalah kemampuan intelektual karena itu akan menjadi milik kita yang abadi, itulah yang harus kamu kejar'. Terima kasih Pak Taufik.

Kepada Dr. Mukhlis PaEni, saya ucapkan terima kasih atas berbagai diskusi selama ini, terutama yang sering kami lakukan di Ruang Staf Ahli Menteri Depbudpar. Disela-sela kesibukannya di Depbudpar, kalau saya datang ke kantornya, Pak Mukhlis selalu menyediakan waktunya untuk saya. Pak Mukhlis tidak hanya sebagai guru tetapi juga teman diskusi yang menyenangkan tentang berbagai hal. Terima kasih juga atas motivasi moralnya selama ini. Selain itu juga terima kasih atas rekomendasinya sehingga saya mendapat bantuan dana penelitian dari Depdiknas.

Kepada Dr. Anhar Gonggong, yang selalu konsen terhadap anak buahnya yang sedang kuliah, dan selalu memotivasi saya untuk sekolah. Pak Anhar adalah orang pertama yang menyuruh saya untuk kuliah sejak tahun 1995. Bagi saya Pak Anhar adalah contoh dari perpaduan antara birokrat dan intelektual yang berhasil. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas motivasi dan provokasinya selama ini.

Kepada Prof. Dr. AB. Lopian, saya banyak belajar tentang kecermatan memilih kata, konsep dan ketelitian dalam penulisan. Meskipun itu sangat sulit saya lakukan. Selain itu disela-sela ngobrol di berbagai kesempatan baik di rumah Pak Lopian, di Pasar Minggu maupun di berbagai forum, Pak Lopian selalu memotivasi saya untuk berkarya lebih baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Kepada Prof. Dr. Peter Nas (Leiden) yang telah mengirimkan email draft artikelnya tentang banjir Jakarta kepada saya sebelum diterbitkan di *Bijdragen* terbitan KITLV, saya ucapkan terima kasih, karena draft tersebut saya gunakan sebagai ancangan dalam penulisan.

Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Dr. Edi Sedyawati. Beliau selalu mengingatkan saya dan bertanya, "piye disertasimu teko ngendi?". Saya kira perhatian yang sungguh membanggakan bagi kami. Selain itu juga peminjaman literatur dari Ibu telah memberi pemahaman yang lebih luas tentang Jakarta.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Prof. Dr. Moendardjito. Kepada Pak Otik terima kasih telah memberikan pemahaman kepada saya terutama tentang kanal-kanal

di dalam kota lama Batavia yang sangat bermanfaat bagi penulisan ini dan juga terima kasih atas peminjaman makalahnya.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Tejo K Widodo (UNDIP), Prof. Dr. Nina Herlina (UNPAJ) atas dorongannya moralnya selama ini. Kepada Dr. Asvi Warman Adam yang telah meminjami beberapa literatur penting saya ucapkan terima kasih. Prof. Dr. Bambang Purwanto (UGM) saya ucapkan banyak terima kasih atas dorongan moralnya dan selalu membuka diri untuk melakukan diskusi-diskusi.

Kepada Dr. Prijanto sebagai Ketua Departemen Sejarah, saya mengucapkan terima kasih atas arahannya dan juga koreksi-koreksinya pada waktu ujian. Kepada Dra. Tri Wahyuning Irsyam, M.Si, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya, dan tidak bosan-bosannya mengingatkan saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Kepada Mbak Wiwik, Mbak Ari Lestari beserta 'krunya', saya juga ucapkan terima kasih atas segala bantuannya.

Kepada pengelola NIOD (*Nederland Institute Oorlog Documentatie*) Belanda dan LIPI saya mengucapkan banyak terima kasih terutama Ibu Els Bogaerts, Marike (NIOD Belanda) dan Sukri Abdurachman, SH (LIPI). Melalui program NIOD yang saya ikuti mulai dari diskusi yang diadakan di Surabaya, Jakarta, Ciater dan Padang telah memberikan suasana akademik tersendiri. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Freek Colombijn (Belanda), Prof. Dr. Thomas Linblad (Belanda), Prof. Dr. Robert Crib (Australia), Dr. Roger Toll (KITLV). Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tim NIOD Indonesia, Prof. Dr. Djoko Surjo; Prof. Dr. AB. Lopian; Prof. Dr. Safri Sairin, Prof. Dr. Taufik Abdullah, Dr. Yekti Maunati, Dr. John Haba, Prof. Dr. I Ketut Ardhana, Dr. M. Hisjam. Keikutsertaan saya pada program yang dilaksanakan oleh NIOD telah banyak membantu saya dalam penelitian dan penulisan. Selain itu bantuan dana dari NIOD telah memudahkan saya dalam melakukan berbagai penelitian. Kepada teman-teman alumni NIOD seperti Ali Khumaedi, Lamijo, (LIPI), Nasrul (USU), Candra (Univ. Jember), Undri (Univ. Andalas), Sarkawi, Laode (Unair), Tanti (Univ. Padjajaran), Rajimo (Undip), dan Amur (Jakarta) yang telah memberikan suasana kompetisi yang konstruktif, saya ucapkan terima kasih.

Kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Ir. Jero Wacik SE, saya mengucapkan banyak terima kasih. Pada awal menjabat, Pak Menteri membuat gebrakan dengan 'budaya berpikir positif' telah memberi motivasi moral kepada saya untuk berkarya. Karena dasar pemikiran itulah yang akan mengubah *mindset* kita, dan akhirnya akan menghasilkan karya yang lebih baik. Selain itu ketika memberi ceramah beliau selalu mengingatkan para pegawainya agar meningkatkan kompetensi, ini merupakan motivator bagi setiap anak buahnya.

Kepada Bapak Drs. Hari Untoro Dradjat, MA, selaku Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala, saya mengucapkan banyak terima kasih, atas ijin dan dorongannya selama ini. Beliau selalu memotivasi saya untuk menulis di berbagai kesempatan tentu ini sebuah perhatian yang cukup besar dari Pak Hari dan membanggakan bagi saya.

Kepada Bapak Dr. Sapta Nirwandar mantan Sekretaris Jenderal Depbudpar, terima kasih atas ijinnya sehingga saya dapat kuliah sambil bekerja. Gaya bicara Pak Sapta yang tegas lugas menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi dengan ditunjang intelektualitas yang tinggi telah memberi rangsangan moral bagi saya untuk meningkatkan kemampuan akademis.

Kepada Bapak Drs. Endjat Djaenuderadjat, selaku Direktur Geografi Sejarah, saya ucapkan terima kasih atas pengertiannya dan dorongan moralnya sehingga saya diberi kebebasan untuk menulis disertasi sambil bekerja. Bahkan pagi-pagi sebelum ujian tertutup beliau mengirim 'sms' memberi dorongan moral kepada saya, tentu sebuah tradisi yang patut ditiru dari seorang pemimpin kepada anak buahnya. Juga kepada Drs. Sabri A, selaku Direktur Nilai Sejarah, 'kawan lama' yang sudah hijrah ke Jakarta, terima kasih atas dorongan moralnya selama ini. Semoga sukses juga di Jakartanya.

Kepada Ibu Dra. Sri Rahayu Budiarti, MM, selaku Sekretaris Ditjen Sejarah Purbakala dan Plt. Direktur Geografi Sejarah, saya mengucapkan terima kasih atas segala motivasinya dan dorongan moralnya, juga kepada Ibu Dra. Nies Anggraini, MA, (Setditjen Sejarah dan Purbakala) terima kasih atas dorongan moralnya selama ini.

Kepada teman-teman di ruang Subdit Lingkungan Sejarah, Dra. Sri Suharni, Murwanti, Restuwati, Lismiarti, Budi Waras, Dudy, Sartono, Lusi, Titin, juga kepada Andi Maryam terima kasih atas dorongan moralnya selama ini dan kawan-kawan di Depbudpar, saya mengucapkan terima kasih atas pengertiannya selama ini sehingga saya dapat menulis disertasi dengan tenang di ruang kerja.

Terima kasih kepada Dr. Magdalia Alfian dan Dr. Saleh As'ad Djamhari, atas dorongan moralnya dan selalu perhatian kepada saya dengan menanyakan perkembangan penulisan disertasi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Lily Manus, Mas Kasijanto, Pak Iskandar atas dorongan moralnya selama ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Wagiono; dr. Rusdi Husein, M. Hum; Iwan Gunawan, M.Hum, teman-teman seangkatan. Juga kepada Dr. Agus Mulyana, Harto Juwono, M.Hum, yang telah banyak memotivasi saya dalam penelusuran arsip-arsip kolonial. Juga Rahmat Kustanto (Depkeu) teman kursus toefl, saya ucapkan terima kasih, semoga sukses di Australianya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak KPH. Jenderal (Purn) Herman Saren Sudiro, atas bantuan dananya sehingga saya dapat melakukan penelitian dengan leluasa. Semoga Pak Herman diberikan kesehatan dan panjang umur.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada bapak-bapak alumni *Koninklijk Institute voor de Marine* (KIM) Belanda diantaranya Laksamana (Purn) Urip Santoso, Bapak Laksamana Soekiswo, Bapak Laksamana Sukono (alm) dan lain-lainnya yang telah memberikan bantuan dananya, sehingga dapat membantu kuliah saya.

Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih kepada petugas Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Sastra UI, Dinas Tata Kota DKI, Perpustakaan Daerah DKI, Arsip Daerah DKI dan Perpustakaan Departemen Pekerjaan Umum atas bantuannya dalam penelusuran sumber-sumber yang kami butuhkan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya tujukan kepada istri tercinta Amurwani Dwi Lestariningsih, M.Hum dengan segala pengertiannya, sehingga saya dapat menulis disertasi ini sampai selesai dan selalu memotivasi saya untuk segera menyelesaikan kuliah karena masih banyak urusan lain yang harus diselesaikan. Untuk dua dewa penolong saya nantinya “dewa angin dan dewa matahari” (Bayu Aji Sinantria G dan Akhmal Dzaky **Baskara** G) yang selalu saya tolak ketika mengajak main bola dan sepeda di Kampus UI dengan alasan masih banyak pekerjaan, insya allah kalau sudah ujian ini, kita bisa bermain bola bertiga di kampus. Kepada kedua orang tua, bapak H. Ramelan dan ibu Hj. Suyarti yang selalu berdoa disepinya malam untuk anak-cucunya, saya ucapkan terima kasih atas segala motivasinya selama ini, semoga dipanjangkan umurnya dan diberi kesehatan. Juga kepada mertua Bapak H. Amam Setiadi dan almarhum Hj. Suniarti terima kasih atas segala motivasinya. Kepada kakak saya Ir. Setyo Harwanto, adik Drs. Tri Gunarto, dan Endang Sulistyowati juga kepada om Santoso, Bapak Soekatno TW yang telah memberi dorongan moralnya saya ucapkan terima kasih.

Depok; Juli 2008

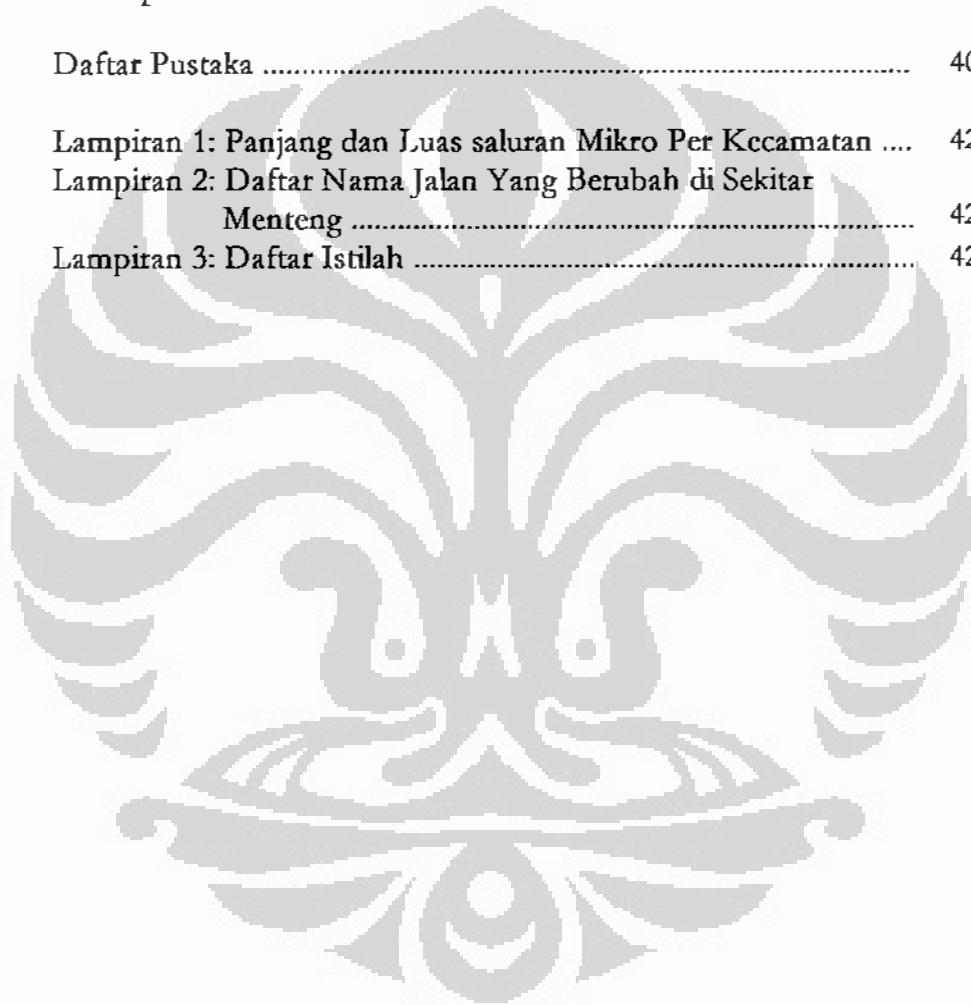
Penulis

Daftar Isi

| | | |
|---------|--|------|
| | Halaman Judul | i |
| | Halaman Pengesahan | ii |
| | Ucapan Terima Kasih..... | iii |
| | Daftar Isi | ix |
| | Daftar Tabel | x |
| | Daftar Gambar | xi |
| | Abstraksi | xvii |
| Bab I | Pendahuluan | 1 |
| | 1.1 Permasalahan | 1 |
| | 1.2 Kerangka Teori dan Metodologi | 2 |
| | 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| | 1.4 Penelitian Terdahulu | 9 |
| | 1.5 Pengertian Tentang Banjir | 12 |
| | 1.6 Sumber Penelitian | 15 |
| | 1.7 Sistematika Penulisan | 16 |
| Bab II | Dataran Rendah Jakarta Dalam Siklus Geografi | 17 |
| | 2.1 Geomorfologi dan Geologi Jakarta | 17 |
| | 2.2 Iklim dan Curah Hujan | 27 |
| | 2.3 Tata Guna Lahan Daerah Aliran Sungai | 32 |
| | 2.4 Sungai dan Rawa | 36 |
| | 2.5 Kanal-kanal Sebelum Abad 20 | 48 |
| | 2.5.1 Kanal di Dalam Kota | 48 |
| | 2.5.2 Kanal di Luar Kota | 51 |
| | 2.6 Bendung Katulampa, <i>Westerslokker</i> dan <i>Oosterslokker</i> | 56 |
| Bab III | Perkembangan Spasial dan Perebutan Ruang Kota | 64 |
| | 3.1 Awal Sebuah Peradaban di Tanah Datar | 65 |
| | 3.2 Kota Bawah Batavia: <i>Benedenstad</i> | 68 |
| | 3.3 Kota Atas Weltevreden: <i>Bovenstad</i> | 73 |
| | 3.4 Pembangunan Kawasan Menteng dan Kampung Bumiputera 1905 – 1940) | 81 |
| | 3.5 Pembangunan Kota Baru Kebayoran dan Jalan MH. Thamrin ... | 97 |
| | 3.6 Pembelian Tanah Partikelir dan Pembangunan Perumahan Pegawai | 106 |
| | 3.7 Marginalisasi Sektor Informal (Tahun 1950 – 1960) | 120 |
| | 3.8 Pembangunan Kompleks Senayan: Jakarta Mercusuar Dunia | 131 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 3.9 | Aglomerasi Kota: Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Tahun 1970 – 1980) | 144 |
| 3.10 | Kawasan Puncak di Bawah Kekuasaan 'Biong' | 153 |
| Bab IV | Banjir di Jakarta 1893 - 1985: Dari Weltevreden ke Pinggiran Jakarta ... | 160 |
| 4.1 | Banjir Tahun 1893: <i>Batavia Onder Water</i> | 161 |
| 4.2 | Banjir 1918 dan Filantropi Dalam Musibah | 165 |
| 4.3 | Banjir 1930-an: Kuburan Menjadi Tempat Pengungsian | 178 |
| 4.4 | Banjir Tahun 1950- 1960: Banjir Dalam Karikatur dan Cerpen .. | 189 |
| 4.5 | Banjir Tahun 1960 – 1970: Tim Khusus Penanganan Banjir | 198 |
| 4.6 | Banjir Tahun 1970 – 1980: Siklus Banjir Yang Semakin Pendek | 206 |
| 4.7 | Banjir Tahun 1980 – 1985: Jakarta di Kepung Air | 226 |
| Bab V | Pengendalian Banjir 1911 – 1965: Dari Kanal Banjir Kali Malang Hingga Rencana WJ. Blommestein | 253 |
| 5.1 | Pembangunan Drainase di Perkampungan Jembatan Lima, Blandongan dan Sekitarnya | 254 |
| 5.2 | Kanal Banjir Kali Malang dan Pintu Air Matraman | 259 |
| 5.3 | Perawatan Sungai dan Pengerukan Sedimentasi | 273 |
| 5.3.1 | Aliran Sungai Ciliwung | 273 |
| 5.3.2 | Sungai Angke dan Saluran Mookervaart | 285 |
| 5.3.3 | Sungai Krukut dan Sekitarnya | 288 |
| 5.3.4 | Saluran Sentiong dan Saluran Kalibaru | 291 |
| 5.4 | Pengendalian Banjir Pada Masa Peralihan 1940 – 1960-an | 295 |
| 5.5 | Pengendalian Banjir Dalam Gagasan Herman Van Breen dan WJ. Blommestein | 304 |
| 5.5.1 | Gagasan Prof. Ir. Herman Van Breen | 304 |
| 5.5.2 | Gagasan Prof. Dr. Ir. WJ. Blommestein | 315 |
| Bab VI | Pengendalian Banjir 1965 – 1985: Dari KOPRO Banjir ke PBJR | 319 |
| 6.1 | Komando Pencegahan Proyek Banjir (Kopro Banjir) | 319 |
| 6.2 | Rencana Induk Pengendalian Banjir: Wacana dan Realisasi | 328 |
| 6.2.1 | Rencana Induk Pengendalian Banjir 1965 – 1985 | 328 |
| 6.2.2 | Rencana Induk 1973: Sistem Tapal Kuda dan Waduk Depok | 331 |
| 6.2.3 | Rencana SOGREAHH Perancis dan JICA Jepang | 343 |
| 6.3 | Pengendalian Banjir Makro Sistem | 345 |
| 6.3.1 | Salurang Cengkareng (Cengkareng Drain) | 345 |
| 6.3.2 | Saluran Cakung (Cakung Drain) | 355 |
| 6.3.3 | Saluran Sungai Grogol dan Sungai Sekretaris | 384 |

| | | |
|---------|--|-----|
| | 6.3.4 Saluran Karang (Karang Drain) | 362 |
| | 6.3.5 Polder Pluit | 364 |
| | 6.3.6 Sodetan dan Instalasi Pompa Sungai Cideng | 369 |
| 6.4 | Pengendalian Banjir Mikro Sistem | 371 |
| | 6.4.1 Pengelolaan Sampah | 371 |
| | 6.4.2 Menggusur Permukiman Warga di Bantaran Sungai | 374 |
| Bab VII | Kesimpulan | 398 |
| | Daftar Pustaka | 407 |
| | Lampiran 1: Panjang dan Luas saluran Mikro Per Kecamatan | 426 |
| | Lampiran 2: Daftar Nama Jalan Yang Berubah di Sekitar Menteng | 427 |
| | Lampiran 3: Daftar Istilah | 429 |



Daftar Tabel

| | | |
|----|--|-----|
| 1 | Tabel 1: Data Curah Hujan Jabotabek Tahun 1870 – 1941 | 29 |
| 2 | Tabel 2: Curah Hujan dan Hari Hujan di Jakarta Tahun 1931 – 1961 | 30 |
| 3 | Tabel 3: Rata-rata Curah Hujan Perbulan Dalam Milimeter Tahun 1963 – 1969 | 31 |
| 4 | Tabel 4: Daerah Tangkapan Air dan Profil Sungai | 35 |
| 5 | Tabel 5: Perawatan Bendung Katulampa | 58 |
| 6 | Tabel 6: Anggaran Batavia Tahun 1906 | 83 |
| 7 | Tabel 7: Penduduk Batavia Pada Tahun 1930 | 88 |
| 8 | Tabel 8: Pembangunan dan Perbaikan Kampung 1929 – 1939 | 96 |
| 9 | Tabel 9: Peruntukan Tanah di Kebayoran | 100 |
| 10 | Tabel 10: Perkembangan Pembangunan Perumahan | 118 |
| 11 | Tabel 11: Jumlah Penduduk di Botabek 1975 – 1980 | 148 |
| 12 | Tabel 12: Penyelewengan IMB Tahun 1983 | 150 |
| 13 | Tabel 13: Perbandingan Jumlah Penduduk dan Luas Kota 1673 – 1985 | 155 |
| 14 | Tabel 14: Perkembangan Kawasan Terbangun Tahun 1970 – 1980 | 156 |
| 15 | Tabel 15: Perubahan Kawasan Terbangun Pada Tahun 1970 – 1980 | 157 |
| 16 | Tabel 16: Sumbangan Untuk Korban Banjir 1963 | 202 |
| 17 | Tabel 17: Daerah Genangan Banjir Pada 10 Pebruari 1970 | 206 |
| 18 | Tabel 18: Jumlah Korban Banjir dan Bantuan Pemerintah Tahun 1976 | 208 |
| 19 | Tabel 19: Debit Air di Beberapa Pintu Air Tahun 1977 | 219 |
| 20 | Tabel 20: Luas Daerah Banjir/Genangan Tahun 1970 – 1977 | 224 |
| 21 | Tabel 21: Perkembangan Wilayah Banjir di Sungai Grogol, Pesanggrahan, Angke dan Sekretaris tahun 1970 – 1977 | 224 |
| 22 | Tabel 22: Perkembangan Wilayah Banjir di Sungai Krukut, Cideng, Ciliwung dan Saluran Tebet tahun 1970 – 1977 | 225 |
| 23 | Tabel 23: Perkembangan Wilayah Banjir di Saluran Sentiong, Sungai Sunter, Cipinang, Cakung dan Buaran tahun 1970 – 1977 | 226 |
| 24 | Tabel 24: Jumlah Pengungsi dan Korban Meninggal Tahun 1911-1985 | 250 |
| 25 | Tabel 25: Grafik Peristiwa Banjir Tahun 1892 – 1985 | 251 |
| 26 | Tabel 26: Rekapitulasi Proyek dan Pembiayaan Proyek di Jembatan Lima; Blandongan dan Klenteng | 256 |
| 27 | Tabel 27: Proyek-proyek Pengairan Tahun 1913 | 269 |
| 28 | Tabel 28: Perbandingan Biaya Pembebasan Banjir Batavia dan Kota- kota lain | 273 |
| 29 | Tabel 29: Perbandingan Pembiayaan Proyek Pengairan di Batavia, Cirebon dan Surabaya | 274 |
| 30 | Tabel 30: Perawatan Sungai dan Saluran di Kantor Irigasi Batavia | 279 |

| | | |
|----|---|-----|
| 31 | Tabel 31: Proyek Pengairan Tahun 1927 | 289 |
| 32 | Tabel 32: Penggalan dan Pengerukan Saluran Tahun 1931 | 290 |
| 33 | Tabel 33: Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Saluran | 301 |
| 34 | Tabel 34: Dana Untuk Proyek Kebersihan Batavia 1919 – 1948 | 308 |
| 35 | Tabel 35: Hubungan Antara Pembiayaan dan Hasil Pekerjaan Kopro Banjir | 323 |
| 36 | Tabel 36: Susunan Organisasi Badan Pelaksana PBJR | 326 |
| 37 | Tabel 37: Waduk dan Kapasitasnya | 343 |
| 38 | Tabel 38: Perbandingan Pembiayaan Proyek Makro dan Mikro | 394 |
| 39 | Tabel 39: Rencana Induk dan Target Yang Dicapai Dalam Pelita I, II dan III oleh PBJR | 395 |

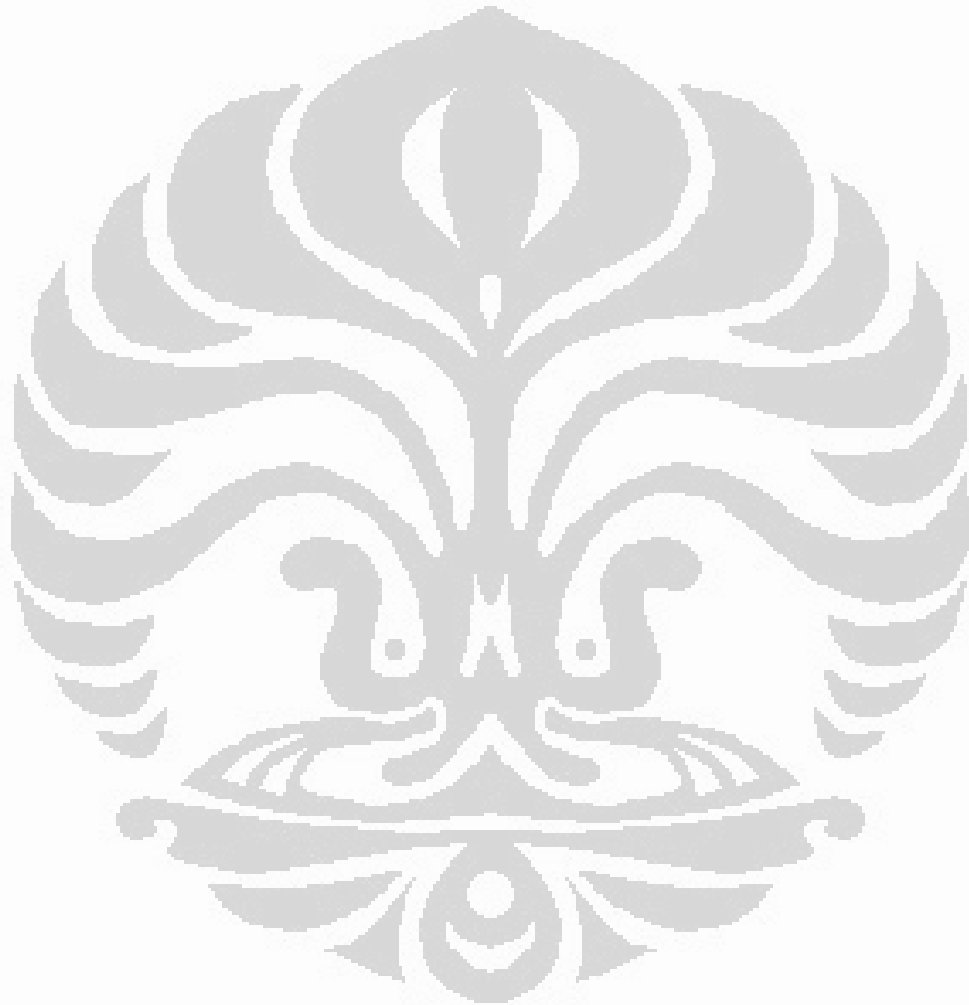


Daftar Gambar

| | | |
|----|---|-----|
| 1 | Gambar 1: Kerangka Analisis | 6 |
| 2 | Gambar 2: Skema Kaitan Debit Banjir, Model Bangunan dan Tanggul Sungai | 14 |
| 3 | Gambar 3: Peta Fisiografis Sederhana Pulau Jawa Menurut van Bemmelen 1949 | 20 |
| 4 | Gambar 4: Akresi dan Abrasi di Teluk Jakarta 1873 – 1939 Menurut Verstappen | 23 |
| 5 | Gambar 5: Kipas Fluvio-Volkanik dan Retakan di Tanah Datar Jakarta | 25 |
| 6 | Gambar 6: Sistem Sungai di Jakarta | 36 |
| 7 | Gambar 7: Peta Aliran Sungai Purba | 37 |
| 8 | Gambar 8: Peta Aliran Sungai Krukut dan Pesanggrahan | 44 |
| 9 | Gambar 9: Aliran Sungai dan Kanal-kanal Luar Kota dan Sistem Pengeringannya | 45 |
| 10 | Gambar 10: Batavia Pada Tahun 1627 dengan Kanal-kanalnya | 50 |
| 11 | Gambar 11:Kanal-kanal di Luar Kota | 56 |
| 12 | Gambar 12: Bagian Atas Bendung Katulampa Menurut Rencana 1912 | 60 |
| 13 | Gambar 13: Pengatur Pintu Air ke Oosterslokkan di Bendung Katulampa | 61 |
| 14 | Gambar 14: Peta Sunda Kelapa | 66 |
| 15 | Gambar 15: Peta Jayakarta 1619 | 68 |
| 16 | Gambar 16: Peta Batavia Tahun 1635 | 72 |
| 17 | Gambar 17: Peta Weltevreden dan Gondandia Tahun 1927 | 78 |
| 18 | Gambar 18: Sketsa Perluasan Jakarta Sampai Tahun 1967 | 121 |
| 19 | Gambar 19: Bung Karno Didampingi R Maladi Memberi Penjelasan Mengenai Kompleks Senayan | 134 |
| 20 | Gambar 20: Rencana Kepadatan Penduduk Jakarta Tahun 1965 – 1985 | 141 |
| 21 | Gambar 21: Peta Perkembangan Perumahan Jakarta sampai 1976 | 143 |
| 22 | Gambar 22: Peta Penggunaan Tanah di Jakarta Sampai Tahun 1970, 1980, 1990 | 149 |

| | | |
|----|--|-----|
| 23 | Gambar 23: Potential Run Off Tahun 1970 .. | 158 |
| 24 | Gambar 24: Peta Wilayah Banjir Pada Tahun 1892 – 1909 .. | 164 |
| 25 | Gambar 25: Wilayah Banjir Tahun 1918 .. | 176 |
| 26 | Gambar 26: Wilayah Banjir Tahun 1923 .. | 178 |
| 27 | Gambar 27: Wilayah Banjir Tahun 1932 .. | 187 |
| 28 | Gambar 28: Lukisan Karikatur Tentang Banjir .. | 190 |
| 29 | Gambar 29: Wilayah Banjir Tahun 1950 – 1960-an .. | 197 |
| 30 | Gambar 30: Wilayah Banjir Menurut Rencana Induk Kota Jakarta 1965 – 1985 .. | 203 |
| 31 | Gambar 31: Wilayah Banjir Tahun 1960 – 1970 .. | 205 |
| 32 | Gambar 32: Banjir di Sungai Krukut .. | 211 |
| 33 | Gambar 33: Pedagang Makanan Yang Kebanjiran di Kelurahan Kapuk Muara Jakarta Utara tanggal 21 Januari 1979 .. | 222 |
| 34 | Gambar 34: Presiden Soeharto dan Ny. Tien Soeharto Meninjau Daerah Banjir .. | 231 |
| 35 | Gambar 35: Genangan Air 15 Mei 1984 di Palmerah .. | 241 |
| 36 | Gambar 36: Polwan yang Kebanjiran di Asrama Ciputat .. | 247 |
| 37 | Gambar 37: Peta Wilayah Banjir Tahun 1970 – 1985 .. | 249 |
| 38 | Gambar 38: Peta Hasil Pembangunan di Jembatan Lima, Blandongan dan Sekitarnya .. | 258 |
| 39 | Gambar 39: Rencana Induk Penataan Pengairan Batavia 1913 .. | 265 |
| 40 | Gambar 40: Perencanaan Pintu Air Matraman Selesai dibangun 1919 .. | 267 |
| 41 | Gambar 41: Rencana Pintu Air Karet .. | 268 |
| 42 | Gambar 42: Penghargaan BOW Kepada Herman van Breen .. | 271 |
| 43 | Gambar 43: Rencana van Breen dengan Tiga Trace Penanggulangan Banjir .. | 311 |
| 44 | Gambar 44: Rencana WJ Blommestein Tentang Pengairan di Batavia .. | 318 |
| 45 | Gambar 45: Rencana Induk Sistem Pengairan Jakarta 1965 – 1985 .. | 330 |
| 46 | Gambar 46: Rencana Induk Sistem Pengendalian Banjir dan Drainase di DKI Jakarta 1973 .. | 336 |
| 47 | Gambar 47: Skema Prinsip Pengendalian Banjir Jakarta .. | 342 |
| 48 | Gambar 48: Waduk dan Dam Yang Disarankan SOGREAH .. | 344 |
| 49 | Gambar 49: Pematangan Sungai Grogol – Sekretaris ke Sungai Angke | 362 |

| | | |
|----|---|-----|
| 50 | Gambar 50: Suasana Penggusuran Warga di Jakarta Pusat | 382 |
| 51 | Gambar 51: Suasana Penertiban di Dacrah Tanah Abang | 384 |
| 52 | Gambar 52: Pengibaran Bendera Merah Putih oleh Warga | 387 |
| 53 | Gambar 53: Dacrah Penguasaan Sungai dan Model Bangunannya | 397 |



Abstract

Title: Water and Disaster: Flood and its Control in Jakarta, 1911-1985

425 pages; xvii, three appendixes

Supervisor : Prof. Dr. I Ketut Surajaya

Flood is indeed a big problem in Jakarta as a metropolitan city. From the colonial era to present day, flood has not yet been resolved adequately. Physiography cycles, space competition, and the management of flood seem to be significant factors affected the continuous problem of flood in Jakarta.

Seeing from the perspective of physiography which is related to geomorphology, geology, and hydrology, lowland of Jakarta formed from rivers' sedimentation thousand years ago. This in fact has formed areas below the sea level like swamp and lake areas. Sedimentation process was accelerated after the eruption of the Mount Salak in 1699, in which newly lowland has been increasing each year around 15-50 metres depending on flood and wind direction. Due to this sedimentation, Jakarta topography is flat where water could not flow smoothly.

The emergence of Jakarta as settlement areas originated from the Sunda Kelapa Kingdom that developed in the Jakarta coastal area. This process of settlement has developed rapidly along with the VOC conquered Jakarta. Being a central of the colonial trading, population has increased dramatically that also extended the size of Jakarta. In 1830, the city extended toward southern part, well-known as Weltevreden. Menteng was built in 1918 after the development of Jakarta itself.

The increasing number of population from 1948 – 1950 was occurred when the capital of the country moved from Yogyakarta to Jakarta. After 1970s population booming has happened in Jakarta which consequently increasing number of buildings could not be avoided. The construction of housing complexes, trading centres, and industries have even conducted in the restricted areas for any buildings, including the environmental geology area of 1,2 and 3. The impact of these constructions could be clearly seen through the decreasing of absorbing water areas. Therefore, flooding areas have increased rapidly. From 1892 to 1930 flood had been around Weltevreden area, but in 1985 floods have reached the outskirts of Jakarta, including Bintaro, Ciputat, and Pasar Minggu.

To solve the flood, structural approach has been applied since 1911. During colonial period flood, especially in 1919, the canal of Kali Malang and Manggarai water control were built. After the independence, 1970 – 1985, floods have been managed by constructing Cengkareng drain, Cakung drain and so forth. Though government has spent a lot of funding, flood could not be stopped it. Flood is indeed a difficult homework for government of Jakarta.

BAB I **Pendahuluan**

1.1 Permasalahan

Pada tanggal 8 Agustus 2007, Pemerintah DKI Jakarta melaksanakan pemilihan Gubernur Kepala Daerah periode 2007 – 2012, dengan menampilkan dua calon yaitu Adang Daradjatun dan Fauzi Bowo. Dalam programnya kedua kandidat menempatkan masalah banjir sebagai prioritas utama yang harus ditangani. Fauzi Bowo dalam janji kampanyenya mengatakan bahwa solusi yang disiapkan untuk mengatasi banjir adalah mempercepat penyelesaian pengerjaan kanal banjir timur, normalisasi kanal banjir barat dan sungai yang melintasi Jakarta: Ciliwung, Pesanggrahan dan Krukut serta pengembangan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana banjir.¹ Sementara itu Adang Daradjatun berjanji akan mempercepat pembangunan kanal banjir timur, perbaikan drainase kota, revitalisasi daerah aliran sungai, kawasan hijau dan daerah resapan air.² Meskipun janji kampanye itu dianggap normatif dan tidak melihat realitas yang sebenarnya, karena tidak dikaitkan dengan kondisi keuangan dan realitas sosial masyarakat Jakarta, tetapi hal ini memperlihatkan bahwa pengendalian banjir tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, sosial dan budaya tetapi juga masuk ke dalam ranah politik. Terbukti untuk memenangkan pilkada, para kandidat gubernur harus bisa menjamin bahwa masyarakat Jakarta tidak kebanjiran lagi.

Janji kampanye yang disampaikan oleh calon gubernur tersebut wajar saja mengingat Jakarta setiap tahun dilanda banjir dan ada kecenderungan wilayah yang dilanda banjir semakin luas. Misalnya daerah Grogol dan Petamburan yang berada di dekat Kali Jeling anak sungai Ciliwung, terkena banjir sejak tahun 1970-an. Sementara itu, daerah Bidara Cina mulai dilanda banjir sejak tahun 1960-an.³ Hal yang sama juga terjadi di daerah Pondok Aren Jakarta Selatan yang berdekatan dengan sungai

¹ Tempo; 4 Agustus 2007

² Kompas; 2 Agustus 2007

³ Kompas; 29 Januari 2005

Pesanggrahan, daerah ini dilanda banjir sejak tahun 1970-an. Banjir terjadi karena adanya pengembang (*developer*) yang membangun kompleks perumahan di sekitar Pondok Aren.⁴

Banjir yang terjadi di suatu wilayah sangat terkait dengan kondisi alam dan penataan kota. Kondisi alam yang menyangkut faktor geografi seperti geologi, iklim, curah hujan, dan geomorfologi merupakan unsur yang perubahannya berjalan lambat bahkan bisa ratusan tahun. Selain faktor geografi, hal lain yang mempengaruhi besar kecilnya banjir adalah kebijakan penataan kota Jakarta yang meliputi pembangunan kota dan perilaku penduduknya.⁵

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat Jakarta dalam mengendalikan banjir yang merupakan gejala alam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa jauh faktor geografi yang menyangkut gejala alam seperti geologi, geomorfologi dan curah hujan mempengaruhi besarnya banjir?
2. Seberapa jauh pemanfaatan ruang kota (ruang politik, ekonomi dan sosial budaya) mempengaruhi wilayah banjir?
3. Bagaimana bentuk-bentuk respon masyarakat dalam menghadapi banjir?
4. Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengendalikan banjir?

1.2 Kerangka Teori dan Metodologi

Menurut Fernand Braudel, perubahan kesejarahan berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pertama adalah 'geosejarah' yaitu hubungan manusia dan lingkungan fisiknya. Lingkungan merupakan aspek spasial dalam sejarah. Dalam aspek temporal, Braudel mengembangkan tiga kerangka waktu yang bersusun tiga, yaitu struktur, sejarah

⁴ Kompas; 30 Januari 2005

⁵ Nama Jakarta digunakan setelah Jepang masuk tahun 1942. Nama Batavia diganti dengan Jakarta untuk menyebut wilayah bekas *Gemeente* Batavia yang dibentuk tahun 1905. Dalam penelitian ini untuk konsistensi, penulis menggunakan nama Jakarta. Thee Liang Gie; *Sejarah Pemerintahan Kota Djakarta*, Jakarta: Kotapraja Djakarta Raja, 1958, hal 83.

tentang pengulangan yang konstan dan siklus yang selalu muncul kembali. Gejala pengulangan ini mencakup rentang waktu ribuan tahun seperti unit geografi yang disebutnya sebagai *histoire structurele*. Kedua, *konjungtur*, yaitu gejala-gejala yang jangkuan waktunya mencakup ratusan tahun, menyangkut sistem ekonomi, negara, masyarakat dan peradaban dengan irama-irama yang lamban tetapi perseptibel yang disebutnya sebagai *histoire conjuncturelle*, ketiga, adalah peristiwa yang bergerak dengan cepat menyangkut peristiwa dan individu, subyek (fokus) sejarah naratif tradisional yang disebutnya sebagai *histoire evenementielle*.⁶

Dalam tulisannya, Braudel mengatakan bahwa daerah dataran mempunyai beberapa masalah terkait dengan air. Pertama adalah problem banjir. Pada musim hujan, daerah dataran dilanda banjir. Untuk mencegah banjir dibuatlah dam, kanal dan jembatan yang dapat menampung air lebih banyak ketika banjir. Di daerah dataran, banjir tidak hanya datang pada musim hujan, kadang-kadang pada musim kemarau banjir datang dengan cepat dari daerah pegunungan. Masalah kedua adalah berkembangnya berbagai macam penyakit seperti malaria dan cholera. Penyakit ini sangat terkait dengan drainase dan irigasi di dataran.⁷

Merujuk pada teori di atas, fenomena banjir di Jakarta dan dinamika masyarakatnya dapat dijelaskan berikut ini. Dalam tingkatan jangka panjang yang menurut Braudel dikategorikan sebagai *histoire structurelle* maka kondisi geografi Jakarta yang meliputi geomorfologi, geologi, curah hujan, iklim, sungai, merupakan faktor yang perubahannya berlangsung lambat bisa mencapai ribuan tahun. Hal ini bisa terjadi apabila campur tangan manusia dalam bentuk teknologi tidak ada. Kondisi geografis ini mempengaruhi besar kecilnya banjir yang melanda Jakarta. Setelah terbentuknya negara dan kota yang mendorong terjadinya penambahan penduduk (faktor demografi), maka banjir yang tadinya dianggap sebagai fenomena alam biasa, kemudian berubah menjadi masalah, karena mengganggu kenyamanan penduduk. Untuk mengatasi

⁶ Peter Burke (terj); *Sejarah dan Teori Sosial*; Jakarta: Yayasan Obor, 2001, hal. 229, lihat juga RZ. Leirissa; *Peradaban dan Kapitalisme di Asia Tenggara*, dalam Anthony Reid; *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*; Jakarta: LP3ES, 2004, hal. xviii.

⁷ Fernand Braudel; *The Mediterranean and The Mediterranean World in The Age of Philip II*, Vol. I, Great Britain: William Collins Sons and Cp Ltd, 1972, hal. 66

banjir, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan di antaranya rencana induk (*master plan*) tahun 1913, 1965, 1973 dan rencana-rencana lainnya. Jika dikaitkan dengan pemikiran Fernand Braudel maka perkembangan kota dan dinamika masyarakat yang berkaitan dengan sistem ekonomi, masyarakat dan peradabannya yang berlangsung ratusan tahun dikelompokkan dalam *historie conjuncturelle*.

Dalam kaitannya dengan *histoire evenementielle*, banjir merupakan peristiwa alam tetapi juga merupakan peristiwa sejarah. Pada waktu terjadi banjir muncul respon dari masyarakat dan pemerintah. Respon ini diungkapkan dalam berbagai bentuk. Selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan banjir merupakan peristiwa sejarah yang unik, karena didalam juga muncul konflik kepentingan antara negara dan masyarakat.

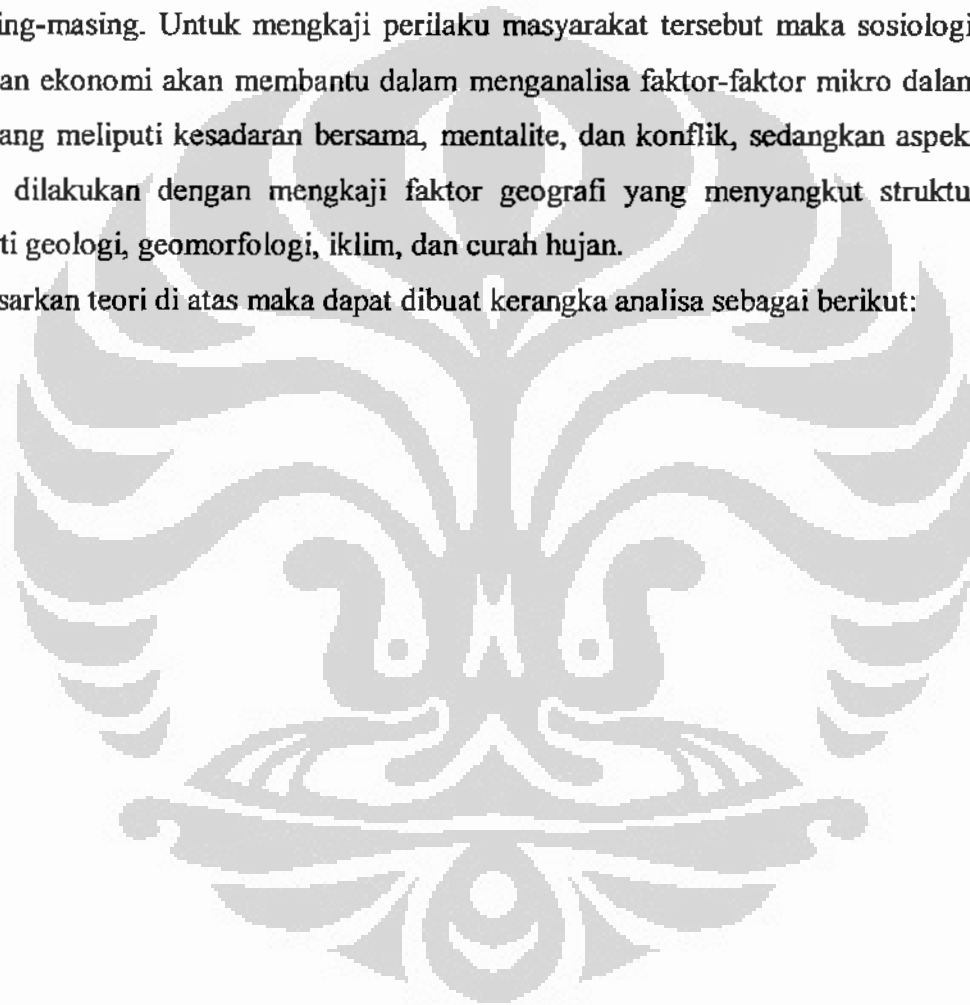
Le Roy Ladurie, penerus Braudel yang tertarik pada '*ecohistory*', lebih menekankan pada hubungan kelompok-kelompok sosial dengan lingkungan fisik. Model perubahan yang diperkenalkan oleh Le Roy Ladurie berorientasi pada ekologi, demografi dan kebudayaan. Kekuatan yang pertama-tama membelokkan arah ekspansi, kemudian meluruskannya kembali dan akhirnya mematahkannya bukan hanya kekuatan ekonomi dalam arti sempit tetapi juga kekuatan kebudayaan. Istilah kebudayaan itu mencakup adat istiadat, cara hidup, mentalitas masyarakat, sehingga motor perubahan adalah penduduk. Le Roy Ladurie juga menyajikan kepada pembaca mengenai konflik sosial dan protes sosial untuk menunjukkan orang-orang semasanya memahami perubahan sosial dan reaksi mereka terhadap peristiwa yang terjadi.⁸

Le Roy Ladurie mengatakan bahwa sejarawan yang mengkaji iklim harus mempelajari meteorologi, glasiologi, geografi, biologi, geologi, arkeologi bahkan fisika. Secara metodologis karyanya memberi perhatian pada realitas struktur sosial sebagai suatu sistem kompleks tingkatan atau sub struktur yang memperlihatkan kausalitas saling terkait satu sama lain. Struktur bukan merupakan sistem monolitik, tetapi menyangkut tindakan dan peristiwa individu, kelompok dan kelas yang merupakan kekuatan penggerak sejarah. Ini artinya penjelasan harus dibuat secara bersamaan baik dalam

⁸ Peter Burke (terj); *loc. cit.*

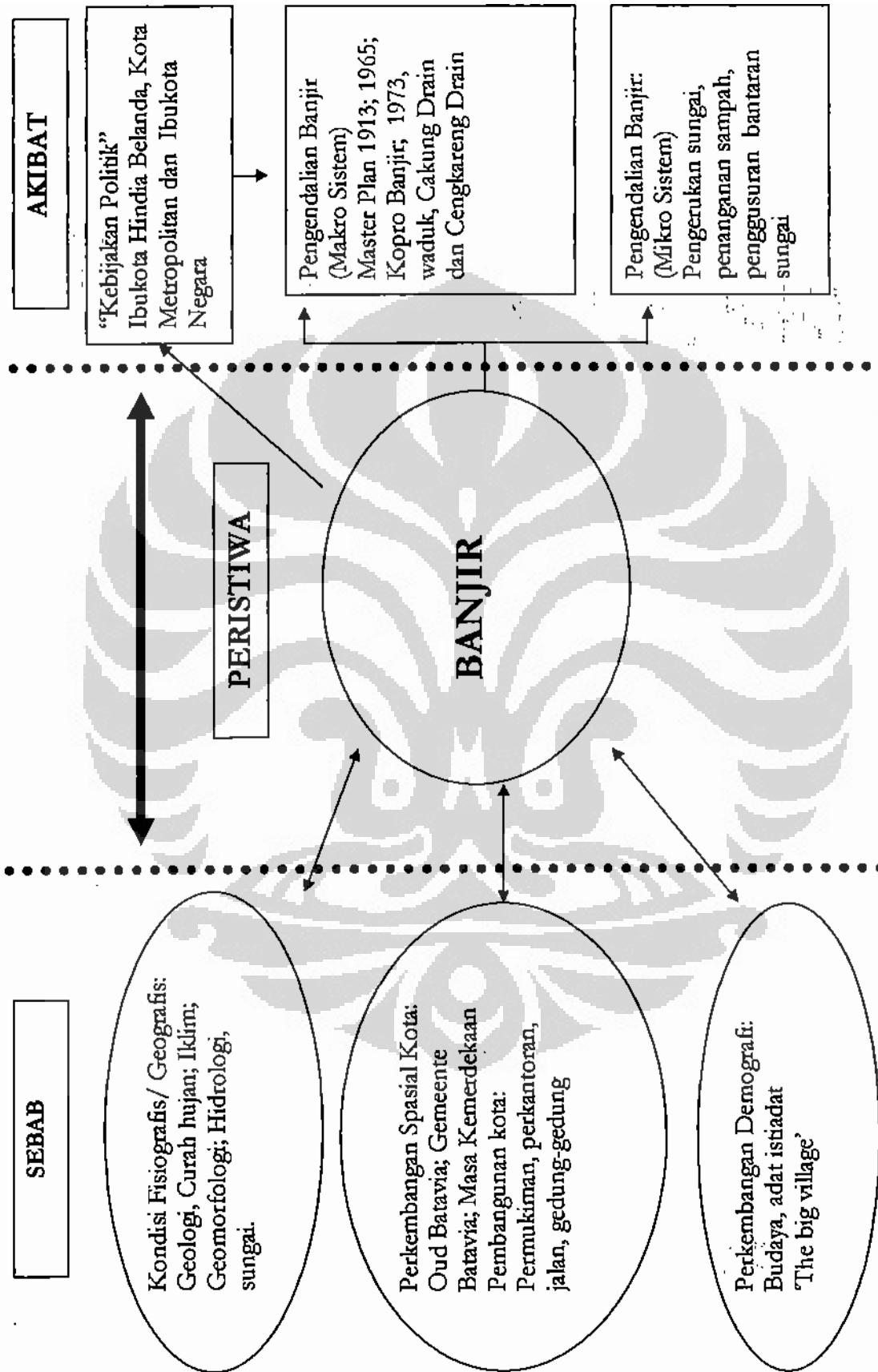
tingkatan mikro maupun makro (masyarakat). Penjelasan tentang tindakan, peristiwa, kesadaran dan perubahan struktural mempersyaratkan acuan holistik. Disinilah perlunya dialektika saling mengisi antara kesinambungan (*continuity*) dan perubahan (*transformation*), tindakan dan struktur, material dan mental.⁹ Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan banjir tergantung pada masyarakat pendukungnya. Masyarakat yang datang dari berbagai daerah mempunyai kebiasaan dan perilaku masing-masing. Untuk mengkaji perilaku masyarakat tersebut maka sosiologi, antropologi dan ekonomi akan membantu dalam menganalisa faktor-faktor mikro dalam masyarakat yang meliputi kesadaran bersama, mentalite, dan konflik, sedangkan aspek-aspek makro dilakukan dengan mengkaji faktor geografi yang menyangkut struktur konstan seperti geologi, geomorfologi, iklim, dan curah hujan.

Berdasarkan teori di atas maka dapat dibuat kerangka analisa sebagai berikut:



⁹ Susanto Zuhdi; *Perspektif Tanah Air dalam Sejarah Indonesia; Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia*; 25 Maret 2006, hal. 21.

Gambar 1: KERANGKA ANALISIS



Konsep dasar ekologi mencoba menggambarkan hubungan antara manusia, hewan dan lingkungannya. Lingkungan dan ruang fisik (*space*) beserta isinya merupakan produk dari proses sosial budaya. Lingkungan hidup manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan buatan, lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan alam meliputi udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan. Lingkungan buatan meliputi bangunan fisik yang sengaja dibuat oleh manusia seperti gedung, lapangan, jalan, waduk, sedangkan lingkungan sosial budaya meliputi penduduk, organisasi, adat dan budaya.¹⁰

Lingkungan fisik alami kota sangat mempengaruhi perkembangan fisik kota. Oleh karena itu drainase air hujan, jaringan pipa untuk penyediaan air bersih dan sistem pembuangan air kotor mempunyai hubungan dengan topografi (kemiringan tanah). Bangunan-kota didirikan dengan menghindari kondisi fisik yang memperbesar biaya konstruksi misalnya kondisi geologi yang tidak stabil, rawa-rawa atau daerah yang sering dilanda banjir.¹¹

Kemunculan negara bangsa yang melanjutkan pembangunan pemerintahan kolonial, perhatian utama negara-negara tersebut adalah pembangunan ekonomi. Akibatnya masalah lingkungan, penggundulan hutan, polusi, pembuangan limbah, sampah dan kualitas air kurang diperhatikan. Selain itu pembangunan fisik kota telah menimbulkan persaingan teritorial untuk mendapatkan lahan berdasarkan perbedaan kelas, perbedaan ras dan budaya. Untuk itu hanya pemerintah atau otoritas perkotaan yang kuat yang dapat mengambil posisi untuk meredakan perebutan lahan dan lingkungan di dalam sistem perkotaan.¹²

1.3 Tujuan Penelitian

Manusia dalam kehidupannya selalu melakukan interaksi dengan lingkungannya. Dalam interaksi ini manusia kadang-kadang melakukan adaptasi tetapi kadang-kadang

¹⁰ Rudy P. Tambunan; *loc. cit.*, hal 18.

¹¹ C. Branch Melville; *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasannya*; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

¹² Takashi Inoguri dkk (ed); *Kota dan Lingkungan: Pendekatan baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*; Jakarta; LP3ES, 2003, hal 140.

juga melakukan rekayasa agar dapat bertahan dari fenomena alam yang terjadi. Jakarta sebagai sebuah kota yang berada di dataran rendah, sehingga banjir merupakan fenomena alam yang harus dihadapi penduduknya. Hubungan manusia dengan lingkungan yang ditempatkan dalam kerangka ruang (*space*) dan waktu (*time*) merupakan salah satu aspek dari kajian *eco history*. Peter Boomgaard mengatakan bahwa penulisan sejarah lingkungan (*eco history*) di Indonesia masih relatif sedikit.¹³ Ada beberapa ahli yang pernah mengembangkan kajian ini di antaranya Clifford Geertz, James Fox dan Roy Ellen. Sejarah Lingkungan sebenarnya hampir sama dengan Geografi Sejarah (*historical geography*) yang dalam kajiannya memerlukan berbagai pendekatan dan kerangka teoretik yang diperoleh dari ilmu sosial dan humaniora lainnya. Untuk itu penelitian ini mempunyai dua tujuan:

1. Tujuan akademis: mengingat masih terbatasnya penulisan yang menggunakan pendekatan *eco history*, maka penulis akan mengembangkan sebuah kajian *eco history*. Karena pada dasarnya *eco history* berusaha menjelaskan hubungan timbal balik antara manusia dan alam sekitarnya. Lingkungan diartikan sebagai sesuatu yang tidak statis yang menyangkut masyarakat dan kebudayaannya. Untuk itu *eco history* telah memberi peluang bagi peneliti sejarah, di antaranya kajian tentang penyakit, gempa bumi, krisis air dan banjir.
2. Tujuan praktis dari penelitian ini, ingin memberikan alternatif dalam pengendalian banjir di Jakarta melalui pendekatan sejarah. Banjir yang terjadi di Jakarta sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan semakin lama wilayah yang dilanda banjir semakin luas dengan rentang waktu banjir semakin pendek (hampir setiap tahun). Pemerintah selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya dengan melakukan pembangunan infrastruktur (pembangunan kanal-kanal, waduk dan drainase) dan juga pembatasan jumlah penduduk. Ternyata Jakarta masih diliputi oleh musuh bersama yaitu banjir. Dalam penulisan ini, kami mengadakan penelusuran sumber-sumber kolonial dan kontemporer yang berkaitan dengan banjir dan upaya

¹³ Peter Boomgaard (ed); *Paper Landscapes: Explorations in The Environmental History of Indonesia*; Leiden: KITLV Press; 1997, hal.1.

pengendalian yang telah dikerjakan selama ini. Dari penelusuran sumber yang disusun menjadi penulisan sejarah inilah dapat diketahui kegagalan dan keberhasilan yang pernah dilalui sehingga dapat memberikan alternatif yang dapat ditempuh pemerintah dalam mengendalikan banjir di Jakarta.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang banjir di Jakarta yang dikaitkan dengan dinamika kehidupan masyarakat dalam menghadapi banjir belum begitu banyak. AR. Soehoed menulis tiga buku yang mengupas tentang banjir dan tata air di Jakarta. Pertama adalah buku "*Proyek Pantura: Transformasi dari ibukota propinsi ke ibukota negara*". Buku ini membahas tentang upaya pembangunan Pantai Utara Jawa dan pembangunan pantai Jakarta. Selain itu juga dibahas tentang drainase dan dampak lingkungan dari pembangunan yang dilakukan di Jakarta. Buku ini lebih menekankan bagaimana proyek pantura dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan banjir dan pembangunan drainase. Selain itu dalam buku ini juga dibahas tentang reklamasi pantai dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Kedua, adalah buku yang berjudul "*Banjir Ibukota: Tinjauan Historis dan Pandangan ke Depan*". Buku ini membahas tentang: karakter sungai-sungai di Jakarta, dan banjir yang pernah melanda Jakarta sejak dari jaman Belanda sampai dengan tahun 2000. Selain itu, dalam buku ini dikutip tulisan Van Breen yang telah merencanakan suatu pengendalian banjir di Jakarta sejak tahun 1920. Penataan air di Jakarta sudah dimulai sejak Jan Pieter Coen pada tahun 1647, dengan penggalian terusan Ammanus ke arah barat ke Sungai Angke dan Terusan Ancol dari Sungai Sunter ke Kota. Ketika Gunung Salak meletus tahun 1699, yang menyebabkan terjadinya arus lumpur yang besar dan hujan abu turun ke Jakarta, semua terusan yang dibangun tertutup dan terjadi endapan yang sangat luas di pantai. Sesudah letusan gunung tersebut maka saluran-saluran harus dikeruk. Pada tahun 1920, dalam rangka penataan perumahan, Van Breen

merencanakan suatu pembangunan tata air di Batavia. Inti pokoknya adalah mengendalikan saluran air Sungai Ciliwung, Krukut, Sungai Angke, Cisadane dan lain-lain.

Ketiga adalah buku "*Membenahi Tata Air Jabotabek: Seratus Tahun dari Banjir Kanaal hingga Ciliwung Floodway*". Buku ini membahas tentang pembangunan kanal-kanal di Batavia sampai dengan pembangunan terusan Ciliwung. Selain itu juga dibahas rencana pencegahan banjir di Jakarta dan biaya yang dikeluarkan jika membuat kanal banjir timur. Selain rencana Van Breen dalam menanggulangi banjir, dalam buku ini juga dibahas rencana WJ. Blommestein pada tahun 1949. WJ. Blommestein menampilkan gagasan *diversion channel* dari Sungai Ciliwung terus ke timur melintasi Sungai Bekasi hingga Sungai Cibeet yang dapat mencurahkan airnya ke waduk Pangkalan pada sistem irigasi dan tenaga listrik Jatiluhur. Selain itu juga dibahas rencana tahun 1980, konsultan Perancis telah melakukan survei empat lokasi bendungan penahan/penyimpan air untuk sungai Cisadane, sungai Pesanggrahan, sungai Krukut dan sungai Ciliwung. Bahkan bendungan untuk sungai Ciliwung di Depok, sudah disiapkan gambar rekayasanya dan penetapan lokasinya. Namun rencana ini tidak ada tindak lanjutnya. Rencana lainnya adalah plan JICA (*Japan International Cooperation Agency*). Dalam rencana ini ditampilkan tujuh proyek yaitu sungai Cidurian (perbaikan ruas-ruas hilir sungai), sungai Cimanceuri (perbaikan ruas-ruas hilir sungai), sungai Ciracas (perbaikan ruas-ruas hilir sungai), Cengkareng drain, perbaikan ruas-ruas hilir dari sungai Angke, sungai Pesanggrahan, saluran Mookervaart, pembangunan Terusan Angke, terusan banjir barat, perbaikan dari ruas-ruas hilir sungai Cisadane dan pembangunan sudetan sungai Ciliwung, terusan banjir timur, yaitu pembangunan terusan dan perbaikan dari ruas-ruas hilir sungai Cipinang, sungai Sunter, sungai Jatikramat, sungai Buaran dan sungai Cakung, dan CBL (Cikarang-Bekasi-Laut) drain. Rencana itu masih dalam studi kelayakan dan belum seluruhnya terlaksana. Sebagai karya seorang insinyur sipil, ketiga karya tersebut sangat bagus karena menampilkan sumber-sumber primer. Namun ketiga buku tersebut tidak mengungkapkan bagaimana dinamika masyarakat Jakarta dalam

menghadapi banjir. Karena banjir tidak akan mempunyai dampak apa-apa jika tidak mengakibatkan kerusakan bagi sumber daya yang dimiliki masyarakat.

Dampak Perkembangan Fisik Kota Terhadap Pola Tata Air Ekosistem Dataran Rendah Jakarta, karya ini merupakan Disertasi Bidang Ilmu Lingkungan yang ditulis oleh Dr. Rudy P Tambunan. Buku ini membahas perkembangan fisik kota dalam kaitannya dengan perubahan ekosistem fisik alami ke ekosistem buatan. Wilayah penelitian mencakup Daerah Aliran Sungai yang mengalir di DKI. Untuk itu sebagai sampel penelitian difokuskan pada kawasan dataran pantai yang meliputi Teluk Gong, Perumahan Cengkareng Permai, Pademangan, Swasembada Barat, Kompleks Bea Cukai, Kawasan Tengah meliputi Tanjung Duren, Pejambon, Kayu Mass Timur Pulo Gadung, Kompleks Hankam Slipi, Sekitar Kantor Lurah Rawa Buaya, Kawasan daerah Bergelombang meliputi IKPN Bintaro, Kompleks Perdatam, Pulo Raya, Kompleks Sandang Kemang Timur, Jalan Dukuh I Kramat Jati. Aspek temporal dari penelitian difokuskan pada periode 1965 – 1985. Kekuatan buku ini adalah kemampuan mengungkapkan faktor-faktor geografis yang menyangkut, geologi, geomorfologi, iklim dan penggunaan tanah dalam kaitannya dengan pembangunan fisik Jakarta. Dalam kesimpulan dikatakan bahwa pengurangan luas tanah basah mengakibatkan menyusutnya luas dan jumlah lokasi tampungan air (*water retention*) pada musim hujan sedangkan pengurangan luas penggunaan tanah pertanian dan ruang terbuka mengakibatkan menurunnya kemampuan peresapan atau infiltrasi lapisan tanah. Perubahan tanah basah yang sesungguhnya *unavailable* untuk penggunaan budi daya bangunan karena berfungsi sebagai ‘rumah air’ pada musim hujan diintervensi oleh penggunaan tanah perumahan. Kondisi ini dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan.

Flooding in Jakarta: Towards a Blue City with Improved Water Management artikel ini ditulis oleh Mark Caljouw dkk.¹⁴ Artikel ini diawali dengan peristiwa banjir tahun 2002, yang terjadi pada tanggal 2 Pebruari tahun 2002, jika dianggakan akan membentuk angka unik 02022002 yang merupakan angka keberuntungan untuk mengadakan pesta pernikahan. Tetapi bukan keberuntungan karena pada tanggal tersebut

¹⁴ Mark Caljouw dkk, *Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde* 161 – 4, tahun 2005, hal. 454 - 485.

ternyata Jakarta dilanda banjir besar. Selain itu artikel ini juga membahas tentang lokasi Jakarta yang terletak di dataran aluvial yang sudah terbentuk sejak 5000 tahun yang lalu. Letak yang sangat datar inilah sehingga mengakibatkan air sulit mengalir secara gravitasi. Untuk mengatasi banjir yang melanda Jakarta, ia menyarankan pembangunan Banjir Kanal Timur yang tertunda harus segera dilaksanakan sesuai dengan saran dari Nedeco tahun 1973 maupun Konsultan dari Jepang tahun 1990.

Anatomi Banjir Kota Pantai: Perspektif Geografi oleh Yasin Yusuf, buku ini membahas banjir yang terjadi di kota Semarang. Buku ini melacak secara genetis terjadinya kota Semarang yang berada di atas dataran aluvial, dataran banjir dan pasang surut air laut, sehingga secara alamiah rentan terhadap banjir dan rob. Buku ini juga menganalisis faktor-faktor penyebab banjir dan daerah rawan banjir di Semarang.

1.5 Pengertian Tentang Banjir

Melimpasnya air dari badan air seperti selokan, saluran, drainase, sungai, situ atau danau yang menggenangi bantaran dan kawasan sekitarnya disebut banjir (B). Di sini ada dua unsur yang berperan yaitu besarnya volume air (Q) yang masuk ke badan air. Kedua, besarnya kapasitas tampungan badan air (K). Jadi B terjadi jika $Q > K$. Besarnya kecilnya gangguan akibat B tergantung pada jumlah manusia yang menjadi korbannya. Jika tidak ada manusia yang menjadi korban, mungkin tidak akan menjadi perhatian. Untuk itu dalam sudut pandang ilmu geomorfologi, banjir merupakan tenaga bagi berlangsungnya proses geomorfologi yang membentuk relief permukaan bumi. Oleh karena itu tanpa banjir, habitat atau tempat berlangsungnya kehidupan manusia yang berupa kota-kota pantai seperti Semarang, Surabaya, Jakarta dan Medan mungkin tidak pernah ada. Pada dasarnya kota-kota pantai tersebut berdiri di atas delta, dataran banjir, rawa, dataran aluvial yang merupakan produk dari peristiwa banjir yang berulang-ulang dalam waktu ribuan tahun.¹⁵

¹⁵ Yasin Yusuf, *Anatomi Banjir Kota Pantai Perspektif Geografi*; Surakarta: 2005, hal. xxii.

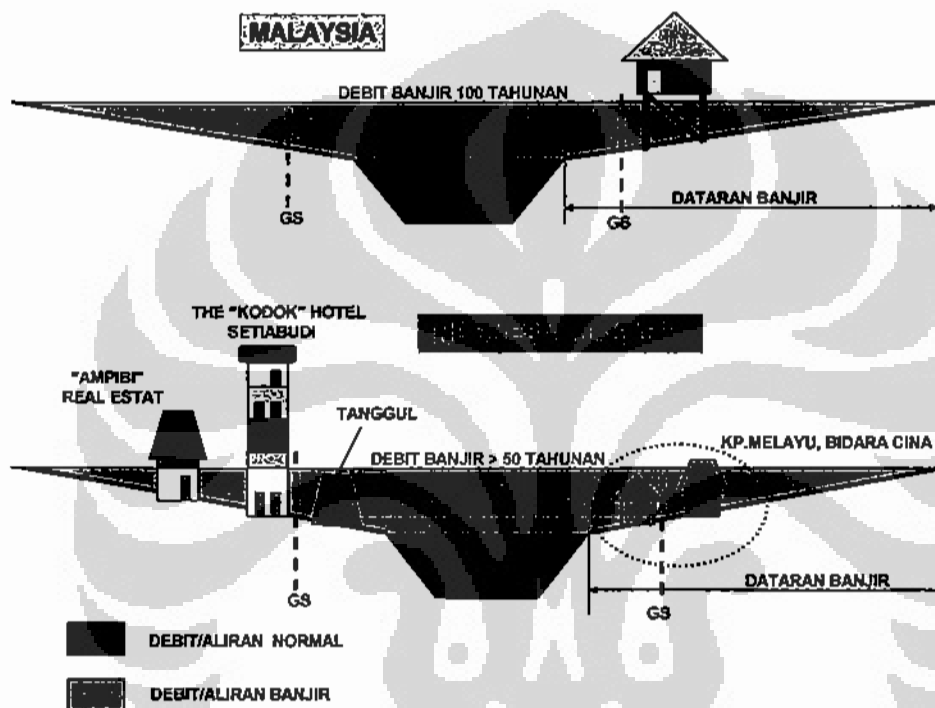
Hal ini berbeda dengan banjir yang terjadi di Jakarta yang berlangsung selama ini, yang mengakibatkan korban manusia dan aset ekonomi. Banjir yang terjadi di Jakarta mempunyai tendensi meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena nilai Q meningkat dan atau nilai K turun. Dari hasil pengamatan terhadap nilai Q banjir Ciliwung di Pintu Air Manggarai dengan perhitungan periode ulang 100 tahun (Q_{100}), pada tahun 1918, 1973, dan 1996 diperoleh nilai berturut-turut sebesar 280 meter kubik perdetik dan 609 meter kubik perdetik. Hal ini berarti dalam periode 1918 – 1973 selama kurun waktu 55 tahun, terjadi peningkatan Q banjir sebesar 32% atau rata-rata pertahun 2,8%. Dilain pihak kapasitas tampungan sungai Ciliwung misalnya dari Pintu Air Manggarai ke cabang utara diperkirakan telah menurun dari 80 meter kubik perdetik pada tahun 1973 menjadi hanya 50 sampai 60 meter kubik perdetik pada tahun 1996 atau terjadi penurunan kapasitas sekitar 25% selama 23 tahun. Perbedaan nilai Q dan K yang semakin besar menyebabkan timbulnya banjir di aliran sungai Ciliwung.¹⁶

Terkait dengan banjir ini, debit banjir yang terjadi di sungai dan bangunan tanggul di sepanjang sungai mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan istilah periode ulang banjir (*return period*). Periode ulang banjir adalah rata-rata selang waktu atau jumlah terjadinya kembali suatu peristiwa yang sama besarnya atau lebih. Misalnya debit banjir sungai Ciliwung dalam periode 25 tahun adalah 250 meter kubik perdetik dan periode ulang 100 tahun debitnya 350 meter kubik perdetik. Untuk setiap tahun kemungkinan terjadinya debit banjir yang sama atau lebih besar dari 250 meter kubik perdetik di sungai Ciliwung adalah sebesar 4% dan untuk setiap tahun kemungkinan terjadinya debit banjir yang sama atau lebih besar dari 350 meter kubik perdetik adalah 1%. Dengan dasar perkiraan ini maka setiap tahun kemungkinan terjadinya debit banjir sebarang besarnya bisa terjadi. Untuk itu bangunan tanggul sungai tidak bisa menjadi jaminan akan membebaskan banjir di daerah sekitar sungai. Selama ini ada pandangan bahwa jika suatu tanggul sungai sudah dibangun untuk periode banjir 25 tahun dengan debit 250 meter kubik perdetik dianggap selama 25 tahun

¹⁶ Rudy P. Tambunan; *op. cit.*, hal. 52.

masyarakat di sekitar tanggul tidak terkena banjir. Kenyataannya bisa saja air yang datang dapat melampaui tanggul tersebut.¹⁷

Gambar 2: Skema Kaitan Debit Banjir, Model Bangunan dan Tanggul Sungai



Sumber Siswoko; 2002

Banjir menurut jenisnya dapat dibedakan atas banjir lokal, banjir kiriman dan banjir rob. Banjir lokal adalah banjir setempat seluas sebaran hujan lokal yang terjadi karena tingginya curah hujan dan tidak tersedianya sarana drainase yang memadai. Banjir kiriman, banjir yang disebabkan karena peningkatan debit air sungai yang mengalir dari daerah aliran sungai (DAS) dan berkurangnya daya tampung saluran atau sungai tersebut. Banjir kiriman dari daerah atas semakin besar sebagai akibat bertambah luasnya daerah

¹⁷ Siswoko; Banjir, Masalah Banjir dan Cara Mengatasinya; Makalah; Jakarta April 2002

terbangun yang mengubah koefisien aliran di daerah tangkapan, sehingga semakin banyak air yang menjadi aliran permukaan dan semakin sedikit air yang mempunyai kesempatan meresap menjadi air tanah. Banjir rob disebabkan oleh tingginya pasang surut air laut yang melanda daerah di pinggiran laut atau pantai. Reklamasi daerah-daerah *retension* atau daerah parkir air seperti rawa dan tambak yang tidak memperhatikan sistem drainase pantai akan mengakibatkan banjir rob semakin parah melanda daerah-daerah sekitarnya.¹⁸

Siswoko mengatakan bahwa banjir kiriman sebenarnya tidak ada karena jika banjir merupakan air yang meluap dari palung sungai dan menimbulkan genangan maka dapat dipastikan berasal dari tempat lain dan bukan dari tempat di mana sungai tersebut meluap. Jadi tidak perlu ada kata “kiriman”. Selain menyesatkan, ditinjau dari aspek sosial politik penggunaan istilah ini dapat menyulut konflik antar wilayah, karena daerah hulu selalu dianggap mengirim banjir di daerah hilirnya. Tetapi istilah banjir kiriman sudah terlanjur populer yang seharusnya dikoreksi.¹⁹

1.6 Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, sebagaimana lazimnya sebuah penelitian sejarah, sumber-sumber primer yang digunakan adalah berupa arsip-arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pemda DKI, dan perpustakaan lainnya yang relevan. Arsip yang diperlukan antara lain *Stadsblad*, *Kolonial Verslaag*, *Gemeentebld*, *Javanche Courant*, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Gubernur, arsip Kotapradja, koran dan majalah sejaman seperti Majalah *de Ingenieur*, Indonesia Raja, Harian Rakjat, Kompas, Asia Raja, *Starweekley* dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan peristiwa banjir, maka sumber koran sangat membantu dalam

¹⁸ Banjir adalah air yang melimpas dari badan air seperti selokan, saluran drainase, sungai, situ atau danau dan menggenangi kawasan sekitarnya. Dalam kaitannya dengan banjir ada dua unsur yang berperan yaitu besarnya volume air yang masuk ke badan air dan besarnya tampungan badan air; lihat: Yasin Yusuf; *Anatomi Banjir Kota Pantai: Perspektif Geografi*; Surakarta: Pustaka Cakra, 2005, hal. 5-6.

¹⁹ *Ibid.*,

penelitian, karena biasanya berita tersebut ditulis sehari setelah peristiwa banjir dan dilakukan oleh berbagai koran yang ada. Jadi liputan langsung sangat membantu dalam mengungkapkan dinamika masyarakat ketika dilanda banjir maupun digusur.

Untuk melengkapi sumber-sumber tertulis, dalam penelitian ini juga diadakan penelitian melalui sumber sekunder dari buku-buku hasil penelitian sebelumnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini terdiri dari tujuh bab yang disusun menurut pendekatan tematis kronologis. Bab satu merupakan pendahuluan yang membahas permasalahan dan metodologi yang digunakan dalam penulisan. Bab dua, sebagai tinjauan geografis, berisi faktor-faktor alamiah yang berubah sangat lambat seperti iklim, faktor geologi, geomorfologi dan sungai-sungai yang ada melintas di Jakarta. Bab tiga, membahas perkembangan *spasial* ruang kota Jakarta yang pada awalnya adalah sebuah kota di tepi pantai yang kemudian semakin meluas sehingga membentuk aglomerasi Jabotabek. Bab empat membahas peristiwa banjir yang terjadi di Jakarta. Dalam bab ini dibahas wilayah-wilayah yang dilanda banjir dan siklus banjir yang semakin cepat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk mengendalikan banjir yang berlangsung selama lima puluh tahun akan dibahas di bab lima. Bab enam membahas upaya pemerintah Indonesia untuk mengendalikan banjir yang dimulai dengan membentuk Kopro Banjir hingga kerjasama dengan beberapa konsultan Belanda dan Perancis. Bab tujuh merupakan kesimpulan dari disertasi ini yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

Bab II Dataran Rendah Jakarta Dalam Siklus Fisiografi

Perspektif fisiografi atau fisik geografi meliputi geomorfologi, klimatologi dan hidrologi.¹ Ketiga faktor ini berperan penting dalam siklus hidrologi. Tanpa ada fenomena alam lainnya, perubahan yang menyangkut ketiga hal di atas berlangsung dalam waktu ribuan tahun atau tahun geologi. Perubahan akan mengalami percepatan jika terjadi bencana (*disturbance*) misalnya gunung meletus, gempa bumi dan banjir. Perubahan yang berlangsung lambat ini oleh Fernand Braudel dikelompokkan sebagai *historie structurelle* yang berkaitan dengan perubahan geografis.

2. 1 Geomorfologi dan Geologi

Bentuk lahan (*morfologi*) adalah bentuk permukaan bumi yang terjadi sebagai akibat proses *geomorfik* yang menyangkut semua perubahan baik fisik maupun kimia yang dilakukan oleh tenaga geomorfologi. Tenaga geomorfologi merupakan semua medium alam yang mampu melepas dan memindahkan material bumi seperti tenaga angin, aliran air dan gelombang laut. Bentuk permukaan bumi yang terbentuk sebagai akibat aktifnya tenaga geomorfologi menghasilkan bentuk permukaan bumi yang mempunyai sifat dan watak tersendiri. Dalam kaitannya dengan bentuk muka bumi, struktur geologi tanah sangat berpengaruh terhadap relief permukaan bumi sedangkan

¹ Geologi adalah studi yang mempelajari ciri-ciri lapisan bumi serta perubahannya. Geomorfologi adalah studi yang mendeskripsikan secara genetis bentuk lahan, proses yang mengakibatkan terbentuknya lahan dan menyelidiki hubungan timbal balik dari bentuk dan proses itu dalam susunan keruangan; Morfologi: adalah bentuk lahan permukaan bumi secara sistematis tidak hanya mengenai kenampakan permukaan bumi saja tetapi juga mengenai asal mula terbentuknya (*geneses*) dan evolusi perkembangannya lihat Yasin Yusuf, *Anatomi Banjir Kota Pantai: Perspektif Geografi*; Surakarta: Pustaka Cakra, 2005, hal. 36.

litologi berkaitan dengan daya tumpu tanah, resistensi batuan terhadap erosi, pelapukan dan gerak masa batuan.²

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses geologi pulau Jawa masih relatif muda, tersusun dari tanah zaman tersier, zaman kuartar, dan zaman sekarang. Pembentukan Pulau Jawa dimulai pada periode *Oligosen* dan *Miosen*.³ Struktur pulau terbentuk dari deretan perbukitan dan depresi (dataran rendah). Berdasarkan poros utama barat – timur, pulau ini dapat dibagi dalam tiga jalur yang sejajar: lajur utara yang dibatasi oleh pantai Laut Jawa dengan dataran rendah seperti dataran rendah Jakarta. Lajur tengah yang bersifat vulkanis terdapat barisan gunung berapi dan lajur selatan yang di batasi oleh Samudera Hindia, ditandai dengan adanya sedimen-sedimen purba dari zaman Eosen, Oligosen dan Miosen, beserta tufa berandesit, breksi dan batu gamping yang mengalami karstifikasi seperti yang terdapat di deretan pegunungan di sebelah selatan Pulau Jawa.⁴

Indonesia terletak pada pertemuan empat lempengan besar tektonis yaitu Eurasia, Filipina, Pasifik dan Hindia-Australia. Pertemuan lempeng Eurasia dengan lempeng Hindia Australia menimbulkan reaksi subduksi yang masih aktif yang merupakan asal muasal pembentukan pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Rangkaian gunung berapi aktif yang melintasi Indonesia mengikuti susunan sesaran besar yang lebih kurang sejajar dengan lempeng-lempeng tektonis. Rangkaian gunung berapi ini berawal dari Sumatera bagian selatan, memanjang ke Gunung Krakatau di selat Sunda dan melintasi Jawa, Bali, Lombok, Sumba, Flores kemudian menghilang di Laut Banda. Daerah ini dipandang sebagai daerah yang tidak stabil, karena menjadi tumpuan utama penelitian mekanisme pembentukan gunung di dunia. Letusan gunung yang terjadi di Pulau Jawa berpengaruh terhadap sedimentasi sungai-sungai, karena

² Yasin Yusuf; *op. cit*; hal 82.

³ Berdasarkan penelitian terhadap lapis bumi, proses terbentuknya lapisan bumi dikelompokkan dalam beberapa jaman yaitu Paleosen 50 juta tahun yang lalu; Eosen 30 juta tahun yang lalu; Oligosen 21 juta tahun yang lalu; Miosen 10 juta tahun yang lalu; Pliosen 4 juta tahun yang lalu; Pleistosen (tua, madya, muda) 2 juta tahun yang lalu, dan holosen 1 juta tahun yang lalu; lihat Koentjaraningrat; *Pengantar Ilmu Antropologi*; Jakarta: Gramedia; 1989; hal. 90.

⁴ Hubert Forestier, (terj); *Ribuan Gunung, Ribuan Alat Batu: Prasejarah Song Keplek, Gunung Sewu, Jawa Timur*; Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007; hal. 81.

pasir yang keluar dari kawah gunung mengakibatkan sedimentasi pada badan sungai sehingga menimbulkan pendangkalan.⁵

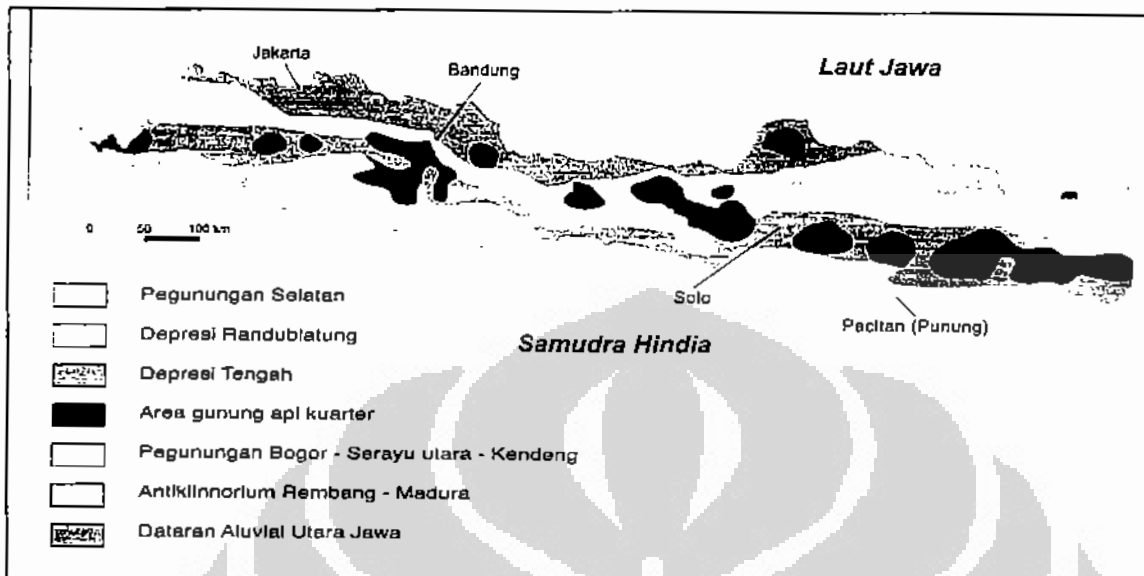
Van Bemmelen membagi pulau Jawa dalam tujuh satuan fisiografis, yakni dari utara ke selatan:

1. Pegunungan Selatan merupakan sebuah zona gamping dan vulkanis dari zaman Miozen yang telah mengalami beberapa pengangkatan hingga zaman Kuarter.
2. Zona vulkanis zaman kuarter memiliki banyak gunung berapi dengan ketinggian sampai 2.000 meter dari permukaan laut (dpl) di beberapa daerah masih aktif.
3. Depresi tengah merupakan poros utama pulau di mana terbentuk dua depresi besar yaitu Bandung di sebelah barat dan depresi Solo di sebelah timur.
4. Zona antiklinal tengah, terdiri atas endapan-endapan zaman Mio-Pleistosen dengan perbukitan Kendeng yang memanjang dari barat ke timur.
5. Depresi Randublatung, di kaki perbukitan Kendeng, yang terbentuk dari endapan laut dan daratan dari periode Mio-Pleistosen.
6. Antiklinorium Rembang Madura yang merupakan sebuah formasi pegunungan gamping dari zaman Miosen.
7. Dataran-dataran rendah aluvial yang berbentuk delta dan merupakan unsur utama pemandangan di pesisir utara pulau Jawa.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hal 82.

Gambar 3: Peta Fisiografis Sederhana Pulau Jawa Menurut van Bemmelen 1949



Sumber: Hubert Forestier, 2007

Wilayah Jakarta adalah dataran rendah⁷ yang sebagian besar terdiri dari lapisan batu endapan jaman *pleistosen* yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah permukaan tanah. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua karena tertimbun oleh endapan sungai dari jaman alluvium. Tanah endapan alluvial sebagian besar berwarna merah tua berasal dari gunung berapi, terutama terdapat di daerah sebelah selatan yang merupakan bagian dari alluvial Bogor. Dataran ini memanjang pada jarak sepuluh kilometer sebelah selatan pantai. Jenis tanah ini sangat subur. Kondisi berbeda yaitu di daerah sebelah tenggara Tanjung Priok yang berupa rawa-rawa karena tidak terdapat sungai besar yang melewati daerah tersebut sehingga tidak terdapat endapan gunung api. Terkait dengan kondisi lapisan tanah tersebut, tanah

⁷ Berdasarkan tipologinya, dataran rendah dibedakan atas (a) dataran pantai (*coastal plains*), (b) interior plains, terbentuk dari dasar laut yang mengalami pengangkatan dan terpisah dari laut, (c) dataran danau, yakni punggung danau yang mengalami pengangkatan dan pengeringan, (d) dataran lava yang terbentuk dari endapan lava, (e) dataran glasier, dan (f) alluvial plains yang terbentuk karena adanya endapan kipas puing (*alluvial fans*) yang terbentuk karena adanya kipas puing (*alluvial fans*); lihat Rudi P Tambunan; Dampak Perkembangan Fisik Kota Terhadap Pola Tata Air Ekosistem Dataran Rendah Jakarta, *Disertasi Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana UI*, Depok, 2005, hal 42.

yang mempunyai lapisan keras di Jakarta bagian utara baru diperoleh sampai kedalaman 10 meter -- 25 meter tetapi semakin ke selatan lapisan keras tidak beraturan di beberapa tempat bisa mencapai kedalaman 40 meter. Di sebelah selatan saluran kanal banjir keadaan lapisan keras makin kurang dalam, rata-rata kurang dari sepuluh meter.⁸

Proses pembentukan wilayah di sepanjang pantai Teluk Jakarta dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama; di muara sungai yang kandungan sedimennya tinggi, pembentukan lahan pantai baru lebih cepat daripada di muara sungai-sungai yang kandungan sedimennya rendah. Sungai-sungai yang mengalirkan curahan hujan, turun melalui lereng-lereng gunung mengikis tanah dari lereng gunung dan mengendapkannya di laut dan berangsur-angsur memperlebar dataran baru di kaki-kaki gunung. Dalam masa ribuan tahun terbentuklah dataran lebar yang disebut dataran aluvial (dataran endapan). Proses sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun mengakibatkan terbentuknya dataran Jakarta semakin melebar, menggeser garis pantai rata-rata enam meter sampai sembilan meter pertahun. Dengan bertambah lebarnya dataran aluvial maka dataran menjadi lebih landai.⁹ Teluk Jakarta pada awalnya tidak ada. Karena Jakarta dilintasi oleh 13 sungai dan diapit oleh dua sungai besar, di sebelah timur Sungai Citarum dan sebelah barat sungai Cisadane. Dua sungai besar ini membawa lebih banyak bahan erosi sehingga terjadi pengendapan yang lebih banyak dari sungai lainnya. Keadaan ini menyebabkan pergeseran garis pantai pada wilayah kedua muara sungai, sehingga terbentuklah delta dan semenanjung yang menjorok ke laut, akibatnya terbentuklah Teluk Jakarta. Tanah datar yang terjadi sebagai akibat endapan sungai ini telah terjadi lebih kurang 5.000 tahun yang lalu. Pada waktu itu, tinggi permukaan laut berada lima meter di atas permukaan laut sekarang. Sungai-sungai lain juga membawa bahan erosi sebagian diendapkan di perairan pantai. Namun di musim hujan sungai-sungai ini akan meluap dan sebagian

⁸ AR. Soehoed; *Proyek Pantura: Transformasi dari Ibukota Propinsi ke Ibukota Negara*; Jakarta: Djambatan, 2004, hal 36.

⁹ *Ibid*; hal 38.

dari sedimentasinya mengendap di sepanjang tepi-tepi sungai dan membentuk tanggul alamiah.¹⁰ Hal ini mengakibatkan garis pantai dari tahun ke tahun bertambah menjorok ke laut karena endapan dan abrasi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa benteng Batavia yang sebelumnya berbatasan dengan laut seolah-olah bergeser ke darat.¹¹

Faktor kedua adalah iklim. Pada musim angin barat, iklim yang menimbulkan angin meniup ke arah daratan. Indonesia terletak tepat di antara pengaruh angin muson khatulistiwa dan tropis di belahan bumi selatan dan angin muson tropis di belahan bumi utara yang menyentuh negara-negara Asia Daratan (Vietnam, Kamboja dan lain-lain). Pada musim angin barat, hempasan air laut dapat menghalangi pembentukan lahan oleh endapan sungai. Oleh karena itu pembentukan lahan bergantung pada perbandingan antara arah angin, kekuatan angin, lamanya angin bertiup, kekuatan arus sungai dan besar kecilnya kandungan sedimen yang terbawa. Akibatnya pembentukan Teluk Jakarta ada yang berlangsung cepat, agak lamban bahkan juga terjadi penggerusan dari lahan pantai.¹² Di bagian timur antara Kalibaru sampai Marunda pantai semakin mundur, akibat terkikis oleh abrasi laut¹³. Proses abrasi dan akresi di Teluk Jakarta seperti terlihat pada gambar berikut ini:

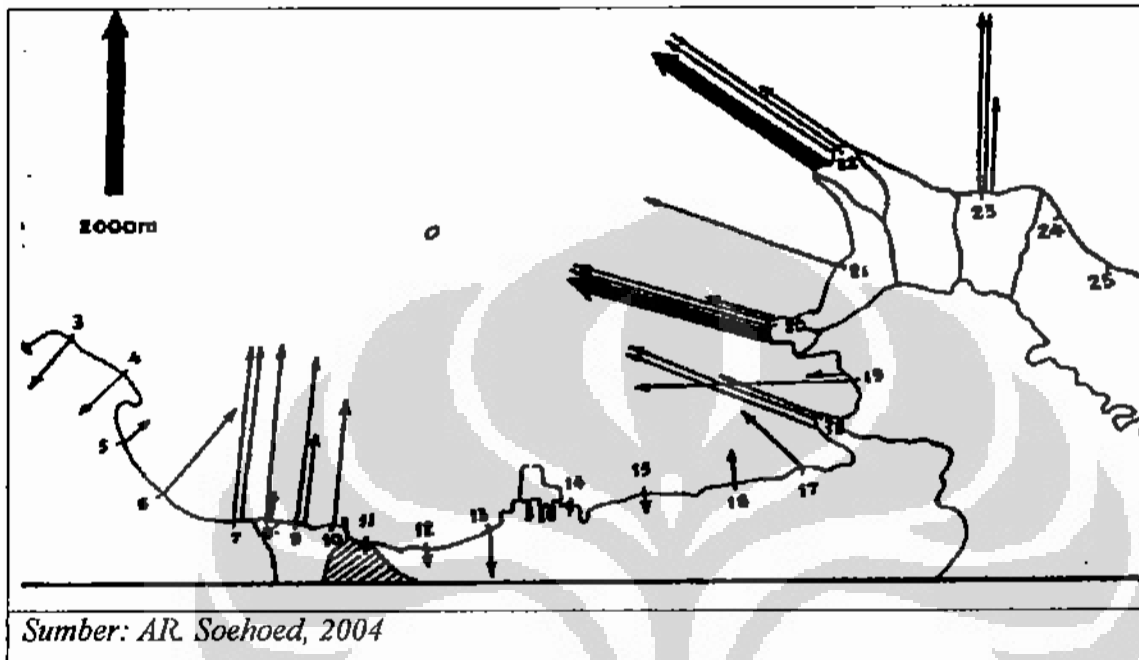
¹⁰ *Ibid.*

¹¹ RZ. Leirissa; Jakarta: Dari Kumpulan Kampung Menjadi Megapolis; *Makalah Temu Tokoh Sejarah dan Purbakala*; Depbudpar, 2002.

¹² AR. Soehoed; *Membenahi Tata Air Jabotabek: Seratus Tahun Dari Bandjir Kanaal hingga Ciliwung Floodway*; Jakarta: Djembatan, 2004, hal. 12.

¹³ Budiaman; *Monografi Daerah Khusus Ibukota Jakarta I*, Jakarta: Depdikbud, tt, hal. 3

Gambar 4:
Akresi dan Abrasi di Teluk Jakarta 1873 – 1938 Menurut Verstappen



Permukaan tanah yang rendah dan landai maka wilayah endapan secara periodik dilanda banjir. Bagian wilayah endapan yang bebas dari banjir adalah tanggul-tanggul sungai, tanggul pantai yang ketinggiannya melebihi batas ketinggian air pada waktu banjir. Untuk Pulau Jawa ketinggian bebas banjir adalah tujuh meter di atas permukaan laut. Selain bebas banjir, tanggul-tanggul itu juga memberikan keuntungan bagi penduduk karena terdapat kantong-kantong air tanah di bawahnya.¹⁴

Verstappen mengatakan bahwa perkembangan dataran rendah Jakarta telah berusia 5.000 tahun. Angka tersebut dihitung berdasarkan kecepatan pengendapan lumpur di tepi pantai dan berdasarkan stratigrafi dari dataran kipas yang berasal dari jaman Holosen tua dan tengah. Dataran rendah aluvial Jakarta memiliki sistem perairan yang berarah radial seperti kipas sebagai ciri dari perairan gunung api muda.

¹⁴ Rudy P Tambunan, *op. cit*, hal. 42.

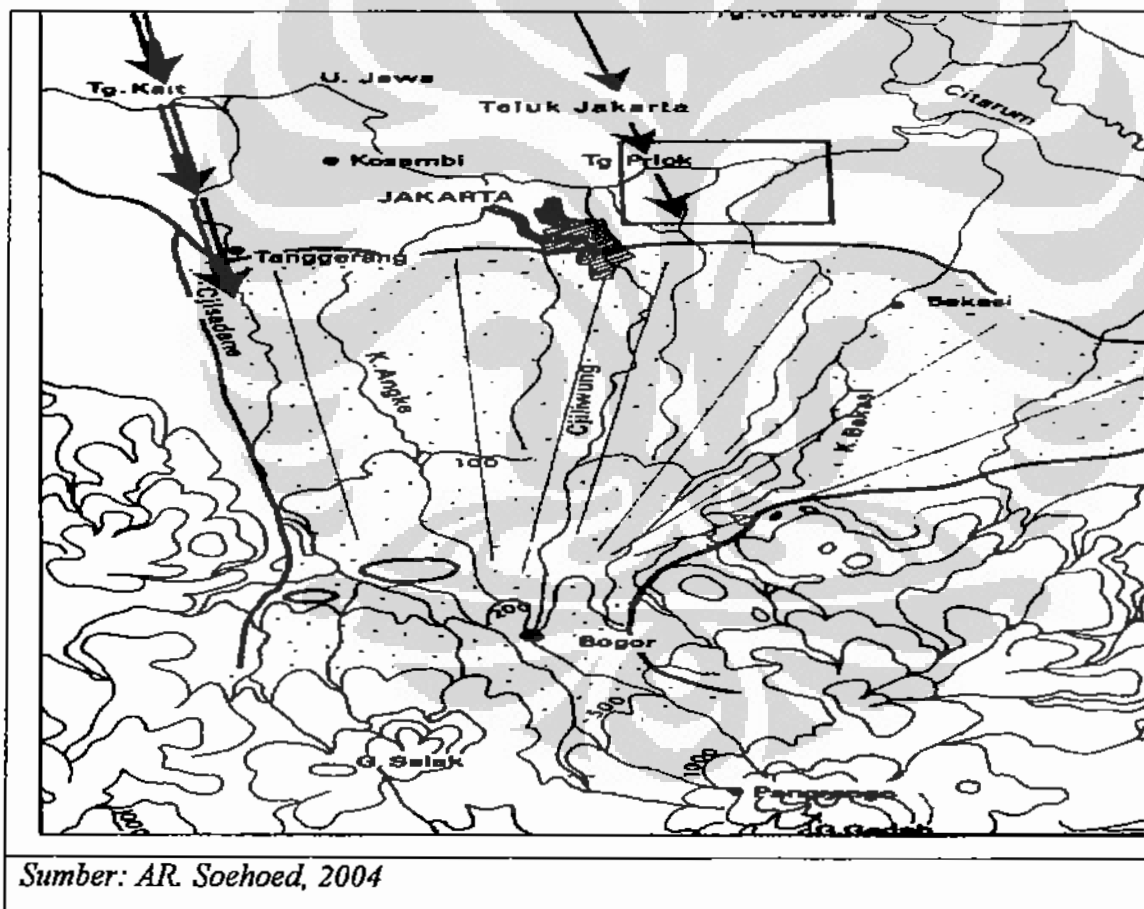
Kipas aluvial ini dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh Sungai Cisadane, Ciliwung, Bekasi dan Citarum. Pertambahan muka daratan yang terjadi di Sungai Bekasi adalah 1.000 meter dalam waktu 50 tahun atau sekitar 15 meter tiap tahun, sungai Citarum mencapai 48,5 meter pertahun, dan sungai Cisadane 7,2 meter pertahun. Jumlah lumpur yang dibawa sungai Cisadane, Citarum dan Ciliwung setiap tahun diperkirakan 4 juta – 7 juta meter kubik pertahun, endapan yang dibawa 80 persennya adalah tanah lempung. Perilaku sungai-sungai yang ada ini pada akhirnya sangat berpengaruh pada penambahan (*akresi*) dan pengurangan (*abrasi*) suatu dataran. Hal ini dipengaruhi oleh ombak, pasang surut dan arus laut. Penelitian Verstappen terhadap proses akresi dan abrasi antara tahun 1873 – 1938 garis pantai di Teluk Jakarta menunjukkan bahwa total akresi terbesar terjadi di daerah Ujung Krawang sebesar 3.000 meter, terkecil di daerah timur Cisadane sebesar 15 meter. Abrasi terbesar terjadi di daerah Muara Katong sebesar 145 meter dan terkecil di Sanggar Bahari sebesar 10 meter.¹⁵ Sementara itu Ongkosongo dan Susmiati dalam penelitiannya mengatakan bahwa antara tahun 1625 – 1873 garis pantai Jakarta maju sampai 1.300 meter yang berarti kecepatannya 3,69 meter pertahun.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian diperkirakan telah terjadi pengendapan lumpur dan lahar yang berasal dari gunung berapi Pangrango, Gede dan Gunung Salak. Endapan lumpur itu seperti kipas yang mengarah ke utara dan membentuk penyaluran-penyaluran air yang memencar. Sungai Cisadane mengalir ke arah barat, sedangkan Sungai Bekasi mengalir ke timur. Sungai-sungai yang membawa lumpur secara berangsur-angsur ke muka 'endapan berbentuk kipas', lambat laun terbentuklah Teluk Jakarta, kemudian muncul pulau-pulau karang. Berdasarkan penelitian melalui pemotretan dari udara dapat terlihat perubahan arah aliran sungai-sungai yang sering berubah tempat. Demikian juga beting-beting pantai. Mendekati muara, sungai Cisadane, Angke,

¹⁵ Malikusworo Hutomo (ed); *Teluk Jakarta: Sumber daya Sifat-sifat Oseanologis Serta Permasalahannya; Jakarta: Proyek Penelitian Sumber Daya Ekonomi*, Jakarta: LIPI, 1977, hal. 91. lihat juga H. Th. Verstappen; *Jakarta Bay A Geomorphological Study on Shoreline Development*; 'sGravenhage: Drukkerij Trio, 1953, hal. 44 – 45.

¹⁶ RZ. Leirissa (peny); *Sunda Kelapa Sebagai Bandar Jalur Sutera: Kumpulan Makalah Diskusi*; Jakarta: Depdikbud, 1995, hal 155.

Ciliwung, Bekasi dan Citarum membelok ke sebelah barat, sedangkan beting-beting pantai terjadi di sebelah timur muara sungai. Hal ini disebabkan oleh air laut yang terus menerus mengalir ke arah timur selama musim hujan. Pada musim hujan sungai-sungai mengangkut 80 – 90% dari jumlah lumpur selama setahun. Selama musim angin timur arus air alut mengalir ke arah barat dan selama itu sungai-sungai mengalirkan 10 – 20% dari jumlah lumpur selama setahun.¹⁷ Setelah Gunung Salak meletus 1699 garis batas pantai bergeser 75 meter ke arah laut setiap tahun.

Gambar 5: Kipas Fluvio-vulkanik dan Retakan di Tanah Datar Jakarta



¹⁷ Budiaman, *op. cit.*, hal 2

Berdasarkan lapisannya tanah di wilayah endapan Jakarta dapat dibagi dalam dua bagian. Bagian selatan adalah tanah latosol dengan tekstur variable dari lempung sampai sedikit berpasir. Di bagian utara dekat pantai karena merupakan endapan batuan muda, maka sifatnya tidak padat dan air tanahnya terpengaruh oleh air laut.¹⁸ Antara kedua sifat ini seolah-olah dibatasi oleh tanggul memanjang dari barat ke timur. Penduduk umumnya menggunakan tanggul-tanggul ini untuk tempat permukiman dan kerap ditanami pohon kelapa sedangkan lembah rawa-rawa dimanfaatkan untuk persawahan. Pola perkampungan ini masih tampak jelas di tanah datar di sebelah timur kota Tangerang. Lebih dekat ke Jakarta kontur tidak tampak dengan jelas. Tinggi tanggul-tanggul pantai antara lima sampai enam meter. Nama daerah di Jakarta seperti Tanah Abang Bukit, Tanah Tinggi, Bukit Duri sangat terkait dengan keberadaan tanggul-tanggul pantai ini. Mungkin juga hal itu menandakan lokasi kaki-kaki lereng kipas dari pegunungan.¹⁹

Dari aspek morfologi tanah di sebelah selatan tanggul-tanggul pantai seperti tersebut di atas lebih mirip tanah laterit kemerah-merahan karena merupakan hasil pelapukan dari batuan sedangkan tanah di sebelah utara tebing lebih banyak berwarna keabu-abuan yang merujuk pada endapan lempung laut. Untuk menguji apakah teori ini, maka dapat dibuktikan dalam pembangunan pondasi suatu bangunan. Bangunan tinggi di sebelah utara Kedutaan Inggris seperti Wisma Nusantara di dekat Hotel Indonesia memerlukan pondasi *basement* sedalam dua lapis. Gedung Sarinah dan gedung Bank Dagang Negara yang berlokasi lebih ke utara sudah memerlukan pondasi dengan kedalaman 30 meter. Kedua gedung ini berada dialur Kali Cideng yang dipotong oleh pemerintah Belanda pada tahun 1920-an dengan sudetan langsung dari Kampung Lima ke Kebon Sirih dan Petojo.²⁰

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ AR. Soehoed; *op. cit.*

²⁰ AR. Soehoed; *op. cit.*

2.2 Iklim dan Curah Hujan

Iklim merupakan hasil pengamatan cuaca dalam jangka relatif lama (misalnya 25 tahun). Iklim mempunyai hubungan dengan ketinggian tempat di permukaan bumi. Posisi Indonesia yang diapit oleh dua garis khatulistiwa merupakan wilayah iklim muson Asia. Pada umumnya, mekanisme iklim ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, disertai angin topan, badai dan angin puting beliung. Mekanisme iklim ini ditentukan oleh pergerakan *Inter-Tropical Convergence Zone* (ITCZ) bersama pergerakan musim dan pertemuan dengan angin yang menimbulkan kelembaban. Secara keseluruhan, iklim Indonesia tergolong panas dan lembab sepanjang tahun dengan suhu udara yang tetap. Jakarta beriklim panas dengan kelengasan tinggi (antara 80⁰ sampai 90⁰) sedangkan suhu rata-rata adalah 27⁰ C. Angin muson yang terjadi pada bulan Nopember – April dan angin muson timur yang terjadi pada Mei – Nopember menimbulkan gelombang besar di sepanjang pantai. Selain berpengaruh terhadap pelayaran, gelombang besar ini juga berpengaruh terhadap bentuk pantai.²¹ Pulau Jawa adalah contoh dari kontras iklim dengan dua tipe yang berbeda. Di bagian barat pulau Jawa, iklimnya cenderung tropis dan semi lembab sedangkan di sebelah timur, iklim semi kemarau dengan curah hujan yang lebih sedikit dibandingkan dengan Pulau Jawa bagian barat. Di Pulau Jawa, tanah-tanah tinggi di tengah pulau merangsang kehadiran curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dataran rendah pesisir. Perbedaan ini begitu terlihat antara pesisir utara dengan curah hujan 1.700 milimeter pertahun dan kota Bogor yang terletak lebih ke selatan pada ketinggian 2000 meter, curah hujan tahunan hampir 4.000 milimeter.²²

Faktor yang berpengaruh terhadap debit puncak banjir adalah karakteristik hujan yang meliputi jumlah, sebaran, ruang, waktu, intensitas, kemiringan lereng, infiltrasi, penutupan tanah, panjang sungai, gradien sungai dan kepadatan jaringan

²¹ Budiawan dkk; *op. cit*, hal. 3.

²² Hubert Forestier; *op.cit*, hal. 78.

sungai. Berdasarkan karakteristik tersebut maka tingginya curah hujan harus terkait dengan waktu dan ruang. Hujan lebat dalam waktu yang singkat pada daerah yang tidak luas belum tentu mendatangkan banjir tetapi curah hujan yang jatuh pada saat tanah mulai jenuh dengan air, besar pengaruhnya terhadap banjir²³.

Mohr membagi bulan basah, bulan lembab dan bulan kering. Bulan basah yaitu bulan yang curah hujannya lebih dari 100 milimeter, sehingga curah hujan lebih besar daripada penguapan. Kedua adalah bulan lembab yaitu suatu bulan yang curah hujannya lebih besar dari 60 milimeter tetapi kurang dari 100 milimeter. Curah hujan kurang lebih seimbang dengan penguapan. Ketiga bulan kering yaitu bulan dengan curah hujan kurang dari 60 milimeter, sehingga curah hujan lebih kecil dari penguapan²⁴. Berdasarkan data curah hujan²⁵ selama hampir tujuh puluh tahun 1870 - 1941, curah hujan paling tinggi di Ciawi pada bulan Desember, Januari dan Pebruari sebesar 357 milimeter, 358 milimeter dan 322 milimeter. Gunung Pangrango dari Desember sampai Pebruari curah hujannya 448, 478 milimeter dan 443 milimeter, Gambir bulan Desember, Januari dan Pebruari sebesar 204 milimeter, 300 milimeter

²³ AB. Suriadi M. Arsjad; www. Detik. Com. Hujan menurut jenisnya dapat dibedakan antara hujan gerimis dan hujan. Gerimis: curah hujan yang agak seragam berupa tetesan air yang halus (bergaris tengah kurang 0,5 mm) sangat rapat antara satu dengan lainnya.

Hujan: curahan air cair dalam bentuk tetesan yang bergaris melebihi 0,5 mm maupun yang lebih kecil dan terhambur luas, lihat MM. Purbo Hadiwidjojo dkk; *Kamus Hidrologi*; Jakarta: Depdikbud, 1987, hal. 74 dan 204.

²⁴ Yasin Yusuf; *op. cit*, hal 32.

²⁵ Tempat yang dianggap sempurna untuk penempatan penakar hujan tempatnya terletak di pusat/ di tengah-tengah daerah yang diwakilinya, tempat terdiri dari lapangan yang datar dan sama tinggi dengan keadaan di daerah sekitarnya, jarak dari tempat penakar ke obyek di sekelilingnya tidak kurang dari 4 kali tingginya obyek, di atas tempat penakar yang dipasang tidak ada benda-benda yang melintang, di tempat penakar tidak ada pohon kecil yang nantinya akan tumbuh besar dan mengganggu pengamatan, letaknya dekat dengan rumah pengamat an mudah diawasi. Salah satu alat pengukur hujan adalah yang diperkenalkan oleh Hellmann, maka alatnya disebut Penakar Hujan Hellmann. Alat ini tingginya dari kaki sampai bibir atas 114 cm, alat-alat mekanisnya terpasang dalam silinder badan penakar yang dibuat dari plat besi. Bibir penakar dikelilingi oleh ring kuningan dan luas penampang bibir 200 cm². pengukuran dilakukan dengan gelas pengukur khusus. Biasanya antara air hujan yang tercatat pada pias dan air hujan yang diukur langsung dengan gelas terdapat perbedaan antara 1 sampai 3 persepuluh, hal ini disebabkan karena sebagian air menempel pada dinding-dinding pipa dan kaleng. Cara memasang badan penakar ialah dengan meletakkan badan tersebut di atas papan kayu yang sudah di taruh *waterpass* di atas pondasi beton, kemudian di tiga kakinya diskrup dengan papan kayu. Lihat: Proyek Perancang Pengembangan Sumber-sumber Air; *Petunjuk Instalasi Penakar Hujan Hellmann*; Jakarta: Direktorat Jenderal Pengairan, DPU; 1975.

dan 299 milimeter, di Bogor curah hujan paling tinggi yaitu 4.027 milimeter²⁶. Curah hujan yang jatuh selama musim hujan sekitar 80% yaitu dari bulan Nopember sampai Mei. Bulan Januari adalah bulan terbanyak hujannya sekitar 25% dari total jumlah hujan. Hujan biasanya terjadi pada sore dan malam hari, antara jam 14.00 sampai 21.00.²⁷

Banjir tidak hanya ditentukan curah hujan rata-rata bulanan tetapi yang paling menentukan banjir adalah curah hujan setiap jam atau harian. Ketika jumlah hujan yang jatuh pada bulan basah dan terjadi hujan lebat dalam beberapa hari atau jam maka kemungkinan terjadinya banjir lebih besar. Sebaliknya curah hujan di atas normal selama sebulan bisa saja tidak terjadi genangan karena hujan yang jatuh tiap jamnya sedikit.²⁸ Sebagai contoh pada 14 Januari 1983, curah hujan di Manggarai 60 milimeter, Karet 48 milimeter. Pada waktu itu hujan selama dua jam lebih dan merata. Akibatnya terjadi banjir di daerah Jakarta, Monas, Kebon Nanas dan lain-lain.²⁹ Berdasarkan data curah hujan yang dilakukan sejak tahun 1870, menunjukkan bahwa fluktuasi curah hujan tidak berbeda jauh. Seperti terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1: Data Curah Hujan Jabotabek Tahun 1870 – 1941

| No | Stasiun | Tinggi atau Elevasi | Bulan | | | | | | | | | | | | Juml/ Tahun |
|----|--------------|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------------|
| | | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Jul | Agt | Sept | Okt | Nop | Des | |
| 1 | Bogor | 237 | 391 | 364 | 394 | 431 | 271 | 281 | 221 | 216 | 286 | 419 | 392 | 361 | 4.027 |
| 2 | Bekasi | 20 | 318 | 183 | 227 | 168 | 144 | 86 | 50 | 37 | 53 | 101 | 179 | 207 | 1753 |
| 3 | Cengkareng | 9 | 294 | 277 | 173 | 137 | 127 | 86 | 58 | 68 | 69 | 101 | 121 | 220 | 1731 |
| 4 | Curug | 41 | 242 | 219 | 204 | 159 | 149 | 116 | 77 | 70 | 105 | 189 | 184 | 225 | 1939 |
| 5 | Ciputat | 50 | 258 | 216 | 215 | 241 | 132 | 130 | 124 | 83 | 109 | 147 | 249 | 208 | 2112 |
| 6 | Cileungsi | 80 | 335 | 333 | 268 | 334 | 270 | 168 | 99 | 117 | 144 | 299 | 333 | 312 | 3012 |
| 7 | Citeureup | - | 341 | 358 | 330 | 381 | 330 | 181 | 174 | 176 | 200 | 251 | 309 | 289 | 3320 |
| 8 | Cikarang | 27 | 270 | 239 | 197 | 131 | 110 | 85 | 49 | 29 | 51 | 117 | 197 | 214 | 1689 |
| 9 | Ciawi | 500 | 358 | 322 | 373 | 265 | 203 | 114 | 67 | 46 | 49 | 167 | 266 | 357 | 2587 |
| 10 | Depok | 95 | 342 | 334 | 313 | 322 | 270 | 191 | 128 | 139 | 200 | 269 | 336 | 286 | 3130 |
| 11 | Dennaga | 220 | 310 | 313 | 327 | 376 | 310 | 244 | 201 | 212 | 272 | 316 | 337 | 362 | 3503 |
| 12 | G. Pangrango | 3022 | 478 | 443 | 437 | 327 | 196 | 119 | 77 | 90 | 124 | 238 | 347 | 448 | 3324 |
| 13 | Jonggol | 123 | 367 | 389 | 395 | 407 | 324 | 196 | 128 | 129 | 157 | 337 | 362 | 325 | 3516 |

²⁶ Verhandelingen No. 37, 1870 - 1941

²⁷ Proyek Pengendalian Banjir Jakarta; *Aspek-aspek Pokok dan Masalah-masalah Lingkup Proyek Pengendalian Banjir Jakarta* (Laporan), tt, hal. 13

²⁸ Sinar Harapan; 10 Nopember 1983

²⁹ Kompas; 15 Januari 1983

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 14 | Jasinga | 90 | 310 | 315 | 306 | 391 | 297 | 225 | 191 | 212 | 229 | 280 | 307 | 285 | 3348 |
| 15 | Gambir | 7 | 300 | 299 | 210 | 147 | 113 | 96 | 63 | 42 | 66 | 111 | 142 | 204 | 1793 |
| 16 | Tanah Abang | 10 | 246 | 274 | 232 | 162 | 122 | 83 | 34 | 49 | 52 | 79 | 134 | 210 | 1677 |
| 17 | Jatinegara | 20 | 303 | 298 | 212 | 157 | 124 | 97 | 65 | 51 | 73 | 128 | 168 | 209 | 1885 |
| 18 | K Badak | 2405 | 523 | 453 | 498 | 343 | 207 | 118 | 72 | 93 | 136 | 272 | 399 | 489 | 3603 |
| 19 | Karawang | 14 | 244 | 243 | 207 | 145 | 126 | 106 | 70 | 36 | 62 | 139 | 228 | 217 | 1823 |
| 20 | Kebayoran | 25 | 285 | 225 | 224 | 190 | 162 | 120 | 60 | 43 | 73 | 94 | 189 | 222 | 1887 |
| 21 | K. Halang | 206 | 385 | 265 | 353 | 433 | 364 | 284 | 215 | 245 | 274 | 450 | 410 | 339 | 4017 |
| 22 | Kedung Haur | 8 | 262 | 261 | 186 | 128 | 100 | 69 | 46 | 15 | 17 | 66 | 121 | 226 | 1497 |
| 23 | Pasar Minggu | 35 | 305 | 267 | 253 | 197 | 172 | 113 | 76 | 60 | 101 | 161 | 236 | 232 | 2173 |
| 24 | Pondok Gede | 28 | 304 | 191 | 194 | 225 | 177 | 153 | 72 | 62 | 59 | 121 | 197 | 227 | 1982 |
| 25 | Parung | 103 | 247 | 284 | 286 | 295 | 264 | 162 | 117 | 136 | 167 | 242 | 266 | 246 | 2712 |
| 26 | R. Dengblok | 7 | 252 | 231 | 162 | 122 | 80 | 62 | 49 | 29 | 45 | 69 | 136 | 184 | 1421 |
| 27 | Ragunan | 50 | 254 | 234 | 242 | 198 | 215 | 121 | 60 | 55 | 72 | 151 | 222 | 204 | 2028 |
| 28 | Serpong | 50 | 256 | 267 | 274 | 255 | 203 | 130 | 98 | 104 | 99 | 200 | 222 | 269 | 2377 |
| 29 | Sawangan | 100 | 244 | 284 | 278 | 260 | 285 | 179 | 98 | 123 | 157 | 233 | 258 | 244 | 2643 |
| 30 | Semplak | 177 | 369 | 325 | 349 | 322 | 322 | 280 | 174 | 234 | 278 | 352 | 427 | 292 | 3724 |
| 31 | Teluk Naga | - | 355 | 233 | 178 | 128 | 107 | 107 | 61 | 31 | 68 | 43 | 82 | 220 | 1613 |
| 32 | T. Priok | - | 318 | 321 | 184 | 115 | 96 | 77 | 48 | 40 | 49 | 61 | 104 | 209 | 1622 |
| 33 | Tangerang | 18 | 278 | 268 | 188 | 136 | 108 | 94 | 70 | 57 | 68 | 106 | 169 | 210 | 1752 |
| 34 | Ujung Gantung | - | 603 | 482 | 468 | 242 | 200 | 193 | 114 | 104 | 150 | 476 | 425 | 521 | 3978 |
| 35 | Ulujami | 25 | 375 | 266 | 163 | 191 | 126 | 93 | 51 | 27 | 90 | 89 | 185 | 192 | 1848 |
| 36 | Parung | 103 | 247 | 284 | 286 | 295 | 264 | 162 | 117 | 136 | 167 | 242 | 266 | 246 | 2712 |
| 37 | Mauk | 5 | 295 | 264 | 196 | 103 | 77 | 81 | 55 | 50 | 62 | 81 | 82 | 204 | 1550 |

Sumber: *Verhandeligen No. 37, 1870 – 1941*

Data curah hujan di atas, khususnya untuk pengukuran di stasiun Gambir jika dibandingkan dengan data curah hujan yang dikeluarkan oleh Tim Komando Proyek Pencegahan Banjir, yang mengadakan pengukuran berdasarkan jumlah hari hujan dan curah hujan bulanan selama 1931 – 1961 tidak banyak berubah.

Tabel 2: Curah Hujan dan Hari Hujan di Jakarta tahun 1931 – 1961

| Bulan | Curah hujan (mm) | Hari hujan (hari) |
|-----------|---------------------|----------------------|
| Januari | 330 | 19 |
| Pebruari | 240 | 17,5 |
| Maret | 202 | 15,7 |
| April | 138 | 11,3 |
| Mei | 102 | 9,2 |
| Juni | 96 | 7,2 |
| Juli | 56 | 6,1 |
| Agustus | 52 | 4,5 |
| September | 80 | 5,5 |

| | | |
|----------|-----|------|
| Oktober | 90 | 7,3 |
| November | 152 | 12,3 |
| Desember | 194 | 14,1 |

Sumber: Tim Kopro Banjir, 1965

Pengukuran curah hujan di daerah Cileungsi dan stasiun Jonggol antara tahun 1963 – 1969 perubahannya tidak begitu banyak. Ini menunjukkan bahwa selama 100 tahun curah hujan mengalami perubahan yang sangat lambat. Data di atas menunjukkan bahwa curah hujan yang terjadi dari bulan Desember sampai Pebruari sangat tinggi. Bulan Januari – Pebruari merupakan puncak bulan basah, sehingga jika pada bulan-bulan tersebut terjadi hujan deras kemungkinan terjadi banjir lebih besar karena tanah sudah jenuh dengan air.

Tabel 3: Rata-rata Curah Hujan Perbulan Tahun 1963 – 1969 (Milimeter)

| Bulan | Stasiun Muara | Stasiun Ciomas | Stasiun Cileungsi | Stasiun Jonggol |
|-----------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Januari | 484 | 527 | 294 | 319 |
| Pebruari | 358 | 383 | 388 | 322 |
| Maret | 320 | 374 | 220 | 275 |
| April | 374 | 439 | 300 | 290 |
| Mei | 231 | 212 | 103 | 172 |
| Juni | 202 | 208 | 104 | 81 |
| Juli | 210 | 247 | 50 | 50 |
| Agustus | 171 | 175 | 98 | 95 |
| September | 323 | 311 | 93 | 227 |
| Oktober | 344 | 324 | 172 | 227 |
| November | 338 | 319 | 172 | 183 |
| Desember | 385 | 426 | 254 | 268 |

Sumber: Nedeco 1970

Membandingkan ketiga data curah hujan di atas, tampak bahwa curah hujan yang terjadi relatif konstan. Untuk itu hal yang sangat menentukan besar kecilnya curah

hujan menjadi aliran di atas tanah (*run off*) dan tidak diserap oleh tanah adalah masalah tata guna lahan dan saluran.

2.3 Tata Guna Lahan Daerah Aliran Sungai

Masalah yang penting dalam kaitannya dengan banjir adalah topografi. Kecepatan aliran air menuju sungai dan laut sangat tergantung pada topografi atau kemiringan tanah. Di daerah Bogor ke arah selatan Jakarta (sekitar Pasar Minggu) kemiringan lereng masih cukup tinggi untuk mengalirkan air dengan lancar sedangkan dari selatan ke utara Jakarta akan mengalami *retardasi* (tahanan) setelah masuk kawasan Jakarta. Retardasi yang terjadi di sungai-sungai mengakibatkan sedimentasi.³⁰

Dalam kaitannya dengan topografi wilayah Jakarta digunakan satu peil pedoman (*reference level*) yakni Peil Priok (PP) ditetapkan sebagai peil 0,00 PP. Peil adalah peil permukaan air yang paling rendah dari pasang surut bulan purnama selama setahun pengamatan. Berdasarkan data topografi terlihat bahwa peil wilayah Jakarta berkisar antara + 1,0 P.P di dekat pantai dan + 25,0 P.P di bagian selatan. Jika ditinjau dari daerah aliran sungai yang masuk Jakarta maka topografinya dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu daerah pegunungan di sebelah selatan Bogor dengan ketinggian 150 PP termasuk daerah Gunung Salak (+ 2.200 meter) dan Gunung Gede (+ 2.960 meter). Kedua; bagian tengah dengan ketinggian antara + 5 PP sampai + 150 PP. Di daerah ini kondisi sungai sudah banyak mengalami erosi berat dan mempunyai lembah yang sempit. Ketiga; daerah Pantai adalah daerah dengan ketinggian 0,5 PP sampai 1,5 PP. Pada umumnya daerah ini sangat datar dan berawa-rawa dengan garis batas tepi sungai yang jelas dan sungai-sungai itu sering berpindah tempat.³¹ Peil permukaan ini

³⁰ AB. Suriadi M Arsjad dalam *Intisari*; 2002.

³¹ Pengukuran muka air laut, pertama kali dilakukan pada tahun 1925. Berdasarkan penelitian 'Peil Permukaan Laut Rata' dipakai sebagai pedoman pengukuran di Pulau Jawa. Gerakan pasang surut di Laut Jawa pada umumnya terjadi satu kali pasang naik dan satu kali surut dalam 24 jam. Berdasarkan penelitian tersebut maka *spring tide* (high water + 1,15 PP dan *average low water* (l.w) + 0,25 PP.

digunakan sebagai acuan dalam pembuatan pintu air atau sarana pengairan di daerah pantai. Misalnya pada Desember 1980- Januari 1981, pintu air Pasar Ikan pernah dilampaui oleh pasang laut. Peil air Pasar Ikan dalam keadaan tertutup adalah + 1,70 PP sehingga diperkirakan peil pasang air laut pada saat itu berkisar + 1,75 PP. Dari sinilah dapat diketahui perubahan pasang surut air laut yang mungkin disebabkan oleh adanya gejala alam lainnya³².

Dilihat dari tinggi tanahnya, wilayah Jakarta dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah daerah bagian utara. Sebelah utara daerah ini berbatasan dengan laut, batas sebelah selatan, lebih kurang arah kana banjir membujur ke barat selebar sepuluh kilometer dengan ketinggian tanah lima meter di atas titik nol Priok. Bagian kedua adalah daerah sebelah selatan dari kanal banjir. Daerah ini merupakan daerah yang berbukit-bukit. Pada umumnya makin ke selatan, tinggi tanah mengalami kenaikan dibanding bagian utara banjir kanal.³³

Tata guna lahan daerah aliran sungai banyak berkaitan dengan dinamika penduduk di suatu tempat. Peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap perkembangan daerah kedap air karena banyak lahan yang digunakan sebagai permukiman. Daerah dengan tata guna lahan perkotaan yang mempunyai permukaan kedap akan menghasilkan aliran yang besar bahkan hampir 100% dari curah hujan menjadi aliran permukaan. Sebaliknya daerah yang tertutup hutan lebih banyak menahan air dan diresapkan ke dalam tanah, karena sebagian air tertahan di daun dan ranting kemudian menguap. Jumlah ini dapat mencapai 20% dari curah hujan.

Secara hidrologis, daratan atau suatu pulau dapat terbagi habis menjadi beberapa satuan daerah yang disebut sebagai satuan daerah aliran sungai (DAS).³⁴

Penelitian kedua tahun 1973, yang dilakukan oleh Proyek Pengendalian Banjir Jaya. Pencatatan muka air laut dilakukan di dua tempat yaitu di Pasar Ikan dan Tanjung Priok. Lihat Team Penyusun Rencana Induk DKI Jakarta 1985 – 2005; *Laporan Sektor Banjir, Drainase dan Irigasi*; II-8; 1981/1982; hal. 15.

³² *Ibid.*

³³ Proyek Pengendalian Banjir Jakarta; *Pola Induk Penanggulangan Banjir DKI Jakarta*, tt, hal 831

³⁴ Daerah Aliran Sungai (DAS)/*cathment area* merupakan suatu wilayah ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografi dan berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan dan penyalur air beserta sedimen dan unsur hara lainnya melalui sistem sungai yan mempunyai outlet tunggal. Sudarmaji dkk; *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Dalam Rangka Pengendalian Tata Air Berwawasan Lingkungan*, dalam

Makin alami suatu daerah makin jelas satuan DAS dan kesatuan ekosistemnya, sedangkan makin banyak campur tangan manusia makin kurang jelas sifat kesatuan DASnya. Batas DAS ditetapkan atas dasar batas topografi, sehingga batas DAS tidak tepat dengan batas administrasi. Untuk itu penanganan DAS memerlukan penanganan yang lintas daerah. Sebagai contoh untuk menangani DAS Ciliwung maka diadakan kerja sama antar satuan pemerintahan yang dilewati oleh sungai Ciliwung, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta.³⁵

DAS dapat dilihat sebagai bagian dari permukaan bumi yang menentukan air hujan menjadi aliran permukaan dan menjadi aliran sungai kemudian bergerak ke daerah yang lebih rendah di hilir. Pembukaan lahan untuk areal permukiman akan mempengaruhi daur hidrologi DAS. Semakin luas pembukaan lahan untuk areal permukiman maka koefisien aliran daerah makin meningkat. DAS mempunyai peranan menangkap curah hujan. Air hujan yang jatuh di atas DAS akan dialirkan melalui satu pintu air ke muara sungai. Istilah banjir kiriman sangat terkait dengan konsep ini. Walaupun di Jakarta tidak terjadi hujan dapat saja terjadi luapan sungai karena terjadinya hujan pada DAS di daerah hulu. Luas DAS dan sub DAS sangat menentukan besarnya volume aliran yang akan ditampung di daerah hilir. Perlakuan manusia terhadap daerah DAS sangat mempengaruhi besarnya aliran air yang masuk ke sungai. Jika di daerah DAS, rapat dengan bangunan yang kedap air maka kemungkinan air yang mengalir langsung ke saluran semakin besar.

Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, Yogyakarta: Bigraf Publishing Bekerjasama dengan STTL, 2004, hal 59

³⁵ *Ibid.*

Tabel 4: Daerah Tangkapan Air dan Profil Sungai³⁶

| Nama Sungai | Van Breen | | DPU Bogor 1970 | | United Nations Flood Control | | Kopro 1965 | Banjir |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | DAS (km ²) | Aliran maksimum (m ³ /s) | Panjang (km ²) | DAS (km ²) | Panjang (km) | DAS (km ²) | Aliran maksimum m ³ /s | DAS (km ²) |
| K. Cakung | - | - | 40 | 121,5 | - | - | - | - |
| K. Sunter | 140 | 120 | - | - | - | - | - | 140 |
| K. Ciliwung | 335 | 250 | 103 | 385 | 125 | 318 | 100 | 475 |
| K. Cideng | 15 | 40 | | | | | | 6 |
| K. Krukut | 110 | 100 | 43 | 94 | | | | 110 |
| K. Grogol | 75 | 60 | 55 | 42 | | | | 75 |
| K. Angke | 395 | 260 | 55 | 42 | | | | |
| K. Cisadane | 1.215 | 1.600 | 138 | 1486 | 150 | | 335 | |

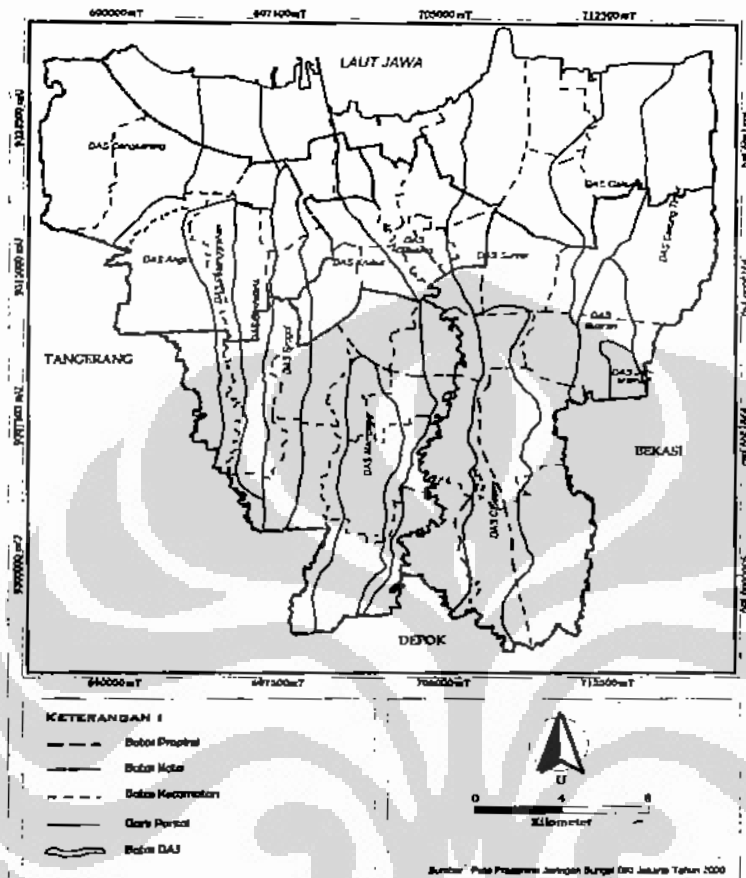
Sumber: *Djakarta Flood Control*; hal 2.8

Pada tahun 1908, masalah yang kaitannya dengan penggundulan hutan dibahas dalam rapat *Bataviasche Landbouw*. Dalam rapat tersebut dibahas seberapa luas penggundulan hutan yang telah terjadi. Karena penggundulan hutan akan berpengaruh terhadap debit sungai Ciliwung. Dengan mengetahui luas penggundulan akan dapat diketahui berapa luas lahan yang bisa diairi.³⁷

³⁶ Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya; *Djakarta Flood Control Preliminary Survey and Recommendations*; Jakarta: 1970, hal 2.8

³⁷ Notulen *Bataviasche Landbouw* 1908, Bijlagen A

Gambar 6: Peta Sistem Sungai di Jakarta



Sumber: Rudy P Tambunan, 2005

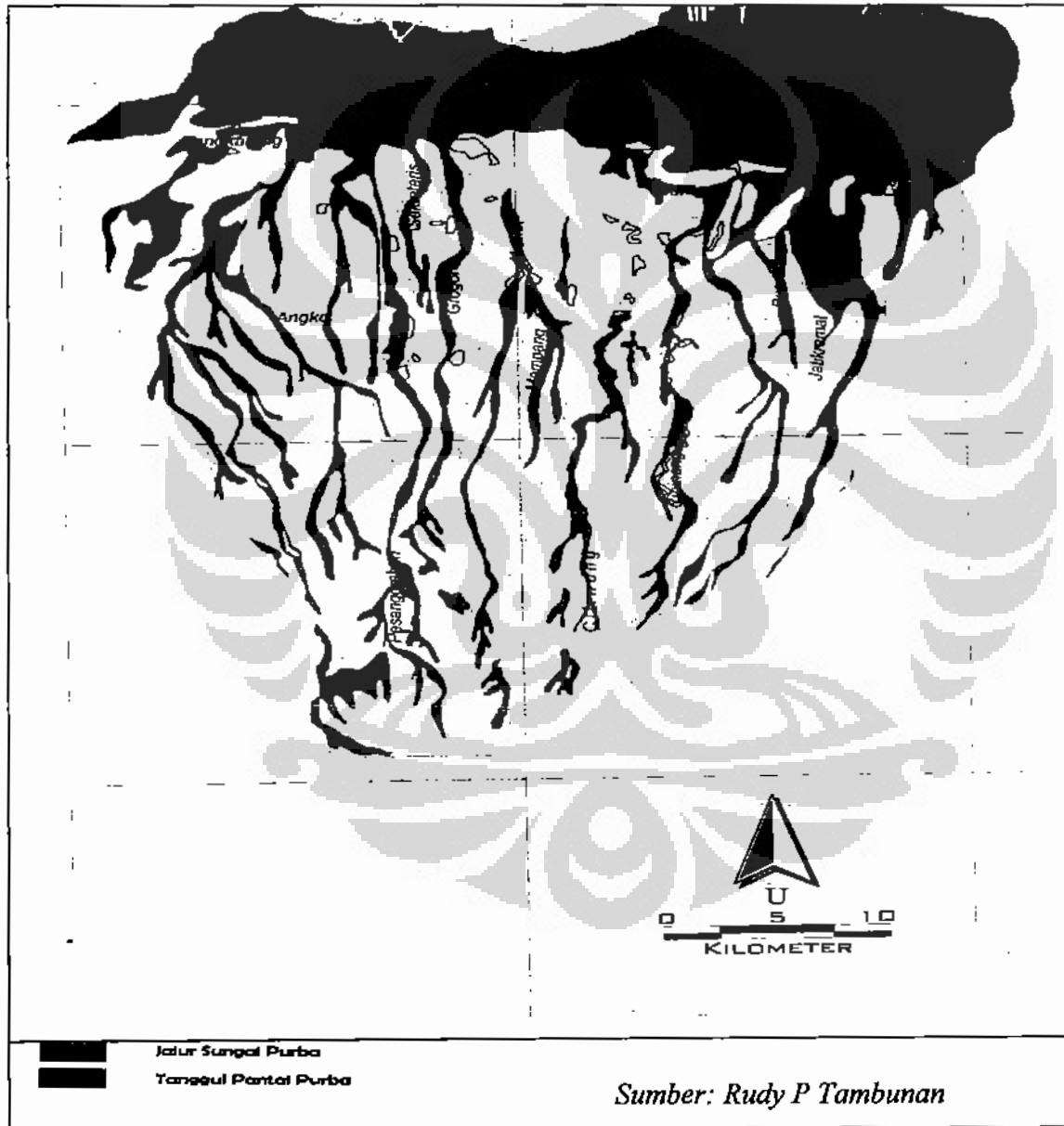
2.4 Sungai dan Rawa

Sungai adalah wadah penampungan dan penyalur alamiah aliran air dengan segala benda yang terbawa dari Daerah Aliran Sungai (DAS) ke tempat yang lebih rendah dan bermuara ke laut³⁸. Berdasarkan pemotretan dari udara, dapat terlihat perubahan arah aliran sungai-sungai yang sering berubah. Demikian pula beting-beting pantainya. Untuk meninjau pengaruh dari endapan lumpur yang mengalir dari

³⁸ MM. Purbo Hadiwidjojo dkk; *loc. cit.*, hal 220.

sungai-sungai yang ada dapat ditelusuri dari peta aliran sungai purba yang ada. Dari peta tersebut terlihat aliran sungai mengalami perubahan aliran yang tergantung pada iklim dan angin. Setelah berlangsung beratus-ratus tahun, maka aliran sungai purba mengalami perubahan-perubahan.

Gambar 7: Peta Aliran Sungai Purba



Pada abad 16 sampai 19 jumlah sungai lebih banyak dari sekarang. Sungai-sungai kecil mengalir di kampung-kampung. Penduduk pribumi banyak yang berprofesi menjadi tukang perahu, tukang binatu (penatu), mencuci pakaian di tepi-tepi sungai. Anak-anak sering menangkap ikan julung-julung dan pala timah. Sesudah hujan turun, anak-anak mandi di sungai yang disebut *ngebak* (lompat-lompatan sambil menciprat-cipratkan air). Pada waktu banjir, banyak ikan mabuk, mengambang dan orang-orang berebut menangkapnya. Karena banyak sungai dan kanal, Batavia pernah dijuluki sebagai 'Venesia' dari Timur. Venesia adalah sebuah kota di Italia yang dikelilingi sungai-sungai. Sekarang banyak sungai kecil dan kanal sudah menghilang dari Jakarta. Seperti nama Cililitan di Jakarta Timur. Nama Cililitan diambil dari salah satu anak sungai Cipinang. Sekarang anak sungai itu sudah tidak ada lagi. Kata 'ci' dalam bahasa Sunda berarti kali atau sungai. 'Lilitan' adalah nama sejenis tanaman perdu.³⁹ Di daerah Menteng yang hilang misalnya saluran Menteng ini mungkin lanjutan dari Sungai Cideng yang masuk ke daerah Menteng. Diberitakan pada tahun 1701 Gubernur Jenderal Van Riebeck dalam perjalanan ke selatan mengikuti *tweede westerweg* artinya jalan barat kedua menuju Bogor, menelusuri *spruitje Menteng* (sungai kecil Menteng). Sungai ini berawal dari sekitar belakang Stadion Kuningan sekarang dan bermuara di Kali Krukut. Bagian terakhir sungai Menteng menelusuri daerah Menteng bagian Barat. Bagian sungai Menteng di sebelah selatan kali Malang masih ada yang disebut kali Cideng.⁴⁰

Sungai selain digunakan sebagai transportasi kapal-kapal besar, penduduk juga memanfaatkan sebagai tempat penyeberangan yang disebut 'eretan'. Eretan adalah prasarana angkutan penyeberangan sungai di Jakarta pada masa lalu. Sarana angkutan ini berupa 'getek' terbuat dari satu atau dua lapis deretan bambu bulat panjang. Sungai-sungai yang mengalir di Jakarta arusnya masih cukup deras, jarak kedua tepiannya masih lebar dan sungainya cukup dalam. Karena menyangkut kebutuhan

³⁹ Republika; 22 Januari 2006

⁴⁰ Adolf Heuken SJ; *Menteng: Kota Taman Pertama di Indonesia*; Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka; 2001, hal 15.

masyarakat, sehingga eretan bisa dijadikan kegiatan usaha yang mendatangkan keuntungan bagi para pemiliknya. Usaha eretan tidak mengenal istirahat, karena selalu dibutuhkan masyarakat dalam bepergian, baik di hari kerja maupun libur. Sampai akhir 1950-an, antara kelurahan Kwitang dengan kampung Kalipasir di kelurahan Gondangdia masih dihubungkan dengan eretan. Tarif penyeberangan sekitar sepicis atau 10 sen per orang. Setelah tahun 1960-an, eretan yang menghubungkan Kwitang-Kalipasir sudah tidak ada lagi dengan dibangunnya jembatan. Tetapi sampai sekarang, Gang Eretan di Kalipasir masih sering diucapkan orang Betawi yang tinggal di kedua kampung yang dipisahkan sungai Ciliwung.⁴¹ Selain itu, sungai juga digunakan sebagai tempat untuk mandi dan mencuci. Untuk menertibkan sungai Pemerintah Hindia Belanda pernah mengeluarkan larangan agar para wanita tidak mandi di sungai atau kanal tanpa busana.

...Saat menjelang senja, rumah-rumah pemandian di sepanjang tepian dinding kanal dipenuhi wanita telanjang dada berendam diri *zonder* khawatir akan buaya pemangsa dan pria iseng doyan mengintip. Sementara satu persatu perahu-perahu mulai lego jangkar di tepian dermaga. Para pedagang siap berkemas diri meninggalkan pasar. Karena 'keberanian' warga Belanda dan para nyai untuk mandi tanpa busana, menyebabkan VOC pernah membuat larangan mandi dengan cara demikian.⁴²

Dalam kaitannya dengan pengawasan air di sungai pemerintah menetapkan aturan bahwa pengangkatan petugas pengawas dan arsitek pengairan harus sudah belajar di sekolah *Burgeravonschool* di Surabaya sampai tahun terakhir yang diketahui oleh komisi ujian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah lulus dari sekolah tersebut.⁴³

Untuk pengaturan penggunaan air, pemerintah mengeluarkan peraturan penggunaan air bagi rumah tangga, pengairan, tenaga industri, aliran air, sungai, kolam, danau, kanal dan saluran air yang dimiliki oleh negara. Peraturan ini juga

⁴¹ *Republika*; 22 Januari 2006

⁴² *Republika*; 19 Nopember 2005

⁴³ *Staatsblad* No. 31; *Bijblad* No. 5176, 19 Pebruari 1896

diberlakukan bagi masyarakat umum dan pihak swasta. Apabila terjadi perbedaan kepentingan dalam penggunaan air maka masalah tersebut diajukan kepada Gubernur Jenderal. Permohonan penggunaan air diajukan melalui kepala pemerintahan setempat dengan dilampiri peta lahan yang dibuat oleh seorang ahli tata pengairan. Setelah Dinas Pengairan menyetujui penggunaan air, maka dinas mengadakan pengontrolan air setiap tiga bulan.⁴⁴ Untuk pengawasan masalah penggunaan air pemerintah mengangkat komisi penasehat untuk di Jawa adalah para bupati atau patih.⁴⁵

Bencana bagi aliran sungai di Batavia terjadi ketika Gunung Salak meletus pada tahun 1699. Dua tahun setelah Gunung Salak meletus (1701) dikirimlah ahli-ahli hidrologi untuk mengadakan penelitian di daerah hulu sungai di *Ommelanden*. Tugas peneliti adalah mengadakan penelitian sebab-sebab pencemaran yang mengalir ke seluruh kota. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa daerah hulu sungai Ciliwung sampai hilir di perkebunan tebu Cornelis Chastelein telah bersih ditebangi. Aliran sungai Ciliwung yang masuk kota semakin kecil tidak hanya karena letusan gunung tetapi juga karena banyaknya pengalihan aliran sungai Ciliwung untuk kepentingan irigasi. Sungai Cisadane juga mengalami pengendapan. Pada tahun 1780 sebagian besar daerah sekitar Batavia telah berubah menjadi 'gua dan reruntuhan'. Pada waktu itu sudah tidak tersisa lagi bekas-bekas kemakmuran masa lalu. Pada periode abad ke 18 pemerintah Batavia sudah dibuat repot dengan masalah sampah dan kebersihan kota. Di Batavia pada waktu itu belum dikenal sistem kakus atau kamar mandi, kotoran manusia ditampung pada tempat tertentu dan pada malam hari jam 21.00 disebut sebagai *negenuursbloemen*, kotoran tersebut oleh para budak dibuang ke kali atau kanal. Siang hari terutama pada musim kering bau menyengat yang berasal dari kali, sampah, bangkai sisa pembangunan menjadi satu di sungai atau kanal yang tidak bisa mengalir lagi karena sedimentasi lumpur dan pasang naik laut yang membawa pasir sehingga menghambat aliran sungai. Semua ini menyumbang munculnya epidemi di Batavia. Pada tahun 1733 jumlah rata-rata kematian 2000 --

⁴⁴ Staatsblad No. 8, Bijlagen Nomor 5081; 10 September 1895

⁴⁵ Bijblad Nomor 9639, 3 Desember 1920.

3000 orang pertahun⁴⁶. Batavia berangsur-angsur mati. Ketika pabrik gula mulai ditutup akibat krisis ekonomi, erosi tanah, sistem irigasi sungai yang rusak, rusaknya ekologi yang mengakibatkan berkembangnya penyakit, dan kawanan kuli yang kehilangan pekerjaan sehingga mengakibatkan daerah pedusunan menjadi tidak aman.⁴⁷

Pada tahun 1911, penelitian mengenai sungai-sungai yang ada di Batavia dilakukan oleh *De Commissie voor den Waterafvoer de Watervoorziening van Batavia* yang terdiri dari Moojen, H. Zaalberg dan Swildens. Penelitian ini bertujuan untuk meminta pejabat berwenang agar memperhatikan dan mengawasi semua pengaliran sungai di Batavia. Penelitian meliputi 9 sungai yaitu Ciliwung yang mempunyai daerah aliran sungai 366 kilometer persegi, sungai Krokot (berubah menjadi Krukut) kira-kira 112 kilometer persegi sampai batas air di Kampung Karet, sungai Angke kira-kira 506 kilometer persegi sampai pintu air Pesing, Cidane (Cisadane) kira-kira 1.009 kilometer persegi sampai penampungan Mookervaart. Selain itu penelitian juga dilakukan terhadap Sungai Grogol, Sungai Menteng (Cidang) yang terletak antara Krokot dan Ciliwung, Kali Sunter, Kali Sungai Putus (Tepango) dan Sungai Kali Bambu di sebelah timur kanal Gunung Sahari.⁴⁸

Wilayah sungai yang ada di Jakarta dapat dibagi dalam tiga belas satuan daerah aliran sungai. Dari satuan aliran sungai yang mengalir dapat dikelompokkan atas tiga lokasi yaitu: kelompok sungai yang berhulu di daerah datar di dalam satuan kipas puing. Masuk dalam kelompok ini adalah:

1. Sungai Kali Kamal. sungai ini merupakan pecahan Kali Cisadane di bagian timur laut kota Tangerang, mengalir menuju daerah batu Ceper dan selanjutnya mengarah ke utara di daerah Kamal dan bermuara di Teluk Jakarta perbatasan Jakarta dan Tangerang.

⁴⁶ Mona Lohanda, *Sejarah Para pembesar Mengatur Batavia*; Jakarta: Masup Jakarta, 2007, hal 66

⁴⁷ Leonard Blusse; *op. cit*, hal 51

⁴⁸ MGS/BGS, 12 Pebruari 1912, Nomor 31.

2. Sungai kecil tak bernama yang berhulu di sebelah barat laut kompleks IAIN Ciputat, mengalir ke arah barat laut dan bergabung dengan sungai Angke di Ciledug.
3. Sungai Sekretaris. Sungai ini bermuara di daerah Bintaro, mengalir ke arah utara menuju Kebayoran Lama, Kelapa Dua, Kebun Jeruk, Tanjung Duren dan selanjutnya bergabung dengan saluran di jalan Daan Mogot yang kemudian masuk ke Banjir Kanal Angke.
4. Sungai Grogol. Hulu Sungai Grogol terletak di daerah Cinere, mengalir ke utara menuju Pangkalan Jati Cilanda, Pondok Indah. Di sebelah utara jalan Marga Guna Gandaria Selatan, sungai ini disodet ke Sungai Pesanggrahan (disodet tahun 1983-1984) yang mengalir di sebelah barat sungai ini. Sungai Grogol selanjutnya mengalir ke utara menyusuri perbatasan Kebayoran Baru dengan Kebayoran Lama menuju Pal Merah dan akhirnya masuk saluran Grogol, mengalir menuju Kemanggisan, Tomang Barat, menyusuri jalan S. Parman, jalan Latumeten dan bergabung dengan banjir kanal di Teluk Gong.
5. Sungai Mampang. Berhulu di daerah Pejaten, sedangkan hulu kedua terletak di Kampung Limo Ragunan. Hulu ketiga terletak di Pejaten. Sungai-sungai kecil ini bergabung di daerah ke Kali Mampang di daerah Kemang Timur yang selanjutnya mengalir ke utara hingga bergabung dengan Sungai Krukut di Kuningan Barat. Selanjutnya sungai Krukut mengalir melewati Bendungan Hilir masuk ke banjir kanal Kali Malang di daerah Penjernihan, dan bermuara di Muara Karang.
6. Sungai Cipinang. Sungai Cipinang hulunya terletak di Situ Jati Jajar, Cimanggis. Sungai ini mengalir melalui Jati Jajar Cibubur, Pekayon, Ciracas, Halim Perdana Kusumah, Cipinang Muara, dan bergabung

dengan sungai Sunter di Cipinang, kemudian mengalir ke utara dengan nama sungai Sunter menuju Pulo Gadung, Tanjung Priok.

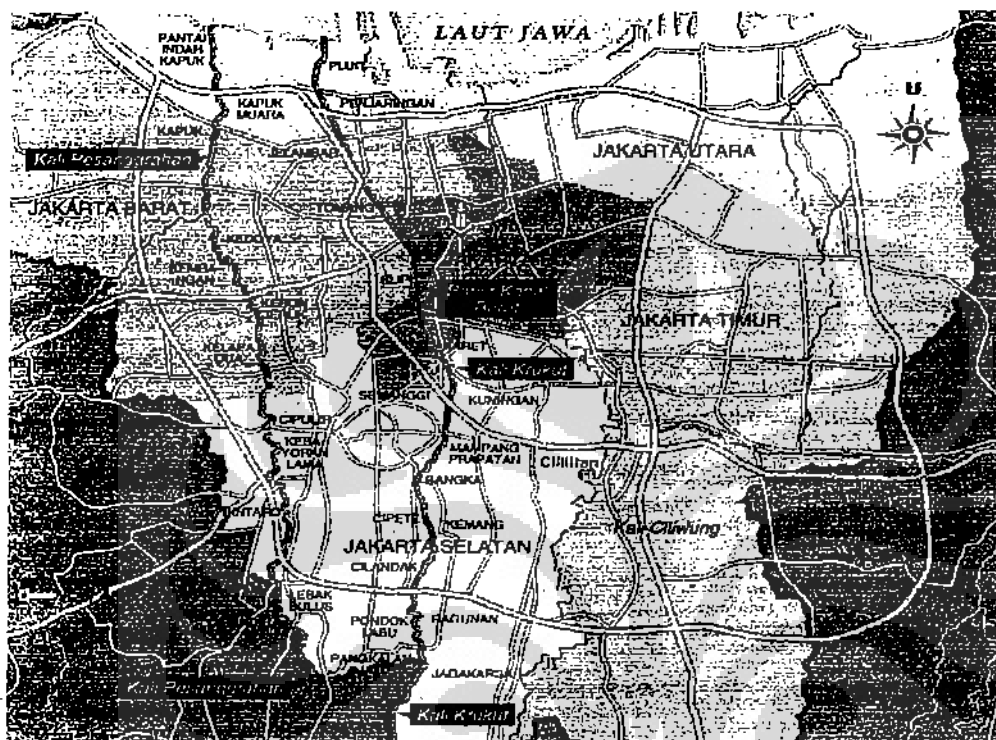
7. Sungai Sunter. Hulu sungai Sunter terletak di daerah Cilangkap, Cimanggis mengalir ke arah daerah Pondok Gede di sisi timur lapangan terbang Halim Perdana Kusumah, dan bergabung dengan sungai Cipinang Muara.
8. Sungai Buaran. Hulu sungai ini terletak di daerah Jatiwaringin, sungai mengalir ke utara menuju daerah Cakung dan saluran Cakung.
9. Sungai Cakung. Hulu sungai Cakung berada di daerah Jatiwaringin, mengalir ke utara ke daerah Pegangsaan Dua, Semper dan bergabung dengan Cakung drain.⁴⁹

Kedua adalah sungai yang berhulu di daerah bergelombang di dalam satuan kipas puing, masuk dalam kelompok sungai ini adalah:

1. Sungai Pesanggrahan. Sungai ini merupakan lanjutan dari sungai Ci Lebakwangi yang berhulu di Ciawi Bogor, mengalir ke arah barat laut menuju Bogor. Di Bogor sungai ini diberi nama Cipakancil. Sungai ini mengalir ke arah utara menuju Citayam. Di daerah ini sungai tersebut bercabang dua, cabang pertama dialirkan ke dalam saluran irigasi dengan nama Kali Baru sedangkan yang aliran asli menuju barat laut menuju Sawangan, Cinere, Kebayoran Lama, Kebun Jeruk dan, Kembangan dan masuk ke Cengkareng drain.
2. Sungai Krukut. Sungai ini merupakan lanjutan dari Cibalok yang bermuara di barat laut Rancamaya Bogor dan di Situ Citayam Depok dengan ketinggian 90 meter dari permukaan laut. Aliran sungai Krukut selanjutnya mengalir ke utara di daerah Cilandak, Kemang, Petogokan dan bergabung dengan sungai Mampang di Kuningan Barat. Sungai Krukut di tengah kota mempunyai anak

⁴⁹ Rudy P Tambunan, *op. cit*, hal 96

Gambar 8: Peta Aliran Sungai Krukut dan Pesanggrahan



Sumber: Kompas; 1 Februari 2005

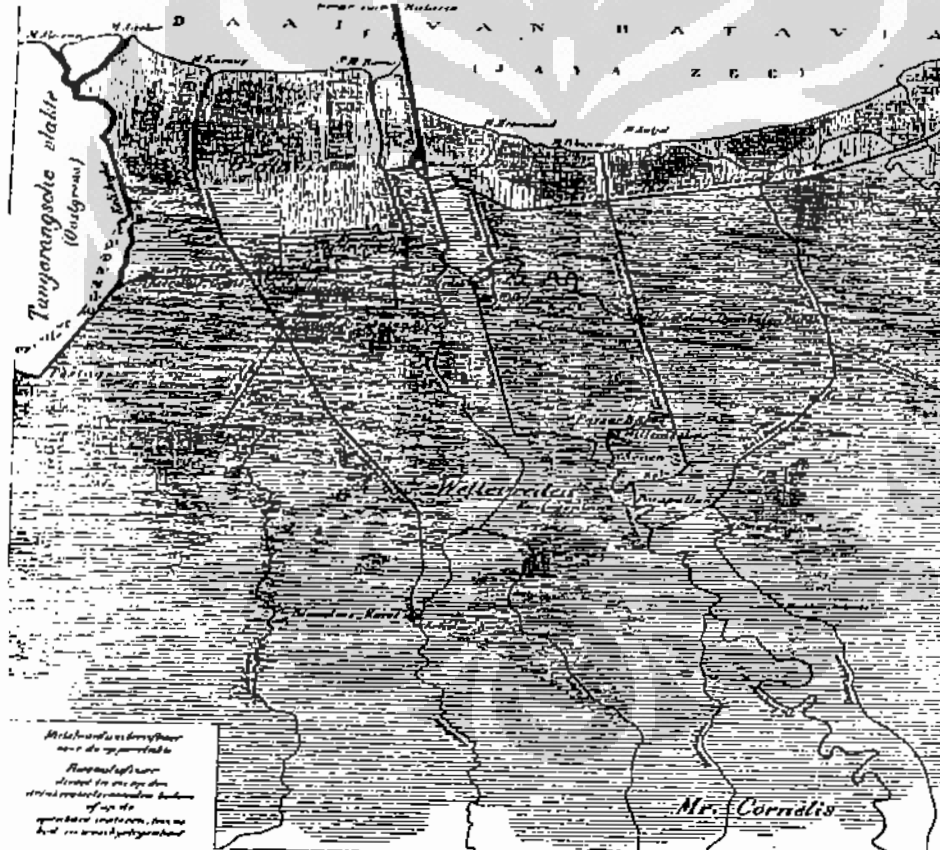
Ketiga adalah kelompok sungai yang berhulu di zona perbukitan di selatan Bogor. Masuk dalam kelompok ini adalah: Sungai Ciliwung. Mata air sungai Ciliwung berada di wilayah pegunungan Gede dan Pangrango dengan ketinggian 1.500 dpl. Hulu sungai berada di perbukitan Mega Mendung. Sungai ini mengalir ke arah barat laut menuju Cipayung, Cibogo, Ciawi, Bogor, Citayam, Depok, Cijantung, Pancoran, Manggarai. Di Manggarai sebagian air sungai Ciliwung membentuk meander menuju daerah Pegangsaan, Kenari, Kwitang.⁵⁰

Sebagai sarana pengairan Ciliwung mampu mengairi sawah seluas 2.000 bahu di Tanjung Barat, 1.000 bahu di Cilodong, 600 di Tapos, 200 bahu di Kranggan, 1600

⁵⁰ Rudy P Tambunan; *op. cit*, hal 96 – 97.

Sebagai sarana pengairan Ciliwung mampu mengairi sawah seluas 2.000 bahu di Tanjung Barat, 1.000 bahu di Cilodong, 600 di Tapos, 200 bahu di Kranggan, 1600 bahu di Kedong Alang, 1000 bahu di Cilebut semuanya berjumlah 6.400 bahu, diperkirakan jumlah itu baru setengahnya karena Ciliwung sebenarnya mampu mengairi dua kali lipat dari jumlah tersebut. Selain itu sungai Ciliwung juga digunakan untuk menggerakkan mesin 7 tuan tanah.⁵¹

Gambar 9: Aliran Sungai dan Kanal-kanal Luar Kota dan Sistem Pengeringannya



Sumber: Herman van Breen; No. 25 tahun 1923

⁵¹ Notulen Bataviasche Landbouw 1908, Bijlagen A

Daerah aliran sungai pada umumnya telah mengalami banyak kerusakan akibat pengembangan wilayah dan cara bercocok tanam, lembah-lembah yang semula merupakan persawahan dapat digunakan sebagai daerah luapan (*retarding basin alam*) banyak yang telah digunakan sebagai tempat permukiman dengan urugan tanah sehingga memperburuk keadaan pada bagian lain, karena jika air sungai disuatu tempat dikekang maka air akan mencari tempat lain yang lebih rendah.⁵²

Selain sungai di Jakarta juga terdapat rawa dan situ⁵³ yang jumlah sekitar 40 buah dengan luas 325.125 hektar. Sebaran situ di Jakarta Selatan terdapat tujuh situ dengan luas 66,35 hektar, Jakarta Pusat terdapat tiga situ seluas 7,4 hektar, Jakarta Utara terdapat 12 situ dengan luas 179,5 hektar Jakarta Barat terdapat dua situ dengan luas lima hektar, dan Jakarta Timur 16 situ seluas 66,87 hektar⁵⁴. Jumlah situ ini telah mengalami penyusutan. Ali Sadikin ketika menjabat gubernur mengatakan bahwa kalau dahulu masih banyak rawa dan sawah yang dihuni kodok yang bergembira bila terjadi genangan air, maka sekarang yang terjadi adalah sebaliknya. Sawah dan rawa itu kini telah berubah menjadi daerah permukiman yang dibangun tanpa memperhitungkan sistem drainase yang baik dan tidak menurut peil banjir sehingga selalu kebanjiran.⁵⁵ Adapun keberadaan rawa dapat dilacak berdasarkan toponim yang ada di Jakarta antara lain Kampung Kerendang di Pekojan. Menurut H Tosim penamaan itu diambil dari kondisi kampung yang selalu tergenang air kalau musim hujan.⁵⁶ Di daerah Kampung Pejagalan Jakarta Barat juga terdapat Kampung Air. Penamaan ini terkait dengan kondisi kampung tersebut yang kalau musim hujan selalu terendam air. Bahkan dalam kondisi musim kemarau pun daerah Kampung Air,

⁵² Wawancara dengan AR. Soehoed tanggal 21 Oktober 2005

⁵³ Rawa adalah tanah rendah yang selalu tergenang air di musim hujan dan biasanya berair sepanjang masa dan paya sedangkan situ atau danau adalah cekungan tanah yang terisi air, kadang-kadang terdapat mata air di daerah tersebut. M.M. Purbo Hadiwidjojo; *op. cit*, hal. 164, lihat juga Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Jakarta: Balai Pustaka; 2002, hal. 935.

⁵⁴ Rudy P Tambunan, *op. cit*, hal 220.

⁵⁵ Sinar Harapan; 7 April 1984

⁵⁶ Dinas Museum dan Sejarah; *Kampung Tua di Jakarta*; Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah DKI, 1993, hal 43.

sumurnya tidak kering.⁵⁷ Di Jakarta Utara di daerah Kampung Tugu terdapat kampung Rawa Gatel berasal dari dua kata yaitu 'rawa' dan 'gatel'. Daerah tersebut pada awalnya adalah daerah rawa yang ditumbuhi oleh tanaman ganggang dan patel lele. Jika orang turun ke rawa badannya terasa gatal-gatal karena tumbuhan air tersebut. Begitu juga Kampung Tanah Merah, sebelum Pertamina mengurug tempat tersebut merupakan daerah rawa-rawa dan sawah⁵⁸. Daerah yang berawa tidak seluruhnya menjadi nama suatu tempat. Misalnya di sekitar Tanah Abang pada awalnya tanahnya merupakan tanah bukit, sedang sekitarnya terdapat daerah rawa-rawa. Keadaan itu berubah mulai abad 18, karena munculnya rumah-rumah mewah yang dibangun orang-orang Cina.⁵⁹ Begitu juga Kampung Angke di Jakarta Barat, pada awalnya mata pencaharian penduduknya adalah bertani, beternak bebek dan ikan karena daerah tersebut merupakan daerah rawa dan sawah⁶⁰. Selain itu masih banyak lagi kampung-kampung yang didahului nama rawa, seperti Kampung Rawa Sari, Rawa Kerbo, Kampung Rawa Puter, Rawa Badung, Rawa Buaya, Kampung Rawa Bahagia, Empang Bahagia, Rawa Bangke, Rawa Kuning, Rawa Bebek, Rawa Gelang, Rawa Mangun, Rawa Terate, Rawa Bunga, Kampung Menteng Rawa Panjang, Rawa Barat dan Rawa Jati.

Di luar Jakarta, situ sangat bermanfaat untuk menampung air sebelum masuk Jakarta. Di daerah dari Bogor sampai Jakarta banyak terdapat situ antara lain situ Kemang yang mengalir ke Kali Angke, Situ Bale Kambang, Situ Lengkong Barang, Situ Iwul, Situ Ciseeng, Situ Jeletreng, Situ Cogrek, Situ Cijujung, Situ Sampora, Situ Cibuntu, Situ Gedong, Situ Cibinong, Situ Cilangkap, Situ Patinggi, Situ Leuwinuuk, Situ Gunung Putri Utara dan Selatan, Talajung Udik dan Hilir, Sanding, Cikeas Hilir, Situ Pamulang, Situ Gintung, Situ Ciledug, Situ Legoso, Situ Rompong, Situ Bungur, Situ Parigi, dan Situ Citayam⁶¹. Keberadaan situ-situ ini sangat penting dalam

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 57

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 24

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 16

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 38

⁶¹ Verslag West Java tahun 1929

penampungan air maupun hulu sungai, misalnya sungai Krukut bermata air di situ Citayam. Situ-situ yang disebutkan di atas hanya sebagian saja, mungkin masih banyak situ-situ yang belum disebutkan karena situnya kapasitas airnya kecil.

2.5 Kanal-kanal Sebelum Abad 20

2.5.1 Kanal di Dalam Kota

Kota Batavia dibangun mengikuti model kota di Belanda dengan banyak kanal yang saling memotong. Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen membangun Batavia (kota lama) dengan menggali tiga kanal tegak lurus di atas Sungai Ciliwung. Penggalan kanal atau parit dimaksudkan untuk membantu pengeringan lahan, terutama pada musim penghujan dan meninggikan permukaan tanah. Dengan demikian rencana kota disesuaikan dengan posisi lahan, karena dibekas reruntuhan kerajaan Jayakarta banyak rawa-rawa. Kanal-kanal digali arah timur-barat sejajar satu sama lain dan bermuara di Ciliwung. Kanal yang pertama dibangun adalah *kasteelgracht*, sekitar tahun 1619. Kanal ini berfungsi sebagai pertahanan dan memisahkan kastil dengan kota Batavia. Wilayah dalam kota Batavia diatur pembagiannya atas sisi barat dan sisi timur Kali Besar. Orang Eropa dan warga lain yang kaya tinggal di sebelah sisi timur Kali Besar sepanjang *Tijgersgracht* dengan rumah mewah, gereja, sekolah, taman dan balaikota. Sisi barat Kali Besar didiami oleh warga Cina dan penduduk sipil non Eropa. Sesudah huru hara 1740 penduduk non Eropa tidak lagi diijinkan tinggal di dalam kota, mereka diharuskan tinggal di kawasan bagian selatan tembok kota berdekatan dengan tempat yang dinamakan Waterplaats kemudian disebut Glodok. Sampai akhir abad ke 18 Batavia yang makmur dan megah memperoleh julukan 'Ratu dari Timur' (*Koningen van het Oosten*)⁶².

⁶² Mona Lohanda; *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*; Jakarta: Jakarta Masup, 2007, hal. 62

Pada tahun 1622 kanal diperlebar dan membelok ke utara di bagian timur bastion Robijn. Setelah itu dibangun tiga kanal lagi yang saling memotong yang diberi nama *Tijgersgracht* (Kanal Macan) membujur panjang dari utara ke selatan, dan dipotong berturut-turut arah selatan oleh parit-parit yang menghubungkan *Tijgersgracht* dengan Kali Besar. Selain itu juga dibangun *Amsterdamgracht* (Parit Amsterdam) dan *Oude Kerkgracht* (Kanal Gereja Lama). Pada tahun 1632 dibuat kanal luar kasteel (*Oosterbuitengracht*) yang dimulai dari bagian tenggara *kasteelgracht* mengarah ke selatan dan bertemu dengan sungai Ciliwung. Sementara itu kanal dalam kota (*Oostenbinnengracht*) bermula dari *Olifantsgracht* terus ke selatan dan berbelok ke barat dan bertemu dengan Sungai Ciliwung (Kali Besar)⁶³.

Kanal-kanal yang memotong arah utara selatan adalah *Oudemarktgracht* kemudian berubah menjadi *Steenhouwersgracht* dan setelah bergabung dengan *Amsterdamsegracht* dan *Olifantsgracht* namanya menjadi *Amsterdamsegracht* pada tahun 1935. Kanal penghubung kedua adalah *Oudekerkgracht*, yang membujur barat – timur terletak di sebelah selatan *Oudemarktgracht*. Kanal ini mengalami beberapa kali perubahan nama pada tahun 1628 bernama *Groenegracht*, tahun 1632 menjadi *Kerkgracht* dan tahun 1635 menjadi *Groenegracht*. Saluran penghubung ketiga adalah *Derde dwarsgracht* yang membujur barat – timur berada di selatan *Oudekerkgracht*, pada tahun 1628 bernama *Leeuwengracht*. Saluran penghubung keempat adalah *Vierde Dwarsgracht* yang berada dekat Bastion Braband. Pada awalnya kanal ini berhubungan dengan *Tijgersgracht* dan membelok ke selatan mengikuti tembok kota dan bertemu dengan sungai Ciliwung melalui *Tayolinsgracht* kemudian berganti nama menjadi *Kaaimansgracht*.⁶⁴

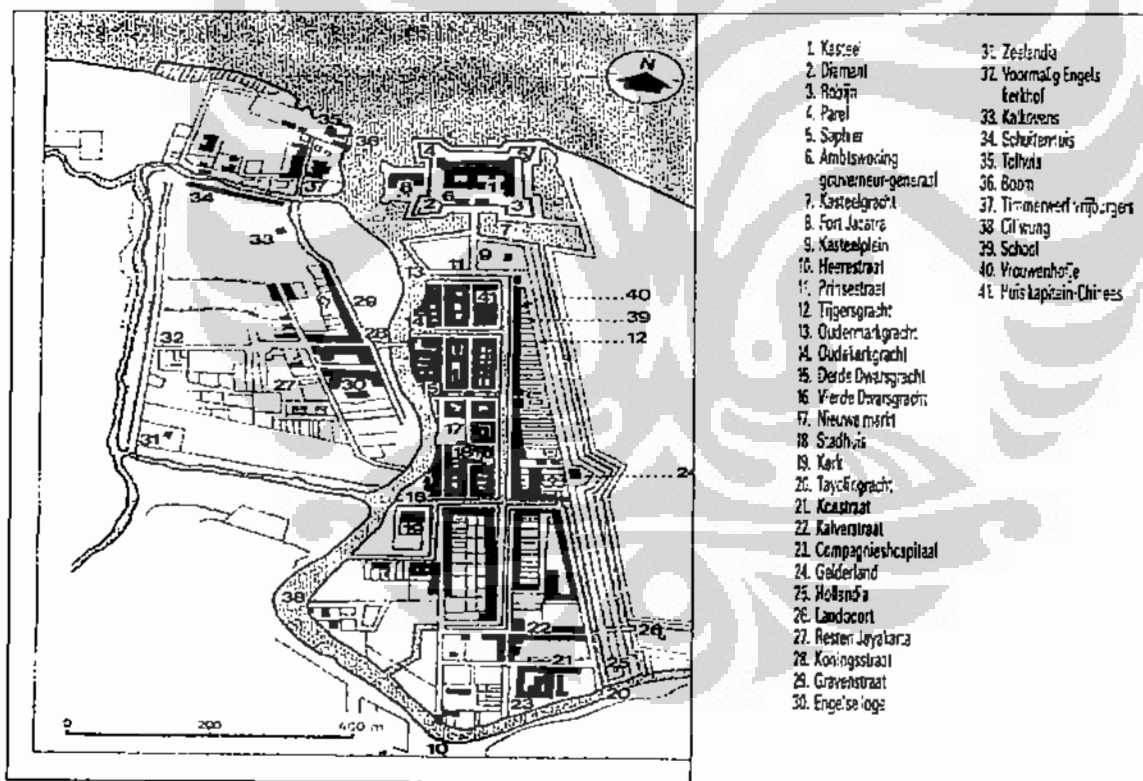
Pada masa Gubernur Jenderal Antonio van Diemen (1635-1645) tembok keliling kota di tepi barat dibangun dan sejumlah kanal digali seperti *Jonkersgracht* (Kanal Jonker) dan *Maleisgracht* (Kanal Melayu). Bangunan-bangunan yang tadinya

⁶³ Abdurrachman Surjomihardjo; *Perkembangan Kota Djakarta*; Jakarta: Dinas Museum dan Sedjarah DCI, 1970, hal 17.

⁶⁴ Abdurrachman Surjomihardjo; *op. cit.*, lampiran Peta 9 – 10.

terbuat dari kayu atau bambu diganti dengan batu. Di tepi timur digali *Bandaaneesegracht* (Kanal Banda) dan *Malabaarsegracht* (Kanal Malabar), sedangkan di sebelah timur kastil digali kanal mulai dari Kalibesar (Ciliwung) sampai gerbang air (*Waterpoort*), karena melebarnya garis pantai oleh endapan lumpur sungai, van Diemen melarang penduduk membangun atau memperbaiki rumah-rumah bambu, terkecuali jika rumah tersebut berjarak 24 kaki dari rumah batu. Untuk mendorong supaya penduduk membangun rumah dari batu, pemerintah memberi pinjaman uang dengan imbalan bunga setengah real.⁶⁵

Gambar 10: Batavia Pada Tahun 1627 dengan Kanal-kanalnya



Sumber: JR. Van Diesen; Jakarta/Batavia; hal 35

⁶⁵ Real adalah mata uang yang dipakai pada masa itu. Nama kampung 'Tanah Sereal' (di Jakbar), yang berarti untuk melewati jalan tol (berupa kanal) harus membayar sereal, tetapi ada juga yang mengatakan tanah sereal, terkait dengan harga tanah. Di Tanah Sereal dulu dibeli dengan harga 1 real.

2.5.2 Kanal-kanal di Luar Kota

Pembangunan kanal luar kota untuk menggiatkan penanaman tebu di daerah *Ommelanden* (daerah sekitar). Orang-orang Cina mendapat prioritas dalam penanaman tebu. Bahkan VOC menjanjikan harga beli yang menguntungkan bagi tanaman tebu. Untuk program penanaman tebu, akhirnya hutan-hutan banyak ditebang. Karena terjadi surplus produksi tebu, harga gula jatuh. Kejatuhan harga tebu, berakibat ditinggalkannya daerah perkebunan tebu, sehingga daerah ini menjadi terbengkelai. Perbuatan ini berakibat pada rusaknya ekologi lingkungan sekitar kota dan terjadi pencemaran air yang mengalir melalui jalur-jalur kanal luar kota dan masuk ke jalur kanal dalam kota. Sungai Ciliwung dan Cisadane telah terjadi polusi akibat aktifitas pabrik tebu.⁶⁶

Pembukaan lahan pertanian diikuti dengan pembuatan saluran untuk transportasi. Untuk meningkatkan hubungan dengan luar kota, pemerintah membangun kanal ke arah timur kota. Pada 1647 Jenderal Francisco Caron dan Fariiek Silvenagel menggali kanal di sebelah timur kota yang kemudian disebut Kanal Ancol (*Antjolvevaart*). Kanal ini dimulai dari *Oosterbuitengracht* di dekat bastion Rotterdam ke arah timur sampai Kali Ancol. Saluran ini berfungsi untuk menghubungkan kota Batavia dengan Kali Ancol.⁶⁷

Masih jalur ke arah timur kota, pada tahun 1667, dibuat saluran *Sontarsevaart* (Kanal Sunter) yang dibuat oleh Pieter Anthonijs Overwater. Saluran ini berfungsi untuk menghubungkan Sungai Sunter dengan *verburchsgracht* dan berhubungan dengan *Antjolvevaart*. Kanal Sunter posisinya berada di sebelah selatan Kanal Ancol.⁶⁸

Jalur penghubung antara kota dengan bagian selatan yang paling penting adalah Molenvliet. Molenvliet dibuat tahun 1648 atas permintaan Poa Bingam. Saluran ini diperuntukkan bagi pengangkutan hasil hutan dari bagian selatan.

⁶⁶ Leonard Blusse, *Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan Belanda di Batavia VOC*; Jakarta: Pustaka Perkasa, 1987, hal. 41

⁶⁷ De Haan, *Oud Batavia*; Bandung; 1922, hal. 133

⁶⁸ *Ibid.*, hal 260.

Selanjutnya sisi saluran ini menjadi jalur yang paling diminati penduduk. Saluran ini kemudian dinamakan *Bingamvaart*, baru pada tahun 1661 diganti namanya menjadi Molenvliet. Molenvliet dimulai dari Nieuwpoort (daerah Glodok/depan Hotel Jayakarta) terus ke Selatan dekat benteng Rijswijk dan membagi alirannya ke arah timur hingga sungai Ciliwung dan ke arah barat hingga sungai Krukut. Tepat di sebelah tenggara Benteng Rijswijk (Harmoni) saluran berbelok ke timur (sekarang diapit Jln. Ir. Juanda dan Jln. Veteran) dan membelok ke selatan bertemu dengan sungai Ciliwung (dekat masjid Istiqlal). Pada tahun 1681 Sungai Ciliwung dialihkan alirannya, kearah timur sepanjang Postweg (Jalan Pos), kemudian ke utara melalui dataran jalan Pasar Baru hingga bertemu dengan jalur lama di sekitar Krekot Sentiong. Kanal ini dikenal sebagai Kanal Gunung Sahari. Kanal ini dilengkapi dengan empat pintu air selebar 3,50 meter. Pengaliran kanal Gunung Sahari berkaitan dengan aktifitas pasang surut air laut. Lebar kanal kira-kira 15 meter pada awalnya dirancang untuk 25 meter dengan tanggul tiga meter kali dua meter⁶⁹. Karena daerah Noordwijk sering mengalami banjir, saluran pengalihan di Pasar Baru dibuatkan sebuah pintu yang disebut *schutsluis* Noordwijk kemudian diubah menjadi *Willemsluis*⁷⁰. Molenvliet diperpanjang kearah selatan barat daya hingga Kali Krukut diberi nama *Bingamsgracht*. Saluran tersebut berada di sebelah timur *Rijswijkstraat* dan Tanah Abang.

Gubernur Jenderal Jacob Mossel untuk menghubungkan vila mewah yang dibangun di tepi tikungan sungai Ciliwung (kini RSPAD Gatot Subroto-Senen) menggali saluran yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Kali Lio mengalir ke Kanal Gunung Sahari. Kali Lio, terletak dari rumah Panglima Angkatan Darat melintasi perkampungan militer Senen sepanjang taman Du Bus menuju *Schoolweg*

⁶⁹ Gemeenteraad van Batavia Gedrukte Stukken Jaar 1911, No. 87, dalam MGS/BGS; 12 Pebruari 1912, No. 31

⁷⁰ Kanal yang masuk ke jalan Veteran sampai Gajah Mada berfungsi sebagai saluran penggelontoran. Pada musim hujan biasanya pintu air di jalan Pintu Air ditutup alirannya yang mengarah ke Pasar Baru sehingga air masuk ke jalan Veteran/Juanda. Pada musim hujan, pada waktu banjir, pintu air Willemsluis ini ditutup sebab akan berakibat banjir di daerah Kali Pasir, Cikini dan Menteng, maka pintu air ini tetap dibuka penuh ke Pasar Baru dan Ancol terus ke laut, lihat *Sinar Harapan*; 7 April 1984

dan bergabung kembali dengan Cabang Ciliwung di Gunung Sahari. Pintu keluar saluran yang hanya 2,30 meter mengakibatkan saluran air tidak lancar sehingga kampung-kampung sekitarnya menjadi kebanjiran. Kali Lio merupakan saluran penggelontoran. Kali Lio, yang dulu dilalui perahu-perahu pedagang, kini menjadi got besar.⁷¹

Di sebelah atas dari Kali Lio, terdapat Kanal Prapatan. Kanal ini menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Kali Baru yang kemudian menyambung dengan Sungai Sunter. Kini terusan ini masih terlihat sebagian sisanya berubah menjadi Jln. Kramat Bunder ke barat Jln. Prapatan dan Jln. Kwitang bertemu dengan Sungai Ciliwung. Kanal ini tidak begitu penting bagi penyaluran banjir. Saluran ini lebih digunakan sebagai saluran keluar dari kampung Prapatan, Kwitang dan Pasar Senin. Kanal ini juga digunakan untuk mengalirkan air irigasi ke Kali Baru dan Sunter. Di kanal ini sampai Tanjung Priok dilengkapi dengan 4 pintu di antaranya di Kemayoran.⁷²

Di daerah luar kota bagian barat, pada tahun 1647, Johannes Ammanus menggali saluran dari *Westerbuitengracht*, dekat Bastion Utrecht sampai bertemu Kali Angke. Saluran ini sebagai pengangkutan ke laut melalui Kali Angke. Ammanus Johannes berhak untuk memungut pajak selama 20 tahun atas saluran ini. Saluran ini kemudian dinamakan *Ammanusgracht*. *Ammanusgracht* disebut juga saluran Bandengan bermula dari saluran Penjaringan ke arah barat hingga ke sungai Grogol dilanjutkan hingga Sungai Krukut dan kanal banjir. Pada tahun 1653 – 1659, Jacob Bacheracht membuat saluran sejajar dengan *Ammanusgracht* di sebelah selatan. Saluran ini digali dari Sungai Angke yang pada bagian baratnya terdapat penggilingan gula, berseberangan dengan Bastion Zeelandia dan bermuara di kali Grogol. Saluran ini diberi nama *Bacherachtgracht*. *Bacherachtsgracht* di sebut juga saluran Patekoan,

⁷¹ Republika; 15 Februari 2007

⁷² Gemeenteraad van Batavia Gedrukte Stukken Jaar 1911, No. 87, dalam MGS/BGS; 12 Pebruari 1912, No. 31

terletak sejajar dengan Jln. Pangeran Tubagus Angke terus ke barat hingga bertemu dengan sungai Krukut dan kanal banjir.⁷³

Sebagai penghubung antara kota Batavia dengan Tangerang dibuat saluran *Groningensvaart* (saluran Pluit) yang berawal dari *Westerbuitengracht* ke arah Pluit dan Muara Pegantungan. *Groningensvaart* sekarang sudah tidak ada, tetapi saluran ini berada paling utara dari bagian barat kota Batavia, diperkirakan lokasinya di daerah jalan Pluit.⁷⁴

Pada tahun 1682 seorang tuan tanah di Tangerang Vincent van Mooock mulai membangun suatu terusan dari sungai Cisadane ke sungai Angke. Pembangunan terusan pada tahap awal dengan lebar tujuh meter tersebut selesai pada tahun 1687. Kanal ini kemudian dinamakan Mookervaart. Pembuatan kanal ini untuk saluran transportasi air untuk memudahkan pengangkutan bahan-bahan bangunan dan kayu bakar dari Tangerang ke Batavia. Air dari sungai Cisadane diperkirakan dapat juga membantu penggelontoran bagi terusan-terusan di kota Batavia bagian hilir. Sebagai imbalan atas usahanya, van Mooock mendapat hak dari pemerintah Batavia menarik uang kepada tuan tanah di daerah Tangerang selama beberapa tahun dan kapal-kapal yang melewati kanal tersebut. Ternyata setelah beberapa tahun, saluran Mookervart tidak dapat dilayari karena mutu air yang masuk ke dalam kota semakin kotor. Tetapi kalau musim hujan, air dari Cisadane masih tetap bisa masuk ke saluran sehingga mengakibatkan banjir di Batavia. Melihat kondisi itu 50 tahun kemudian tahun 1732, Gubernur Jenderal Diederik Durven memerintahkan penggalian Mookervaart untuk mengatur pemasokan air ke dalam kota lebih baik. Penggalian ini berhasil menaikkan muka air. Namun penduduk di tempat-tempat pelimpahan itu merasa amat dirugikan dan menuntut perbaikan. Sebagai tanggapan atas tuntutan itu pada tahun 1738, penduduk setempat yang sebagian besar keturunan Tionghoa diijinkan untuk menutup tempat-tempat pelimpahan itu atas biaya sendiri. Tetapi penggalian saluran ini telah menimbulkan wabah penyakit dan kematian di kalangan kuli Jawa penggali tanah

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ *De Haan, op. cit.*

serta penduduk di sekitarnya. Karena endapan sungai dari *Ommelanden* semakin banyak sebagai akibat erosi sehingga menumpuk di sepanjang jaringan saluran di seluruh kota Batavia, dan menjadi satu dengan tinja serta sampah pembuangan penduduk. Apa yang dinamakan *modder javanen* (Jawa lumpur) yang datang sekali setahun dari Cirebon untuk mengangkat lumpur yang tertimbun di saluran-saluran di Batavia itu, pada akhirnya merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Bahkan para kuli tanah itu banyak yang meninggal. Karena Mookervart juga mendapat pasokan dari sungai-sungai di sekitarnya, maka sungai-sungai tersebut melumpur di muaranya masing-masing dekat laut. Rawa-rawa genangan air mandek menjadi sarang nyamuk dan menjadi penyebab endemi malaria yang menyebabkan kematian bagi penduduk.⁷⁵

Pada tahun 1744 pemerintah pusat melakukan pemeriksaan dan ternyata keadaan terusan Mookervaart masih tetap memprihatinkan. Untuk itu direncanakan untuk membuat tiga buah pintu air kapal (*schutsluis*) di terusan Mookervaart untuk mengatasi perbedaan tinggi air antara sungai Cisadane dan sungai Angke agar kapal bisa lewat. Gagasan ini tidak pernah dilaksanakan. Akhirnya pada tahun 1762 diputuskan untuk menutup gerbang terusan Mookervaart di sungai Cisadane dan menggantikannya dengan satu pintu air yang lebih kuat dari pasangan batu. Pelaksanaan gagasan ini cukup baik tetapi pintu ini belum memenuhi harapan karena banjir masih tetap mengancam Batavia. Akhirnya pada 1764 gerbang lama dapat ditutup dan barulah bahaya banjir melalui terusan Mookervaart sudah dapat diatasi. Tetapi masalah lain muncul karena pada musim kemarau tidak tersedia cukup air bagi Batavia. Pada tahun 1768 muncul gagasan untuk membuat satu pintu air di lokasi gerbang lama yang dapat mengatur arus air dari Cisadane ke Terusan Mookervaart dan dapat memudahkan masuknya kapal-kapal dari Cisadane ke terusan Mookervaart dan dapat memudahkan masuknya kapal-kapal atau perahu. Perbaikan pintu air dilaksanakan pada tahun 1779 dengan menghabiskan biaya 137.000 ringgit dari

⁷⁵ Leonard Blusse, *op. cit.*, hal 52

anggaran yang disediakan hanya 31.700 ringgit satu peningkatan biaya sebesar 330%. Konstruksi ini bisa bertahan selama 45 tahun, pada tahun 1825 terjadi longsoran-longsor, selain itu lebar alur terusan yang direncanakan 5 – 7 meter dengan panjang 14 kilometer banyak terjadi pengikisan di sepanjang terusan, sehingga banjir dari sebelah barat Batavia masih tetap mengancam. Perbaikan dilanjutkan pada tahun 1930.⁷⁶

Gambar 11: Kanal-Kanal di Luar Kota



Sumber: JR. Van Diesen; Jakarta/Batavia; hal. 48

2.6 Bendung Katulampa, Westerslokkan dan Oosterslokkan

Hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan banjir di Jakarta adalah adanya Bendung Katulampa. Selama ini ketika banjir melanda Jakarta, maka debit air di bendung Katulampa sering digunakan sebagai acuan. Bendung Katulampa keberadaannya sangat penting pada saat ini sebagai pos pemantau banjir. Pada musim

⁷⁶ AR. Soehoed, *op. cit*, hal. 32

hujan penjaga pintu Katulampa harus siap 24 jam. Untuk memudahkan sistem kerja para penjaga maka jika air bendung Katulampa menunjukkan tinggi air > 310 ditetapkan siaga I dengan pemberitaan setiap setengah jam sekali ke petugas penjaga pintu air Depok, siaga II ketinggian air > 240 sampai 310 centimeter pemberitaan satu jam sekali, siaga tiga tinggi > 170 centimeter sampai 240 centimeter pemberitaan tiga jam sekali.⁷⁷

Bendung Katulampa yang berada di aliran sungai Ciliwung merupakan bangunan peninggi air (*weir*) yang gunanya untuk pengambilan air untuk irigasi yang dialirkan ke *Oosterslokan* (selokan timur) dan untuk penggelontoran air bagi kota Bogor, Depok dan Batavia.⁷⁸

Pada tahun 1739 pemerintah kolonial telah mengeluarkan ijin pembuatan *Oosterslokan* yang berfungsi untuk pengairan dan pengangkutan barang dari pedalaman. Pembukaan saluran dimulai pada tahun 1739 atas usul Gubernur Jenderal van Imhoff dan selesai tahun 1753. *Oosterslokan* mencakup pengairan di Ciawi dan Onderdistrik Kedung Halang. Di aliran *Oosterslokan* terdapat tiga pintu air di daerah hulu air yaitu di Ratim untuk mengairi sawah seluas 273 bahu, Cibalok seluas 328 bahu, dan Cibanon menggenangi 1.023 bahu. Upaya untuk mengefektifkan aliran *Oosterslokan* sebagai sarana pengangkutan barang mengalami hambatan karena banyak memerlukan pintu air, akhirnya upaya ini dihentikan. Untuk menaikkan pasokan air ke *Oosterslokan* Gubernur van Imhoff memerintahkan pembuatan Bendung Katulampa pada tahun 1749 yang terletak sekitar 4 paal dari Buitenzorg⁷⁹. Karena Bendung Katulampa dibangun dari material sementara, maka ketika diterjang banjir, bendung mengalami kerusakan akibatnya lahan yang diairi *Oosterslokan* mengalami kekeringan, selain itu pasokan air ke Meester Cornelis mengalami kekurangan. Setelah itu pada tahun 1753 saluran *Oosterslokan* diperpanjang sampai

⁷⁷ Wawancara dengan Andi Sudirman (Penjaga Pintu air Katulampa)

⁷⁸ Laporan Kali Brasi Bendung Ciliwung Katulampa, UPTD, Balai Pendardayaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

⁷⁹ Prof. Ir. H Van Breen; *Verbetering van den Waterstaat van de Hoofdplaats Batavia; Eerste Gedcelte; dalam De Ingenieur No. 25 tahun 1923, hal. 484*

ke kanal timur di Weltevreden bergabung dengan kanal Prapatan dengan nama Kali Baru. Pada awalnya *Oosterslokkan* akan digunakan sebagai kanal pelayaran, tetapi karena kerusakan pada kanal yang mengalami kebocoran yang sulit diatasi air *Oosterslokkan* akhirnya hanya digunakan sebagai pertanian. *Oosterslokkan* digunakan untuk mengairi sawah seluas 9.705 bahu di tanah-tanah partikelir aliran sebelah timur Sungai Ciliwung dan untuk menggenangi Meester Cornelis dan Batavia⁸⁰.

Perawatan Bendung Katulampa setiap tahun menghabiskan dana f 700, sehingga karena sering mengalami kerusakan perlu dibuat bendung yang lebih permanen. Biaya perawatan yang dikeluarkan dengan kondisi bendung yang tidak permanen sangat tidak seimbang dengan hasil yang diharapkan.

Tabel 5: Perawatan Bendung Katulampa tahun 1895 – 1910

| Tahun | Dana (f) |
|-------|----------|
| 1895 | 1.980 |
| 1896 | 1.808 |
| 1898 | 1.910 |
| 1899 | 4.295 |
| 1905 | 2.252 |
| 1907 | 4.929 |
| 1910 | 1.800 |

Sumber: *Burgelijke Openbare Werken*; 10 April 1911; No. 1

Kerusakan bendung Katulampa setiap tahun menunjukkan semakin parah, karena penggundulan hutan di pedalaman terus meningkat sehingga arus air yang masuk ke Ciliwung semakin besar. Hal ini berpengaruh terhadap daya tahan Bendung Katulampa. Penyediaan air yang sangat terbatas bagi Batavia dan Meester Cornelis, maka pada 10 April 1911, *Burgelijke Openbare Werken* (BOW) mengajukan biaya pembangunan permanen terhadap Bendung Katulampa dengan menggunakan pintu air di Ciliwung. BOW dalam usulannya untuk membangun bendung air biaya yang

⁸⁰ Verslag West Java 1929 hal. 160

diperlukan sebesar f 66.200. Pembangunan bendungan menggunakan pemlesteran dengan menggunakan semen. Berdasarkan harga yang diperhitungkan harga semen per karung f 4,80. Biaya untuk pembangunan pintu air dan bendung air berjumlah f 82.000.⁸¹ Sebelumnya pada tahun 1901, Bendung Katulampa, Cibalok, *Westerslokker* dan *Oosterslokker* pernah mengalami perbaikan dengan biaya perawatan sebesar f 20.000⁸². Berdasarkan surat yang diajukan oleh BOW, pemerintah memutuskan untuk membangun bendungan permanen Katulampa pada 13 April 1911, dengan biaya f 66.090 berupa uang dan f 150 berupa barang.⁸³

Kesulitan dalam pembuatan pengaliran air di *Oosterslokker* maka Van Imhoof pada tahun 1776, mengusulkan untuk menggali sebuah kanal di bawah Bogor yang diambil dari Sungai Cisadane untuk dialirkan ke Sungai Ciliwung. Kanal ini kemudian dikenal sebagai *Westerslokker* yang menghubungkan Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung yang terletak di sebelah utara Bogor. Aliran *Westerslokker* bisa menyambung dengan Sungai Ciliwung di Pegangsaan, pada tahun 1854. *Westerslokker* mengalir lahan persawahan dan perkebunan antara sungai Ciliwung dan sungai Pesanggrahan⁸⁴. *Westerslokker* yang menyambung dengan sungai Ciliwung, sangat penting untuk pengairan persawahan. Dari hulu, *Westerslokker* mengairi persawahan di Cilebut, Citayam, Depok, Pondok Cina, Tanjung Barat, dan Pondok Labu. Pengairan *Westerslokker* telah meningkatkan hasil padi perbahu antara 15 – 35 pikul. Sementara itu *Oosterslokker* mengairi persawahan Cibinong, Tapos, Cilangkap, Cimanggis, Cilodong, Tanjung Timur, Kampung Makasar, Cililitan, Cawang, Kemayoran, Gedong Rubuh, dan Kelapa Gading. Hasil padi di daerah ini berkisar antara 15 pikul sampai 30 pikul perbahu⁸⁵. *Westerslokker* kini masih dimanfaatkan untuk pengairan, namanya diganti dengan saluran Minangkabau, namun

⁸¹ Burgelijke van Openbare Werken; tanggal 10 April 1911, No. 1

⁸² Burgelijke van Openbare Werken; tanggal 14 Maret 1901, No. 4

⁸³ Besluit van Nederlandsch Indie; 13 April 1911, No. 8

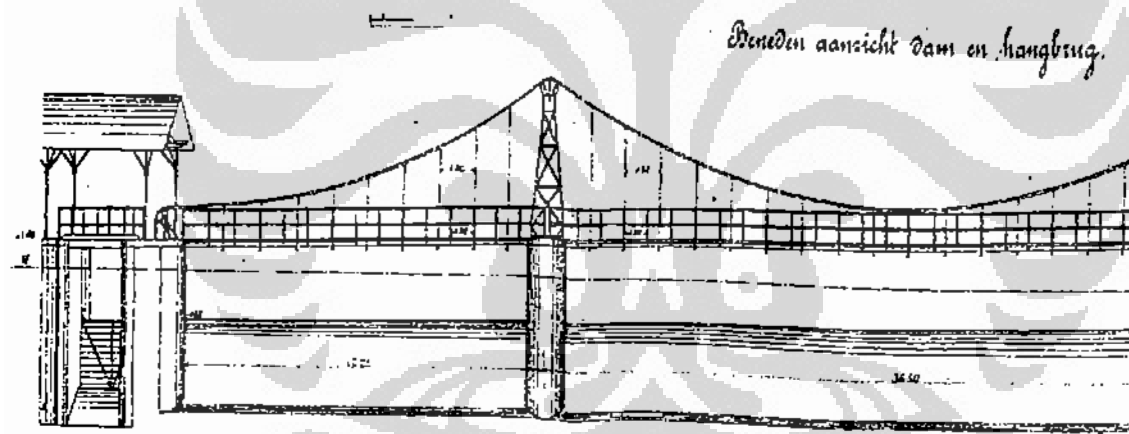
⁸⁴ MGS/BGS; 12 Februari 1912, No. 31

⁸⁵ Verslag West Java, 1929, hal 174

bagian yang berhubungan dengan Sungai Ciliwung sudah ditutup karena adanya kanal banjir.⁸⁶

Untuk memasok air di Batavia juga digunakan aliran sungai Ciliwung dengan membuat Bendung Cibalok dekat Gadok yang dibuka tahun 1803. Bendung ini berada 450 meter di atas permukaan laut. Aliran air dari Bendung Cibalok mengalir menuju Bogor untuk mengairi sawah dan perkebunan di bagian utara dan timur dari *onderdistrik* Blubur. Di *onderdistrik* Blubur terjadi alih fungsi lahan dari hutan menjadi kebun teh sehingga sumber air Ciliwung untuk pengairan di daerah Cisarua sangat penting.⁸⁷

Gambar 12: Bagian Atas Bendung Katulampa Menurut Rencana 1912

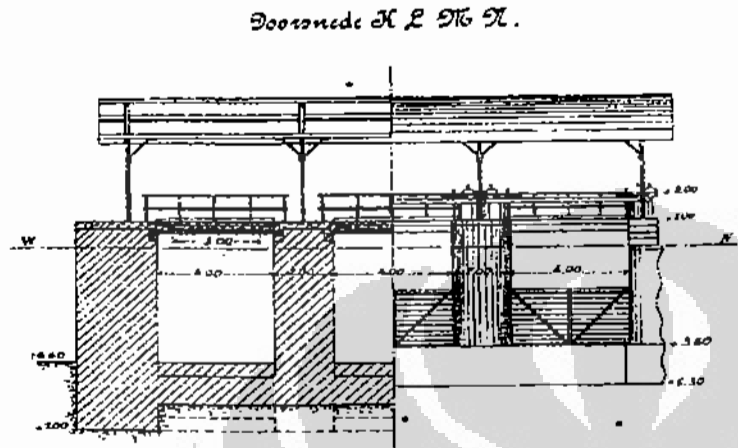


Bendung Katulampa dengan rencana pembuatan jembatan di atas Bendung

⁸⁶ MGS/BGS, *op. cit.*

⁸⁷ *Onderzoek Naar de Mindere Welvaart Der Inlandshe Bevolking op Java en Madoera VII Overzicht van de Uitkomsten Der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Irrigatie en Daaruit Gemaakte Gvolgtrekkingen*; Weltevreden, 1910, hal 141.

Gambar 13: Pengatur Pintu Air ke *Oosterslokkan* di Bendung Katulampa



Sumber: *Verlag Over de BOW 1912*

Faktor geografi yang disampaikan di atas merupakan faktor yang perubahannya sangat lambat jika campur tangan manusia sedikit. Penggunaan teknologi secara besar-besaran telah berhasil mempercepat perubahan bentang alam. Perluasan dan persebaran lokasi banjir erat kaitannya dengan perubahan bentang alam ini. Terutama dalam kaitannya dengan perubahan penggunaan tanah basah (*wet land*) dan tanah yang tidak cocok (*unavailable*) sebagai tempat hunian ataupun industri. Pembangunan fisik merupakan penciptaan bentang alam baru dan secara cepat mengubah bentang alam aslinya. Hal ini akan mempengaruhi pola aliran, energi, dan material yang ada di sungai. Sehingga perubahan permukaan *flood plain* atau pemisahan alur sungai akan mengakibatkan kerugian di tempat lain. Demikian pula dengan *meander* sungai yang dibentuk oleh gaya-gaya sentrifugal dan sentripetal sebagai upaya sungai untuk mencari keseimbangan pengaliran air sangat peka terhadap gangguan dari luar.

Di Jakarta, perubahan secara cepat tidak hanya di kawasan yang memang layak bangun (*available*) tetapi juga terjadi di lokasi-lokasi yang digolongkan sebagai satuan

geologi lingkungan 1. Satuan geologi ini meliputi wilayah di sepanjang pematang pantai dengan tipologi bentang alam berbentuk jalur-jalur pematang yang sejajar dengan garis pantai dengan permukaan yang relatif datar. Wilayah ini dibentuk oleh endapan pasir berbutir halus dan kasar serta lempung berpasir. Kedua adalah satuan geologi lingkungan 2 yang meliputi wilayah sebaran endapan sungai yang dibentuk oleh pasir lempung, pasir dan kerikil yang bersifat lepas sehingga memiliki tingkat kelulusan yang relatif tinggi. Ketiga adalah satuan geologi lingkungan 3 yaitu wilayah dataran pantai pada elevasi antara nol sampai dua meter di atas permukaan laut. Daerah ini dibentuk oleh endapan banjir dan rawa berupa lempung berpasir yang lunak berwarna abu-abu kehitam-hitaman. Dari satuan geologi tersebut meliputi kawasan Penjaringan, termasuk dalam wilayah ini adalah kawasan Pantai Indah Kapuk, Pluit dan Teluk Gong. Wilayah ini merupakan kawasan rawa pantai utara Jakarta, sehingga merupakan kawasan *wet land*. Kedua kawasan Cengkareng yang meliputi Duri Kosambi, Cengkareng Timur, Kedaung Kali Angke dan Kembangan Selatan; daerah ini pada awalnya adalah daerah persawahan yang merupakan dataran banjir sungai Semanan yang bermuara ke Saluran Mookervart, sedangkan Kembangan Selatan merupakan dataran Sungai Angke, sehingga kawasan ini termasuk *unavailable* untuk permukiman. Ketiga adalah kawasan Tanjung Priok terutama kawasan Swasembada dan Kebun Bawang merupakan daerah yang sangat datar yang digunakan sebagai tanah persawahan; Keempat adalah kawasan Kelapa Gading merupakan kawasan *wet land* dan persawahan. Kelima adalah Kawasan Mampang yang meliputi kawasan Kuningan dan Pondok Jaya Mampang. Daerah ini adalah daerah persawahan yang memanjang arah Tenggara dan Barat laut sejajar dengan Sungai Krukut. Sehingga kawasan ini adalah *unavailable* karena merupakan *flood plain area* Sungai Krukut yang selalu tergenang pada waktu banjir.⁸⁸

Pembangunan yang dilaksanakan di Jakarta telah mengubah secara cepat ekosistem alami berubah menjadi ekosistem buatan. Hal ini meningkat pesat mulai

⁸⁸ Rudy P Tambunan; *op. cit.*, hal 222

tahun 1970. Luas kawasan tanah basah (*wet land*) dan badan air di Jakarta Utara pada tahun 1970 adalah 2.620,22 hektar. Pada tahun 1980, kawasan *wet land* berkurang menjadi 2.343,55 hektar dan pada tahun 1990 lahan tersebut berkurang lagi tinggal 698,23 hektar.⁸⁹ Pengurangan luas tanah basah yang sesungguhnya *unavailable* untuk penggunaan bangunan karena berfungsi sebagai ‘rumah air’ pada musim hujan mengakibatkan menyusutnya luas dan jumlah lokasi tampungan air (*water retention*) pada waktu banjir sedangkan pengurangan luas penggunaan tanah pertanian dan ruang terbuka mengakibatkan menurunnya kemampuan peresapan atau infiltrasi air ke tanah.



⁸⁹ Rudy P Tambunan; *op. cit.*, hal.95

Bab III

Perkembangan Spasial dan Perebutan Ruang Kota

Permulaan abad ke-16 hanya ada enam kota di Eropa yang berpenduduk diatas 10.000 yaitu Konstantinopel, Paris, Naples, Venice, Milan dan Lisabon¹. *Village* dapat berkembang menjadi *town* dengan ciri terdapat pusat pemerintahan dan lembaga yang lebih tegas, formal dan jelas batasnya. *Town* berkembang menjadi *city* selain terdapat pusat pemerintahan yang lebih formal, kepadatan bangunan dan penduduknya juga lebih rapat. Di dalam kota ini kebutuhan tersier akan tampak seperti kesenian, hiburan yang bersifat rutin, tempat rekreasi, pusat perbelanjaan. Apabila kota berpenduduk mendekati 5.000.000 jiwa disebut kota metropolitan. Metropolitan berasal dari kata *metera* yang berarti ibu (induk) dan *polis* (kota). Jadi metropolitan berarti kota induk bagi kota-kota di sekitarnya. Penduduk kota di sekitarnya biasanya memiliki hubungan tertentu dengan kota metropolitan, seperti yang berkaitan dengan pekerjaan atau kebutuhan hidup sehari-hari lainnya, sehingga terjadi arus ulang alik (*commuter*) antara penduduk kota di sekitarnya dengan kota induk atau sebaliknya². Jadi kalau dilihat dari ukuran jumlah penduduk, Jakarta menjadi kota metropolitan sekitar tahun 1970-an dengan jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa.

¹ Ir. D. Sinulingga, M.Si; *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal*; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal. 15.

²Kota disebut sebagai *very small town* dengan jumlah penduduk antara 10.000 sampai 50.000 jiwa, *small town* jumlah penduduknya antara 50.000 sampai 100.000 jiwa, *town* jumlah penduduknya berkisar 100.000 – 200.000 jiwa. *City* jumlah penduduknya antara 200.000 – 500.000 jiwa, *big city* berpenduduk antara 500.000 sampai 1.000.000 jiwa. Apabila lebih kompleks lagi kebutuhan dan permasalahan suatu kota dan diikuti dengan jumlah penduduk yang lebih dari 10.000.000 jiwa maka kota tersebut disebut *megapolitan*; lihat Paulus Hariyono, *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*; Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal. 86 – 87.

3.1 Awal Sebuah Peradaban di Tanah Datar

Masyarakat pertama yang teratur dan bertempat tinggal tetap di wilayah Jakarta adalah penduduk kerajaan Taruma Negara. Nama kerajaan disebutkan pada sebuah batu tulis yang terdapat di sungai Ciaruteun dekat Bogor, sedangkan nama Purnawarwan disebutkan di batu tulis yang ditemukan di Tugu dekat Tanjung Priuk. Batu Tulis Tugu memuat berita tentang penggalian sebuah kali yang permai dan berair jernih. Pekerjaan penggalian diadakan dalam waktu 21 hari dan dilakukan oleh Brahmana, yang diberi hadiah 1.000 ekor sapi. Pekerjaan ini dilaksanakan pada tahun ke-22 tahta raja Purnawarman. Jadi raja dan penduduknya telah lebih lama menetap di daerah ini. Penggalian sungai itu tentu bermaksud untuk mengairi sawah dan menahan banjir, sebuah usaha untuk kesejahteraan umum.³

Berdasarkan bentuk huruf dan bahasa yang terdapat di batu tulis, diperkirakan kerajaan Taruma Negara telah ada pada abad ke 5 Masehi atau kira-kira 4.000 tahun setelah terjadinya dataran 'endapan puing berkipas' Jakarta. Letak kerajaan Tarumanegara dibatasi oleh Sungai Citarum di sebelah timur, sungai Cisadane di sebelah barat, sebelah selatan daerahnya sampai sungai Ciaruteun. Di daerah ini mengalir sungai-sungai lainnya yang penting seperti sungai Ciliwung dan Bekasi.⁴

Perkembangan selanjutnya dari permukiman di wilayah dataran rendah ini adalah pelabuhan Sunda Kelapa. Berdasarkan peta yang dibuat pada akhir abad 16 dapat diketahui bahwa Sunda Kelapa memiliki pelabuhan yang tidak persis berada di tepi pantai (*open sea port*) tetapi masuk muara sungai Ciliwung. Sungai ini memungkinkan untuk dimasuki 10 buah kapal dagang yang mempunyai kapasitas 100 ton. Air sungai Ciliwung mengalir bebas tidak berlumpur dan tenang⁵.

Mengenai letak Sunda Kelapa dapat ditelusuri dari hubungan persabahatan antara d'Albuquerque yang mengutus Henrick Leme pada tahun 1522 dengan Sang

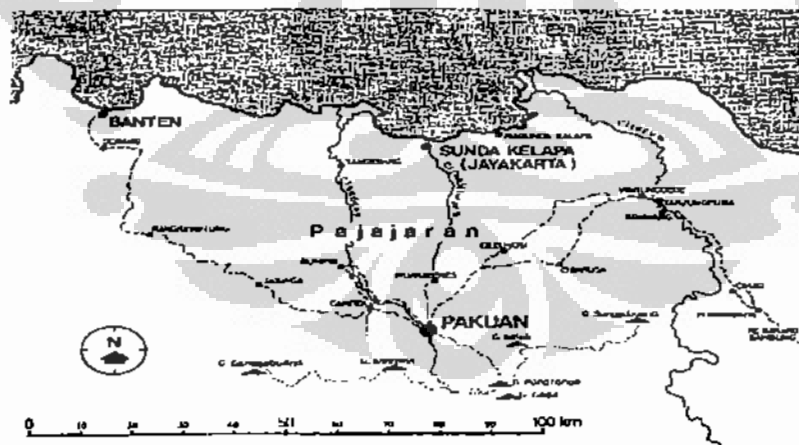
³ Abdurrachman Surjomihardjo; *Perkembangan Kota Jakarta*; Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah DKI, 1973, hal. 14

⁴ *Ibid.*

⁵ RZ. Leirissa (Peny); *Sunda Kelapa Sebagai Bandar Jalur Sutera*; Jakarta: Depdibud, 1995, hal. 156.

Hyang di Pajajaran untuk mendapat ijin mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Sebagai tanda hubungan yang pernah dilakukan maka didirikan *padrao* sebagai tanda untuk dibangun benteng. Dari catatan Hendrick Leme, *padrao* ini didirikan di muara sungai di tepi kanannya pada suatu tempat yang mereka namakan 'Calapa'/ Sunda Kelapa. Wilayah Sunda Kelapa meliputi daerah sebelah menyebelah di muara Ciliwung yang luasnya sekitar empat kilometer persegi. Daerah sebelah barat terdapat permukiman para penguasa Sunda Kelapa, pasar, tempat berlabuh dan kantor pabean. Daerah sebelah timur didiami oleh para pedagang. Penduduk di Sunda Kelapa diperkirakan berjumlah 10.000 sampai 15.000 orang. Meskipun wilayah di belakang Sunda Kelapa adalah daerah yang berawa-rawa, tetapi daerah di pedalaman banyak menghasilkan hasil bumi seperti lada dan beras. Barang-barang hasil bumi dari daerah pedalaman dikumpulkan melalui beberapa persimpangan jalan seperti Rumpin dan Ciampea di sungai Cisadane, Muaraberes di Ciliwung, Cikoa, Citarum, Cileungsi, Cikarang dan Cibarusa. Di jalan-jalan tersebut hasil bumi dikumpulkan untuk diangkut melalui sungai ke pelabuhan terdekat.⁶

Gambar 14: Peta Sunda Kelapa



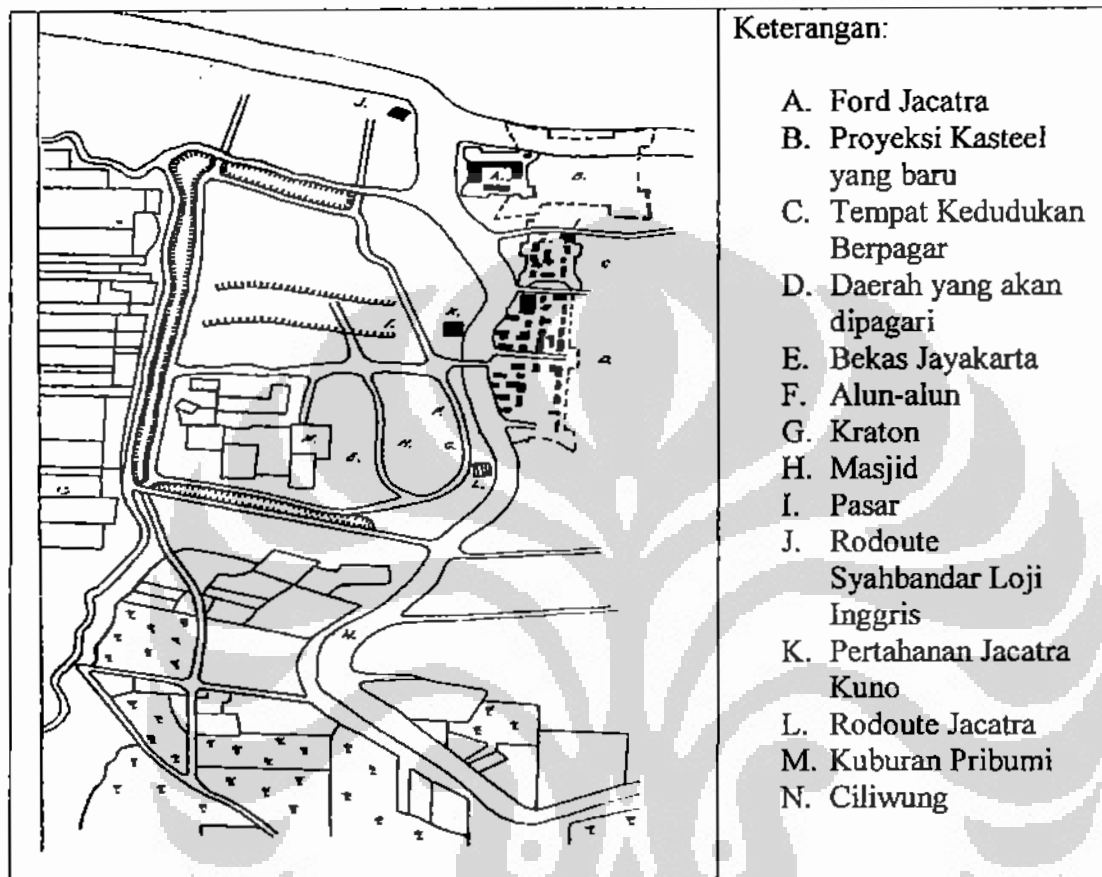
Sumber: JR. Van Diessen; Jakarta/Batavia, hal. 13.

⁶ RZ. Leirissa; Dari Sunda Kelapa ke Jayakarta; dalam *Beberapa Segi Masyarakat Budaya Jakarta*; Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah DKI, 1973, hal 21- 22.

Pelabuhan Sunda Kelapa mengalami perubahan, ketika Falatehan pada tahun 1527 memimpin tentara Demak menyerbu dari Banten dan menduduki Sunda Kelapa. Atas kemenangan ini maka daerah yang ditaklukkan dinamakan Jayakarta “kota kemenangan”. Menurut Yzerman, kota dilingkungi oleh suatu pagar yang terbuat dari bambu kemudian sebagian diganti dengan tembok untuk menghadapi serangan dari Inggris dan Belanda. Di tepi sungai Ciliwung terbentang dalem dari Pangeran Jayakarta yang kira-kira luasnya sama dengan alun-alun yang terbentang di depannya. Di sebelah barat alun-alun berdiri masjid. Tidak jauh ke utara, di tepi sungai Ciliwung terdapat sebuah pasar yang terpisah dari kompleks tersebut. Sementara itu rumah-rumah penduduk terbuat dari bambu dan atap rumbia. Daerah yang terbentang di sebelah utara kompleks pusat kota tersebut tanahnya sangat berlumpur karena terjadi dari endapan yang belum begitu kering. Di sebelah barat kota, daerahnya tandus dan berawa-rawa. Di sebelah selatan terbentang persawahan yang dimiliki oleh penguasa setempat. Di sebelah timur dari tepi Ciliwung terdapat suatu daerah yang dinamakan ‘Wilayah Kyai Arya’. Di daerah inilah Portugis merencanakan membuat benteng yang tidak bisa terwujud. Selain itu juga terdapat perkampungan orang-orang Cina. Perkampungan Cina ini dikepalai oleh seorang *watting*. Di sebelah timur sungai juga terdapat ‘waranda’ atau tempat perburuan dari Pangeran Jayakarta dan bangsawan lainnya.⁷

⁷ *Ibid*, hal 26.

Gambar15: Peta Jayakarta 1619



Sumber: Abdurrachman Surjomihardjo; *Perkembangan Kota Jakarta; Peta 5*

3.2 Kota Bawah Batavia: *Benedenstad*

Pedagang-pedagang Belanda pada tahun 1596 mulai berdatangan ke Jakarta. Pedagang Belanda mendapat sebidang tanah di perkampungan orang-orang Cina yang terletak di sebelah timur sungai. Sejak itulah dimulai pembangunan gudang-gudang yang disebut Nassau dan Mauritius. Luas Nassau 50 langkah kali 18 langkah atau kurang lebih 40 meter kali 14,4 meter. Bangunan ini kemudian diperkuat pinggirnya dengan Het Fort van Jacatra (Benteng Jacatra). Dari sinilah awal Belanda menduduki

Jayakarta. Pada tanggal 30 Mei 1619, Jan Pieterzoon Coen berhasil menghancurkan kota Jayakarta. Sejak itu kota ini diubah namanya menjadi Batavia. Setelah kota dihancurkan maka sebagian penduduknya melarikan diri ke Banten. Tetapi ketika musim panen tiba ada juga yang kembali untuk memanen hasil pertaniannya. Daerah persawahan letaknya di sekitar Grogol yang letaknya jauh dari daerah yang dikuasai VOC. Setelah diduduki Belanda, dalem Pangeran Jayakarta diserahkan kepada pedagang-pedagang Inggris untuk mendirikan loji. Loji-loji ini terbakar habis ketika tentara Mataram menyerbu Batavia pada tahun 1628. Jan Pieter Coen Zoen memerintahkan agar kota ditata menurut peta buatan Simon Stevin, seorang perencana kota Belanda ternama. Menurut Brommer dan de Vries hal ini bisa disimpulkan dari sepucuk surat dari Heeren XVII (Dewan Direksi Kongsi Dagang Hindia Timur) yang meminta Stevin merancang sebuah benteng dengan balai kota dan menjamin pemandangan menawan di pusat kota.⁸

Penamaan kota pelabuhan yang sudah ditaklukkan menjadi Batavia diperintahkan oleh Heeren XVII. Nama Batavia pada awalnya hanya untuk menyebut benteng di muara sungai Ciliwung dan kota yang mereka bangun di tepi Barat dan Timur sungai, yang kini dikenal sebagai Glodok. Istilah Jayakarta (Jacatra) dipakai untuk menyebut daerah yang lebih luas yang meliputi Batavia, daerah-daerah Jacatra/Jayakarta, Amboina dan Banda.⁹

Dalam kaitannya dengan penduduk masa Jayakarta, Belanda berusaha mengusir mereka dari Batavia. Pelbagai ekspedisi dikirim untuk menghalau penduduk Jayakarta terutama di tepi sungai Ciliwung. Bahkan mereka yang tinggal di daerah Jatinegara juga diusir. Akibatnya tidak bisa dijumpai lagi penduduk Jayakarta dalam jumlah besar dan berkelompok. Menyingkirnya penduduk Jayakarta ini mengakibatkan daerah persawahan yang memang sudah mengalami kemunduran sejak

⁸ Peter J.M. Nas dan Kees Grijns; *Jakarta Batavia: Sebuah Sampel Penelitian Sosio Historis Mutakhir*; dalam Peter J.M Nas dkk (Peny); *Jakarta Batavia: Esai Kultural*; Jakarta: Batavia, 2007, hal. 7.

⁹ RZ. Leirissa; *op. cit*; hal 28.

abad 17 makin mundur dan berubah menjadi rawa-rawa karena sudah tidak digarap lagi.¹⁰

Kota Batavia yang dibangun dari reruntuhan Jayakarta adalah usaha membangun suatu kota tiruan Belanda yang dijadikan tempat bertemunya (*rendezvous*) dalam lalu lintas pelayaran. Rencana kota berbentuk segi empat bersisi lurus sesuai dengan rencana kota-kota di negeri Belanda berdasarkan rumusan benteng Romawi. Kota di kelilingi parit-parit dan tembok-tembok kota yang diperkuat dengan sederetan benteng-benteng kecil. Kota dengan jaringan jalan dan terusan-terusan yang lurus. Setiap usaha golongan bangsa lain untuk mempengaruhi rencana kota dirintangi, artinya golongan lain tidak diijinkan membangun menurut keinginan sendiri yang mungkin dapat mengganggu rancangan umum. Karena itu tidak ditemui jalan-jalan sempit yang menolak hawa panas dan lorong-lorong kecil tak beraturan seperti kebiasaan kota-kota di Asia dan Timur Tengah. Bahkan penduduk asli tidak diperbolehkan untuk membuat kampung di dalam tembok kota. Sungai Ciliwung yang berkelok-kelok dialihkan dan digantikan dengan sebuah terusan yang lurus, Kali Besar (*Groote Rivier*) memotong kota menjadi dua bagian. Perluasan kota yang dimulai sejak 1625 ke arah tepi barat sungai Ciliwung dilanjutkan lagi oleh Specx dan Van Diemen.¹¹

Dalam periode 1619 – 1627, benteng Jacatra semakin mekar, sehingga luasnya tiga kali lipat dari luas semula. Namanyapun diganti menjadi kasteel Batavia. Bentuk kasteel tidak lebih dari benteng kuno, yaitu persegi empat dengan bastion-bastion yang menonjol. Masing-masing disebut Parel, Diamant, Saphir, dan Robijn. Itulah sebabnya kita mengenal penamaan kota Intan bagi kota Batavia Lama. Orang Belanda berusaha menciptakan kota Belanda dengan rumah-rumah Belanda di daerah beriklim panas dan berawa. Dalam usaha itu, mereka membuat hal-hal yang sebenarnya tidak boleh. Seperti membuat rumah tingkat dengan ruangan sempit dan letaknya berhimpitan.

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Siswadi; *Perkembangan Kota Jakarta Suatu Tinjauan Sosial Historis*; dalam Abdurachman Surjomihardjo; *Beberapa Segi Sejarah Masyarakat Budaya Jakarta*; Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah DKI, 1973, hal 37.

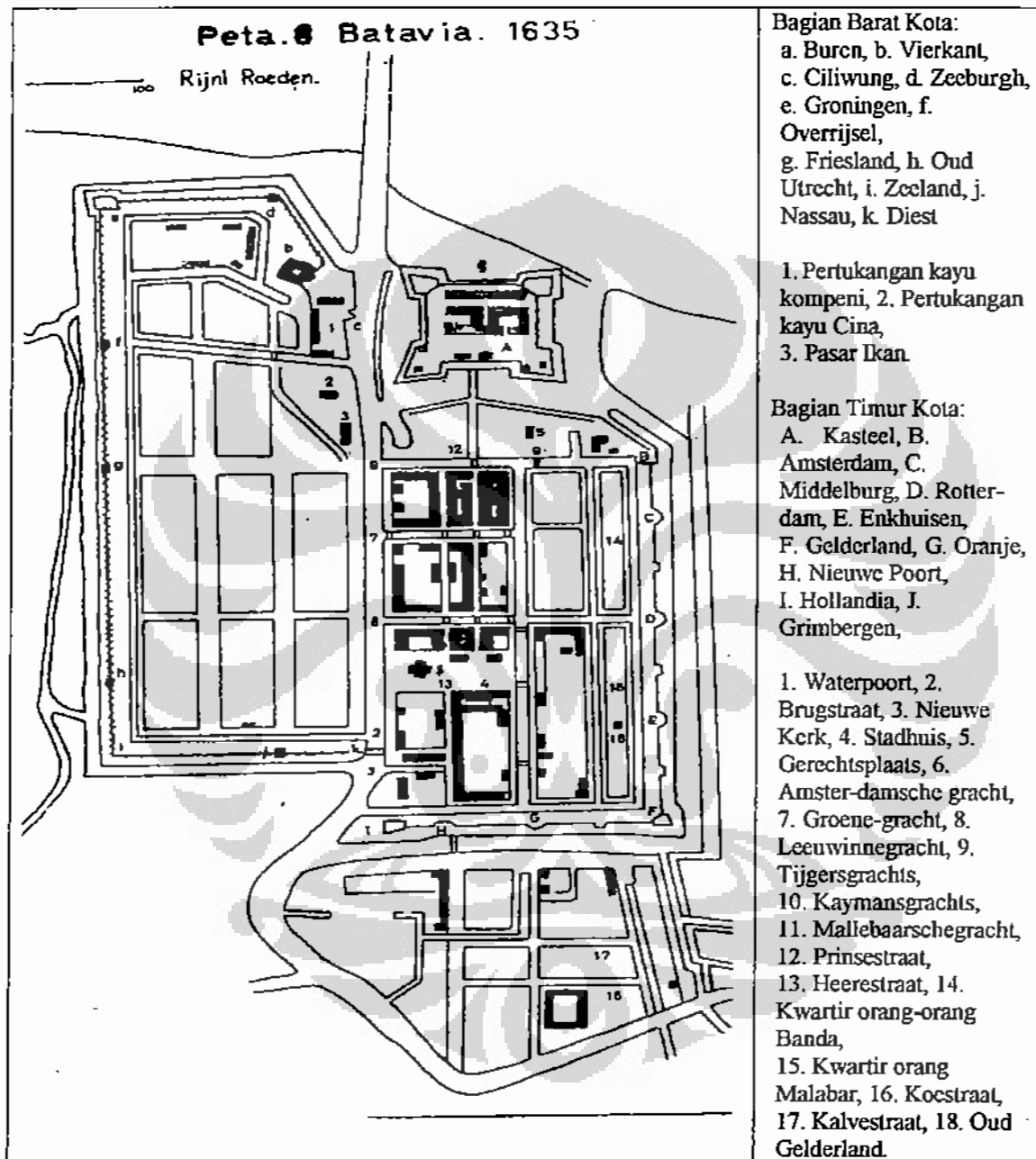
Jendela selain kecil tak pernah dibuka, sinar matahari dicegah masuk ke dalam rumah dengan tirai-tirai berwarna gelap dan tebal, sebab takut dengan angin. Terusan-terusan yang digali di beberapa bagian kota makin penuh dengan endapan lumpur, alirannya mampet dan berbau busuk sebagai tempat persemaian nyamuk malaria.¹²

Bagian kota sebelah timur, berbentuk segi empat yang beraturan. Melalui sisi-sisi timur dan selatan dari segi empat dapat dilihat tembok kota yang dilengkapi dengan bastion-bastion. Sampai tahun 1650, kota dapat dibagi dalam empat bagian yaitu kasteel, kota bagian timur, kota bagian barat dan kota depan (*voorstad*) yang terletak di sebelah selatan kota bagian timur. *De voorstad* terletak di luar tembok kota dan parit.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Abdurachman Surjomihardjo; *op. cit.*, hal 22.

Gambar 16: Peta Batavia Tahun 1635



Sumber: Abdurrachman Surjomihardjo, 1970

Berdasarkan peta diatas, maka perkembangan morfologis Jakarta merupakan perkembangan tahap II dengan ditandai perluasan kota secara lebih modern. Dalam peta ini terlihat Batavia mengalami perluasan ke barat. Daerah ini sebelumnya merupakan rawa-rawa. Selain itu Kali Besar yang membelah kota sudah diluruskan.

3.3 Kota Atas Weltevreden (*Bovenstad*)

Permukiman di daerah luar kota Batavia (*Ommelanden*) muncul dari dua arah. Mula-mula tentu saja berlangsung eksplorasi dan pembudidayaan secara bertahap hutan-hutan di sekitar Batavia. Pada tahun 1620-an orang-orang Belanda dan Cina membersihkan lahan di luar tembok kota dan menanam kelapa. Ekspansi terutama mengarah ke selatan sepanjang Sungai Ciliwung. Sebelah timur dan barat kota tanahnya bergambut dan tidak cocok untuk bercocok tanam dan permukiman. Hal ini berubah ketika sistem drainase kanal dan parit ke timur mulai dibangun. Selain proses penggarapan lahan lahan yang dilakukan para pengusaha kota itu, terjadi pula imigrasi secara perlahan-lahan namun terus meningkat dari orang-orang Jawa baik dari barat yaitu dari wilayah Banten maupun dari timur yaitu dari Mataram. Walaupun pihak Belanda berusaha mengonsentrasikan orang Jawa di satu tempat, mereka memperlihatkan kecenderungan meningkat untuk menyebar ke segala penjuru pedalaman menetap di tanah milik pribadi atau daerah tak bertuan yang jauh dari kota. Perkembangan penduduk ini semakin lama semakin berkembang dengan pesat dan menyebar di daerah selatan Batavia. Jumlah penduduk yang masuk ke Batavia terus meningkat sehingga pada tahun 1789 jumlah penduduk Batavia dan *Ommelanden* berjumlah 143.339 orang.¹⁴

Menjelang abad 18 kemakmuran kemewahan dan keamanan makin bertambah baik. Seperti halnya di kota lain yang sedang berkembang, terjadi kecenderungan penduduk untuk pindah ke daerah-daerah luar kota. Gubernur Jenderal, pegawai tinggi

¹⁴ Remco Raben; *Seputar Batavia: Etnisitas dan Otoritas di Ommelanden 1650 – 1800*, dalam Peter JM. Nas dkk (Peny); *loc. cit*, hal 101.

komponi dan warga kota merasa perlu untuk bermukim di daerah luar kota, karena kota sudah dirasakan sangat kotor pengab dan berpenyakit. Mereka keluar dari bagian kota dan membeli kebun-kebun, untuk ber-*weekend* di rumah-rumah yang baru didirikan. Mula-mula rumah itu berbentuk kecil, terbuat dari bambu dan kayu, lambat laun bentuknya bertambah besar terbuat dari batu. Setelah itu mereka tinggal sebagai penghuni tetap dengan gedung-gedung besar yang megah dan bagus menurut model Belanda. Gedung-gedung itu terutama muncul di sepanjang Jacatraweg¹⁵ (sekarang jalan Jayakarta) dan kanan kiri Molenvliet (Sekarang jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk). Di sepanjang jalan ini dibangun gedung-gedung bergaya Belanda. Di belakang gedung terdapat kebun-kebun yang terpelihara indah yang berbatasan dengan sungai, dengan dibuatkan tempat-tempat pemandian dan pangkalan perahu. Para penghuninya mempunyai kebiasaan saling berkunjung dengan *orembaai* (perahu kecil yang didayung oleh budak belian). Perkembangan kota yang pesat pada akhir abad ke 18, terjadilah perpindahan besar-besaran ke arah daerah yang lebih tinggi dan sehat yaitu Weltevreden.¹⁶

Weltevreden, semula adalah milik Anthony Paviljoen yang pada tahun 1648 masih merupakan rawa dan hutan. Kemudian daerah tersebut disewakan kepada orang-orang Cina untuk ditanami tebu dan kebun sayuran. Pada tahun 1697, tercatat pendirian sebuah rumah oleh pemiliknya yang baru Cornelis Chastelein. Selain itu terdapat 2 kincir penggilingan tebu. Kemungkinan besar nama Weltevreden diberikan oleh Chastelein. Pada tahun 1733 tanah ini dijual kepada Justinus Vinck dengan harga 39.000 ringgit. Di wilayah ini pada tahun 1735 diijinkan membangun pasar, yaitu di Tanah Abang dan Weltevreden. Sepeninggal J. Vinck, tanah Weltevreden menjadi milik Gubernur Jenderal Jacob Mossel yang membelinya seharga 28.000 ringgit dan sejak tahun 1767 Weltevreden menjadi milik Gubernur Jenderal Van der Parra¹⁷.

¹⁵ Penamaan jalan Jacatra karena adanya benteng kecil yang didirikan di ujung timur jalan itu. Benteng tersebut bernama Jacatra.

¹⁶ Abdurrachman Surjomihardjo; *Perkembangan Kota Djakarta*; Djakarta Raja: Dinas Museum dan Sedjarah DCI, 1970, hal. 20.

¹⁷ *Ibid.*

Meskipun kota lama sudah ditinggalkan, kegiatan komersial Batavia masih tetap berlangsung. Sejak itu daerah tersebut terutama didiami oleh orang asing Asia dengan mata pencaharian sebagai pedagang skala menengah dan pengecer. Penduduknya sebagian besar adalah peranakan Cina yang lahir di Indonesia, ditambah dengan pendatang baru dari suku-suku Hokian, Hakka dan Kanton. Mereka berkumpul di pinggiran kota di daerah Glodok. Di antara mereka juga terdapat kelompok orang Arab dan India golongan Koja dan Keling. Di samping itu masih terdapat sejumlah kecil orang Indo kelas bawah yang masih tetap tinggal di daerah ini karena tidak mampu pindah. Sementara itu golongan elite bisnis dan dunia perbankan Belanda berduyun-duyun datang dari daerah kediamannya ke Petojo, Sawah Besar, Tanah Abang dan Gambir menuju gedung-gedung bisnis dan bank yang megah serta kantor koran di sepanjang kanal utama dan jalan raya di daerah kota tua.¹⁸

Hierarki yang terjadi di daerah kota baru tersebut, di daerah selatan terdapat kantor-kantor pemerintah, barak militer, penyedia jasa dan kompleks tempat tinggal. Tempat itu meliputi *Koningsplein* di Gambir dan *Waterlooplein* (Lapangan Banteng) yang dilayani oleh tentara yang direkrut dari orang Betawi yang bertempat tinggal di kampung sekitarnya. Rumah mereka dibuat dari kayu, bambu, dan jerami yang terletak di antara *Benedenstad* (kota bawah) dengan *Bovenstad* (kota atas) Batavia¹⁹. Perkampungan lain adalah daerah Ketapang sebelah barat Molenvliet. Orang Betawi banyak tinggal di rumah-rumah bambu yang menempel di belakang gedung-gedung komersial yang megah dan kompleks hunian gedongan di sepanjang jalan raya utama dan penghubung. Keamanan daerah ini ditangani para *wijk* Betawi. Daerah padat di Betawi kekurangan fasilitas sanitasi seperti pembuangan hajat manusia dan sampah rumah tangga. Sementara itu para pendatang baru tinggal di daerah kampung yang tanahnya lebih rendah dari permukaan sungai-sungai yang melintasi Batavia. Mereka menggunakan sungai sebagai tempat mencuci, mandi, dan membuang sampah.

¹⁸ Bob Heering; *Mohammad Hoesni Thamrin: Tokoh Betawi, Nasionalis Revolusioner Perintis Kemerdekaan*; Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hal. 8 – 9.

¹⁹ *Ibid.*,

Kampung-kampung tersebut juga kekurangan air bersih, sistem drainase yang membuat menjadi tempat hunian yang sehat²⁰. Dalam kondisi semacam itu maka kerusakan dan kematian sering terjadi akibat banjir di musim hujan yang melanda kampung-kampung rendah yang kemudian sering diikuti oleh berbagai epidemi penyakit.²¹

Pada tahun 1807, Herman Willem Daendels mendapat tugas untuk memindahkan ibukota koloni Belanda di Asia, di mana saja di bagian Pulau Jawa yang cocok untuk keperluan itu. Dengan alasan strategis, semula pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Semarang atau Surabaya. Akan tetapi karena terkendala biaya yang besar maka pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah yang lebih dekat yaitu Weltevreden²². Pada awalnya Daendels membuat sebuah istana baru didekat tempat parade (Waterlooplein atau Lapangan Banteng) bahan-bahan bangunan diambil dari bekas kasteel Batavia dan bangunan lain dari kota lama. Karena keadaan perang, istana baru tidak berhasil diselesaikan seluruhnya. Jansen pengganti Daendels menutup atap istana 15 tahun kemudian. Tindakan Daendels ini, mempengaruhi perkembangan tata kota Batavia dengan pembukaan lapangan latihan yang bernama Koningsplein (1818) dan tanah lapang Gambir. Sementara itu pusat pertahanan dibangun di Meester Cornelis.²³

Daendels membangun Weltevreden terinspirasi oleh penataan kota-kota tua di Indonesia dimana satu pusat dikelilingi oleh jalan yang saling memotong. Di daerah pusat kota inilah tempat para pegawai pemerintah kolonial. Penduduk bumiputera yang miskin tinggal di perkampungan sekitar kota, masuk dan pergi ke kota untuk bekerja. Mereka tinggal di daerah yang tersembunyi di seberang pohon-pohon besar dan pinggir sungai. Menurut Wertheim, Weltevreden menyerupai kota lama di

²⁰ Susan Abeyasekere, (ed); *From Batavia to Jakarta: Indonesia's Capital 1930s to 1980s*; Australia: Monash University, 1985, hal 72 - 75.

²¹ Wertheim, WF; *Indonesian Society in Transition*; The Hague: van Hoeve Publishers LTD, 1969, hal. 73

²² Mundardjito; Kota Tua Batavia: Masalah Perlindungan; *Ceramah Ilmiah* oleh Program Study Arkeologi UI; 25 Maret 2008, hal. 2.

²³ *Ibid*;

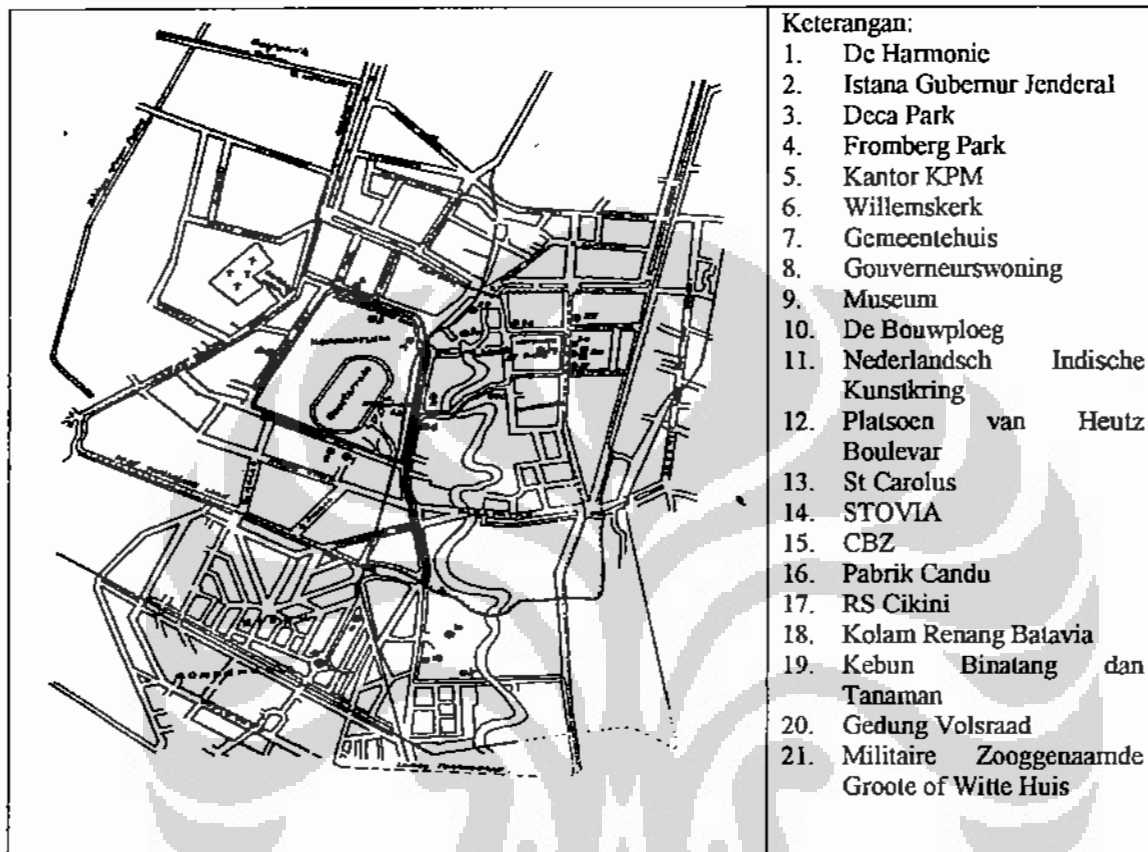
Indonesia, yaitu bangunan luas dengan halaman luas menyerupai alun-alun. Arsitektur ini merupakan perubahan fundamental rumah tinggal di Hindia Belanda.²⁴

Pada masa pemerintahan Inggris, berdiri satu perkumpulan sandiwara yang anggotanya terdiri dari opsir-opsir tentara Inggris. Mereka mengadakan pertunjukan di dalam bangunan yang terbuat dari bambu. Pada 7 Desember 1821, diresmikan pembukaan gedung baru *Schouwburg* (Gedung Kesenian) di Pasar Baru. Pada masa pemerintahan Inggris, pembangunan Istana Waterlooplein dilanjutkan sampai tahun 1826, tetapi juga tidak selesai juga. Di belakang istana ini dibangun sebuah taman Dus Bus yang ternyata tidak memenuhi fungsinya, kemudian dibangun gedung perumahan para perwira pada tahun 1853. Setelah pemerintahan Inggris, pemerintah Hindia Belanda membeli Raffles Houses (Bina Graha) dengan kebun yang luas, berbatasan dengan Koningsplein. Di belakang gedung ada sebuah paviliun milik van Braam. Paviliun ini kemudian juga dibeli pemerintah yang kemudian digunakan Gubernur Jenderal untuk menginap, karena istana Waterlooplein belum juga selesai. Setelah diputuskan istana Waterlooplein akan digunakan sebagai perkantoran, maka paviliun Rijswijk diubah menjadi tempat kediaman Gubernur Jenderal. Berhubung dengan kegiatan-kegiatan Gubernur Jenderal di istana yang semakin banyak, maka dirasakan perlunya dibuat istana lagi yang menghadap Koningsplein. Sejak itu (1848) terdapat dua bangunan istana yang kini disebut Istana Merdeka (menghadap Medan Merdeka) dan Istana Negara (menghadap Jalan Veteran).²⁵

²⁴ Bangunan-bangunan di sekitar Weltevreden merupakan gaya campuran antara Eropa dan Indonesia, tetapi orang menyebutnya sebagai villa Hindia, kenyamanan India. *Ibid*, hal 173.

²⁵ Abdurrachman Surjomihardjo; *op. cit*, hal. 24.

Gambar 17: Peta Weltevreden dan Gondang Dia tahun 1927



Sumber: Abdurrachman Surjomihardjo, 1970

Selama hampir empat abad pertumbuhan kota Jakarta ada beberapa pusat fungsional yaitu Glodok, Tanah Abang, Gambir, Senen dan Jatinegara. Di sekitar pusat perekonomian ini muncul kampung yang menekan pusat dan di sekitarnya muncul daerah pertanian yang menyangga daerah pusat. Ini mengakibatkan urbanisasi dan pertumbuhan permukiman menjadi tidak terkontrol. Ada beberapa perkampungan yang muncul di sebelah barat dan utara. Daerah penyangga barat adalah daerah Tambora, Angke, dan Duri Pulo²⁶. Penguasaan kampung dimulai dari Glodok sebagai

²⁶ Gerald Hans Krausser, *The Kampung of Jakarta, Indonesia: a Study of Spasial Patterns in Urban Poverty*, Hawaii: University of Pittsburg; 1975, hal. 41.

pasar lokal dan Angke adalah daerah pertahanan lama. Untuk itu daerah Glodok sampai Tambora merupakan konsentrasi komunitas Cina terbesar. Di daerah ini banyak tanah-tanah kosong yang merupakan pertanian pohon kelapa. Perkembangan di daerah ini melampaui kanal banjir sehingga muncul perkampungan baru di sebelah barat dan pertumbuhannya tanpa perencanaan yang bagus.²⁷

Lokasi kedua adalah daerah Senen sampai Jatinegara. Daerah ini kondisinya lebih nyaman karena adanya jalan yang lurus dan jalur kereta api. Daerah ini pada awalnya adalah daerah pertumbuhan perkampungan Eropa. Pada abad 19 penduduk mendekati pusat Belanda di Weltevreden dan Jatinegara, sehingga banyak orang Eropa membeli tanah di sekitar daerah ini. Lokasi ketiga, adalah perkampungan Tanah Abang. Tanah Abang adalah pasar tua yang dibangun tahun 1735. Pasar ini melayani penduduk Kampung Bali, Kebon Kacang, dan Petamburan, Slipi. Dominasi orang Cina menguasai pasar retail dan barang import. Kampung ini menjual tekstil, cigarettes, dan makanan. Kampung Slipi adalah penghasil sayuran dan produksi kecil. Tanah Abang letaknya didukung oleh kondisi ini karena terdapat jalur kereta api²⁸.

Penyelenggaraan hari pasar diatur dengan peraturan pemerintah. Selama ini Pasar Ikan, pasar burung dan pasar sayur-sayuran/buah yang terletak di dalam tembok kota di sekitar Roa Malaka dan *Jonkersgracht*. Pasar Weltevreden dibuka setiap hari Senin, karena itu penduduk menyebutnya sebagai Pasar Senen. Sedangkan Tanah Abang yang juga milik Justinus Vink boleh buka setiap hari Sabtu. Menurut peraturan yang dikeluarkan 8 Desember 1801 ditetapkan hari-hari pasar yang berlaku: hari Minggu untuk pasar di Tanjung Barat (sekarang dikenal sebagai Pasar Minggu), hari Selasa di Cilincing dan Pondok Gedeh, hari Rabu di Tanjung Timur (dikenal sebagai Pasar Rebo) juga Tanah Abang, hari Kamis di Meester Cornelis, hari Jumat di Cimanggis, Pulo Gadung, dan Lebak Bulus.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Mona Lohanda; *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*; Jakarta: Masup Jakarta; 2007, hal 144.

Setelah Daendels berhasil memindahkan kota ke Weltevreden arus migrasi ke Batavia semakin meningkat. Penduduk pribumi tinggal di daerah pinggiran Weltevreden, seperti Senen, Kemayoran, bekerja sebagai buruh bagi pegawai kolonial di Weltevreden. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat pada tahun 1930 ketika dilaksanakan sensus untuk pertama kalinya di Hindia Belanda jumlah penduduk Jakarta sebanyak 532.205.³⁰

Lapisan-lapisan masyarakat di Batavia juga dibagi dalam hukum serta pembagian struktur fisik dan geografi. Secara hukum kekuasaan Belanda mempertahankan pembagian di antara golongan orang Eropa, Pribumi (*inlander*) dan timur asing (*Vreemde Oosterlingen*). Tiga golongan penduduk ini dibedakan sepenuhnya secara hukum penuh dengan diskriminasi rasial dalam seluruh tingkat kehidupan. Menjelang abad 20, masalah kulit putih dan sawo matang kian mendalam yang menguntungkan para kolonialis. Selanjutnya orang pribumi, Indo, Sinyo dan terutama Indo Kemayoran dan Ketapang yang keras dipandang rendah dan kian diskriminasi. Meskipun diskriminasi hukum, dalam beberapa hal misalnya sistem pemisahan tempat dan surat pas, aturan pakaian yang boleh dikenakan dibebaskan untuk golongan orang timur asing. Di pihak lain beberapa aturan sosial bahkan diperkeras untuk menunjukkan golongan Eropa lebih eksklusif atau superior. Laporan komisi Visman pada 1942 mencatat tentang adanya keresahan sehubungan dengan sekat-sekat sosial dan hukum rasialis yang tajam. Dalam survey tentang politik kolonial disebutkan golongan darah campuran mendatang adanya konfrontasi yang meningkat dan jarak yang semakin lebar antara golongan yang lahir di Eropa dan yang lahir di negeri jajahan. Hal ini menyebabkan gambaran Batavia merupakan kota dengan dua wajah lebih jelas dari sebelumnya. Kampung-kampung Belanda di kota-kota besar membentuk pulau terpisah dan tidak memberikan tempat bagi golongan Indo³¹.

³⁰ Volkstelling 1930: Vol I. Tabel I dan II

³¹ Bob Hering; *loc. cit.*, hal. 12.

Dengan demikian kontur fisik kota diatur berdasarkan ketentuan hukum dan institusinya dengan pembagian rasial dan sosial. Glodok yang terletak di bagian selatan kota tua (*benedenstad*) kemudian menjadi Pecinan. Belanda lebih suka menyebutnya sebagai *Chineesche Kamp*. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan kampung-kampung di dalam maupun sekitar kota ditempatkan petugas komandan setempat. Di sebelah selatan Glodok dilintasi kanal Molenvliet dan dua jalan raya di barat dan di timur, menghubungkannya dengan Weltevreden. Bagian barat yang lebih tua menghubungkan dengan daerah kediaman orang Belanda di Petojo dan Sawah Besar. Diantara rumah-rumah mewah milik Eropa, hotel-hotel, pabrik gas, barak kavaleri di Petojo, gedung klub Harmonie, tersebar juga sejumlah rumah penuh ornamen milik orang Cina kaya peranakan, Arab, priyayi baru Indonesia (keluarga Thamrin tinggal di sebuah rumah mewah di Sawah Besar³². Lebih ke selatan terletak daerah Rijswijk dan Noordwijk daerah baru yang diilhami model Perancis yang disebut sebagai *Franche Buurt* (daerah Perancis). Daerah ini dekat dengan kompleks kediaman eksklusif orang Eropa yang eksotis dengan taman-taman yang luas yaitu Koningsplein. Sebelah timur tempat ini berdampingan dengan Weltevreden dengan lapangan Waterloo adalah kompleks pemerintahan dan militer urat nadi imperium kolonial Belanda di Asia. Berpindahannya secara berangsur-angsur orang Eropa ke sebelah selatan dan tenggara menyebabkan daerah orang Eropa lama menjadi daerah campuran.³³

3.4 Pembangunan Kawasan Menteng dan Kampung Bumi Putera (1905 – 1940)

Pemerintah Belanda pada tanggal 23 Juli 1903 mengeluarkan *Wet Houdende Decentralisatie van het bestuur in Nederlandsche-Indie* (Decentralisatiewet) atau biasa disebut UU Desentralisasi.³⁴ Undang-undang ini membuka kemungkinan diadakannya pembagian hak dan kewajiban mengurus pemerintah daerah oleh

³² Bintang Betawi; 14 Januari 1901

³³ Bob Hering; *loc. cit.*, hal. 13.

³⁴ Staatsblad van Nederlandse Indie tahun 1903, No. 329

pemerintah daerah. Berdasarkan UU ini, mulai tanggal 1 April 1905, Kota Batavia ditetapkan sebagai kota praja (*gemeente*). Wilayah kotapraja merupakan tanah-tanah partikelir yang kepemilikannya sudah diserahkan kepada pemerintah, seperti Menteng, Gondangdia, Duku, Karet, Bendungan, Kramat Lontar dan Petojo³⁵. Batas-batas wilayah kotapraja Batavia meliputi *Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia* dengan pengecualian pulau-pulau di Teluk Batavia dengan luas sekitar 125 kilometer persegi. Meskipun sudah dibentuk *gemeente* Batavia pada tahun 1905, tetapi jabatan walikota (*burgemeester*) belum diangkat. Sampai tahun 1916 pemerintahan di Batavia masih ditangani oleh Dewan Kotapraja (*Gemeente Raad*) yang diketuai oleh Residen Batavia. Kotapraja Batavia, di bidang pemerintahan mempunyai wewenang untuk mengurus masalah-masalah pemeliharaan kota, perbaikan, pembaruan dan perencanaan jalan-jalan umum, jalan besar, lapangan, pertamanan, tanggul-tanggul jalan, tambak, parit-parit, sumur bor, papan nama jalan, jembatan, pengaturan got, riol dan pengaturan pasar. Urusan kemiliteran, pengawasan jalan kereta api dan pelabuhan Tanjung Priok masih tetap diurus langsung oleh Gubernur Jenderal.³⁶

Dalam rangka penataan birokrasi selain kotapraja Batavia juga dibentuk Dewan Kotapraja Batavia. Susunannya terdiri dari 25 orang anggota yaitu 15 orang Eropa, tujuh orang pribumi (Hindia Belanda) dan 3 orang timur asing. Pada tahun 1917 jumlahnya diubah menjadi 27 orang. Anggota ini pada awalnya dipilih dan ditunjuk, tetapi dengan penambahan tersebut, ditetapkan bahwa semuanya harus dipilih untuk masa enam tahun, pada tahun 1925 diubah menjadi empat tahun.³⁷ Sebagai ketua Dewan Kota Batavia ditunjuk asisten residen Batavia, Kreischer (1905) dan diganti WJ. Ketjen (1907 – 1910). Sampai tahun 1916 jabatan Walikota dan *wethouder* (Dewan Pemerintah Daerah) belum diangkat karena dalam peraturan perundang-undangan desentralisasi yang dikeluarkan tahun 1903 belum diatur adanya lembaga tersebut. Baru pada peraturan desentralisasi tahun 1916 memuat ketentuan

³⁵ Staatsblad van Nederlandese Indie tahun 1905, No. 204

³⁶ SZ. Hadisutjipto; *Sekitar 200 Tahun Sejarah Jakarta*, Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah DKI, 1979, hal 74.

³⁷ Staatsblad van NI 1917 tahun No. 587 dan Staatsblad van NI tahun 1925 No. 674

bahwa suatu kotapraja diangkat seorang ketua Dewan Kota oleh Gubernur Jenderal. Ketua dewan kota yang diangkat memakai nama *burgemeester*, yang merangkap sebagai walikota sedangkan jabatan *wethouder* dimungkinkan pada tahun 1922³⁸. Dengan peraturan tersebut maka sejak 5 Agustus 1916 diangkatlah Mr. Gerardus Johannes Bisschop sebagai walikota Gemeente Batavia sampai tahun 1920. Selain jabatan Walikota ada pula jabatan *plaatsvervanend burgemeester/loco burgemeester* (pengganti walikota) yang bertugas mewakili walikota apabila pejabat walikota berhalangan dalam tahun 1917 diangkat Mr. Dr W.M.G Schumann, pada tahun 1920 diganti Herman Van Breen.³⁹

Tabel 6: Anggaran Batavia Tahun 1906

| Jenis Bangunan | Anggaran (f) |
|--|-----------------|
| Bangunan | 2.500 |
| Jembatan dan alat penyelam | 10.500 |
| Jalan trotoar, taman | 99.050 |
| Tembok pangkalan, tembok laut dan tembok pacuan kuda | 6.500 |
| Got dan riol | 9.000 |
| Penyiraman jalan dan pengangkutan sampah, Sumur artesis | 40.000 7.460 |
| Perbaikan berat meliputi: | |
| Perbaikan cshouwburg | 2.000 |
| Perbaikan jembatan | 18.560 |
| Tambak parit di Glodok dari jembatan Glodok sampat toko tiga dan got-got air | 196.000 |
| Tambak di Spinhuisgracht sepanjang Kampung Malakka, tiang bendera dan Penjaringan dengan got-got pembuangan air | 6.260 |
| Perbaikan tembok sungai di Molenvliet West | 37.500 |
| Pelebaran jalan di Glodok dekat kantor tera | 8.900 |
| JUMLAH | 444.230 |

Sumber: Keputusan Gemeenteraad No. 792, tahun 1906

³⁸ *Staadsblad van NI* tahun 1916 No. 506

³⁹ *The Liang Gie; Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta*; Jakarta: Kotapradja Djakarta Raja, tahun 1958, hal 39

Sejak tahun 1910, anggaran dibuat untuk jangka waktu lima tahun sekaligus dengan perincian untuk bangunan, termasuk pembuatan bangunan baru dan perbaikan bangunan lama sebesar f 91.400; jalan, termasuk pembuatan jalan baru dan perbaikan jalan f 663.095; perbaikan jembatan f 70.000; pembuatan dan pemeliharaan serta perbaikan got-got, riolen dan saluran air ledeng f 107.800; tambak, tanggul-tanggul dan perbaikan f 135.000; pembuatan sumur bor f 138.500; penyediaan perkakas dan alat-alat lain f 45.000.⁴⁰ Jadi anggaran pembangunan Batavia dari tahun 1910 – 1915 sebesar f 1.250.795.

Untuk memudahkan dalam pengontrolan dan pengaturan kota, sejak tahun 1908, maka daerah-daerah di kotapraja Batavia dibagi dalam wilayah-wilayah kecil yang terdiri dari 2 distrik yaitu distrik Batavia meliputi onderdistrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priok, sedang distrik Weltevreden meliputi onderdistrik Gambir, Senen dan Tanah Abang.⁴¹

Pemerintah Hindia Belanda melalui keputusan tanggal 14 Juli 1916 Nomor 18, menyatakan bahwa Pemerintah menjadi pemilik tanah-tanah tak dikenal, kecuali apabila penghuni dapat membuktikan kepemilikannya. Dalam peraturan ini dibedakan petak-petak yang sejak dahulu dihuni oleh penghuni lama dan penghuni baru. Sebagai batas waktu kepemilikan adalah 1 Januari 1916. Bagi penghuni petak-petak lama apabila tanahnya tidak digunakan untuk kepentingan umum maka tanah tersebut dapat diberikan kepada pemilik sebagai tanah turun temurun. Setelah batas waktu yang ditentukan pelepasan tanah ditentukan dengan pembayaran oleh pemerintah. Proyek pembebasan tanah ini diserahkan kepada Kontrolir Mallien, pengawasan sehari-hari dijalankan oleh Tuan Fanoy yang bertindak sebagai sekretaris komisi yang bertugas mendata informasi kepemilikan tanah.⁴²

Kondisi kesehatan yang buruk telah mendorong pemerintah untuk mengadakan perbaikan sarana kesehatan yang ada. Kampung-kampung di tanah partikelir

⁴⁰ SZ. Hadisutjipto, *loc. cit.*, hal 80.

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Staatsblad 1918; Nomor 287.

kondisinya sangat kumuh. Pemilik tanah partikelir atas dasar peraturan bangunan dan rumah yang ada wajib untuk membersihkan kampungnya dan memperbaiki jalan di lingkungan tanahnya, tetapi kenyataannya yang membersihkan bukan pemilik melainkan penduduk pemegang usaha dan penyewa.⁴³

Kondisi ini memaksa kotapraja untuk mengadakan kerjasama dengan pemilik tanah untuk memperbaiki lingkungannya. Sementara itu dalam kasus tanah-tanah yang tidak jelas kepemilikannya, pemerintah mengambil secara paksa.⁴⁴

Tanah di kotapraja ada empat macam yaitu tanah kotapraja, tanah negeri, tanah partikelir, dan tanah individu. Berdasarkan kepemilikannya, tanah dibedakan lagi menjadi tanah hak milik, hak bangun, hak sewa, hak pakai, hak guna hasil, hak milik negara⁴⁵. Menurut keputusan Menteri Koloni, tiap tahun disediakan f 500 ribu bagi penebusan kembali tanah-tanah partikelir di mana bisa dipertimbangkan tanah-tanah di Tangerang yang harus dikembalikan kepada tanah negara untuk proyek irigasi. Dari insinyur yang ditugasi untuk memperbaiki irigasi di Tangerang menyampaikan permohonan untuk segera menebus kembali tanah-tanah Tangerang.⁴⁶

Pemilik tanah partikelir kebanyakan adalah warga Arab. Pada akhir abad ke-19 jumlah penduduk Arab di Batavia meningkat menjadi sekitar 1.448 orang pada tahun 1885, pada tahun 1930 meningkat menjadi 5.231 orang. Kelompok orang Arab ini lebih banyak bergerak dalam bidang niaga. Komoditi yang diperdagangkan umumnya tekstil, batu permata, wangi-wangian dan mebel. Di samping itu warga Arab banyak memiliki tanah partikelir. Misalnya Sayid Ali bin Syahab menjadi tuan tanah di Menteng, Bassalam tuan tanah di Kwitang Timur. Menurut catatan pada tahun 1904 ada 10 tuan tanah Arab yang mempunyai 22 tanah partikelir di sekitar *Ommelanden* (daerah sekitar) dengan luas seluruhnya 50 kilometer persegi. Seorang warga Arab terkaya di Batavia adalah Sayid Abdullah bin Ali Alatas yang tidak hanya memiliki tanah tetapi juga pabrik peralatan besi dan pembuatan mesin. Oemar Mangus, kapitan

⁴³ Staatsblad 1918, Nomor 287

⁴⁴ Gemeentebld 1938, NO. 377, Nomor 14361

⁴⁵ Staatsblad 1870, Nomor 118.

⁴⁶ Secrctarie Gouvernement 1 Agustus 1921, bagian 1, nomor 89/175.

Arab yang menjabat tahun 1902 – 1931 adalah eksportir gula dan pemilik rumah-rumah gedung. Warga Arab yang kaya tidak lagi tinggal di Pekojan yang sempit dan penghab tetapi mereka keluar dan tinggal di Tanah Abang, Petamburan, Krukut dan menyebar di Sawah Besar, Jatinegara dan lain-lain.⁴⁷

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut peraturan perundangan desentralisasi tahun 1903 kurang memuaskan sehingga pada tahun 1922 dikeluarkan *Wet op de Bestuurshervorming* (Undang-undang Pembaruan Pemerintahan)⁴⁸. Menurut peraturan tersebut maka wilayah Hindia Belanda dibagi dalam satuan-satuan propinsi lengkap dengan dewan propinsinya yang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Pulau Jawa dan Madura dibedakan atas 3 daerah otonom yaitu propinsi, *afdeling* dan *gemeente* yang diatur sesuai peraturan masing-masing. Untuk kotapraja Batavia sejak 1 Oktober 1926 statusnya berubah menjadi *Stadsgemeente* Batavia (kotapraja).⁴⁹ *Stadsgemeente* Batavia merupakan daerah otonom yang setingkat di bawah Propinsi Jawa Barat.

Wilayah di sebelah timur kotapraja Batavia berbatasan dengan kotapraja Meester Cornelis. Selanjutnya pada tahun 1926 Mester Cornelis ditetapkan sebagai kotapraja Meester Cornelis yang menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan jumlah anggota dewan 15 orang.⁵⁰ Berdirinya kotapraja Mester Cornelis tidak berlangsung lama. Mulai 1 Januari 1936 kotapraja Meester Cornelis dibubarkan dan wilayahnya digabung dengan kotapraja Batavia⁵¹. Dengan adanya penambahan ini maka wilayah kotapraja Batavia menjadi 182 kilometer persegi. Sehingga jumlah anggota kotapraja Batavia yang sebelumnya 27 diubah menjadi 42 orang yang susunannya 24 orang Belanda, 12 orang pribumi, dan 6 timur asing.⁵²

Penggabungan ini membawa perubahan dalam bidang perundang-undangan. Peraturan daerah kotapraja Batavia yang dibuat sebelum penggabungan tidak dengan

⁴⁷ Mona Lohanda; *op.cit*, hal. 188.

⁴⁸ *Staadsblad van NI* tahun 1922 No. 216

⁴⁹ *Staadsblad van NI* tahun 1922 No. 366

⁵⁰ *Staadsblad van NI* tahun 1926 No. 367

⁵¹ *Staadsblad van NI* tahun 1934 No. 687

⁵² *The Liang Gie, op. cit*, hal. 82-83.

sendirinya berlaku untuk wilayah yang baru digabung. Peraturan lama di wilayah kotapraja Meester Cornelis masih tetap berlaku sampai 1 Januari 1938 atau diberi waktu 3 tahun sebagai persiapan sebelum diganti oleh kotapraja Batavia.

Seiring dengan terbentuknya kotapraja Batavia pengelolaan masalah keuangan langsung dikelola sendiri. Sejak terbentuknya kotapraja Batavia, maka direncanakan pembangunan kompleks perumahan yang sehat. Untuk itu tanah Partikelir Menteng yang masih ditanami padi, rumput dan pohon kelapa akan dibebaskan. Tanah partikelir Menteng dinilai seharga f 238.868 dengan 2.301 orang penggarap tanah yang tinggal di atas tanah tersebut. Pada awalnya, sebagai pemilik tanah Menteng pada pertengahan abad ke-18 disebut seorang Arab (Moor) yakni Assan Nina Daut dan Jakob P Barends. Sampai tahun 1910, kepemilikan tanah Menteng berganti-ganti dan terakhir dimiliki keluarga Shahap. Kotapraja akan mendirikan permukiman bagi masyarakat golongan atas di daerah Menteng. Untuk itu perusahaan perumahan *De Bouwploeg* membeli tanah Menteng pada tahun 1908 seharga f 238.870. Selain itu, pada tahun 1910 *Bouw en Cultuurmaatschappij* Gondangdia membeli tanah partikelir Gondangdia Prapatan dengan 3.502 orang penggarap di atasnya senilai f 217.724. Penentuan harga tanah ditentukan oleh panitia Taksiran Tanah Partikulir.⁵³

Pada tahun 1912 Dewan Kota, menyetujui rencana dari Maskapai Pembangunan dan Perkebunan Gondangdia, untuk melaksanakan pembangunan perumahan dan prasarana lainnya, di antaranya pembuatan jalan, taman serta saluran air buangan. Sampai tahun 1920, Kotapraja Batavia telah membeli tanah delapan juta meter persegi yang meliputi pembelian tanah partikelir Petojo (1917), Jati Wetan (1916), Jati Baru (1918), Karet, Dukuh, Bendungan Udik, Kramat Lontar I (1920), Gondang Dia, Jati Baru sampai tahun 1927, tanah kotapraja berkembang menjadi 11,5 juta meter persegi dengan tambahan pembelian Taman Sari dan Sentiong. Sampai 1 Januari 1930, kotapraja telah mempunyai tanah seharga 6 juta gulden⁵⁴. Pada tahun 1928, pembangunan dipusatkan di daerah Koningsplein (Lapangan Merdeka). Di

⁵³ Heuken; *op. cit.*, hal. 94.

⁵⁴ Abdurrachman Surjomihardjo, *op. cit.* hal. 27.

sekitar lapangan ini mulai dibangun kantor-kantor dan hotel, bagian barat adalah kantor-kantor, bagian selatan terdapat lapangan pacuan dan arena balap sepeda. Pada periode 1930-an inilah daerah Koningsplein mulai diatur dengan fasilitasnya.

Tabel 7: Penduduk Batavia dan Daerah Sekitarnya Tahun 1930

| Penduduk | Batavia dan Mr. Cornelis | Daerah Pinggiran |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Orang Betawi | 192.697 | 226.000 |
| Sunda | 135.251 | 15.000 |
| Jawa | 58.708 | 1.000 |
| Melayu | 5.220 | 100 |
| Orang Sulawesi Utara | 3.736 | 100 |
| Minangkabau | 3.186 | - |
| Maluku | 2.034 | - |
| Batak | 1.253 | - |
| Orang Depok dan Tugu | 721 | 200 |
| Sumatera Selatan | 799 | - |
| Madura | 317 | - |
| Lain-lain tak dikenal | 5.553 | 1.400 |
| Jumlah | 409.475 | 243.800 |
| Orang Cina | 78.185 | 9.400 |
| Eropa | 37.076 | 100 |
| Lain-lain | 7.469 | 400 |
| Jumlah seluruhnya | 532.205 | 253.700 |

Sumber: Volkstelling 1930: Vol I. Tabel I dan II

Rencana Gondangdia ciptaan Moojen diresmikan tahun 1912 berpusat pada suatu lapangan bundar yang luas. Menurut rencana lapangan dikelilingi oleh gedung-gedung umum yang besar, suatu *boulevard* dan jalan besar yang memotong lapangan bundar yang menghubungkan Menteng, Tanah Abang dan Meester Cornelis. Batas *Nieuw Gondangdia* (Menteng) sebelah timur rel kereta api, sebelah barat

Theresiakerkweg (Jalan Agus Salim Sekarang), sebelah selatan banjir kanal, sebelah utara *oude Tamarindelaand* (Jln Wachid Hasyim).⁵⁵

Sebagai sarana perlengkapan, kotapraja Batavia menyediakan air ledeng. Sebelum pembangunan jalan dan rumah dimulai, beberapa kampung perlu dipindahkan. Banyak penduduk Menteng terpaksa pindah ke Karet. Pada tahun 1915 misalnya NV. BC Gondangdia hendak menaikkan sewa tanah dari f 1,50 menjadi f 100, sedangkan sewa ladang dari f 0,50 menjadi f 124,85. Maksudnya supaya pada saat tanah dikosongkan para penggarap dan penghuni tidak mendapat kompensasi apapun untuk rumah dan pohon mereka dengan dalih tanah penggantian sudah sangat berharga. Dilain pihak beberapa penduduk Menteng meningkatkan tuntutan uang pindah f 0,05 permeter persegi menjadi f 5 permeter persegi. Hal ini mengakibatkan Sarekat Islam mengadakan pembelaan agar penggusuran dikaitkan dengan perbaikan kampung dan kesehatan⁵⁶.

Pada tahun 1925 – 1932 merupakan puncak harga tanah, di daerah Menteng permeter persegi harganya f 1,50 sampai f 10. Harga itu menurut perhitungan pada masa itu termasuk mahal.⁵⁷ Untuk mengatasi mahalnya harga tanah, diusulkan mendirikan rumah bertingkat dua seperti yang pernah dibangun di Kramat V dan VII yang dibangun Moojen 1919. Pada tahun 1924, sudah ada keluhan bahwa hidup sehat dan murah sudah tidak mungkin di Batavia, untuk itu Tillema seorang apoteker, mengusulkan adanya perumahan murah. Pada tahun 1934, di sebelah selatan banjir kanal (daerah Guntur) dibangun rumah sederhana, tetapi karena krisis ekonomi 1932 – 1937, perluasan Menteng mengalami kemunduran. Sampai tahun 1930-an perluasan kota ke arah selatan merupakan gerak pembangunan yang tidak bisa dihentikan. Jadi kota sudah membentuk poros utara selatan secara tegas. Perluasan ke timur mengalami

⁵⁵ Adolf Heuken; *loc. cit*, hal 95

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Vries, JJ de, 1927, halaman 169.

hambatan, karena di daerah timur terdapat lapangan udara Kemayoran. Sampai tahun 1940 penduduk kota Batavia sudah berjumlah 544.823 orang.⁵⁸

Kondisi kampung yang buruk akibat tanah-tanah dikuasai tuan tanah juga didorong oleh keberanian para tuan tanah menentang penguasa. Para tuan tanah diberi harapan-harapan oleh tokoh SI agar berani melawan penguasa misalnya dengan tidak membolehkan tanah-tanah mereka dibeli dengan harga murah. Pembukaan tanah partikelir di Tanah Abang juga diwarnai ketegangan sehingga untuk sementara hanya sebagian yang bisa dibeli oleh pemerintah. Begitu juga dalam kaitannya dengan kerusuhan yang terjadi di tanah Cakung pada tanggal 13 Desember 1914. Menurut informasi masyarakat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan SI pada malam hari, dan ada dugaan juga bahwa gerakan dilakukan oleh tuan tanah. Akibat keresahan-keresahan penduduk ini sebagai akibat aksi perlawanan terhadap pemerintah, sehingga banyak penduduk yang berpindah-pindah tempat.⁵⁹

Selain perkampungan yang dibangun secara terencana oleh pemerintah kolonial, juga terdapat kampung bumiputera yang penataannya diatur sendiri-sendiri oleh penduduk pribumi. Rumah penduduk saat itu terbuat dari bambu dan kayu. Ada juga yang terbuat dari batu disebut rumah gedongan yang jumlahnya tidak banyak. Para pegawai bumi putera dan penduduk yang penghasilannya besar bisa memiliki rumah setengah batu dan setengah kayu. Pagarnya terbuat dari bambu. Di halaman rumah tumbuh pohon seri, saga, kingkit, dan tanaman obat-obatan semacam tumbuhan apotik hidup. Mereka yang sakit diare atau malaria biasanya minum obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan, karena dokter masih sedikit. Kalau anak-anak sakit seperti badannya panas biasanya ke dukun sembur. Segelas air putih setelah dibacakan doa oleh orang yang dituakan atau kyai kemudian diminumkan pada anak yang sakit.⁶⁰

Migrasi orang Belanda ke daerah yang bersuasana *art deco* seperti Rijswijk, Noorwijk, Tanah Abang dan Weltevreden, pada tahun 1910, dan juga Menteng dan

⁵⁸ Kantor Sensus dan Statistika DKI Jakarta; *Jakarta Dalam Angka*, Jakarta: 1984

⁵⁹ Notulen Bataviasche Landbouw Vereeniging, 1914, hal. 33.

⁶⁰ Republika; 22 Januari 2006

Gondang Dia, mengakibatkan banyak penulis menyebut sebagai 'kota berwajah dua'. Sementara itu terdapat wajah kota lain yang sama sekali berbeda dan secara sosial terpisah. Bagian penduduk yang merupakan 93% ini menghuni wilayah yang tidak begitu luas dibanding dengan penduduk Eropa yang tinggal di daerah pinggiran kota. Mereka berjubel di daerah Pecinan, kampung berawa dan daerah rendah yang tidak menarik bagi pembangunan swasta Eropa dan Cina maupun dewan penasehat kota⁶¹.

Dengan adanya kondisi yang sangat kontras antara permukiman Eropa dan bumiputera maka dalam sidang 28 Oktober 1921, VJ. Van Marle melaporkan adanya perbedaan antara jalan-jalan raya Batavia yang lebar dengan gang-gang di kampung. Menurut Marle, jika walikota hanya menghabiskan waktu senggangnya dengan mengadakan perjalanan ke luar pulau, ia akan menyaksikan tidak satu kampungpun dari Sabang sampai Merauke seburuk dan sejerok yang ada di Batavia. Keengganan walikota membangun perkampungan kumuh karena tanah-tanah itu dimiliki tuan tanah. Tuan tanah dikatakan rakus dan pelit. Kondisi kesehatan kampung yang buruk mengakibatkan penduduk terancam kesehatan, menurunnya taraf hidup dan rusaknya jaringan sosial. Melihat kondisi ini, Thamrin pada Februari 1922, dengan menunjuk catatan van Marle, mendesak adanya perbaikan kampung dan menyatakan kekecewaan terhadap kemajuan yang sangat lambat. "Batavia masih tetap seperti lukisan dengan pigura bagus dihiasi dengan villa yang luas dengan jalan yang lebar, sementara kampung-kampung terwakili pada kanvas tak berharga".⁶²

Kondisi kampung penduduk asli Batavia sangat tidak terurus. Hamka yang pernah bermukim di gang Toahong, Taman Sari mengatakan bahwa rumah orang Betawi terdiri dari dinding bambu anyaman, atapnya rumbia, tinggal di daerah yang becek. Apabila waktu telah masuk fajar menyingsing, kedengaran sayup-sayup dari lorong kampung yang becek, suara azan mendayu-dayu. Sesudah sembahyang, penduduk melakukan ratib bersama *la illa hailallah*. Dengan suara keras dan

⁶¹ Bob Hering; *loc. cit*, hal 17.

⁶² Bob Hering, *Mohammad Hoesni Thamrin: Tokoh Betawi, Nasionalis Revolusioner Perintis Kemerdekaan*, Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hal 66.

berulang-ulang sampai ada yang *jadzab* (hilang kesadaran diri) karena ingat kepada Allah dan berzikir bersama dengan suara keras. Ketika di kampung-kampung tersebut masih terdengar suara dzikir, maka itu dapat diartikan bahwa orang Betawi masih ada.⁶³

Kondisi kampung bumiputera yang buruk menyebabkan kritik dari berbagai pihak. Muh Husni Thamrin di Dewan Kota mendesak agar perbaikan kondisi perkampungan di Batavia ditingkatkan. Thamrin mengusulkan adanya penyiraman tiap hari di kampung-kampung, perlunya penerangan jalanan⁶⁴. Atas usulan Thamrin inilah perkampungan bumiputera diadakan perbaikan, antara lain perbaikan Kampung Sawah Besar. Untuk perbaikan kampung, Dinas Pekerjaan Umum (BOW), menganggarkan sebesar f. 63.640⁶⁵. Selain itu perbaikan kompleks Kampung Pecah Kulit dengan dilengkapi prasarana jalan selebar 4,5 meter, dan jalur pejalan kaki dari beton 4,5 meter. Biaya perbaikan kampung Pecah Kulit sebesar f 11.930. Selain itu juga dilakukan perbaikan Kampung Sawah Besar pada tahun 1933 – 1934 dengan biaya f 63.640.⁶⁶

Pembangunan jalan dan saluran juga direncanakan untuk gang Bendungan Jago, Kampung Serdang, Gang Haji Dasir, perbaikan saluran Kali Baru dan Sentiong⁶⁷. Melalui rapat dewan tanggal 3 November 1931 diputuskan untuk membangun permukiman di daerah Sentiong yang disebutnya sebagai Sentiong B. Lahan yang dibangun seluas 281.750 meter persegi dengan jalan selebar lima meter. Lahan ini akan dibagi dua yaitu untuk pembangunan dengan model Eropa seluas 85.500 meter persegi. Khusus untuk wilayah ini jalan yang akan dibangun selebar 15 meter. Lahan lainnya akan dibangun rumah-rumah kecil seperti petak dan pondok. Sebelumnya dalam usulan tahun 1931, wilayah Sentiong juga akan dibangun sebagai

⁶³ Ridwan Saidi; *Corak Islam Masyarakat Betawi Peran Ulama dan Jagoan Dalam Kemerdekaan dan Pembangunan Bangsa*; dalam Yasmin Zaki Shahab (ed); *Betawi Dalam Perspektif Kontemporer: Perkembangan Potensi dan Tantangannya*; Jakarta: Lembaga Kebudayaan Betawi; 1977, hal. 96.

⁶⁴ Bob Hering; *op. cit*, hal. 63

⁶⁵ Gemeentebld 1934, No.122, Stadsgemeente Batavia, No. 2 4 5 I, Afd II

⁶⁶ Gemeentebld 1933, No.419, Stadsgemeente Batavia

⁶⁷ Gemeentebld 1931, No. 149, Stadsgemeente Batavia No. G/R, Bag II, April 1931.

asrama polisi. Tanah untuk pembebasan ini dihargai 50 sen per meter persegi⁶⁸. Besarnya pembangunan jalan-jalan yang diperkeras dengan aspal untuk tahun anggaran 1932 telah menghabiskan aspal Buton 300 ton dengan harga f 55, 25 perton dan 100 ton colas dengan harga f 97 perton.⁶⁹

Sementara itu untuk perbaikan Gang Kemayoran, dan jalur pertahanan Van Den Bosch diajukan berdasarkan usulan pemerintah pada tahun 1931. Khusus mengenai Gang Kemayoran, Kandang Sampi dan Utan Panjang mendapat perhatian khusus karena daerah Kemayoran Wetan permukimannya sudah mulai padat sehingga pembangunan jalan segera direalisasikan.⁷⁰

Untuk memperbaiki perkampungan di luar Menteng pemerintah melakukan pembukaan tanah dan jalan-jalan yang menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain. Dalam rapat dewan pada 6 November 1929 anggota dewan kota setuju untuk menyerahkan hak kepemilikan tanah propinsi kepada kotapraja Batavia yaitu Laan Canne yang dahulu merupakan lapangan tembak termasuk lahan di wilayah Petojo untuk keperluan kotapraja⁷¹. Tanah dibeli dengan harga 1,50 gulden per meter persegi dan harga belinya dilakukan secara berangsur selama 5 tahun. Angsuran pertama jatuh tempo dua tahun. Setelah penyerahan lahan, kotapraja meratakan lahan siap bangun dan membangun jalan penghubung. Pembangunan jalan-jalan di sisi selatan dimulai dari lahan bekas lapangan tembak yang melewati Laan Canne hingga ke timur sampai di kanal Krukut. Selanjutnya antara Laan Trivelli dan jalan Tangerang, bagian yang belum ada jalan, sepanjang sisi timur Krokot kanal akan dibangun jalan, menyambung dengan jalan antara Gang Ketapang dan Djati Baroe. Pembangunan jalan dengan biaya untuk pembangunan jalan sebesar 13.050 gulden,

⁶⁸ Gemeentebld 1932, No.61, Stadsgemeente Batavia, Rancangan Keputusan No. 1640/Bag. II; Tanggal 1 Maret 1932

⁶⁹ Gemeentebld 1932, No.61, Stadsgemeente Batavia, Rancangan Keputusan No. 1640/Bag. II; Tanggal 1 Maret 1932

⁷⁰ Gemeentebld 1931, No. 150, Stadsgemeente Batavia No. G/R, Bag II, 1931.

⁷¹ Gemeentebld 1929 No.428

termasuk biaya meratakan bangunan dan membangun jembatan. Sedangkan biaya pembangunan jalan kedua, sebesar 26.000 gulden.⁷²

Pada tahun 1931, Kotapraja membebaskan lahan untuk pembuatan jalan di daerah Cideng Timur (*Tjideng Oost*).⁷³ Untuk memperlancar hubungan antara Batavia ke Meester Cornelis, maka kota membangun jalan penghubung Batavia-Meester Cornelis sepanjang banjir kanal. Jalan penghubung direncanakan mulai dari viaduct Manggarai sepanjang sisi selatan banjirkanal sampai J.P.Coen-Stichting, lalu terhubung sampai Goentoerweg. Pembangunan awal dimulai dari wilayah kotapraja Meester Cornelis dengan lebar tiga meter. Selain itu juga akan dibangun jalan dari J.P.Coen-stichting hingga *Westerslokkan* (saluran Minangkabau) dengan jalan selebar 6 meter yang diperkeras. Berkaitan dengan perluasan Menteng dan Menteng Pulo, maka Kotapraja Meester-Cornelis akan membangun jalan dari viaduct di Manggarai hingga batas kotapraja dengan jalan selebar lima meter yang diperkeras. Pembangunan itu untuk mengurangi keramaian jalan antara Salemba-Matraman. Biaya pembangunan jalan penghubung tersebut akan ditanggung bersama oleh kedua kotapraja. Misalnya pembangunan di wilayah kotapraja Meester-Cornelis akan ditanggung kotapraja setempat. Sementara itu untuk bagian pekerjaan lainnya, termasuk bangunan jembatan di *Westerslokkan*, akan ditanggung bersama oleh kedua kotapraja. Taksiran biaya dari pembangunan yang akan dikerjakan oleh kotapraja ini, diperkirakan f 9.222 untuk pembangunan jalan, f 3020,52 untuk jembatan atau jumlah keseluruhan f 12.242,52. Dari jumlah tersebut kotapraja menanggung biaya sebesar f 6121,26.⁷⁴

Wilayah Petojo mulai digarap sejak tahun 1932, yaitu dengan mengadakan pengaplingan tanah kotapraja yang terletak di Petojo, sebelah utara dari Laan Trivelli dan sebelah barat saluran air Krukut. Berdasarkan keputusan 11 Januari 1932 No.42/G.R, ditentukan satuan harga dari persil yang terletak di sebelah utara dari perpanjangan Laan Trivelli, harganya 10 persen lebih rendah dari harga persil yang

⁷² Gemeentebld 1931 No.151, Stadsgemeente Batavia, Batavia, 16 April 1931, No.4289, Afd: II

⁷³ Gemeentebld 1931 No.96, Stadsgemeente Batavia, Batavia, 5 Maret 1931, No.2402)Afd: II

⁷⁴ Gemeentebld 1934, No.132, Stadsgemeente Batavia, No.2499, Afd:II, 14 April 1934

akan dibangun jalan.⁷⁵ Usulan tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan rencana pengaplingan yang lebih detail yaitu bahwa harga tanah yang digunakan untuk jalan lebih rendah 10% dari harga tanah di pasaran mengingat untuk kepentingan umum.⁷⁶

Sementara itu di daerah Petojo Udik, pembelian tanah dimulai dari sudut perpanjangan jalan Djagamonjet yang menembus persil di jalan Petodjo Oedik. Pemilik telah menerima pengumuman dari komisi harga yang menyatakan bahwa mereka bersedia untuk menjual tanahnya dengan harga f 5.500 kepada kotapraja.⁷⁷

Pembangunan jalan yang diusulkan oleh kotapraja tidak seluruhnya dapat disetujui oleh Dewan. Contohnya adalah ketika kotapraja mengajukan perbaikan kampung dan jalan di daerah Jalan Tangerang, Jalan Cideng Barat, jalan Kampung Petojo Sawah Gang V, semua ditolak oleh anggota dewan. Dewan hanya menyetujui jalan-jalan yang melewati persil-persil yang sudah dibebaskan yang dapat dilaksanakan. Untuk proyek ini pemerintah mengajukan anggaran sebesar f 27.000, setelah sebelumnya dengan susah payah memperoleh izin dari komisi teknis. Jalan-jalan yang akan dibangun adalah jalan Cideng Barat dan perpanjangan jalan Jembatan Lima.⁷⁸

Perbaikan kompleks Bukit Duri Tanjakan II, dinas PU Kotapraja mengajukan rencana perbaikan kampung sebesar f 9.300, dan untuk pembebasan petak tanah bagi pembukaan jalan berjumlah f 1.250. Perbaikan kampung selain itu seluruhnya memerlukan dana f 10.550.⁷⁹

Dalam tahun 1939 anggaran untuk perbaikan kampung sebesar f 245 ribu, yang terdiri atas f 75 ribu ditambah f 85 ribu subsidi negara ditambah kredit sisa selama tahun 1938 dari f 85 ribu. Dalam rangka perbaikan kampung ini, berkali-kali keberatan diajukan tentang belum tercapainya kesepakatan antara kotapraja dan para pemilik tanah tentang pelepasan tanah-tanah partikelir. Pada tahun 1939 dilontarkan

⁷⁵ Gemeentebld 1934, No.92, Stadsgemeente Batavia, Rancangan Keputusan No. /G.R., Afd: II

⁷⁶ Gemeentebld 1934, No.93, Staadsgemeente Batavia, Rancangan keputusan, Batavia, 1934, No. /G.R, Afd: II

⁷⁷ Gemeentebld 1934 No.28, Stadsgemeente Batavia, No.312, Afd: II, Batavia, 15 Januari 1934

⁷⁸ Gemeentebld 1934 No. 127, Stadsgemeente Batavia, No.2494, Batavia, 14 April 1934, Afd. II

⁷⁹ Gemeentebld 1938 No. 377, Stadsgemeente Batavia, Nomor: 14361, Batavia, 5 Nopember 1938

untuk membentuk sebuah komisi, lebih tepatnya komisi bersama anggota dewan pribumi yang mencoba mencari penyelesaian dari kesulitan tersebut lewat penelitian dan pembicaraan, yang bisa memuaskan penduduk dan pemerintah. Para anggota lain yang sepenuhnya bisa menyetujui usulan ini memberikan pertimbangan untuk segera memulai dengan melibatkan eksekutif.⁸⁰

Dari uraian di atas terlihat bahwa selama 1929 sampai dengan 1939 dana yang dikeluarkan kotapraja untuk perbaikan dan pembangunan kampung dan jalan adalah seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 8: Pembangunan dan Perbaikan Kota 1929 – 1939

| No | Jenis Pembangunan | Tahun | Biaya (f) | Keterangan |
|----|---------------------------------------|-------|-----------|------------|
| 1. | Pembangunan Daerah Petojo | 1929 | 13.050 | Tahap I |
| 2 | Pembangunan Persil Cideng Timur | | 26.000 | Tahap II |
| 3 | Pemb. Jln. Batavia – Meester Cornelis | 1934 | 662.126 | |
| 4. | Pemb. Jln. Cideng, Petojo Sawah | 1934 | 27.000 | |
| 5. | Perbaikan Sawah Besar | 1934 | 63.640 | |
| 6. | Kompleks Pecah Kulit | 1934 | 15.105 | |
| 7. | Kebon Sirih dan Tanah Rendah | 1937 | 75.000 | |
| 8. | Komplek Bukit Duri Tanjakan II | 1938 | 10.550 | |
| 9. | Perbaikan Matraman dan Salemba | 1939 | 11.675 | |
| 10 | Perbaikan Kampung lainnya | 1939 | 245.000 | |
| | Jumlah | | 1.149.146 | |

Diolah dari Gemeentebld tahun 1929 – 1939

Berdasarkan teori morfologi kota, maka perluasan kota Batavia sampai tahun 1940 menunjukkan bahwa poros utara selatan yang semakin kuat. Faktor utama yang

⁸⁰ GEMEENTEBLAD 1939, Nomor 76, Stadsgemence Batavia, Nomor: 4017, Batavia, 22 Maret 1939

mempengaruhi mobilitas adalah poros transportasi yang menghubungkan pusat kota dengan daerah luarnya.⁸¹

3.5 Pembangunan Kota Baru Kebayoran dan Jalan MH. Thamrin

Gelombang pertama meningkatnya penduduk Jakarta setelah kemerdekaan terjadi ketika ibukota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Dari tahun 1948 sampai 1949 jumlah penduduk meningkat 62,8% dari 823.356 jiwa tahun 1948 pada tahun 1949 menjadi 1.349.625 jiwa. Pada tahun 1952, datangnya penduduk dari luar Jakarta sudah dikeluhkan. Dilaporkan oleh residen Banten beribu-ribu orang datang ke Jakarta, sehingga pemecahan perumahan bagi mereka bukan lagi menjadi tanggung jawab Jakarta, untuk itu perlu dibuat kesepakatan antara bupati dan residen di sekitar Jakarta, agar penduduk yang tidak memegang surat izin tinggal di Jakarta tidak menetap terlalu lama. Awal tahun 1940-an penduduk Jakarta mencapai 540.000, dan dalam waktu 20 tahun sudah meningkat menjadi 2.973.053 jiwa (1961) pada tahun 1971, berjumlah 4,684 juta sampai 1985 jumlah penduduk Jakarta sebanyak 6.164.848 jiwa. Melihat kecenderungan yang terus meningkat diperkirakan penduduk Jabotabek pada tahun 2010 dengan arus masuk pendatang konstan sekitar 260.000 pertahun akan berjumlah 30 juta orang, khusus untuk DKI Jakarta menjadi 11,2 juta orang⁸².

Masalah urbanisasi seringkali diikuti masalah sosio kultural serta masalah perkotaan yang lain. Para migran yang berasal dari daerah dan tinggal di kota seringkali mengalami berbagai macam perasaan dan perilaku tertentu, misalnya *cultural shock* yaitu jiwanya terguncang karena perbedaan kultur antara dirinya dengan masyarakat yang baru dikenal. Di kota-kota berkembang, perbedaan tingkat kemajuan di antara unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki penduduknya di antaranya perbedaan menyerap teknologi yang berkembang pesat tetapi tidak diikuti dengan kemampuan yang ada, maka muncul *cultural lag*. Perilaku tersebut di antaranya

⁸¹ Hadi Sabari Yunus; *Struktur Tata Ruang Kota*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2005, hal. 43.

⁸² Kees Grijns; *op.cit*, hal 271.

membuang sampah sembarangan di sungai, jalanan, mendirikan bangunan di tempat-tempat yang dilarang (bantaran sungai), halte dan lain sebagainya. Penduduk kota dengan status sosial ekonomi rendah seperti buruh, memadati pusat kota karena pertimbangan biaya transportasi. Dengan tetap tinggal di pusat kota mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang dirasakan cukup besar daripada tinggal di kawasan pinggiran kota (*suburban*). Mereka bahkan memilih tinggal di gubug-gubug kota di daerah *slum* maupun *squatter* di pusat kota. Ketika kondisi pusat kota yang sudah tidak sehat, maka mendorong sebagian penduduk kota menempati daerah pinggiran kota sebagai tempat tinggal. Proses berpindahnya penduduk ke pinggiran kota disebut *suburbanisasi*.⁸³ Proses *suburbanisasi* di Jakarta telah berlangsung sejak lama.

Pendudukan Jepang dengan politik bumi hangus serta pembakaran kampung-kampung, mengakibatkan kerusakan perumahan. Sesudah perang dunia II ditaksir 2.000 buah mengalami kerusakan. Pada tahun 1940 telah direncanakan pembangunan rumah sebanyak 1.000, tetapi pada akhir 1949 baru terealisasi 20% saja. Untuk mengatasi masalah perumahan, sejak tahun 1948 direncanakan dibangun kota Satelit Kebayoran Baru seluas 730 hektar. Daerah ini diproyeksikan sebagai daerah perumahan yang tepinya bersinggungan dengan jalan kereta api Tanah Abang – Tangerang. Pembangunan dimulai tahun 1949. Tanah seluas 730 hektar dibagi untuk keperluan perumahan rakyat 152,5 hektar dengan banyaknya persil 6.730, perumahan samadia/ sedang 69,8 hektar dengan banyaknya persil 2.198, villa 55,1 hektar dengan banyaknya persil 834, bangunan istimewa 75,2 hektar, flat 6,6 hektar, toko-toko 17 hektar, industri 20,9 hektar taman-taman kota 118,4 hektar, jalan-jalan 181,5 hektar dan sawah-sawah pinggiran 33 hektar. Semua ini dimaksudkan untuk memberi tempat kediaman bagi 100.000 penduduk.⁸⁴

⁸³ *Ibid*; hal 94.

⁸⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Republik Indonesia; *Pembangunan Kotabaru Kebajoran*, Djakarta: Kementerian Pengadjaran Umum dan Tenaga RI, 1953, hal. 15.

Gagasan pembangunan kota Kebayoran pada awalnya berasal dari Ir. VR. Van Romondt. Gagasan tersebut pada 19 Juli 1948 dibicarakan dalam rapat Panitia Perumahan Pusat. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 1948 rencana tersebut diajukan kepada pemerintah dan tanggal 21 September 1948, pemerintah menerima rencana tersebut. Untuk mempercepat pembangunan, maka tanggal 1 Desember 1948 sudah dimulai pembayaran ganti rugi kepada penduduk. Selain tanah, pemerintah juga mengganti rugi 700.000 pohon terdiri dari 26 macam pohon buah-buahan, 1.668 rumah bangunan rumah, kios dan kandang. Pada tahap awal ini, Desember 1949, pemerintah sudah mengeluarkan dana 15 juta gulden. Rencana pembangunan kota disusun oleh Praktek Ingenieur M. Soesilo dari *Central Planologish Bureau*. Dalam perencanaannya, kota baru yang akan dibangun diberi nama Kota Satelit Kebayoran. Penamaan kota satelit sebenarnya tidak tepat karena kota satelit biasanya terletak 15 kilometer dari ibukota, sedangkan Kebayoran hanya 8 kilometer dari kota. Peletakan batu pertama dilakukan 18 Maret 1948.⁸⁵ Sebelum ditentukan sebagai kompleks perumahan menjelang perang dunia II, wilayah Kebayoran sebenarnya telah diteliti untuk dijadikan lapangan terbang internasional yang baru menggantikan lapangan Kemayoran, karena dianggap mengganggu pemekaran kota ke timur, tetapi rencana itu gagal. Pelaksanaan pembangunan Kotabaru Kebayoran diserahkan kepada *Central Stichting Wederopbouw* (CSW) suatu yayasan yang didirikan oleh pemerintah dengan akte notaris tanggal 1 Juni 1948. Sejak penyerahan kedaulatan tahun 1950, CSW berubah namanya menjadi Yayasan Pemugaran Pusat (JPP). Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden No. 65 tahun 1951, JPP atau CSW dinyatakan bubar. Hak milik dan hutang piutang dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Untuk melanjutkan pembangunan, dengan keputusan Menteri Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal 4 September 1950 dibentuklah suatu jawatan khusus yaitu Jawatan Pekerjaan Umum Kotabaru Kebayoran terhitung tanggal 1 Juni 1950, kemudian tahun 1952 diubah lagi menjadi Pembangunan Khusus Kotabaru

⁸⁵ Abdurrachman Surjomihardjo; *Perkembangan Kota Djakarta*; Djakarta: Dinas Museum dan Sedjarah DCI, 1970, hal. 30.

Kebayoran, sebagai suatu organisasi dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga⁸⁶.

Dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Kebayoran dilakukan oleh Perusahaan Tanah (*Land Business*) dengan ketentuan, bahwa perusahaan membayar kepada negara sebesar f 0,30 tiap meter persegi untuk setiap persil. Berdasarkan perhitungan tersebut maka pemerintah mengeluarkan dana 15 juta rupiah untuk pembelian tanah meliputi daerah Grogol Udik, Pelapetogokan, Gandaria Utara, Benajan, Kecamatan Kebayoran dan sebagian kabupaten Jatinegara. Karena tidak cukup pada tahun 1951 dananya ditambah 2.500.000 rupiah sehingga jumlahnya menjadi 17.500.000 rupiah⁸⁷.

Pembangunan perumahan yang luas tanahnya 323 hektar direncanakan untuk dibangun 7.546 rumah, namun sampai tahun 1952 baru terlaksana sebanyak 4.630 rumah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 9: Peruntukan Tanah di Kebayoran

| | | Perumahan Rakyat | Rumah samadia | Villa/flat | Toko | Jumlah |
|---|------------------|------------------|---------------|------------|------|--------|
| 1 | Rencana Kota | 2.676 | 3.197 | 1.168 | 505 | 7.546 |
| | Realisasinya | | | | | |
| 1 | CSW | 1.772 | 286 | | | 2.058 |
| 2 | Rumah Negeri | 285 | 1.543 | 154 | - | 1.982 |
| 3 | Rumah Partikelir | - | 24 | 555 | 11 | 590 |
| | Jumlah (2+3+4) | 2.057 | 1.853 | 709 | 11 | 4.630 |

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Republik Indonesia

Adapun sisa persil yang belum dipergunakan untuk perumahan rakyat 619, rumah samadia 1.344, villa 459, dan toko 494, dengan jumlah persil seluruhnya yang

⁸⁶ Kementerian Pekerdjaan Umum; *op. cit*, hal. 18

⁸⁷ Kementerian Pekerdjaan Umum; *op. cit*, hal. 22

belum digarap sebanyak 2.916. Pembangunan perumahan diusahakan dengan memberikan pekarangan lebih luas sehingga mendekatkan hubungan antara penghuni dan alamnya. Menurut perbandingan yang normal, luas jalan, pertamanan dan sebagainya adalah 30% dari jumlah areal kota seluruhnya. Dalam rencana kota Kebayoran perbandingan ini ditingkatkan menjadi 50%. Pada tahap awal tahun 1951 CSW telah selesai membangun 2.058 sebagian sudah terjual, sedangkan yang disewakan 1.717. Biaya untuk membangun 1.717 rumah sebesar 19.323.530 rupiah, dari jumlah tersebut terdiri dari 788 rumah semi permanen. Rumah tersebut disewakan dengan harga antara 17,50 rupiah sampai 100 rupiah⁸⁸. Selain itu di kotabaru Kebayoran juga dibangun rumah negeri sebanyak 1.510 rumah, rumah negeri golongan ke I 183 rumah, pasar 3 buah, sekolahan 14 buah, rumah partikelir 559 rumah, rumah yayasan CSW sebanyak 2.015 rumah. Pembangunan perumahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga dilakukan oleh dinas-dinas pemerintah, perusahaan swasta, sehingga model rumahnya bermacam-macam. Berdasarkan perhitungan maka biaya yang dikeluarkan untuk pembebasan tanah seluas 730 hektar adalah 16 juta rupiah ditambah 2,5 juta rupiah, menyiapkan tanah menjadi siap bangun 3,5 juta rupiah, pembuatan jalan primair dan sekunder 6,25 juta rupiah, jalan raya 1,5 juta rupiah, bangunan pada jalan raya 1,2 juta rupiah, saluran air minum 1,6 juta rupiah dan saluran air 4,8 juta rupiah jumlah seluruhnya 38,1 juta rupiah. Angka ini tidak termasuk biaya pembangunan penanaman modal dari perusahaan listrik dan gas.⁸⁹

Untuk menjamin kesehatan kota, maka pembangunan Kebayoran dilengkapi dengan sistem drainase yang modern. Sistem drainase disusun oleh Ir. HK. Van Zijl de Jong, kepala bagian Pengairan dan Assainering. Dalam garis besarnya rencana tersebut adalah air dari sungai Grogol akan diambil dan dinaikkan dengan kapasitas 300 liter perdetik. Air pembilas terus dinaikkan melalui pipa tekanan dari beton sampai kepada tingkatan yang cukup tinggi dan terus dimasukkan suatu penangkap

⁸⁸ *Ibid*, hal. 30.

⁸⁹ *Ibid*.

air. Untuk itu dibutuhkan 9.500 meter kubik beton dan 123 kilometer pipa saluran harus dipasang.⁹⁰

Setelah pembangunan kotabaru Kebayoran, berlangsung ternyata masalah pembebasan tanah tidak seluruhnya memuaskan penduduk. Hal ini mengingat pembebasan tanah dilakukan oleh perusahaan tanah, sehingga ada permainan masalah harga antara pemerintah dengan perusahaan. Dalam rangka pembangunan Kebayoran Baru, kira-kira 800 rakyat tani yang dipimpin oleh M. Zain menyampaikan protes agar tanah-tanah mereka diganti rugi per meter empat rupiah. Pernyataan tertulis disampaikan kepada Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, Walikota Kotapraja, Jaksa Agung. Dalam pernyataannya mereka menyampaikan riwayat pengambilalihan tanahnya yang sudah dilakukan sejak tahun 1948 - 1949. Pada waktu Hilman Djajadiningrat menjadi Gubernur Militer Jakarta, terjadilah paksaan atas tanah-tanah kebun buah, sawah hak milik asli penduduk di Petogokan, Senayan, Gandaria yang sekarang menjadi Kotabaru Kebayoran. Sekitar 3.000 pemilik tanah terpaksa menyerahkan tanahnya dan tanah-tanah mereka ditaraktor oleh alat-alat militer Belanda. Pada awalnya penduduk minta ganti rugi empat rupiah permeter, tetapi pemerintah Belanda mengatakan bahwa dikasihkan atau tidak hanya diganti rugi 20 sen setiap meter persegi, bahkan pemerintah berhak merampas tanpa ganti rugi. Setelah penyerahan kedaulatan pembangunan diambil alih oleh pemerintah nasional.⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Berdasarkan UU Darurat 1950/20, pemerintahan Kota Jakarta, ditetapkan dalam keputusan Presiden RIS 1950 No. 125 dan dituangkan dalam berita negara 1950 No. 18 dijalankan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat oleh seorang walikota. Mengenai kedudukan Kota Jakarta sebagai suatu daerah swatantra, dalam undang-undang federal tersebut ditentukan bahwa pemerintahan daerah tersebut dengan wilayah yang baru dinamakan Kotapraja Jakarta Raya. Dengan batas-batas yang baru maka luas wilayah kotapraja Jakarta Raya menjadi 530 km persegi. Wilayah yang baru itu meliputi kotapraja Jakarta, Pulau Seribu, distrik Tangerang Ilir yaitu onderdistrik Cengkareng, sebagian distrik Kebayoran yang meliputi Kebon Jeruk, Kebayoran Ilir dan Kebayoran Udik, sebagian Kramatjati yaitu onderdistrik Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Pasar Rebo, sebagian distrik Bekasi yang meliputi onderdistrik Pulogadung, Cilincing dan Semper. Selanjutnya peraturan yang termuat dalam *Stadsblad 1948 No. 178* dicabut sedang wilayah lainya dari Distrik Federal Jakarta yang tidak diambil untuk memperluas wilayah Jakarta adalah distrik Tangerang Udik, Distrik Depok semuanya dikembalikan untuk diurus oleh Negara Bagian Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 31 Maret 1950 Gubernur Distrik Federal meletakkan jabatannya dan menyerahkan kekuasaan pemerintahannya kepada Walikota Jakarta Suwirjo sesuai dengan wilayah pembulatannya. Sebagai daerah yang dipimpin

Dalam penetapan ganti rugi dan cara pembayaran sampai tahun 1953 tidak ada kepastian. Ada yang diganti rugi 20 sen ada yang diganti rugi 30 sen. Sementara harga 20 sen – 30 sen dibayar dengan menyicil, sehingga pemilik tanah yang buta huruf tidak mampu meneliti kembali tanah mana yang sudah dibayar dan berapa luasnya. Sedangkan penggantian tanah untuk pembangunan jalan raya dari jembatan tinggi (*viaduct*) sampai Kebayoran ganti ruginya 6 rupiah. Sampai tahun 1953 ada 300 penduduk yang tidak mau pindah sebelum ganti rugi 4 rupiah dibayarkan. Panitia menuntut supaya pemerintah memberi ganti rugi dan dilarang mengusir penduduk yang masih bertahan sebelum ada rumahnya dan tempat usahanya.⁹²

Untuk menindaklanjuti keluhan warga Panitia Kebayoran akhirnya pemerintah memberi tambahan dananya yang jumlahnya mencapai 20 juta rupiah. Dengan tambahan dana tersebut, Pemerintah menyatakan tidak akan menambah pembayaran lagi karena kotapraja tidak mempunyai dana. Adanya tekanan dari pemerintah ini akhirnya rakyat terpaksa menerima ganti rugi dan mereka mencari tempat tinggal lebih ke pinggir. Seperti yang dialami oleh keluarga Mak Enoh. Mak Enoh, pada waktu pembebasan tanah orang tuanya di daerah Petogokan, mengatakan bahwa selain tanah, tanaman juga diberi ganti rugi. Orang tuanya membawa uang satu karung, kemudian dibelikan tanah di Blok A, yang kemudian digunakan sebagai tempat untuk berjualan⁹³. Tetapi setelah tinggal di daerah ini beberapa lama, mereka harus pindah lagi karena akan dibangun pasar dan pertokoan. Sekarang mereka terpaksa pindah di daerah pinggiran Depok.

Hampir bersamaan dengan pembangunan Kebayoran Baru juga diadakan pembangunan perumahan di daerah Petojo, Cideng, Duku Tanah Abang (bekas lapangan aduan anjing).⁹⁴ Daerah ini sering banjir sehingga pembangunan saluran

oleh Walikota Kepala Daerah Jakarta Raya, maka wilayah Kotapraja Jakarta Raya dibagi dalam satuan-satuan administratif yang lebih kecil yaitu kewedanan yaitu Penjaringan, Tanjung Priok, Gambir, Matraman, Kebayoran, dan Kramatjati, 20 Kecamatan dan 136 kelurahan; lihat The Liang Gie; *loc. cit.*; hal. 58.

⁹² Merdeka, 20 Pebruari 1953

⁹³ Wawancara dengan Mak Enoh (umur 75 tahun)

⁹⁴ Lukisan Mingguan, tahun 1 No. 42 tahun 1949

air diperkampungan lebih ditingkatkan. Ini menunjukkan bahwa Cideng sejak tahun 1950-an sudah dilanda banjir akibat saluran yang kurang bagus.⁹⁵

Untuk menghubungkan kota Jakarta dengan Kebayoran Baru dibuat jalan dengan lebar 40 meter yang terdiri dari dua jalan besar untuk lalu lintas cepat, dua jalan untuk lalu lintas jalan biasa di tengah-tengah ada jalan rumput lebarnya enam meter. Untuk pembuatan jalan tersebut tanah urug diambil dari jurang Bendungan kurang lebih 20.000 meter kubik. Untuk mempercepat pembangunan, penduduk asli di Kebayoran Baru dipindahkan ke desa Senayan dan desa Pella. Pada tempat-tempat tersebut didirikan rumah sebanyak 700 buah. Pada akhir tahun 1950 di Kebayoran Baru telah dibangun 3.000 rumah, dengan 1,3 juta meter persegi jalan tanah. Kenyataannya rumah-rumah di Senayan dan Pella tidak semua dihuni penduduk asli, mereka kebanyakan tidak cocok menempati daerah tersebut.⁹⁶

Pada tahap selanjutnya pembangunan jalan dari jalan Thamrin melalui permukiman liar yang berada di Kebon Sirih, Kampung Lima, Jalan Irian, Jalan Madura, Jalan Gresik. Sebanyak 400 penghuni liar dipindahkan ke Bendungan Ilir Petamburan. Selain itu juga dibangun saluran dari jalan Asem Lama Kampung Lima. Pemindahan saluran ini untuk mencegah bahaya banjir.⁹⁷

Penduduk yang menghuni di sekitar Jalan MH. Thamrin sebagian dipindahkan ke Tanjung Grogol dan Kebayoran Baru. Dalam pemindahan penduduk ini pemerintah memberi ganti rugi dan ongkos pindah. Apabila tidak ada protes dari warga, pembangunan Jalan Thamrin ditargetkan selesai tahun 1954. Tetapi warga tidak mau pindah ke Tanjung Grogol dan Kebayoran Baru dengan alasan tempat tersebut jauh dari kota tempat bekerja.⁹⁸

Berlarut-larutnya pemindahan penduduk yang tinggal di daerah Jalan Thamrin, dapat dilihat pada kejadian di Pintu Kecil dan Jalan Irian. Penduduk di jalan Irian

⁹⁵ Lukisan Mingguan, tahun 1, No. 46, 1949

⁹⁶ Kementerian Penerangan; *Republik Indonesia: Kotapradja Djakarta Raya, 7 Tahun Kotapradja*, Jakarta: Deppen, 1952, hal 5.

⁹⁷ Kotapraja 1951, November 1951

⁹⁸ Majalah Merdeka, No. 38 th VII, 18 September 1954

seharusnya dipindahkan dan sudah bersedia dipindahkan. Masyarakat merasa dirugikan dengan upaya pemerintah ini. Masyarakat akhirnya membentuk Komite Rakyat yang diketuai oleh M. Tohir. Dalam rapat 16 Agustus 1951, Komite Rakyat memutuskan mengajukan permohonan kepada pemerintah yang berisi tuntutan bahwa rakyat tidak setuju dua kelurahan yaitu Kampung Lima dan Kebon Sirih di pindahkan. Komite juga menuntut bahwa rumah yang dibongkar harus diberi ganti rugi. Untuk itu penyelesaian masalah pembongkaran harus melalui Komite Rayat.⁹⁹

Di lain pihak, karena pemerintah sudah terlalu lama menunggu tetapi penduduk tidak segera pindah, maka Damiri seorang Pegawai Urusan Daerah, datang ke Jalan Irian. Pagi itu tidak satu orangpun laki-laki, berada di rumah, maka sore harinya, Damiri datang lagi dan ternyata sudah berkumpul 200 orang minta rapat dan akan mengurus sendiri atas nama Komite Rakyat minta pindah ke Grogol. Akibat tekanan dari warga, Damiri yang hanya seorang diri melarikan diri khawatir terjadi pengeroyokan atas dirinya.¹⁰⁰

Pihak Kotapraja yang diwakili R. Sujoso, dalam menanggapi tuntutan Komite Rakyat, tetap pada pendiriannya, bahwa rumah yang dibongkar tidak akan diberi ganti rugi, karena rumah-rumah tersebut didirikan di atas tanah Kotapraja, kalau rumah-rumah yang dibongkar diberi ganti rugi, yang menerima uang ganti rugi adalah pemilik rumah bukan rakyat yang menyewa rumah. Akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1951, pihak kotapraja mengadakan pembongkaran secara paksa sebanyak 125 rumah dan tanggal 29 Agustus 1951 sebanyak 85 rumah. Dalam setiap pembongkaran rakyat mengadakan perlawanan, bahkan pada waktu pembongkaran pertama, telah terjadi kekerasan, sehingga polisi harus melepaskan tembakan dan menahan Moh. Tohir.¹⁰¹ Pemandahan rumah penduduk akhirnya dapat selesai meskipun harus dengan paksaan.

Bendungan Ilir disiapkan sebagai permukiman baru bagi penduduk yang rumahnya terkena pembongkaran di Kampung Lima dan Kebon Sirih. Disediakan 100

⁹⁹ Abadi; 13 Juli 1951

¹⁰⁰ Notulen Rapat DPR-GR 1951, hal 145

¹⁰¹ Harian Rakjat; 21 Agustus 1951

rumah rakyat. Penduduk yang tidak mau tinggal di rumah baru, diberi tanah untuk dibangun sendiri. Sebagai pelengkap dibangun juga pasar Bendungan Ilir dan juga alat angkutan sampai di kota. Rumah yang dibongkar, tidak diberi ganti rugi, tetapi disediakan truk untuk mengangkut barang-barangnya ke rumah yang baru.¹⁰²

Pembangunan saluran di Kebayoran Baru ternyata tidak seluruhnya tuntas, daerah Kampung Senayan telah mengalami banjir pada tahun-tahun 1950 dan tahun 1951. Hal ini disebabkan saluran pembuangan di Kebayoran Baru hanya diselesaikan sekitar 25%. Pembuangan air yang hanya difokuskan di Kebayoran Baru telah mengakibatkan banjir di Senayan.¹⁰³

3.6 Pembelian Tanah Partikelir dan Pembangunan Perumahan Pegawai

Setelah kemerdekaan tanah partikelir banyak tidak terawat sehingga pemerintah membeli tanah-tanah partikelir. Tanah-tanah yang diambil alih Jepang dikembalikan kepada pemiliknya¹⁰⁴. Tanah seluas 469.506 hektar telah dibeli kembali seharga f 43.860.198,56. Semenjak 1 Januari 1950, tinggal 19 tanah partikelir di sebelah barat Cimanuk seluas 14.938 hektar yang dibeli pemerintah. Tanah partikelir dibagi dua wilayah:

- a. Di sebelah barat Sungai Cimanuk diatur dalam *Staatsblad* 1942 No. 22 Reglement tanah-tanah partikelir tertanggal 8 April 1949, No. 1, Di sebelah timur Cimanuk 14 tanah dengan luas 6.860 hektar.
- b. Di sebelah timur Cimanuk diatur *Staatsblad* 1880 No. 154 (Semarang sampai Surabaya) per Januari 1949 tanah partikelir di Jawa seluas 498.839 hektar.

¹⁰² *Harian Rakjat*; Kamis, 16 Agustus 1951

¹⁰³ *Kotapraja* No. 9 tahun 4, 15 Januari 1954 hal 6 – 8

¹⁰⁴ *Kotapraja* No. 5 tahun ke 2 September 1951

Tanah agraris di sebelah barat Cimanuk milik *NV Javasche Particular Landerijn Mij* sebanyak 13 tanah dengan luas 78.412 hektar, tanah partikelir lain sebanyak 54 tanah dengan luas 406.432 hektar, jumlahnya 67 tanah, luas seluruhnya 484.844 hektar. Tanah-tanah tersebut terdapat di *Staadslanden Hamintee* Jakarta 50 tanah dengan luas 4.447 hektar, Semarang 14 tanah 1292 hektar, Surabaya 45 tanah 1386 hektar. Sampai 1 Januari 1950 masih ada 19 tanah partikelir di sebelah barat Cimanuk dengan luas 14.938 hektar.¹⁰⁵

Di Jakarta ada 4 macam tanah yaitu tanah kotapraja, tanah negara, tanah individual dan tanah partikelir. Masalah tanah ini menjadi semakin rumit ketika Jepang (1942 – 1945), melalui *tonarigumi* dan *kumicho*, penduduk diharuskan untuk menggarap tanah-tanah kosong, dengan ditanami sayur dan jarak. Penggarapan tanah kosong tidak mempedulikan kepemilikan tanah. Penduduk juga diperbolehkan mendirikan gubug-gubug di kebun dengan ukuran dua meter kali dua meter yang digunakan untuk menjaga keamanan. Penggunaan tanah-tanah ini tidak dipungut biaya sewa, bahkan nama-nama penggarap tidak diadakan pencatatan. Berawal dari sinilah masalah penataan tanah mengalami kesulitan dalam pencatatannya. Setelah merdeka, untuk menertibkan kepemilikan tanah dan bangunan, pemerintah mengeluarkan seruan agar rakyat mendaftarkan kepemilikan tanah dan melarang mendirikan bangunan di atas tanah kotapraja.¹⁰⁶

Walikota Suwirjo untuk menindaklanjuti seruan tersebut mengadakan pengumuman melalui surat kabar dan selebaran agar pemilik tanah segera mendaftarkan tanahnya. Sejak pertengahan tahun 1950 mulai diadakan langkah-langkah untuk mengadakan penertiban pemakaian tanah yang tidak sah. Penertiban itu menyangkut pendaftaran tanah yang berisi nama, luas, tujuan pemakaian dan mulai kapan tanah itu dikuasai.

¹⁰⁵ Kotapraja tahun 1, No. 1, Juni 1950

¹⁰⁶ Soedarmadji J.H. Damais, dkk; *Karya Jaya: Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945 – 1966*; Jakarta: Pangeran Jayakarta Offset, 1977, hal. 37

Pada tahun 1950-an, pemakaian tanah di Jakarta menurut Mr. Supangkat, Sekretaris Kotapraja Jakarta, dibedakan dalam dua yaitu bangunan yang didirikan oleh orang-orang yang sangat butuh dan yang didirikan oleh orang-orang yang nakal, untuk keuntungan sendiri. Mereka ini memanfaatkan masa peralihan karena kontrol dari kotapraja belum ada dan belum sempat mengadakan pencatatan. Mereka yang dikategorikan nakal, karena mendirikan rumah baru, kemudian disewakan dengan harga mahal untuk mengejar keuntungan pribadi.¹⁰⁷ Untuk menangani masalah rumah liar. Oleh karena itu pemerintah membentuk panitia yang diketuai oleh Tabrani Notosudirdjo. Panitia berkewajiban menyelesaikan soal bangunan gelap dan memberikan ganti rugi secara wajar. Bagi kelompok yang pertama akan dicarikan pengganti tempat tinggal, sedangkan yang kedua akan dibersihkan dan tidak mendapat ganti rugi¹⁰⁸.

Untuk mengatasi masalah pertanahan diperlukan suatu instansi yang mengurus masalah peralihan tanah. Untuk itu perlu jawatan Urusan Agraria, karena timbul perebutan tanah, baik menyangkut tanah pemerintah, tanah partikelir maupun tanah rakyat. Selain itu supaya diadakan bagian kebersihan kota (*staadsreiniging*) karena kotoran di kampung-kampung tidak bisa dibersihkan begitu saja. Jawatan ini bisa dimasukkan ke Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Kebersihan Kota dan Jawatan Perawatan Wilayah.¹⁰⁹ Setiap pengeluaran tanah, penduduk yang minta tanah diperiksa seorang demi seorang yang menyangkut kebutuhan dan kemampuannya. Tiap sidang BPH diselesaikan 20 permintaan rumah.¹¹⁰

Akibat banyaknya kasus-kasus tanah maka masalah pengambilan tanah partikelir dibawa ke sidang parlemen. Parlemen menyetujui adanya undang-undang yang mengatur masalah pengambilan tanah partikelir. Tanah partikelir yang akan dibebaskan seluas 56 hektar sawah, 118 hektar pekarangan kebun, 17 hektar pekuburan, 530 hektar sawah milik usaha, 897 hektar tanah pekarangan milik usaha.

¹⁰⁷ Indonesia Raya; 6 Oktober 1950

¹⁰⁸ Indonesia Raya, 23 Mei 1951

¹⁰⁹ Notulen No. 7/1952, 18 Juni 1952. hal 82

¹¹⁰ Notulen No. 1 tahun 1952; DPKS 30 Januari 1952

Letak tanah partikelir itu adalah Jepang (Pejompongan), Melayu Besar, Jelambar, Schoonzicht, Tanjung Lengkeng, Jati dan Gunung Sahari. Uang untuk mengganti tanah partikelir berjumlah 7 juta rupiah. Tanah-tanah di daerah ini akan dibeli oleh pemerintah dengan harga per meter persegi 1 rupiah, 0,50 rupiah dan 0,25 rupiah, setelah dibeli, tanah-tanah tersebut statusnya dijadikan tanah dalam kekuasaan negara.¹¹¹ Kondisi tanah-tanah partikelir sangat jelek. Sebagai contoh adalah jalan-jalan umum di daerah Kwitang yang menjadi milik NV Bouwmaatschapij Al Kaf. Perwakilan Al Kaf menyampaikan bahwa dengan sukarela menyerahkan tanahnya kepada kotapraja. Akibat jeleknya jalan itu maka penduduk membentuk “komite aksi” agar tanah tersebut dibeli oleh kotapraja¹¹². Kementerian Pekerjaan Umum mengajukan satu rencana kepada pemerintah untuk mendirikan bangunan berbagai kementerian di sekitar lapangan Banteng sampai Kwitang.¹¹³

Selain itu di Jakarta masih terdapat 3.566 hektar tanah partikelir yang dikuasai 16 tuan tanah.¹¹⁴ Pada hari Jumat; 13 Pebruari 1953, Parlemen mengadakan sidang pleno untuk membicarakan rancangan undang-undang tentang perlunya beberapa tanah partikelir dikembalikan menjadi tanah negeri. Rancangan undang-undang mengenai soal tersebut telah diserahkan oleh Pemerintah kepada Presiden. Dalam rancangan undang-undang disebutkan perlunya mengembalikan tanah-tanah partikelir untuk dijadikan milik negara yakni yang terletak di daerah Jakarta Raya dan sekitarnya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum. Apabila rancangan undang-undang disyahkan parlemen maka sejak berlakunya undang-undang tersebut, tanah-tanah partikelir dijadikan tanah negeri.¹¹⁵

Dalam pengembalian tanah-tanah partikelir, pemerintah berusaha melakukan dengan jalan damai dan atas dasar perundingan antara pemerintah dan tuan tanah. Adapun dasar untuk berunding adalah peraturan pembelian kembali tanah-tanah

¹¹¹ Merdeka; 19 Pebruari 1953

¹¹² Merdeka, 4 Maret 1953

¹¹³ Merdeka, 30 Maret 1953

¹¹⁴ Kotapraja No. 5 tahun ke 2 September 1951

¹¹⁵ Merdeka; 12 Januari 1953

partikelir menjadi tanah negeri sesuai dengan *Staatsblad* 1922, No. 480. Dalam pasal 27 sebagai acuan bahwa jika digunakan untuk kepentingan umum maka harga tanah dikurangi 10% dari harga pasaran. Dari luas tanah partikelir yang ada seluas 1.000 hektar dihargai 1 rupiah permeter persegi, sedangkan tuan tanah yang memiliki persil tanah menghendaki 2 rupiah permeter persegi. Jika hal ini dituruti maka pemerintah akan mengeluarkan tambahan biaya 10.000 rupiah setiap hektarnya. Jika tuan tanah tidak bersedia mengembalikan harga tanah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, maka sesuai dengan peraturan *Staatsblad* 1911, No. 38 jo. *Staatsblad* 1912, No. 480, pemerintah berhak menunjuk hakim untuk menyelesaikan harga tanah melalui tim ahli yang ditunjuk, sehingga dapat dicapai harga yang adil.¹¹⁶

Selama ini tuan tanah selain menguasai tanah, juga menguasai hak usaha. Tuan tanah partikelir seolah-olah mempunyai pemerintahan sendiri dan mempunyai keamanan sendiri. Ia mempunyai petugas untuk memungut pajak sebesar 20% dari hasil bumi. Rakyat penggarap diwajibkan menyumbangkan tenaganya sehari dalam seminggu untuk kepentingan tuan tanah. Keadaan ini berlangsung sampai zaman Jepang. Kondisi ini mengakibatkan tanah-tanah partikelir tidak tersentuh pembangunan dan pada masa kemerdekaan menjadi masalah yang rumit bagi pemerintah. Untuk itu pemerintah mengharuskan tuan tanah memperbaiki jalan-jalan yang ada di dalam lingkungan tanahnya dan kalau tidak bersedia, maka pemerintah berhak mengadakan perbaikan dengan resiko biaya perbaikan ditanggung tuan tanah. Tetapi hal ini tidak bisa berjalan, karena tuan-tuan tanah tidak sanggup untuk membayarnya. Untuk itu para tuan tanah seperti di Kwitang menjual tanah satu meter, satu rupiah tetapi tuan tanah hanya mau menjual tanah yang digunakan untuk jalan sedangkan tanah lainnya tidak dijual, sehingga pemerintah merasa dirugikan. Untuk daerah Kwitang saja pembangunan jalan menghabiskan f 2.000.000. Selain itu pembebasan tanah partikelir untuk dibangun perkampungan, pemerintah juga harus menyediakan prasarana yang lengkap dari perkampungan yang teratur, saluran, pasar

¹¹⁶ Merdeka; 12 Januari 1953

dan perlengkapan lainnya. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar sementara daerah-daerah tersebut sudah penuh dengan penghuni.¹¹⁷

Namun masalah tanah ini sampai tahun 1952 sudah mulai dapat diatasi. Pada masa kotapraja Batavia luas wilayah Batavia 18.500 hektar, pada tahun 1952 luas Jakarta Raya 56.000 hektar. Dengan kondisi itu, ditemukan tiga macam tanah, yaitu tanah milik kotapraja yang luasnya 1.765,50 hektar, kedua milik pemerintah luasnya 29.750 hektar, ketiga tanah partikelir yang luasnya 3.566 hektar. Tanah partikelir seluas 3.566 hektar dimiliki sekitar 16 penguasa partikelir yang merupakan sisa-sisa tanah partikelir sebelum merdeka yaitu seluas 21.103 hektar yang dimiliki 57 penguasa partikelir. Dari seluas itu sebanyak 17.537 hektar telah dibeli oleh pemerintah. Pembelian ke-16 tanah partikelir yang dilakukan antara tahun 1947 sampai 1952 adalah: Klender 1.271 hektar, Pulogadung 1.400 hektar, Tanah Rendah Udik/Iilir 183 hektar, Cakung 102 hektar, Cipinang-Vredental 219 hektar, Pondok Gede 5800 hektar, Tanjung Timur 6.563 hektar, Cawang 250 hektar, Cikoko 65 hektar, Pengandengan 72 hektar, Pabean Cilauw 285 hektar, Lenteng Agung 49 hektar, Cilincing Semper 1.019 hektar, Tugu Timur dan Barat 15 hektar, Telukgong 42 hektar, Muara Angke 29 hektar. Sedangkan tanah pertikelir yang belum dibeli antara lain Melayu Besar, Jelambar, Zoetendal, Pademangan, Cipinang, Pondok Bambu.¹¹⁸

Sementara itu, tanah kotapraja bertempat di Bendungan Udik seluas 120 hektar, Bukit Duri 27 hektar, Jati Timur 10 hektar, Dukuh 141 hektar, Gondangdia 134 hektar, Karet 145 hektar, Kramat Lontar 6 hektar, Kwitang Timur 113 hektar, Matraman 303 hektar, Melayu Kecil 22 hektar, Menteng 69 hektar, Petojo I 9 hektar dan Petojo II 268 hektar. Tanah-tanah kotapraja digunakan sebagai tempat fasilitas umum seperti jalan, sekolah, pasar dan keperluan pemerintahan kotapraja. Tanah kotapraja tersebut dipergunakan sebagai perumahan rakyat ada beberapa tingkatan

¹¹⁷ Kotapraja No. 5 tahun ke 2 September 1951

¹¹⁸ Kementerian Penerangan; *Republik Indonesia: Kotapradja Djakarta Raya, 7 Tahun Kotapraja*, Jakarta: Deppen, 1952, hal. 331

yaitu rumah villa, rumah setengah villa (OKW) rumah-rumah rakyat (OKP) yang merupakan perkampungan biasa. Untuk villa OKW dan OKP harganya antara satu rupiah sampai 10 rupiah. Permohonan untuk mempunyai tanah disampaikan kepada Badan Pertanahan Kotapraja dan untuk mendirikan bangunan harus seijin pemerintah kotapraja. Kenyataannya penduduk mendirikan bangunan tanpa ijin sehingga ketika tanah tersebut masuk ke dalam rencana pengembangan kota terjadi konflik dengan penduduk karena pemerintah harus membongkar.¹¹⁹

Untuk menghindari konflik pertanahan, pada 23 April 1954 untuk pertama kalinya di gedung balai kota diadakan pertemuan antara kotapraja dengan tuan tanah. Hadir dalam pertemuan tersebut 16 tuan tanah dari 51 undangan yang dikirim¹²⁰. Hal ini terkait dengan program pemerintah yang dituangkan di Lembaran Negara RI No. 27 tahun 1953, dan sesuai Undang-undang No. 6 tahun 1953, tanah partikelir dikembalikan kepada tanah negeri. Pada tahun 1954, kotapraja mengeluarkan 15 program di antaranya adalah masalah perumahan rakyat. Akan diusahakan rumah murah dengan harga 5.000 rupiah. Pada tahun 1954 akan dibangun 2.000 rumah dengan harapan pihak swasta akan tertarik membangun rumah-rumah swasta. Selain itu masalah penggalian saluran untuk mencegah bahaya banjir dan memajukan kesehatan akan diadakan pengerukan kali dan saluran airnya yang tidak mengalir.¹²¹

Dari jumlah itu mungkin belum cukup, karena pada tahun 1950, kebutuhan rumah baru, dengan penduduk sekitar 2,5 juta orang, diperkirakan 40.000 rumah yang menghabiskan dana sekitar 400 juta rupiah, jika satu rumah dihargai 10.000 rupiah. Kotapraja belum sanggup untuk menyediakan rumah sebanyak itu.¹²² Selain itu keterbatasan kesempatan kerja mengakibatkan para pendatang baru, berada pada kondisi ekonomi yang kurang baik. Kondisi yang buruk ini misalnya menyangkut masalah minimnya sekolah, perkampungan yang kumuh dan lain sebagainya. Untuk

¹¹⁹ Republik Indonesia; *Kotapraja Djakarta Raja Kementerian Penerangan, 7 tahun Kotapraja*, Djakarta Raya, 1952 hal 333 – 335

¹²⁰ Kotapraja No.9 tahun 4, tahun 1954, hal 11

¹²¹ Kotapraja No.9 tahun 4, 1954, hal 14

¹²² Indonesia Raya; 6 Oktober 1950

meningkatkan pendapatan daerah maka Walikota Suwirjo¹²³ dalam pengumumannya, menyatakan bahwa mulai bulan Januari 1951, pemerintah akan menaikkan pajak sebesar 200%. Pajak sepeda, jalan, tontonan, anjing, becak dari f 3 menjadi f 25, rencana ini sudah disampaikan kepada Dewan Kota.¹²⁴

Kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Jakarta mengakibatkan meningkatnya kebutuhan kantor-kantor dan perumahan pegawai. Menurut catatan pada tahun 1950 dan 1951 setelah ibukota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta jumlah pegawai yang belum mempunyai rumah adalah 4.600. Sampai bulan Oktober tahun 1950, pemerintah membangun 243 rumah yang terdiri dari 120 rumah untuk pegawai negeri diberikan oleh Jawatan Gedung-gedung Negeri, dan 100 rumah partikelir diberikan oleh Urusan Perumahan Djakarta (UPD), sehingga pegawai yang belum mendapat rumah 4.357. UPD dalam kerjanya berada di bawah Urusan Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Departemen Sosial, sedangkan kotapraja Jakarta Raya tidak mempunyai kewenangan dalam urusan perumahan. Menurut rencana, pemerintah mendirikan rumah 1.050 rumah negeri di Kebayoran Baru dan 1.039 di beberapa tempat di Jakarta. Tetapi dari jumlah itu sebanyak 830 rumah tidak dapat dipenuhi. Para pegawai sebagian membeli tanah dan membangun rumahnya sendiri di Tanah Tinggi, Gang Tengah, Bekasi, Cideng dan Kampung Duri. Dalam pembagian rumah, ternyata pihak UPD telah memberikan rumah melalui 'jalan belakang' kepada orang-orang partikelir dan tentara yang berjumlah 750 rumah yang semestinya tidak boleh diberikan. Rumah negeri seharusnya diberikan kepada pegawai negeri dan bukan tentara. Berdasarkan hitungan itu maka pegawai negeri yang mendapat perumahan sekitar 3.098. Dari jumlah itu tidak termasuk pegawai yang belum masuk ke Jakarta. Untuk mencari rumah partikelir, harus ada 'uang kunci'. Uang kunci rumah sederhana besarnya 2-3 ribu rupiah sampai 10-15 ribu rupiah. Bagi pegawai yang bergaji 300 – 1.000 rupiah untuk menyediakan uang kunci sebesar itu

¹²³ Walikota Suwirjo berasal dari PNI, diangkat sebagai walikota I 29 September 1945 – 21 Juli 1947, kemudian ditangkap Belanda, dan diangkat sebagai Walikota kembali sejak 21 Maret 1950.

¹²⁴ Indonesia Raya; 16 Oktober 1950

tentu tidak mungkin. Sedangkan pemerintah tidak berdaya menghadapi uang kunci¹²⁵. Sulitnya mendapatkan ijin dan merajalelanya uang sogok/uang kunci telah memunculkan rumah-rumah liar.

Mengingat kebutuhan rumah yang sangat besar dan kesemrawutan dalam pembagian rumah maka diperlukan adanya reorganisasi UPD. UPD dianggap tidak berhasil mengatasi masalah perumahan Jakarta. Untuk itu perlu dibentuk beberapa organisasi yang mengurus perumahan, diantaranya Urusan Perumahan Pusat (UPP) dan Panitia Perumahan Negara (PPN). Kepala Urusan Perumahan Pusat (Ismangil) setuju supaya urusan perumahan daerah diserahkan kepada Panitia Perumahan Negara (PPN). PPN pada awalnya mengurus perumahan bagi pegawai-pegawai negeri, yang wakilnya ditunjuk dari masing-masing departemen. PPN meminta kepada pemerintah agar diakui sebagai badan yang sah. Selama ini PPN hanya diakui sebagai pembantu UPD yang tugasnya memberikan masukan tentang pembangunan perumahan. Karena tidak puas dengan kerja UPD, PPN menuntut supaya UPD menyerahkan kewenangannya kepada kotapraja¹²⁶. Karena urusan perumahan Jakarta mestinya diurus oleh kotapraja bukan pemerintah pusat.

Untuk memperlancar pembangunan perumahan dan pembagiannya, pemerintah melalui Lembaran Kota 1952, No. 5 menetapkan pembentukan Yayasan Kas Pembangunan (YKP), yang kedudukannya berada di bawah pengawasan kotapraja. Terpilih sebagai badan pengurus Yayasan Kas Pembangunan DM. Djanur, Supranoto, Ir Dipokusumo, Tan In Hok. Dualisme organisasi yang mengurus masalah perumahan dan pembangunan ini sehingga dalam pembangunan sering terjadi tumpang tindih¹²⁷. DPKS-GR mengatakan dengan adanya YKP maka pembangunan yang dualisme harus diakhiri. Karena pemerintahan swatantra (otonomi), sehingga urusan daerah harus diserahkan kepada pemerintahan swatantra supaya dapat mengatur dan

¹²⁵ Indonesia Raya, 20 April 1951

¹²⁶ Indonesia Raya, Juni 1951

¹²⁷ Notulen Rapat DPRS-GR Jakarta, 29 April 1952

menyelenggarakan seluruh kepentingan penduduk di daerahnya¹²⁸. Menanggapi tuntutan dari DPKS-GR tersebut maka Kementerian Sosial akan menyerahkan UPD kepada kotapraja. Selain itu walikota juga telah membentuk Dewan Perumahan (*huisvestingsraad*) setempat. Dalam dewan perumahan ini duduk 2 orang wakil dari kotapraja. Dengan demikian timbul kerja sama yang baik antara UPD dan kotapraja. Meskipun UPD sudah diserahkan kepada kotapraja, kenyataannya masalah pembangunan perumahan, masih ditangani Kementerian Sosial, dan berulang kali didesak tetapi belum diserahkan sehingga masalah pembangunan perumahan ini tetap mengalami kesulitan untuk mengontrolnya, karena masing-masing instansi berjalan masing-masing sesuai kepentingannya.¹²⁹

Selain masalah perumahan pegawai, pemerintah juga menyiapkan pembangunan perumahan di beberapa tempat. DPKS-GR dalam sidangnya pada tahun 1951 menyetujui pekerjaan-pekerjaan yang harus diprioritaskan antara lain pembangunan Kebon Sirih, Pisangan baru, Kebon Kacang, Bendungan Hilir dan lain-lain. DPKS GR pada tahun 1951 memutuskan:

1. Meluaskan kota di Kebon Sereh dan Pisangan Baru Jatinegara
2. Melebarkan jalan dan saluran di Sawah besar, dan Jalan Tanah Abang II
3. Pembuatan syphon Duri di Kota, Perbaikan Cideng dan memindahkan Cideng
4. Perbaikan Selokan Gang Gatep dan Jalan Mangga Dua
5. Perbaikan Kampung Kebon Kacang, Kampung Wadas, Jalan Tjutjarawa, Kampung Kebon Djahe
6. Pemeliharaan kampung Paseban, Sawah Besar II dan III, Pasar Baru I, II, III, Petojo Binatu-Entjlek dan Udik, Kampung Bali I dan II
7. Pembukaan Tanah Duku Atas, RWJ (Bendungan), Grogol Jembatan Duren
8. Pembuatan saluran air di 2e SS Laan Jatinegara, Pisangan Baru – Kebon Sereh, Kramat Tengah, Tanah Tinggi Cempaka Putih, Tanah Abang Dua, Petojo Centrum
9. Pembebasan Tanah Bendungan (RWJ), Kebon Kacang, Cipinang Vredendal, Tembusan Jalan Thamrin, Rawa Kerbo, Tanjung Grogol, Duku

¹²⁸ Notulen Rapat DPRS-GR Jakarta, 29 April 1952

¹²⁹ Notulen No. 7/1952, 18 Juni 1952

Atas, Menteng Wadas, Djipang dan Pejompongan, Kebon Sereh, Menteng Pulo, Pejagalan...¹³⁰

Berdasarkan rencana tersebut, pembangunan perkampungan Rawa Kerbo yang direncanakan tahun 1951, mulai dikerjakan pada tahun 1953. Rawa Kerbo direncanakan untuk menampung penghuni rumah liar yang menghuni tanah-tanah pemerintah dan pembangunan pabrik obat-obatan. Untuk itu jalan masuk harus diperlebar dan penduduknya dipindahkan. Biaya yang dibutuhkan 2 juta rupiah sedangkan subsidi dari pemerintah hanya 1,6 juta rupiah. Para penghuni lama dipindahkan ke kampung Tengah yang jaraknya sekitar 4 kilometer dari kampung baru Rawa Kerbo. Pada saat ini sudah dibangun 230 rumah dengan lahan seluas 28 hektar.¹³¹

Pembangunan daerah Slipi tidak bisa berjalan mulus karena masih adanya permasalahan tanah di daerah Jati Petamburan. Dalam Notulen DPKS No. 8/1952 tanggal 19 Juni 1952, tentang rencana khusus bekas persil Alaydrus di Jati Petamburan untuk keperluan 46 orang pemilik baru. Seksi Planologi dalam keterangannya mengatakan bahwa rakyat di daerah Slipi pada tahun 1951 mengajukan resolusi tentang sengketa tanah Slipi. Pada tahun 1950 telah terbentuk Panitia Pembela Tani Rakyat Petamburan untuk menyelesaikan sengketa antara pemilik tanah dengan orang-orang yang menyewa tanah, yang bertanam sayur mayur. Panitia Pembela Petani Kelurahan Jati, Petamburan, menyampaikan resolusi agar rakyat yang berdiam di daerah Jati yang diusir pada masa penjajahan diijinkan kembali menempati dan mengerjakan tanah-tanahnya. Surat ditujukan kepada Perdana Menteri dan Ketua DPR Pusat.¹³²

Panitia Pembela Petani ini juga digunakan sebagai alat untuk membebaskan persil Jati Petamburan. Dalam kasus Ipah, Panitia tidak sanggup lagi menyelesaikan. Ipah yang tinggal di atas tanah tersebut dalam suratnya ke Wedana Gambir

¹³⁰ Notulen Dewan Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raya 1952; hal 3

¹³¹ Kotapraja, No. 10 -11, tahun ke 3, 15 Pebruari 1953 hal. 4 – 5

¹³² Sin Po; 20 Nop 1950

mengatakan mendapat penghidupan dengan berjualan sayur mayur, sementara Ipah harus meninggalkan tanah tersebut. Selanjutnya pemilik tanah baru, Siauw Hin Toan, akan membuka tanah dengan membuat jalan dan minta bantuan DPU. Tanah tersebut menurut rencana menjadi daerah pengembangan Slipi Selatan. Pemilik tanah sudah membuat petak-petak menjadi 46 persil sesuai dengan rencana kota. Panitia Pembela Petani, Dalari Umar, menyampaikan kepada Dewan bahwa sejak 11 Maret 1951, membubarkan diri karena tidak mampu menyelesaikan konflik tanah dan masalahnya diserahkan kepada pemerintah. Tanah tersebut, kepada penyewa sebanyak 7 orang diberikan ganti rugi sebesar 12.000 rupiah, sedangkan Ipah yang usianya sudah lanjut tidak mau menerima ganti rugi.

Ketika ditanya Wedana Gambir minta ganti rugi berapa dia tidak menjawab dengan jelas, terserah bagaimana pertimbangan yang di atas, sehingga ada dugaan ada orang di belakang Ipah, tetapi Wedana tidak tahu siapa orangnya, sehingga masalah ini diserahkan kepada Hakim.¹³³

Tidak ada sumber resmi yang menyebutkan siapa orang-orang yang berada di belakang Ipah. Tetapi pada masa itu untuk menyelesaikan masalah tanah muncul Komite Rakyat yang afiliasinya PKI. PKI tidak begitu kuat karena Jakarta besar dikuasai oleh PNI dan Masyumi.

Di daerah Slipi merupakan daerah perkampungan tempat pabrik batik, mereka menempati daerah ini karena alasan keamanan. Akhirnya sampai tahun 1952 masalah rencana Slipi tidak selesai.¹³⁴

¹³³ Surat Wedana Gambir kepada Kepala Jawatan Urusan Daerah, Surat No. 1707/41

¹³⁴ LK 1952, No. 16, hal 95

Tabel 10: Perkembangan Pembangunan Perumahan

| Tahun | Daerah Yang dibuka | Luas (ha) | Peruntukan |
|-------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1950 | Kompleks Plaju | 8 | Perumahan |
| | Kebayoran Baru | 750 | Perumahan dan perkantoran |
| 1951 | Gang Tengah | 4 | Perumahan |
| | Tanah Tinggi | 25 | Perumahan |
| | Kebon Jahe | 3 | Perbaikan kampung |
| 1952 | Grogol | 25 | Perumahan |
| | Kebon Sere | 25 | Perumahan |
| | Karet Pasar Baru | 4 | Perumahan dan pendidikan |
| | Tembusan jalan Thamrin | | Perumahan |
| | RWJ Bendungan Hilir | 6 | Perumahan |
| | Krekot Bunder | 2 | Toko/perumahan |
| | Rawakerbo | 30 | Perumahan |
| | Rawasari | 6 | Pabrik obat |
| | Kebon Kacang | 3 | Perbaikan kampung |
| | Jalan Lokomotif | 3 | Perbaikan kampung |
| | Kampung Sultan Agung | 2 | Perbaikan kampung |
| | Petamburan Slipi | 3 | Asrama polisi |
| | Petamburan (tanah partikelir) | 2 | Perumahan |
| | Pejompongan | 25 | Penjernihan air |
| | Sentiong Seribu | 2 | Perumahan |
| | Galur | 5 | Perumahan |

Diolah dari koran-koran terbit antara 1950 - 1951

Masalah pembangunan perumahan sampai tahun 1954 masih belum tercukupi. Tahun 1954 rumah yang tersedia setiap bulan 30 buah rumah, sedangkan yang mengajukan permohonan 1.000 orang, untuk itu tahun 1954 direncanakan pembangunan Grogol, Cipinang, dengan biaya 2.538.300 rupiah, Gang Sentiong dan Utan Kayu dengan biaya 700.000 rupiah.¹³⁵ Di Grogol akan didirikan 304 petak perumahan dengan biaya dua juta rupiah yang didirikan oleh Kas Pembangunan

¹³⁵ Kotapraja No. 5, tahun ke 5, 31 Januari 1955

dengan ukuran 3,5 meter kali enam meter. Rumah disewakan 30 rupiah sebulan. Bank Industri Negara (BIN) juga akan membangun perumahan dengan biaya 5 juta rupiah seluas 30 hektar.¹³⁶

Sudiro, sebulan setelah dilantik sebagai Walikota pada 8 Januari 1954, mengadakan jumpa pers yang dihadiri oleh wakil walikota Suratno Sastroatmodjo. Dalam kesempatan tersebut Sudiro menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi kotapraja terutama adalah soal perumahan, tanah-tanah perkampungan, air dan rencana pemungutan berbagai macam pajak. Mengenai soal tanah, diterangkan oleh Walikota bahwa dari daerah Jakarta yang luasnya 530 kilometer persegi sampai kini masih terdapat tanah partikelir sebanyak 18%. Untuk melaksanakan program-programnya tersebut pada tahun 1954, dibutuhkan biaya 40 juta rupiah.¹³⁷ Ini menjadi masalah pemerintah terutama dalam pembangunan perkampungan.

Pada tahun 1955 muncul adanya keinginan untuk pembangunan Jakarta dengan menggunakan *planning* besar sehingga perlu direncanakan tempat-tempat untuk jalan yang lebarnya 60 meter sampai 100 meter, lapangan olah raga, pekan raya, taman rekreasi, kompleks perumahan dan lain sebagainya¹³⁸. Mengingat semakin mendesaknya pembangunan fisik kota maka diperlukan penyusunan *master plan* kota. Perumusan itu dituangkan dalam bentuk rencana Pendahuluan (*Outline Plan*) kemudian berkembang menjadi Rencana Induk. Untuk keperluan tersebut mendapat bantuan dari ahli teknik PBB Clifford Holliday pada tahun 1954 untuk merintis pembuatan *outline plan* tersebut. Rencana pendahuluan dapat diselesaikan pada tahun 1957. Dalam rencana pendahuluan itu diambil asumsi bahwa pertambahan penduduk tiap tahun sebesar 4 %, sehingga dalam jangka 20 tahun, penduduk Jakarta tahun 1957, 2,2 juta rupiah sedangkan tahun 1977 penduduknya menjadi 4,5 juta. Dalam tahun 1955 inilah muncul ide untuk membangun kota dengan bangunan tidak

¹³⁶ Indonesia Raya, 29 Maret 1955

¹³⁷ Indonesia Raya; 8 Januari 1954

¹³⁸ Merdeka, 9 Juni 1955

horizontal tetapi vertikal. Hal ini mulai dilaksanakan dalam pembangunan Krekot setelah kebakaran.¹³⁹

3.7 Marginalisasi Sektor Informal Tahun 1950 - 1960

Sethuraman mengatakan, kegiatan sektor informal menyangkut sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, seperti pedagang dan sektor jasa lainnya. Sektor informal merupakan manifestasi dari pertumbuhan kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang. Mereka memasuki kegiatan berskala kecil di kota untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan. Dalam usahanya mereka tidak berharap memperoleh keuntungan besar, tetapi hanya sekedar bertahan. Mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran. Sektor informal dapat dibedakan antara sektor informal yang bersifat legal yang biasanya menempati lokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sementara itu sektor informal yang bersifat ilegal, lokasinya selalu berpindah-pindah mengikuti kerumunan konsumen. Persoalan legal dan ilegal sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Apabila kebutuhan masyarakat akan kehadiran sektor informal ilegal dibutuhkan dan tidak mengganggu lingkungan dapat terjadi lokasi yang sebelumnya sektor informal, ilegal menjadi legal, tetapi bisa juga sebaliknya yang sebelumnya legal bisa menjadi ilegal¹⁴⁰. Keberadaan sektor informal yang sering dianggap mengganggu lingkungan, maka keberadaan mereka sering digusur. Akibatnya sebagian pedagang sering mengadakan perlawanan terhadap petugas ketertiban.

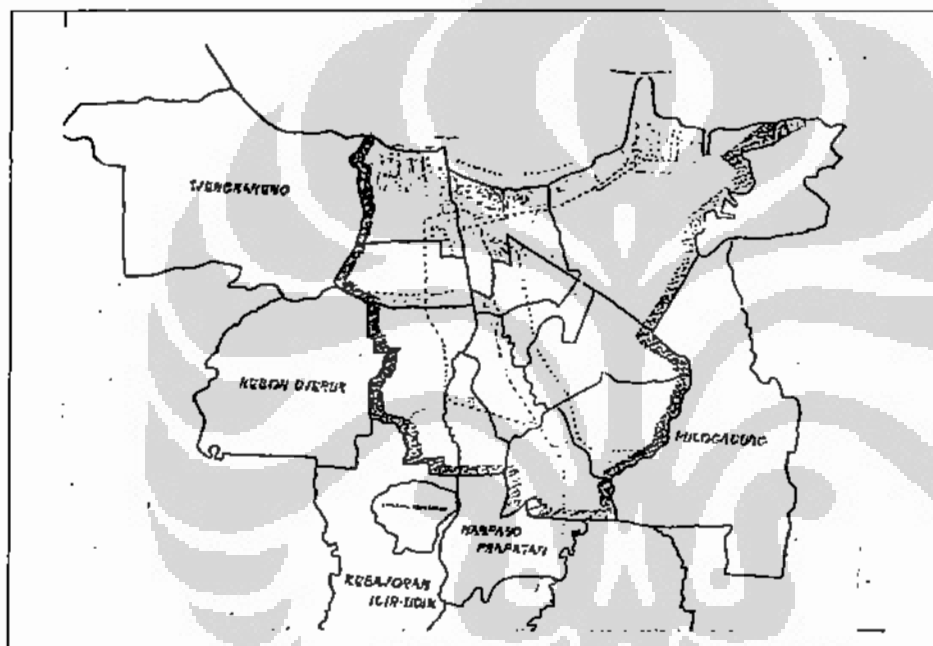
Setelah berlakunya UU 1957 No. 1, status kotapraja Jakarta Raya yang sebelumnya merupakan daerah swatantra tingkat II, diubah statusnya menjadi

¹³⁹ Soedarmadji J.H. Damais; dkk; *Karya Jaya: Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945 - 1966*, Jakarta: Pemda DKI, 1977, hal. 119.

¹⁴⁰ Paulus Hariyono; *op. cit.*, hal. 113.

swatantra tingkat I yang langsung berada di bawah pengawasan Menteri Dalam Negeri.¹⁴¹ Sampai tahun 1967 luas wilayah Jakarta adalah 590,11 kilometer persegi. Luas ini berkembang lagi ketika terjadi pembulatan wilayah pada tahun 1980 menjadi 657 kilometer persegi dan 661 kilometer persegi pada tahun 1990.¹⁴²

Gambar 18: Perluasan Jakarta Sampai tahun 1967



Sumber: *The Liang Gie, 1958*

Jakarta sudah menghadapi masalah ketertiban sejak awal, terutama kaitannya dengan permukiman dan penataan pedagang. Dalam kaitannya dengan pengurusan dapat dibedakan atas dua masalah. Pertama adalah munculnya penyerobatan terhadap tanah kotapraja dan tuan tanah untuk didirikan bangunan liar dan masalah pedagang informal. Pembebasan daerah dari penghuni liar dan pedagang liar sudah dimulai

¹⁴¹ Thee Liang Gie; *Sejarah Pemerintahan Kota Djakarta*; Jakarta: Kotapradja Djakarta Raja, 1958

¹⁴² Pemda DKI; *op. cit.*, hal. 58 lihat juga Kees Grijns, *op. cit.*, hal. 265

sejak tahun 1950. Pada tahun 1951, karena permintaan tanah semakin meningkat, sementara tanah-tanah partikelir yang dikuasai oleh Tuan Tanah masih luas sehingga terjadi penyerobotan terhadap tanah-tanah tersebut. Kotapraja mengatakan bahwa penyerobotan tanah oleh penghuni liar terhadap tanah kotapraja akan diambil tindakan keras. Selain itu, Kotapraja menyarankan kepada pemilik tanah partikelir dalam menyelesaikan penyerobotan tanah partikelir tidak bergerak sendiri agar tidak terjadi keributan.¹⁴³

Untuk menertibkan masalah tersebut, kotapraja akan mengadakan pembersihan rumah-rumah liar di Jakarta. Kotapraja memberikan batas waktu 20 Mei 1951, jika sampai batas waktu itu penghuni liar tidak membongkar rumahnya, maka akan diadakan pembersihan. Pembersihan pertama dilakukan di depan bioskop Metropole, Pegangsaan. Tindakan pembongkaran yang dilakukan di daerah Pegangsaan Timur, dan Pasar Sultan Agung adalah untuk kebersihan dan penataan kota. Setelah itu akan didirikan 14 pasar baru untuk menampung pedagang kecil.¹⁴⁴ Dalam pembersihan, pemerintah membedakan dalam dua kategori, yaitu mereka yang memang membutuhkan rumah untuk tinggal dan keluarganya. Kedua, adalah mereka yang mencari keuntungan. Mereka biasanya membangun rumah dengan seadanya, kemudian menjualnya kepada yang membutuhkan. Rumah-rumah ini dijual dengan harga mahal. Bagi kelompok yang pertama akan dicarikan pengganti tempat tinggal, sedangkan yang kedua akan dibersihkan dan tidak mendapat ganti rugi.¹⁴⁵

Penggesuran penghuni liar juga dilakukan di Kampung Petojo. Untuk melawan penggesuran, rakyat Kampung Baru Petojo VII membentuk Panitia Sementara yang tugasnya berhubungan dengan pihak berwajib agar rumah yang telah warga di Kampung Baru Petojo VII tidak dibongkar. Permohonan ditandatangani oleh semua warga. Dalam permohonannya warga menyadari telah menempati tanah kotapraja,

¹⁴³ Indonesia Raya, 18 Juni 1951

¹⁴⁴ Indonesia Raya, 29 Mei 1951

¹⁴⁵ Indonesia Raya, 23 Mei 1951

tetapi mereka minta perlindungan dan kebijaksanaan.¹⁴⁶ Di Jakarta di perkirakan terdapat 200 bangunan yang dibangun secara tidak sah yang tersebar di Petojo, Jati Baru. Selain rumah warga pembongkaran juga diberlakukan untuk gedung-gedung. Pemilik gedung sudah diberi peringatan, apabila sampai peringatan yang ketiga tidak ditinggalkan maka pemerintah akan membongkar secara paksa dengan menggunakan bulldozer. Untuk menghormati bulan Puasa, pembongkaran besar-besaran dilakukan setelah bulan puasa, selama bulan puasa tidak akan diadakan pengusuran.¹⁴⁷

Selain itu, Walikota Sudiro, pada September 1954 mengadakan pengusuran pedagang kaki lima di berbagai tempat. Untuk menyelesaikan masalah ini, Walikota menyerahkan kepada Wedana dari masing-masing wilayah. Pedagang yang berjualan di depan Bioskop Rex Senen, Pancoran, Asem Reges, Cikini dan lain sebagainya terkena dampak dari kebijakan yang dikeluarkan Walikota¹⁴⁸.

Akibat pengusuran yang dilakukan oleh aparat pemerintah, sekitar 70 pedagang kecil yang berdagang dengan mendirikan gubug-gubug di sepanjang depan Bioskop Rex Pasar Senen berdemonstrasi dengan mengendarai sepeda ke gedung Balai Kota Jakarta. Para demonstran, meminta agar Walikota Jakarta Raya meninjau kembali maksud atau perintah yang telah dikeluarkan untuk membongkar semua gubug dagang yang terdapat di sepanjang jalan. Pedagang juga meminta agar sebelum mengadakan pembongkaran, Wedana memberi tahu kepada para pemilik gubug-gubug liar. Selain itu para pedagang mengeluhkan pembongkaran yang dilakukan terhadap pedagang di depan Bioskop Rex. Pedagang di depan Rex adalah pedagang yang pernah digusur karena berdagang di depan Toko Baba Gemuk. Mereka oleh Jawatan Pasar Kotapraja dipindahkan ke depan Bioskop Rex. Jadi pemindahan ini pada awalnya sudah sejjin Jawatan Pasar Kotapraja. Akibat kebijakan ini, para pedagang

¹⁴⁶ Indonesia Raya, 29 Mei 1951

¹⁴⁷ Indonesia Raya, 4 Juni 1951

¹⁴⁸ Indonesia Raya; 11 Januari 1954

harus menanggung dua kali gusuran. Para pedagang bersedia menaati peraturan kotapraja asalkan gubug-gubugnya tidak dibongkar¹⁴⁹.

Pada waktu demonstran datang ke balaikota, Walikota Sudiro sedang mengadakan peninjauan ke Kepulauan Seribu, sehingga delegasi pedagang diterima oleh Sekretaris Balai Kota Mr. Supangkat. Dalam jawabannya, Mr Supangkat menyarankan agar para pedagang langsung menemui Wedana Matraman, karena Senen termasuk wilayah Matraman dan masalah pembongkaran diserahkan kepada Wedana masing-masing. Menyikapi reaksi keras dari para pedagang, pada tanggal 11 Januari 1954, Walikota Sudiro menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara perintah dari Walikota dengan pelaksana di lapangan yaitu Wedana. Menurut Walikota, pembongkaran agar dilakukan fase demi fase. Pembongkaran fase I, dilakukan terhadap pedagang-pedagang keliling/pikulan yang berdagang dengan mendirikan bangunan beratap di tempat-tempat yang ramai dan dekat dengan gedung-gedung besar yang mengganggu lalu lintas. Kepada pedagang semacam ini diberikan waktu 5 hari untuk membongkar sendiri gubugnya atau jika tidak dibongkar maka pamong praja yang membongkar. Batas ini sudah berakhir pada tanggal 11 Januari 1954 tetapi kenyataannya para pedagang sudah digusur sejak tanggal 9 dan 10 Januari 1954.¹⁵⁰

Pembongkaran fase II, akan dijalankan terhadap pedagang-pedagang pikulan dan keliling yang berdagang dengan mendirikan bangunan beratap di tempat-tempat yang tidak begitu ramai dan tidak dekat gedung besar tetapi sifatnya mengganggu lalu lintas. Fase ketiga, ialah pedagang-pedagang tidak keliling (pedagang tetap) yang mendirikan gubug-gubug tetapi tidak untuk tempat tinggal. Fase ke IV ialah pembongkaran tempat-tempat yang sebagian dijadikan tempat untuk berdagang dan setengah lagi untuk tempat tinggal dan fase ke V, ialah pembongkaran terhadap gubug-gubug liar lainnya. Untuk melaksanakan pembongkaran fase I dan II tidak diberikan ganti rugi. Terhadap pembongkaran fase III, IV dan V, terlebih dahulu

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Indonesia Raya; 12 Januari 1954

harus dilakukan persiapan-persiapan dan penunjukkan tempat penampungan serta pembiayaannya.¹⁵¹ Menurut walikota, terjadinya reaksi dari para pedagang, karena kesalahpahaman dalam melaksanakan perintah dari Walikota kepada Wedana. Wedana menafsirkan bahwa pembongkaran harus selesai dalam waktu 5 hari. Mengantisipasi adanya para pedagang yang nakal, walikota Sudiro mengingatkan kepada para pedagang, yang semestinya masuk kategori fase I dan II, tetapi kemudian membangun secara permanen agar mendapat ganti rugi, akan ditindak tegas.¹⁵²

Untuk menghindari adanya pedagang di luar gedung-gedung perusahaan, maka Sudiro meminta kerjasama dengan perusahaan agar menyediakan kantin di dalam kompleks kantor, untuk menampung pedagang kecil. Walikota mencontohkan adanya pedagang gado-gado yang sudah berjuang hampir 3 tahun lamanya di pekarangan belakang Balaikota¹⁵³. Berdasarkan seruan Walikota Sudiro inilah, mungkin adanya kantin yang menyediakan makan bagi para karyawan di Jakarta mulai ada, sekitar tahun 1954. Setelah mendapat reaksi keras dari masyarakat, kotapraja dalam keterangannya menyatakan bahwa pedagang di depan Rex masih diijinkan berdagang. Sementara itu pedagang di Kramat untuk sementara diijinkan karena mereka berdagang pada pukul 17.00 sampai 22.00, sedangkan pedagang di Pancoran akan dipindahkan ke Glodok.¹⁵⁴

Meskipun demikian, jawaban dari pihak kotapraja rupanya tidak memuaskan para pedagang, karena secara material. Mereka sudah dibongkar sehingga sudah banyak kehilangan harta. Akibatnya para pedagang kecil bersepakat membentuk Persatuan Pengusaha Dagang Kecil (PPDK).¹⁵⁵ Mereka mengkoordinir rakyat untuk melakukan aksi melawan kebijakan kotapraja, khususnya dalam penanganan pedagang kecil. Hal itu dibuktikan dengan membuat siaran pers yang menyerang kotapraja dan DEIP. DEIP adalah organisasi nasional yang bergerak dalam perdagangan dan

¹⁵¹ Indonesia Raya; 12 Januari 1954

¹⁵² *Ibid.*,

¹⁵³ Indonesia Raya; 12 Januari 1954

¹⁵⁴ Indonesia Raya; 14 Januari 1954

¹⁵⁵ Indonesia Raya; 7 Februari 1954

ekonomi. DEIP dalam pernyataannya mendukung kebijakan yang dilakukan oleh walikota, untuk mengadakan penggusuran pedagang kecil.¹⁵⁶

Menanggapi pernyataan dari DEIP tersebut, PPDK menyesalkan sikap DEIP yang menyetujui pembongkaran terhadap pedagang kecil. PPDK, mengatakan bahwa DEIP yang semestinya dapat dianggap sebagai pusat usaha untuk membangunkan dunia pedagang nasional sebaliknya justru menyulitkan pencarian hidup bagi pedagang kecil yang menjadi alat penyalur barang dagangannya sendiri. Selain itu PPDK dalam resolusinya mengatakan bahwa PPDK tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan kotapraja tentang mengganggu lalu lintas, mengganggu kesehatan dan keamanan. Kalau harus pindah maka kotapraja harus menyediakan tempat penampungan yang layak dan untuk alasan keindahan kota, maka para pedagang bersedia untuk memperbaiki gubug-gubugnya agar lebih baik dan indah.¹⁵⁷

PPDK dalam gerakannya, pada hari Sabtu 6 Pebruari 1954, jam 12.30, setelah hari Jumat sebelumnya tidak mendapatkan kesepakatan, para pedagang mengirimkan 800 anggotanya untuk mengadakan pertemuan dengan Badan Pemerintahan Harian (BPH), para wedana, Kepala Jawatan Penerangan dan undangan lainnya. Pertemuan diadakan di Balaikota. PPDK yang diwakili Makdum sebagai wakil ketua menuntut agar jangan diadakan pembongkaran terhadap gubug-gubug sebelum ada tempat penampungan baru. Tempat penampungan juga jangan terlalu jauh dengan keramaian. Dalam kesempatan tersebut, Makdum juga menyampaikan bahwa seluruh anggota PPDK menjaga keutuhan untuk menghadapi segala kemungkinan, karena perjuangan para pedagang masih panjang. Menanggapi tuntutan PPDK, Walikota Sudiro memberikan 3 hal. Pertama jangan berdagang pada tempat yang tidak diijinkan oleh Polisi Lalu Lintas karena mengganggu hubungan lalu lintas. Menurut Sudiro akibat kecelakaan lalu lintas di Ibukota Jakarta kalau dihargai dengan uang mencapai 6 juta pertahunnya. Kedua, kotapraja dalam waktu dekat akan membangun 9 buah tempat penampungan bagi pedagang yang menjadi korban. Ketiga, bahwa tindakan yang

¹⁵⁶ Indonesia Raya; 14 Januari 1954

¹⁵⁷ Indonesia Raya; 18 Januari 1954.

dilakukan oleh kotapraja bukan karena adanya tamu dan pembesar yang akan mengadakan kunjungan ke Jakarta. Dalam kesempatan tersebut R. Supranoto, Juru Bicara Kotapraja memberikan arahan tentang model-model gubug yang diijinkan oleh kotapraja.¹⁵⁸

Sementara itu, para pedagang kecil di sekitar Pasar Karanganyar, Gang Laotze dan Asem Reges yang terkena gusuran fase I dan II mendapat tempat penampungan di sekitar Asrama Polisi Karanganyar seluas kurang lebih 60 x 100 meter. Para pedagang di tiga daerah ini, telah digusur secara paksa oleh pihak kotapraja dengan bantuan polisi. Berhubung daerah penampungan baru masih berupa tanah kosong dan masih banyak pohon kelapa, maka kotapraja menyediakan dana Rp 50,000 untuk meratakan tanah, membangun selokan, dan jalan. Model seperti ini telah dilakukan untuk menata pasar Glodok. Akibat tekanan dari berbagai pihak, maka sampai 20 Januari 1954, pembongkaran untuk sementara dihentikan. Selain itu tenaga kerja yang dikerahkan untuk membongkar bangunan sedang dikonsentrasikan untuk menjaga daerah-daerah yang sudah selesai digusur. Karena kalau tidak dijaga, para pedagang akan kembali menempati tempat jualannya kembali. Menurut juru bicara walikota, berdasarkan pengalaman yang lalu, setelah 4 - 5 hari digusur, biasanya para pedagang menduduki kembali daerah semula, tetapi khusus daerah-daerah yang menyolok dan mengganggu lalu lintas tetap akan digusur.¹⁵⁹

Masalah pembongkaran pedagang kecil, rupanya telah meningkat menjadi masalah yang lebih luas. Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) Jakarta Raya melalui mosinya yang diajukan oleh Hutagalung, Jahja Malik (Partai Murba) Abdullah Salim, Gazali Sjahlan (Masyumi), dan Takdir Alisjahbana (PSI) meminta agar DPKS mengadakan sidang pleno menyikapi masalah pembongkaran ini. Hasilnya pada tanggal 20 Januari 1954, DPKS mengadakan sidang membahas masalah pembongkaran pedagang kecil.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Indonesia Raya; 7 Pebruari 1954

¹⁵⁹ Indonesia Raya; 20 Januari 1954

¹⁶⁰ Indonesia Raya; 18 Januari 1954

Dalam sidang yang berlangsung pada tanggal 20 Januari 1954, dimulai jam 20.00 dan berakhir pukul 00.30 dari 25 anggota dewan hanya 5 orang yang tidak hadir. Dalam pernyataannya, anggota dewan menyatakan bahwa tindakan walikota sangat gegabah dan buru-buru karena asal bongkar dan tidak menyediakan tempat penampungan terlebih dahulu. Selain itu pedagang kecil yang menjadi korban penggusuran terdapat rakyat yang telah ikut berjuang mendirikan negara hingga merdeka. Karena keadaan, mereka tidak bisa lagi melanjutkan perjuangan dan menjadi rakyat biasa, dan berusaha sebagai pedagang kecil. Mereka baru mulai bangkit kemudian secara tiba-tiba digusur, tanpa diberi kesempatan untuk pindah¹⁶¹. Terkait dengan masalah ini, maka anggota Dewan Jusuf Bandjar mengajukan usul agar dibentuk satu komisi untuk menyelesaikan masalah penggusuran ini secara cepat. Jusuf Bandjar, juga menyesalkan mengapa Badan Pemerintahan Harian (BPH) tidak membicarakan terlebih dahulu dengan dewan. Jusuf juga mengusulkan agar BPH ditambah 4 orang lagi sehingga menjadi 8 orang. Sebelum sidang selesai, tiga anggota dewan J Hutagalung, Jusuf Banjar dan Tabrani mengajukan mosi lagi agar tindakan pembongkaran dihentikan, membiarkan kepada para pedagang untuk berdagang sementara, sebelum tempat penampungan tersedia, menyesalkan tindakan pembongkaran, meminta jaminan agar mosi dilaksanakan. Akhirnya rapat ditutup pukul 00.30 dan akan dilanjutkan besok harinya dimulai pukul 20.00.¹⁶²

Sidang lanjutan 21 Januari 1954, dimulai dengan mengadakan voting terhadap mosi J Hutagalung dengan hasil 20 setuju dan 1 tidak setuju yaitu Nur St Iskandar dari PNI. Adapun keputusan dari sidang adalah: memutuskan; menyatakan penyesalan terhadap tindakan yang telah diambil, dan menuntut: Kesatu; kepada BPH untuk memerintahkan agar pembongkaran tempat-tempat berdagang dan rumah-rumah rakyat yang belum mempunyai ijin di tepi jalan dihentikan sekarang juga. Kedua; kepada BPH agar pedagang-pedagang kecil yang telah dibongkar gubugnya diperkenankan lagi berdagang kembali di tempat semula mereka berdagang atas

¹⁶¹ Indonesia Raya; 21 Januari 1954

¹⁶² Indonesia Raya; 21 Januari 1954

petunjuk-petunjuk dari Kotapraja dengan alat-alat yang tidak memberatkan bagi para pedagang, sementara tempat penampungan yang layak belum disiapkan kotapraja. Ketiga; dari pihak kotapraja diadakan dalam waktu singkat usaha-usaha yang positif untuk memimpin dan menyokong pedagang-pedagang kecil Indonesia agar mereka mendapat kemajuan sesuai dengan struktur perekonomian kita yang sehat. Keempat; kepada BPH agar pasar-pasar darurat dan tempat penampungan berjualan di perbanyak sesuai rencana yang telah diajukan oleh seksi-seksi dewan. Kelima; kepada BPH diberi waktu 6 bulan untuk melaksanakan mosi nomor 4 dalam waktu 6 bulan.¹⁶³

Selain mosi tersebut, karena dipandang BPH kinerjanya kurang bagus maka H Darwis Aminy (Masyumi), didukung Alaydrus, Moh. Ngali (Masyumi) dan M Tabrani (Partai Murba) mengajukan mosi agar BPH ditambah 4 anggota, mosi ini dikenal dengan nama mosi H Darwis Aminy dan kawan-kawan. Tetapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 00.40 mosi tersebut ditunda pembicaraannya.¹⁶⁴

Keluarnya mosi ini ternyata, telah menimbulkan dua pendapat, pertama bahwa kotapraja akan menarik kembali tindakannya dan mengizinkan orang berdagang di tempat semula. Kedua, pembongkaran masih akan tetap dijalankan, hanya sementara dihentikan. Pihak Kotapraja dalam siarannya melalui juru bicara kotapraja, R. Supranoto, mengatakan bahwa bukan berarti pedagang yang telah digusur boleh berdagang kembali di tempat semula, tetapi harus mendapat petunjuk dari kotapraja dan tidak mengganggu lalu lintas.¹⁶⁵ Dari hasil rapat dicapai kesepakatan bahwa daerah yang tidak boleh digunakan untuk berdagang adalah dari simpang tiga jalan ke Bogor ke jurusan Bekasi sampai jalan Baloel, dari bioskop Grand sampai stasiun tram Kramat, gang Sentiong, Pasar Nangka, seluruh Tanah Abang Bukit, Jaga Monyet sampai jalan Kesehatan, Jalan Gajah Mada, Glodok, Pasar Kebon Kacang, di sekitar bioskop Roxy. Tempat yang diijinkan untuk berdagang adalah di belakang trotoar dan

¹⁶³ Indonesia Raya, 22 Januari 1954

¹⁶⁴ Indonesia Raya; 22 Januari 1954

¹⁶⁵ Indonesia Raya; 26 Januari 1954

tidak di jalanan.¹⁶⁶ Kepada orang-orang yang mendirikan bangunan dan menanami pohon-pohon di atas trotoar diberi peringatan untuk segera membongkar bangunannya dan apabila sampai peringatan ini tidak dilaksanakan maka pemerintah akan membongkarnya.¹⁶⁷

Munculnya sektor informal di perkotaan yang meliputi pedagang kaki lima, becak, ojek dan sektor lainnya, sangat terkait dengan problem sosial ekonomi kota. Usaha ini sebagai bentuk kreatifitas rakyat di tengah ketidakmampuan negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Akibat keterbatasan lahan, para pedagang kemudian berjualan sebagai pedagang kaki lima dan bertempat tinggal di lokasi ilegal seperti bantaran sungai dan tanah-tanah negara dan lain sebagainya. Meskipun mereka mendesain tempatnya sendiri secara kreatif, unik dan imajinatif, namun tidak jarang terjadi pertentangan dengan negara. Mereka ini sering menduduki tanah orang lain, tempat-tempat umum seperti trotoar, menciptakan kekumuhan, kemacetan lalu lintas. Berkembangnya sektor informal (pedagang liar) di sudut-sudut kota ternyata membawa problem sosial tersendiri. Bagi pemerintah kehadiran pedagang liar berdampak pada terganggunya upaya pelaksanaan ketertiban, keindahan, kenyamanan dan keteraturan kota. Konsekuensinya dari perbedaan pandangan ini adalah munculnya penggusuran sektor informal. Ketika terjadi penggusuran sering terjadi aksi karena pemerintah dalam mengadakan penggusuran disertai dengan tindakan anarkhis dari aparatnya dengan mengadakan perusakan dan penyitaan alat-alat dagang mereka¹⁶⁸. Menghadapi aksi pemerintah ini, para pedagang mengadakan berbagai bentuk perlawanan. Perlawanan pedagang dapat berbentuk perlawanan terbuka diantaranya perang mulut, memblokade jalan, menolak relokasi, melakukan demonstrasi, membentuk paguyuban pedagang. Paguyuban (organisasi) digunakan sebagai sarana untuk memperkuat kelompok dalam menghadapi

¹⁶⁶ Kotapraja 30 Januari 1954, hal 3 -4

¹⁶⁷ Merdeka; 9 Juni 1955

¹⁶⁸ Dr. Ir. Alisjahbana, MA; *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*; Surabaya: ITS Press, 2006, hal. 140

penggusuran, sehingga mereka tidak keberatan jika harus membayar uang iuran untuk kelancaran paguyubannya.¹⁶⁹

3.8 Pembangunan Kompleks Senayan: Jakarta Mercusuar Dunia

Sukarno menginginkan Indonesia menjadi sebuah negara besar dan merupakan mercusuar dunia. Untuk mewujudkan gagasannya itu Sukarno menempatkan Jakarta sebagai tempat untuk aktualisasi dari gagasannya itu. Sebagai sebuah kota mercusuar dunia maka Sukarno membangun berbagai simbol kota. Simbol berfungsi sebagai alat komunikasi kelompok, legitimitasi kepemimpinan dan kontrol terhadap rakyatnya. Pembangunan simbol dan monumen kota merupakan identitas diri yang membedakan dengan kelompok lainnya¹⁷⁰. Untuk memperkuat legitimitasi politiknya, Sukarno membangun beberapa monumen diantaranya Monumen Nasional yang merupakan simbol mercusuar Indonesia. Pembangunan Monumen Nasional seperti juga Menara Eiffel mempunyai fungsi menghubungkan antara bumi dan langit, antara dunia bawah dan dunia atas. Selain itu Soekarno juga membangun Kompleks Asian Games dan berbagai perlengkapannya.¹⁷¹

Pada tahun 1962 Jakarta, disibukkan dengan event internasional, yaitu pesta Olah Raga Asia (Asian Games) ke IV dan Ganefo. Dua kegiatan besar tersebut, merupakan awal kota Jakarta untuk melaksanakan perombakan fisik kota secara besar-besaran. Untuk mempersiapkan pembangunan Gelora Senayan yang menelan biaya 12,5 juta US\$, pemerintah Indonesia mendapat pinjaman dari Uni Soviet. Peletakan batu pertama pembangunan pada 8 Pebruari 1960 oleh Presiden Sukarno. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Asian Games IV, setelah berhasil menyingkirkan Karachi

¹⁶⁹ *Ibid*; hal 124

¹⁷⁰ Peter J.M. Nas (ed); *Urban Symbolism: Studies in Human Society*; Leiden-NewYork-Koln; EJ. Brill, 1993, hal 17.

¹⁷¹ *Ibid*, hal. 44.

dalam voting dengan skor 22 banding 20, pada 1 Juni 1958 di Jepang. Jakarta selama ini mempunyai Stadion Ikada yang terletak di Lapangan Merdeka dengan daya tampung 15.000 penonton. Menanggapi adanya kemenangan Jakarta sebagai tuan rumah maka Presiden mulai memikirkan tempat penyelenggaraan Asian Games. Gagasan Sukarno pertama adalah di sekitar Bendungan Hilir seluas 300 hektar. Gagasan ini kurang disetujui oleh Gubernur Sumarno. Sumarno lebih memilih Rawamangun yang tanahnya masih banyak yang kosong. Pemikiran Sukarno berubah, kemudian berpikir di daerah Kampung Karet dan Pejompongan, karena Bendungan Hilir merupakan daerah permukiman padat. Untuk memastikan pilihan terhadap calon lokasi pusat kegiatan olah raga, Bung Karno bersama Frederik Silaban terbang bersama. Dalam penerbangan tersebut Silaban mengarahkan agar helikopter berputar di atas Senayan. Sampai akhirnya secara perlahan muncul ide Bung Karno, bahwa daerah Senayan cocok untuk stadion. Dalam gagasan Bung Karno ada sebuah paket segitiga pembangunan. Kawasan sekitar Monumen Nasional ditentukan sebagai pusat pemerintahan, Senayan pusat olah raga dan budaya, sebelah barat Senayan sebagai *political venues*.¹⁷²

Senayan sebelum ditetapkan sebagai lokasi olah raga, sebagian besar merupakan daerah rawa dan kebun luas. Setelah ditetapkan sebagai pusat pembangunan olah raga tahun 1959, maka dimulai dengan pembebasan tanah. Dalam rangka pembebasan tanah untuk pembangunan Gelora Senayan, pemerintah menggunakan surat Keputusan Peperpu tanggal 19 Mei 1959, No. Kpts/Peperpu/0733/59 dan dilaksanakan dengan Peraturan Pelaksanaan Peperda tanggal 26 Mei 1959 No. Prt/05/PPDSIDR/1959. Pembebasan tanah dilakukan atas 4 kampung yaitu Senayan, Petunduan, Kebun Kelapa serta Bendungan Hilir, yang mencakup wilayah 300 hektar. Kawasan yang tergusur lainnya adalah daerah Pejompongan sampai Kebayoran Baru dengan batas jalan Hang Lekir.¹⁷³

¹⁷² Julius Pour; *Dari Gelora Bung Karno ke Gelora Bung Karno*; Jakarta: tanpa penerbit, 2004, hal. 32

¹⁷³ *Ibid.*,

Dalam pembangunan Gelora Senayan selain pembangunan stadion utama yang lebih penting adalah menata kembali lahan seluas 300 hektar, tiga kali lipat dari lapangan Merdeka. Sebagai kelengkapan program pemindahan penduduk, dibangun 6 masjid, 18 langgar, 19 gedung sekolah, dua pasar, tiga poliklinik dan jaringan jalan sepanjang 40 kilometer. Lahan pengganti bekas penduduk Senayan seluas 500 hektar. Daerah baru tersebut harus dilengkapi berbagai fasilitas umum seperti jaringan jalan, bangunan fasilitas pelayanan umum misalnya gereja, masjid. Bekas penduduk Senayan yang dipindahkan ke Tebet menerima kavling masing-masing keluarga luasnya minimal 100 meter persegi, dengan membayar harga maksimal 60% dari ganti rugi atas tanah hak milik mereka di Senayan. Selain membebaskan kampung Senayan, secara serentak juga dilakukan pelebaran terhadap jalan Sudirman.¹⁷⁴

Dalam rangka Asian Games pada tahun 1962, dibangun jalan raya baru yang menghubungkan daerah Slipi dan Cawang memotong jalan Jenderal Sudirman tidak jauh dari bekas Pekan Raya Jakarta. Untuk menghubungkan jalan baru, dibangun jalan yang memotong jalan Sudirman yang dibuat setengah lingkaran sehingga menyerupai daun semanggi (*cloverleaf, klaverblad*).¹⁷⁵

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Meskipun Jakarta sudah mengadakan pembangunan secara besar-besaran tetapi keputusan yang menetapkan Jakarta sebagai Ibukota Negara, baru ditetapkan pada tahun 1964, melalui UU No. 10 tahun 1964, bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dinyatakan sebagai Ibukota Negara RI dengan nama Jakarta. Selanjutnya untuk mengepalari wilayah Jakarta maka Presiden mengeluarkan keputusan bahwa kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan berkedudukan sebagai Menteri gelar Menteri Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta, berada di bawah pengawasan langsung presiden; *Starweekly*, 21 Mei 1960 hal. 20 dan Lembaran Negara RI, No. 70, 1965

Gambar 19: Bung Karno di Dampiri R Maladi Memberi Penjelasan Tentang Kompleks Asean Games kepada Tamu Negara



Sumber: Julius Pour, 2004

Dalam rangka pembangunan kompleks Senayan, rumah-rumah yang dibongkar dan dibangun kembali berjumlah 8.652 buah, yang digunakan sekitar 46.829 jiwa penduduk di Tebet, Pejompongan, Slipi, Cikoko dan Cileduk. Jumlah penduduk yang harus dipindahkan sekitar 60.000 jiwa. Penduduk yang tinggal di Senayan sebagian besar adalah penduduk pindahan dari gusuran pembangunan Kebayoran Baru. Pada tahun 1950-an, sewaktu digusur mereka menuntut agar dinaikkan harga ganti rugi dan tidak mau ditempatkan di Senayan dan Kampung Pella tetapi pemerintah tidak bersedia. Jadi penduduk Senayan sebagian telah dua kali terkena gusuran akibat pembangunan. Akibatnya mereka terkena kerugian dua kali yaitu kerugian material karena ganti rugi yang tidak sesuai dan kerugian moril, karena harus meninggalkan tanah kelahirannya. Pemandahan dari Senayan ke tempat penampungan yang baru, warga banyak dirugikan. *Harian Merdeka* melaporkan bahwa penduduk hanya menerima uang saku sebesar 500 rupiah suatu jumlah yang sangat sedikit. Pemerintah dalam tanggapannya dengan adanya berita bahwa pemindahan penduduk setiap

keluarga mendapat uang saku hanya 500 rupiah tidak benar karena untuk keperluan sudah ditetapkan tarif sesuai surat Keputusan Seksi Urusan Tanah Biro III Dewan Asian Games tanggal 9 September 1959 No. 41/SUT/tahun 1959 sampai kepada tanaman mendapat ganti kerugian.¹⁷⁶

Menurut Kepala Staf KMKB/Peperda Jakarta Raya, Letkol AJ Kusno bersama-sama dengan Mayor Sutikno, sampai tahun 1960 penduduk yang dipindahkan sebanyak 940 orang kepala keluarga yang terdiri 4.114 jiwa mereka ditampung di kompleks Penampungan Pasar Minggu. Pemindahan ini sekitar 25% dari jumlah penduduk yang dipindahkan. Dalam pemindahan ini digunakan alat pengangkut truk sebanyak 40 buah tiap hari, jumlah semestinya 80 truk. Pemindahan penduduk diharapkan selesai Pebruari 1960.¹⁷⁷

Untuk mendukung pembangunan Gelora Bung Karno, di Jakarta dilengkapi dengan prasarana lainnya. Hotel Indonesia selesai pada tahun 1962. Gedung Wisma Nusantara, gedung tertinggi di Asia pada saat itu sebanyak 29 lantai. Wisma Nusantara tidak selesai di bawah kekuasaan Sukarno dan diselesaikan pada masa Presiden Soeharto. Selain itu dibangun departement store Sarinah yang terdiri dari 10 lantai dan merupakan pusat perbelanjaan pertama di Indonesia yang menggunakan tangga berjalan atau eskalator. Selain itu di sepanjang jalan Thamrin juga dibangun beberapa gedung penting di antaranya Departemen Agama dan Bank Indonesia yang merupakan karya Silaban. Bank Dagang Negera (BDN) pada tahun 1964 diadakan pemancangan tiang pertama untuk kantor yang berlantai 14. Hotel Banteng di lapangan Banteng juga dibangun. Sementara itu Masjid Istiglal dinyatakan sebagai masjid terbesar di dunia dan ditaksir membutuhkan dana 3 milyar rupiah pada tahun 1963, sebagian dananya berasal dari sumbangan masyarakat. Masjid Istiqlal diselesaikan pada masa Suharto pada tahun 1978. Untuk menunjukkan semangat demokrasi yang sedang menyala di bumi Indonesia, Sukarno juga membangun sebuah gedung pertemuan di daerah Senayan. Gedung ini didesain oleh Ir. Sujudi dan

¹⁷⁶ Merdeka 25; Januari 1960

¹⁷⁷ Merdeka; 11 Januari 1960

dikerjakan oleh ketua tim Ir. Sutami. Gedung ini kemudian dikenal sebagai Gedung DPR/MPR.¹⁷⁸

Prasarana umum lainnya yang dibangun adalah yang berhubungan langsung dengan pembangunan Gelora Bung Karno. Di antaranya adalah proyek pelebaran jalan Thamrin sampai jalan Sudirman dan pembangunan Jalan Cawang – Grogol sepanjang 14 kilometer. Jakarta *by pass* sepanjang 27 kilometer dibangun sebagai sarana untuk memperlancar transportasi ke pelabuhan Tanjung Priok, hal ini disebabkan jalan utama Senen – Jatinegara sudah semakin padat. Lancarnya transportasi di daerah timur mendorong munculnya pembangunan permukiman baru di antaranya Cempaka Putih dan pengembangan Pulo Gadung.¹⁷⁹

Pembiayaan proyek-proyek di Indonesia diperoleh dari pinjaman negara asing. Rusia tergabung dalam pembangunan ekonomi semesta tiga puluh tahun. Dari rencana kredit 337 juta dollar, penggunaan dana yang digunakan hanya 99,248 juta dollar. Sementara itu Blok Barat juga memberikan pinjaman, Ancol sebagai tempat rekreasi terbesar di Asia Tenggara mendapat kredit dari Perancis, sedangkan Jakarta *by pass* mendapat bantuan pinjaman dari Amerika Serikat. Sementara Jepang sesuai kesepakatan memberikan ganti perang sebesar 223,05 juta dollar dalam jangka waktu 12 tahun dengan perincian 20 juta rupiah pertahun mulai dari tahun 1958 sampai tahun 1970, dalam kenyataannya uang pampasan perang ini sudah habis menjelang tahun 1965, karena setiap tahunnya diambil lebih dari 20 juta dollars.¹⁸⁰

Pembangunan Gelora Senayan yang luasnya 300 hektar dan memindahkan penduduk ke daerah Tebet, Mampang, Lembah Setiabudhi, dan Kebayoran Lama (Ciledug) sangat tidak cocok dengan rencana pembangunan Jakarta. Daerah Tebet dan Kemang pada masa Belanda ditetapkan sebagai *retention basin* (daerah penggenangan) sungai-sungai di sekitarnya seperti Sungai Krukut dan Ciliwung dengan ketentuan bahwa daerah yang boleh dibangun 5% dari daerah yang

¹⁷⁸ Farabi Fakhri; *Membayangkan Ibukota Jakarta di Bawah Soekarno*; Yogyakarta: Ombak, tahun 2005, hal 139

¹⁷⁹ *Ibid.*, hal 142.

¹⁸⁰ *Ibid.*, hal 155

dimilikinya. Sementara itu sisanya adalah daerah terbuka dan pertanian dengan harapan jika banjir melanda daerah tersebut maka tidak merusak rumah penduduk, dan hanya menggenangi daerah pertanian.¹⁸¹ Akibat kebijakan pemindahan penduduk tersebut maka daerah-daerah tersebut mulai dikapling dan ditempati penduduk. Dampaknya sejak tahun 1960-an daerah Lembah Setiabudhi (Karet), Lembah Tebet dan Kemang selalu kebanjiran. Lembah Setiabudhi terkena limpahan air dari banjir kanal dan daerah-daerah sekitarnya yang sudah terbangun, sehingga air tidak bisa mengalir secara gravitasi ke kanal banjir. Sementara itu daerah Kemang terkena banjir dari Kali Krukut yang meluap. Daerah Tebet warganya terkena banjir dari sungai Ciliwung.¹⁸²

Menurut ketentuan penduduk yang dipindahkan dari Senayan mendapat kapling di daerah Tebet dan Kemang, tetapi ternyata mereka menjual tanahnya kepada penduduk lain. Sebagai gantinya mereka mencari tanah yang lebih murah di daerah pinggiran. Daerah Kebayoran Lama diserbu penduduk. Sebagian penduduk pindah ke Pluis yang terletak di Kebayoran Lama. Daerah ini merupakan daerah aliran Sungai Grogol. Sebelumnya daerah Pluis dibuat kolam-kolam dan situ-situ untuk pemancingan yang dapat digunakan sebagai *reservoir* untuk menampung luapan air sungai Grogol di waktu banjir. Dibangunnya Gelora Senayan dan ditempatkannya para penghuni yang kena gusur pada tanah kapling sekitar Pluis maka tanah yang luasnya kurang lebih 5 hektar itu, mulai menjadi perhatian penduduk untuk didiami. Kolam-kolam dikeringkan oleh penduduk. Bangunan rumah sementara mulai dibangun pada daerah aliran sungai Grogol, sehingga terbentuklah permukiman tanpa keteraturan. Pengeringan kolam berjalan terus, sehingga pembangunan perumahan baik yang permanen maupun semi permanen berjalan terus tidak terkendali. Akhirnya daerah aliran Sungai Grogol penuh dengan bangunan perumahan. Sampah dari usaha yang sebagian besar adalah bekas konveksi dan peralatan rumah tangga dibuang langsung ke Sungai Grogol, sebagian lagi dibuang ke kolam yang belum kering agar cepat

¹⁸¹ Wawancara dengan AR Soehoed

¹⁸² Wawancara dengan H Irwan Syafii Mantan Lurah Setia Budhi

penuh. Buangan sampah ke sungai berakibat memperkecil aliran sungai dan merupakan tempat berlindung nyamuk dan akhirnya banjir melanda daerah di atasnya karena air tidak bisa mengalir lancar ke bawah.¹⁸³

Selain pembangunan Gelora Senayan, pemerintah juga menetapkan 8 wilayah pengembangan. Wilayah pengembangan tersebut adalah Ancol 803,30 hektar, wilayah Kampung Gusti/Pluit 1.415,60 hektar, Jelambar 571,60 hektar, Tomang Barat 645,70 hektar, Tanah Kusir 428,13 hektar, Tebet 288,96 hektar, Kebayoran Baru 801,60 hektar, Rawamangun 470,50 hektar. DPRD dalam rapat dengar pendapat menyetujui *detail plan* tersebut hanya minta agar dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1964 untuk mempercepat pembangunan Jakarta insinyur teknik meningkat dari 7 orang menjadi 22 orang.¹⁸⁴

Tahun 1960-an pembangunan perumahan yang dilakukan oleh proyek swasta baik dalam bentuk otorita maupun proyek semakin banyak. Proyek Ancol dengan luas 585 hektar dilaksanakan oleh CITRA, proyek dimulai dengan meratakan tanah dan menyedot pasir dari laut. Sebuah kapal beroperasi di kanal Ancol. Dalam waktu setengah tahun daerah rawa dan bakau telah diubah menjadi tanah rata untuk rekreasi. Ide untuk membangun Ancol dimulai pertengahan tahun 1960. Pada tanggal 27 Januari 1961, kontrak untuk mematangkan tanah ditandatangani oleh Perusahaan Perancis Citra. Dalam bulan September 1963 dimulai pematangan tanah dan selesai pada Maret 1964. Tanggul-tanggul yang terbuat dari ijuk yang dianyam dari bambu dipasang sepanjang pantai untuk mencegah agar pasir yang disemprotkan ke darat tidak kembali ke laut. Diperlukan sekitar 7 juta meter kubik lumpur dan pasir untuk meratakan seluruh daerah dengan lebar 800 meter dan panjangnya 6,5 kilometer. Ancol dibangun sepanjang pantai dengan boulevard berlatar belakang gedung,

¹⁸³ Ahmad Sahur, dkk; *Migrasi, Kolonisasi, Perubahan Sosial*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988, hal. 90 – 92

¹⁸⁴ Warta Berita; 30 Mei 1977

bioskop, sebagai tempat rekreasi. Di bagian selatan dari bangunan utama akan dibangun 10 lingkungan perumahan dengan sarana perlengkapannya.¹⁸⁵

Tahun 1961 telah dilaksanakan pembangunan kembali n(peremajaan) Senen yang meliputi wilayah 15 hektar. Untuk memukimkan penduduk yang semula tinggal di Planet Senen dipindahkan ke Kawi-kawi seluas 40 hektar. Industri rumahan yang semula di wilayah Senen dipindah ke Galur Cempaka Putih seluas 25 hektar.¹⁸⁶

Di Pulo Mas, Proyek Pulo Mas merencanakan pembangunan Pulo Mas dengan mendapat bantuan dari PBB. Dalam pelaksanaan tahun 1965 tanah yang dibebaskan, luasnya kurang lebih 280 hektar dengan jumlah ganti rugi 1,5 milyar rupiah. Tanah yang dipindahkan sampai Juli 1965 sebanyak 20.000 meter kubik dan penggalian saluran dan danau seluruhnya menyangkut pemindahan tanah 70.000 meter kubik. Proyek Pulo Mas adalah proyek swasembada Jaya, proyek yang dibiayai dari hasil penjualan tanah yang telah siap bangun.¹⁸⁷

Proyek Cempaka Putih untuk pembangunan rumah sederhana, sampai akhir 1965 tanah yang dibebaskan seluas 100 hektar dari seluruh tanah yang luasnya 235 hektar. Pembangunan yang telah diselesaikan adalah pengurangan tanah yang disediakan kurang lebih 30 hektar, saluran pembuangan air sepanjang 2.500 meter serta jalan utama dan lingkungan seluas 54.048 meter persegi dari 57.000 meter persegi yang ditargetkan. Untuk melaksanakan Proyek Cempaka Putih, Pemerintah membentuk Otorita Cempaka Putih yang mengatur penggunaan tanah proyek menurut perumusan yang telah disusun dalam rangka *landform* bagi tanah perkotaan dengan pengertian bahwa di tiap perkotaan ada tanah untuk kota yang berpenduduk padat, ada tanah *green belt* yang melingkari kota. Cempaka Putih diperuntukkan untuk kota yang padat dengan menyatukan antara perumahan, perdagangan, perindustrian.¹⁸⁸

Selain pembangunan perumahan pemerintah juga membangun pasar. Dalam rangka pembangunan pasar, maka pemerintah DKI pada bulan Oktober 1962, telah

¹⁸⁵ Mingguan Djaja, th ke II, No. 57, 23 Pebruari 1963

¹⁸⁶ Prisma, No. 5, 1992, LP3ES, hal 5

¹⁸⁷ Mingguan Djaja, th ke 2, No. 51, 12 Januari 1963

¹⁸⁸ Keputusan Gubernur KDH Jakarta No.9957/BS/ tanggal 31 Mei 1961

membentuk panitia Pembangunan Pasar dan toko yang diketuai oleh H Tb. Mansur Ma'mum dengan anggota dari unsur pemerintah DKI. Sampai tahun 1963, ada 4 pasar yang menjadi fokus untuk perbaikan yaitu pasar Rawamangun, Tebet, Cikini Lama dan Grogol. Pasar Rawamangun sudah selesai dibangun bersamaan dengan proyek *by pass*. Pasar tersebut menyediakan 30 tempat untuk tekstil, pedagang kelontong dan penjahit masing-masing berukuran 3 meter kali 3 meter, 20 tempat, 30 tempat untuk rempah, 50 tempat sayuran dan ikan. Mengenai pasar Tebet, luas pasar 2.000 meter persegi, terdiri 50 ruang untuk tekstil, 45 ruang makanan dan minuman, los terbuka 300 buah. Untuk los tertutup sumbangan Rp 200.000 sedangkan los terbuka 2.500 rupiah sampai 4000 rupiah. Pasar Grogol dengan luas 2.450 meter persegi, disini akan dibangun kios sekaligus rumah tinggal sebanyak 18 dan beberapa kios. Sedangkan pasar Cikini masih dalam tahap penggambaran. Selain itu juga dibangun pasar Pejompongan, Kebayoran Baru, (Blok E dan M), Slipi, Manggarai dan Glodok.¹⁸⁹

PT Pembangunan Ibukota Djakarta adalah perusahaan terbatas semi pemerintah yang bertujuan membantu pemerintah DKI dalam pembangunan ibukota, dalam masalah perumahan. Pembangunan di Jalan Slipi Raya dinamakan Proyek Slipi. Proyek Slipi direncanakan oleh PT Perencana Djaja, anak perusahaan Pembangunan Ibukota Djakarta. Proyek Slipi luasnya kira-kira 10 ha akan dibangun 170 rumah dan 100 rumah flat.¹⁹⁰

Sampai akhir 1960-an luas wilayah kota dikembangkan menjadi 590 kilometer persegi, wilayah terbangun secara padat 180 kilometer persegi dengan radius kira-kira 7,5 kilometer yang dimukimi 65% penduduk¹⁹¹. Sementara itu dalam Keputusan DPRDGR Khusus Ibukota Jakarta No. 9/P/DPRD-GR/1967 tanggal 3 Mei 1967 tentang pengesahan Rencana Induk Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 1965 – 1985 jo Keputusan DPRD GR No 11/P/DPRD-GR/1967 tanggal 22 Juni 1967 tentang pengesahan Pola Rehabilitasi Pembangunan Tiga Tahun Daerah Khusus Ibukota

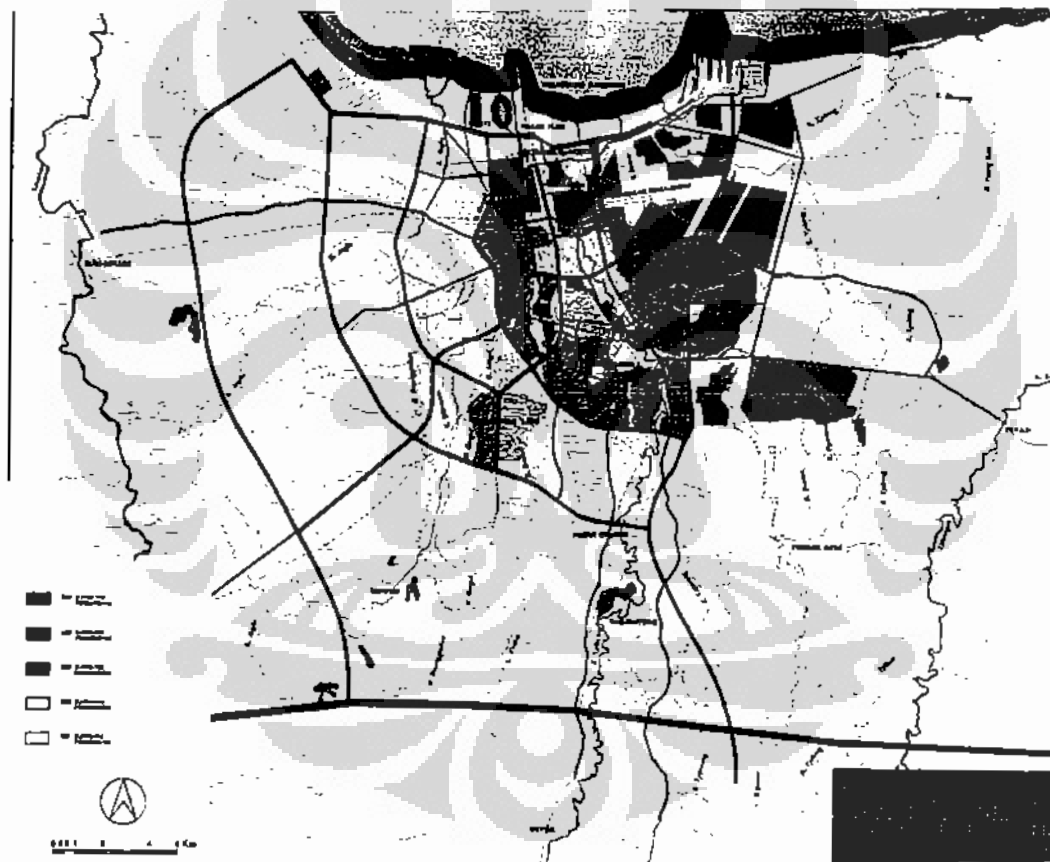
¹⁸⁹ Djaja, No. 55, 9 Pebruari 1963

¹⁹⁰ Mingguan Djaja, th ke 2, No. 51, 12 Januari 1963

¹⁹¹ Prisma, No. 5, 1992, LP3ES

Jakarta (1967 – 1969), dalam rencana induk 1967, dimasa datang di wilayah timur adalah daerah industri, bagian barat dan selatan daerah industri dan pelayaran, yaitu industri perikanan, peternakan, bagian utara dan pusat daerah pusat pemerintahan dan perdagangan. Pusat perdagangan membujur sepanjang jalan Gajah Mada – Hayam Wuruk, Senen, Kramat, Jatinegara, Pusat Perkantoran daerah Thamrin dan Sudirman, Pusat olah raga, Senayan.¹⁹²

Gambar 20: Rencana Kepadatan Penduduk Jakarta Tahun 1965 – 1985



Sumber: Rencana Induk daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 1965 – 1985

¹⁹² Rencana Induk Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 1965 – 1985 jo Keputusan DPRD GR No 11/P/DPRD-GR/1967 tanggal 22 Juni 1967

Rencana Induk ini memang sudah lama dipikirkan oleh Ali Sadikin. Ali Sadikin dalam suatu waktu pernah mengatakan bahwa ia tidak mau menyimpang dari planologi kota yang ditetapkan, “saya tidak mau melacurkan diri kalau mau menyelamatkan Jakarta harus turut planologi”. Ali Sadikin menyampaikan itu setelah mengadakan kunjungan ke Kuala Lumpur dan Singapura. Berdasarkan studi banding tersebut maka Ali Sadikin mengadakan diskusi dengan para wartawan. Ketika didesak wartawan bahwa masyarakat yang terkena gusuran di negara lain disediakan tempat penampungan. Bahkan penduduk yang rumahnya digusur sebagian bersertifikat dan mempunyai girik tetapi digusur tanpa ganti rugi yang layak. Padahal masyarakat mengetahui bahwa tanah-tanah yang digusur dibeli oleh cukong dengan harga yang menguntungkan DKI. Menanggapi pertanyaan itu Ali Sadikin mengatakan:

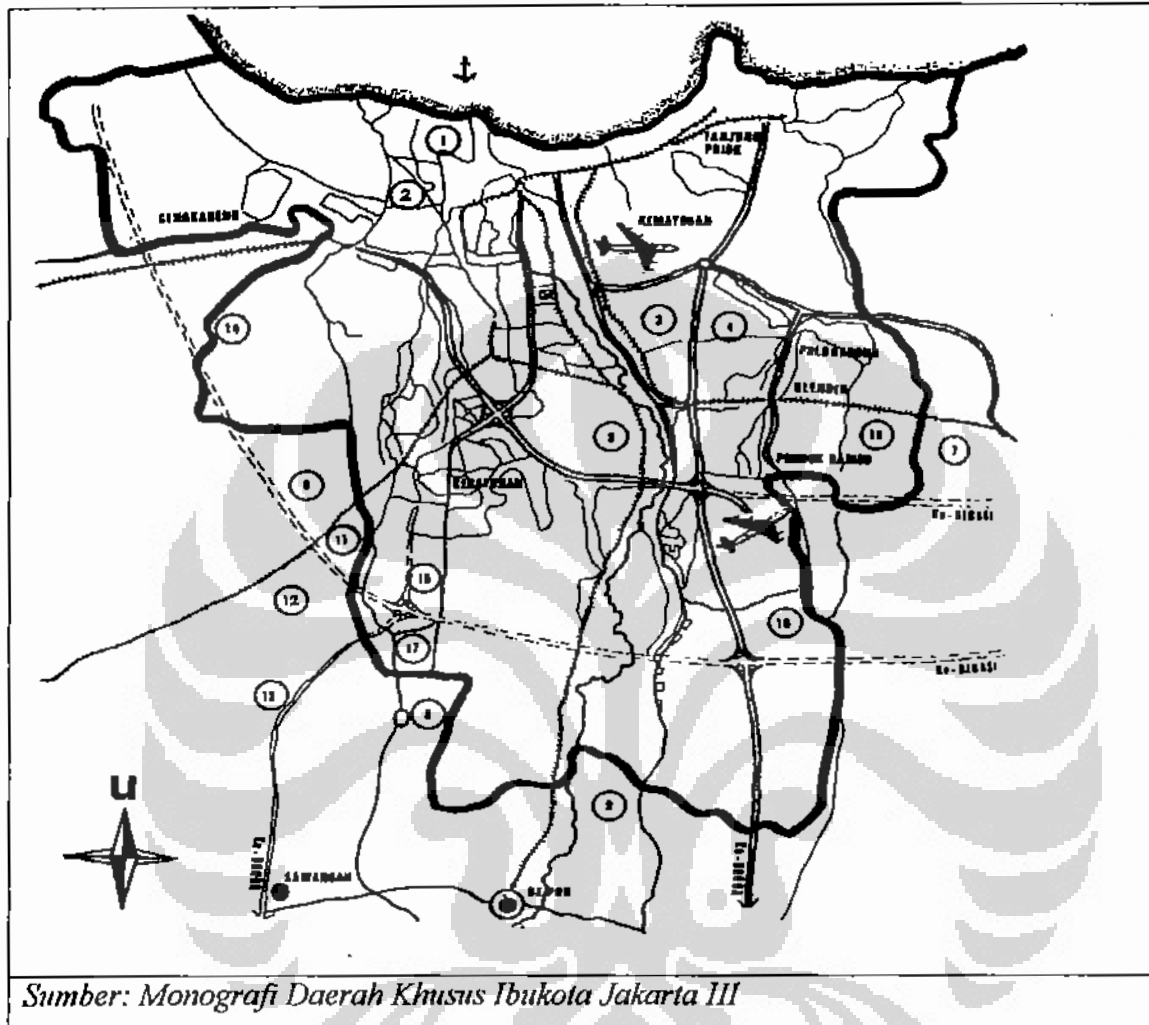
bahwa kita menghadapi masalah perumahan yang gawat. Mengenai penampungan penduduk yang digusur, secara tegas gubernur mengatakan bahwa pemerintah tidak sanggup, pemerintah ini miskin. Kalau kita digembar gemborkan bahwa kita kaya yang kaya depositnya tetapi belum digali¹⁹³.

Untuk memudahkan dalam pengurusan tanah pada tahun 1960 kotapraja membentuk Tim Pembangunan Perumahan Kotapraja Jakarta Raya. Tim ini tugasnya adalah mengkoordinir seluruh usaha pembangunan perumahan rakyat yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Tim diketuai oleh Badan Pemerintah Harian (Gozali Sjahlan). Kesulitan yang dihadapi kotapraja adalah dari seluruh tanah yang ada di kotapraja hanya 18% yang dimiliki kotapraja sisanya adalah dimiliki oleh Departemen Agraria, sehingga sampai tahun 1960 kotapraja sudah tidak memiliki tanah yang siap bangun lagi.¹⁹⁴

¹⁹³ Suara Karya; 7 Pebruari 1977

¹⁹⁴ Merdeka, 29 Juli 1960

Gambar 21: Peta Perkembangan Perumahan Jakarta sampai 1976



Berdasarkan peta tersebut terlihat perkembangan perumahan di wilayah Jakarta. Daerah yang sudah berubah fungsi menjadi permukiman (*housing estate*) adalah 1. Pluit, 2. Pakuwon, 3. Taman Solo, 4. Kencana Mas, 5. Kuningan, 6. Shangrila Indah, 7. Mas Naga, 8. Cinere, 9. Tanjung Barat, 10. Gunung Putri, 11. Bintaro Indah, 12. Country Wood, 13. Ciputat, 14. Hankam, 16. Pondok Indah, 17. Bonauli, 18 Dilly Emoun. Suatu hal yang perlu diperhitungkan juga adalah setiap muncul kawasan permukiman, maka akan dilengkapi sarana perlengkapan lainnya seperti kawasan

pertokoan dan permukiman penduduk di luar kompleks. Ini tentu menjadikan wilayah tersebut semakin penuh dengan permukiman penduduk¹⁹⁵. Jika melihat perkembangan kota tersebut menunjukkan bahwa perluasan kota ke arah selatan lebih cepat dibandingkan ke arah timur dan barat.

3.9 Aglomerasi Kota: Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek) Tahun 1970 – 1980

Kota-kota besar terbentuk sebagai suatu produk perkembangan dan integrasi yang berlanjut terus menerus dari sejumlah pusat-pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain dalam suatu sistem perkotaan. Pusat-pusat dan distrik-distrik di sekitarnya dalam proses pertumbuhan selanjutnya ditandai dengan gejala spesialisasi dan diferensiasi ruang. Karena suatu kota dengan banyak pusat kegiatan ini menjadi penyebab aglomerasi kota. Kecepatan pelayanan, industri yang berdekatan dengan industri yang lain, ketersediaan sumber industri, tenaga kerja dan penyaluran barang industri menjadi prinsip aglomerasi sebuah kota.¹⁹⁶

Pada tahun 1955, kondisi kampung di tengah kota yang tidak teratur dirasakan tidak sanggup lagi menampung penduduk. Untuk itu penduduk di dalam kota perlu dipindahkan ke daerah-daerah kosong. Perencanaan perluasan kota perlu dibuat terutama untuk jalan-jalan, karena diperkirakan 2 -3 tahun lagi kota akan penuh¹⁹⁷. Pembangunan industri tidak lagi di tengah kota melainkan dibawa ke pinggiran kota untuk mengurangi kepadatan di pusat kota, untuk itu perlu dibangun jalan yang menghubungkan daerah pinggiran. Urbanisasi yang meningkat juga karena pergolakan di daerah luar Jakarta antara lain di Jawa Barat, karena mendapat gangguan dari para pemberontak DI/TII. Mereka pergi ke Jakarta dengan membangun perkampungan liar

¹⁹⁵ Budiawan dkk; *Monografi Daerah Khusus Ibukota Jakarta I*, Jakarta: Depdikbud, tt, hal. vii

¹⁹⁶ Hadi Sabari Yunus; *loc. cit*, hal. 44.

¹⁹⁷ Merdeka; 1 September 1954

di daerah Tanah Tinggi, Sunter. Sebagian besar pendatang di daerah ini berasal dari Cirebon, Kuningan, Sumedang, Tasik Malaya.¹⁹⁸

Untuk menghindari adanya permukiman yang padat di tengah kota maka Ir Hadinoto, kepala soal-soal masyarakat perkotaan, menyarankan perlunya desentralisasi dalam pembangunan perindustrian. Desentralisasi hendaknya dibagi-bagi dalam: industri yang harus dekat dengan pelabuhan karena menggunakan bahan import, industri yang harus berada di tempat bahan mentah dihasilkan, industri lainnya yang dapat didesentralisasikan seperti pabrik kecap, rokok, sepatu dan lain-lain. Desentralisasi dapat menggunakan kota-kota di sekitarnya seperti Tangerang, Bekasi, Krawang atau dengan membangun kota-kota satelit.¹⁹⁹ Wacana perluasan kota ke daerah Bogor, Tangerang dan Bekasi ini pada tahun 1955 belum berhasil dilaksanakan.

Pembangunan yang pesat di Jakarta membutuhkan jumlah pegawai negeri semakin banyak. Pada tahun 1966 jumlah pegawai negeri di DKI Jakarta sebanyak 24.761 orang. Jumlah pegawai DKI sampai tahun 1977 meningkat menjadi 50.679 orang.²⁰⁰ Pesatnya pembangunan di Jakarta berakibat semakin meningkatnya jumlah urbanisasi di Jakarta. Hal ini membutuhkan pembangunan perumahan yang semakin besar.

Pada tahun 1970-an diperkenalkan kawasan yang dinamakan Jabotabek (Jakarta Bogor, Tangerang dan Bekasi). Konsep Jabotabek berawal ketika awal 1973 Direktorat Jenderal Cipta Karya PUTL menyelenggarakan kursus tenaga perencana dari Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi. Kursus bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwa Jakarta telah berkembang dengan cepat, hal ini perlu disadari oleh para perencana kota. Dari hasil pelatihan tersebut dihasilkan laporan yang menjadi bahan referensi pertama dengan judul: *Jabotabek: A Planning Approach of Its Absortion Capacity for New Settlements Within The Jakarta Metropolitan Region.*

¹⁹⁸ Merdeka; 3 September 1954

¹⁹⁹ Majalah Merdeka No. 46, th 7, Nopember 1954

²⁰⁰ Pemda DKI; *Gita Jaya: Catatan H Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966 – 1977*, Jakarta: Pemda DKI, 1977, hal 80.

Laporan yang disebarluaskan ke berbagai instansi ini mendapat tanggapan yang luas terutama dari Departemen Dalam Negeri, Pemerintah DKI dan Pemerintah Jawa Barat. Konsep tersebut kemudian dibahas pada 3 Januari 1974 oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Hasil pembahasan ini kemudian diajukan kepada Presiden Suharto dan mendapat persetujuan, yang dikenal sebagai konsep Jabotabek. Konsep Jabotabek sebagai konsep planologi maupun konsep tata ruang maka pokok-pokok pikiran yang mendasari perkembangan penduduk Jakarta pada tahun 1985 sudah tidak mencukupi lagi. Untuk itu perlu dikembangkan pusat-pusat industri dan permukiman di luar Jakarta untuk menampung kelebihan penduduk Jakarta. Dengan dasar pemikiran ini disusun rencana tata ruang atau regionalisasi untuk wilayah Jabotabek. Rencana tata ruang ini dibuat dalam suatu batas wilayah permukiman dan pertanian sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan pola perkembangan yang serasi. Untuk menyiapkan perencanaan pengembangan Jabotabek, ketiga Menteri ditugasi oleh Presiden dibantu oleh satu team perencanaan yang terdiri dari Deputi bidang Regional dan Daerah; Ketua Bappenas, Dirjen PUOD, Dirjen Cipta Karya PU, Ketua Bappenas Jawa Barat dan DKI Jakarta. Team ini hanya bertugas membuat perencanaan pengembangan Jabotabek saja.²⁰¹

Dari hasil kerja tersebut kemudian Ali Sadikin dengan Gubernur Jawa Barat A. Kunaefi sejak bulan Mei 1976 mengadakan kerjasama pengembangan Jabotabek. Selanjutnya dibentuk tim untuk menangani konsep kerjasama Jakarta dan Jawa Barat. Untuk itu dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) selaku sekretaris Dr. Ateng Syafrudin SH. Proyek Jabotabek memerlukan biaya 10 milyar rupiah meliputi areal 567.889 hektar dengan taksiran jumlah penduduk 9,2 juta orang. BKSP akan menangani pemecahan permasalahan menyangkut pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, tata ruang dan administrasi pemerintahan di wilayah Jabotabek. Selain itu juga menetapkan program-program daerah sektoral, pembangunan fisik

²⁰¹ Pelita; 14 Januari 1981

serta pengendalian perencanaan pembangunan agar tercapai koordinasi, integrasi proyek-proyek regional dan sektoral. Untuk mempercepat pembangunan maka diperlukan penelitian bersama tentang kependudukan, industri bahan bangunan, tanaman, transportasi. Karena Ali Sadikin sudah habis masa jabatannya maka proyek Jabotabek kemudian dilanjutkan oleh Tjokropranolo.²⁰²

Untuk mencapai sasaran secara berencana, dilaksanakan pembangunan secara bertahap. Tahap pembangunan Jabotabek pada tahap pertama 1975 – 1980, ditekankan pada pembangunan 3 pusat pengembangan Tangerang, Depok dan Bekasi sebagai daerah permukiman dan lokasi industri. Sebagai daerah permukiman pada lokasi itu akan diberikan fasilitas lingkungan yang diperlukan seperti listrik, pasar, sekolah. Tahap II tahun 1980 – 1990 sasaran yang dikembangkan adalah Tangerang, Bogor, Cikarang dengan peningkatan daya tampung masing-masing 250.000 jiwa, pengaturan daerah industri sepanjang Cibinong dan Bogor, peningkatan daerah industri di daerah Tangerang sebelah barat dan daerah Cikarang di Timur, dan pengaturan daerah-daerah hijau di sekitar Jakarta. Sebagai konsekuensi gagasan ini maka perlu diperbaiki jalan raya dan kereta api Depok – Bogor dan penyelesaian jalan tol Jagorawi dan pembuatan jalan lingkar luar Jakarta. Tahap III, pengembangan Jabotabek tahun 1990 – 2000, daya tampung daerah/kota Tangerang, Bogor dan Cikarang dengan daya tampung masing-masing, Bogor 500.000 jiwa, Tangerang 250.000 jiwa dan Cikarang 400.000 jiwa. Pengembangan daerah permukiman di Ciputat, Ciledug dan Cileungsi 50.000

²⁰²Letjen Tjokropranolo terpilih sebagai gubernur melalui rapat pemungutan suara untuk menentukan gubernur. Tjokropranolo mendapatkan suara 32 dari 40 anggota DPRD. Tjokropranolo merupakan calon terkuat dari 3 calon yang ada yaitu Dr. HR. Suwondo bekas wakil gubernur dan R. Sukiyat tokoh buruh dan tenaga kerja, dalam pemungutan suara masing-masing mendapat 4 suara. Pelantikan dilaksanakan pada 29 September 1977. Mengapa suara cukup banyak memilih Tjokropranolo dalam pemungutan suara ini satu hal yang menarik. Dari 40 anggota DPRD DKI Jakarta, mereka berasal dari 14 orang Fraksi PPP, 13 orang Fraksi karya, 6 orang Fraksi PDI, 7 orang Fraksi ABRI. Dalam pemilihan gubernur, masing-masing orang tidak mewakili partai. Dalam UU No. 5, 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pasal 15 dan Peraturan Mendagri No. 10/1974 tentang Pemilihan kepala Daerah tidak dibenarkan calon tunggal. Calon paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang, dan calon-calon yang ada harus dimufakati bersama antara Pimpinan Dewan, pimpinan Fraksi dan Mendagri. Dalam rapat pertama semua unsur sepakat mencalonkan Tjokropranolo, dalam usaha taraf kedua baru diusulkan Dr. HR Suwondo dan R Sukiyat untuk diajukan menjadi calon yang dinilai dari perseorangan dan bukan partai. Lihat *Warta Berita Antara*; No. 235; 22 Agustus 1977 dan *Berita Buana*, 26 September 1977

jiwa dan Cibinong dengan 100.000 jiwa, selain itu juga pengembangan daerah industri di Tangerang, Cibinong – Bogor dan Cikarang. Konsekwensi dari pengembangan ini penambangan fasilitas dan sarana jalan di daerah permukiman baru seperti Tangerang, Ciputat, Ciledug, Cibinong, dan Bogor. Untuk pengembangan wilayah Jabotabek ini maka Pemerintah Pusat, Pemerintah DKI, Pemerintah Jawa Barat dan pemerintah daerah tingkat II yang berada di lingkungan Jabotabek masing-masing mengarahkan anggarannya untuk membina pengembangan wilayah Jabotabek.²⁰³

Pengembangan wilayah Jabotabek menurut laporan tahun 1975, telah mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk di Bogor 1.855.981 jiwa, Kota Bogor 251.000, Kabupaten Tangerang 1.154.000 orang, Kabupaten Bekasi 904.600, sedangkan Jakarta 5.403.957 jiwa.²⁰⁴ Jumlah penduduk di Jabotabek ini pada tahun 1980 sudah meningkat lebih cepat, Kabupaten Bogor 2.823.201 jiwa, Kodya Bogor 247.157 jiwa, Kabupaten Tangerang 1.515.677 jiwa, Bekasi 1.123.976 jiwa. Penambahan penduduk yang terjadi di daerah Jabotabek tentu membutuhkan lahan untuk permukiman. Akibatnya tanah yang seharusnya digunakan sebagai daerah resapan air telah berubah menjadi daerah permukiman, akibatnya air dari daerah Bogor dan sekitarnya langsung masuk badan sungai dan berakibat banjir di daerah dataran Jakarta.

Tabel 11: Jumlah Penduduk di Botabek 1975 – 1980

| No | Wilayah | Luas/Ha | Jumlah Penduduk (tahun) | | |
|----|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | 1970 | 1975 | 1980 |
| 1 | Kab Bogor | 237.121 | 1.864.652 | 1.855.981 | 2.823.201 |
| 2. | Kodya Bogor | 2.275 | 195.882 | 251.000 | 247.157 |
| 3 | Kab Tangerang | 104.400 | 1.066.695 | 1.154.000 | 1.515.677 |
| 4 | Kab. Bekasi | 130.829 | 832.721 | 904.600 | 1.123.976 |

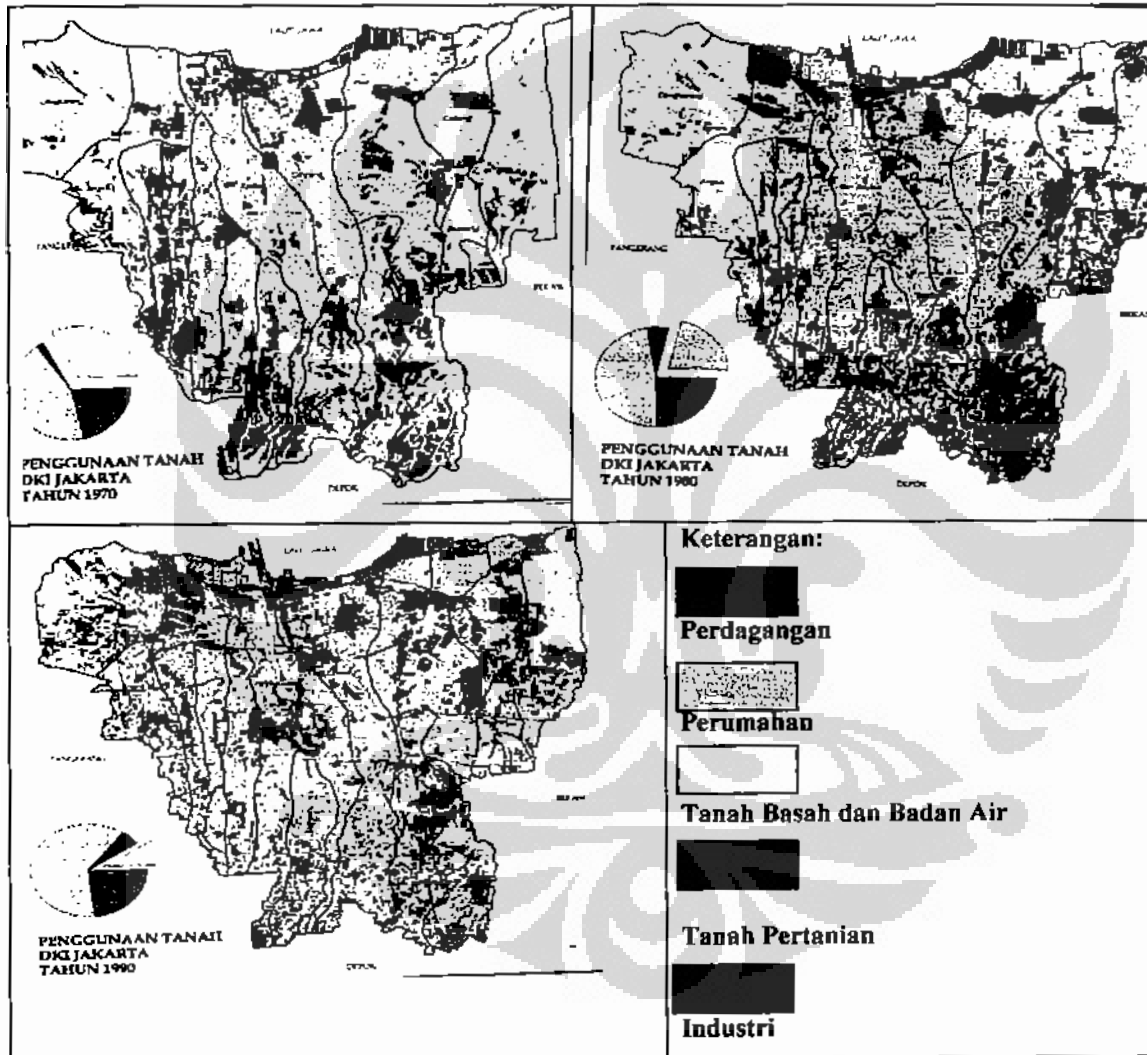
Sumber: Monografi DKI Jakarta III

²⁰³ *Ibid.*, hal 68.

²⁰⁴ *Ibid.*, hal 69.

Pembangunan di daerah Jabotabek telah merusak DAS Ciliwung. Daerah ini tadinya dapat menyerap air hujan, sekarang daya serapnya sekitar 20% saja, sisanya menjadi aliran sungai. Banjir di aliran Ciliwung karena pembangunan di Puncak, sedangkan bagian tengah Jakarta sudah dipenuhi dengan permukiman padat.²⁰⁵

Gambar 22: Peta Penggunaan Tanah di Jakarta Sampai Tahun 1970, 1980, 1990



Sumber: Rudy P Tambunan, 2005

²⁰⁵ Kompas; 26 Nopember 1984

Selain masalah pengembangan wilayah sekitar Jakarta, masalah yang sangat penting dalam penataan Jakarta adalah penggunaan tata ruang kota. Masalah tata ruang kota yang tidak konsisten dapat dijumpai dengan mengkaji adanya temuan petugas inspektorat terutama dalam pemberian ijin mendirikan bangunan. Tentang kondisi penyelewengan ijin mendirikan bangunan di DKI sangat memprihatinkan. Pada tahun 1983, petugas Operasi Ketertiban berkerja sama dengan Inspektorat wilayah DKI berhasil membongkar penyalahgunaan wewenang jabatan dalam proses perijinan IMB maupun IMB pemutihan. Di Jakarta Selatan pejabat suku dinas P2K Jakarta Selatan masing-masing R dan Ir. A bersama 16 oknum pejabat dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Besarnya penyalahgunaan wewenang IMB mencapai 263.352.728 rupiah. Berdasarkan pemeriksaan terhadap 34 orang serta wawancara 71 saksi yang mengalami pungutan liar telah terjadi berbagai macam praktek pungli yang dilakukan oleh pejabat Dinas/Suku Dinas P2K DKI Jakarta terhadap pemohon IMB. Di Jakarta Selatan, R yang menjabat sebagai pejabat di Suku Dinas P2K bekerjasama dengan beberapa petugas dari suku dinas lainnya telah berhasil melakukan praktek pungli dan penyalahgunaan jabatan sejak tahun 1974 yang menurut pengakuannya sebesar 199 juta rupiah. Modus praktek pungli dilakukan dengan cara minta uang pengurusan, biaya membuat laporan, gambar dan lainnya. Bila uang tersebut tidak diberikan maka IMB dihambat dengan cara mempersulit proses pengurusannya dengan dalih syarat-syarat kurang lengkap.²⁰⁶

Tabel 12: Penyelewengan IMB Tahun 1983

| Daerah | Oknum terlibat | Modus |
|-----------------|---------------------------------------|--|
| Jakarta Selatan | Ir. A dari Dinas P2K; Oknum NG, SN, R | Sejak tahun 1976 -- 1980 Ir. A telah menerima pungli dari real estate PT K, PT P, PT M dan dari bawahannya yaitu Ir. LE dan R sebesar 2,4 juta sedangkan permohonan IMB sebesar 2,9 juta. Ir U juga menerima pungli dari seorang pemohon IMB |

²⁰⁶ Suara Karya, 8 Februari 1983

| | | |
|---------------|---|---|
| | | <p>C sebesar 300 ribu dengan dalih untuk urusan olah raga.</p> <p>Oknum NG bertindak sebagai komisaris PT yang bergerak dibidang konsultan mengadakan kerjasama dengan SN</p> <p>Seorang oknum pejabat menerima bayaran dari Ny. E pemohon advis planning sebesar 8 juta. Sedangkan SN sebagai oknum pejabat telah bekerjasama dengan R untuk mengadakan pungli terhadap Ny E sebesar Rp 3.957.728</p> |
| Jakarta Barat | Oknum Pejabat Suku Dinas P2K inisial SF, SD, TN | <p>Oknum SF, SD, TN masing-masing Sudin P2K melakukan penyimpangan dengan cara pemohon diberi petunjuk untuk melampirkan foto bangunan lama dengan tidak melampirkan foto bangunan lama tidak melampirkan keterangan RT/RW sehingga bangunan baru diproses dengan cara lama dan berhasil memperoleh IMB pemutihan. Oknum SF sejak 1979 memroses IMB pemutihan dengan menerima imbalan 100.000 rupiah dari setiap pemohon rata-rata tiap bulan menerima 350.000 rupiah serta selama bertugas menerima imbalan pungli 5.950.000 rupiah. oknum SD pada tahun 1979 menerima imbalan sebesar 2 juta rupiah dari pemohon IMB pemutihan rumah di jalan mangga Besar dan 125.000 rupiah dari pemilik rumah di jln Kenanga serta pemilik rumah di jalan Tomang sebesar 135.000 rupiah</p> <p>- Oknum TN mendapat meminta imbalan dari bangunan baru untuk diputihkan dengan menerima pungli Rp 450.000 dengan cara mengganti foto bangunan baru dengan foto tahun 1960 agar kepala Seksi dan pejabat lainnya tinggal menandatangani.</p> |
| Jakarta Timur | Ir. D; S, MS, M | <p>Ir. D (di kantor Walikota Jakarta Timur) setiap melakukan pengawasan ke lokasi proyek/bangunan PT M di Pasar Rebo telah menerima 200 ribu rupiah dan 100 ribu rupiah untuk setiap kali membuat laporan proyek. Dalam tahun 1982 menerima imbalan/pungli dari pemohon IMB sebesar 1.410.000 rupiah.</p> <p>Oknum S penilik telah memproses IMB dengan menerima imbalan setiap pemohon IMB 30.000 rupiah dan dalam tahun 1981 – 1982 menerima imbalan Rp 1700.000.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Oknum MS pengamat sejak tahun 1975 telah menerima imbalan dari pemohon IMB sebesar 2.695.000 rupiah.</p> <p>Oknum M pengamat bersama dengan BS/Penilik wilayah Jakarta Utara selama tahun 1977 sampai tahun 1980.</p> |
|--|--|--|

Sumber: diolah dari Suara Karya dan koran lainnya Pebruari 1983

Masalah tanah ini rupanya menjadi masalah yang rumit bagi Jakarta, selain penyelewengan adanya mafia tanah juga dirasakan sangat menyulitkan pemerintah dalam menata wilayah. Kasus mafia tanah misalnya terjadi di Jakarta Utara. Hal ini dibuktikan oleh Walikota Jakarta Utara, H Koestamto WD, bahwa di Jakarta Utara telah terjadi penjualan tanah milik investor penanam modal PT S seluas 11,5 hektar telah dijual oleh oknum mafia tanah yang melibatkan pihak aparat Kamtib dan pemerintahan. Masyarakat yang dikelabui oleh mafia tanah telah membeli tanah tersebut perkapling dengan harga 100.000 rupiah sampai 200.000 rupiah²⁰⁷. Hal yang hampir sama juga dialami warga miskin. Seperti yang dialami seorang warga di Jakarta Utara yang merasa ditipu, sehingga tanahnya harus digusur oleh petugas.

Seorang perempuan yang nampak tua termangu menatap sebuah traktor tengah mengobrak abrik sebuah rumah. Wajahnya muram, matanya kedap kedip menahan air mata, walau akhirnya meleleh juga membasahi pipinya. Disampingnya berdiri dua perempuan masing-masing menggendong anak yang masih kecil-kecil. Mereka semuanya menunjukkan perasaan duka yang mendalam dihatinya. Perempuan yang nampak tua bernama Roiah, berusia kira-kira 40 tahun, dua perempuan lainnya adalah anak dari Ny. Roiah. Yang tua berusia 19 tahun bernama Warsih dan yang berumur 17 tahun namanya Rumina. Ny Roiah beserta dua anaknya itu mempunyai status sama sebagai janda. Roiah tinggal di RW 13, kelurahan Papanggo, Jakarta Utara yang merupakan tanah garapan yang dibeli secara sah dari H Ramin dengan panjang 150 m, lebar 6 m. Tanah dibeli pada 20 Oktober 1982 dengan harga Rp 450.000. Menurut Roiah uang untuk pembelian rumah dikumpulkan sedikit-demi sedikit dari hasil buruh memetik kangkung selama bertahun-tahun²⁰⁸.

²⁰⁷ Antara; 27 Maret 1983

²⁰⁸ Merdeka; 25 Juni 1983

Problem pertanahan rupanya menjadi masalah yang umum terjadi di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pertanahan di Jakarta merupakan masalah yang rumit. Hal inilah yang mengakibatkan pembangunan suatu kawasan tidak sepenuhnya dapat berjalan lancar dan sering banyak menimbulkan konflik.

3.10 Kawasan Puncak di Bawah Kekuasaan ‘Biong’

Kawasan Puncak mulai mengalami perubahan fungsi lahan pertama kali ketika pemerintah kolonial Belanda mengadakan pembabatan hutan secara besar-besaran sejak abad 19. Kawasan Puncak diubah fungsinya menjadi daerah perkebunan teh. Selama hampir dua abad sampai sekitar tahun 1920-an alih fungsi masih terus berlangsung. Pada masa kolonial masalah penebangan pohon mendapat perhatian yang sangat ketat dari pemerintah. Pemerintah menekankan bahwa meskipun tanah-tanah partikelir dikuasai oleh para tuan tanah, untuk penebangan pohon hanya diijinkan bagi pohon-pohon yang sudah mati sedangkan pohon yang masih hidup tuan tanah tidak boleh menebangnya tanpa seijin pemerintah. Bagi tuan tanah yang menebang pohon seharga f 25 apakah pohon hidup atau mati maka hakim polisi daerah mempunyai wewenang untuk mengadilinya. Karena hal itu dapat dikategorikan sebagai pencurian, tetapi jika nilainya lebih dari f 25 maka pengadilan negeri yang harus menangani masalah ini.²⁰⁹ Mengenai penebangan pohon dibahas dalam *Bataviasche Landbouw Vereeniging* 30 Agustus 1915. Namun dalam kasus penebangan pohon di Tangerang karena belum ada peraturan yang jelas maka Residen Tangerang misalnya, masalah ini dibawa sampai di pengadilan.²¹⁰

Tahap kedua dari perkembangan kawasan Puncak adalah sejak tahun 1980-an, ketika tol Jagorawi mulai dioperasikan. Luas permukiman di wilayah ini meningkat menjadi 64 kali dalam waktu 22 tahun. Dampaknya, air hujan yang langsung masuk ke

²⁰⁹ Notulen *Bataviasche Landbouw Vereeniging*; 30 Agustus 1915, lampiran Nomor 1718, 3 Februari 1915.

²¹⁰ Notulen *Bataviasche Landbouw Vereeniging*; 30 Agustus 1915, hal. 7

anak-anak kali Ciliwung membengkak dari 15% menjadi 70%. Pengalihan lahan di daerah Puncak menjadi villa atau permukiman sangat terkait dengan aturan dan perilaku masyarakatnya. Vila-vila yang ada, sebagian berdiri di atas bekas perkebunan teh Ciliwung, Gunung Mas yang tiap tahun kehilangan lahan sekitar 600 hektar akibat dijarah warga. Pengalihan fungsi lahan ini sangat terkait dengan keberadaan 'biong' (biang bohong) istilah untuk makelar yang menjadi perantara petani penggarap dengan kalangan berduit yang ingin memiliki vila. Perkebunan Ciliwung sejak tahun 1970-an luasnya sekitar 300 ha sudah dikuasai penggarap. Untuk menjual tanah negara, seperti pengakuan biong Haji Teteng, biong kesohor di Gunung Mas, oper garapan cukup dilakukan dengan melibatkan RT/RW dan aparat desa, pihak perkebunan dan notaris. Para pembeli tanah garapanpun sebenarnya juga berspekulasi. Kalau gagal mereka siap dengan kehilangan tanah, tetapi modusnya mereka mengakali birokrasi dengan perantara para biong. Para spekulan tanah berani membeli tanah karena tanah di daerah ini untuk lahan bekas perkebunan Gunung Mas. Tanah garapan permeter dihargai 2.500 rupiah sampai 100.000 rupiah tergantung panoramanya. Untuk memudahkan pengurusan tanah para 'biong' siap untuk mengurus IMB dengan memasukkan ijin pembangunan vila di lokasi permukiman, setelah suratnya selesai, lokasi digeser ke tempat yang diinginkan. Selain itu biong juga menyediakan jasa pembangunan villa, jalan masuk dan penjaga villa.²¹¹

Akibat alih fungsi yang berlebihan di kawasan Puncak, maka air dari kawasan Puncak yang alirannya dapat diukur di pintu air Katulampa menyumbang 17 juta meter kubik yang masuk ke Jakarta. Perubahan tata guna lahan dari kawasan hutan, menjadi perkebunan dan menjadi permukiman telah membawa perubahan daya serap. Kawasan hutan dapat menahan air hujan 85 – 98%, kawasan perkebunan daya serapnya 35% – 79% sedangkan permukiman daya serapnya 30 – 65% sedangkan kawasan permukiman di perkotaan mempunyai daya serap 5 – 50%.²¹²

²¹¹ Tempo; Edisi 21 – 27 Mei 2007, hal. 64-65

²¹² *Ibid*; hal. 76.

Perbandingan jumlah penduduk dan luas kota dari tahun 1673 - 1985 terjadi perbedaan yang tajam. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13: Perbandingan Jumlah Penduduk dan Luas Kota 1673 – 1985

| Tahun | Jumlah Penduduk | Luas Kota (kilometer persegi) |
|-------|-----------------|-------------------------------|
| 1673 | 23.068 | 8 |
| 1815 | 47.217 | 8 |
| 1883 | 110.669 | 8 |
| 1930 | 409.475 | 182 |
| 1941 | 544.823 | 182 |
| 1950 | 1.432.085 | 182 |
| 1960 | 2.910.858 | 182 |
| 1970 | 4.473.133 | 590 |
| 1985 | 6.164.848 | 675 |

Diolah dari Monografi DKI Jakarta I

Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, dari data tahun 1970-an diketahui bahwa wilayah terbangun di DAS Sekretaris sebesar 20,07%, pada tahun 1980 meningkat menjadi 96,26% dari luas DAS Sekretaris. DAS Krukut pada tahun 1970 kawasan terbangunnya seluas 59,49%, pada tahun 1970 kawasan terbangun meningkat menjadi 87,65%. Sementara itu kawasan DAS Cakung kawasan terbangunnya pada tahun 1970 9,74%, pada tahun 1980 meningkat menjadi 30,12%. Sementara itu DAS Buaran kawasan terbangunnya pada tahun 1970 11,61% pada tahun 1980 meningkat menjadi 35,41%. DAS Mampang pada tahun 1970 prosentase kawasan terbangun 16,48% pada tahun 1980 menjadi 40,54%. Sementara itu DAS Ciliwung pada tahun 1970 kawasan terbangun sebesar 33,65% pada tahun 1980 meningkat menjadi 41,85%. Lahan di Jakarta juga digunakan sebagai sarana jalan. Adapun panjang jalan di Jakarta menurut fungsinya dibedakan atas jalan toll sepanjang 112.960 meter dengan luas 2.472.680 meter persegi; jalan arteri primer panjang 101. 869 meter, luas 2.140.040 meter persegi; jalan kolektor primer panjang 51.631 meter dengan luas 671.385 meter persegi; arteri sekunder 501.179 meter dengan luas 8.283.908 meter persegi; kolektor

sekunder panjang 823.914 meter dengan luas 6.970.038 meter persegi; jalan lokal 4.936.928 meter dengan luas 20.988.104 meter persegi. Total luas jalan di Jakarta adalah 41.526.155 meter persegi²¹³. Perkembangan kawasan terbangun dari DAS yang ada di Jakarta seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 14: Perkembangan Kawasan Terbangun Tahun 1970 – 1980

| DAS | 1970 | | 1980 | | Luas DAS |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| | HA | % | HA | % | |
| Angke | 6.561,12 | 24 | 10.257,22 | 37,52 | 27.338,01 |
| Buaran | 238,33 | 11,61 | 726,89 | 35,41 | 2.052,78 |
| Cakung | 331,62 | 9,74 | 1.025,51 | 30,12 | 3.404,76 |
| Cakung Timur | 2.243,25 | 22,35 | 3.179,69 | 31,68 | 10.036,90 |
| Cengkareng | 1.657,75 | 14,20 | 3.496,45 | 29,95 | 11.674,28 |
| Ciliwung | 13.027,89 | 33,65 | 16.241,31 | 41,95 | 38.715,88 |
| Cipinang | 1.475,40 | 26,66 | 2.388,53 | 43,16 | 5.534,11 |
| Grogol | 2.170,88 | 48,32 | 2.641,27 | 58,79 | 4.492,71 |
| Jatikramat | 712,69 | 39,93 | 985,41 | 55,21 | 1.784,84 |
| Krukut | 6.744,67 | 59,49 | 7.924,90 | 69,90 | 11.337,48 |
| Mampang | 574,48 | 16,48 | 1.413,18 | 40,54 | 3.485,89 |
| Pesanggrahan | 2.071,01 | 17,00 | 3.475,65 | 28,53 | 12.182,44 |
| Sunter | 4.504,13 | 30,70 | 6.390,06 | 43,55 | 14.672,92 |
| Jumlah | 42.727,62 | 28,72 | 61.140,87 | 41,10 | 148.777,78 |

Sumber: Diolah dari data Rudy P Tambunan

Berdasarkan data tersebut wilayah DAS yang digunakan sebagai kawasan pertanian, permukiman, jasa perdagangan dan industri. Selama periode 1970 – 1980, terjadi peningkatan pembangunan di sekitar daerah aliran sungai yang digunakan untuk pembangunan kawasan perumahan seluas 10.857,63 hektar; kawasan industri 4.960,05 hektar dan kawasan jasa perdagangan seluas 2.596,58 hektar. Sementara itu terjadi pengurangan kawasan pertanian dan lahan basah di sekitar aliran sungai. Untuk kawasan pertanian terjadi pengurangan seluas 8.425,95 hektar dan pengurangan lahan basah seluas 9.988,33 hektar. Perubahan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

²¹³ Rudy P Tambunan; *op. cit*; hal. 120

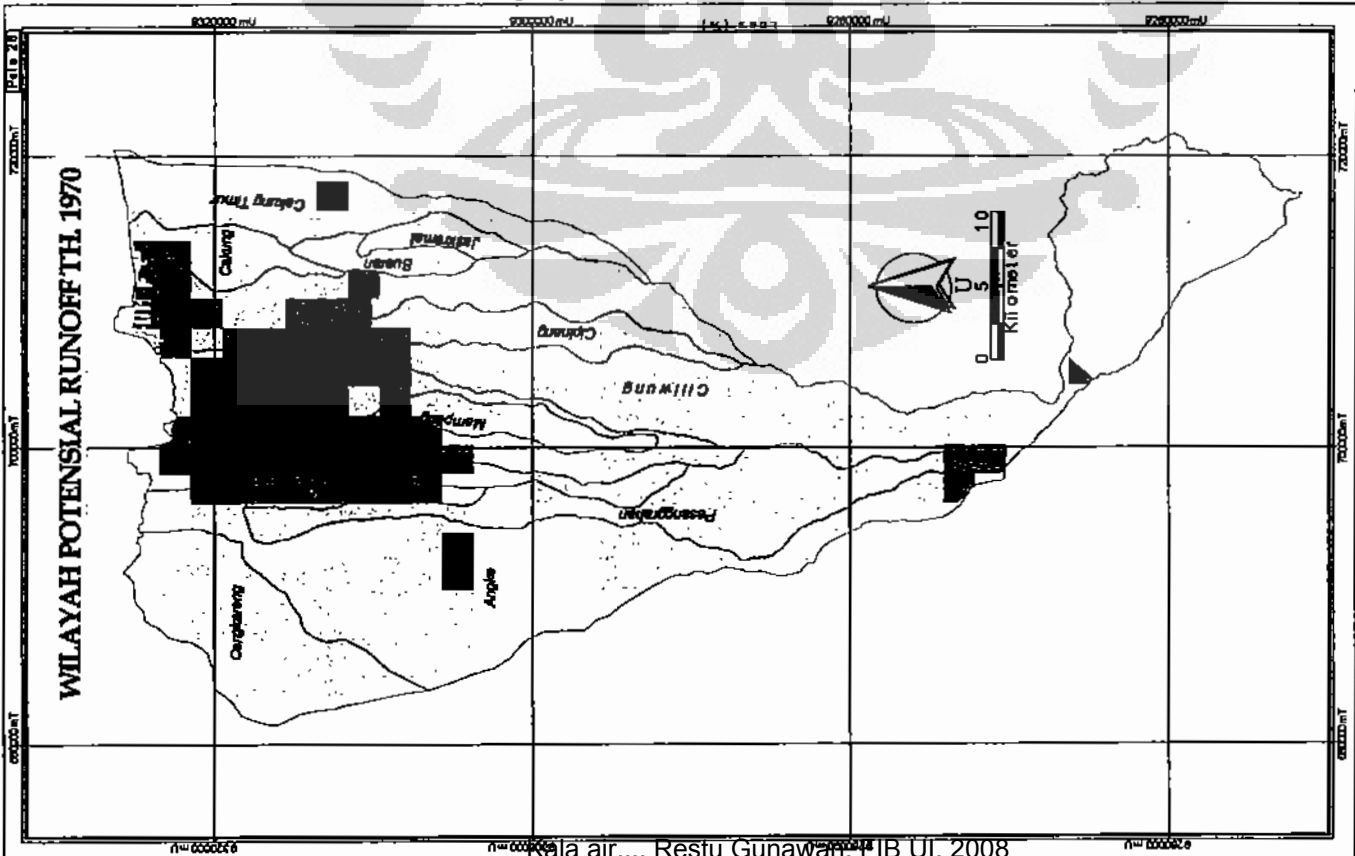
Tabel 15: Perubahan Kawasan Terbangun Pada Tahun 1970 -1980

| Peruntukan Tanah | Tahun 1970 (ha) | 1980 (ha) |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Pengurangan Kawasan Pertanian | 53.871,85 | 45.445,90 |
| Pengurangan Lahan Basah | 52.179,33 | 42.191,00 |
| Kawasan Permukiman | 38.280,66 | 49.138,29 |
| Kawasan Industri | 1.496,50 | 6.456,55 |
| Kawasan Jasa Perdagangan | 2.949,44 | 5.546,02 |

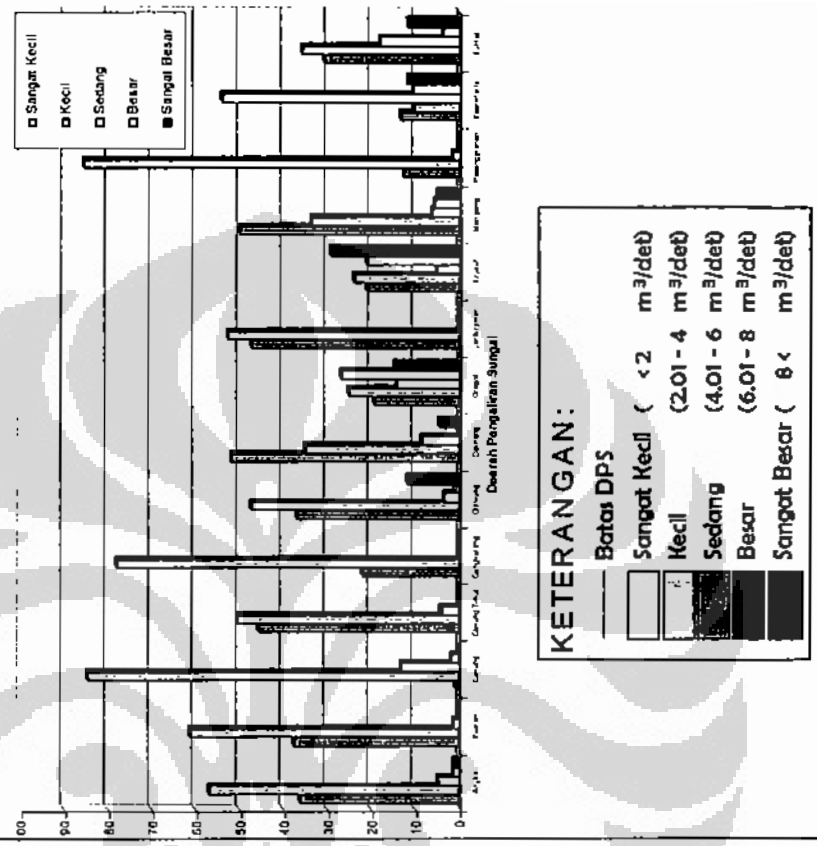
Diolah dari berbagai sumber

Meningkatnya luas wilayah terbangun akan berpengaruh terhadap aliran permukaan pada waktu musim hujan. Sementara itu berkurangnya lahan basah atau menurunnya besaran *water ratio* adalah hilangnya lokasi-lokasi tampungan air. Implikasi penurunan *water ratio* pada masing-masing DAS adalah berubahnya luasan dan lokasi genangan air dan banjir pada musim hujan. Perubahan kawasan sangat berkaitan dengan konsep *potential run off*.²¹⁴ Berdasarkan konsep *potential run off* tersebut maka dapat dipetakan berikut ini:

²¹⁴ *Water ratio* adalah perbandingan luas badan air dan tanah basah terhadap luas DAS; *Potential run off* adalah prakiraan limpasan air permukaan yang bersumber dari curah hujan yang mengalir dari permukaan tanah yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Potensi limpasan dipengaruhi oleh besaran curah hujan maksimum harian, kemampuan resapan tanah akibat perbedaan penggunaan dan kemiringan muka tanah. Klasifikasi *potential run off* adalah sebagai berikut: *potential run off* sangat kecil kurang dari 2 m³/detik; *potential run off* kecil 2,01 – 4 m³/detik; *potential run off* sedang 4,01 – 6 m³/detik; *potential run off* besar 6,01 – 8 m³/detik; *potential run off* sangat besar lebih dari 8 m³/detik; lihat Rudy P Tambunan; Dampak Perkembangan Fisik Kota Terhadap Pola Tata Air Ekosistem Dataran Rendah Jakarta; *Disertasi*; Program Studi Ilmu Lingkungan, UI, 2005; hal 165



Grafik Potential Runoff DPS Th. 1970



KETERANGAN:

Batas DPS

- Sangat Kecil (< 2 m³/det)
- Kecil (2.01 - 4 m³/det)
- Sedang (4.01 - 6 m³/det)
- Besar (6.01 - 8 m³/det)
- Sangat Besar (8 < m³/det)

Berdasarkan peta tersebut maka luas *potential run off* sangat kecil sebesar 31,63%; luasan *potential run off* kecil 51,06%; luasan *potential run off* sedang 6,22%, luasan *potential run off* besar 3,55% dan luasan *potential run off* sangat besar 7,54%.²¹⁵ Hilangnya lokasi-lokasi tampungan air tersebut berakibat pada kemampuan daya serap tanah terhadap curah hujan. Curah hujan yang jatuh di suatu kawasan semakin besar kemungkinannya menjadi aliran permukaan. Di daerah permukiman padat, curah hujan yang tidak bisa diserap ke dalam tanah bisa mencapai 50 persen. Hal ini sangat terkait dengan zonasi daerah limpasan. Menurut penelitian berbagai ahli, zonasi daerah limpasan kawasan atas sekitar Gunung Gede dan Pangrango sampai Katulampa. Di kawasan ini koefisien limpasan di Katulampa tercatat sebesar 38 persen. Zonasi wilayah tengah dari Katulampa sampai Ratu Jaya, di kawasan ini koefisien limpasan tercatat 48 persen. Sedangkan wilayah bawah dari Ratu Jaya hingga Manggarai, koefisien limpasan 54 persen. Zona tengah inilah yang saat ini paling banyak memberikan kontribusi melonjaknya debit air karena perubahan tata guna lahan sebagai daerah permukiman. Sebagai contoh untuk wilayah dengan luas 3.000 hektar daerah hunian di sekitar Depok dengan curah hujan 98 milimeter dapat dihasilkan 1,4 juta meter kubik air. Namun kondisi akan semakin parah jika perubahan tata guna di daerah hulu sekitar Gunung Gede - Pangrango hingga Katulampa dibiarkan tak terkendali.

Kaitan antara banjir di daerah hulu ini dapat dilihat dari debit air yang masuk ke pintu air Manggarai. Pada hujan yang cukup deras dengan curah hujan sekitar 98 milimeter dapat menghasilkan 1,4 juta meter kubik air. Jumlah keseluruhan air yang melewati pintu air Manggarai mencapai 29 juta meter kubik. Seandainya koefisien limpas mencapai 50 persen, artinya ada 14,5 juta kubik air yang harus dialirkan dengan debit 510 meter kubik perdetik. Padahal pintu air Manggarai tidak mampu menampung debit air 380 meter kubik perdetik, akibatnya daerah sebelah hulu dari pintu air Manggarai sering kebanjiran.

²¹⁵ Rudy P Tambunan; *op. cit*, hal 195

Bab IV
Banjir di Jakarta 1893 - 1985:
Dari Weltevreden ke Pinggiran Kota

Banjir menurut jenisnya dapat dibedakan atas banjir lokal, banjir kiriman dan banjir rob. Banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh banjir lokal atau kiriman saja kadang-kadang banjir tersebut datang secara bersamaan.¹ Banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan kondisi sungai yang tidak bisa mengalirkan air secara gravitasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Jakarta dan kondisi sungai yang dipenuhi oleh sampah dan sedimentasi. Hal ini dapat ditelusuri dari pemberitaan koran yang ada. Alur sungai Grogol di daerah Cilandak sampai Pondok Indah airnya masih kelihatan coklat dan mengalir dengan lancar. Aliran ini akan berubah ketika memasuki daerah Gandaria. Di daerah ini lebar sungai hanya tinggal dua meter dan dangkal. Hal ini ditambah dengan adanya rumah-rumah yang berjajar rapat di sepanjang sungai. Pada tahun 1965 air sungai Grogol, masih digunakan untuk mencuci dan masih lebar. Memasuki tahun 1970-an pertambahan penduduk di daerah Kampung Sawah meningkat pesat, sehingga terjadi penumpukan sampah dan airnya tidak bisa digunakan untuk mencuci dan badan sungai semakin menyempit. Seperti penuturan penduduk berikut ini:

Tanah kosong yang dulu banyak terhampar kini sudah hilang. Wah, jangan cari tanah di sini deh, buat jalan aja sudah susah. Bahkan kini banyak penduduk yang mendirikan rumah dengan menimbun dasar kali atau menggunakan tonggak-tonggak bambu sepanjang penopangnya, gimana lagi tanahnya udah habis, anak makin berkembang. Ujar Halimah yang sejak lahir tinggal Kampung Sawah.²

Hal yang berbeda terjadi di daerah Simpruk, lebar Sungai Grogol di daerah ini melebar sekitar tiga sampai empat meter. Hal ini bisa terjadi karena daerah Simpruk merupakan daerah perumahan elit. Meskipun di daerah elit, sampah

¹ Banjir adalah air yang melimpas dari badan air seperti selokan, saluran drainase, sungai, situ atau danau dan menggenangi kawasan sekitarnya. Dalam kaitannya dengan banjir ada dua unsur yang berperan yaitu besarnya volume air yang masuk ke badan air dan besarnya tampungan badan air; lihat: Yasin Yusuf, *Anatomi Banjir Kota Pantai: Perspektif Geografi*; Surakarta: Pustaka Cakra, 2005, hal. 5-6.

² Kompas; 3 November 1983

masih berserakan di dasar sungai, padahal di daerah ini sampah dikelola oleh RT/RW, berbeda dengan Kampung Sawah masalah sampah diurus oleh warga sendiri, tetapi begitu masuk daerah Kalijodo sampai Pluit aliran air kondisinya lebih parah, karena tumpukan sampah yang memadati dasar sungai seolah-olah sudah membatu, sehingga aliran sungai berjalan sangat lambat dan berbau. Hal yang sama juga terjadi di Sungai Sentiong dan Sungai Krukut. Pada tahun 1980-an, aliran sungai Sentiong selain dipenuhi sampah, juga terdapat enceng gondok yang menutup permukaan sungai. Di daerah Tanah Tinggi karena permukiman padat, sampah banyak menggunung di dasar sungai. Di sepanjang Sungai Sentiong terdapat kakus umum yang berderet dalam jarak lima meter, tidak jarang anak-anak yang nongkrong di pinggir sungai karena tidak kebagian kakus.³ Hal yang hampir sama juga terjadi di Sungai Krukut, di daerah Kebalen yang dulu lebar sungainya mencapai 5 meter, sekarang (tahun 1980-an) tinggal selebar dua meter. Di daerah Kebayoran Baru juga dipenuhi oleh enceng gondok dan bangunan permanen yang membatasi lebar sungai. Meskipun setiap musim hujan besar selalu banjir, namun penduduk daerah ini semakin bertambah.⁴

4.1 Banjir Tahun 1893: *Batavia Onder Water*

Banjir di Jakarta sebenarnya bukanlah masalah baru, kota ini sudah akrab dengan banjir sejak dahulu. Pada tanggal 1 Januari 1892, hujan yang turun di Batavia mencapai 286 milimeter. Akibat curah hujan yang tinggi, beberapa daerah di Weltevreden mengalami banjir. Tidak hanya di daerah kota, daerah pinggiran Batavia, yang merupakan aliran sungai Ciliwung juga banjir termasuk Pasar Minggu. Banjir terjadi karena hujan yang turun sangat lebat dan dalam waktu yang cukup lama yaitu hampir lebih dari 8 jam.

Dari djam 8 liwat koerang-lebi teroes sampe kemaren doeloe oedjan toeroen teroes tida brenti..brenti. Paling keras adalah waktue lepas tengah

³ Menurut catatan daerah Tanah Tinggi penduduknya 87.920 jiwa perkilometer persegi, sedangkan Gandaria dengan luas 1,11 kilometer penduduknya 42.377 jiwa; *Kompas*; 3 November 1983.

⁴ *Ibid.*

malem dan fadjar, kamoedian ngetes teroes dan masi toeroen rintjik-rintjik sampe djam 8 pagi liwat. Ini oedjan besar achirnja tida sanggoep dikerdjaken oleh soeloeran-soeloeran aer di dalem kampoeng hingga tida heran djikaloe itoe pagi orang-orang jang tinggal di bilangan-bilangan rendah letaknja pada djadi tjelangap koetika liat marika poenja rorak roemah karendem. Apalagi jang tinggal di seblah daleman kampoeng aer masi masoek ka dalem roemah...deket Pasar Minggoe rails kreta api dari Buitenzorg kabarnja lagi sedikit aken karendem aer. Sampe ini kabaran tertoealis aer di berbagi bagi kampoeng masi belon djoga maoe soeroet. Jang girang adalah botja-botja jang pating lalompatan di aer bandjir dan maen getek-getekan...⁵

Setahun kemudian, pada tahun 1893, banjir tidak hanya merusak jalan-jalan di Weltevreden tetapi juga merusak perekonomian. Sejak awal tahun 1893 beberapa kawasan di Batavia tergenang air seperti Kampung Kepu, Bendungan, Nyonya Wetan dan Kemayoran. Daerah ini adalah kampung bumiputera, selain itu akibat banjir, nelayan di pelabuhan Marunda kapalnya terbalik di muara Peca sehingga ikan hasil tangkapannya lenyap, sedangkan 3 nelayan berhasil selamat karena bisa berenang sampai ke darat. Banjir di Marunda lebih disebabkan karena datangnya ombak besar yang menghantam Teluk Jakarta, akibatnya selain kerugian bagi nelayan, benteng yang terletak tidak jauh dari jembatan putar Tanjung Priok runtuh terkena trjangan ombak. Pada akhirnya banjir yang terjadi tahun 1893 mengakibatkan Batavia terendam di antaranya Kampung Pluit Belakang, Sawah Besar, Kandang Sapi, Pesayuran, kebun Jeruk, Tangki Belakang, tanah sereal, Tanah Nyonya, Kampung Kepala, Tanah Tinggi, Kemayoan Sawah, Kemayoran Wetan dan Sumur Batu terendam setinggi 1 meter sedangkan Pasar Ikan terendam setinggi setengah meter. Akibat hujan deras dan angin, pohon asam di dachrah Kwitang tumbang. Kondisi banjir ini sangat menyusahkan penduduk Batavia, karena pada 1893, di Batavia juga terjangkit wabah kolera, sehingga banyak penduduk yang mati⁶.

Setelah itu Batavia juga dilanda banjir lagi yaitu pada 1895, 1899, 1904⁷. Menurut koresponden *De Locomotief*, pada tanggal 19 Pebruari 1909 hujan deras,

⁵ Siang Po; 2 Januari 1932

⁶ Fitri R. Ghozally (peny); *Dari Batavia Menuju Jakarta*; Jakarta: MM Corp, 2004, hal. 17.

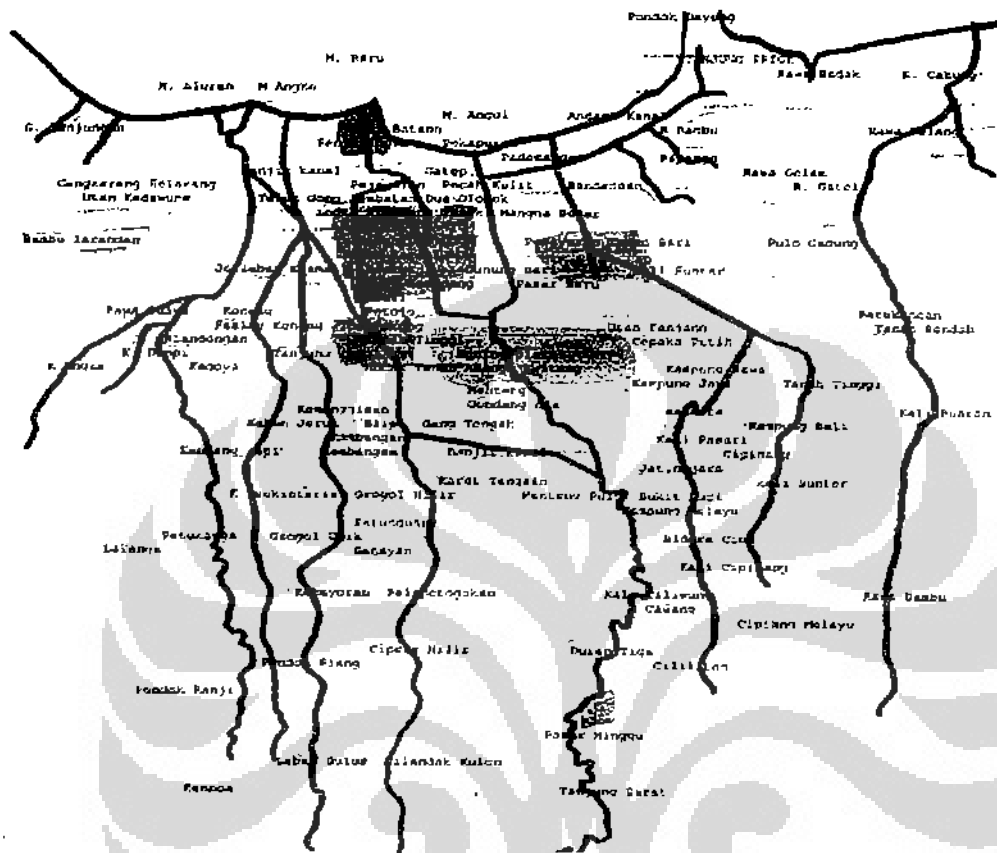
⁷ MGS/BGS; 12 Pebruari 1912, No. 31

sehingga banjir sudah tidak bisa ditampung kanal-kanal yang ada. Karena sebagian besar daerah di Batavia terendam banjir maka *De Locomotief* mengkritik pemerintah dalam menangani banjir dengan menulis berita '*Batavia Onder Water*', yang kalau disingkat menjadi BOW (*Burgelijke den Openbare Werken*) sebuah kantor yang menangani sarana dan prasarana pemerintah termasuk di dalamnya masalah pengairan. Pada banjir 1909, daerah-daerah yang dilanda banjir adalah sekitar Waterloplein. Bahkan dikatakan mirip danau. Akibat banjir trem tidak berjalan. Menurut pengamatan penduduk, banjir di sebabkan karena sungai Ciliwung meluap. Setelah banjir biasanya kampung-kampung bumiputera yang terletak di dataran rendah dalam waktu singkat akan kosong, karena air memasuki rumah setinggi kaki orang dewasa. Kondisi ini berlangsung berhari-hari. Hal ini menimbulkan ingatan bagi penduduk Batavia bahwa dalam kondisi seperti ini perkampungan pribumi berubah menjadi danau. Dari atas trem listrik yang melewati permukiman, penduduk melihat rumah-rumah yang hanyut dan orang-orang yang ketakutan berlarian, berusaha menyelamatkan diri. Menurut penduduk bumiputera, setiap tahun tidak pernah ada sesuatu yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi perkampungan bumiputera. Dewan kotapraja tidak pernah memikirkan dan mencari pemecahan masalah banjir yang terjadi perkampungan pribumi. Melihat kondisi ini seharusnya dewan kota mengusulkan kepada kotapraja agar memasukkan kampung-kampung pribumi untuk diperbaiki oleh kotapraja.⁸

Karena permukiman penduduk Batavia sebagian besar masih tinggal di perkampungan Sawah Besar, Pesayuran dan lain sebagainya maka daerah ini sering dilanda banjir seperti terlihat dalam peta berikut ini.

⁸Algemeene Gemeentebld; 20 Pebruari 1909

Gambar24: Wilayah Banjir Pada Tahun 1892 – 1909



Daerah yang dilanda banjir: tahun 1892: Weltevreden, Kampung Kepu, Bendungan Nyonya Wetan, Kemayoran, Pasar Minggu; Tahun 1893: Kampung Pluit Belakang, Sawah Besar, Kandang Sapi, Pesayuran, Kebon Jeruk, Tangki Belakang, Tanah Sereal, Tanah Nyonya, Kampung Kepal, Tanah Tinggi, Kemayoran Sawah, Kemayoran Wetan, Kwitang, Sumur Batu, Pasar Ikan, 1909: Waterloplein

Diolah dari berbagai sumber koran 1892

Jika diperhatikan maka selama tahun 1892 – 1909 daerah yang sering dilanda banjir adalah daerah Weltevreden daerah sekitar aliran sungai Krukut. Sementara itu daerah aliran sungai di luar sungai Krukut dan Ciliwung belum begitu berbahaya. Karena konsentrasi penduduk masih berada di sekitar daerah kota lama Batavia, kawasan Krukut dan sebagian Weltevreden yang merupakan daerah baru. Hal yang sangat aneh meskipun daerah kota lama Batavia penduduknya lebih

padat, daerah ini tidak dilanda banjir. Daerah yang dilanda banjir justru daerah-daerah di luar kota lama.

4.2 Banjir 1918: Filantropi dalam Musibah Banjir

Filantropisme (sikap kedermawanan) telah memberi jawaban tatkala sebuah masyarakat dilanda banjir, gempa bumi, kerusuhan sosial maupun dalam berjuang untuk mengatasi problem ekonomi, kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Kebutuhan manusia untuk beramal jariah, berderma, bersikap murah hati, lebih penting dari sekadar tuntutan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Sering kita melihat orang kelaparan tetapi kita harus memberikan makanan kepada mereka yang dirasakan lebih memerlukan, karena bila terlambat sebentar saja maka akan mati.⁹ Begitu juga ketika banjir melanda Jakarta banyak orang mengumpulkan dana untuk memberi bantuan kepada yang memerlukan seperti yang terjadi pada banjir tahun 1918.

Pada bulan Januari 1918, penduduk Batavia disibukkan dengan naiknya harga bahan pangan terutama beras. Harga beras naik dari f 8,50 menjadi f 12 perpikul sedangkan perbatok harganya 10 cent¹⁰. Dalam suasana kenaikan harga bahan pokok itulah kampung-kampung di Batavia dilanda banjir. Pada bulan Januari sampai Pebruari 1918, terjadi hujan terus menerus, akibatnya pada hujan tanggal 4 Pebruari 1918, kampung-kampung di Weltevreden terendam banjir, sehingga penduduknya terpaksa mengungsi. Kampung-kampung tersebut antara lain Kampung Tanah Tinggi, Kampung Lima dan Kemayoran Belakang. Penyebab banjir di daerah ini karena selokan yang terlalu kecil sehingga air tidak bisa lewat. Padahal pada malam hari tanggal 4 Januari 1918 hujan turun selama 3 jam. Kejadian ini sangat mengganggu aktifitas warga masyarakat. Pedagang-pedagang pikulan yang tinggal di kampung merasakan kesusahan, karena selain akibat

⁹ Eka Budianta; *Filantropi Seni, Sosialisasi dan Pendidikan Kesenian; Kumpulan Makalah, Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi Buku II, tahun 2003, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2003, hal 267.*

¹⁰ *Sin Po*, 14 Januari 1918

kenaikan harga beras dan bahan makanan belum bisa diselesaikan ditambah lagi banjir.¹¹

Pada tanggal 13 Januari 1918, akibat hujan lebat, mulai jam 17.00 air meluap dari Sungai Ciliwung sehingga membanjiri kampung-kampung di sekitarnya. Melihat kondisi banjir tersebut, Kantor Harian *Sin Po* pada jam 17.00 mendapat telepon bahwa banjir sudah datang dan meminta agar *Sin Po* mengadakan pemeriksaan ke kampung-kampung. Berita itu benar sampai jam 20.30 malam, air semakin naik dan jam 21.30 air sudah naik 50 centimeter. Akibatnya jalan di sepanjang Noordwijk, Rijswijk, gang Pecenongan sudah tidak kelihatan dan berubah menjadi sungai. Toko-toko di kanan kiri jalan juga sudah mulai terendam, antara lain jalanan Pasar Baru, Tanah Lapang Singa, Schoolweg yang semuanya berada di pinggir kali Ciliwung. Kampung Pejambon yang letaknya agak rendah terendam hampir satu meter. Akibatnya penduduk harus mengungsi ke Gereja Willemsskerk yang tingginya kira-kira tiga meter. Jalan Willemslaan dan Hertogspark tidak bisa dilewati kendaraan karena sudah terendam air, sampai di Gambir Wetan semua jalan sudah menyerupai kolam. Akibat banjir penduduk mencari tempat pengungsian dengan hanya membawa perlengkapan berupa tikar dan bantal.¹²

Pada tanggal 14 Pebruari, hujan turun sejak jam 08.00 pagi. Akibatnya sungai Ciliwung yang belum sempat surut semakin tinggi airnya, sehingga pada jam 21.30 banjir semakin meluas. Hal yang masih dikhawatirkan penduduk Batavia adalah meskipun hujan sudah turun tetapi di sebelah selatan mendung masih tebal berwarna hitam, sehingga ada kemungkinan di sebelah hilir masih hujan. Ternyata benar, pagi harinya air di Sungai Ciliwung sudah banjir lagi. Akibatnya kampung rendah di Gang Pecebokan banjir setinggi 'dengkul' sekitar setengah meter. Suasana berbeda terjadi di belakang Gang Perotian (Molenvliet Barat arah ke Prinsenlaan) pagi-pagi orang sudah ramai sekali pindah dengan gerobak. Penduduk sibuk mengangkut barang-barangnya akan di pindahkan ke tempat lain. Dalam kondisi banjir ternyata dimanfaatkan oleh

¹¹ *Sin Po*, 4 Pebruari 1918, No Microfilm 444/PN/M, halaman 5)

¹² *Sin Po* 14 Pebruari 1918

penyewa rumah untuk mengusir orang-orang yang menyewa rumahnya karena tidak membayar angsuran. Pemilik rumah mengatakan rumahnya akan dibangun sehingga penghuni rumah harus pindah kontrakan¹³. Hal ini juga sering dilakukan para pemilik rumah kontrakan untuk mengusir penyewa rumah jika susah membayar kontrakan pada masa sekarang, dengan mengatakan bahwa kontrakan mau dibangun atau dipakai saudara sendiri.

Selain masalah sosial, banjir juga mengakibatkan kerusakan beberapa jalanan di daerah permukiman. Hujan dan banjir membuat jalanan di dalam perkampungan Tionghoa di kota Batavia rusak, seperti jalanan di Klenteng. Di Gang Corong karena jalannya rusak kendaraan tidak bisa lewat. Para pengendara khawatir veernya patah. Gang Pacebokan di samping commissariat Tangki sudah berubah menjadi rawa lumpur. Kerugian akibat jalanan rusak, diperkirakan sebesar 10 rupiah – 20 ribu rupiah, tetapi jika air belum surut jumlahnya akan bertambah.¹⁴

Di Batavia bagian selatan, kampung Tanah Tinggi, sudah beberapa hari ditutup untuk kendaraan, karena air sudah menutup kampung Tanah Tinggi. Meskipun namanya Tanah Tinggi tetapi sebenarnya tanahnya sangat rendah. Air yang mengalir dengan deras menyebabkan rumah-rumah penduduk yang tinggal di perkampungan di luar Weltevreden yang merupakan kawasan elit kebanjiran sehingga rumahnya rubuh. Karena rumah-rumah tersebut hanya terbuat dari bambu dan pondasi yang tidak kuat. Koran *Sin Po* menyebut penduduk kampung ini dengan sebutan 'orang bumiputera'. Kampung Kwitang yang terletak di pinggir sungai ditinggalkan oleh penduduk, karena rumah-rumah yang berada di pinggir sungai diterjang banjir.¹⁵

Sementara itu di Kampung Lima, Sawah Besar, Gunung Sari Wetan, Kemayoran Belakang dan Kampung Pesayuran menjadi tempat anak-anak untuk bermain perahu di dalam rumah. Rata-rata semua kampung yang rendah di daerah Weltevreden dan Batavia sudah kebanjiran dari jam 08.30 malam sampai pagi ini. Dalam suasana banjir itu penduduk di sepanjang jalan Noordwijk dan Rijswijk,

¹³ *Sin Po*; 14 Pebruari 1918

¹⁴ *Sin Po*; 15 Pebruari 1918

¹⁵ *Ibid.*,

pada malam hari memantau datangnya banjir dengan cara berdiri di pinggir jalan, menonton air sungai Ciliwung meluap yang semakin lama semakin tinggi.¹⁶

Menurut pengamatan penduduk, naiknya air disebabkan karena pembangunan jembatan di depan Harmoni (*Eigen Hulp*) belum selesai sehingga menutup jalan air. Jembatan itu merupakan jembatan yang biaya pembuatannya paling mahal di Batavia sebesar 60.000 gulden. Jembatan Harmoni direncanakan selain untuk jalan air di bawahnya, juga akan dibuat jalan raya bagi kendaraan umum dengan kondisi jalanan lebih lebar. Tetapi selama pembangunan karena terowongannya terlalu kecil sehingga air melimpas ke kanan dan ke kiri jalan.

Di daerah Cikini, banjir telah mencapai rumah sakit Cikini. Akibat banjir yang masuk rumah sakit, sehingga pasien panik. Dalam suasana panik itu, pasien dikejutkan oleh datangnya buaya yang naik ke darat. 'Satu orang pasien bilang itu raja air mau nengokin orang sakit typhus'¹⁷. Pada waktu itu Batavia sedang dilanda wabah cholera, dikabarkan setiap hari ada sekitar 6 - 8 orang yang masuk rumah sakit karena penyakit ini. Tanggal 20 Pebruari, ada 2 orang yang terkena cholera sedang yang berobat 6 orang, jumlahnya 8 orang, tapi satu di antaranya sudah meninggal. Sementara itu sore harinya yang berobat 4 orang Eropa dan 8 orang Bumiputera.¹⁸

Akibat banjir, isi koranpun berkurang seperti diberitakan oleh *Sin Po* oleh karena sebagian besar kota Batavia telah kebanjiran maka isi koran *Sin Po* hari itu dikurangi dari empat lembar menjadi dua lembar.¹⁹

Selama banjir, selain kerugian berupa materi, juga mendorong naiknya harga makanan. Harga cabe dalam kondisi banjir, pedagang berani membeli f 35 perpikul tetapi meskipun ditawar begitu besar, penjual belum mau melepas, karena menurut perkiraan pedagang, dalam tahun 1918 ini harga cabe bisa mencapai f 60 perpikul²⁰. Harga beras naik dari f 11,20 menjadi f 12 sepikul, naik 1,20 rupiah sepikulnya dalam seminggu, dan 2 cent setiap batoknya.

¹⁶ Sin Po; 14 Pebruari 1918

¹⁷ Sin Po; 14 Pebruari 1918

¹⁸ Sin Po; 21 Pebruari 1918

¹⁹ Sin Po; 20 Pebruari 1918

²⁰ Sin Po; 14 Pebruari 1918

Dalam bulan Pebruari rupanya banjir belum berhenti. Pada tanggal 16 Pebruari 1918, banjir datang lagi. Menurut berita yang diterima melalui telepon di harian *Sin Po* jam 11.00 siang, dikabarkan air sudah naik kembali dan lebih tinggi dari kemarin.

Dari djembatan Santi menoeedjoe ke Djacatra di depan geredja besar, orang mesti melalui sekobakan air jang naik kira-kira sainggan dengkol, sedang depan pabrik mindjak Djacatra, rail tram listrik sudah terangkat dari tanah, sebab balok-balok bantalnja semua mengambang dan mengangkat rail. Djembatan listrik di Gunung Sari dari djaoeh soeda kelihatan bengkok dan di atasnja ada beberapa poeloeh kuli jang dipimpin oleh dua opzichter Eropa jang sedang bekerjja. Goenoeng Sari hampir seluruhnja karendam, kacoeali sedikit di depan Gang Kemadjan tetapi oentoek teroes ke Senen orang haroes berenang, sampai ke Kalilio Senen, air setinggi 50 cm. Di gedoeng kantor Marine, bandjak pengoesi orang priboemi dari Gang Chambon jang kampoengnja soedah kabandjiran. Gambir Wetan terendam sedikit, kampoeng Pedjambon soedah karendam sedjak beberapa hari, hingga pendoedoeknja tinggal di geredja, dimana mereka dikasih makanan oleh fonds banjir. Di Gambir Lor kerendam, sedang Gang Secretarie dan Gang Pool masih terendam, sedang kampoeng-kampoeng jang rendah masih karendem.²¹

Dalam suasana kesusahan akibat banjir, orang-orang bumiputera tidak memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah banjir. Seorang pejabat bumiputera (tetua desa) melakukan pemungutan liar kepada warga. Seperti yang terjadi pada penduduk yang mencari bantuan. Beberapa orang bumiputera yang bekerja pada toko Kolff dan rumahnya kebanjiran datang kepada majikannya akan meminjam uang untuk membeli bahan makanan, karena harga yang terus naik sehingga uangnya habis. Permintaan pinjaman akan dikabulkan oleh majikannya, tetapi sebagai jaminan, orang yang akan meminjam uang harus bisa membawa surat keterangan dari kepala kampungnya yang menetapkan bahwa mereka memang perlu uang. Untuk memenuhi kelengkapan tersebut, orang-orang itu kemudian kembali ke kampungnya dan minta surat keterangan. Tetapi ketua kampung minta 25 cent untuk satu surat keterangan.²² Suatu tindakan yang sangat memberatkan warga, tetapi karena memang perlu dana pinjaman, penduduk

²¹ *Sin Po*; 16 Pebruari 1918

²² *Sin Po*; 21 Pebruari 1918

terpaksa mengabdikan tuntutan tetua desa. Ini adalah bentuk pungutan liar dari pejabat-pejabat di Batavia.

Kesusahan penduduk yang disebabkan oleh banjir telah membuat kritik terhadap Sarekat Islam, yang selama ini kritis dalam membela kesusahan rakyat. *Java Bode* mengkritik Sarekat Islam yang tidak berbuat untuk menolong penduduk yang kesusahan. *Java Bode* mendapat informasi dari penduduk, bahwa tukang-tukang warung nasi Tionghoa dan Bumiputera mencari untung besar dengan penjualan nasi. Nasi yang jumlahnya sedikit (mereka menyebutnya *sajumpu*) dijual sepuluh cent. Dari berita *Java Bode* itu, wartawan harian *Sin Po*, mengadakan pelacakan mencari siapa yang menjual nasi terlalu mahal dan akan melaporkan kepada polisi agar para penjual nasi tersebut ditegur. *Sin Po* menyarankan agar para penjual nasi menjual apa adanya saja. Bahkan wartawan *Sin Po* dalam tulisannya menyarankan agar para pedagang nasi meniru apa yang dilakukan oleh Khouw Kim An. Khouw Kim An dengan pengawalnya berjalan mengelilingi kampung dan memborong nasi dari warung nasi untuk dibagikan langsung kepada penduduk yang mengungsi di rumah-rumah penduduk lainnya. Selain itu polisi dari Pos Penjaringan juga membuka pos untuk menolong orang kampung dan memberikan bantuan berupa nasi dan ikan asin.²³

Kampung-kampung yang kebanjiran seperti jalan Belandongan, Kali Besar Timur, Pinangsia, Prinsenlaan dan beberapa belas kampung dan jalanan sudah menjadi empang. Melihat kondisi ini, perkumpulan Eng Ho Hwa di Pasar Senen menjalankan kotak amal sumbangan yang uangnya untuk memberi bantuan khususnya untuk penduduk Tionghoa di kampung-kampung yang kebanjiran sedangkan Thaliafonds sudah mengeluarkan uang f 300. Tuan Tio Tek Kang menyediakan rumah petaknya di belakang gedung Thalia di Mangga Besar untuk pengungsian orang-orang kampung Mangga Besar Belakang yang rumahnya kebanjiran²⁴. Kendaraan militer berjalan mondar mandir membawa nasi dan ikan untuk dibagikan kepada orang-orang kampung yang kebanjiran. Penduduk Tanah

²³ *Sin Po*; 20 Pebruari 1918

²⁴ *Sin Po*; 19 Pebruari 1918

Tinggi, Pejambon, gang Chambon dan lain-lain diberi makan karena tidak bisa memasak. Akibat banjir juga terjadi kecelakaan di jalanan.

Sadari brapa hari jang laloe kota Betawi telah kabandjiran dan banjak kampoeng-kampoeng jang renda soeda kamasoekan aer, hingga orang-orang jang roemanja kamasoekan aer merasa kesel betoel, sebab salaennya dingin, ia orang djadi soesa masak dan bekerdja, tapi pendoedoek jang tinggal di tempat sebla tinggian kaliatan girang, kerna ampir satiap malem marika itoe djalan-djalan di bebrapa kampoeng jang penoe aer. Nona-nona ada jang paling soeka sama ini plesiran, maka ampir satiap malem di kampoeng-kampoeng Kali Wangsa, Pekapoeran, Soeteng dan laen-laen kampoeng jang deket sitoe kaliatan orang prampoean djalan dengan goembira. Sampai ini hari poen aer itoe belon kaliatan soeroet. Lantaran ini bandjir, pada hari Saptoe di Djalambar telah djadi satoe katjilakaan negeri jang djadi mengambil bebrapa djiwanja binatang, jaitoe satoe grobak babi jang moeat delapan ekor babi gemoek lantaran daratan sama sekali telah mendjadi satoe, koesirnja jang belon kenal betoel djalanan di itoe tempat telah ambil djalan sala, hingga grobak itoe kajeblos dalem kali...kembali kemaren sore telah terdjadi katjilakaan jang sematjem itoe jaitoe tiga anak Boemipoetra dari Kampoeng Krendang, lantaran maen prao di Djembatan Doea, praoenja telah terbalik, hingga katjoeng-katjoeng itoe njoengsoep dalem aer. Beroentoeng katjilakaan itoe tida mengambil korban, sebab salagi praoenja tebalik, disitoe ada bebrapa orang lagi mendjala, jang lantans njeboer dan angkat itoe botja, tapi satoe antaranja soeda minoem banjak aer sebab ia katoeloengan paling blakang...²⁵

Banjir di Batavia bagian barat terjadi karena bendungan sungai Grogol jebol. Akibat banjir ini toko-toko dagang Tionghoa di kota Batavia, kebanjiran.²⁶ Kampung Tambora, Suteng, kampung Klenteng Kapuran, telah menjadi kolam sampai satu kilometer jauhnya ke selatan. Di dalam gang di kampung-kampung tersebut ke arah Kampung Jawa hanya bisa dilalui dengan sampan. Anak-anak naik perahu kecil sebagian hanya untuk bermain-main di air dan sebagian pula mengangkut orang kampung dan barang-barangnya yang hendak dipindahkan ke jalan besar Molenvliet Barat yang disediakan sebagai tempat pengungsian.

...di kebanjakan pondok jang rendah soeda naek lebih dari satoe meter tingginja, hingga orang-orang kampoeng poenja paso-kwali, bale-bale dan bangkoe-bangkoe soeda mengambang. Pager-pager banjak jang roeboe dan

²⁵ Sin Po; 28 Pebruari 1918

²⁶ Sin Po; 21 Pebruari 1918

kabarnya soeda tiga hari orang-orang kampoeng disitoe tida bisa masak nasi. Sedi sekali boeat tengok itoe keadaan, apapoela boeat denger orang-orang prampoean jang sedang sakit baroe melahirkan baji dan nene-nene jang menangis sesenggoekan di atas bale-bale jang soeda kerendem. Banjak djoega pondok dan roema goeboek jang soeda tida taoe di betoelan mana ada lobang soemoer, kakoes dan solokan. Kira-kira satoe djam satengah sampan dari kita poenja toekang veslag berdjalan mengider di 8 kampoeng sekitarnja Klenteng dan Petjebokan Blakang, jaitoe tempat-tempat jang sangat sesek dengan roema-roema orang. Di kampoeng-kampoeng itoe memang tida ada sedikit lapangan, hingga pembatja bisa pikir brapa besar adanja djoembla pendoedoek jang dapat soesa dari ini bandjir. Boleh dibilang pasti, djika lagi doea hari aer belon soeroet, di itoe kampoeng-kampoeng bakal ada banjak roema jang roeboe, oleh kerna pondok-pondok tida bisa tahan karendem...²⁷

Dari kutipan di atas tergambar bahwa banjir di perkampungan pribumi sudah sangat parah, bahkan ada beberapa kampung yang sudah kebanjiran beberapa hari. Dalam situasi banjir bahkan ada ibu-ibu yang harus melahirkan di atas bale-bale dengan ditunggu oleh orang tuanya, karena tidak mendapat pertolongan, mereka hanya menangis.²⁸

Kondisi di ujung Prinsenlaan, jalan-jalan sudah penuh dengan air setinggi 50 centimeter. Orang-orang duduk di perahu pergi ke kampung-kampung sebelah barat dan sebelah timur Molenvliet. Dari kampung Pesayuran Belakang terus ke kampung Kebon Jeruk melalui kampung Kaligot sampai kampung Sawah Besar Belakang, perahu bisa berjalan di gang-gang di mana biasanya kendaraan kuda bisa lewat. Di sebelah utara dari jalan Mangga Besar (Prinsenlaan) yaitu seperti kampung Tangki, Petaksinkian, Mol belakang penjara Glodok sampai terus ke kampung Pinangsia, air rata-rata naik setinggi setengah meter sampai satu meter, begitu juga Kampung Jacatra atau Kampung Pecah Kulit di samping sungai Gunung Sari. Di dalam kampung Betawi yaitu Angke, Pekojan, Kampung Air, Pejagalan Belakang terus sampai di Kampung Janis rumah-rumah seperti berada di pulau. Di dalam kota Batavia ada dua sekolah yaitu Holl China School di Pinangsia dan Tiong Hoa Lie Hak Hauw (*Chineesche Meisjes School*) di Blandongan, dua sekolah sudah ditutup karena terendam air. Di dalam kelas air

²⁷ Sin Po; 20 Pebruari 1918

²⁸ *Ibid.*

naik lebih tinggi dari 50 centimeter. Untuk memperlancar jalannya air, pintu air di Batavia dan Weltevreden dibuka, tetapi hal itu tidak bisa mengatasi derasnya air yang masuk ke permukiman. Derasnya air yang mengalir dilukiskan bahwa dari pintu air ujung Noordwijk, air yang turun dengan suara gemuruh terus berjalan ke Gunung Sari di mana sungai itu bertemu dengan Kali Lio yang datang dari Senen, sehingga aliran Kali Lio tertahan. Akibatnya air melimpas ke arah perkampungan di Senen dan merendam jalan dan kampung.²⁹

Banjir tahun 1918 juga mengakibatkan sarana transportasi mengalami kelambatan dan kerusakan. Tram listrik yang biasa lewat di Tanah Tinggi tidak bisa lewat karena relnya terendam air. Di sepanjang Rijswijk, karena hujan yang turun mengakibatkan *stoomtram* tersiram air, sehingga lokomotifnya kehilangan tenaga. Setelah menunggu kira-kira 15 menit, tram yang mogok sudah disusul oleh tiga tram dari belakang sehingga semua menunggu di sepanjang Pintu Besar.³⁰ Lalu lintas mengalami ketidakteraturan sampai 16 Pebruari 1918. Untuk memperlancar lalu lintas *stoomtram* yang berjalan ke kota ditarik oleh dua lokomotif dan beberapa lokomotif cadangan berjalan mondar mandir untuk memberi pertolongan pada tram yang kehabisan tenaga di tengah jalan. Banyaknya *stoomtram* yang mogok dan rusak akibat banjir, perusahaan *stoomtram* memberikan gaji ekstra 10 hari.³¹ Mogoknya *stoomtram* memberi peluang pendapatan bagi kendaraan kuda. Tetapi karena kampung-kampung tukang sado juga kebanjiran maka tidak banyak yang beroperasi, sehingga kesempatan ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tukang sado. Untuk menyelamatkan diri dari guyuran air hujan, orang menggunakan payung dan jas hujan sampai di tempat pekerjaan, bagi yang tidak punya automobil atau kendaraan kuda.³²

Dalam kondisi bencana banjir, masyarakat Batavia memberikan bantuan bahan makanan kepada sesamanya. Hal ini antara lain dilakukan oleh *smerofonds* di Batavia yang menyediakan uang beberapa belas ribu. Yayasan ini dibentuk untuk membantu orang yang terkena kesusahan. Gubernur Jenderal yang

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Sin Po; 14 Pebruari 1918

³¹ Sin Po; 18 Pebruari 1918

³² Sin Po; 16 Pebruari 1918

menengok kampung-kampung yang terendam juga menawarkan bantuan uang, tetapi karena dianggap belum perlu tawaran tersebut ditolak.³³

Selain itu warga secara sadar menyediakan tempat pengungsian. Di sepanjang jalan Molenvliet Barat dan Timur rumah-rumah dibuka untuk pengungsian orang kampung. Tempat pengungsian yang disediakan adalah petak-petak Thalia, rumah tuan Tjie Eng Hok, commissariaat politik Tangki, Gedong Tiong Hoa Oen Tong Hwee, Gedong Jamaiait Khair, Kong Boe Siang Hwee dan teras beberapa rumah orang Tionghoa. Di kota Intan pun, kotapraja membuka tempat-tempat untuk orang kampung. Ribuan orang yang mengungsi mendapat jatah makanan. Dari *Thaliafonds* memberi bantaun f 300, Tuan Tjie Eng Hok menyumbang beberapa puluh karung beras serta ikan asin dan tuan Lauw Soen Bak memberi tiga peti ikan asin. Di dalam pengungsian, penduduk mulai diserang penyakit gatal.³⁴

Bersamaan dengan banjir di Batavia, di Tiongkok juga terjadi banjir besar pula. Orang-orang Cina di Hindia Belanda sejak bulan Pebruari 1918 mendirikan fonds bahaya banjir di Tiongkok yang dikelola oleh Chinese Consulate General di Batavia. Yayasan ini antara lain mendapat kiriman uang dari Opera Soey Ban Lian Cirebon sebesar 145,13 gulden, Han Khee Jam Probolinggo f5 \$ 120. Jumlah sumbangan yang terkumpul sampai tanggal 14 Pebruari sebesar f 470,74.³⁵

Kondisi banjir yang melanda Batavia, telah mendorong dewan kota mengadakan rapat pada tanggal 19 Pebruari 1918, jam 19.15 malam. Rapat dibuka dan dipimpin oleh *buurgemeester* (walikota) Bischof. Hadir dalam rapat 11 perwakilan Eropa dan 3 perwakilan Bumiputera sedangkan perwakilan Tionghoa dan Arab tidak hadir. Dalam rapat tersebut pimpinan dewan kota pertama-tama menyampaikan turut berduka melihat penduduk dilanda banjir. Kedua pertolongan yang sudah dilakukan adalah bahwa ibu-ibu telah membagikan barang dan makanan, selain itu Nyonya Gravin van Limburg Stirum dan militer telah membagikan makanan sehingga tidak terjadi kelaparan. Untuk membantu penduduk, sejak tahun 1916 telah dibentuk yayasan untuk menolong korban banjir

³³ Sin Po; 16 Pebruari 1918

³⁴ Sin Po, 20 Pebruari 1918

³⁵ Sin Po; 14 Pebruari 1918

yang diketuai oleh De Nijs Bik dan juga disediakan *smerofonds* yang dikepalai oleh Vissering yang pada waktu berada di Holland. Dalam rapat tersebut, Walikota mengatakan telah menyediakan uang cukup, jika dana tersebut tidak cukup maka akan dimintakan lagi kepada Gubernur General. Jika dana masih belum cukup maka diharapkan anggota dewan kota menyediakan sumbangannya.³⁶

Selain itu pemerintah memberikan bantuan berupa pompa air dan pompa kebakaran. Untuk menjaga keamanan dan penerangan, pemerintah mengeluarkan perintah supaya lentera gas dinyalakan sepanjang malam. Selain itu sesuai hasil rapat tanggal 18 Pebruari 1918, pemerintah telah menyediakan pondokan pengungsian bagi penduduk. Tempat pengungsian disediakan di bangsal Royal Standard Biograph di Pasar Baru, yang dapat menampung 200 orang, gedung Sekolah Dokter Jawa yang baru di Salemba juga los-los di kota ilir dan di Tanah Abang. Di pengungsian disediakan air minum dan minyak kayu putih. Kampung-kampung harus dikosongkan karena masih ada kemungkinan banjir akan naik dan berbahaya bagi kesehatan. Melihat kondisi banjir yang terjadi di Batavia, maka walikota memberi usulan agar kanal banjir segera diselesaikan secepatnya. Menanggapi permintaan walikota, Schotman mengatakan apakah menurut ahli teknik sesudah kanal banjir selesai, banjir dapat dihindarkan? Walikota mengatakan bahwa menurut ahli teknik memang begitu adanya. Selanjutnya Schotman mengkritik bahwa teknisi harus bertanggung jawab bahwa banjir yang terjadi karena pembangunan jembatan di dekat Eigen Hulp yang menjadi penyebab banjir, karena perbedaan tinggi air di depan dan di belakang bendungan sekitar 85 centimeter. Dari ukuran ini 25 centimeter karena saluran yang terlalu sempit dan 60 centimeter karena bendungan. Menurut teknisi pengaruh pembendungan mengakibatkan air tertahan sampai 1.200 meter dialiran sebelah atas, kira-kira sampai di jembatan Willemslaan. Menurut Schotman, mestinya tidak usah ada bendungan bila sudah bisa dihitung akibatnya. Menanggapi kritik Schotman, Van Breen mengatakan bahwa banjir tahun 1918, satu setengah meter lebih tinggi dari pada banjir tahun-tahun sebelumnya, sehingga van Breen tidak menduga akan datang air sebanyak itu. Ternyata meskipun kanal banjir selesai dibangun, Van

³⁶ Gemeenteblad; 19 Pebruari 1918

Tanah Tinggi, Kampung Lima, Kemayoran Belakang, Noordwijk, Rijswijk, Gang Pecenongan, Jalanan Pasar Baru, Tanah Lapang Singa, Schoolweg, Pejambon (1 meter) Jalan Willemslaan, Hertogspark, Gang Pacebokaan, Klenteng, Kampung Kwitang, Senen, Kampung Lima, Sawah Besar, Gunung Sari Wetan, Kemayoran Belakang, Kampung Pesayuran, Cikini, Tambora, Suteng, Kampung Klenteng, Kapuran, Kampung Jawa, Mangga Besar, Prinsenlaan, Tangki, Petaksinkian, Kampung Jacatra (Kampung Pecah Kulit sampai Gunung Sahari), Penjara Glodok, Pinangsia, Angke, Pekojan, Kampung Air, Pejagalan Belakang, Kampung Janis;
Diolah dari berbagai sumber koran 1918

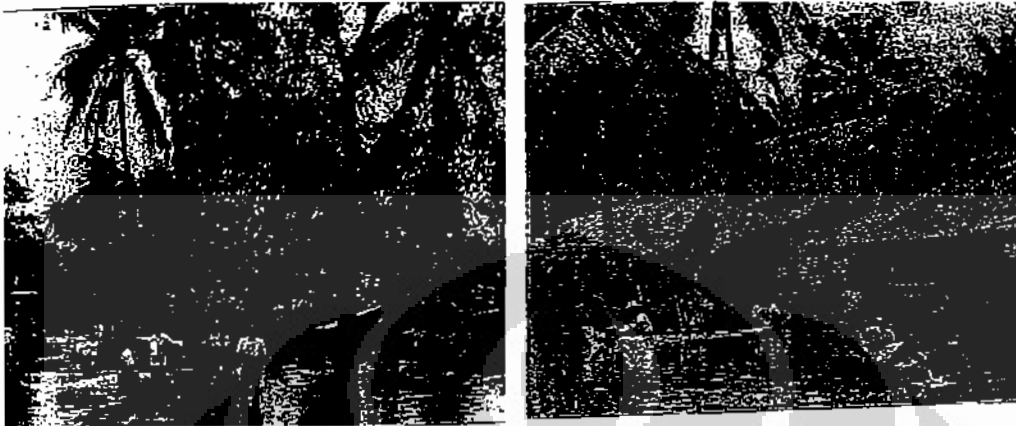
Jika memperhatikan daerah yang direndam banjir dari tahun 1892 – sampai 1918 menunjukkan bahwa daerah kota lama Batavia sangat jarang dilanda banjir. Ini menunjukkan bahwa sistem penyaluran di kota lama lebih bagus. Artinya sistem kanal saling memotong yang diterapkan di kota lama ternyata cukup efektif untuk mengendalikan banjir. Atau mungkin daerah yang dilanda banjir sebagian besar adalah perkampungan bumiputera yang pembangunannya sangat terlambat. Untuk itulah desakan MH. Thamrin untuk perbaikan kampung sangat bermanfaat dalam menanggulangi banjir di perkampungan.

Setelah banjir tahun 1918, di Jakarta dilanda banjir pada tahun 1919. Pada tanggal 5 dan 6 Pebruari 1919 curah hujan tinggi terjadi hujan deras mengakibatkan banjir di daerah Weltevreden. Banjir besar akan terjadi jika banjir kanal yang baru selesai tidak digunakan untuk mengalirkan air. Banjir di Weltevreden dapat dikurangi dengan adanya banjir kanal tersebut.⁴⁰

Banjir tahun 1923 tidak terlalu besar, karena hanya sebagian kampung yang dilanda banjir terutama perkampungan bumiputera. Kemungkinan besar manfaat dari kanal banjir sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian warga elit di kawasan Menteng dan sekitarnya. Sementara itu di kawasan kampung bumiputera masih tetap terjadi banjir. Di antaranya daerah-daerah Kebon Jeruk, Tanah Tinggi, karena memang wilayah-wilayah tersebut tidak ada kaitan langsung dengan kanal banjir. Hal ini dapat dilihat dari foto-foto yang dikoleksi oleh Van Breen pada tahun 1923 berikut ini.

⁴⁰ *Dr. J Boerema; Over Grooten regenval 5 en 5 Februarie 1919 in het Stroomgebied van den Tjiliwoeng; Natuurkundig Tijdschrift voor Ned Indie, 1920 Jilid LXXXIX*

Gambar 26: Banjir pada Tahun 1923



Banjir di Kebon Jeruk

Banjir di Kwitang dan Tanah Tinggi

Sumber: Van Breen 1923

4.3 Banjir Tahun 1930-an: Kuburan Menjadi Tempat Pengungsian

Pada tahun 1931 banjir melanda Batavia. Pada tanggal 29 Desember 1931, hujan besar mengakibatkan banjir di daerah Tangerang – Batavia. Selain hujan deras, juga terjadi kilat yang menyambar satu warung dan pemilik warungnya meninggal. Daerah yang terendam adalah Pasar Ikan.⁴¹

Tanggal 4 Januari 1932 adalah hari pertama puasa⁴², sehingga antara tanggal 4 Januari sampai 2 Pebruari 1932 merupakan hari-hari menjalankan puasa bagi umat Islam. Dalam suasana puasa itulah penduduk disibukkan dengan datangnya banjir. Pada bulan Januari 1932, di beberapa daerah di Sumatera dan Jawa terkena banjir. Sawah di sepanjang jalan Tangerang, Krawang berubah menjadi lautan besar bahkan di beberapa tempat air sawah melintasi jalan raya. Bendungan air di Kedawung (Krawang) jebol, kampung Kedawung kebanjiran, begitu juga di Banten, Serang dan Lebak. Di Serang beberapa desa terendam air, di antaranya ada yang sampai 1,60 meter dalamnya. Di Kragilan Banten sekitar

⁴¹ Sin Po; 29 Desember 1931

⁴² Bintang Timur; 5 Januari 1932.

400 orang yang diberi sumbangan beras oleh pemerintah setiap hari. Hal yang sama juga terjadi di Pasir Binong. Pegawai pemerintah bekerja siang malam mengurus orang yang kebanjiran itu.⁴³

De Orient memberitakan bahwa sampai tanggal 8 Januari 1932, hujan turun selama 8 hari berturut-turut, baik pagi, siang maupun sore, bahkan matahari selama 8 hari tersebut tidak memperlihatkan sinarnya. Karena besarnya banjir gang Holle disebut sebagai 'kali gang Holle' dan hanya orang tertentu yang bisa melintas, karena derasnya air. Mobil-mobil disebutnya bergerak seperti amfibi menembus genangan air. Di Batavia tidak ada lagi villa seperti di Venesia, kecuali hanya rumah-rumah di Koningsplein berubah menjadi kolam.⁴⁴

Banjir kedua terjadi pada tanggal 15 Januari 1932. Sebelum banjir masuk kota Batavia, penjaga pos pintu air di Depok memberitahukan kepada pos penjaga di Manggarai bahwa pada hari Sabtu di Depok ketinggian air sudah mencapai 4,80 meter. Diduga pada tengah malam air sampai Batavia untuk itu penduduk diminta bersiap-siap. Benar pada tengah malam sampai pagi, Batavia dilanda banjir besar. Hertogspark tergenang air, karena kanal banjir tidak mampu menampung air. Mobil-mobil banyak yang mogok. Seorang laki-laki yang gemuk yang memasuki mobil citrunnya berusaha menghidupkan mobilnya, tetapi karena terendam air mobil tidak bisa dihidupkan. Berbeda dengan seorang laki-laki tadi, Ali dan Kromo, merasa senang setelah naik trem dua kali hanya bayar sekali. Semua trem berhenti di Tamarindelaan karena banjir. Para penumpangnya kembali naik trem setelah melewati jembatan dan berganti trem yang berada di seberang jembatan. Kromo dan Ali begitu bangga menceritakan kejadian yang menimpa dirinya, meskipun kakinya basah menerjang banjir.⁴⁵ Di Batavia, *Kantor van Arbeid* (Kantor Buruh), terendam sehingga surat dan buku-buku harus dipindahkan ke atas kursi dan tempat yang lebih tinggi.⁴⁶ Selain itu daerah Gang Holle (Jalan Sabang

⁴³ Pandji Poestaka; Januari 1932, hal 94.

⁴⁴ *De Orient*, No. 2, 9 Januari 1932.

⁴⁵ *De Orient*, No. 3, 16 Januari 1932

⁴⁶ Pandji Poestoko; *Ibid.*, hal 92.

sekarang) juga terendam air.⁴⁷ Sebelumnya, pada malam tahun baru 1932, di sekitar Batavia air telah menenggelamkan kampung-kampung.

Sungai Grogol dan sebagian dari aliran Cisadane yang mengalir masuk ke Batavia juga meluap. Di Tanjung, Jelambar orang-orang kampung yang rumahnya terendam mengungsi ke tempat yang aman. Penduduk Jelambar yang perkampungannya sudah terendam mendirikan gubuk-gubuk di pinggir jalan dan mengungsi. Tempat mengungsi yang paling dekat adalah kuburan Tionghoa. Kuburan yang menggunakan lantai batu dan genteng digunakan sebagai tempat mondok, penduduk membawa bantal, kasur dan keperluan lainnya.

Di kampoeng-kampoeng di Tandjoeng Djelambar dekat koeboeran Tionghoa air poen ada tinggi djoega. Tempo-tempo di pinggir djalan nampak goeboek-goeboek boeat sementara waktoe dimana orang-orang jang roemahnja karendem dapetken tempat mondok. Berbagi-bagi koeboeran Tionghoa disitoe jalah jang memake joebin baloe dan genteng telah digoenakan sebagi tempat mondok. Di itoe koeboeran-koeboeran terliat boeltzak, bantal dan laen-laen kaperloean pembaringan pating malang melintang.... roemah-roemah jang terletak di seberang soengai, jalah di sebrangnja itoe djalan besar telah karendem air, malah beberapa antaranja sampe woewoengan. Tentoe saja dalem roemah-roemah begitoe orang soeda tida bisa tinggat lebih lama, maka joega pendoeoeknja pada mondok doeloe boeat sementara waktoe ditempat-tempat yang lebih tinggi...⁴⁸

Akibat Cisadane meluap, selain kampung, sawah dan tegalan yang baru ditanami kebanjiran. Untuk mengurangi dampak banjir, penduduk membendung saluran dengan tumpukan tanah, batang pohon pisang dan papan agar air tidak merendam jalanan. Di Pesing pada hari Kamis mulai jam 06.00 penduduk desa Koneng, membawa bantal dan tikar karena rumahnya kebanjiran. Orang-orang berkumpul di rumah mantri polisi Pesing. Polisi Patroli dari Paal Merah, Tangerang, Kebayoran didatangkan untuk mengadakan penjagaan di Pesing.⁴⁹

Di daerah kota dampak banjir Ciliwung juga sangat luas, Kampung Sawah dan Sawah Lio, penduduknya mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Meluapnya

⁴⁷ Als de rivieren bandjirren, *De Orient*, No. 3, 16 Januari 1932.

⁴⁸ Siang Po, 2 Januari 1932

⁴⁹ Siang Po; 2 Januari 1932

sungai Patuakan meluap yang mengakibatkan daerah-daerah kampung Jembatan Lima kebanjiran di daerah ini air naik setinggi setengah meter. Kali tanah Abang (kali Krukut) juga meluap. Akibatnya Gang Unie, gang Kancil, kampung Jawa Belakang kebanjiran sekitar setengah meter.

...Kali Tanah-Abang soeda naek tinggi sekali. Got-got Gemeente soeda tida koeat tahan aer, djadi aer naek ka darat. Di gang Unie dalem banjak pendoedoek soeda tidak bisa masak, malah terpaksa angkoet barang-barangnja. Itoe roemah-roemah jang permanja di pinggir kali ada paling sedih. Gang Kantjil soeda naek aer sampe wates dengkoel. Di Kampoeng Djawa Blakangpoen bandjir. Pendoedoek pada ngerobok waktoe pergi kerdja, satoe hal jang menjoesaken. Malah soeda digoenaken praoe-praoe. Orang koeatir dengan oedjan lagi, pasti itoe bandjir aken naek lebih tinggi, beberapa kampoeng di bilangan Batavia centrumpoen kabandjiran...⁵⁰

Kondisi ini menimbulkan kritik, bahwa saluran yang dibuat oleh kotapraja ternyata tidak cukup tinggi tanggulnya. Untuk menutup kesalahannya pemerintah mengatakan bahwa banjir tidak akan berlangsung lama, karena begitu hujan reda maka banjir akan segera surut.

Banjir pada tahun 1932 jangkauannya juga sangat luas. Sungai Citarum juga mengalami banjir besar. Disebabkan bendungannya jebol. Di daerah Krawang, Bekasi di beberapa tempat telah kebanjiran. Karena banjir besar Bupati Krawang dan asisten residen Krawang akan mengadakan kunjungan ke daerah-daerah yang terkena banjir, untuk melihat tindakan-tindakan apa yang diperlukan agar banjir tidak menelan korban jiwa. Sampai tanggal 2 Januari 1932, meskipun banjir besar, belum ada kabar adanya korban jiwa.⁵¹

Begitu hebatnya banjir, penduduk mengaitkan dengan kondisi politik dan mitos yang berkembang di masyarakat. Dalam surat kabar dikatakan bahwa banjir besar yang terjadi bukan karena Sukarno maupun Nyai Roro Kidul. Seperti diketahui bahwa pada 31 Desember 1931, Sukarno baru dibebaskan dari penjara Sukamiskin.⁵² Majalah *Panji Poestaka* ingin memberi pencerahan kepada

⁵⁰ Sin Po; 2 Januari 1932

⁵¹ Siang Po; 2 Januari 1932

⁵² John D Legge; *Sukarno: Biografi Politik*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001, hal. 144.

masyarakat, bahwa banjir yang terjadi karena gejala alam biasa seperti diterangkan dalam surat kabar tersebut.

Moesim hoedjan dan bandjir, boekan karena Ir Soekarno boekan karena Njai Roro Kidul. Dalam waktoe jang akhir ini tiada berhenti-henti termuat dalam soerat kabar berita tentang hoedjan dan bandjir. Di Medan di Palembang di Betawi di Semarang di Soerabaja, di Bali, di Borneo air sungai dan selokan naik oleh karena hoedjan tak berhenti-henti. Dibeberapa tempat boekan sedikit kerugian jang disebabkan oleh air bah itoe, baik tentang ternak maupoen tentang harta benda. Bahkan di Bali dan Soemba serta Sumatera Timur kabarnya konon banjir itoe mengorbakan bebrapa djiwa manoesia. Tentang djalan jang roesak ataoe tertoeptak oesahlah kami katakan lagi, hal jang seroepta itoe sekarang ini boleh kita katakan oemoem diseloeroeh Hindia ini. Dibeberapa kota djalan besar boekan seroepta djalan besar lagi, tetapi tak ada bedanja dengan soengai jang lebar.⁵³

Menurut catatan *Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Instituut*, banjir 1932 sebenarnya hujan turun tidak terlalu lebat. Karena dari tanggal 28 sampai 29 Januari, hujan yang turun hanya 96 milimeter. Dari tanggal 29 - 30 Desember curah hujan 47 milimeter. Jumlah yang kedua itu termasuk kecil, rata-rata curah hujan pada bulan Januari, biasanya 110 milimeter. Jika dibandingkan dengan curah hujan 1 Januari 1892 sebesar 286 milimeter, maka hanya seper-enamnya. Tetapi sampai malam ini banjir masih melanda beberapa kampung. Di Pasar Minggu, air hampir sampai rel kereta api.⁵⁴

...Menyambung ini kutipan dari HN kita bisa tambaken belon tau lagi brapa banyak ujan yang turun kemaren dulu malem aken tetapi kita rasa lebih banyak dari yang suda-suda. Dari jam 8 liwat kurang lebi terus sampe kemaren dulu ujan turun terus tidak brenti-brenti. Paling keras adalah waktu lepas tengah malem dan fajar kamudian ngetes terus dan masi turun rintik-rintik sampe jam 8 pagi liwat. Ini ujan besar akhirnya tidak sanggup dikerjakan oleh saluran-saluran air di dalem kampung hingga tida heran jikalau itu pagi orang-orang yang tinggal di bilangan-bilangan rendah letaknya jadi celangap ketika liat marika punya rumah karendem.. banyak staat-straat kampung sampe berupa sungai sungguhan..jang girang adalah boca-boca yang pating lalompotan di air banjir dan maen getek-getekan⁵⁵.

⁵³ Pandji Poestaka; Januari 1932, hal 92.

⁵⁴ Siang Po; 2 Januari 1932

⁵⁵ Siang Po; 2 Januari 1932

Luapan sungai Ciliwung tidak hanya di bagian kota juga mengakibatkan kerusakan jembatan di daerah Embrat tempat tinggal para pegawai pertanian. Jalanan yang rusak diperkirakan panjangnya 500 meter diperkirakan kerugiannya mencapai f 800.

... itu lapisan batu di seblah wetan jembatan gantung deket kampung Embrat tempat tinggalnya kuli-kuli dari Botanischen Tuin telah somplak panjangnya 100 meter dan lebarnya 8 meter. Kalau terjadi kaguguran lebih jau ada harepan satu dapur dan satu pondok kuli akan menjadi ambrek. Ujung sebla kulon dari itu jembatan gantung telah rusak, samentara lapisan batu di sebla kaler pun dapet karoesan besar dan satoe kebon poehoen bamboe sampe pandjangnja 100 m telah kasapoe... dibagian kaler dari itoe kebon, deket djembatan gemeente di van Limburgstirumweg, sapotong djalanan pandjangnja kira-kira 100 m dan lebarnja kira 8 m berikoet sabagian dari tetaneman telah kasapoe. Delapan poehoen besar jang soeda toea kanjoet dan kabentrok dengen keras pada pilarnja djembatan terseboet. Tepi koeloen dari itoe soengeo telah karendem dan itoe djalanan orang di tempat, dimana itoe soengei terpetja doea, ada membri bahaya bagi perhoeboengan. Di satoe soengei simpangan Tjiliwoeng satoe djembatan besi pranti orang djalan dan satoe solokan besi telah kasapoe aer, samentara sabagian tepi soengei, pandjangnja kira 150 m telah somplak, kampoeng koeli boeat Kebon Bako di itoe tanah baroe sebla wetan dari itoe kali karendem 50 cm dan moesti dikosongkan boeat samentara waktoe...⁵⁶

Selain kerugian material, banjir juga mengakibatkan korban jiwa. Sungai Ciliwung yang merendam beberapa kampung, telah mengakibatkan dua anak Indonesier⁵⁷ meninggal dunia.⁵⁸ Di Sunter, Batavia Timur ditemukan mayat satu orang anak umur enam tahun yang hanyut dibawa banjir. Di Kebon Kosong Tanah Abang seorang anak jatuh ke selokan yang sedang banjir. Satu jam kemudian mayatnya baru ditemukan dan dikirim ke rumah sakit. Selain korban jiwa di jalan Jacarta sebatang kayu roboh dan menimpa mobil yang dinaiki oleh orang Eropa sehingga mobilnya rusak dan orangnya luka ringan.⁵⁹ Selain itu akibat banjir,

⁵⁶ Siang Po; 2 Januari 1932

⁵⁷ Istilah Indonesier pada tahun 1932 sudah digunakan untuk menyebut orang-orang pribumi. Ini terkait dengan semakin meningkatnya semangat nasionalisme.

⁵⁸ Siang Po; 2 Januari 1932

⁵⁹ Bintang Timoer; 6 Januari 1932

karena jalanan dari kota Batavia ke Cililitan terendam air, penerbangan dari Batavia ke Medan ditunda seperempat jam.⁶⁰

Banjir kedua terjadi pada tanggal 3 Januari 1932 yang melanda daerah di sekitar Sungai Cideng. Banjir di daerah ini tidak berlangsung lama karena air bisa disalurkan dengan cepat melalui kanal Krokot ke laut.⁶¹ Melihat kondisi ini, Dinas Pekerjaan Umum (BOW) merencanakan membuat saluran yang lebih besar agar Weltevreden tidak kebanjiran. Belum sempat rencana itu dibicarakan banjir besar melanda Batavia.

Pada banjir tanggal 5 Januari 1932, ternyata banjir semakin meluas. Karena hujan deras, Pekapuran, Tanah Abang sampai Kebayoran, Pekembangan (antara Pal Merah dan Tanah Abang) sawah sudah mulai kebanjiran, bahkan ada sebuah mobil yang sudah mengambang di atas air. Banjir yang terjadi di wilayah ini karena kali Krukut meluap. Sementara itu sungai Ciliwung juga merendam daerah-daerah di Meester Cornelis dan Batavia. Daerah yang terendam antara lain Koningsplein, Gang Holle, Kebon Sirih, Gang Ceylon. Daerah ini dikatakan setiap tahun selalu kebanjiran. Selain itu kampung Pondok Dayun, Sawah Lio, Petojo Ilir, gang Tembok, Tanah Sereal, jembatan Lima, Kampung Paceboka, Gang Fransmalat, Pejagalan, Floeit, Angke dan daerah dekat aliran Sungai Grogol.

...saban taon moesim oedjan di Batavia selaloe kasi moentjoel hal-hal jang tida sebagaimana moestinja. Menoeroet tjatetan-tjatetan dari Meteorologisch Instituut, lagian di ini kali oedjan jang toeroen masi belon terlaloe heibat, sebab jang paling penting kenapa Batavia telah kerendem aer, boleh djadi karena Batavia terletak lebih rendah dari moeka laoet...kembali lantaran semalem toeroen oedjan keras, aer kali telah meloewap di antero kampoeng terdjadi bandjir, lebih tinggi dari jang soeda. Kampoeng Pondok Dajoen dan Sawah Lio aer naek kira-kira doea meter, soeda rendem tida koerang dari doea ratus roemah. Penduduk kepaksa berlaloe dari itoe roemah aken singkirken diri. Barang-barang dan binatang piarahan soeker ditoeloeng kepaksa ditinggalken. Di Petojo Ilir dan Gang Tembok, Tanah Sereal aer naek sampe satoe meter lebih. Ratoesan pondok di Djembatan Lima soeda karendem aer, koeli-koeli jang moesti kerdja, tidak bisa tinggalken roemanja. Kampoeng Soeteng soeda djadi laoetan, orang moesti ngerobok wates dengkoel. Kampoeng Patjeboka orang

⁶⁰ Bintang Timur; 9 Januari 1932

⁶¹ Sin Po; 4 Januari 1932

moesti goenaken praoe boeat bisa djalan. Djembatan-djembatan ketjil telah anjoet, paling berbahaja lobang-lobang got soeda katoetoeep kotoran dan aer, dikoeatir terbit bahaja. Di Pedjagalan, Floeit dan sakiternja, aer naik lebih tinggi dari jang soeda. Wijk Angkepoen soeda maloewap aer. Pendoedoek Pesing dan daerahnja moesti berlaloe. Kali Grogol jang memang belon soeroet aernja soeda moelai meloewap.⁶²

Menurut beberapa pemberitaan pada tahun 1932, kehidupan rakyat memang sangat susah karena kekurangan makan. Untuk itu ketika banjir pemerintah menyarankan agar rumah penduduk tidak ditinggalkan karena khawatir terjadi pencurian. Tetapi karena banjir semakin meninggi, penduduk terpaksa mengungsi mencari tempat yang lebih tinggi. Dalam suasana banjir banyak orang yang melakukan penipuan hanya karena ingin makan nasi saja. Misalnya dilakukan dengan pura-pura minta makan di warung tetapi tidak membayar. Seperti yang terjadi di Gang Kancil yang belum lama dilanda banjir, beberapa orang bumiputera berpura-pura membeli sate dan nasi, ternyata setelah lama ditunggu tidak kembali lagi. Kejadian seperti ini banyak dialami beberapa para penjual keliling. Ini menunjukkan bahwa kesusahan hidup dialami oleh penduduk di Batavia, bahkan untuk makan sekalipun.

...Semalem ada tiga orang Boemipoetra jang tida dikenal, soeda datang makan nasi di waroengnja saorang bumipoetra nama Asma di Gang Klenteng Patjebokan. Sasoeda marika makan kenjang, doea antaranja berlaloe dengen diam-diam. Satoe antaranja kaliatan bingoeng, laloe ini satoe temen berlaloe dengen tinggalken boengkoesannja, aken soesoel itoe doea temen. Itoe boengkoesan sebagai tanggoengan, tapi sampe djaoe malem ini tiga orang tidak kaliatan moentjoel lagi. Toekang nasi merasa tjoeriga, laloe boeka itoe beongkoesan isinja tjoema potongan-potongan kertas dan batoe aloes... harga makanan jang soeda dimakan kira-kira ampatpoele sen lebih...

Belon lama berselang, pada satoe toekang sate boemipoetra di Gang Kancil ada makan saorang bangsanja. Ini orang jang oenjoek tinggal di satoe pondokan tidak sebrapa djaoe minta permisi bawa itoe sate, nasi dan piringnja, tapi tida kombali lagi bersama itoe makanan. Menurut bebrapa

⁶² Sin Po; 6 Januari 1932

keterangan toekang dagang makanan jang koeliling, ada banjak kadjadian marika soeda diangglap makanan boeat beberapa pitjis...⁶³

Banjir di Batavia, di perkampungan air naik sampai ke tangga rumah. Pada waktu malam, lampu tidak ada, gang-gang becek dan 99% dari orang Bumiputera tinggal di gang tersebut. Jalan yang gelap dan licin mengakibatkan banyak orang yang jatuh dan tergelincir. Hal ini memunculkan protes kepada pemerintah kotapraja dan tuan tanah yang mempunyai tanggung jawab terhadap perbaikan kampung. Penduduk kampung bumiputera menyesal mengapa jalanan tidak diperbaiki, berbeda dengan Koningsplein, Noordwijk dan perkampungan Eropa dibuat bagus dan diurus setiap hari.⁶⁴

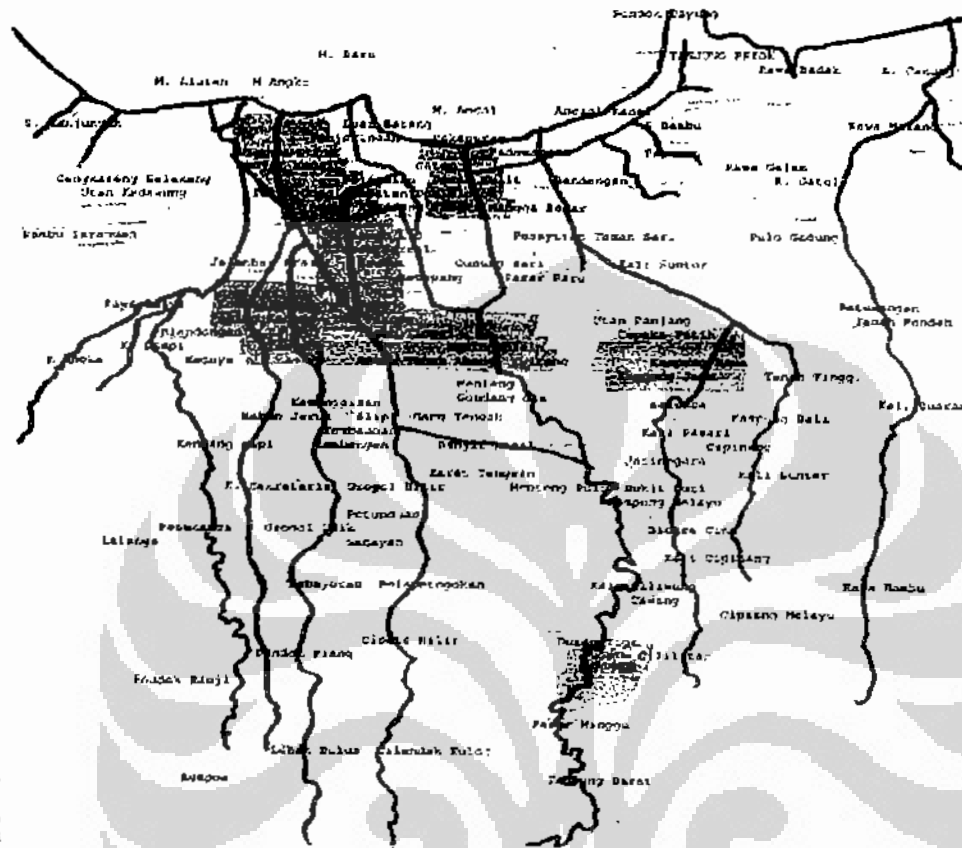
Sesungguhnya Batavia teramat kotor dan mengganggu kesehatan kalau musim hujan. Pembangunan parit-parit di bawah tanah sebagian besar hanya dilakukan di perkampungan Eropa sedangkan kampung Bumiputera masih belum dikerjakan, sehingga air hujan dan air dari kamar mandi tidak bisa mengalir dan menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini sangat memalukan, apalagi jika orang luar datang ke Batavia, melihat ibu kota begitu kotor. Untungnya semua tamu negara dari luar negeri seperti Clemenceau, Northeliffe dan orang-orang Amerika hanya berjalan di sepanjang Koningsplein-Noorwijk-Rijswijk dengan jalanan yang bagus dan rapi. Hal ini menimbulkan pujian tentang keindahan kota Batavia di surat kabar dan majalah di negerinya. Tetapi jika mereka berjalan di Kemayoran, Gang Bungur, Kramat Pulau dan lain-lain kampung Bumiputera, mungkin mereka akan muntah. Penduduk kampung bumiputera berharap pejabat kotapraja mengadakan kunjungan ke kampung-kampung pada musim hujan, dengan harapan ada perbaikan dan para tuan tanah mau mengurus tanahnya secara benar agar kesehatan penduduk terpelihara.⁶⁵

⁶³ Sin Po; 2 Januari 1932

⁶⁴ *Bintang Hindia (De Maleische Revue)*; 17 Pebruari 1923, No. 7, tahun II

⁶⁵ *Bintang Hindia (De Maleische Revue)*; 17 Pebruari 1923, No. 7, tahun II

Gambar 27: Wilayah Banjir Tahun 1932



Daerah banjir 1932: Koningsplein, Gang Holle, Hertogspark, Tanjung, Jelambar, Pesing, Kampung Sawah, Kampung Sawah Lio, Jembatan Lima, Gang Unie, Gang Kancil, Kampung Jawa Belakang, Pasar Minggu, Cililitan, Pekapuran, Tanah Abang – Kebayoran, Koningsplein, Pekembangan, Kebon Sirih, Gang Ceylon, Pondok Dayun, Sawah Lio, Petojo Ilir, Tanah Sereal, Gang Tembok, Jembatan Lima, Kampung Pacebokan, Gang Framsmalat, Pejagalan, Floeit, Angke;
Diolah dari berbagai sumber koran 1932

Sejak tahun 1932, wilayah Batavia bagian barat semakin luas yang dilanda banjir. Bahkan daerah-daerah aliran sungai Angke, Mookervart terjadi banjir sangat parah. Sementara itu ke arah selatan daerah pasar Minggu dan daerah Cililitan yang merupakan aliran Sungai Ciliwung juga dilanda banjir. Sementara itu daerah sekitar Weltevreden sedikit berkurang wilayah yang dilanda banjir. Ini

menunjukkan kanal banjir Kali Malang hanya mampu mengendalikan banjir sekitar 10 tahun.

Bencana banjir pada tahun 1932, telah mendorong para dermawan untuk mencari sumbangan. TR. Hadiwinangun Wedana Rengasdengklok pada hari Selasa tanggal 4 Januari 1932 mengadakan pertunjukkan De Echo Opera dan permainan gymnastik anak-anak kelas II Sekolah partikuler Saliminschool. Dalam pertunjukkan tersebut yang hadir selain orang pribumi, juga orang Eropa dan Tionghoa. Permainan dimulai dengan nyanyian anak-anak sebagai berikut:

Kasihlanlah oerang Batoedjaja
 Orang jang tjilaka tartimpa bahadja
 Bahadja bandjir jang moesnahkan bandanja
 Moesnahlah roemah dan radjakalanja
 Ingatlah mereka djang tidak punja
 Ingatlah si miskin dalam sengsara
 Sengsara mikirkan tidur makannja
 Kasihanilah sesama manoesia
 Dengarlah swara treak tangisan
 Anak-anak lapar dan kadinginan
 Nenek kakek bergemetar badan
 Adoehai darmawan haroes kasihan.⁶⁶

Wedana menyampaikan bahwa para dermawan jangan berharap dari pembalasan orang yang dibantu, karena manusia wajib tolong-menolong tidak memandang bangsa agama. Hasil dari sumbangan tidak diketahui jumlahnya karena sumbangan akan dibuka di depan Bupati Krawang.⁶⁷ Hal ini sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh *fonds* banjir untuk Canton di mana jumlah pendapatan dari hasil opera diumumkan kepada masyarakat. Misalnya dalam pertunjukkan opera derma untuk menolong *fonds* banjir Canton di Ngauw Sian Hie di Betawi untuk kedua kalinya ditontonkan opera di Gedung Thalia Mangga Besar. Auw Yang King, Consul General Tiongkok dan Vice Consul Tiongkok dalam pertunjukkan mendapat penghasilan f 2.100, lebih dari separuh sumbangan berasal dari orang kulit putih. Dari hasil pendapatan tersebut 80% dari jumlah disumbangkan ke

⁶⁶ Bintang Timoer; 8 Januari 1932

⁶⁷ Bintang Timur; 8 Januari 1932

fonds banjir Canton, 10% pada anti *opium vereneiging*, 10% untuk kas opera⁶⁸. Begitu juga bantuan dari para dermawan juga diumumkan kepada masyarakat seperti bantuan melalui wesel yang dikirim untuk Fonds Bahaya Banjir di Canton melalui wesel di Hongkong dan Shanghai Banking Corporation dikirimkan uang f 1207,96 dengan kurs f 1,08 ¼ per dollar, jadi jumlahnya menjadi 1.115,90 dollar⁶⁹. Pertunjukan pertama dilakukan pada malam 2 Januari 1932 di Schouwburg Thalia, Mangga Besar. Pertunjukan menampilkan dua perangkat musik TH Im Gak Hwee dan UM. S Kaberesan. Selain itu dalam pertunjukan juga ditampilkan murid-murid perempuan Kwong Jen School yang memainkan pertunjukan tambahan. Selain itu Tjoeng Boon Sen juga menampilkan permainan sulap. Pertunjukan baru selesai jam 1.30 pagi, dengan pendapatan kotor f 1.500⁷⁰.

Pada tahun 1933, banjir yang melanda Batavia terjadi pada bulan Maret 1933. Banjir merendam daerah-daerah Weltevreden dan Theresiakerkweg terutama kantor Batavia *van Arbeid* (Kantor Buruh).⁷¹

4.4 Banjir Tahun 1950 – 1960: Banjir Dalam Karikatur dan Cerpen

Kota adalah pusaran tempat manusia mengalami perubahan-perubahan mendasar dalam peradabannya. Bahkan Saini KM, menyebutnya “kota/rahim yang melahirkan engkau yang kedua, setelah rahim yang pertama adalah desa”. Untuk itulah kota merupakan ruang-ruang fisik dan ruang budaya baru yang menjadi media penciptaan karya seni. Nilai seni selalu berhubungan dengan pengalaman spriritual manusia dan mengakar dalam bentuk-bentuk kehidupan yang diekpresikan dengan rasa keindahan yang unik pada manusia. Untuk itulah dalam kaitannya dengan seni dan karya sastra banyak sastrawan diilhami oleh peradaban

⁶⁸ Sin Po; 7 September 1915

⁶⁹ Sin Po; 27 September 1915

⁷⁰ Sin Po; 2 Januari 1932

⁷¹ Keng Po; 25 Maret 1933

kota dalam menciptakan karyanya. Misalnya Aman Dt. Madjoindo “*Si Dul*”, atau Mochtar Lubis “*Jakarta Kota Penuh Kontras*”.⁷²

Jakarta yang selalu kebanjiran tiap tahun tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga memunculkan kritik dari media. Untuk itu Koran *Sin-Po* mengeluarkan gambar karikatur yang memperlihatkan kejengkelan terhadap bahaya banjir.⁷³

Gambar 28: Lukisan Karikatur Tentang Banjir



Sumber: *Sin Po*; 1956

Selain karikatur banjir rupanya menjadi ilham yang dijadikan Firman Muntaco menulis cerita satire untuk memperolok dirinya sendiri di tengah-tengah kehidupan Jakarta yang serba gemerlap. Seperti yang ditulis oleh Firman Muntaco dalam “*Tjerman Tjakarta*” kemudian diterbitkan dengan judul “*Gambang Jakarte*”. Ia menggambarkan dengan jelas bagaimana penduduk Jakarta begitu akrab dengan banjir. Dalam cerita tersebut Muntaco menggambarkan bahwa di suatu pagi Bang Nuing berpamitan kepada istrinya Mpok Ijot. Bang Nuing merasa pengab tinggal di rumah dan minta ijin untuk pergi keluar sebentar. Ternyata

⁷² Marco Kusumawijaya; *Seni Dalam Perkembangan Kota: Hidup Bersama, Makin Berpisah?*; dalam Sukri Abdurrachman (ed); *Seni di Ruang Publik: Monumen dan Tata Kota*; Jakarta: LIPI Press; 2007, hal. 20.

⁷³ *Sin Po*, 10 Desember 1956

sesampai di depan gedung bioskop, dia melihat iklan film *Super Giant*. Akhirnya bang Nuing membeli karcis dan duduk di kelas paling depan. Waktu film selesai buru-buru saja dia pulang karena sadar pasti istrinya akan marah-marah. Meskipun hujan belum reda, Bang Nuing lari pulang.

...serenta sampai, dia lihat rumahnya lagi kebanjiran. Bang Nuing jadi lemes kayak orang tak makan seminggu. Apalagi barang dia liat bininya, dengan kaki terendam air, nyapnyap di pintu sembari tunjang pinggang. "Hei bang! Bener-bener nggak punya isi perut elu sih! Kemane aje? Dari pagi ngilang, gini ari baru nongol. Noh, lu liat anak-anak pade meriang! Mane rume kebanjiran, mane dangdang kite di bawa aer anyut, eeh elu sih enak-enakan pegi jalan-jalan, ye? Ayo bilang lu kluyuran kemane, ha? Cuman nonton doang di Sinema!
Cuman nonton? Lu abis nonton tadi, bang? Tobat-tobat! Kata pok Ijot sembari angkat angkat kakinya liwat dengkul.....
Sehabis wara wiri pindah-pindahan barang yang terendam, berkatalah bang Nuing: Waduh dimane gue mau tidur nih? Bale basah, pat tidur lepek!
Ude deh molor di atas meje aje situ, masa iye lu nggak bisa bang? Pokoknye asal si Entong anak kite bisa ngorok, juga ati gue ude senang deh! Elu di meja, biar gue di bangku! Nah daripada kite maen diem-dieman, coba dong elu terusin ngedongeng, cerite ape aje deh! Kata pok Ijot yang sudah nangkring di atas kursi reyot....
Barang Pok Ijot nengok ke bawah, mulutnya ngablak lagi: waduh bang! Ngomong-ngomong aer ude mulain surut nih. Ayo deh kite betulin 'tu bale. Gue ude pegel nih nangkring melulu dari setadian!
Sembari turun ngerobak⁷⁴, bang Nuing bilang: 'tapi pingserin dulu dong 'tu...tai temen! Mane?
Itu tuh.. deket kaki lu! Kata bang Nuing sembari nuding.
Ampun, ampun...begini nih kalo jadi orang suse sampe-sampe segale 'pisang goreng' nggak ngendain.⁷⁵

Menyimak cerita pendek tersebut di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa penduduk Jakarta sudah terbiasa dengan kondisi banjir sekaligus menggambarkan ketidakmampuan warga dalam menghadapi banjir yang akhirnya pasrah dan hanya menunggu air surut.

Hal itu sesuai dengan kondisi Jakarta pada tahun 1950-an. Banjir pada tahun 1950 dikabarkan telah merendam kampung Pondok Dayung, Krukut, Lio,

⁷⁴ Ngerobak: berjalan di atas air

⁷⁵ Firman Muntaco; *Gambang Jakarta*; Jakarta: Masup Jakarta; 2006, hal 9 - 11

Rawa Terate, Gang Talip. Setiap hujan turun maka air akan naik 1,5 meter, sedikitnya 200 rumah terendam dan 3.000 keluarga kebanjiran. Hal ini disebabkan oleh adanya rawa-rawa yang penuh dengan sampah, saluran air yang lebih tinggi dari jalan. Untuk itu warga membentuk panitia untuk memberi pertolongan setiap banjir datang. Sebagian besar penduduk adalah buruh yang rumahnya rapat sehingga sampah tidak bisa dibersihkan dan dibuang ke selokan.⁷⁶

Selain itu daerah Penjaringan dan Jati Petamburan juga dilanda banjir. Untuk meringankan beban masyarakat yang terkena banjir dibutuhkan biaya perawatan sekitar Rp 105.000 tetapi di Kementerian Sosial hanya tersedia dana Rp 10.000.

Berhubung dengan terdijadnja baru-baru ini kebandjiran di beberapa kampung disekitar kota Djakarta, jang sebagaimana diketahui telah djuga dilakukan penindjauan oleh Walikota Suwirjo agar segera dapat diberikan pertolongan, baik uang maupun obat-obatan, lebih djauh menurut Djawatan Penerangan kotapradja dapat diterangkan, bahwa dengan Djawatan Sosial telah terdapat persetujuan tjara bekerdja dan memberikan bantuan kepada para korban kebandjiran itu. Djawatan tersebut akan menjerahkan uang kepada Urusan Daerah Kotapradja untuk membeli bahan-bahan mentah, seperti beras, kaju dllnja... biaya untuk keperluan pekerjaan pertolongan ini ditaksir kira-kira Rp 105.000, sedangkan dari fihak Kementerian Sosial dapat diterima dengan segera Rp 10.000.⁷⁷

Untuk mendapatkan gambaran yang tuntas tentang banjir di Jakarta, Walikota Soewirjo pada tanggal 1 Nopember 1950 mengundang para wartawan harian, majalah dan film berjumlah 20 orang untuk diajak berkeliling meninjau keadaan kampung-kampung di Jakarta terutama di daerah Pondok Dayung, Krukut. Daerah Krukut adalah daerah rendah bekas rawa dan tempat pembuangan sampah yang kemudian dijadikan perumahan. Di kelurahan Krukut terdapat sekitar 600 rumah dengan penduduk 4000 orang, sebagian penduduknya adalah keturunan Arab. Rumah di daerah Krukut ini sangat kotor, sempit dan becek. Karena air tidak bisa mengalir dengan lancar.

⁷⁶ Sin Po, 2 Nop 1950

⁷⁷ Indonesia Raja; 11 Oktober 1950

Rumah2 rakjat sekitar Krukut ini sangat sempit dan termasuk rumah jang paling kotor di djakarta dan sangat menjedihkan. Kesehatan sama sekali tak dapat terpelihara berhubung dengan keadaan bandjir jang saban kali datang hingga rumah2 jang sempit dan kotor itu bertambah betjek. Air2 dalam got2 tergenang tak dapat mengalir. Sukar digambarkan bagaimana rakjat mandi, minum, mentjuji dan jang lebih hebat lagi sukar dibayangkan bagaimana orang dapat tidur dan memasak nasi diatas tanah jang tidak pernah kering2nja itu. Didalam rumah2 orang menghadapi tanah basah, diluar rumah orang menghadapi betjek jang tak kering2nja...⁷⁸

Dalam kunjungan ke daerah Krukut ini rombongan walikota mendengarkan keluhan warga yang mengatakan bahwa biasanya dalam setahun daerah Krukut hanya kebanjiran satu kali, tetapi dalam tahun 1950 mereka sudah dilanda banjir sebanyak tiga kali, dan menurut perkiraan penduduk, mereka akan terendam banjir sebanyak empat kali dalam setahun ini. Meskipun warga mendapat pertolongan ketika banjir bulan Oktober dengan dibentuknya Panitia Penolong Korban Bencana, tetapi itu tidak dapat menyelesaikan kesusahan penduduk. Penduduk menginginkan sebuah penanganan banjir yang serius tidak hanya masalah bantuan dikala banjir. Menurut warga banjir yang terjadi karena kanal Duri sudah rusak dan Sungai Krukut dan Sungai Cideng mengalami pendangkalan, untuk itu harus diadakan pengerukan terhadap sungai ini. Seorang warga di daerah banjir mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan warganya dan sibuk membangun gedung-gedung besar, dan perkampungan orang asing yang hanya menyenangkan orang asing.

Biasanja dalam 1 tahun hanja 1 kali bandjir, tetapi dalam tahun ini sudah 4 kali bandjir. Dalam 2 bulan ini sadja sudah 3 x bandjir. Jang terhebat ditimpa bandjir daerah Krukut Lio, gang Abdullah, gang tembok. Ketika bandjir seluruh daerah ini tergenang air sampai 2 meter tingginja. Dalam keadaan bandjir biasanja rakjat harus mengungsi ke sekolah Alkatiri dan atau ditumpangkan ke rumah2 rakjat jang terdekat. Kalau kebetulan bandjir datangnja siang pertolongan dapat lebih mudah sedang kalau bandjir malam sangat sukar untuk memberi pertolongan....untuk menolong korban2 bandjir 2 bulan jang lalu telah didirikan Panitia Penolong Korban Bentjana jang dikepalai oleh Rais Hamis. Sumbangan jang telah sampai sekarang ada

⁷⁸ Indonesia Raja; 2 Nopember 1950

f 2.000 diantaranya dari pemerintah ada f 1.000 sedang pemerintah kotapradja telah mengeluarkan sumbangan korban bandjir untuk beberapa kelurahan termasuk kelurahan Krukut ada f 10.000....Seorang rakjat daerah bandjir itu menjatakan perasaannya dengan pengharapan supaya pemerintah djanganlah melalaikan nasib beribu rakjat jang saban hari terantjam bahaya bandjir jang menimbulkan kemelaratan jang sangat menjedihkan. Djanganlah pemerintah membuang2 uang untuk memperbaiki gedung2 besar, djalan2 diperkampungan orang2 asing, jang pada hakekatnya hanja ditempati dan untuk menjenangkan orang asing sadja...⁷⁹

Pada tahun 1950, lima tahun setelah merdeka rupanya keluhan rakyat tentang kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah yang lebih mementingkan kepentingan proyek-proyek besar dan melupakan kepentingan rakyat ternyata sudah dirasakan, termasuk masalah yang berkaitan dengan perbaikan kampung.

Pada tahun 1952, Jakarta juga dilanda banjir. Dalam banjir tahun 1952 kondisinya memang tidak begitu luas. Banjir terutama disebabkan oleh aliran Sungai Cideng yang meluap. Ini artinya masih merupakan banjir lokal. Banjir terutama terjadi di Kompleks Petojo, Jembatan Lima, Gang Hauber, Krukut, Jalan Asem Lama, Jalan Sumatera, Kampung Lima, Kampung Baru dan sekitarnya. Karena sudah terbiasa dengan banjir yang melanda daerah ini setiap tahun, ketika terjadi banjir pada tengah malam, warga dengan sabar menunggu air sampai surut. Hal berbeda terjadi di daerah Glodok dan sekitarnya yang merupakan permukiman orang-orang Cina. Mereka sibuk merayakan tahun baru Imlek 1952 yang masuk 'tahun Liong'. Kaum Cina merayakan hari raya Imlek dengan menghiasi rumah dan toko-tokonya dengan lampion warna-warni. Hujan yang terus turun dianggapnya sebagai pertanda bahwa tahun depan rejekinya akan melimpah.

Tinggi air Kali Tjideng, saluran-saluran, kanal dan got2 disebabkan turunnya hujan terus menerus belakangan ini telah naik sedemikian rupa hingga Rebo pagi air banjak jang meluap. Beberapa kampung jang letaknya rendah tergenang air bah terutama kampung2 kompleks Petodjo, Djembatan Lima, Gang Hauber, Krukut dan sekitarnya....penduduk di-kampung2 jang kena bandjir telah terbangun dari tidurnja sedjak malam

⁷⁹ Indonesia Raja; 2 Nopember 1950

hari, oleh karena air masuk kedalam rumah. Bagi banjak orang kedjadian ini tidaklah mengedjutkan, karena terulang setiap tahun. Orang hanja menunggu dengan sabar hingga air surut kembali dan orang kampung tidak ada niat mengungsi...kepala urusan daerah kotapradja tuan Sujoso Rebo pagi menindjau bagian2 kota, untuk mengetahui apakah dari pihak kotapradja perlu diberikan bantuan.⁸⁰

Dalam kondisi banjir, karena takut air semakin tinggi maka toko-toko beras menjual beras dengan harga murah. Para pedagang takut air semakin tinggi sehingga beras persediaan di tokonya kebanjiran. Beras yang biasanya dijual Rp 3 dijual dengan harga Rp 1,25, sehingga meskipun dilanda banjir warga di Petojo ramai mengantri beras murah.

Ditengah-tengah kompleks jang digenangi air di Petodjo berkerumun sedjumlah orang banjak untuk membeli beras murah. Persediaan beras dari seorang pedagang beras telah tergenang air. Karena takut menderita kerugian lebih besar lagi, maka persediaan beras itu didjualnja Rp 1,25 seliter; harga biasa adalah Rp 3,-.⁸¹

Kalau banjir tanggal 23 Januari 1952 disebabkan oleh hujan lokal, maka banjir yang terjadi pada 30 Januari 1952 lebih disebabkan banjir kiriman. Banjir terjadi karena sungai Grogol meluap, akibat hujan deras yang terjadi di daerah Bogor sampai Depok. Sungai Grogol telah merendam kampung-kampung di daerah Kebayoran yang meliputi Kampung Gandaria, Duri, Marunda Ilir dan Selatan. Rumah yang terendam banjir menurut laporan pemerintah daerah sebanyak 186 rumah, selain itu banjir juga merendam sawah. Banjir yang terjadi di daerah Kebayoran ketinggiannya sekitar setengah meter.⁸²

Dalam tahun 1952, sebnarnya banjir tidak hanya melanda kampung-kampung Jakarta. Di daerah Krawang akibat sungai Citarum meluap empat desa telah terendam banjir. Daerah tersebut berada di distrik Rengasdengklok yang meliputi Kampung Sawah dimana tinggi air mencapai 1,5 meter. Banjir di Krawang telah menenggelamkan 1.200 rumah, 700 hektar sawah terendam banjir.

⁸⁰ Merdeka; 24 Januari 1952

⁸¹ Merdeka; 24 Januari 1952

⁸² Merdeka; 31 Januari 1952

Desa Medangasem tinggi air mencapai 2 meter sehingga sekitar 550 rumah dan 160 ha sawah terendam banjir. Desa Gronggongan tinggi air mencapai 2 meter dengan sekitar 100 rumah kebanjiran, sedangkan desa Kertasari 9 rumah dan 5 hektar sawah terendam air.⁸³

Menanggapi adanya banjir yang terjadi pada tahun 1952 di Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa banjir terjadi karena hujan turun yang sangat lebat di beberapa wilayah, dan saluran air yang mengalami pendangkalan, karena sudah lama tidak dikeruk. Untuk mengatasi banjir, kotapraja Jakarta sudah mengusulkan agar sungai yang ada di Tanah Abang diperdalam. Tetapi Kementerian Pekerjaan Umum belum memberikan jawaban pasti atas rencana tersebut, karena menurutnya masalah itu menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Raya. Untuk mengadakan pengerukan sungai, kotapraja telah memesan dua buah mesin pengeruk lumpur dari Belanda, tetapi mesinnya baru datang dua bulan kemudian.

Tentang bandjir jang baru2 ini menimpa berbagai daerah di Djakarta, Kementerian Umum menerangkan, bahwa bandjir2 itu disebabkan karena hebatnja hudjan jang turun dan karena saluran2 itu mendjadi dangkal sebagai akibat dari laut jang datangnja bersama dengan turunnja hudjan menghambat kerasnja turunnja air. Keadaan kedangkalan ini sekarang sudah begitu tebal, sehingga hanja dapat dikeruk dengan alat2 mekanis...⁸⁴

Aliran sungai Cideng dan Sungai Tanah Abang rupanya masih memberikan dampak banjir bagi warga di sekitarnya. Pada tahun 1953, ada sekitar 41 rumah di daerah Tanah Abang yang terendam, akibat meluapnya sungai Cideng dan Krukut. Selain itu juga di Kampung Duri. Sementara itu di daerah Penjaringan ada sekitar 5.000 orang yang harus mengungsi. Namun sebenarnya banjir tahun 1953, tidak hanya melanda Jakarta, di daerah Pati, terutama akibat meluapnya Sungai Juwana ribuan warga di Kecamatan Juwana kebanjiran. Begitu juga di Weleri Kendal,

⁸³ Merdeka; 26 Januari 1952

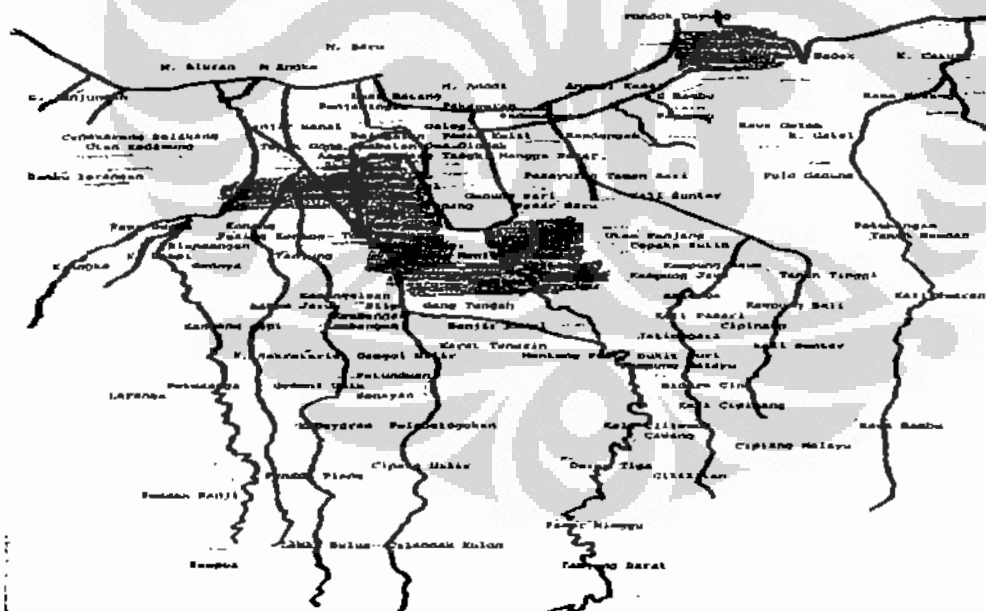
⁸⁴ Merdeka; 1 Pebruari 1952

akibat meluapnya Kali Bodri dan Kali Koeto kampung-kampung di daerah Weleri dilanda banjir, bahkan banjir di Weleri telah mengakibatkan kematian 3 orang.⁸⁵

Pada bulan Nopember 1954 daerah yang dilanda banjir di antaranya adalah Jalan Budi Utomo, Lapangan Banteng, jalan Alaydrus dan lain-lain. Air menggenang sampai setengah meter.⁸⁶ Dua tahun kemudian tahun 1956 banjir melanda tanah-tanah rendah di Jalan Thamrin, Krukut. Untuk menanggulangi banjir yang terus terjadi, muncul gagasan untuk membangun waduk di Pasar Ikan. Dari waduk air di pompa ke laut. Untuk pembangunan waduk ini biaya yang dibutuhkan 26 juta selesai sekitar 2 – 3 tahun.⁸⁷

Jika memperhatikan daerah yang dilanda banjir pada tahun 1950-1960 maka daerah yang dilanda banjir sebagian besar adalah daerah-daerah pusat yang meliputi daerah aliran sungai Grogol, Sungai Krukut dan Sungai Ciliwung. Batas daerah selatan yang sering dilanda banjir adalah sekitar Kebon Sirih, di barat sekitar Grogol, Cideng; di timur Senen, Tanah Tinggi dan sekitarnya.

Gambar 29: Wilayah Banjir Tahun 1950 - 1960-an



Diolah dari berbagai sumber koran 1950 - 1960

⁸⁵ Merdeka; 25 Januari 1953.

⁸⁶ Merdeka No. 46, tahun 7, 13 Nopember 1954

⁸⁷ Kotapraja, No. 6, th, 6, 31 Januari 1956

Berdasarkan peta tersebut masih terlihat bahwa selama periode 1950 – 1960-an perkembangan wilayah banjir belum menunjukkan perluasan yang sangat besar. Daerah yang dilanda banjir masih didominasi daerah-daerah aliran sungai Grogol bagian hilir, sungai Krukut bagian hilir dan sungai Ciliwung bagian hilir yaitu daerah-daerah kota. Hal ini kemungkinan besar meskipun pembangunan perumahan dan perkantoran sudah mulai dilakukan tetapi dampaknya terhadap banjir belum begitu dirasakan.

4.5 Banjir Tahun 1960 – 1970: Tim Khusus Penanganan Banjir

Pada tahun 1960 Jakarta mengalami banjir besar. Grogol yang digunakan sebagai permukiman baru bagi penduduk yang digusur dari jalan Thamrin yang berjumlah sekitar 800 penduduk mengalami kebanjiran. Kotabaru Grogol untuk pertama kalinya kebanjiran akibat rusaknya bendungan di Kebon Jeruk. Menurut laporan selain air dari Sungai Grogol, banjir juga disebabkan pasangnye laut. Selain menggenangi perkampungan penduduk, banjir juga melanda perumahan badan intelijen dan perumahan DPR.⁸⁸

Tanggal 7 – 10 Pebruari 1960, banjir melanda daerah Grogol, akibat Sungai Grogol dan Sungai Angke meluap, ketinggian air di pintu air Grogol adalah 30 centimeter sedangkan di Kali Angke 60 centimeter. Menurut catatan Jawatan Penerangan daerah terparah adalah Kelurahan Grogol dengan jumlah rumah rusak sebanyak 2.114 buah dan 15.290 jiwa mengungsi, di Jelambar rumah yang rusak 1.858 rumah, 12.636 jiwa harus mengungsi, di Cengkareng sebanyak 692 rumah rusak, dan 2.899 jiwa mengungsi. Untuk mengurangi beban yang diderita penduduk, pemerintah mengadakan operasi pasar dengan menjual beras 22,5 ton beras yang disalurkan melalui warung dan toko grosir dengan harga resmi pemerintah. Bantuan sudah dilakukan sejak tanggal 8 Pebruari 1960.⁸⁹

⁸⁸ Merdeka; 8 Pebruari 1960

⁸⁹ Merdeka; 11 Pebruari 1960

Banjir yang terjadi pada bulan Pebruari 1960 daerah yang direndam banjir paling parah di daerah Grogol adalah perkampungan yang terletak di samping Rumah sakit Jiwa sepanjang pinggir sungai Jembatan Duren yang disebut Kampung Empang Bahagia dan Kampung Kramat. Kompleks gedung yang terparah adalah di sekitar jalan Makalele, jalan Dr. Susilo, Jalan Semeru dan juga kompleks yang dihuni oleh para parlemen. Hal yang ditakuti oleh penduduk pada waktu banjir selain penyakit, bau busuk dan kotoran yang masuk rumah-rumah penduduk, adalah banyaknya binatang berbisa seperti ular dan kalajengking yang berkeliaran untuk mencari tempat yang kering. Tidak sedikit penghuni yang meninggalkan rumahnya setelah menemukan ular berbisa melingkar di tempat tidur.

Seperti seorang pegawai Departemen Perindoesirian bernama Elang Satriya goena menjelamatkan istrinya yang lagi hamil dan beberapa anaknya haroes mengungsi di Penjagaan Polisi. Seorang boeroeh kecil bernama Moesa bersama keloearganya terpaksa tinggal di seboeah goeboek di dekat roemah sakit djiwa karena pernah dikejoetkan oleh kedatangan oelar yang maoc bertedoeh di roemahnja. Sebaliknya Mirah dan Sarkam yang menghoeni seboeah goeboeg di kampung Kramat, karena tak ada tempat lain bagi mereka oentoek dapat dijadikan tempat penoempangan sementara, terpaksa bertahan, walaoe air di dalam roemahnja mencapai tinggi koerang lebih 1 meter. Socami istri demi ditanja bagaimana mereka tidoer mendjawab bale-balenja diganjel.⁹⁰

Banjir tahun 1960 dianggap membahayakan kawasan Istana Negara untuk itu air dari Pintu air Manggarai dialirkan ke kanal banjir. Sehingga rumah-rumah di pinggir kanal banjir hanyut, di antaranya dari daerah Pejompongan sampai jembatan Haji Ling di jalan Tangerang terendam banjir sampai pukul 20.00.⁹¹

Daerah Jalan Asam Lama, Jalan Sabang, jalan Tangerang, Jalan Kebon Jeruk, kampung Penjaringan dilanda banjir. Air juga menggenangi Universitas Indonesia, Salemba. Sebagai jawaban atas ketidakmampuan menangani banjir, pimpinan kotapraja mengatakan bahwa banjir disebabkan oleh kekuatan alam. Untuk mengurangi banjir ada usulan diadakan kerja sama dengan pemadam

⁹⁰ Merdeka; 13 Pebruari 1960

⁹¹ Merdeka; 8 Pebruari 1960

kebakaran untuk menyedot air dan dialirkan ke kanal banjir atau mungkin juga dengan gotong royong memperbaiki tanggul-tanggul yang ada, karena selama dua hari banjir tidak surut-surut.⁹²

Persesuaian tentang penanganan banjir di Jakarta melibatkan lima instansi yaitu Departemen Sosial, Kesehatan, Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Pekerjaan Umum dan Tenaga, dan Departemen Keuangan. Masalah banjir terkait dengan masalah kebakaran, karena kebiasaan penduduk membangun dengan menutup selokan, membuang sampah di selokan, sehingga kalau hujan air meluap.⁹³ Akibat hujan, meskipun Jalan Thamrin sudah ditinggikan di daerah Kebon Kacang, kanal-kanal dan saluran sudah diperbaiki, banjir masih melanda daerah ini. Pada banjir tersebut banyak orang yang mengungsi ke tempat yang agak tinggi.⁹⁴

Untuk mengurangi beban masyarakat akibat banjir, Departemen Sosial memberikan bantuan 250 ribu rupiah, bagi korban banjir di daerah Kedaung, Angke, Krukut, Kebon Jeruk, Tanjung Priuk dan Grogol. Bencana banjir tahun 1960, mengakibatkan 30.600 jiwa terpaksa mengungsi dan diantaranya ada yang kehilangan rumah.⁹⁵

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1963, menurut *Mingguan Djaja* merupakan musim banjir bagi kota-kota besar di Indonesia. Jakarta yang setiap tahun harus menghadapi banjir, pada tahun 1963 merupakan banjir yang melanda wilayah paling luas, karena 21 kecamatan di DKI terdapat 9 kecamatan yang daerahnya terendam banjir yakni Krukut, Kampung Melayu, Salemba, Senen Angke Duri, Tanah Abang, Gambir, Petamburan dan Cengkareng. Umumnya air menggenang setinggi 50 centimeter. Di Kampung Lima, kecamatan Krukut, air naik sampai satu meter, sedangkan di daerah Kampung Lima dan Jalan Sabang air mencapai ketinggian 125 meter. Sampai 15 Januari 1963 terdapat 21.956 kepala keluarga yang memerlukan bantuan. Jumlah itu semakin bertambah karena sampai tanggal 20 Januari, air meluap melalui got dan gili-gili. Wilayah Grogol yang

⁹² Merdeka; 10 Pebruari 1960

⁹³ Merdeka; 19 Pebruari 1960

⁹⁴ Merdeka, 6 Pebruari 1960

⁹⁵ Merdeka; 12 Pebruari 1960

merupakan wilayah langganan banjir pada tahun 1963 juga kebanjiran lagi. Diperkirakan sampai meredanya hujan pada bulan Pebruari orang menderita akibat banjir sebanyak 433.812 jiwa dari 3 juta penduduk.⁹⁶

Curah hujan yang terjadi di Jakarta sampai 22 Januari 1963 mencapai 790,6 milimeter. Ini merupakan curah hujan tertinggi dalam tahun 1963, karena tahun-tahun sebelumnya jumlah hujan rata-rata dalam bulan Januari adalah 400 – 600 milimeter. Melihat dampak kerusakan akibat banjir, untuk membantu korban banjir pada tanggal 21 Januari 1963 dibentuk team khusus untuk memberi bantuan kepada warga. Ini adalah bentuk upaya responsif terhadap bencana banjir di Jakarta. Tim terdiri dari:

| | |
|-----------------|---|
| Ketua Umum | : Wakil Gubernur DKI, |
| Ketua Pelaksana | : Patih Singgih, |
| Seksi I | : Keamanan Kapten Simanjutak, |
| Seksi II | : Pengungsian/evakuasi A. Kafar dan Firdaus, |
| Seksi III | : Penampungan/dapur umum/Perawatan, Miharso, Djoko, Kapt Sutomo, |
| Seksi IV | : Kesehatan, Sudigdo, |
| Seksi V | : Bahan Makanan Kopol Ali, H Tb. Mansur Mamum, |
| Seksi VI | : Pencegahan bencana Ir. Manuhutu dan para bupati, |
| Seksi VII | : Penerangan Soeweno dan Firdaus. ⁹⁷ |

Pada tahun 1963 inilah masalah banjir untuk pertama kalinya ditangani oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Sebelumnya masalah banjir ditangani sendiri oleh masyarakat. Untuk membantu korban banjir ini karena jumlah pengungsi yang banyak kesulitan yang dialami paling besar adalah menyediakan dapur umum bagi para pengungsi. Menurut perhitungan tim, jika jumlah pengungsi sekitar 100.000 jiwa, maka tim harus menyediakan dapur umum yang mampu memasak 17 ton beras untuk satu kali makan, selain sayur mayur dan bahan makanan lain seperti susu dan ikan asin. Dapur umum sangat diperlukan karena semua pengungsi tidak bisa memasak, karena rumahnya kebanjiran. Padahal

⁹⁶ Mingguan Djaja, Th. Ke II, No. 54, 2 Pebruari 1963

⁹⁷ *Ibid.*,

jumlah dapur umum yang tersedia hanya mampu melayani kurang lebih 15.000 orang yakni dapur umum Lapangan Rinkes, Batalyon Brawijaya, Rumah Sakit Jiwa Grogol, Rumah Penjara Glodok, Cipinang, Bukit Duri dan Rumah Asuhan Budi Cengkareng. Untuk itulah disadari sepenuhnya oleh tim bahwa banyak para pengungsi yang tidak mendapat jatah makanan.⁹⁸

Untuk menjaga keamanan, ditempatkan pos-pos penjagaan di beberapa tempat diadakan patroli dengan perahu karet dan pemantauan melalui pos radio. Satu hal yang sangat menarik dalam kaitannya dengan banjir tahun 1963 ini ternyata dengan dibentuknya tim khusus telah mampu mendorong kesadaran warga untuk menolong sesamanya. Selain menerima sumbangan dari pemerintah DKI, tim juga menerima sumbangan dari berbagai pihak.

Tabel 13: Sumbangan Banjir 1963

| No | Penyumbang | Jumlah Sumbangan |
|----|---|------------------|
| 1. | PN menunda kapal (Tundabara) | Rp 50.000 |
| 2. | Koperasi Bea Tjukai Priok | Rp 25.000 |
| 3. | Karyawan Deperinda | Rp 50.000 |
| 4. | Ibu-Ibu Menteri | Rp 25.000 |
| 5. | Kepolisian Jakarta Raya | Rp 100.000 |
| 6. | Ikatan Perkumpulan Tionghoa | Rp 500.000 |
| 7. | Ny. Aziz Saleh (sumbangan dari karyawan BPU PNPR) | Rp 50.000 |
| | Jumlah | Rp 800.000 |

Sumber: Diolah Dari Mingguan Djaja; 2 Pebruari 1963

Selain sumbangan berupa uang, team juga berhasil memobilisasi bantuan dalam bentuk obat-obatan dan bahan makanan. Obat-oban diterima dari PT Pharmasi Abdi, sayur-mayur dari PT Ichsani Tjisarua Bogor sebanyak 2 ton, beras 1 ton dari Kodamar III yang penyerahannya dilakukan kepada warga Grogol oleh Kapten Djohan atas nama panglima kepada Residen Rachmad yang mewakili Gubernur pada tanggal 24 Januari 1963. Selain itu tim juga menerima sumbangan pakaian, sejumlah obat-obatan, kain blacu, dan minyak goreng dari Kejaksaan Istimewa

⁹⁸ *Ibid.*

Jakarta. Soekardjo Sasrodihardjo mewakili Menteri Sosial juga menyumbangkan obat-obatan warga melalui MA Kaffar dari Departemen Sosial DKI Jakarta, berupa obat-obatan yang berasal dari sumbangan Apotik Mampang, PT Tunggal dan Pabrik Pharmasi Abdi. Sumbangan obat-obatan berupa betaninol, mercurochroom, alcohol, balsem vicks, minyak aspirin, kapas, kain pembalut dan plester. Sementara itu bantuan dari rumah sakit 24 jam juga dilakukan di Rumah Sakit Sumber Waras dan Rumah Sakit Cideng. Meskipun jumlah korban banjir sangat banyak sampai akhir tahun 1963, masyarakat yang berobat karena banjir hanya 4 orang. Simpati atas bencana banjir juga datang dari luar negeri. Pemerintah Amerika Serikat melalui Duta Besarnya Howard Jones dan Konsol Whittington telah menemui pemerintah dan menanyakan bantuan apa yang diperlukan⁹⁹. Tidak ada tindak lanjut dari tawaran Duta Besar Amerika Serikat ini, karena kebutuhannya sudah ditangani oleh Pemerintah.

Untuk memetakan daerah-daerah yang rawan banjir, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Jakarta, pemerintah DKI telah berhasil menyusun daerah-daerah yang rawan banjir.

Gambar 30: Daerah Banjir Sesuai Rencana Induk Kota Jakarta 1965 – 1985



Sumber: Djakarta Membangun 1972

⁹⁹ *Mingguan Djaja*; tahun ke II, No. 54, 2 Pebruari 1963

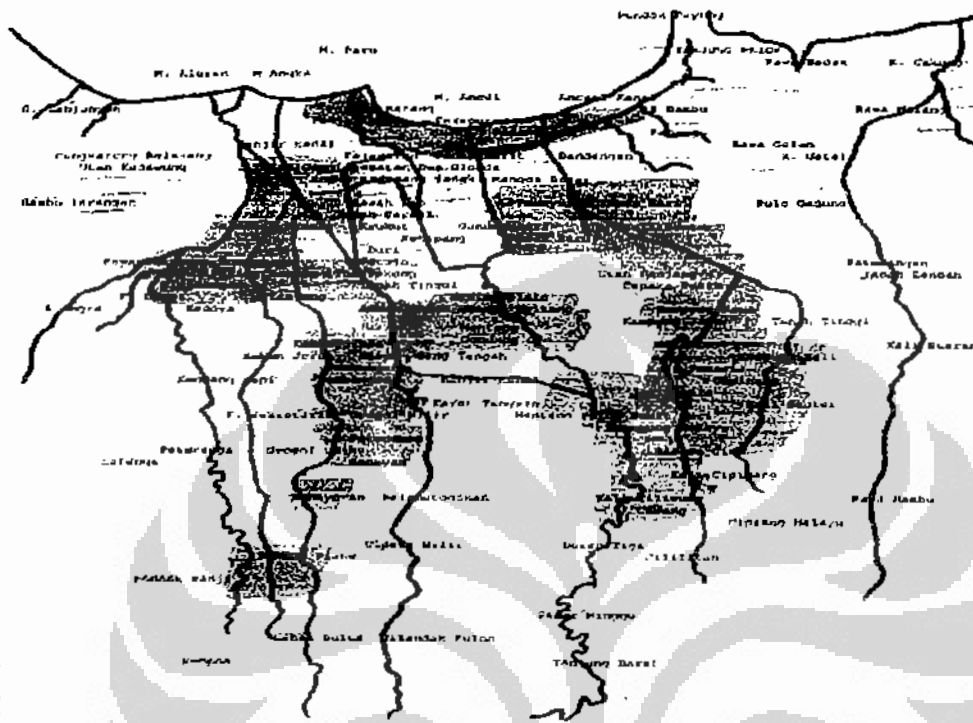
Jika diperhatikan peta daerah genangan yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI tersebut maka sampai tahun 1965 daerah yang berwarna biru adalah daerah banjir yang meliputi Tebet, Tanah Abang, Sunter, sebagian besar Jakarta Utara, Grogol dan lain-lain. Berdasarkan peta tersebut daerah banjir yang terjadi pada setiap tahun dapat dikelompokkan dalam tiga wilayah: Wilayah Barat: banjir di Kali Angke di Pesing, Banjir dari Kali Sekretaris dan Kali Grogol di Palmerah, Perumahan TVRI, Hankam, Tomang Barat, Tomang Timur dan Jelambar.

Wilayah Tengah: Banjir dari Kali Ciliwung di kali Pasir, Matraman Dalam, Bidara Cina, Otista, dan Pademangan, Banjir dari Banjir Kanal meliputi Tanah Abang, Tanjung Selor, Tanah Abang Bongkaran, Banjir dari Kali Krukut dan Kali Mampang di Bendungan Hilir, Pondok Karya, Blok P, dan Majapahit, Banjir di Kali Cideng dan Kali Duri di Jalan Thamrin, Duri, Kampung Krendang, Tanah Sereal, Setiabudhi, Kuningan, Banjir dari anak Kali Ciliwung/Beton, Taman Sari, Mangga Besar, Jayakarta.

Wilayah timur adalah banjir dari kali Cipinang dan kali Sunter di Kampung Malang, Kramat Tunggak, Cawang, By Pass Penas, Belakang Penjara Cipinang, Komplek Perhubungan Rawamangun, Rawamangun, By Pas Sunter, Plumpang, Pulo Mas, STM Pembangunan, Kampung Ambon. Banjir dari Kali Cakung dan Kali Buaran di PT Jiep dan kampung di kanan kiri kali. Banjir dari Kali Sentiong Tanah Tinggi, Sumur Batu, Senen, Kali Baru Timur, Percetakan Negara. Banjir pada daerah Polder Tomang Barat. Luas banjir seluruhnya sekitar 17% dari wilayah Jakarta.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Rencana Induk daerah Khusus Ibukota Jakarta 1965 – 1985 disahkan oleh No. 9/DPRGR/P/1967.

Gambar31: Wilayah Banjir Tahun 1960 - 1970



Diolah dari Sumber-sumber koran 1960 - 1970

Pada tahun 1960 – 1970-an karena pembangunan sudah semakin pesat dan jumlah penduduk yang tinggal di Jakarta meningkat dengan pesat pula, rupanya hal ini sangat berpengaruh terhadap wilayah banjir. Mulai periode 1960 – 1970-an inilah daerah-daerah seluruh Jakarta terutama daerah selatan mulai dilanda banjir. Daerah baru yang dilanda banjir adalah daerah-daerah Kampung Melayu, Bidara Cina dan sekitarnya. Hal ini sangat menarik jika dikaitkan dengan keberadaan pintu air Manggarai. Ternyata keberadaan pintu air tersebut, karena terjadi sedimentasi yang berlebihan dan sampah yang semakin banyak, telah mengakibatkan luapan air di daerah atas pintu air. Hal ini terus berlangsung sampai sekarang, karena sampah-sampah dan sedimentasi dari hasil rumah tangga semakin banyak dan rumah-rumah yang berdiri di bantaran Ciliwung semakin banyak dan tidak bisa dikendalikan.

4.6 Banjir Tahun 1970 – 1980: Siklus Banjir yang Semakin Pendek

Pada periode 1970 – 1980 dapat dikatakan Jakarta mengalami siklus banjir yang semakin pendek. Pada banjir tahun 1970, air menggenangi daerah-daerah penting yang berdekatan dengan Istana. Listrik seluruh kota padam akibat banjir besar. Genangan air berkisar 20 centimeter sampai dua meter. Akibatnya aliran listrik dipadamkan, 43 pasien rumah sakit diungsikan. Pada waktu itu Presiden Suharto berkunjung ke daerah banjir.¹⁰¹

Tabel 16: Daerah Genangan/Banjir pada 10 Pebruari 1970

| Daerah Banjir | Luas/m ² | Kedalaman (meter) | Waktu genangan (jam) |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Komplek Balai kota | 300 | 0,50 | 3 |
| Jalan Thamrin | 1.500 | 0,50 | 3 |
| Jalan Merdeka Timur | 500 | 0,70 | 4 |
| Jlan Kebon Sirih | 300 | 0,50 | 3 |
| Tanah Abang I dan sekitarnya | 80.000 | 0,50 | 3 |
| Pasar Petojo dan Sekitarnya | 10.000 | 0,40 | 3 |
| Petamburan, KH. Hasyim Asyari, Batu Ceper, Batu Tulis | 4.000 | 0,40 | 2 |
| Jalan Pecenongan, Pintu Air II | 400 | 0,50 | 5 |
| Jalan Menteng dalam, Jln KH. Wahid Hasjim | 1500 | 0,60 | 3 |
| Jln Sunda, Jln Lombok, Jln. Maluku | 2000 | 0,50 | 3 |
| Jln. Gereja Theresia | 1000 | 0,60 | 3 |
| Jalan Sumbawa dan Jalan Sumatera | 750 | 0,50 | 3 |
| Jln Jaksa | 400 | 0,60 | 3 |
| Jlan Kartini, Leutser, Jlan Krekot Bunder | 1500 | 0,40 | 3 |
| Jalan Kartini IV dan sekitarnya | 500 | 0,40 | 2 |
| Jlan Percetakan Negara | 30.000 | 0,60 | 4 |
| Jalan Garuda dan Patrich Lumumba | 1.500 | 0,50 | 3 |
| Jln Kebon Kosong | 500 | 0,50 | 3 |
| Bendungan Hilir | 4.000 | 0,70 | 3 |
| Harapan Mulya | 4.000 | 0,80 | 5 |
| Jalan Jakarta | 500 | 0,50 | 3 |
| Jalan Bungur | 2.000 | 0,40 | 4 |

¹⁰¹ *Kompas*, 11 Pebruari 1970

| | | | |
|--------------------|------|------|---|
| Kramat Bunder | 500 | 0,50 | 3 |
| Jalan Kwini I | 500 | 0,60 | 3 |
| Jalan Tanah Tinggi | 2000 | 0,50 | 3 |

Sumber: Jakarta Flood Control Preliminary Survey and Recommendations; Proyek Pengendali Banjir Djakarta Raya, 1970 halaman 4.2

Karena hampir seluruh kawasan Monas kebanjiran, maka Presiden Soeharto mengadakan peninjauan dengan menggunakan helikopter ke daerah-daerah banjir.

Setelah banjir tahun 1970, Pada tahun 1973, banjir merendam daerah-daerah yang dialiri sungai Grogol dan sungai Krukut. Daerah tersebut adalah daerah Grogol yang diapit sungai Grogol dan banjir kanal, Tomang Ancak, sampai Petamburan daerah Slipi.¹⁰²

Dari bulan Desember 1975 hingga Januari 1976, menurut catatan Departemen Sosial korban banjir di seluruh Indonesia berjumlah 1,5 juta. Korban banjir terbesar di Jakarta sampai bulan Maret 1976 berjumlah 800.000 orang. Untuk meringankan beban korban banjir pemerintah memberi bantuan beras 800 ton dan uang 80 juta rupiah. Sementara itu untuk daerah Jawa Barat banjir melanda daerah Bandung, Ciamis, Bekasi, dan Tangerang. Jumlah pengungsi di Jawa Barat sampai bulan Januari 1976 berjumlah 95.000 jiwa, jumlah ini meningkat pesat sampai Maret 1976 pengungsinya berjumlah 120.000 jiwa. Pemerintah memberikan bantuan beras sebanyak 480 ton dan uang 1,2 juta rupiah. Daerah Jawa Tengah, banjir melanda Sragen, Kudus, Brebes. Jumlah korban banjir sampai Januari 1976, sebanyak 31.203 orang, sampai bulan Maret jumlah korban banjir sebanyak 90.000 orang. Pemerintah memberi bantuan beras 360 ton dan uang 9 juta rupiah. Sementara itu di Jawa Timur banjir melanda Mojokerto, Tuban, Gresik, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, dan Kediri. Pengungsi pada Januari sebanyak 67.040 orang sampai bulan Maret jumlah pengungsi meningkat sebanyak 200.000 dengan kebutuhan beras 800 ton dan 20 juta rupiah. Daerah Sumatera Utara, Langkat, Deli Serdang dan Labuan Batu tercatat 12.027 jiwa sampai Maret sekitar

¹⁰² Sinar Harapan; 7 April 1984

20.000 kebutuhan beras 80 ton dan 2 juta rupiah. Banjir di Kalimantan Barat meliputi daerah Sambas dengan pengungsi pada bulan Januari 1.716 sampai Maret 6000 jiwa, memerlukan dana 500.000 rupiah dan beras 20 ton. Untuk daerah Sulawesi Selatan banjir melanda Ujung Pandang dengan jumlah pengungsi 61.972 orang dan pada Maret sekitar 100.000 orang menjadi korban, kebutuhan beras 400 ton, dan 10 juta uang. Sedangkan daerah lain diperkirakan sampai bulan Maret sebanyak 160.000 jiwa, kebutuhan beras 660 ton dan uang sebesar 16.500.000. Sehingga total uang yang dikeluarkan pemerintah 41.430.900 rupiah, beras 1.385 ton dan tepung terigu 50 ton.¹⁰³

Tabel 17: Jumlah Korban Banjir dan Bantuan Pemerintah Tahun 1976

| No | Propinsi | Jumlah Korban | Bantuan Beras | Bantuan Uang |
|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Jakarta | 800.000 | 800 ton | 80.000.000 |
| 2 | Jawa Barat | 120.000 | 480 ton | 1.200.000 |
| 3 | Jawa Tengah | 90.000 | 360 ton | 9.000.000 |
| 4 | Jawa Timur | 200.000 | 800 ton | 20.000.000 |
| 5 | Sumatera Utara | 20.000 | 800 ton | 2.000.000 |
| 6 | Kalimantan Barat | 6.000 | 20 ton | 500.000 |
| 7 | Sulawesi Selatan | 100.000 | 400 ton | 10.000.000 |
| 8 | Daerah lainnya | 160.000 | 660 ton | 16.500.000 |
| | Jumlah | 1.496.000 | 4.320 ton | 139.200.000 |

Diolah dari Sumber Koran 1976

Pada tahun 1976 Jakarta dilanda banjir hampir selama sebulan penuh yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 26 Januari 1976. Pada banjir 2 Januari diawali hujan yang mengguyur kota selama dua malam berturut-turut, sehingga pada tanggal 2 Januari yang kebetulan jatuh pada hari Jumat, jalan Thamrin kebanjiran, terutama di depan Sarinah, air mencapai ketinggian 15 – 20 centimeter. Akibatnya banyak mobil yang mogok. Hal ini dimanfaatkan oleh para pemuda untuk mencari uang. Mereka mendorong mobil yang mogok dengan imbalan antara 50 rupiah sampai 500 rupiah. Dalam suasana seperti ini untuk mendapatkan uang,

¹⁰³ Suara Karya; 3 Pebruari 1976

para pemuda ada yang menyumbat lubang-lubang air dengan kain atau sampah sehingga air semakin tinggi dan semakin banyak mobil yang mogok¹⁰⁴. Hal yang sama juga terjadi di Jalan Ahmad Yani By Pass.

Para pegawai memanfaatkan kejadian banjir untuk tidak masuk kantor. Bahkan para pegawai sebagian besar meliburkan diri sejak hari Kamis tanggal 1 Januari sampai hari Minggu, karena pada hari Jumat selain banjir juga hari tanggung untuk masuk kantor, karena hari Sabtu adalah hari libur tanggal 1 Muharram. Pada kesempatan itu Sutami selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) mengatakan bahwa untuk menanggulangi banjir di Jakarta diperlukan dana sebesar 50 milyar. Sementara itu, Gubernur Ali Sadikin merasa pasrah menghadapi keadaan tersebut akibat kesulitan keuangan untuk menanggulangi kesejahteraan rakyat banyak.¹⁰⁵

Pada 2 – 7 Pebruari 1976 untuk pertama kalinya diadakan seminar perhitungan banjir rencana yang diadakan di Bandung, yang dihadiri para ahli, para petugas pengairan dan tehnsi yang bergerak di bidang pengairan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal teknik dan cara penghitungan banjir terencana. Dengan seminar ini, bila di suatu daerah diadakan pengamatan terhadap banjir secara terus menerus dalam jangka waktu lima tahun, maka akan didapat catatan adanya banjir yang terbesar dalam jangka waktu tersebut, misalnya saja debitnya tercatat 2.000 meter kubik perdetik dengan ketinggian 17 meter, maka banjir ini dinamakan banjir maksimum selama lima tahun. Dari seminar tersebut dihasilkan sebuah rumusan *design flood* untuk melihat perkiraan-perkiraan debit air yang terjadi setiap musim hujan.¹⁰⁶

Pada tahun 1976 di wilayah Jakarta Utara diperkirakan 29 ribu orang harus mengungsi. Banjir di Jakarta Utara meliputi Kali Baru, Koja, Rawa Badak, Penjaringan, Mangga Dua. Bahkan di Teluk Gong banjir merendam perkampungan di sekitarnya seluas 5 ha. Penduduk yang dilanda banjir tampak kebingungan dan berusaha menyelamatkan barang-barangnya menerobos banjir dengan rakit darurat. Perahu karet yang diturunkan oleh Yon Air (Angkutan Air) di Sempur ikut

¹⁰⁴ Suara Karya; 5 Januari 1976

¹⁰⁵ Berita Antara; 2 Januari 1976

¹⁰⁶ Antara; 3 Januari 1976

diperbantukan. Suasana sepanjang jalan raya yang menghubungkan Plumpang sampai Semper pada pagi hari sampai Minggu siang. Penduduk yang belum mengetahui tempat untuk mengungsi menanti di bawah rintik-rintik hujan diselingi oleh tangisan anak-anak.¹⁰⁷

Untuk membantu beban warga, pemerintah memberi bantuan 500 kilogram beras dan obat-obatan dari PMI untuk penduduk Kali Baru. Selain itu penduduk Rawa Badak, yang mengungsi di gedung sekolah dan Kodim 0502 Yos Sudarso, Suku Dinas Sosial membantu 1 ton beras ditambah uang 50.000 rupiah. Menurut laporan Suku Dinas Sosial untuk bantuan di Jakarta Utara telah disumbangkan beras sebanyak 3,3 ton dan uang 95 ribu rupiah. Sampai hari Minggu banjir telah mengakibatkan dua korban tewas satu anak meninggal karena kedinginan dan satu anak lagi meninggal karena kelalaian. Anak yang berumur satu tahun dikabarkan tidur tanpa dijaga, kemudian diketahui anak tersebut meninggal dunia dan terlihat mengapung di atas air.¹⁰⁸

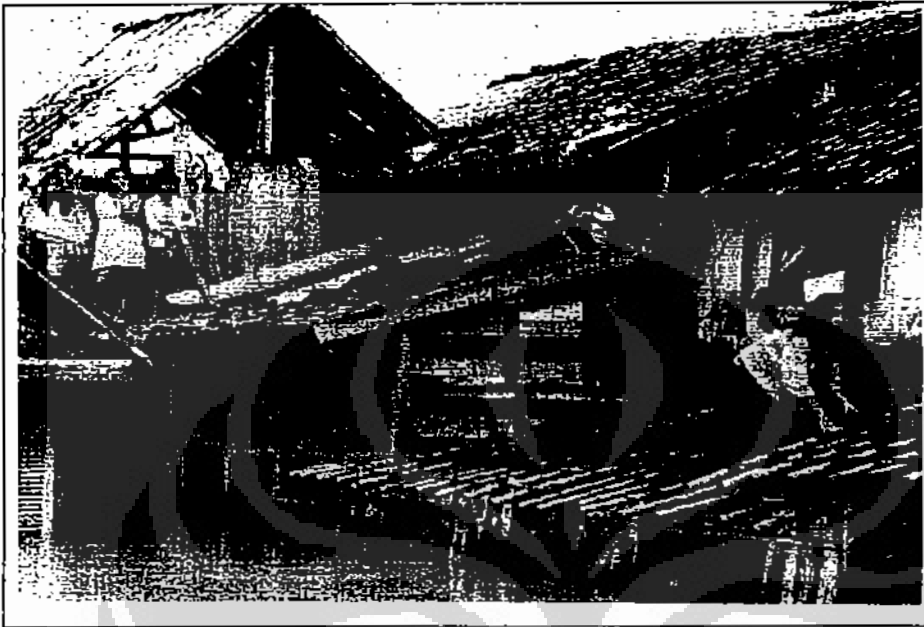
Di Jakarta bagian timur, karena Sungai Klender dan Sungai Cakung meluap, banjir melanda daerah Cipinang, Cipinang Muara, Kebon Nanas dan Jagalan. Menurut keterangan Nyonya Husein, banjir melanda rumahnya sejak jam 15.00 hari Jumat dan baru surut pada hari Minggu. Air masuk rumahnya setinggi 90 centimeter banyak perabotan yang rusak dan yang lebih penting adalah surat-surat penting suaminya yang menjadi pegawai Dinas Kehutanan terendam air. Bantuan sudah diberikan di Asrama Brimob tetapi banyak pengungsi yang belum mendapat bantuan. Sementara itu Sukandar penduduk RW 05, kelurahan Cipinang Muara, seluruh keluarganya anak beranak yang terdiri 14 orang terpaksa mengungsi karena rumahnya telah tergenang sampai atap.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Sinar Harapan 5 Januari 1976

¹⁰⁸ Sinar Harapan; 5 Januari 1976

¹⁰⁹ Sinar Harapan; 5 Januari 1976

Gambar 32: Banjir di Sungai Krukut



Sungai Krukut meluap, penduduk terpaksa menghindari banjir dengan menjebol atap ilalangnya dan genteng agar terhindar dari air.

Sumber: Kompas; 21 Januari 1976

Sampai hari Selasa, banjir masih dirasakan dampaknya oleh penduduk yang akan pergi ke kantor setelah liburan panjang. Hal ini dimanfaatkan oleh abang becak yang biasa parkir di jalan *by pass* A Yani Cipinang. Bagi pejalan kaki yang menyeberang jalan *by pass* baik dari arah kuburan Cina maupun sebaliknya, karena kendaraan tidak bisa lewat maka penduduk terpaksa naik becak. Untuk itu sekali menyeberang pada pagi hari ditarik 150 rupiah, sedangkan sore dan malam hari ditarik 200 – 250 rupiah. Penumpang tentunya tidak bisa duduk melainkan nongkrong dengan kaki di atas jok dan pantat di atas sandaran.¹¹⁰

Penduduk di aliran Ciliwung juga merasakan banjir yang sangat hebat. Dari Manggarai sampai Berlan, air mencapai atap rumah. Penduduk Kampung Melayu merasakan banjir yang parah, akibat penutupan pintu air Manggarai. Meskipun pintu air Manggarai ditutup, ternyata daerah Monumen Nasional tetap masih

¹¹⁰ Berita Antara; 6 Januari 1976

dilanda banjir. Bahkan Ketua Mahkamah Agung Omar Senoadji terpaksa turun dari kendaraannya di Jalan Asam Lama dan berjalan kaki ke gedung Sekretariat Kabinet agar tidak terlambat menghadiri sidang, karena jalan Veteran IV dimana gedung Sekretariat Kabinet juga dilanda banjir¹¹¹.

Bulan Januari banjir melanda Jakarta tidak hanya sekali, pada tanggal 19 Januari dikabarkan banjir melanda Jakarta lagi. Laporan dari Walikota Jakarta Pusat sekitar 8 hektar wilayahnya dilanda banjir, yang meliputi Kenari, Pegangsaan, Cikini, Kebon Melati, Kebon Kacang, Karet Tengsin dan Petamburan yang menimbulkan kesusahan orang sekitar 36.580 jiwa. Untuk mengurangi kerugian akibat banjir di daerah Jakarta Pusat, Gubernur DKI mengambil alih langsung pimpinan pintu-pintu air di seluruh DKI. Prioritas utama adalah menyelamatkan daerah sekitar Monumen Nasional dimana ada Istana Presiden dan gedung-gedung penting¹¹². Menurut Ali Sadikin, banjir yang mengancam daerah pinggiran Kali Ciliwung (Manggarai, Kali Pasir, Pejambon) tidak mungkin dielakkan karena rumah-rumah dibangun di daerah alur sungai. Wakil Gubernur A. Wiriadinata yang ditugaskan memimpin operasi banjir berjalan ke tempat-tempat yang dilanda banjir sedangkan sejumlah pejabat sampai bermalam di pintu air Manggarai. Akibat banjir, buaya di kebun binatang Ragunan terlepas karena air yang semakin meninggi di Ragunan.¹¹³ Berbeda dengan banjir pada awal Januari yang banyak menenggelamkan daerah Jakarta Timur dan Utara, banjir kali ini banyak menenggelamkan daerah tengah sepanjang Ciliwung dan bagian Timur banjir kanal yang merupakan bukti bahwa banjir yang menyerang ibukota disebabkan adanya kiriman air akibat luapan air di daerah Bogor dan Depok. Banjir telah mengakibatkan bobolnya tanggul di sepanjang banjir kanal persis seperti banjir tahun 1965. Berdasarkan laporan petugas pintu air Manggarai pada jam 13.00, tinggi air tercatat 875/875 milimeter dengan debit air 136,26 meter kubik perdetik, sementara pintu air Karet tercatat 574/545 milimeter dengan debit 215,88 meter kubik untuk menghindari banjir lebih parah di daerah Manggarai dan Kampung Melayu, maka pintu air Manggarai harus sedikit dibuka, tetapi akibatnya

¹¹¹ Berita Antara; 6 Januari 1976

¹¹² Berita Antara; 20 Januari 1976

¹¹³ Berita Antara 20 Januari 1976

daerah Pejambon dan Jakarta Pusat kebanjiran. Sebaliknya dengan ditutupnya pintu air Manggarai, penduduk di kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Kebon Manggis terendam air, bahkan ketinggiannya mencapai 5 meter lebih tinggi dari banjir yang terjadi pada awal Januari¹¹⁴.

Meskipun banjir, rupanya penduduk Jakarta sudah biasa, seperti yang dialami penduduk di daerah Tanah Abang. Beberapa penduduk di pinggir kanal banjir Tanah Abang tidak menghiraukan banjir yang melanda rumahnya. Dengan koper berisi pakaian di sampingnya, mereka asyik bermain gaple di atas balai-balai kayu mengenakan celana pendek. 'Pokoknya air naik, angkat koper dan ngungsi', kata salah seorang pria setengah umur yang rumahnya kosong karena keluarganya telah diungsikan terlebih dahulu di rumah tetangga tidak jauh dari belakang kantor DPU DKI.¹¹⁵

Banjir yang keempat kalinya dan terbesar selama periode 1 sampai 20 Januari 1976, terjadi pada Selasa dinihari. Petugas pintu air di Depok memberikan laporan kepada petugas pintu air Manggarai, tetapi penduduk yang mengetahui kabar tersebut tidak mempunyai alternatif, karena hanya masalah waktu saja, sehingga penduduk hanya menunggu datangnya banjir. Menurut perhitungan, jika pemantau banjir di Depok mengabarkan tentang naiknya air yang mencapai 140 centimeter ke atas, maka dalam enam jam berikutnya banjir sudah masuk ke Jakarta. Akibat dahsyatnya banjir, luapan dari pintu air Manggarai, air disalurkan ke arah sungai Ciliwung ke kota dan banjir kanal. Akibatnya penduduk di sekitar sungai Ciliwung dan banjir kanal itu mengalami kebanjiran meskipun tidak terjadi hujan daerahnya.¹¹⁶ Penduduk yang tinggal di daerah Jembatan Matraman melaporkan bahwa mereka tidak diberitahu oleh petugas, tetapi karena kesadaran antar mereka sendiri sehingga tindakan penyelamatan dilakukan. Sementara itu penduduk Tanah Abang yang tinggal di sekitar banjir kanal mengakui dibangunkan oleh petugas DKI sehingga bisa menyelamatkan diri. Penduduk Kali Pasir, Cikini yang rumahnya terendam mendapat peringatan dari pemerintah. Setiap terjadi banjir, daerah Kali Pasir merupakan daerah Jakarta Pusat yang terparah, umumnya

¹¹⁴ Berita Antara; 21 Januari 1976

¹¹⁵ Berita Antara; 21 Januari 1976

¹¹⁶ Kompas; 21 Januari 1976

mereka tinggal di bantaran sungai. Di Tanah Abang akibat meluapnya Sungai Krukut dan Ciliwung banyak warga yang menderita kelaparan, karena tidak mendapat bantuan makanan.

Sementara itu walikota Jakarta Pusat Eddy Djadjang Djajaatmadja yang mendapat laporan tentang meluapnya air kali Ciliwung dan kali Krukut di wilayahnya pada Selasa siang melakukan peninjauan ke daerah RW 09 Kelurahan Petamburan, Tanah Abang yang tergenang air segera dikenali oleh penduduk RW 09 itu yang berteriak-teriak 'lapar pak, lapar pak walikota, kami belum makan pak'. Selain itu tinjauannya pula beberapa tempat lain di wilayahnya yang juga dilanda banjir. Dapur umum didirikan sehingga bantuan beras dan ikan asin dari pemerintah segera dapat dibagikan kepada penduduk yang menderita melalui kelurahan dan RW dan RT setempat. Tetapi menganggap letak dapur umum kurang strategis dan minta dipindahkan. Untuk pengiriman beras dan ikan asin dan air minum mobil pengangkutnya harus melewati banjir¹¹⁷.

Sementara itu banjir yang terjadi 25 Januari 1976, di Jakarta Pusat telah mengakibatkan hampir 15% wilayah Jakarta Pusat kebanjiran. Penduduk yang mengungsi di Jakarta Pusat sebanyak 67.774 jiwa. Di tiga belas kelurahan, air mencapai ketinggian 4,50 meter dan terendah 1,10 meter. Di kelurahan Kenari air 4,50 meter, kelurahan Pegangsaan 3,50 meter, Kebon Sirih 3 meter Petamburan 3 meter dan air terendah terdapat di kelurahan Gelora 1,10 meter. Wakil Walikota Jakpus Drs. A Musjanif sampai hari Senin mendapat bantuan beras sebanyak 1 ton dan uang 50.000. Bantuan beras sejak awal Januari sebanyak 30 ton dan uang 870.000.¹¹⁸

Banjir kiriman melanda sebagian besar kota Jakarta Sabtu tengah malam menjelang pagi khususnya di sepanjang Kali Ciliwung, banjir kanal yang termasuk wilayah Jakarta Pusat. Daerah Tanah Abang, jati Bunder, kenari, Kwitang, Kalipasir merupakan sasaran dari air kiriman banjir ini. disamping banjir kiriman dari Bogor dan Depok di kota Jakarta sendiri turun pula hujan yang cukup lebat yang merupakan hujan lokal...ratusan rumah liar terdapat di sepanjang kali dari karet sampai Kampung Duri. Mereka membangun rumah bahkan sampai melampaui tanggul...¹¹⁹

¹¹⁷ Kompas; 21 Januari 1976

¹¹⁸ Berita Antara; 26 Januari 1976

¹¹⁹ Berita Antara; 26 Januari 1976

Selama Januari 1976, banjir yang melanda Jakarta sebanyak empat kali. Banjir yang pertama tanggal 5/6 Januari, kemudian 16 – 20 Januari 1976, ketiga 24 – 26 Januari, keempat 30 Januari - 1 Pebruari 1976. Kalau banjir hari Jumat dan Sabtu akibat hujan lokal maka banjir yang terjadi 20 Januari adalah banjir kiriman.¹²⁰

Kondisi yang buruk di sekitar kanal banjir ditengarai menjadi penyebab banjir tahun 1976. Ratusan rumah liar terdapat di sepanjang kali dari Karet sampai Kampung Duri, mereka membangun rumah bahkan sampai melampaui tanggul. Selama ini daerah yang sudah dinormalisasi adalah Duku Atas sampai Manggarai. Di daerah ini penghijauan sudah dimulai. Untuk mengurangi jumlah penduduk, pemerintah akan mentransmigrasikan penduduk ke Kalimantan Barat. Rumah-rumah liar yang dibangun di atas tanggul di sepanjang banjir kanal ialah Tanjung Selor, sungai Bambu sampai Jati Petamburan.¹²¹ Untuk menjinakkan banjir diperlukan waduk-waduk. Waduk yang ada sekarang ialah Pluit, Setiabudhi dan Kebon Melati, untuk itu perlu dibangun waduk lainnya.

Banjir besar yang keempat kalinya, kembali melanda ibukota tengah malam kemarin dengan volume air yang mencapai puncaknya selama ini dibandingkan dengan genangan air yang sebelumnya. Hampir seluruh daerah Jakarta Pusat yang biasanya kedatangan tamu banjir kiriman ini kembali direndam air mulai dari daerah matraman Dalam , Kenari, Kali Pasir, Pejambon, Tanah Abang... tanda2 kenaikan air ini diterima sejak jam 10.00 pagi kemarin dengan kenaikan mendadak pada ketinggian 175 cm pada jam 09.00 pagi naik menjadi 200 cm pada jam 10.00 WIB...¹²²

Selama banjir tahun 1976, diperkirakan 200.000 penduduk Jakarta harus mengungsi. Daerah Jakarta Pusat merupakan daerah terparah dengan pengungsi sebanyak 150.000, yang meliputi Tanah Abang, Menteng, Senen sebanyak 78.418 orang, Gambir, Cempaka Putih, Kemayoran, dan Sawah Besar diperkirakan 60.000 orang sedangkan wilayah lain Jakarta Utara, Timur dan Selatan sebanyak 70.000

¹²⁰ Kompas; 21 Januari 1976

¹²¹ Berita Antara; 26 Januari 1976

¹²² Berita Antara; 26 Januari 1976

orang. Pada banjir 1 Pebruari – 3 Pebruari, untuk menghindari korban lebih banyak air banjir kanal dialirkan ke kali Cideng, Ciliwung, Krukut, tetapi Ciliwung tidak bisa dialiri air sampai 80 centimeter kubik perdetik, karena 50 meter kubik perdetik saja perkampungan di sekitarnya sudah tenggelam. Akibatnya kali Cideng dilimpahi air dari banjir kanal, maka air genangan di Jalan Thamrin dan depan Kartika Plaza (Baturaja, Teluk Betung dan sebagainya air mencapai ketinggian 1,25 centimeter.

Menurut catatan Posko Banjir DKI di Jatibaru sejak awal Januari, banjir hari Minggu kemarin merupakan banjir ke-8. banjir pertama tiba tanggal 1-2 Januari, dengan korban paling banyak di Jakarta Pusat akibat hujan lokal. Banjir ke-2 tanggal 5-6 Januari akibat hujan kiriman untuk daerah Jakarta Timur dan Barat, ke-3 tanggal 16 – 17, ke -4 tanggal 18 dan 19, ke-5 tanggal 24-25, ke 6 tanggal 26 akibat banjir kiriman juga, ke -7 akibat banjir kiriman malam Sabtu yang lalu dan terakhir kemarin akibat hujan lokal...¹²³

Dalam menangani banjir selain pemerintah, peranan penduduk juga sangat penting, pemerintah mengeluhkan sikap penduduk yang masa bodoh dalam keadaan banjir. Mereka tetap saja tenang sewaktu diberitahu akan ada banjir, karena anggapan mereka banjir ini sudah rutin dan menjadi sahabatnya.

...namun sangat disesalkan tanggapan masyarakat akibat dari banjir itu. Dibeberapa tempat sepanjang banjir kanal ditimbun pasir dalam karung yang bisa digunakan setiap waktu untuk menguatkan tanggul dari amukan air. Tetapi setiap kali dibutuhkan pasir itu banyak yang lenyap, sekaligus dengan karung-karung plastiknya. Demikian juga sikap penduduk yang kurang menghargai peringatan dari petugas akan datangnya banjir. Mereka tetap saja tenang sewaktu diberitahu akan ada banjir karena anggapan mereka banjir sudah rutin dan menjadi sahabat mereka. Bahkan di beberapa tempat saat kebanjiran tidak mempengaruhi mereka untuk berbuat sesuatu penyelamatan banjir. Banjir datang penduduk tetap menikmati televisi atau radio. Bahkan malam Sabtu di Bongkaran (pusat pelacuran murah) tetap saja terjadi transaksi dagang antara penjual dan pembeli cinta.¹²⁴

¹²³ Kompas; 2 Pebruari 1976

¹²⁴ Kompas; 2 Pebruari 1976

Di daerah Bongkaran Tanah Abang memang banyak berdiri permukiman liar yang selalu dijadikan sasaran penertiban pemerintah DKI. Meskipun sering dibongkar tetap saja daerah itu ramai dikunjungi orang.

...gubug-gubug liar di atas permukiman tuna wisma diatas bibir bantaran banjir kanal tontonan gratis dari wajah gombal ini disaksikan ribuan mata dari atas jembatan tinggi Tanah Abang...dari pandangan burung itu, nampak bongkaran indah yang sejak dulu memang selalu mengalami bongkar pasang dan banjir bakar. Dan bila malam tiba wajah bongkaran indah menjadi ramai ibarat kelab malam besar dibawah rayuan dangdut dan kelap kelipnya lampu tintir. Dan komplek ini ada diatas bantalan jalur rel kereta api stasiun Tanah Abang yang amat ramai pula menyedot penumpang dan barang dagangan dari arah barat...dikolong sebuah gang diapit dua tembok gedung tua dibilangan Jakarta Pusat, seorang warga kota dalam tempo 24 jam sudah mendirikan gubug tempat tidurnya, 1 m kali 1,5 m. Cukup untuk tiduran bersama kekasihnya dan menyimpan pakaian bajunya...¹²⁵

Dalam peninjauan ke lapangan, Wagub Urip Widodo mengatakan bahwa banjir memberikan kesempatan untuk menggusur penduduk yang tinggal di sepanjang bantaran sungai dan kolong jembatan. Menurut Wakil Gubernur kesalahan pertama memang terletak pada pamong setempat karena para pamong itu tidak mau melarang orang-orang membangun rumah atau mendirikan pangkalan bambu dan lainnya di tepi sungai atau tanggul, demikian pula dalam pemberian KTP kepada para penghuni di tepian kali. Bahkan penghuni ini juga ditarik iuran sehingga mereka merasa berhak tinggal di tempat terlarang.¹²⁶

Setiap awal tahun, seperti biasa selalu muncul polemik masalah banjir terutama dari pejabat yang terkait mengurus masalah pengairan dan kota Jakarta. Mereka seperti biasa melemparkan isu masalah-masalah dana terbatas, letak geografis sampai sikap psimistis dalam menangani banjir. Pada tahun 1977 bulan Januari curah hujan adalah 330 milimeter/hari jumlah sebulan 62,1 milimeter. Menyangkut banjir 1977, Sutami sebagai Menteri PUTL sangat pesimis dapat menanggulangi banjir secara tuntas.

¹²⁵ Berita Buana; 12 Januari 1983

¹²⁶ Kompas; 3 Pebruari 1976

Kita jangan memberi ilusi untuk bisa mengatasi banjir di ibukota. Sebab katanya di Jepang, Australia dan Amerikapun sering terjadi banjir. Sekalipun biaya 50 milyar tersedia dan pekerjaan sarana pengendalian banjir periode 25 tahun sekali untuk sistem makro, tetap masih akan ada banjir. Mungkin yang akan terjadi banjir periode 30 tahun sekali atau lebih.Gubernur Ali Sadikin pada tahun yang sama secara realistis mengatakan tidak mau menipu rakyat Jakarta dengan menjanjikan kota ini akan bebas banjir selama biaya tidak memungkinkan. Berdasarkan perhitungan 1973 Rencana Induk Pengendalian Banjir DKI untuk biaya pekerjaan pengendalian banjir baik makro maupun mikro memerlukan kurang lebih 450 milyar. Untuk pekerjaan makro pembuatan dua banjir kanal (timur dan barat), waduk-waduk, rumah-rumah pompa sebesar 207,5 milyar dan pekerjaan mikro seperti drainase dan sanitasi riolering mencapai 242 milyar.¹²⁷

Banjir tahun 1977 diawali ketika hujan deras terjadi pada 19 Januari 1977. Pada tahun 1977, banjir sebagian besar terjadi Jakarta Pusat. Diantaranya jalan Merdeka Selatan, Sabang, Silang Monas, Merdeka Timur, Senen, Sarinah.

Jalan Abdul Muis (Tanah Abang) pada jam 12.00 digenangi air setinggi setengah meter akibat meluapnya kali yang sejajar jalan itu. Gedung RRI di Jalan Merdeka Barat yang bagian belakangnya terletak di Jalan Abdul Muis, khususnya ruang dieselnya tergenang air setinggi 80 cm demikian pula ruang redaksi siaran. Akibatnya untuk siang hari Rabu jam 13.00 RRI tidak mengudara. Wilayah Kemayoran di sekitar lapangan terbang yang selama ini menjadi langganan banjir, sudah terlebih dahulu pada Rabu pagi digenangi air akibat meluapnya Kali Sentiong.¹²⁸

Di Jakarta Selatan Pondok Karya, Kebayoran Baru juga kebanjiran. Sementara itu di Jakarta Utara banjir meliputi daerah Cilincing, Sunter, Lagoa, Rawa Badak, Muara Karang, Kapuk Muara, Penjaringan, Kamal dan Pejagalan. Di bagian timur, akibat Sungai Sunter meluap, daerah yang dilanda banjir adalah Cempaka Putih, dan Sunter.¹²⁹

Banjir yang berlangsung pada bulan Januari 1977, rupanya masih berlangsung sampai tanggal 20 Januari 1977. Menurut perkiraan jumlah pengungsinya sekitar 100.000, daerah paling parah adalah Jakarta Pusat, Cempaka

¹²⁷ Sinar Harapan; 7 April 1984

¹²⁸ Warta Berita; 19 Januari 1977

¹²⁹ Warta Berita; 19 Januari 1977

Putih, Gambir, Cipinang Besar, Cakung, Bidara Cina, Johar Baru dan lain-lain. Akibat banjir besar ini banyak terjadi kekerasan yang dilakukan oleh para pemuda yang berpura-pura mendorong mobil yang mogok. Bahkan taksipun menaikkan harga sewa.

...kendaraan yang terhambat banjir di tempat itu praktis tidak bisa maju maupun mundur. Akhirnya kendaraan-kendaraan itu ditinggalkan pemiliknya. Banyak gelandangan yang memanfaatkan peristiwa itu dengan menjual jasa untuk mendorong mobil dengan imbalan jasa yang mahal. Bahkan ada yang minta dengan kekerasan jumlah ribuan rupiah, Rp 3000 untuk seorang pendorong. Para pemilik kendaraan banyak yang lapor mengenai hal ini. Mereka tidak berdaya karena jumlah penjual jasa itu banyak sekali. Mobil gubernur juga tidak mampu menembus ketinggian air dan terpaksa mogok di depan gedung PLN. Taksi pasang tarif tinggi Rp 1500 untuk jarak dekat dan tidak mau membawa penumpang kalau rutanya melintasi daerah banjir.¹³⁰

Banjir pada tahun 1977 bukan merupakan banjir kiriman, karena curah hujan di DKI, pada hari Rabu mencapai 240 milimeter setelah hujan selama 10 jam, ini merupakan curah hujan tertinggi sejak tahun 1892 yang saat itu mencapai 286 mm. Akibat banjir besar ini, Presiden Soeharto dan Tien Suharto meninjau melalui helikopter. Jumlah pengungsi sekitar 126.000 di Jakarta Utara. Selain itu karena lapangan udara Kemayoran kebanjiran akibatnya penerbangan ditunda.¹³¹

Tabel 18: Debit Air di Beberapa Pintua Air Tahun 1977

| | Pos Pemantau | Ketinggian Air (m3/det) |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Pos Pusat | PA Manggarai Banjir Kanal | 156,84 |
| Pos I | Waduk Pluit | 1,14 |
| Pos II (P.A. Opak) | Kali Cideng Atas | 1,50 |
| | Peil Lantai Jembatan | 1,85 |
| Pos III (Pompa Tomang) | Waduk Tomang | 2,90 |
| | K Sekretaris | 2,90 |
| | Peil Lantai Gd. Pompa | 3,40 |

¹³⁰ Kompas; 20 Januari 1977

¹³¹ Sinar Harapan; 7 April 1984

| | | |
|---------------------------|-----------------------|--------|
| Pos IV P.A. Pondok Pinang | K. Grogol | 2,07 |
| Pos V Pompa Setiabudhi | Banjir Kanal | 6,70 |
| | K Cideng | 6,80 |
| | Waduk Timur | 6,50 |
| | Waduk Barat | 6,35 |
| | Peil lantai Gd. Pompa | 5,00 |
| Pos VI P.A. Karet | Debit max | 156,80 |
| Pos VII Pompa Melati | Waduk Melati | 3,90 |
| | K Cideng | 3,80 |
| | Peil lantai gd pompa | 4,00 |
| Pos Unit C | K Sunter Pulo Gadung | 7,70 |
| | Tinggi air di Depok | 2,50 |

Sumber: Evaluasi Singkat Banjir DKI 1977

Berdasarkan data hasil evaluasi tersebut, maka sebagian besar daerah di Jakarta masih dilanda banjir. Daerah Setiabudhi yang diamankan dengan bangunan waduk Setiabudhi barat dan timur dengan kapasitas pompa tiga meter kubik perdebit, ternyata pada banjir tahun 1977 tidak mampu menampung air, karena pengembangan daerah Kuningan, sehingga *cathment area* waduk Setiabudhi semakin luas. Berdasarkan pemantauan tersebut, daerah-daerah yang berdekatan dengan pos pemantauan rata-rata masa dilanda banjir, misalnya daerah Tomang Barat. Keberadaan waduk Tomang tidak mampu membebaskan banjir, karena waduk hanya berkapasitas 4 meter perdetik. Daerah Waduk Kebon Melati, masih dilanda banjir, karena waduk tidak mampu menampung air dari daerah sekitarnya¹³².

Pada tahun 1978, warga Jakarta boleh sedikit bernafas karena tidak diganggu oleh banjir. Banjir baru datang pada tahun 1979. Pada banjir tahun 1979 bahkan mengakibatkan korban jiwa sebanyak 20 orang. Pada banjir tahun 1979 sebanyak 714.861 orang yang harus mengungsi. Pemerintah telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 250 ton, 150 ton dari pemerintah pusat, 37 perahu karet. Puskesmas-puskesmas di seluruh Jakarta disiapkan untuk menanggulangi korban banjir¹³³. Jakarta Selatan yang biasanya adalah daerah yang relatif aman dari

¹³² Evaluasi Singkat Mengenai Banjir Wilayah DKI Jakarta Periode Januari 1977

¹³³ Merdeka; 24 Januari 1979

banjir, namun pada tahun 1979, banjir yang terjadi pada 19 – 20 Januari 1979 telah menenggelamkan daerah Pondok Pinang. Di daerah ini air mencapai 2,5 meter. Bahkan di Pondok Pinang mengakibatkan 3 orang meninggal.¹³⁴ Sampai tanggal 23 Januari 1979, jumlah korban hilang sebanyak 20 orang. Menurut pelaksana Harian Khusus Daerah Jaya (Laksusda) dengan satuan tugas banjirnya, Anas Malik menemui kesulitan untuk mengevakuasi karena sebagian penduduk yang terkena banjir merasa keberatan untuk diungsikan dengan alasan takut barang-barangnya hilang.¹³⁵ Tulodong Bawah, daerah Belakang Kodak VII Metro Jaya dan kelurahan Bintaro juga kebanjiran. Selain itu daerah Pal Merah Jakarta Barat juga kebanjiran. Menanggapi banjir ini Gubernur Tjokropranolo mengatakan bahwa banjir pada tahun 1979 adalah banjir 12 tahun sekali¹³⁶. Akibat banjir besar ini, lantai dasar gedung DPR RI tidak luput dari genangan air, sehingga terpaksa dikerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran untuk mengurasnya. Listrik di kompleks gedung DPR RI mati, sehingga sidang pleno DPR-RI yang membahas pandangan umum fraksi tentang Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran 1979/1980 terpaksa dipindahkan dari gedung utama ke lantai II.¹³⁷ Jalan Thamrin sudah ditinggikan 80 centimeter pada tahun 1977, dikatakan oleh pejabat bahwa Thamrin tidak akan kebanjiran ternyata masih tergenang air sehingga lalu lintas

¹³⁴ Korban di daerah Pondok Pinang adalah kakak beradik anak sopir Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro. 2 anak tersebut adalah Sri Rachmawati (9 tahun) dan Amrullah (5 tahun), ketika banjir besar terjadi di daerah Kebun Jeruk, 2 anak tersebut tergelincir dan hanyut. Pada waktu itu Rachawati sedang menggendong adiknya. Di Jakarta Utara, korbannya adalah Onasis Harahap (2 tahun) dengan alamat Jln. Martimbang, RT 11/10 kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara. Di Jakarta Barat, di Tanah Sereal, Agus Suyono (18 tahun) dan Hardi bin Sanimin (17 tahun) di RT 05/09 Tanah Sereal Pal Merah tenggelam di kali Cideng, di Jakarta Pusat seorang laki-laki bernama Hareri (20 tahun) penduduk kampung Kebon Pala, gang Mes, kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat tenggelam di kali Malang yang mengalir dari Manggarai. Selain itu Afianto (42 tahun) meninggal akibat kesetrum listrik yang mengalir di dalam genangan air; lihat *Merdeka*, 22 Januari 1979.

¹³⁵ *Merdeka*; 23 Januari 1979

¹³⁶ *Merdeka*; 20 Januari 1979

¹³⁷ Dalam rapat Pleno tersebut, Soerjadi dari Fraksi PDI dalam pandangannya menegaskan bahwa penguasaan tanah secara berlebihan dari waktu-waktu semakin bertambah. PDI berpendirian perlunya inventarisasi dari seluruh penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah, jika dikehendaki tegaknya tertib hukum agraria. sementara itu Fraksi Karya Pembangunan (Bowodiman) menyarankan agar pemerintah memperhatikan dan melaksanakan secara konsekwen program pendidikan luar sekolah, pemberantasan buta huruf dan keluarga berencana, sementara Fraksi ABRI mengingatkan hendaknya pemerintah tetap waspada agar pembangunan tidak terganggu, sehingga dalam Pelita III diusahakan modal dalam negeri lebih banyak dari modal asing, masalah banjir tidak disinggung sama sekali dalam rapat tersebut; *Merdeka*; 20 Januari 1979.

macet. Wilayah lain yang tergenang banjir di Jakarta Pusat adalah kawasan Monas, Gambir, Senen, Salemba, Gunung Sahari, Kramat Raya, Jalan Pegangsaan, Jalan Mendut, Borobudur, rata-rata air setinggi satu meter.¹³⁸

Daerah Jakarta Barat, daerah yang dilanda banjir adalah sekitar Kemanggisan, Slipi dan Tomang Barat. Daerah ini digenangi oleh kali Grogol. Di Blok K Slipi, daerah Kebun Sayur dekat kompleks Hankam. Di daerah ini dikabarkan 2 anak hilang. Daerah Pal Merah Barat juga kebanjiran, sehingga karyawan yang akan ke kantor harus memutar melalui Kebayoran Lama atau Kebun Jeruk. Banjir meliputi Jln. Makaliwa, Jln. Nurdin, dan jalan Tawakal. Di Kota Bambu, dan Pondok Bandung Jakarta Barat sekitar 1.000 penduduk terendam banjir. Daerah ini merupakan daerah langganan banjir tiap tahun. Di daerah ini dikabrkan 1 orang hanyut. Selain itu hubungan Jakarta Tangerang terputus di daerah Pesing, karena jalanan yang tergenang air sepanjang 3 kilometer.¹³⁹

Gambar 33: Pedagang Makanan Yang Kebanjiran di Kelurahan Kapuk Muara Jakarta Utara, pada 21 Januari 1979.



Sumber: Merdeka 22 Januari 1979

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Suara Rakyat Republik Indonesia; 20 Januari 1979

Daerah Jakarta Timur, daerah aliran Sungai Cipinang yang meliputi Cipinang, Klender, Jatinegara kebanjiran, selain itu daerah aliran Sungai Sunter mencapai radius 250 meter di sekitarnya juga kebanjiran. Selain itu, Pondok Karya, Tebet, Bali Matraman dan Menteng Pulo dilanda banjir sehingga kantor kecamatan Tebet dan kantor komsiko 742 tergenang setinggi 2 meter. Sebanyak 6 tahanan di kantor polisi Tebet terpaksa diungsikan ke Kores Metro 742 Jakarta Selatan¹⁴⁰. Pada 4 Pebruari 1979 yang mengakibatkan 8.000 orang mengungsi. Cipinang, Cipinang Besar, Cipinang Muara, Klender, Jatinegara Kaum.¹⁴¹

Untuk membicarakan penanggulangan banjir, maka diadakan pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum Poernomosidi Hadjisarosa, Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim, Dirjen Pengairan Sujono Sosrodarsono, Gubernur DKI Tjokropranolo, KDPU DKI Bunyamin Ramto dan Kepala Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya Martsanto. Dalam keterangannya, Menteri PU mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan untuk menanggulangi banjir di DKI mencakup program jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek penanggulangan banjir pada sisa musim hujan sampai bulan April yang akan datang yaitu pengerukan kali Angke yang diperkirakan mengandung lumpur 400 ribu meter kubik, dengan kapal keruk berkapasitas 20 ribu meter kubik perhari. Diharapkan dalam waktu 20 hari pengerukan muara sungai sudah selesai. Sementara itu Gubernur Tjokropranolo dalam keterangannya hanya mengatakan bahwa semua sudah beres dan DPU akan membantu.¹⁴² Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Jakarta sebagian besar adalah tanggung jawab pemerintah pusat sedangkan gubernur DKI hanya pelaksana.

¹⁴⁰ Merdeka; 20 Januari 1979

¹⁴¹ Merdeka; 5 Pebruari 1979

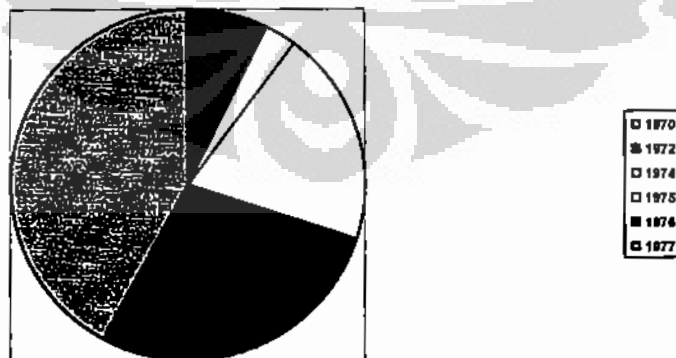
¹⁴² Merdeka; 25 Januari 1979

Tabel 19: Luas Daerah Banjir/Genangan tahun 1970 – 1977

| No | Daerah Aliran | Tahun (luas dalam HA) | | | | | | | |
|----|------------------------------|-----------------------|------|-------|------|-------|-------|--------|--------|
| | | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
| 1 | K. Grogol Atas | 42 | - | 75 | - | 52 | 475 | 480 | 500 |
| 2 | K. Grogol Bawah | 1 | - | 100 | - | 108 | 350 | 1.450 | 1.850 |
| 3 | K. Pesanggrahan / K Angke | 12 | - | 850 | - | 168 | 1.650 | 1.900 | 3.500 |
| 4 | K Sekretaris | 1 | - | 100 | - | - | 575 | 500 | 750 |
| 5 | K Krukut Atas | 45 | - | 100 | - | 36 | 75 | 375 | 600 |
| 6 | K Cideng Bawah/ Krukut Bawah | 11 | - | 25 | - | 80 | 1.200 | 1.800 | 2.000 |
| 7 | K Cideng Atas | 42 | - | - | - | 16 | 120 | 400 | 800 |
| 8 | K Ciliwung | 42 | - | 40 | - | 184 | 500 | 600 | 600 |
| 9 | Saluran Tebet | 27 | - | 100 | - | - | 150 | 240 | 400 |
| 10 | K Sentiong | 285 | - | 750 | - | 568 | 750 | 1.150 | 3.000 |
| 11 | K Sunter | 66 | - | 3.225 | - | 756 | 3.550 | 4.000 | 5.500 |
| 12 | K Cipinang | - | - | - | - | 200 | - | 3.225 | 4.500 |
| 13 | K Cakung | - | - | - | - | 200 | - | 3.225 | 4.500 |
| 14 | K Buaran | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| | Jumlah (HA) | 574 | - | 5.390 | - | 2.224 | 9.545 | 16.520 | 26.000 |
| | Prosentase (%) | 0,9 | - | 8,5 | - | 3,5 | 15 | 25 | 41 |

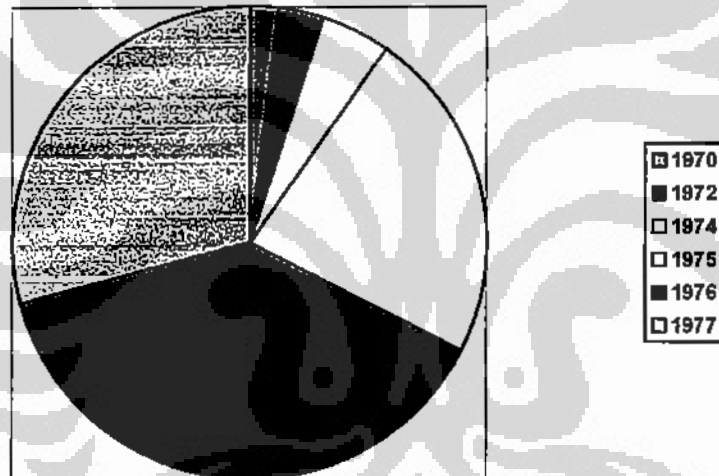
Sumber: Evaluasi Singkat Mengenai Banjir DKI Tahun 1977

Berdasarkan data di atas jika dikelompokkan berdasarkan alirannya yaitu sungai yang beraliran di bagian timur, tengah dan barat menunjukkan perkembangan wilayah banjir semakin luas. Seperti terlihat dari grafik berikut ini.

Tabel 20: Perkembangan Wilayah Banjir di Sungai Grogol, Pesanggrahan, Angke, Sekretaris Tahun 1970 – 1977

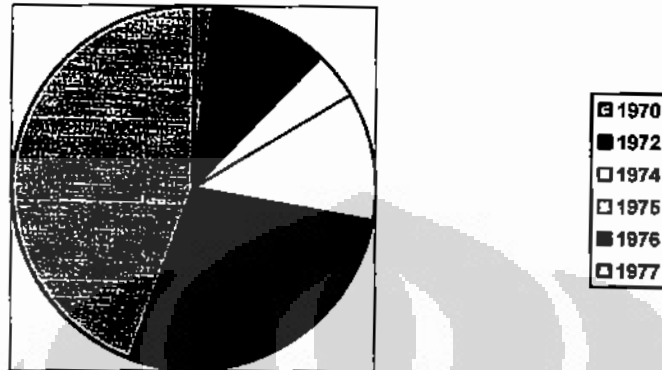
Jika memperhatikan gambar di atas maka selama tujuh tahun perkembangan wilayah banjir aliran Sungai Grogol, Pesanggrahan, Angke dan Sekretaris mengalami perluasan sejak tahun 1975 dan meningkat terus sampai tahun 1977 yang meliputi wilayah seluas 6.600 hektar. Padahal pada tahun 1970 wilayah yang dilanda banjir baru seluas 56 hektar. Pada tahun 1972 meningkat menjadi 1125 ha, tahun 1974 seluas 428 hektar, 1975 seluas 3.050 hektar, tahun 1976 seluas 4330 hektar.

Tabel 21: Perkembangan Wilayah Banjir di Sungai Krukut, Cideng, Ciliwung, Saluran Tebet Tahun 1970 – 1977



Sementara itu aliran sungai bagian tengah meliputi sungai Krukut, Cideng, Ciliwung dan saluran Tebet, puncak wilayah genangan banjir justru terjadi pada tahun 1976 yaitu seluas 3.415 hektar. Pada tahun 1977 hanya seluas 2.600 hektar sedangkan pada tahun 1975 seluas 2.045 hektar.

Tabel 22: Perkembangan Wilayah Banjir di Saluran Sentiong, Sungai Sunter, Cipinang, Cakung dan Buaran Tahun 1970 – 1977



Wilayah aliran sungai bagian timur yang meliputi Sentiong, Sunter, Cipinang, Cakung dan Buaran, selama tujuh tahun mengalami perluasan wilayah banjir paling banyak dibandingkan wilayah lain di bagian barat maupun tengah. Karena perluasan kota ke timur semakin cepat, seperti Bekasi dan Pulo Gadung dan lain sebagainya. Di daerah aliran ini pada tahun 1970 baru 751 hektar yang direndam banjir tetapi pada tahun 1976 sudah menjadi 11.600 hektar dan pada tahun 1977 sudah menjadi 18.500 hektar.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun wilayah banjir menunjukkan perluasan. Bahkan pada banjir tahun 1977 hampir 41% wilayah Jakarta direndam banjir. Pada periode 1970 – 1980 inilah wilayah banjir mengalami perluasan dan semakin tak terkendali.

4.7 Banjir Tahun 1980 – 1985: Banjir Mengepung Jakarta

Martsanto pada tahun 1983 mengatakan bahwa tahun 1983 adalah tahun keberhasilan dalam menangani banjir. Hal ini pantas dikatakan mengingat sejak tahun 1978 – 1983 pemerintah telah berhasil membangun sarana pengendali banjir di Jakarta secara maksimal. Diantaranya Cengkareng Drain, Cakung Drain, pompa

air Siantar dan pengerukan sungai. Ternyata tahun keberhasilan itu tidak mampu menuntaskan banjir di Jakarta.

Tahun 1980, tidak seperti biasanya banjir yang melanda Jakarta jatuh pada bulan Mei. Banjir datang justru ketika pemerintah sudah membubarkan Posko Banjir yang disiapkan sejak awal tahun. Setelah Posko Banjir dibubarkan pada bulan April 1980, banjir datang di wilayah Jakarta. Pada banjir tahun 1980 ini sekitar 27.000 orang harus diungsikan, 4 rumah hanyut, 2 orang anak tewas. Di kota Bogor sebanyak 81 rumah mengalami rusak berat dan ringan, 3 diantaranya hanyut serta 1 orang tewas dipatuk ular yang melilitnya. Banjir yang terjadi pada tahun 1980 karena hujan lebat di Bogor dan sekitarnya. Pada pukul 20.00 hari Jumat malam, di pintu air Depok ketinggian air 2 meter, dan pada jam 24.00 ketinggian air di Depok sudah mencapai 3,60 meter, lebih tinggi dari banjir tahun 1979 yang ketinggian di pintu air Depok hanya 2,65 meter. Daerah yang paling parah menderita banjir adalah Kampung Melayu yang 60% penduduknya atau 13.658 jiwa terpaksa diungsikan, selain itu di Kelurahan Bukit Duri sebanyak 1511 jiwa, kelurahan Kebon Baru sebanyak 2.660 jiwa, dan kelurahan Manggarai sebanyak 2.710 jiwa harus mengungsi. Di wilayah Jakarta Timur daerah Kampung Melayu sebanyak 73 RT harus diungsikan meliputi kelurahan Cawang sebanyak 1.524 jiwa, kelurahan Bidara Cina 1.492 jiwa, kelurahan Kebon Manggis 295 jiwa dan kelurahan Cililitan 390 jiwa. Menurut pengamatan penduduk, banjir tahun 1980 lebih besar dari tahun 1979, karena Jalan Otto Iskandardinata yang tidak biasa kebanjiran, tahun ini dilanda banjir, selain daerah Cililitan dan SMA 8 juga kebanjiran.¹⁴³

Meskipun suasana banjir, akibat banyak rakit yang hanyut dan menyangkut di jembatan, warga banyak yang mengambil bambu sehingga mereka panen bambu. Dalam banjir ini Suku Dinas DKI mengirimkan bantuan 2 ton beras di Kampung Melayu, sementara itu Gubernur Tjokropranolo dan Wakil Gubernur DKI Haki Chourmain meninjau lokasi banjir. Banjir di Jakarta ini diakibatkan oleh hujan deras di Bogor, sehingga selain menenggelamkan Jakarta daerah Bogor juga dilanda banjir besar. Sebanyak 81 rumah di sepanjang Ciliwung mengalami rusak

¹⁴³ Suara Karya; 5 Mei 1980

berat dan ringan, 3 rumah di antaranya hanyut. Rumah yang hanyut antara lain di Kampung Gelis sebanyak 49 rumah, 1 surau, sedangkan di Kampung Sereal Bogor, 19 rumah hanyut dan di Bogor Timur 13 rumah¹⁴⁴.

Banjir yang terjadi di Bogor dan Jakarta menurut perkiraan disebabkan maraknya penggalian pasir dan batu di daerah Bogor. Warga banyak menggali pasir dan batu di sepanjang Sungai Ciliwung dan Cisadane. Sebelumnya batu dan pasir dua sungai tersebut digunakan untuk pembangunan Proyek Jalan Tol Jagorawi. Hal yang sama juga terjadi di Katulampa dan Kedunghalang yang dilakukan penggalian batu dan pasir tanpa ijin. Perusahaan liar mencari keuntungan tanpa mengindahkan ketentuan dan kelestarian alam. Perusahaan penggali pasir dan batu tersebut antara lain PT Karya Parung Abadi dan PT Karya Cibodas. Selain itu penggalian di daerah Parung Panjang dengan menggunakan alat peledak dan peralatan mekanis masih berlangsung terus menerus tanpa ijin dan ada *backing* kuat dibelakang usaha ini.¹⁴⁵ Penggalian tanpa ijin mengakibatkan kerusakan alam, sehingga banjir dan tanah longsor sering terjadi di daerah Bogor.

Tahun 1980 menurut perkiraan terjadi banjir besar, mengingat setiap empat tahun biasanya akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Curah hujan yang tinggi turun sekitar bulan Januari – Pebruari 1981, namun tidak tertutup kemungkinan banjir datang sebelum itu yaitu Desember 1980. Perkiraan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Bun Yamin Ramto. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan beberapa persiapan menghadapi banjir, misalnya pihak kepolisian Metro Jaya telah menyediakan fasilitas 4 perahu karet dan 1 helikopter, sementara itu Dinas Kebakaran menyiapkan 5 perahu karet, satu perahu motor serta sejumlah pelampung.¹⁴⁶

Melihat pengalaman selama ini, karena setiap tahun dilanda banjir maka pada tahun 1980, Gubernur mengeluarkan keputusan tentang Komando Penanggulangan Banjir. Dalam keputusan Gubernur No. 672 tahun 1980 tanggal 24 Juni 1980 tentang Prosedur Tetap Tugas Penanggulangan Banjir di wilayah DKI. Dalam peraturan tersebut Gubernur adalah pemegang komando tertinggi

¹⁴⁴ Suara Karya; 5 Mei 1980

¹⁴⁵ Pelita; 23 Mei 1980

¹⁴⁶ Sinar Harapan; 22 November 1980

koordinasi dengan Muspida. Pelaksanaan teknis didelegasikan kepada Wakil Gubernur Bidang III/Pembangunan dan Komando Penanggulangan non teknis dipegang Wagub Bidang I/Ketertiban. Ketua Pelaksana bertugas mengatur tugas-tugas lain unit pemerintahan maupun sistem komunikasi penanggulangan banjir serta koordinasi dengan instansi lain.¹⁴⁷

Berbeda dengan Bun Yamin Ramto, Wakil Gubernur DKI Piek Mulyadi dalam peninjauan ke bendung Katulampa pada 23 Januari 1981, setelah melihat persiapan yang ada merasa bahwa banjir tahun 1981 tidak begitu mengkhawatirkan. Pada waktu melakukan peninjauan tersebut pintu air Katulampa hanya 1,5 meter. Menurut Wagub, banjir baru akan terjadi jika curah hujan di antara Bogor dan Jakarta lebat dan laut pasang. Jadi pintu air Katulampa tinggi tidak perlu dikhawatirkan. Menurut Martsanto meskipun kekhawatiran tidak ada, tetapi daerah-daerah yang harus diperhatikan adalah Pesing, Sunter, Mampang, Bintaro, Hankam Slipi dan Bukit Duri.¹⁴⁸

Ternyata optimisnya Wagub Gubernur DKI yang menyatakan bahwa banjir tahun ini tidak perlu dikhawatirkan, dijawab pada malam harinya dengan datangnya banjir di beberapa daerah di Jakarta. Di Jakarta Utara di Kelapa Gading ketinggian air mencapai dua meter sehingga sebanyak 914 jiwa harus diungsikan di kantor Kodim 0502 Jakarta Utara, di Cilincing 996 jiwa mengungsi di dua gedung sekolah dasar. Sungai Sunter telah membuat warga di sekitarnya mengungsi yaitu di Cipinang sebanyak 1.500 orang dan di Cilincing sebanyak 420 kepala keluarga mengungsi. Sementara itu kali Pesanggrahan meluap sehingga warga di IKPN Bintaro harus kebanjiran. Air masuk rumah dengan ketinggian 75 centimeter. Sungai Grogol di Jakarta bagian barat mengakibatkan banjir di Palmerah dan Kebayoran Lama. Penduduk di Cilincing mengeluhkan bahwa banjir yang terjadi di daerahnya karena pembangunan Cakung Drain yang sedang berlangsung, mengakibatkan sungai Sunter meluap. Menurut warga baru kali ini warga kebanjiran.

¹⁴⁷ Sinar Harapan; 21 Pebruari 1983

¹⁴⁸ Antara 24 Januari 1981

...di Cilincing ketinggian air mencapai satu meter. Penduduk yang ditampung di sekolah mengatakan banjir kali ini baru pernah terjadi mencapai satu meter. Tahun 1976 pernah banjir tetapi segera surut. Seorang ibu Ny Pani mengatakan selama 10 tahun baru pernah kebanjiran. Kini bersama suaminya ditampung di gedung sekolah SD Inpres. Mereka yang diungsikan membawa semua barang-barang alat-alat dapur, pakaian termasuk juga ternak ayam. Di gedung itu mereka tidur di meja sekolah. Sungguhpun demikian mereka kelihatannya masih belum tenang, karena air mulai mencapai lantai teras gedung sekolah. Sejumlah pemuda AMPI aktif membantu menggunakan perahu karet. Sementara genangan air cukup tinggi para petugas atau pekerja di proyek Cakung Drain tetap sibuk dengan tugas mereka. Sejumlah ibu-ibu mengutarakan banjir yang menimpa Cilincing dipengaruhi pembangunan saluran raksasa itu.¹⁴⁹

Banjir yang terjadi di daerah Cilincing selain disebabkan oleh curah hujan dan air laut yang pasang. Di pantai Cilincing, Kosambi serta Kalibaru perahu-perahu yang ditambat di pantai itu terombang-ambing akibat gelombang besar. Pada banjir 23 Januari 1981, di Jakarta Timur daerah yang dilanda banjir adalah Cipinang dan daerah Sunter. Sedangkan daerah Jakarta Barat yang dilanda banjir adalah Jati.¹⁵⁰

Pada akhir bulan Desember 1981, Presiden Soeharto mengadakan liburan ke Bali dan memperingati ulang tahun perkawinannya yang ke 34 di Istana Tampak Siring. Tetapi sepulang dari liburan, Presiden disibukkan dengan banjir yang melanda Jakarta. Banjir kali ini telah mempengaruhi pasokan bahan bakar minyak dan listrik. Untuk itu Presiden bersama Gubernur DKI, sepulang dari liburan langsung mengadakan peninjauan ke lokasi banjir dengan memantau dari udara dengan menggunakan helikopter PUMA milik TNI AU. Dalam peninjauan tersebut Presiden memerintahkan agar segera diambil langkah-langkah penting untuk mengatasi kelangkaan BBM akibat Plumpang terendam banjir.¹⁵¹

¹⁴⁹ Kompas; 24 Januari 1981

¹⁵⁰ Kompas; 24 Januari 1981

¹⁵¹ Jurnal Ekuin; 31 Desember 1981 dan Sinar Harapan 29 Desember 1981

Gambar 34: Presiden Soeharto Didampingi Ibu Tien Soeharto Melihat Peta Lokasi Banjir Tahun 1981



Presiden Soeharto dan Ny. Tien Soeharto Selasa pagi (28 Desember 1981) dengan helikopter meninjau genangan air akibat hujan dan air kiriman yang melanda wilayah DKI Jakarta, sebelum meninjau Presiden mendengar penjelasan Gubernur DKI Tjokropranolo dan Kopro Banjir DKI Martsanto (paling kiri) yang dilengkapi dengan peta daerah banjir.

Sumber: Sinar Harapan; 29 Desember 1981

Banjir pada akhir 1981 diawali pada tanggal 24 Desember 1981. Daerah yang dilanda banjir di Jakarta Barat karena meluapnya Cisadane adalah Kelurahan Kedoya, Kembangan, Cengkareng, Kapuk dan Bojong Indah dengan ketinggian 75 – 100 centimeter. Selain itu kompleks Hankam Slipi, Palmerah, Kembangan. Wilayah Jakarta Pusat Kwitang, Gunung Sahari, RSAL Bendungan Hilir, Jakarta Timur akibat kali Sunter dan kali Cipinang meluap yaitu daerah Cipinang, Cipinang Muara, Jatinegara Kaum, sedangkan Ciliwung membanjir daerah Kampung Melayu, Bidara Cina. Kali Angke meluap membanjiri daerah Pesing, Jelambar, Kedoya, Rawa Buaya dan Krendang. Jakarta Selatan daerah Tebet, Karet, Pondok Karya, Warung Buncit, Lenteng Agung. Pada banjir ini telah terjadi

ketegangan antara Gubernur Cokropranolo dengan Bupati Tangerang mengenai dibuka tidaknya pintu air Tangerang pada 26 Desember 1981. Namun hal ini dibantah oleh Kepala Humas DKI yang menganggapnya sebagai konsensus.¹⁵² Banjir yang parah di daerah Pluit disebabkan pompa air Pluit tidak berfungsi, sehingga air yang masuk waduk meluap akibatnya kecamatan Penjaringan terendam.

Pompa Pluit sejak pukul 10.00 sampai 15.30 sama sekali tak berfungsi karena listrik padam. Air waduk meluap, lalu berbalik ke arah selatan yang mengakibatkan seluruh daerah Penjaringan terendam total. Air dari kanal di samping Pakin (Pasar Ikan) terus mengalir tapi mengalami kesulitan masuk ke waduk. Kanal ini selesai dibangun Pemda DKI awal tahun ini. Menurut seorang pejabat Kecamatan Penjaringan, luapan air dari kanal semakin besar sekitar pukul 13.00 setelah tanggul kanal yang ada di wilayah RW 07 bobol, sampai pukul 16.30, air semakin tinggi sehingga sampah dan potongan kayu meluap ke jalan raya sampai di RS Universitas Atmajaya... genangan air di kecamatan Penjaringan sampai Senin sore menyatu dengan air yang merendam kompleks pemukiman mewah Pluit. Sementara itu empang di pinggir jalan menuju perumahan nelayan Muara Angke sudah menyerupai laut.¹⁵³

Akibat banjir sekitar 112 gardu jaringan listrik PLN distribusi Jakarta Raya dan Tangerang terpaksa dipadamkan. Daerah yang mengalami pemadaman adalah Jakarta Utara Kampung Warakas dan sekitarnya, Jakarta Selatan Bendungan Hilir, Karet, Palmerah, Slipi, Bintaro, Kebayoran Lama, Pondok Karya, Kemang dan sekitarnya, Jakarta Pusat Pulo Mas, Cempaka Putih, Kwitang dan sekitarnya, Jakarta Barat Tanjung Duren, Pesing Koneng, Jelambar, Kali Jodo, Teluk Gong, Muara Kapuk, Tegal Alur dan lain-lain.

Selain itu distribusi bahan bakar mengalami hambatan. Hampir di setiap pompa bensin terjadi antrean panjang mobil untuk mengisi bahan bakar. Untuk menghindari pembelian berlebihan setiap kendaraan hanya dibatasi boleh membeli bensin 20 liter. Untuk itu polisi disiapsiagakan di pompa-pompa bensin. Untuk mengatasi kekurangan bahan bakar minyak di Jakarta akibat depo Plumpang

¹⁵² Sinar Harapan; 29 Desember 1981

¹⁵³ Kompas; 29 Desember 1981

kebanjiran, Pertamina mengalihkan pengambilan BBM dari Tanjung Priok, sedangkan depo-depo lainnya seperti Merak dan Balongan di Jawa Barat diusahakan untuk menunjang kekurangan BBM. Meskipun sudah diusahakan pengalihan pengambilan bahan bakar ke Tanjung Priok kekurangan bensin masih terjadi, karena depo Plumpang jauh lebih besar kapasitasnya dibandingkan depo Tanjung Priok. Selain itu depo Tanjung Priok juga harus melayani Purwakarta dan Sukabumi.¹⁵⁴

Di daerah Cengkareng akibat banjir, pabrik juga tutup. Jalur transportasi yang semestinya melalui Cengkareng dialihkan melalui Kebayoran Lama sehingga terjadi kemacetan di daerah Kebayoran. Selain itu ongkos naik angkutan karena harus melalui Kebayoran Lama dan Ciledug ongkosnya naik dua kali lipat yaitu Rp 500.¹⁵⁵

Dalam tahun 1981, Jakarta tidak seperti biasanya dilanda banjir sebanyak dua kali yaitu pada 23 Januari dan 24 Desember 1981. Banjir pada akhir tahun lebih besar dengan jumlah orang yang harus mengungsi selama tahun 1981 sebanyak 200.000 orang dan 9 orang meninggal. Banjir pada awal tahun telah mengakibatkan kematian 3 orang dan 28 ribu orang harus mengungsi. Sangat ironis memang padahal pada bulan 29 Agustus 1981, Presiden Soeharto baru saja meresmikan pemakaian waduk Pluit yang menurut catatan dilengkapi dengan sistem polder untuk mengendalikan genangan air di daerah Krukut, Cideng, Jatibaru, Taman Sari, Mangga Besar, Kali Beton dengan luas wilayah 2.500 hektar dengan batasan hujan periode 25 tahun. Biaya pembangunan waduk adalah 950 juta rupiah untuk pembebasan tanah dan biaya konstruksi dari pemerintah Belanda sebesar 40.4 juta gulden. Selain itu juga dilakukan pengerukan kali Ciliwung, Cideng, Krukut, Grogol, Kaliduri, Setiabudhi, Ciliwung Kota, Manggarai dan dibangun 3 pompa baru di daerah Setiabudhi, pengerukan waduk Grogol, pembersihan Kali Mampang.¹⁵⁶

Awal tahun 1983, warga DKI Jakarta disodori masalah tahunan di bulan Januari, bulan yang hujan sehari-hari. Selain itu, kepastian harga BBM yang naik

¹⁵⁴ Kompas; 29 Desember 1981

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Sinar Harapan; 30 Desember 1981

lagi untuk kesekian kalinya, pada tanggal 7 Januari 1983 jam 00.00 yang didahului oleh antrian panjang mobil-mobil di pompa bensin sekitar 24 jam sebelumnya. Maka berita menyolok lainnya adalah penertiban gubug-gubug liar di atas permukiman tuna wisma di bantaran sungai yang menjadi tontonan ribuan mata dari atas jembatan Tanah Tinggi Tanah Abang menghiasi harian ibukota.¹⁵⁷

Selain itu masalah tahunan yaitu datangnya musim hujan yang berakibat banjir juga menjadi pokok kegiatan pemerintah DKI. Untuk menghadapi banjir pemerintah mempersiapkan dengan baik. Sejak 1 Desember 1982, pemerintah mendirikan Posko Banjir bertempat di Balai Kota jalan Merdeka Selatan sebagai pusat, sedangkan di kantor walikota serta Suku Dinas Pekerjaan Umum untuk wilayah kota. Posko ini bekerja selama 24 jam. Tugas Posko adalah memonitor seluruh pertolongan yang dibutuhkan masyarakat akibat banjir yang menyangkut bahan makanan, dapur umum, kesehatan dan pengungsian. Sedangkan posko PU bertugas memonitor masalah debit air dan akan memberikan pertolongan secara teknis bagi warga yang kebanjiran. Posko banjir dalam kerjanya dibantu oleh dinas teknis lainnya seperti Dinas Kebakaran yang menyangkut penyediaan perahu karet, penyaluran perahu karet, PDAM menyangkut penyaluran air minum, DLLAJR menyangkut pengaturan lalu lintas.¹⁵⁸

Pada tanggal 3 Januari 1983, telah terjadi hujan lokal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Akibat hujan tersebut para pedagang di daerah Glodok kebanjiran. Banjir di Glodok terjadi karena air yang meluap dari selokan-selokan yang mampet tidak mampu mengalirkan air dengan lancar. Selain itu juga diperparah oleh ulah pemborong bangunan Kios Gantung di Glodok yang tidak bertanggung jawab. Pemborong dalam membangun, bahan-bahan yang digunakan telah menutup saluran yang ada disekitar Glodok, sehingga air meluap di kanan-kiri jalan dan masuk ke kios-kios pedagang dan City Hotel kebanjiran juga.¹⁵⁹

Pada bulan Januari 1983, banjir di Jakarta lebih disebabkan oleh luapan akibat hujan lokal dan kondisi saluran yang tidak bagus. Pada hari Jumat tanggal 6 Januari hujan turun di Jakarta sejak pagi. Akibatnya daerah sekitar Monas

¹⁵⁷ Berita Buana; 12 Januari 1983

¹⁵⁸ Sinar Harapan; 4 Januari 1983

¹⁵⁹ Sinar Harapan; 4 Januari 1983

kebanjiran. Akibat banjir, jalanan di sekitar Thamrin, Jalan Merdeka Selatan, Jalan Sabang terendam air. Akibatnya kantor posko banjir Merdeka Selatan yang dipersiapkan untuk memantau banjir dan memberi pertolongan pertama bagi korban banjir terendam air.

Di Balaikota khususnya pada gedung DPRD, air nampak cukup tinggi karena sistem saluran air yang kurang berfungsi dengan baik menyebabkan kantor2 pemerintah termasuk ruang Humas ikut terembesi air. Bahkan kantor Posko induk pengendalian banjir yang bertempat di bawah ruang sidang DPRD DKI Jakarta juga tidak luput dari sasaran air. Ini baru berita, komentar seorang karyawan, karena kantor Posko banjir juga kebanjiran. Air yang menggenang ini oleh para petugas dipompa untuk dialirkan ke got Jln. Merdeka Selatan.¹⁶⁰

Curah hujan pada 14 Januari 1983 di Manggarai 60 milimeter, Karet 48 milimeter. Pada waktu itu hujan selama 2 jam lebih dan merata. Akibatnya terjadi banjir di daerah Jakarta, Monas juga, Kebon Nanas, dan lain-lain kebanjiran.¹⁶¹ Ketika banjir terjadi biasanya banyak orang menawarkan jasa mendorong mobil jasanya rata-rata 1.000 rupiah. Setiap mobil didorong sekitar 3 – 4 orang.¹⁶² Sejak tahun 1980-an kebiasaan membantu mendorong mobil yang mogok karena kebanjiran dengan meminta uang mulai menjadi kebiasaan. Untuk menolong warga masyarakat yang akan melewati jalan-jalan di ibukota agar tidak terjebak banjir, maka *Kompas* menurunkan peta jalan-jalan yang sering dilanda banjir, dengan harapan pengendara mobil menghindari daerah-daerah tersebut.

Banjir di Jakarta yang disebabkan oleh banjir kiriman dan hujan lokal rupanya baru terjadi pada pertengahan Januari 1983. Pada tanggal 20 – 21 Januari misalnya telah terjadi hujan di beberapa wilayah di Bogor dan Jakarta yang berlangsung hampir selama 8 jam. Akibatnya kali Cisadane, Ciliwung dan sungai-sungai lainnya meluap. Daerah Jakarta Barat yang terkena banjir akibat luapan Cisadane merendam daerah Rawa Buaya, Kedaung Kali Angke. Di wilayah Rawa

¹⁶⁰ Antara; 7 Januari 1983

¹⁶¹ Kompas; 15 Januari 1983

¹⁶² Antara; 20 Januari 1983

Buaya air masuk rumah setinggi 1 meter, dengan wilayah banjir sekitar 20 hektar. Akibatnya sebanyak 1.635 jiwa harus diungsikan ke daerah rel kereta api.¹⁶³ Jakarta Timur akibat luapan dari Kali Cipinang daerah yang dilanda banjir adalah Cipinang Besar, Jatinegara, di daerah ini mengakibatkan sebanyak 1.468 kepala keluarga rumahnya kebanjiran setinggi 40 centimeter. Karena dianggap belum berbahaya warga belum bersedia mengungsi. Di wilayah Jakarta Utara, banjir terjadi di Pejagalan, Pademangan, Kapuk Muara, Sungai Bambu dan Penjaringan. Selain itu daerah yang dilanda banjir adalah Rawamangun, Tanah Abang.¹⁶⁴ Sungai Cipinang menurut Martsanto sulit untuk dikendalikan karena permukiman padat dan daerah aliran sungai sempit.

Martsanto menyatakan tidak yakin, masalah banjir akan diselesaikan bersamaan dengan selesainya masa masterplan DKI 1965 – 1985. Masalah kenaikan jumlah penduduk di samping dana yang kurang sangat mempengaruhi lambatnya penanganan soal banjir...kalau dana cukup sesuai dengan perkiraan tahun 1973, banjir di Jakarta akan tertangani dalam waktu 20 – 25 tahun... dana besar baru mulai diterima Proyek Pengendali Banjir sejak lima tahun terakhir. Walaupun dana dari pemerintah cukup besar tetapi jumlah pos pengeluaran paling tinggi adalah untuk ganti rugi. Tahun ini dari dana yang tersedia 8 milyar, untuk ganti rugi tanah penduduk saja sudah menelan lima milyar...¹⁶⁵

Rupanya banjir di Jakarta tidak selalu terjadi pada bulan Januari sampai Pebruari, karena pada 13 Maret 1983, telah terjadi banjir di beberapa wilayah Jakarta. Banjir kali ini lebih disebabkan karena Ciliwung meluap. Daerah yang banjir diantaranya daerah Cawang, Kebon Nanas, Jakarta Pusat. Di Jakarta Barat daerah tergenang air adalah daerah Grogol. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak luput dari banjir.

...di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, air yang menggenang itu bukan saja terdapat di halaman gedung, tetapi juga masuk ke ruang sidang. Akibat masuknya air ke ruang sidang, terpaksa sidang yang sedang berjalan dihentikan oleh hakim yang memimpin sidang. Para pengunjung yang kebetulan berada di Pengadilan tersebut terpaksa menghindar ke lantai atas

¹⁶³ Suara Karya; 24 Januari 1983

¹⁶⁴ Antara; 23 Januari 1983

¹⁶⁵ Kompas; 15 November 1983

pengadilan yang berlantai dua tersebut. Tapi tak urung para karyawan yang ada di kantor tersebut dibuat sibuk menyelamatkan surat-surat yang ada di lemari. Dua hakim wanita terkurung di ruangnya ketika air masuk ke ruang hakim. Mereka terpaksa menaikkan kaki ke kursi agar tidak basah oleh air yang kotor kecoklat-coklatan.¹⁶⁶

Pemerintah DKI Jakarta untuk memberikan pertolongan kepada warga yang kebanjiran, pada anggaran belanja daerah (APBD) tahun anggaran 1983, disediakan dana 6,2 milyar rupiah untuk mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan banjir. Proyek tersebut meliputi pembersihan saluran, sungai, perawatan pompa air di pintu air, waduk, pembebasan tanah dan perbaikan drainase kota. Pembebasan tanah diperuntukkan proyek sodetan sungai Grogol - sungai Sekretaris di Pesing, dan pemasangan pompa air di Siantar.

Anggaran sebesar 6,2 milyar rupiah berasal pemerintah pusat dan bantuan Jepang. Menurut Ir. Martsanto (lulusan UGM), Jakarta tidak akan kebanjiran walaupun turun hujan lokal yang lebat akhir-akhir ini. Perkiraan ini didasarkan pada pengalaman selama bulan April yang tak pernah banjir. Banjir setempat mungkin saja timbul, namun dapat cepat ditanggulangi. Karena saluran yang ada cukup mampu menampung air hujan. Tetapi harus diakui Sungai Sunter merupakan sungai yang sulit dikendalikan, upaya menormalisasi sungai belum dapat dilakukan karena sepanjang tepi sungai padat penduduk, jadi sulit pembebasannya.¹⁶⁷

Pendapat Martsanto ini diperkuat dengan telah selesainya 8 buah pembuangan utama yaitu Kali Angke, Muara Karang, Pompa Pluit, Marina di Ancol, Muara Sentiong, Muara Kali Sunter, Cakung Drain, serta Cengkareng Drain. Selain itu sungai Cakung yang berkelok-kelok juga sudah diluruskan. Begitu juga saluran Buaran yang disalurkan ke Cakung Drain sudah dapat mengalirkan air dengan lancar.¹⁶⁸

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Ramona Ginting (Kepala Humas Pemda DKI) selain itu juga akan diadakan pengerukan pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa untuk mempertahankan kedalaman pelabuhan dan alur pelayaran.

¹⁶⁶ Suara Karya; 14 Maret 1983

¹⁶⁷ Kompas; 30 April 1983

¹⁶⁸ Kompas; 9 November 1983

Di areal Tanjung Priok akan dikeruk sekitar 700.000 meter kubik lumpur sehingga pelabuhan diharapkan akan memiliki kedalaman 8 – 11,5 meter. Untuk proyek ini dianggarkan Rp 533.213.000 sedangkan di areal pelabuhan Sunda Kelapa akan dikeruk sekitar 230.000 meter kubik lumpur untuk kedalaman 3 – 4 m dengan anggaran 240.500.000.¹⁶⁹

Pada bulan November 1983, pemerintah DKI menyiapkan langkah-langkah bagi penanggulangan banjir, karena menurut perkiraan jawatan Metereologi curah hujan mulai banyak pada pertengahan November dan Desember. Pemerintah DKI menyiapkan perahu karet sebanyak 32 buah, 4 helikopter, karung pasir, ambulance dan petugas Puskesmas. Sekitar 2000 orang petugas disiapkan untuk menghadapi banjir, sedangkan bahan makanan disiapkan 50 ton¹⁷⁰. Daerah rawan diperkirakan terletak di Pondok Karya, Grogol, Bintaro, Cipinang, Palmerah, Kompleks Hankam Slipi, Jalan Sabang Air Mancur.¹⁷¹ Menurut Mucrodji setiap tahun rata-rata jumlah korban akibat banjir sebanyak 400.000 jiwa. Banjir di Jakarta akan timbul jika terjadi akumulasi banjir kiriman, hujan lokal yang deras serta terjadi pasang air laut. Hal ini pernah terjadi tahun 1980. Jika ketiga hal itu terjadi dalam satu waktu maka kemungkinan membebaskan banjir sudah tidak mungkin, jalan satu-satunya adalah mengungsikan penduduk. Dalam menanggulangi banjir maka diatur dengan sistem piket selama 24 jam. Mulai 1 Desember 1983, Gubernur mengeluarkan instruksi Surat Instruksi Gubernur No. 208/-1.792/XI/1983 tanggal 7 November 1983. Dalam instruksi ditetapkan bahwa piket banjir dalam keadaan siaga penuh mulai akhir Desember 1983. Apabila sebelum tanggal tersebut hujan lebat terus menerus dan mengakibatkan banjir besar maka keadaan siaga penuh bisa dimajukan¹⁷². Dalam keadaan bencana atau gawat, rakyat butuh didampingi umaroh atau pemimpin pemerintahan yang dapat memutuskan suatu tindakan untuk mengatasi keadaan. Demikian kata Wagub Haki Chourmain dalam mengadakan kunjungan dalam rangka meninjau persiapan banjir di DKI. Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur mengadakan kunjungan ke seluruh tempat-

¹⁶⁹ Antara; 30 April 1983, Merdeka 30 April 1983

¹⁷⁰ Berita Buana; 10 November 1983

¹⁷¹ Antara; 8 November 1983

¹⁷² Suara Karya; 12 November 1983

tempat persiapan banjir. Kunjungan diikuti Ir. Martsanto, Karo Ketertiban DKI Susdaryono, Kabag Bencana Alam Muchroddi Sutomo, Ka Urusan Bansos Akmal Achmad dan sejumlah staf. Dalam kunjungan yang berlangsung dari jam 09.00 – 19.00 dilakukan di Posko Jakarta Pusat, DPU Jatibaru, Jakarta Barat, Pintu Air Daan Mogot, Cengkareng Drain, Pintu Air Teluk Gong, Pasar Ikan, Cilincing, Jembatan Sukapura, Sungai Landak, Cakung Drain, pintu air Bekasi, dan kali Cipinang Sunter¹⁷³. Secara rata-rata menurut Akmal masing-masing wilayah kota disediakan 15 ton beras atau 400 gram/hari/jiwa selama 5 hari, uang lauk pauk Rp 125/hari/jiwa selama 5 hari dalam 1 Desember harus siap.¹⁷⁴

Pada bulan Januari 1984 dalam wawancara dengan wartawan *Sinar Harapan*, Martsanto kepala Proyek Pengendali Banjir Jakarta dengan rasa optimis mengatakan bahwa tahun 1983 adalah tahun keberhasilan dalam penanganan banjir. Terbukti pada bulan Januari 1984, meskipun hujan mengguyur Jakarta dan Bogor cukup deras ternyata tidak terjadi banjir di Jakarta.¹⁷⁵

Seolah menjawab optimisme Kepala Proyek Pengendali Banjir Martsanto, pada tanggal 8 Januari sampai 9 Januari 1984 telah turun hujan cukup deras. Menurut catatan posko banjir, di pintu air Depok ketinggian air 190 centimeter, Manggarai 790 centimeter, Karet 500 centimeter, Pulogadung 260 centimeter, Sunter 340 centimeter dan Pesanggrahan 100 centimeter. Daerah di beberapa wilayah di Jakarta dilanda banjir. Di Jakarta Timur Kampung Melayu, Bidara Cina, Cipinang, Pulo Gadung, Cawang, Kayu Putih, Kramat Jati dan lain-lain ketinggian air di perkampungan setinggi 75 centimeter, di Jakarta Barat di daerah Palmerah, Jati Pulo, Jembatan Besi II, Pondok Bandung ketinggian air di perkampungan setinggi 30 – 50 centimeter. Selain itu Mangga Dua, Kebon Sayur, Kebun Bawang juga tergenang karena dalam waktu bersamaan terjadi laut pasang, Jakarta Selatan daerah yang dilanda banjir adalah Kebun Baru, Pal Merah, dan Kota Bambu.¹⁷⁶ Banjir 1984 mengakibatkan 39.726 orang terkena banjir. Untuk

¹⁷³ Berita Buana; 18 November 1983

¹⁷⁴ Berita Buana; 18 November 1983

¹⁷⁵ Sinar Harapan; 8 Januari 1984

¹⁷⁶ Suara Karya; 9 Januari 1984

meringankan kesusahan warga yang terkena banjir, Dinas Sosial memberi bantuan sebanyak 57 bal atau 3.420 kilogram beras dan uang lauk pauk Rp. 300.000.¹⁷⁷

Meskipun banjir yang terjadi telah mengakibatkan banjir di beberapa wilayah, menurut pengamatan Proyek Pengendali Banjir Jaya masih belum merupakan banjir yang sebenarnya. Karena daerah yang selama ini menjadi langganan banjir masih aman, seperti Thamrin, Mampang, Palmerah masih aman.

...rumah-rumah penduduk ibukota yang tergenang air minggu lalu wajar, karena umumnya rumah-rumah itu dibangun di bantaran kali yang dicadangkan untuk menampung air luapan kali...genangan air yang melanda rumah-rumah daerah itu bukan banjir yang sebenarnya. Sebab pada waktu banjir seperti Mampang, Bintaro, Thamrin, Kompleks Perhubungan, Palmerah sama sekali aman. Untuk wilayah utara genangan air terjadi selain akibat luapan kali, juga bersamaan itu air laut pasang yang setiap waktu akan terjadi hingga bulan Maret. Daerah-daerah yang selalu tergenang air akibat air laut pasang meliputi Kalibaru, Kebon Bawang, Kebon Sayur dan Mangga Dua Utara...genangan air di Pondok Bandung itu merupakan kejadian rutin. Sebab daerah itu memang legok dan kalau air banjir kanal naik pasti tergenang. Pintu klep yang dibangun pada tahun 1918 kini sudah rusak dan fungsinya bukan sebagai pengering. Untuk mengeringkan air di daerah itu harus dipompa. Soal genangan air seperti yang diberitakan di surat-surat kabar memang ada, namun genangan itu terjadi hanya di daerah-daerah bantaran kali. Karena itu genangan air kemarin belum dapat dikatakan sebagai banjir...¹⁷⁸

Dengan demikian terjadi perbedaan persepsi bahwa jika air yang menggenang itu tidak melanda penduduk yang mempunyai permukiman yang legal tidak dianggap sebagai banjir. Untuk pemberian bantuanpun harus selektif, bagi warga yang terkena banjir dan tinggal di bantaran sungai tidak berhak mendapat sumbangan.

¹⁷⁷ Merdeka; 10 Januari 1984

¹⁷⁸ Suara Karya; 11 Januari 1984

Gambar 35: Genangan Air di Palmerah tanggal 15 Mei 1984



Sumber: *Kompas*; 17 Mei 1984

Pada tahun 1984, ternyata banjir yang melanda Jakarta datang dua musim. Dalam banjir yang terjadi pada bulan Mei dianggapnya sebagai salah musim. Banjir terjadi karena Kali Grogol, Kali Sekretaris meluap. Daerah yang terparah dilanda banjir pada hujan salah musim ini, diantaranya Slipi, Kampung Sawah, Palmerah, Tanjung Duren, Duri Kepa, Rawa Buaya serta Jelambar. Di Palmerah ketinggian air mencapai dua meter, selain kerusakan rumah, banjir di Palmerah juga mengakibatkan satu orang tewas.

Seorang anak lelaki bernama Arief 12 tahun penduduk RT 013/12 Kelurahan Palmerah Selasa malam ditemukan tewas tenggelam. Saat itu korban mau menyelamatkan diri, namun ketika menyelamatkan diri, namun ketika melintasi genangan air cukup dalam dia terperosok dan hanyut. Korban berhasil diangkat setelah beberapa penduduk nekad menyelam dengan bantuan penerangan senter dan petromak.¹⁷⁹

Daerah Tomang dalam tahun 1983 terendam banjir beberapa kali. Bahkan pada hujan yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 1983 yang mestinya musim kemarau,

¹⁷⁹ *Kompas*; 17 Mei 1984

karena hujan deras terjadi di Jakarta, daerah Palmerah kebanjiran. Sekitar 10 RW di Palmerah tergenang air setinggi 60 centimeter.¹⁸⁰

Menurut pengamatan penduduk, banjir yang terjadi karena pembangunan tol Tomang dan sudetan Kali Sekretaris dan Grogol yang tertunda-tunda.

...sebagian penduduk Kampung Sawah dipinggir mulut jalan Tol Tomang mengungsi di kaki lima rumah yang terdapat di pinggir Jalan S. Parman. Beberapa diantaranya menggunakan pos polisi setempat untuk tempat mengungsi. Sejumlah anak tampak tidur pulas di kaki lima kantor itu... genangan air cukup tinggi di kawasan Kampung Sawah sebagai akibat sulitnya air mengalir ke hilir. Ini disebabkan pembuatan jalan tol yang merupakan tanggul penahan air dari arah tol yang belum diaspal ini nampaknya tidak mampu mengalirkan debit air yang cukup besar sehingga genangan air di Slipi serta Kampung Sawah tidak segera habis..penyebab lain genangan cukup tinggi dan lama di daerah Tanjung Duren, Duri Kepa, serta Jelambar karena Kali Grogol dan Kali Sekretaris tidak mampu menampung debit air... Kopro Banjir DKI Jakarta yang bertanggungjawab atas proyek ini sudah punya dana yang cukup, tapi sampai sekarang belum diketahui jelas mengapa pembangunan sodetan belum tuntas...¹⁸¹

Hal yang sangat meresahkan warga meskipun saluran Cengkareng sudah selesai ternyata tidak menjamin bebas banjir di daerah paling dekat sekalipun, pada hujan 16 Mei 1984, banjir melanda daerah Tanjung Duren dan Slipi. Perumahan Green Ville masih juga kebanjiran seperti tahun-tahun sebelumnya. Semula penduduk di kawasan Jakarta Barat, mereka sudah lega dengan selesainya Cengkareng drain tetapi harapan itu pupus ketika banjir muncul banyak penduduk bertanya apa fungsi saluran Cengkareng.¹⁸²

Menanggapi banjir yang terjadi pada bulan Mei 1984, pihak Kopro Banjir mengatakan bahwa hal ini disebabkan hujan salah musim. Selain itu dikarena tanggul di kali Sekretaris jebol untuk mengatasinya harus dilakukan penyedotan air. Selain itu karena adanya pasang air laut dan Teluk Gong tidak berjalan lancar karena tersumbat sampah. Dengan masih adanya banjir ini berarti saluran Cengkareng belum bekerja maksimal.

¹⁸⁰ Antara 14 Agustus 1984

¹⁸¹ Kompas; 17 Mei 1984

¹⁸² Sinar Harapan; 17 Mei 1984

Sementara itu, banjir yang terjadi pada bulan Mei hampir melanda seluruh Jakarta. Daerah yang terkena banjir diantaranya Tanah Abang, Kampung Melayu, Slipi, Cempaka Putih dan lain-lain. Menurut warga dalam hari tersebut warga Jakarta disusahkan oleh dua peristiwa yang sangat penting yaitu banjir besar yang salah musim dan meninggalnya tokoh Orde Baru Ali Murtopo. Menurut warga hal-hal yang tragis akan muncul secara bertubi-tubi. Banjir salah musim ini mengakibatkan 4 orang meninggal dan 300 rumah kebanjiran.¹⁸³

Dalam bulan September 1984, giliran Jakarta Timur yang dilanda banjir. Daerah Kramat Jati, Kampung Makasar, Halim, Kebon Pala penduduknya harus mengungsi karena Kali Cipinang dan Kalibaru meluap. Ketinggian air yang masuk rumah penduduk antara 50 centimeter - 1,2 meter. Penduduk yang mengungsi mencapai 1.500 orang. PMI Cabang Jakarta Timur segera menghimpun dana dan menyampaikan sumbangan beras 700 kilogram, 30 kilogram ikan asin, 300 kilogram susu bubuk dan 130 mie bungkus yang diberikan langsung oleh Wakil Walikota Jakarta Timur.¹⁸⁴

Sejak memasuki tahun 1980-an wilayah yang dilanda banjir di Jakarta semakin ke selatan. Selain itu jika selama ini banjir banyak disebabkan oleh meluapnya sungai Ciliwung, sejak tahun 1970-an sungai yang meluap tidak hanya Ciliwung tetapi hampir seluruh sungai yang ada di Jakarta. Seperti yang terjadi pada banjir tahun 1985. Banjir pada bulan Januari 1985 telah mengakibatkan warga yang mengungsi sebanyak 30.000 orang. Banjir pada tanggal 15 dan 16 Januari 1985, di daerah Jakarta Barat yang meliputi Pluit, Kapuk Muara, Pekojan, Taman Sari, Harapan Mulia dan Penjaringan. Bahkan karena RS Atmajaya tergenang banjir sampai 1 meter, pasien yang ada harus diungsikan ke RS Carolus yang berjarak 15 kilometer. Pasien yang dipindahkan terdiri 10 pasien bedah, 9 pasien penyakit dalam, 7 pasien anak-anak, 11 bayi, 12 pasien bagian wanita, 2 pasien kebidanan dan seorang pasien kelas II. Karena sebagian pasien masih diinfus maka pemindahan dari kamar perawatan ke truk yang jaraknya 15 meter dilakukan dengan hati-hati. Perawat naik perahu sambil menggendong bayi,

¹⁸³ Berita Buana; 18 Mei 1984

¹⁸⁴ Antara; 20 September 1984

sedangkan polisi dari gegana mendorong dari belakang. Selain itu daerah yang terkena banjir adalah Gunung Sahari, Pekojan, Tambora, Taman Sari, Cipinang Sunter, Petojo, Tomang, Jatipulo dan lain-lain.¹⁸⁵

...satu persatu pasien itu dibawa dari ruang perawatan yang tergenang air, dengan menggunakan 10 perahu karet bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI dan Satgas Gegana Polri. Selanjutnya dengan truk ABRI yang bak belakangnya tertutup mereka diangkut ke RS Carolus yang jaraknya 15 km...pengungsian pasien itu terpaksa dilakukan karena genangan air akan mempengaruhi penderita sakit. Di samping itu tempat-tempat untuk perawatan dan bantuan perawatan seperti dapur tidak berfungsi lagi karena genangan air masih mencapai 1 meter. Pasien yang dipindahkan terdiri 10 pasien bedah, 9 pasien penyakit dalam, 7 pasien anak-anak, 11 bayi, 12 pasien bagian wanita, 2 pasien kebidanan dan seorang pasien kelas II...para perawat naik kedalam perahu karet sambil menggendong bayi atau menjaga pasien dewasa. Anggota Sat Gegana Polri yang bertugas tidak ikut naik ke dalam perahu tetapi mendorong atau menyeret perahu tersebut. Dengan cara demikian pasien dan perawat di dalamnya aman tidak terpengaruh oleh riak air dalam pelayaran lewat lorong-lorong rumah sakit sampai jalan raya. Air yang menggenangi sekitar RS Atmajaya kelihatan sangat kotor, bercampur sampah dan berbau menusuk hidung.¹⁸⁶

Penyebab banjir di daerah Pluit disebabkan 2 dari 4 pompa air di waduk Pluit mengalami kerusakan. Pompa yang ada sudah berumur 20 tahun yang bekerja 24 jam dalam 3 shift. Belum lagi gangguan plastik, enceng gondok yang menutup permukaan waduk. Enceng gondok yang menutup permukaan sungai an waduk, maka daya kerja pompa terhambat, karena tertutup oleh kotoran sehingga pompa air mudah terbakar. Selain itu sampah plastik yang sering menyumbat saluran dan got.¹⁸⁷

Untuk menekan kerugian akibat banjir maka barang-barang kebutuhan sehari-hari dijual murah, antara lain beras dijual 50 rupiah perkilo gram, tetapi barang-barang seperti ikan asin, terigu, gula dan lain sebagainya dibuang begitu

¹⁸⁵ Suara Karya; 17 Januari 1985

¹⁸⁶ Suara Karya; 17 Januari 1985

¹⁸⁷ Sinar Harapan; 27 Januari 1985

saja, sedangkan kacang-kacangan, kemiri lada masih bisa dikeringkan dengan cara dijemur. Sementara itu pabrik-pabrik kursi terpaksa menghentikan karyawannya.

Para pedagang dan perusahaan yang terkena banjir, yang paling parah adalah warung² di beberapa pusat perbelanjaan karena sebagian barang² dagangannya terendam air. Barang² itu umumnya merupakan kebutuhan sehari² seperti beras, ikan asin, terigu, gula kacang merah/ijo dan lain sebagainya. Untuk menekan kerugian mereka menawarkan dengan harga² yang cukup menarik bagi barang² yang masih bisa dijual. Seperti beras mereka tawarkan dengan harga Rp 50/kg. Rupanya dengan harga yang cukup rendah itu peminatnya agak lumayan, jenis kacang²an, kemiri, lada masih bisa dikeringkan dengan jalan menjemurnya di panas matahari. Begitu pula dengan produsen berbagai jenis kaki kursi dari logam yang hingga kini pabriknya masih terendam air. Padahal pemiliknya sudah berusaha mengeringkan dengan pompa air, namun banjir juga belum surut.¹⁸⁸

Masa banjir tahun 1985 berlangsung sampai bulan Pebruari. Pada banjir bulan Pebruari 1985, dimulai dari meluapnya sungai Pesanggrahan. Banjir kiriman dari wilayah Bogor melalui sungai Pesanggrahan Ciputat Jakarta Selatan sehingga melanda ratusan rumah di kompleks real estate Cireundeu Permai, Asrama Pusdik Polwan Ciputat, Pondok Pinang khususnya di kompleks IKPN dan kompleks Deplu. Menurut keterangan seorang penduduk daerah Cireundeu tidak pernah banjir, ini merupakan banjir pertama sejak 30 tahun terakhir. Menurut penduduk, banjir kali ini disebabkan kecerobohan pemilik proyek karena tidak melakukan pengamanan dengan membuat dam di tepi Pesanggrahan yang mengalir hanya 200 meter dari kompleks. Kompleks yang luasnya 2 hektar terdapat 100 rumah semua tenggelam. Beberapa orang tampak panik melihat rumahnya terendam. Sementara seorang ibu berteriak-teriak minta tolong sekaligus menanyakan apakah anak-anaknya sudah diselamatkan.

Selama ini daerah itu tidak pernah banjir. Seorang penduduk mengatakan ini merupakan banjir pertama selama 30 tahun terakhir. Penduduk yang tidak mau disebutkan namanya itu menganggap banjir tersebut disebabkan kecerobohan pemilik proyek karena tidak melakukan pengamanan dengan membuat dam di tepi kali Pesanggrahan yang mengalir hanya 200 m dari

¹⁸⁸ Business News; 18 Januari 1985

kompleks. Sedang lokasi kompleks agak rendah. Di kompleks seluas 2 ha itu terdapat rumah 100 buah lebih. Semuanya sudah dihuni dan sebagian besar terendam. Beberapa ibu dan anak yang baru pulang menjadi panik melihat rumahnya sudah terendam. Mereka nampak kebingungan tidak tahu apa yang akan diperbuat. Sementara seorang ibu berteriak-teriak minta tolong sekaligus menanyakan apakah anak-anaknya sudah diselamatkan. Beberapa penghuni terutama anak muda tampak mengungsi di atas atap pergola diperumahan tergolong mewah itu.¹⁸⁹

Hal yang sama juga terjadi di Asrama Polwan Ciputat. Komplek Polwan yang paling parah adalah Blok C dan D. Dari 48 pintu asrama 20 diantaranya terendam air. Para siswa polwan bekerja keras menyelamatkan barang-barangnya. Mereka melepaskan roknya dan hanya mengenakan celana pendek agar gesit untuk memindahkan barang-barangnya karena genangan air yang sudah menyentuh dada. Selain itu Sertu Wahyudin, Sertu Amirullah, dan Sertu Waruwu ketiganya penghuni asrama Pusdik Polwan, mereka bertiga menempati sebuah asrama terletak di belakang kali Pesanggrahan. Semua ijazah mereka hancur terendam air.

Para siswa Polwan tampak bekerja keras menyelamatkan barang apa saja yang bisa diselamatkan dari rumah yang dilanda banjir kiriman tersebut. Mereka melepaskan rok dan hanya mengenakan celana pendek agar lebih gesit menyeruak genangan air yang sudah sampai menyentuh dada. Mereka meletakkan barang dan peralatan rumah tangga di jalan-jalan kecil atau di rumah yang selamat dari banjir...sertu Wahyudin, Sertu Amirullah dan Sertu Waruwu, ketiganya penghuni Asrama Pusdik Polwan Ciputat. Mereka bertiga menempati sebuah rumah di lingkungan asrama tersebut terletak di belakang Kali Pesanggrahan. Semua ijazah mereka hancur terendam air. Ketik terjadi banjir kiriman, mereka bertiga masih dinas di Pusdik Polwan... ketiganya kecewa setelah pulang dari dinas, mengetahui ijazah mereka hancur dalam air karena terendam air.¹⁹⁰

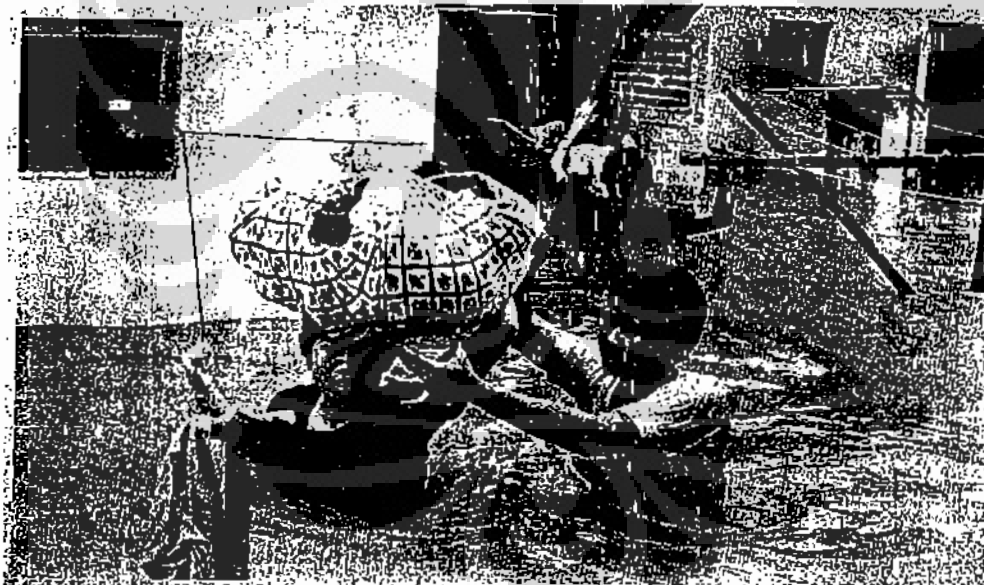
Selain itu di daerah Bintaro Kebayoran Lama, sekitar 500 rumah juga terendam air. Di daerah Bintaro akibat meluapnya sungai Pesanggrahan, sebanyak 616 kepala keluarga mengungsi. Selain Bintaro, daerah Ulujami, Cipulir, Pondok Pinang dan Pesanggrahan. Menurut Lurah Bintaro A Cholik Muchli kompleks

¹⁸⁹ Suara Karya; 7 Pebruari 1985

¹⁹⁰ Suara Karya; 7 Pebruari 1985

Ikatan Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) yang paling parah, banjir di daerah ini lebih besar dari banjir 1981. Asnawi pedagang di pasar Situgintung warga kelurahan Bintaro RT 012/RW 01 bersama istrinya terpaksa mengungsi. Menurutny baru kali ini air masuk ke rumahnya dengan cepat dan deras dan menenggelamkan rumahnya. Sanadi warga RT 13/RW 01 mengeluhkan tidak adanya perhatian dari pemerintah. Sanadi mengatakan bahwa sampai sekarang ini belum ada bantuan dari pihak manapun, dia berharap setelah banjir surut mendapat bantuan penyemprotan hama pada rumah-rumah yang tergenang untuk menghindari muntaber.¹⁹¹ Akibat luapan sungai Pesanggrahan sekitar 12.000 orang harus mengungsi.

Gambar 36: Polwan yang Kebanjiran di Asrama Ciputat



Asrama siswa Pusdik Polwan di Ciputat yang terletak di pinggir Kali Pesanggrahan kebanjiran. Nampak 2 orang calon Polwan sedang mengangkat harta bendanya sementara beberapa temannya berusaha masuk ke asrama untuk menyelamatkan barang-barang miliknya yang masih bisa diselamatkan.

Sumber: Sumber Karya; 7 Februari 1985

¹⁹¹ Sinar Harapan 7 Februari 1985

Selain akibat luapan Pesanggrahan, daerah lain yang dilanda banjir adalah Kampung Melayu, Bidara Cina, Tebet, Bukit Duri, Setiabudhi, Cawang. Sementara itu di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara hanya terjadi genangan kecil. Di Jakarta Barat akibat meluapnya sungai Cisadane antara lain Semanan, Kosambi, Rawa Buaya, Kedaung, Kebun Jeruk, Rempoa, Jumlah pengungsi pada tahun 1985 akibat korban banjir adalah 14.000 orang.¹⁹²

Menanggapi adanya rumah yang hanyut, Muchroji Sutomo mengatakan bahwa rumah-rumah yang hanyut adalah gubug yang dibangun di pinggir sungai.

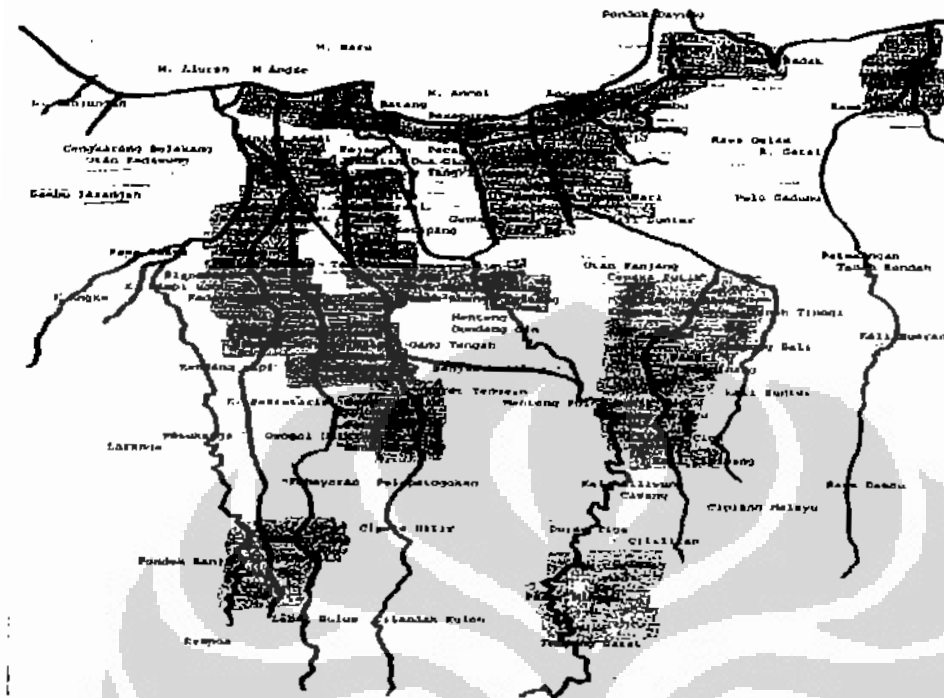
Semua daerah yang banjir itu berada di sekitar kali Pesanggrahan Jakarta Selatan dan Kali Ciliwung di Jakarta Timur dan Selatan. Bahkan sebagian rumah yang kebanjiran berada di bantaran kali yang mestinya bebas dari bangunan. Lima rumah yang hanyut di Pondok Pinang disebutkan dibangun di bantaran Kali Pesanggrahan. Rumah-rumah itu dikategorikan sebagai rumah sederhana. Yak gubuglah kata Muchroji Sutomo.¹⁹³

Banjir yang terjadi antara tahun 1980- 1985 ada kecenderungan semakin luas, bahkan daerah-daerah yang selama ini tidak pernah banjir dilanda banjir, seperti daerah Ciputat. Selain itu, ada kecenderungan pejabat terkait menyalahkan pihak lain dengan mengatakan bahwa kawasan yang dilanda banjir adalah daerah bantaran sungai, padahal kalau dilihat tidak semuanya benar. Misalnya Asrama Polwan Ciputat, Perumahan di daerah Cirendeu, pembangunannya tentu menggunakan persyaratan atau ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

¹⁹² Suara Karya; 8 Pebruari 1985

¹⁹³ Suara Karya; 8 Pebruari 1985

Gambar 37: Peta Wilayah Banjir Tahun 1980 – 1985



Diolah dari koran-koran tahun 1970 - 1985

Berdasarkan peta tersebut maka selama periode 1970 – 1985 daerah banjir yang melanda Jakarta semakin meluas, tidak hanya di pusat kota tetapi daerah-daerah pinggiran seperti Ciputat, Pasar Minggu, Tanjung Barat juga dilanda banjir. Dari sungai-sungai besar yang ada di Jakarta selama periode tersebut turut memperbesar aliran banjir. Kalau sebelumnya sungai Pasanggrahan, Sekretaris, Cipinang belum begitu besar peranannya dalam memperbesar aliran banjir, sejak tahun 1970-an kedua sungai sudah mulai menunjukkan kegagasannya. Hal ini sangat berkaitan dengan pembangunan perumahan di sekitar daerah aliran sungai Pesanggrahan, Krukut, Sekretaris dan Cipinang.

Selain itu dari segi temporalnya, jika diperhatikan maka sejak 1911 – 1985, siklus banjir semakin cepat dari rentang waktu antara 5 – 10 tahun, kecenderungannya semakin pendek bahkan hampir setiap dua tahun. Selain wilayah yang dilanda banjir semakin luas sesuai dengan wilayah perluasan kota.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama terjadi banjir hal yang sangat dirasakan masyarakat adalah kesusahan yang berakibat pada terganggunya aktifitas harian. Selama itu jumlah masyarakat yang harus mengungsi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 22: Pengungsi 1911 – 1985 dan Jumlah Korban Meninggal

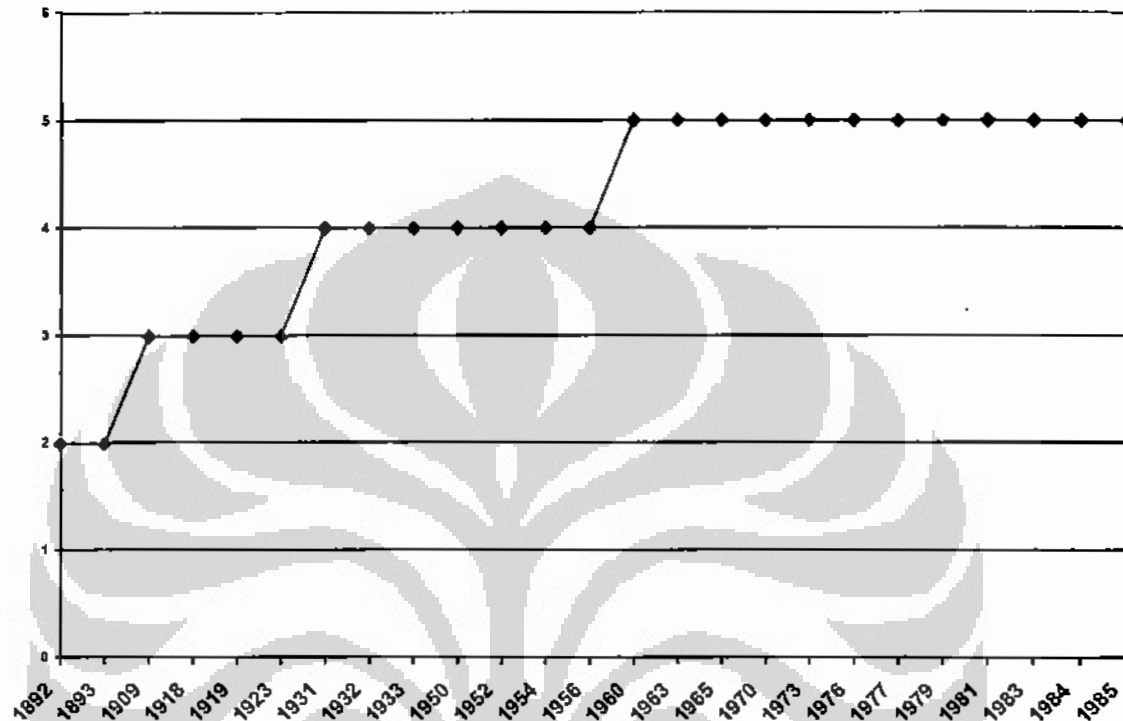
| No | Tahun | Jumlah Pengungsi | Jumlah Korban Meninggal |
|----|-------|---|--------------------------------|
| 1 | 1918 | 200 orang | |
| 2 | 1923 | Tidak diketahui | |
| 3 | 1930 | Tidak diketahui | |
| 4 | 1932 | Tidak diketahui | 3 orang |
| 5 | 1950 | 3000 keluarga | |
| 6 | 1963 | 433.812 | |
| 7 | 1976 | 800.000 di seluruh Indonesia orang yang kebanjiran 1,5 juta | 8 orang |
| 8 | 1977 | 126.000 (khusus Jakarta Utara) | |
| 9 | 1979 | 714.861 | 9 orang meninggal 20 hilang |
| 10 | 1980 | 400.000 | |
| 11 | 1981 | 200.000 | 11 meninggal |
| 12 | 1983 | 1.635 + 1.468 kk | |
| 13 | 1984 | 39.726 | 4 orang meninggal |
| 14 | 1985 | 14.000 + 30.000 | |

Sumber: Diolah dari Koran-koran 1911 - 1985

Jika dilihat dari tabel tersebut, maka jumlah pengungsi sangat bervariasi jumlahnya. Pada tahun 1976 dan 1979 merupakan jumlah pengungsi paling banyak, karena wilayah yang dilanda banjir mengalami perluasan.

Selama hampir satu abad siklus banjir besar semakin pendek dari 10 tahunan pada tahun 1893 sampai 1918, kemudian setelah tahun 1960-an kala ulang banjir menjadi 5 tahunan dan setelah tahun 1970-an kala banjir berubah menjadi 2 tahunan. Seperti terlihat dari grafik berikut ini:

Tabel 24: Grafik Peristiwa Banjir 1892 - 1985



Sumber: Diolah berbagai Sumber Koran dan Majalah

Jika dilihat dari grafik di atas maka pada tahun 1893 merupakan banjir besar pertama. Banjir besar berulang kembali pada tahun 1918. Hal ini terjadi karena pembangunan sarana pengairan belum selesai. Pada tahun 1932 ternyata terjadi banjir besar lagi. Ini artinya bahwa kanal banjir hanya mampu mengatasi banjir selama 10 tahun, terbukti setelah itu terjadi banjir besar. Selama periode 1933 – 1950, masalah banjir tidak bisa kami ketahui dengan pasti karena terbatasnya sumber. Hal ini terjadi karena pada masa tersebut berita tentang pembangunan sarana pengairan sangat terbatas. Pada tahun 1932, pemerintah kolonial berkonsentrasi untuk mengatasi krisis ekonomi, setelah itu pemerintah kolonial sibuk dengan persiapan perang dunia II. Pada tahun 1945 - 1950-an, pemerintah Indonesia sibuk mempersiapkan prasarana fisik berupa pembangunan gedung pemerintah dan perumahan pegawai. Setelah tahun 1950-an, masalah

banjir mulai dirasakan mengganggu kenyamanan penduduk. Hal ini terbukti mulai banyaknya berita-berita tentang banjir di Jakarta. Pada periode 1950 - 1985 kecenderungan banjir semakin sering terjadi dan wilayah yang dilanda banjir mengalami perluasan. Perluasan banjir ke wilayah barat semakin luas, terutama aliran sungai Grogol dan Pesanggrahan. Pada periode 1970 - 1985 wilayah yang dilanda banjir semakin luas, bahkan daerah-daerah selatan Jakarta seperti Ciputat, Cirendeu, Pondok Karya, Bintaro sudah mulai dilanda banjir karena luapan sungai Pesanggrahan. Aliran Sungai Krukut di daerah hulu seperti daerah Tebet, Kemang mulai kebanjiran. Di daerah Jakarta Timur, banjir yang disebabkan aliran Sungai Cipinang semakin meluas seperti daerah Cawang, Cipinang. Sementara itu Sungai Ciliwung yang merupakan sungai utama penyebab banjir di Jakarta, sejak tahun 1960-an alirannya menyebabkan banjir di daerah Bidara Cina, Kampung Melayu, Pasar Minggu dan Bukit Duri.

Bab V
Pengendalian Banjir Tahun 1911 – 1965
Dari Kanal Banjir Kali Malang Hingga Rencana WJ. Blommestein

Pengendalian banjir di Batavia secara struktural mulai ditangani sejak pemerintah kolonial membentuk *Waterstaat van Batavia* tahun 1854. Perkembangan selanjutnya terjadi ketika Pemerintah pada tahun 1918 membentuk *Departement van Burgelijke Openbare Werken* (BOW).¹ Adapun tugas BOW yang kaitannya dengan masalah air adalah pemeliharaan sungai, situ, genangan yang bersifat alami, pembuatan, pemeliharaan dan pengelolaan pengairan (*bevloeiings*), bangunan penahan air, terusan (*kanalen*) untuk pelayaran sungai, pekerjaan lain yang menyangkut ilmu bangunan air, dan pembuangan air untuk kepentingan umum². Pada tahun 1933 BOW digabung menjadi *Department van Gouvernment Bedrijven* dengan nama *Departement van Verkeer en Waterstaat* (Departemen Perhubungan dan Perairan)³. Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya *Departement van Verkeer en Waterstaat* secara struktural dibantu oleh bagian (*afdeeling*), sub bagian (*onder afdeeling*) dan dinas (*diens*). Di tingkat propinsi terdapat *Provinciale Waterstaat Dienst*. Untuk wilayah Batavia berada di bawah kewenangan *Provincie Van West Java* (Propinsi Jawa Barat). Untuk daerah di bawahnya yang otonom yang dinamakan *staatsgemeente* (kotapraja) seperti Batavia masalah pekerjaan umum dilaksanakan oleh *Gemeentewerken*.⁴

Terbentuknya kotapraja Batavia masalah banjir mulai ditangani secara struktural. Terbukti dari berbagai sumber yang ada menunjukkan bahwa masalah

¹ Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1919; No. 2

² *Ibid.*,

³ Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1933; No. 509

⁴ Mutohar Sudiro; *Profil dan Struktur Fungsi Pekerjaan Umum Dari Masa ke Masa*; Jakarta: DPU; 1986, hal. 14

banjir mulai dirasakan mengganggu kenyamanan hidup di Batavia. Hal ini seiring dengan pertumbuhan kota Batavia.

5.1 Pembangunan Drainase di Perkampungan Jembatan Lima, dan Blandongan Tahun 1910

Selama beberapa tahun daerah Jembatan Lima, Blandongan dan Klenteng selalu kebanjiran. Daerah ini merupakan daerah aliran sungai Krukut. Untuk menanggulangi banjir di daerah ini maka pemerintah menganggarkan biaya perbaikan sebesar f 25.000 yang dananya disediakan oleh Kotapraja. Anggaran ditetapkan pada bulan September 1910⁵. Tetapi setelah dikerjakan selama hampir 5 bulan berdasarkan laporan Ketua Dewan Kotapraja (*De Voorzitter*) Canne kepada Residen Batavia ternyata menghabiskan biaya f 28.306,615 dan f 3.306,615 sehingga terjadi pembengkakan hampir f 6.600.⁶

Daerah-daerah sekitar Jembatan Lima, Blandongan dan Klenteng menurut laporan Canne merupakan pusat perdagangan Batavia Lama tetapi kondisi sungai yang ada sangat tidak mendukung untuk pengangkutan dan pengiriman barang-barang. Selain itu kondisi sungai dan kanal-kanal yang saling sejajar tidak menguntungkan bagi kondisi perkampungan. Sungai Grogol pada waktu banjir airnya dialirkan ke kanal Krukut melewati kampung-kampung ini, selain airnya cukup deras, tetapi juga digunakan sebagai tempat pembuangan kotoran dan sampah penduduk yang langsung dialirkan ke laut. Kondisi yang buruk di kampung-kampung ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal akibat banjir telah mengakibatkan pengendapan lumpur yang menghambat perdagangan dan perkapalan, bahkan kapal tidak bisa lagi masuk ke kanal yang ada. Padahal pada masa lalu kanal Krukut dapat dilayari dengan perahu. Tetapi kondisinya semakin dangkal karena dipenuhi lumpur, tanaman air dan

⁵ Besluit; 10 September 1910; No. 9

⁶ Gemeente Batavia; No. 794/66 tanggal 1 Pebruari 1913

digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Untuk mengalirkan air dari sungai Grogol maka perlu dibuka pintu air ke kanal Krukut. Kondisi kampung di daerah ini digambarkan sebagai suatu permukiman yang padat, dilewati saluran galian yang tidak lagi mengalirkan air. Akibatnya perkampungan ini menjadi sumber berbagai penyakit dan bisa menjadi sumber penularannya.⁷

Setelah terjadi pembicaraan antara D. Ouwehand dengan Direktur BOW dan A. Dijkstra yang bertugas untuk menangani masalah pengairan di Batavia maka pemerintah memutuskan bahwa dana f 25.000 akan digunakan untuk mengalirkan air yang berasal dari air limbah rumah tangga dan kotoran ke saluran sehingga tidak terjadi penimbunan kotoran dan mencegah air meluap, kedua; memperdalam dan normalisasi saluran dengan melapisi semen, ketiga; menimbun saluran-saluran, got terbuka yang sudah tidak berguna karena menjadi sarang berbagai penyakit, keempat; meninggikan lahan yang rendah dan rawa-rawa dengan tanah-tanah yang berasal dari saluran-saluran yang diperdalam. Untuk mempercepat proyek maka daerah sebelah timur Kali Krukut atau disebut juga Kali Tanah Abang menjadi prioritas terlebih dahulu. Untuk itu perlu penggalian satu saluran untuk mengalirkan air ke sungai Krukut. Saluran Krendang yang sangat dangkal dan mengambil air terlalu banyak dari Sungai Krukut perlu dinormalisasi dan perlu diatur debit airnya sehingga kapal-kapal bisa melewati Sungai Krukut.⁸

Perbaikan saluran di kampung Klenteng dilakukan dengan memperdalam dan normalisasi dua saluran pembuangan utama, sedangkan satu saluran yang berada di antara dua saluran yang ada ditutup, karena airnya tidak mengalir dan berbau. Saluran Krendang yang dari namanya sudah menunjukkan bahwa daerah ini selalu tergenang air (*krendang*) bahkan dalam musim kemarau sekalipun. Selanjutnya Kampung Jembatan Lima Kulon dan Wetan yang merupakan perkampungan padat, saluran-saluran yang ada dinormalisasi kemudian airnya dialirkan ke *Bacheragracht*. Untuk normalisasi saluran karena mengalami pelurusan maka diperlukan biaya f 2.750 untuk

⁷ Bijlagen 4, Gemeente Batavia; No. 794/66 tanggal 1 Pebruari 1913

⁸ *Ibid.*;

pembebasan tanah. Tanah-tanah yang digali dari pendalaman saluran digunakan untuk menguruk rawa-rawa di daerah Jembatan Lima. Rawa-rawa yang ditimbun tanah, luasnya mencapai 11.200 meter persegi dengan menghabiskan biaya f 7366,98. Untuk memberi kemudahan penduduk dalam mencuci dan mandi di beberapa tempat dalam jarak tertentu dibuat semacam tangga yang dilapis semen.

Tabel 26: Rekapitulasi Proyek dan Pembiayaan Proyek di Jembatan Lima, Blandongan, Klenteng

| Lokasi Proyek | | Kegiatan Proyek | Biaya (f) |
|---|----------|--|-----------|
| Jembatan Wetan | Lima | Normalisasi dan pendalaman saluran Krendang | 3.000 |
| | | Pemerataan tanah, penimbunan rawa dan kubangan | 2.176,725 |
| | | Pembuatan tangga untuk kepentingan mandi, cuci | 1.298,39 |
| | | Pembuatan pintu air sungai Krukut ke saluran Krendang | 749,10 |
| | | Pembebasan tanah, tanaman dan rumah penduduk | 372,30 |
| | | Pembuatan los, pembelian peralatan dan sebagainya | 109,82 |
| | | Jembatan Kulon | Lima |
| Pemerataan tanah, penimbunan rawa dan kubangan | 4.190,26 | | |
| Pembuatan tangga untuk kepentingan mandi, cuci | 2.229,34 | | |
| Pembuatan pintu air berupa palang kayu di muara saluran | 689,60 | | |
| Pembebasan tanah, tanaman dan rumah penduduk | 718,51 | | |
| Pembuatan los, pembelian peralatan dan sebagainya | 197,62 | | |
| Pembuatan riol dari bis beton | 1.443,95 | | |
| Pembuatan got beton menuju saluran Trate | 585,695 | | |
| Blandongan dan Klenteng | | Pembuatan dua got beton di Blandongan termasuk pengerukan pasir saluran yang ada | 4.301 |
| | | Pendalaman saluran Toasibio dan pemasangan tanggul bambu dan pengangkutan tanah galian ke tempat-tempat rendah | 2.373,76 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| | Pendalaman saluran Glodok dan penimbunan saluran Klenteng | 850,13 |
| | JUMLAH SELURUHNYA | 28.302,615 |

Sumber: *Bijlagen 3; Gemeente Batavia, No. 794/66; tanggal 1 Pebruari 1913*

Dipasangnyanya saluran beton dan saluran tertutup maka air dapat mengalir dengan lancar. Selain itu karena daerah tersebut merupakan daerah rawa-rawa maka disiapkan tempat-tempat penampungan air sementara yang diharapkan dapat meresapkan air ke dalam tanah.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa normalisasi saluran merupakan prioritas utama, karena masalah saluran merupakan masalah pokok dalam kaitannya dengan banjir. Selain itu pemanfaatan tanah-tanah yang diambil dari sedimentasi dan penggalian untuk pengurukan tanah-tanah rendah sangat bermanfaat untuk meninggikan daerah-daerah rendah sehingga perbedaan antara daratan dan aliran sungai menjadi tinggi sehingga jika banjir, air tidak meluap ke perkampungan yang ada.

Karena kekurangan dana maka Ketua Dewan Kota mengirimkan surat untuk minta bantuan keuangan. Surat dikirim kepada Residen Batavia, *Adviseur voor Decentralisatie* (Penasehat Urusan Desentralisasi), *Chef van den Burgelijken Geneeskundigen Dienst* (Kepala Dinas Kesehatan Umum) dan *Directeur van Onderwys en Eeredienst* (Direktur Pendidikan dan Agama). Menanggapi surat yang dikirim kepada dinas-dinas terkait maka dinas-dinas tersebut mengirim surat ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Misalnya Resident Batavia mengirim surat tanggal 17 Pebruari 1913¹⁰; *Adviseur voor Decentralisatie* (Penasehat Urusan Desentralisasi) tanggal 24 Pebruari 1912, Kepala Dinas Kesehatan Umum tanggal 28 Maret 1913 dan Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 16 Agustus 1913. Berdasarkan surat-surat

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Gcwestelijck Bestuur der Residentie Batavia No. 3389/24; tanggal 17 Pebruari 1913; Bijlagen 5*

tersebut kemudian Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan dana tambahan sebesar f3.306,61, yang diambil dana kotapraja.¹¹

Gambar 38: Peta Hasil Pembangunan di Jembatan Lima, Blandongan dan Sekitarnya



Sumber: Bijlagen 3; Gemeente Batavia, No. 794/66; tanggal 1 Pebruari 1913

¹¹ Besluit; 6 September 1913, No. 22

5.2 Kanal Banjir Kali Malang dan Pintu Air Matraman

Menurut Bob Heering dalam tulisannya mengatakan bahwa sebelum dibuat kanal banjir Kali Malang telah terjadi diskusi antara Muhammad Husni Thamrin dan D. Van der Zee.¹² Ketika bertemu dengan Van Der Zee, Thamrin mengemukakan gagasannya tentang pembangunan sebuah kanal besar untuk mengatasi banjir. Pembangunan kanal itu harus menghubungkan sungai Ciliwung dengan sungai Krukut untuk mengatasi banjir yang secara periodik terjadi di pinggiran Batavia. Selanjutnya Thamrin menyarankan Van Der Zee untuk meminta perhatian Dewan Kota agar masalah banjir dan perbaikan kampung segera diperhatikan. Dari pertemuan itu akhirnya Mr. Herman Van Breen diberi tugas untuk membangun fasilitas pengontrol banjir.¹³

Diskusi itu mungkin saja terjadi mengingat kondisi kesehatan penduduk Batavia yang buruk karena terjadinya penumpukan sampah dan kotoran di beberapa saluran sehingga terjadi pengendapan hampir di seluruh sungai. Akibatnya setiap musim hujan tiba, banjir selalu melanda kota. Untuk itu *de Commissie voor den Waterafvoer en Watervoorziening Van Batavia* (Komisi Pengaliran Air dan Penyediaan Air di Batavia) yang terdiri dari Moojen, H. Zaalberg dan Swildens pada tanggal 10 Oktober 1911 menyerahkan hasil kajiannya terhadap sungai-sungai di Batavia kepada Ketua Dewan Kota Canne.¹⁴ Penelitian terhadap sungai-sungai dan endapan juga terkait dengan semakin luasnya pembangunan perkebunan teh di Bogor, sehingga air yang akan mengalir ke Batavia semakin besar. Selama satu abad sejak 1830-an telah terjadi penggundulan hutan secara terus menerus, sehingga penutup tanah secara

¹² D. Van der Zee pernah menjabat sekretaris Gemeente Batavia. Zee pernah menulis buku dalam bentuk stensilan dengan judul "*Mensen in milieu uit mijn leven*", sekitar tahun 1920-an, tetapi sampai sekarang penulis belum berhasil menemukan buku tersebut.

¹³ Bob Heering; *Mohammad Hoesni Thamrin: Tokoh Betawi, Nasionalis Revolusioner Perintis Kemerdekaan*; Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hal 63.

¹⁴ Gemeenteraad Batavia 14 Oktober 1911; No. 87

alamiah menjadi berkurang. Selain itu perluasan kota ke Menteng dan Gondangdia, sebagai daerah permukiman baru sehingga harus terbebas dari banjir.¹⁵

Setelah tim mengadakan penelitian hampir satu tahun, maka hasil kajian tersebut oleh Canne dikirim kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 4 Desember 1911 dengan harapan mendapat perhatian dari pejabat yang berwenang agar masalah pengaliran air di Batavia diperhatikan.¹⁶ Sementara itu BOW yang berwenang dalam penanganan masalah pengairan menindaklanjuti hasil kajian komisi tersebut dengan menunjuk Herman Van Breen seorang insinyur hidrologi untuk menyusun perencanaan pengairan di Batavia.¹⁷

Hasil penelitian yang dilakukan komisi meliputi sungai-sungai di Jakarta diantaranya Ciliwung dengan luas daerah aliran sungai 366 kilometer persegi sampai batas *afdeelling* kota, Sungai Krukut dengan daerah aliran sungai sekitar 112 kilometer persegi sampai pintu air di Kampung Karet, Sungai Angke dengan luas aliran 506 kilometer persegi sampai pintu air Pesing, sungai Cidani dengan luas aliran 1.009 kilometer persegi sampai saluran Mookervaart di Tangerang. Selain itu juga dilakukan penelitian terhadap Sungai Grogol antara Krukut dan sungai Kali Angke; sungai Menteng (Cidang) antara Krukut dan Ciliwung; sungai Sunter; Sungai Putus (Tepango) di sebelah timur sungai Gunung Sahari; dan Sungai Bambu. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa banjir Sungai Ciliwung sering melanda daerah di sebelah timur Ciliwung, sedangkan daerah sekitar Kampung Lima, Blandongan adalah daerah rawa-rawa. Selain itu Kanal Priok, Sungai Sunter dan kanal Gunung Sahari mengalami pendangkalan, sehingga kecepatan arus sangat lambat akibatnya kapal mengalami kesulitan untuk melintas.¹⁸

Tim Peneliti memberikan saran-saran perbaikan pengairan kota diantaranya menormalisasi sungai Krukut atau sungai Tanah Abang, yang panjangnya 1.150 meter, dimulai di atas persimpangan Kebon Sirih dan Tanah Abang. Kanal Krukut dari Tanah

¹⁵ RV 2498; 27 Jan 1911, dalam Indeks Folio No. 111, tahun 1911.

¹⁶ Gemeente Batavia tanggal 4 Desember 1911; No. 3963

¹⁷ BOW; 23 Januari 1912, No. 1201/D

¹⁸ MGS/BGS; 12 Februari 1912, No.31

Abang sampai Muara Karang yang panjangnya sekitar 10 kilometer perlu diperluas di beberapa pintu air, karena terjadi pengendapan. Pengendapan pintu air Karet karena biaya perawatan yang sangat rendah yaitu hanya f 75 pertahun. Sementara itu dari perkampungan yang rendah, saluran pembuangan rumah tangga tidak bisa mengalir, misalnya di Molenvliet, seluruh kampung dari Molenvliet Barat, Sawah Besar, Tangki air limbah tidak bisa mengalir ke sungai Krukut. Hal itu juga terjadi di Noordwijk dan Rijswijk air tidak bisa mengalir. Daerah antara Molenvliet sampai Grogol, Grogol sampai *Bacheragracht* yang meliputi kampung Jembatan Lima, Blandongan, Tambora dan Klenteng yang merupakan permukiman padat, air tidak bisa mengalir dengan lancar dan terjadi genangan seperti rawa-rawa. Penelitian hampir dilakukan di seluruh perkampungan di Batavia dimulai dari Kampung Asem Reges, Kebon Sirih, Koningsplein, Pasar Baru, Glodok bahkan sampai Kemayoran dan Kampung Bungur. Daerah-daerah tersebut setiap musim hujan tiba, lebih dari sekali mengalami banjir.¹⁹

Kanal Krukut pada tahun 1901, sebenarnya telah diperbaiki. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upah harian menghabiskan dana sebesar f 2.750. Proyek menyangkut perbaikan tanggul untuk menanggulangi terjadinya perembesan yang terletak sekitar 50 meter di bawah pintu air Karet. Pelaksanaan proyek ini sebagai tindak lanjut perintah Residen Batavia tanggal 30 Mei 1901²⁰. Sebagai kelengkapan proyek untuk pengaturan air di kanal Krukut maka perlu dibangun bendungan permanen yang terletak sekitar 50 meter di bawah pintu air Karet dengan biaya f 6.920 dan f 10 berupa bahan material yang tidak terdapat di gudang pemerintah.²¹

Satu hal yang tidak dilakukan oleh tim peneliti adalah tidak dilakukannya penelitian terhadap rawa-rawa yang menyangkut jumlah dan luas. Di sepanjang Sungai Krukut dan di sebelah timur Sungai Gunung Sahari terdapat rawa-rawa yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Burgelijke der Werken*; tanggal 31 Juli 1901, Nomor 3

²¹ *Besluit* tanggal 9 Agustus 1901; No. 22

pada musim kemarau cepat mengering. Penanganan rawa-rawa ini sangat penting karena untuk mengubah menjadi kawasan permukiman dapat maka dapat ditimbun dengan menggunakan tanah yang diambil dari tanah hasil pengerukan sungai-sungai yang ada. Sebagai contoh *Bacheragracht*, tanah hasil pengerukan digunakan untuk menimbun rawa di belakang rumah sakit Cina, tetapi ini hanya sebagian, selebihnya tanah hasil pengerukan dibuang ke laut mestinya digunakan untuk menguruk rawa-rawa yang ada, selain untuk menghemat biaya, rawa-rawa juga cepat penuh.²²

Berdasarkan penelitian tersebut maka prioritas yang harus dikerjakan adalah pembebasan banjir atau setidaknya untuk melindungi kota terutama dari aliran sungai Ciliwung. Pembuatan alat untuk mengatur debit air aliran anak sungai Ciliwung yaitu di pintu air kanal Prapatan, pintu air di sungai Krukut yang terletak di pintu air Karet, sungai Angke di pintu air Gusti. Selain itu juga penimbunan rawa-rawa di Penjaringan, Roa Malaka, Bungur, Kemayoran dan Gunung Sahari, dan pengangkatan endapan di sungai-sungai dan kanal-kanal yang ada di Batavia.²³

Pada tahun 1913 pemerintah mengadakan penelitian ulang terhadap sungai-sungai yang ada. Untuk tugas ini oleh kepala Dinas BOW Ir. Sluyter diserahkan kepada Ir. Herman Van Breen. Laporan hasil penelitian Van Breen kemudian diserahkan kepada BOW tanggal 16 Juli 1913 dengan nomor surat 255/5. Dalam suratnya tersebut Van Breen membuat usulan untuk pembuatan penggalian banjir kanal dari Matraman sampai Karet. Berdasarkan penghitungannya biaya yang dibutuhkan f 579.300. Usulan kedua adalah pembuatan saluran Cideng dengan proyek terkait lainnya dengan biaya f 182.000. Jumlah sebesar itu juga menyangkut pembuatan jembatan di atas saluran Cideng, pembebasan tanah di Petojo dan Bukit Tanah Abang. Proyek Cideng ini berguna juga sebagai pembagi air di Jatibaru pada sungai Krukut dan pembuangan limbah di Tanah Abang dan Petojo; pembangunan pintu air dari beton berlapis untuk mengalirkan limbah di Sungai Tanah Abang dan saluran Cidang, lima jembatan dari beton di atas kanal Krukut, jembatan Jatibaru,

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Trivelli, Petojo, Chaulan, Ketapang masing-masing sepanjang 16,50 meter dan lebar antar pegangan 5,50 meter, sebuah jembatan tonggak berskrup dengan lebar satu meter di Petojo Ilir dan di Tanah Sereal.²⁴ Penelitian terhadap sungai-sungai untuk kedua kalinya ini dianggarkan biaya sebesar f 17.000, tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata hanya menghabiskan dana f 13.366.²⁵

Berdasarkan penelitian tersebut, pada bulan Agustus 1913, pemerintah memutuskan untuk membangun pintu air Matraman dengan biaya f 275.600, kedua membangun pintu air bolak balik di kampung Gusti sebagai pintu penutup dengan biaya f 43.000, ketiga proyek penggalian sungai Sunter ke laut dengan biaya f 34.000²⁶. Selain itu proyek yang penting adalah pemerintah menyetujui untuk membangun banjir kanal dari Matraman sampai Karet dengan biaya f 574.000 berupa uang dan f 5.300 dalam bentuk material dan saluran Cideng dengan biaya f 179.600 berupa uang dan f 2.400 berupa material. Setelah diputuskan proyek akan segera dimulai²⁷. Jadi sekitar dua bulan setelah pemerintah memutuskan untuk membangun pintu air Matraman, pemerintah baru memutuskan membangun kanal banjir.

Untuk pembangunan sarana pengaliran air di Batavia, Herman Van Breen mengajukan anggaran sebesar f 1.113.200. Jumlah yang diajukan oleh Van Breen menurut BOW terlalu tinggi. Karena biaya untuk perbaikan pengairan sangat minim. Menjawab kritik itu Van Breen mengatakan bahwa biaya tinggi disebabkan karena naiknya upah buruh dan pegawai.²⁸ Untuk memudahkan pengerjaan proyek pengairan, maka pemerintah mengeluarkan rencana induk pembangunan pengairan di Batavia.

Sampai akhir tahun 1913 dari 5 proyek utama yang disetujui, pemerintah telah mengeluarkan biaya masing-masing untuk pembuatan pintu air Matraman sebesar f

²⁴ Verslag Van BOW 1915, hal. 142

²⁵ Besluit; 20 Maret 1913 No. 15

²⁶ Besluit 22 Agustus 1913, No. 9

²⁷ Besluit 21 Oktober 1913; No. 44

²⁸ Departement der Burgelijke Openbare Werken Bijlagen 40.w.o 32 Tickeningen; tanggal 8 October 1913 No. 3

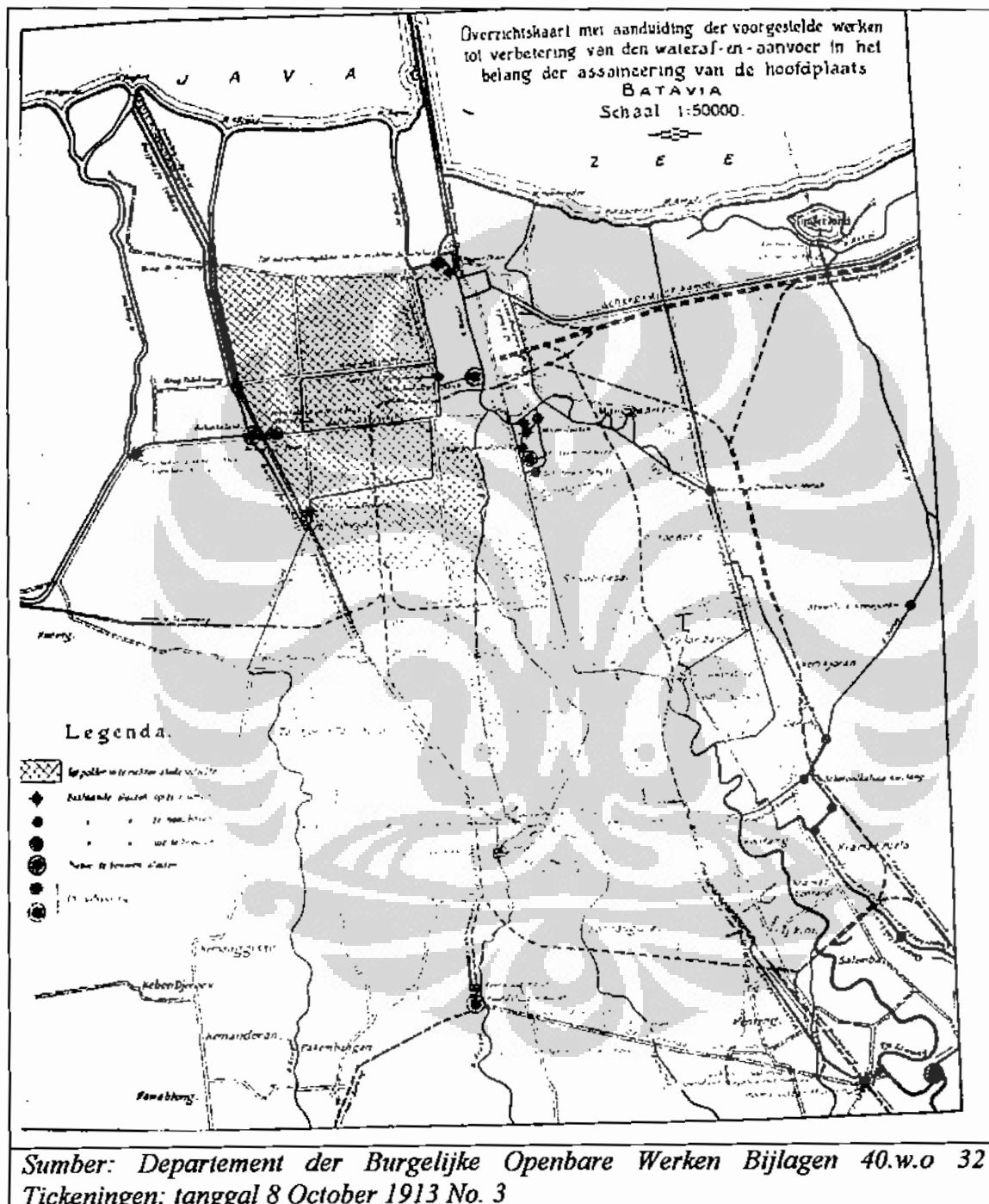
15.788; proyek pintu air Gusti sebesar f 18.286; proyek normalisasi Sunter f 3.750; proyek banjir kanal sebesar 39.596 dan proyek saluran Cideng f 10.506.²⁹

Proyek-proyek yang ada pada tahun 1913, dibedakan atas proyek saluran pembuangan dan pengaliran air permukaan; pengaliran dan pengairan di beberapa kampung dan untuk perkapalan. Khusus untuk proyek saluran pembuangan dan pengaliran air permukaan biayanya ditanggung pemerintah, yang meliputi proyek kanal banjir di Matraman dimulai dari Ciliwung dan bermuara di Sungai Kali Angke mengalir ke laut, dari Karet diteruskan melalui kanal Krukut yang sudah ada. Di sepanjang kanal ini, banjir dari Ciliwung, Sungai Krukut dan Sungai Cideng ditampung kemudian dialirkan keluar kota. Saluran banjir kanal dari Matraman sampai Karet kemudian dikenal sebagai kanal banjir Kali Malang. Tujuan pembuatan kanal ini untuk melindungi daerah Batavia, Menteng, Gambir, Senen, Harmoni, Kota, Pasar Ikan dan Priok.³⁰

²⁹ Verslag Van BOW over het Jaar 1913; Batavia Landsdrukkerij 196; hal. 196.

³⁰ Menurut peta Jayakarta yang dibuat oleh Dr. JW Ijzerman disebutkan kota Jayakarta terbentang dua anak sungai di sebelah utara dan selatan, sebuah anak sungai disebelah barat dan sungai Ciliwung di sebelah timur. Tempat kota dimaksud disekitar Pasar Ikan. Dari kota inilah Jayakarta memekar. Pada tahun 1627 luas kota sudah menjadi tiga kali lipat dan namanya berubah menjadi kasteel Batavia. Parit yang masuk ke Jalan Veteran sampai Gajah Mada berfungsi sebagai saluran penggelontoran. Pada waktu musim hujan biasanya pintu air di Jalan Pintu air (dekat Mesjid Istiglal) ditutup alirannya ke Pasar Baru maka air akan masuk ke saluran di jalan Veteran/Juanda. Pada musim hujan kali Ciliwung meluap, jika pintu air di Masjid Istiqlal ditutup, akan berakibat banjir lebih besar akan terjadi di daerah di atasnya seperti Kalipasir, Cikini dan Menteng, karena itu pintu air tetap dibuka penuh ke Pasar Baru dan Ancol terus ke laut; Sinar Harapan; 7 April 1984

Gambar 39: Rencana Induk Pengairan Batavia 1913

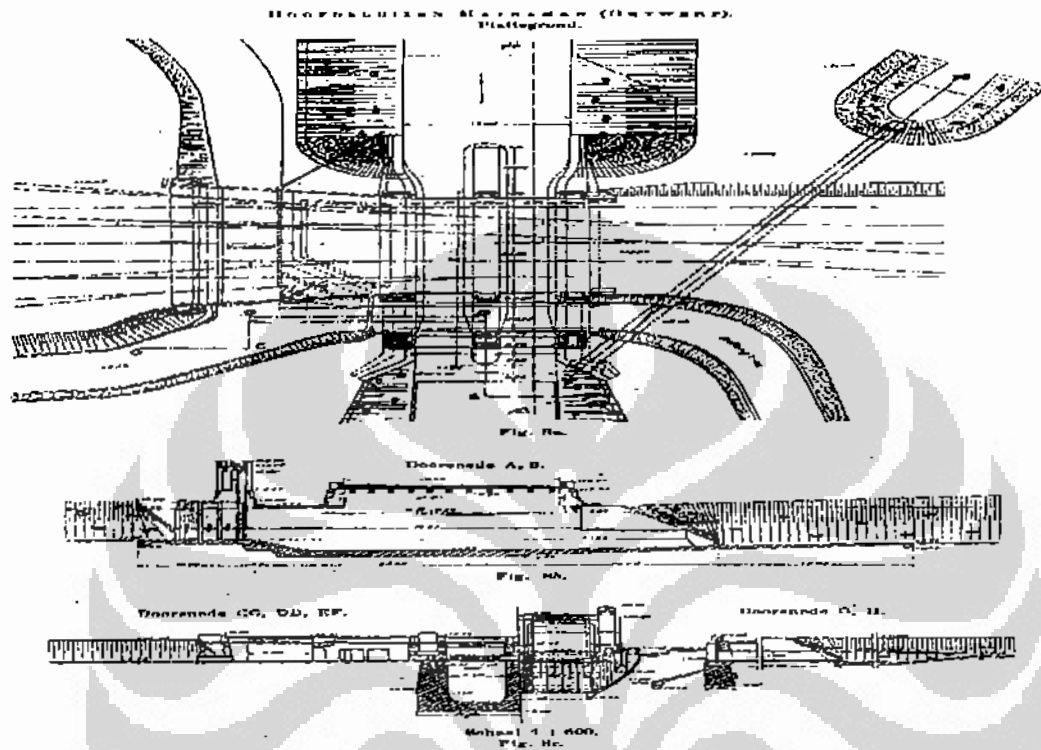


Proyek penggalian kanal banjir Kali Malang seluruhnya dikerjakan dengan tenaga tangan, sepanjang 4,5 kilometer, dengan kedalaman 4 meter sampai 12 meter, di bawah kemiringan antara 1 meter sampai 1,5 meter : 1 meter dan dengan lebar dasar dari 13,50 meter sampai 16 meter. Dalam kaitannya dengan proyek ini, dibangun dua jembatan angkat pada 4 titik tumpu, dengan panjang 32 meter dan lebar antar pegangan 3 meter; jembatan gantung sepanjang 52 meter dan lebar antar pegangan 1,50 meter, sebuah jembatan beton berlapis di atas 4 titik tumpu sepanjang 34 meter dan lebar antar pegangan 5 meter, sebuah pintu air dengan kemampuan maksimal berjumlah 2 meter kubik dan 8 meter kubik perdetik; dan sebuah pintu air untuk pembuangan, dengan kemampuan maksimal 10 meter kubik dan 25 meter kubik perdetik. Proyek kanal banjir Matraman sampai Karet selesai pada tahun 1915³¹. Untuk memperlancar aliran sungai maka perlu dilakukan penggalian saluran Cideng dan saluran pembuangan Tanah Abang dengan biaya f 182.000.³²

³¹ Verslag Van BOW over het jaar 1915; Batavia: Uitgevens, mijpapyrus, 1918, hal 141 - 143

³² BT, 21 Oktober 1913, Nomor 44.

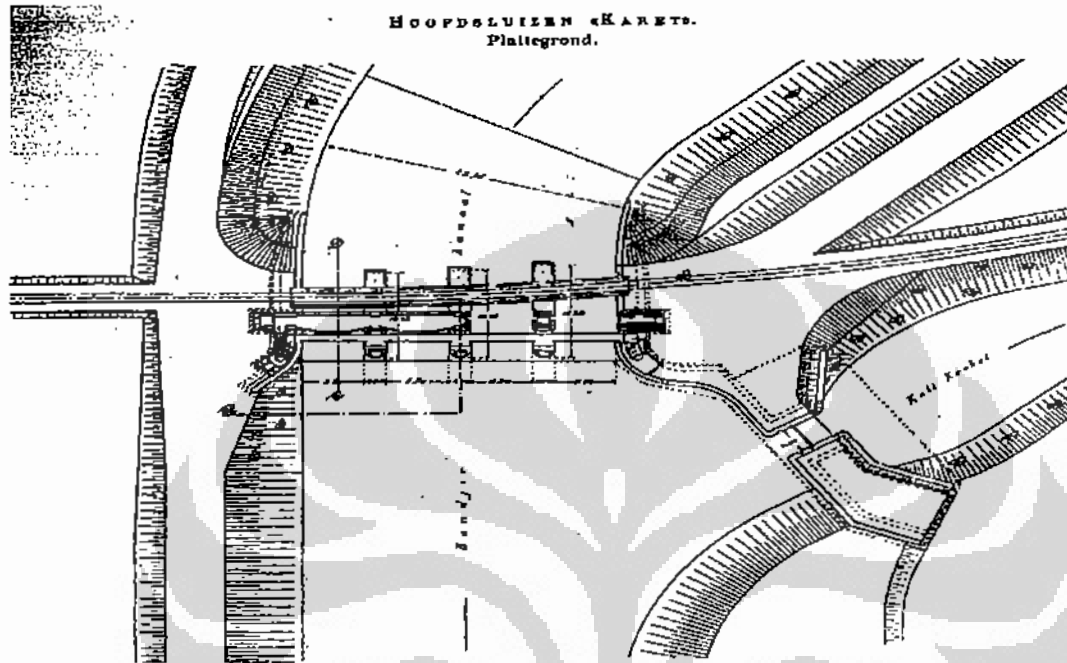
Gambar 40: Perencanaan Pintu Air Matraman Selesai di Bangun Tahun 1919



Sumber: *Sumber: De Ingenieur in Nederlands, No. 26, tahun 1923*

Pintu air Matraman memotong Sungai Ciliwung di daerah Manggarai, satu aliran mengikuti aliran lama ke kota, sedangkan satu aliran dialirkan ke kanal banjir Kali Malang. Di pintu air Matraman air juga dialirkan ke Saluran Surabaya untuk penggelontoran ke kawasan Menteng. Selain itu sebagai kelengkapan banjir kanal Kali Malang, maka perlu dibuat pintu air Karet.

Gambar 41: Rencana Pintu Air Karet



Sumber: De Ingenieur in Nederlands, No. 26, Tahun 1923

Proyek 1913, seluruhnya menghabiskan biaya 3 juta gulden termasuk 2.200.000 atas tanggungan pemerintah pusat sedangkan 800.000 atas tanggungan kotapraja. Seluruh Batavia perbaikan pengairan meliputi wilayah seluas 75 kilometer persegi dengan rata-rata biaya 0,07 per meter persegi. Pada tahun 1913 pembangunan dipusatkan pada pembebasan lahan, pengumpulan material dan meratakan tanah³³.

Secara keseluruhan proyek tahun 1913 adalah untuk penanggulangan banjir, pembuangan air lokal, termasuk karena hujan lokal, saluran limbah, pengaliran air secara gravitasi diberbagai got dalam kota, mempertahankan permukaan air untuk pengairan, perkapalan dan untuk ketersediaan air dalam kasus kebakaran.³⁴

Adapun proyek tersebut terdiri dari proyek pembangunan sarana pengaliran air di antaranya pembangunan kanal banjir Matraman – Karet, pembangunan di sungai

³³ BT; 21 Oktober 1913, Nomor 44

³⁴ Verslag 1913; hal. 198

Grogol sepanjang kanal banjir menuju laut. Penggalian sungai Sunter di timur melalui kolam ikan *Slingerland* ke laut; penggalian sungai Cideng di daerah Petojo, pelebaran sepanjang aliran hilir sungai Krukut; Kali Besar sampai ke kanal pelabuhan; pembuatan pintu air Matraman dan di Karet, pintu air penampungan dan pembagian di aliran hilir Sungai Krukut di Jatibaru dan saluran pembuangan limbah ke bagian hilir yang dikenal sebagai Sungai Tanah Abang, perbaikan pada pintu air di Molenvliet untuk menjaga stabilitas air pelayaran agar air bisa naik; pembagian air di daerah selatan Bogor (*Buitenzorg*) dan ibukota Batavia. Kedua; adalah proyek yang berkaitan dengan pengaliran dan pengairan daerah permukiman. Proyek ini menyangkut masalah pemasangan tanggul di saluran yang ada di bagian barat laut kota, pemasangan saluran limbah, perbaikan dan pelebaran sistem got yang digunakan untuk pembuangan kotoran rumah tangga. Ketiga; adalah proyek yang menyangkut lalu lintas perkapalan.³⁵

Tabel 27: Proyek-proyek Pengairan Tahun 1913

| Nama Proyek | Biaya f |
|--|-----------|
| Pembangunan Pintu Air Matraman | 275.600 |
| Pembangunan Pintu Air Gusti | 43.000 |
| Penggalian Kali Sunter | 34.000 |
| Pembangunan Banjir Kanal Matraman | 579.300 |
| Penggalian saluran Cideng | 182.000 |
| Pembuatan saluran Senen di sepanjang jalan Sebelah timur | 3.302 |
| Pembuatan saluran sepanjang jalan Menteng | 2.733 |
| Betonisasi saluran | 20.416 |
| JUMLAH | 1.140.351 |

Sumber: Diolah dari Verslag West Java 1913

Selain proyek besar tersebut, untuk memperbaiki pembuangan air, di sepanjang tepi timur jalan Senen dibangun sebuah saluran (*riol*) dengan biaya f 3.302. Pembangunan riol di sepanjang jalan Menteng dikeluarkan dana f 2.733. Beberapa got

³⁵ *Ibid.*

terbuka ditutup dengan lapisan beton dan saluran tanah diganti dengan saluran beton. Perawatan saluran permukiman seluruhnya menghabiskan dana f 20.416. Selain itu perawatan terusan dari kanal banjir dari Karet sampai laut yang dikenal sebagai kanal Krukut, pemerintah mengeluarkan dana sebesar f 158 ribu. Dana tersebut termasuk untuk pembebasan lahan.³⁶

Setelah proyek kanal banjir selesai, Herman van Breen sebagai kepala proyek dalam proyek pengairan di Batavia mengusulkan untuk meneruskan proyek kanal banjir kanal dari Karet sampai Muara Angke. Untuk itu Van Breen pada tanggal 10 Mei 1915 dengan nomor 286/5 yang ditujukan kepada Direktur BOW, mengajukan anggaran sebesar f 1.580.000. Jumlah ini naik dari perencanaan yang dibuat pada tahun 1913 sebesar f 554.000. Kenaikan harga yang sangat tinggi menurut Van Breen disebabkan karena kenaikan upah kerja dan beberapa jembatan sudah rusak sehingga perlu pembuatan jembatan baru. Selain itu khusus untuk biaya pembebasan tanah, naik dari rencana semula f 100.000 menjadi f 365.000. Dalam jawabannya kepada Van Breen, Direktur BOW mengatakan bahwa dana dari BOW tidak akan mencukupi karena untuk tahun berjalan dana yang tersedia hanya ada f 500.000 untuk seluruh Batavia. Untuk itu Direktur BOW mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal pada tanggal 26 Oktober 1915.³⁷ Setelah menerima permohonan tersebut Gubernur Jenderal pada tanggal 1 Nopember 1915 menyetujui rencana yang diajukan oleh Herman Van Breen untuk melanjutkan proyek tahap II dari Karet sampai laut sebesar f 1.501.000 dalam bentuk uang dan f 79.000 dalam bentuk bahan bangunan dari negara, dengan ketentuan bahan bangunan yang tersedia di gudang negara.³⁸

Setelah bekerja selama hampir tujuh tahun, proyek banjir kanal dari Matraman sampai laut dan pembangunan pintu air Matraman dapat digunakan pada tahun 1919 yang terlihat dari plakat yang ditempelkan di tembok pintu air Matraman sebagai ungkapan terima kasih dari BOW kepada Ir. Herman Van Breen.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Burgelijke Openbare Werken* tanggal 26 Oktober 1915; No. 1/E

³⁸ *Besluit*; 1 Nopember 1915, No. 1

Gambar 42: Penghargaan BOW kepada Herman Van Breen Yang Berhasil Membangun Pintu Air Matraman dan Kanal Banjir tahun 1919



Plakat ini terdapat di pintu air Manggarai

Pada bulan Pebruari 1918 Batavia dilanda banjir besar. Setelah banjir besar tersebut, aparat pemerintah diingatkan kembali akan pembangunan sarana pengairan yang telah dikerjakan sejak tahun 1913. Untuk itu Walikota Batavia setelah mengadakan rapat pada 18 Pebruari 1918, di mana terjadi perdebatan besar antara anggota Dewan Kota dalam rapat tersebut, akhirnya Walikota mengirim surat permohonan kepada Gubernur Jenderal pada 28 Pebruari 1918 yang isinya meminta agar kanal banjir segera diselesaikan agar pada musim hujan tahun berikutnya tidak terjadi banjir.³⁹ Direktur BOW berdasarkan surat dari Walikota membuat

³⁹ Gemeente Batavia tanggal 28 Pebruari 1918; No. 1150, Bijlagen 881

penghitungan proyek lanjutan kanal banjir. BOW mengajukan anggaran sebesar f 500.000 untuk menyelesaikan kanal banjir kepada Gubernur Jenderal.⁴⁰ Persetujuan terhadap penyelesaian banjir kanal dikeluarkan oleh Sekretaris Pemerintah pada 29 Juni 1918. Untuk itu Dinas Pengairan diperintahkan segera mengerjakan proyek-proyek di kanal banjir.⁴¹

Selain proyek banjir kanal, Van Breen sesuai perintah dari Direktur BOW juga mengadakan perbaikan pengaliran di Cideng yang menyangkut wilayah-wilayah di Weltevreden dan Menteng. Pekerjaan ini dianggap mendesak mengingat musim hujan semakin dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi banjir dan mengganggu kesehatan. Hal ini juga didukung oleh Dr. Vogel dari Dinas Kesehatan yang menganggap proyek ini juga penting. Untuk perbaikan ini dari usulan yang diajukan sebesar f 1.350.000, setelah diadakan penghitungan ulang pada tahun 1919 ditafsir dana yang dibutuhkan sekitar f 3 juta, hal ini disebabkan kenaikan upah buruh dan harga material. Dari dana 1.350.000 terbagi untuk proyek tahun 1916 sebesar f 147.000, proyek tahun 1917 sebesar f 239.500 dan proyek 1919 sebesar f 687.400. Selain itu untuk proyek seluruhnya diperlukan dana sebesar f 1.720.000 jadi seluruhnya berjumlah f 2.793.000 atau f 206.000 lebih tinggi dari perkiraan awal. Proyek yang terletak antara Sungai Krukut dan Sungai Sunter ini merupakan bagian proyek ke-IV dari proyek pengairan di Batavia.⁴²

⁴⁰ Departement Der Burgelijke Openbare Werken tanggal 22 Juni 1918; No. 11347/E

⁴¹ Brief Gouvernements Secretaris, tanggal 29 Juni 1918, No. 1693/III B, agenda 19766/18

⁴² Departement Der Burgelijke Openbare Werken tanggal 12 Nopember 1919; No. 2/C

5.3 Perawatan Sungai dan Pengerukan Sedimentasi

5.3.1 Aliran Sungai Ciliwung

Masalah yang sangat menentukan dalam kaitannya dengan banjir adalah aliran air yang tidak lancar karena terganggu oleh sedimentasi atau pengendapan di beberapa sungai. Sedimentasi selain berasal dari sampah yang mengendap di saluran, juga berasal erosi yang dibawa dari hulu sungai. Masalah sedimentasi ini sudah mulai ditangani sejak tahun 1916. Misalnya pengerukan di saluran Pasar Ikan yang masuk dalam biaya perawatan umum BOW tahun 1916 dianggarkan f 10.000, tetapi setelah dilaksanakan menghabiskan dana sebesar f 9.999, sehingga ada sisa f 1.⁴³ Sedangkan untuk perbaikan seluruh sarana pengairan di Batavia pemerintah mengeluarkan dana f 614.687. Dalam tahun 1916 gaji aparat pribumi untuk menjaga pintu air berjumlah f 6.789. Biaya ini hanya untuk pintu air Pasar Ikan dan pintu air Tangki.⁴⁴

Berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perbaikan dan perawatan sungai yang meliputi pembebasan banjir di Batavia paling besar dibandingkan dengan Surabaya maupun Cirebon, ini menunjukkan bahwa masalah banjir di Batavia dianggap lebih penting dibandingkan dengan daerah lain. Seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 28: Perbandingan Biaya Pembebasan Banjir Batavia dan kota-kota lain

| Tahun | Pembebasan Banjir di Batavia | Perbaikan Sarana Banjir di Cirebon | Perbaikan Sarana di Surabaya |
|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1921 | 368.346 | 70.190 | 93.451 |
| Biaya yang digunakan sampai tahun 1921 | 4.320.625 | 670.652 | 1.070.778 |
| 1923 | 138.671 | 271.776 | - |
| Biaya yang | 4.731.390 | 1.341.811 | 1.257.946 |

⁴³ Besluit Van den Directeur der BOW, Van 24 Mei 1916 No. 9158/E.

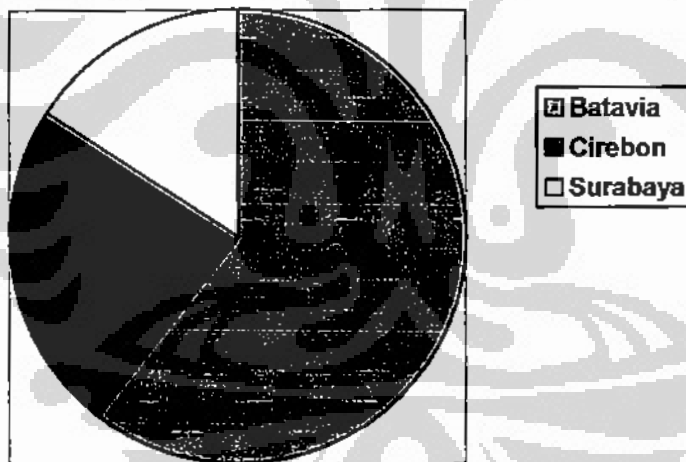
⁴⁴ Verslag Van BOW over het jaar 1916; Gkolff and Co; 1920, hal. 116

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| digunakan sampai tahun 1923 | | | |
| 1925 | 15.392 | 188.425 | - |
| Biaya yang digunakan sampai tahun 1925 | 4.835.102 | 1.892.489 | 1.257.864 |

Diolah dari Verslag Van BOW dari tahun 1921 – 1925

Jika diperlihatkan dalam bentuk diagram maka terlihat gambaran perbandingan pembiayaan banjir dari kota besar Batavia, Cirebon dan Surabaya seperti terlihat berikut ini.

Tabel 29: Perbandingan Pembiayaan Proyek Pengairan di Kota Batavia, Cirebon dan Surabaya



Jika melihat biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pembebasan banjir di tiga kota maka terlihat bahwa Batavia membutuhkan biaya paling besar setelah itu baru Surabaya dan Cirebon.

Berdasarkan pengerjaannya, proyek pengairan dibedakan atas dua. Pertama proyek yang dikerjakan oleh Propinsi Jawa Barat dan Proyek Kotapraja Batavia. Proyek Jawa Barat yang meliputi wilayah Bantam, Batavia, Cheribon, Priangan, dan Buitenzorg. Proyek yang dikerjakan meliputi perbaikan saluran, bendungan dan pengairan untuk sawah, pengerukan saluran. Khusus mengenai kantor irigasi Batavia, masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir dan pengerukan sedimentasi banyak menggunakan anggaran negara.⁴⁵

Pada tahun 1926, masalah penataan air mengalami perubahan. Hal ini lebih merupakan pendelegasian kepada pemerintah propinsi. Selama ini yang digunakan sebagai peraturan penggunaan air adalah *Bijblaad* No. 5081, 5178, 5439, 6185 dan 10902, dalam *Bijblaad* tersebut pemberian ijin bagi penggunaan air untuk tujuan rumah tangga, pengairan, daya gerak (kincir) tujuan industri, sumber air, danau, kolam, kanal dan saluran air ditangani oleh negara. Artinya ijin tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal. Sejak tahun 1926 melalui surat keputusan yang dikeluarkan *Gouvernement Secretaris* tanggal 24 Januari 1927, No. 127/B yang ditujukan kepada *Provincialen Raad* (Dewan Jawa Barat) diberi sebagian wewenang untuk memberi ijin dalam kaitannya dengan pengaturan air. Dalam hal ini Dewan Propinsi akan memberi wewenang kepada Direktur BOW untuk mengeluarkan perijinan dan penelitian tentang pengambilan sumber daya sungai yang meliputi pengambilan pasir, kerikil, pengawasan penggunaan air dari sungai dan saluran.⁴⁶

Pada tahun 1930 berdasarkan surat dari Dewan Propinsi tanggal 13 Maret 1930 No. K2/1/16/17, proyek dibagi atas 4 kelompok yaitu: kelompok satu, proyek-proyek yang diprioritaskan. Dalam kaitan ini proyek yang akan dikerjakan tanpa didiadakan penawaran lagi sehingga pelaksanaannya langsung disetujui. Yang termasuk dalam kelompok ini ada 13 proyek. Kelompok kedua adalah proyek yang sifatnya khusus sehingga segera bisa dinyatakan tanpa mengkaji berkas-berkas rancangannya, pelaksanaannya langsung disetujui. Dalam kelompok ini ada 21 proyek. Kelompok

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Verslag West Java 1926*; hal 120.

ketiga adalah proyek yang berkas dan anggarannya harus disetujui sebelum dana diberikan. Dalam kelompok ini ada 28 proyek. Kelompok keempat adalah proyek besar sehingga perlu dibatasi lebih lanjut atau pengerjaannya harus disetujui oleh negara dan propinsi. Meskipun ada pengawasan dari negara tetapi pengawasan tidak boleh mengganggu otonomi dari propinsi sehingga pengawasannya lebih sebagai kontrol saja.⁴⁷

Selain itu untuk mendapatkan harga satuan yang standar, maka pada tahun 1928 Architect BOW De La Foose tanggal 5 Juli 1928 mengeluarkan harga satuan 1 meter kubik batu karang seharga f 6.50; 1 meter kubik batu kali f 6.50; 1 meter kubik kerikil f 5; 1 meter kubik batu beton f 6,50; 1 meter kubik batu porselin f 12; 1 meter kubik kapur f 11; 1 meter kubik batu pecahan untuk aspal f 12; 1 meter kubik kayu jati f 9; 1 meter kubik semen merah f 10; 1.000 potong batu bata Cikampek f 35; gaji Mandor satu hari f1,75, gaji pengawas bangunan f 2,50 sehari; gaji kuli f 0,60 sehari; gaji tukang kayu sehari f 1,50; dan gaji tukang batu f1,50.⁴⁸

Dalam kaitannya dengan anggaran perawatan sungai dan aliran irigasi, kotapraja Batavia pada tahun 1931 mendapat anggaran paling besar dibandingkan dengan kantor irigasi lainnya di Propinsi Jawa Barat dari anggaran f 50.700, seksi Subang sebesar f 10.000, seksi Buitenzorg mendapat f 10.350 dan Batavia f. 30.350. Dana untuk seksi Batavia digunakan untuk memperbaiki pintu air di Sungai Sunter sebesar f 4.270. Perbaikan pintu ini terkait dengan pembelian tanah partikelir di kampung Kayu Putih, Tanah Tinggi, Kampung Ambon dan Pulonangka.

Pada tahun 1922, pemerintah mengeluarkan biaya f 10.382 untuk gaji pegawai untuk menjaga pintu-pintu air. Proyek pengerukan saluran di seluruh Batavia diajukan biaya f 876.800, jika dana tersebut dikeluarkan seluruhnya maka biaya permeter persegi sekitar f 1,16. Sementara itu dana untuk perbaikan termasuk pembuatan tanggul pada tahun 1922 hanya f 272.094. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pengendapan menjadi masalah yang sangat penting dalam kaitannya dengan banjir.

⁴⁷ Verslag West Java 1930, hal. 184

⁴⁸ Algemeene Secretarie; AG 26146; tanggal 17 Agustus 1929

Pengerukan dilakukan sejak tahun 1917. Dalam tahun tersebut pengerukan meliputi pengerukan di Sungai Krukut hilir dan saluran Cideng. Pengerukan di saluran ini dilanjutkan sampai jembatan Gang Ketapang. Di daerah ini pengerukan dilakukan dengan tangan. Selain itu juga dilakukan pengerukan di Muara Karang dan saluran Grogol sampai laut. Untuk kanal banjir pengerukan dilakukan di pintu air Karet. Pengerukan di sekitar pintu air Karet dan Jembatan Jati banyak disebabkan karena runtuhnya tanggul-tanggul tanah. Hampir sepanjang 1.700 meter sejak pintu air Karet sampai Tanah Abang mengalami kerusakan sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum dilakukan pengerukan lumpur. Untuk itu perlu pelebaran kanal mulai Jembatan Jatibaru ke arah hilir, sehingga perlu penggalian tanah sedalam 2 meter dengan tanggul penahan 0,75 meter. Untuk pelebaran kanal diperkirakan biayanya mencapai f 300.000, sementara itu dana yang tersedia hanya f 100.000. Meskipun terjadi kekurangan dana, proyek tetap dijalankan.⁴⁹ Selain pembuangan Gunung Sahari, pengerukan dimulai dari kanal perkapalan sampai jembatan kereta api sepanjang 800 meter di bawah pintu air Jembatan Merah. Proyek ini dihentikan tahun 1921 untuk menghemat biaya, karena saluran Gunung Sahari dianggap masih mampu untuk mengalirkan air sampai 45 meter kubik perdetik. Kanal Tangki mulai dari muara di parit luar kota sampai pintu air Tangki.⁵⁰

Pada tahun 1923, terdapat empat proyek yang menyangkut perluasan dan perbaikan proyek di saluran Gunung Sahari yang merupakan pengaliran dari Sungai Ciliwung. Proyek pengaliran ini dimulai tanggal 7 April 1919 dengan tujuan memperbesar debit air menjadi 40 meter kubik perdetik. Untuk itu, pemerintah melakukan pengerukan lumpur dan pendalaman kanal. Dana yang disediakan adalah f 357.000 dan dana tambahan sebesar f 5.000 sehingga jumlahnya f 381.264. Proyek kedua adalah perawatan di kanal banjir Batavia. Proyek dimulai pada bulan Maret 1923 disediakan dana f 300.000 yang berasal dari anggaran kotapraja. Aktifitas yang

⁴⁹ Besluit Van den Dir. Der BOW Van 17 October 1922, No. 31270 E

⁵⁰ Verslag Van BOW 1922; Vijde Gedeelte; Beveilig, Afwatering en Waterkerij; Landrukkerij, 1924, hal. 187

dikerjakan adalah peninggian tanggul, menggeser tanggul sebelah kiri untuk memperluas kanal antara pintu air Karet sampai jembatan Kali Baru, dan yang lebih penting adalah pemlesteran dengan semen tanggul kanal dari Karet sampai Kali Baru. Proyek ketiga ditujukan untuk normalisasi saluran kanal di bagian timur kota. Perbaikan meliputi Gunung Sahari dari Tangki sampai Jembatan Merah. Kanal Gunung Sahari dikeruk sampai kedalaman 1,50 meter dengan biaya f 30.771, dengan pengerukan ini maka kapal bisa lewat dengan lancar. Proyek keempat adalah perbaikan tanggul banjir di sebelah barat kota yaitu sepanjang Sungai Angke dari Kampung Asem sampai Jembatan Pesing. Tanah-tanah di sekitar ini pada tahun 1872 merupakan tanah partikelir yang dibeli pemerintah dengan harga f 22.923. Jika perbaikan Sungai Angke selesai maka banjir yang selalu terjadi di Batavia bagian barat yang meliputi Pesing dan sepanjang aliran Sungai Angke dapat dikurangi. Sesuai keputusan Direktur BOW tanggal 27 Oktober 1923, pemerintah mengeluarkan anggaran f 8.250. Dana ini untuk menanggulangi kebocoran di sepanjang Sungai Grogol. Kebocoran di Sungai Grogol disinyalir sebagai penyebab banjir. Tanah-tanah galian Sungai Grogol dan Sungai Angke digunakan untuk mengurug tanah-tanah rendah dan rawa yang ada di sekitar Kampung Asem sampai Pesing. Untuk penggalian dua sungai ini menghabiskan biaya f 7.923.⁵¹

Pada tahun 1923 pengerukan dilakukan dengan mesin pengeruk Poetjak IV dan Majang III. Tanah yang dikeruk dibuang ke laut di Muara Baru sebanyak 27.470 meter kubik dengan kapal pengeruk Tjidang, sedang lumpur lainnya dibuang di rawa-rawa yang menjadi sumber penyakit, terutama di dekat kanal-kanal yang menuju pelabuhan. Sungai yang dikeruk dengan kapal diantaranya adalah Kali Besar sebanyak 19.422 meter kubik. Khusus pengerukan di Kali Besar dekat *Javansche Bank* sebesar 6.608 meter kubik; kanal perkapalan di Muara Baru 11.254 meter kubik; Parit luar kota timur 11.290 meter kubik dan parit luar kota barat 5.100 meter kubik jumlahnya 53.674 meter kubik. Selain itu Sungai Ciliwung yang berhubungan dengan Kali Besar

⁵¹ Verslag over BOW in Nederlands Indie 1923 Vjide Gedeelte; Bevloeing, Afwatering, Landsdrukkerij, Weltevreden 1925.

dikeruk sebanyak 1.122 meter kubik. Pengerukan sungai dilakukan secara teratur yang kerjakan setiap bulan Maret atau September. Sementara itu pengerukan yang tidak mungkin dilakukan dengan mesin kapal karena kapal tidak bisa masuk, pengerukan dilakukan dengan tangan. Kemudian dibuang dengan kapal hanya mampu memuat sampah dan tanah 4 meter kubik. Pengerukan dengan tangan di kampung-kampung sebanyak 13.320 meter kubik.⁵²

Proyek yang paling banyak menyerap dana pada tahun 1930 adalah pengerukan sungai di muara dekat laut. Pengendapan yang sangat besar di 5 muara sungai, terutama muara Pekapuran. Pengendapan selain berasal dari hilir, juga karena gelombang laut yang membawa pasir sehingga muara sungai tertahan oleh pasir. Proyek ini menyerap biaya paling besar yaitu f 22.295. Selain itu banjir yang datang dari sungai Cisadane mengancam beberapa wilayah Batavia, untuk itu dibuat bendungan di muara saluran Kuripan untuk menahan banjir besar.⁵³

Tabel 30: Perawatan Sungai dan Saluran Air di Kantor Irigasi Batavia Tahun 1928 - 1930

| Tahun | Nama Proyek | Dasar Pengerjaan | Dana yang disediakan | Realisasi Pengerjaan | Keterangan |
|-------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1928 | Normalisasi dan pembebasan banjir selokan barat di Mr. Corneelis antara Rawa Panjang dan Banjir kanal Batavia | Direktur PU, 2 Maret 1928, No. E, 10/1/8/9/ f 7600 dan 13 Nop 1928, No. E, 10/2/25 f 5000 | F 12.600 | f. 3460 | Selesai tahun 1929 |
| 1930 | Pengerjaan saluran Pembuangan di Kali Pesanggrahan, | Besluit CVG ddo 14/2-30, No. | F 2550 | F 2538 | Selesai |

⁵² Verslag Van BOW 1923 dan 1926; Hoofdstuk III; Bagger bedrijf, 1928, Landrukkerij, hal 5.

⁵³ Verslag West Java, 1931, hal. 207 - 209

| | | | | | |
|--|--|--|----------|--------|------------------------|
| | Kedoya | O 36/2/14 F2550 | | | |
| | Pengerukan Lumpur Kali Krukut dan saluran Cideng sampai Toko Tiga | Besluit CVG ddo 31/1-30, No. O 36/2/6 F 41.500 | F 41.500 | F38500 | Selesai |
| | Saluran Pembuangan Cideng di Kampung Lima sampai Tanah Abang | Besluit CVG ddo. 14/11-30, No. o/36/24/17 f990 | F990 | F990 | Selesai |
| | Saluran Pembuangan Bancerachsgracht dari Jembatan Dua sampai saluran Gusti | Besluit CvG. Ddo. 21/11-30, No. O 36/24/19 f7000 | F7000 | F1000 | Dilanjutkan tahun 1931 |

Diolah dari Verslag West Java 1928 - 1930

Pembangunan pintu air Manggarai telah mengakibatkan pengendapan di daerah hulu sungai Ciliwung, terutama di daerah saluran utama Mester Cornelis. Karena permukaan air mengalami kenaikan sehingga perkampungan militer yang terletak di sebelah kiri saluran Ciliwung mengalami gangguan air kalau Ciliwung airnya naik. Untuk mengurangi beban banjir di daerah ini maka pemerintah mengadakan perbaikan berupa pembuatan tanggul dan pengerukan tanah akibat sedimentasi. Untuk kegiatan ini pemerintah mengeluarkan dana f 5.042.⁵⁴

Dalam rangka pengukuran, penelitian dan perencanaan tanah, pada tahun 1927 disediakan dana f 50.042. Pengukuran dilakukan di aliran hulu Ciliwung dari pintu utama Matraman sampai ke kanal di depan saluran utama timur di Mesteer Cornelis. Sejak selesainya pintu air Matraman tersebut selalu terjadi pengendapan. Permukaan banjir mengalami penurunan dan perkampungan militer yang terletak di aliran kiri

⁵⁴ Verslag West Java, 1927, hal. 141

dekat saluran utama mengalami gangguan banjir. Untuk itu disusunlah rencana untuk memperdalam Ciliwung.⁵⁵

Pembangunan kanal banjir Kali Malang yang selesai dibangun, selama hampir 7 tahun maka memerlukan perawatan. Untuk itu sesuai keputusan Dewan Kota tanggal 30 Desember 1926 nomor O 36/34/19, disediakan dana sebesar f 40.800. Proyek perawatan kanal banjir dimulai bulan Januari dan selesai akhir September 1927. Dalam pengerjaannya dibuat bendungan dari bronjong kawat yang dipenuhi dengan batu kali, agar talud tidak hanyut⁵⁶. Masalah yang selalu muncul ketika dibuat pintu air adalah adanya pengendapan di sekitar pintu air. Untuk itu pengerukan kanal banjir di pintu air Jembatan Dua dan saluran Grogol pada arus hulu Telok Gong dan Molenvliet dilakukan secara rutin.⁵⁷ Selain itu pada tanggal 30 Desember 1926 disediakan dana sebesar f 40.800 untuk pemasangan tanggul di kanan kiri kanal banjir dari HM 61 + 30 dan HM 65 + 50. Proyek dimulai pada bulan Januari sampai September 1927.⁵⁸

Kompleks militer di Meester Cornelis yang selalu tergenang air, karena terjadi pengendapan di sungai Ciliwung akibat dibangunnya pintu air Matraman maka perlu diadakan perbaikan saluran-saluran yang melintas di daerah ini. Melalui keputusan Dewan Perwakilan tanggal 15 September 1927 nomor O 36/19/17 untuk normalisasi selokan timur disediakan dana sebesar f 12.000. Proyek ini menjadi bagian dari normalisasi *Oosterslokan* yang menyambung dengan Kali Baru mulai jembatan Ie sampai bendungan di belakang *Generaal Staalplein* di Meester Cornelis sepanjang 255 meter. Mampetnya *Oosterslokan* selain berakibat pada banjir juga mengganggu kondisi kesehatan di Batavia. Gangguan banjir di saluran ini telah diatasi dengan pembangunan dan pemasangan got berlapis semen di bagian paling hilir dari saluran yang terpotong yang memungkinkan aliran air akan lancar. Seluruh rencana

⁵⁵ Verslag West Java, 1927.

⁵⁶ Gemeenteraad; 30 Desember 1926, No. 036/34/19

⁵⁷ Verslag West Java 1927, hal. 144

⁵⁸ Verslag West Java 1927, hal. 141

normalisasi dengan dana f 110 ribu selama tahun laporan disahkan, namun dari ini hanya sebagian yang disetujui.⁵⁹

Hal lain yang penting untuk ditangani selain masalah banjir adalah pengairan untuk pertanian. Untuk itu saluran di luar kota yang dikerjakan adalah perbaikan proyek Pondok Terong di cabang timur *Westerslokkan* di halte Citayam di Karesidenan Buiotenzorg. Berdasarkan keputusan Dewan Kota tanggal 15 Juli 1927 nomor O 36/15/17, untuk memperbaiki proyek di tanah partikelir Citayam, disediakan dana f 2.700. Proyek ini mencakup pembaharuan sebagian aliran hilir bendungan yang ditanggul sepanjang 2,50 meter. Tanggul di plester dan dibuat talud di atasnya dengan lebar 12,50 meter.⁶⁰

Selesainya kanal banjir dan bendung Matraman maka keberadaan *Westerslokkan* (saluran Minangkabau) harus diperbaiki. *Westerslokkan* dipindahkan dari aliran lamanya yang masuk ke Sungai Ciliwung bertemu di daerah Matraman, kemudian dipindahkan ke kanal banjir. Selain itu juga perbaikan saluran dari Rawa Panjang ke kanal banjir. Berdasarkan usulan Direktur BOW, proyek ini pembiayaannya diajukan dalam dua tahap yaitu berdasarkan usulan Direktur BOW 2 Maret 1928 No. E, 10/1/8/9/ dengan pengajuan anggaran sebesar f 7.600 dan 13 Nopember 1928 No. E 10/2/25 dengan dana sebesar f 5000, sehingga proyek tersebut menghabiskan dana f 12.600 proyek direncanakan selesai tahun 1929.⁶¹

Pada tahun 1937 sampai 1938, pemerintah banyak melakukan pembelian tanah partikelir dan pembuatan waduk baru untuk pengairan. Tanah partikelir Kampung Melayu/Kedawung dibeli oleh NV. *Javasche Particuliere Landerijen Mij* tanahnya digunakan untuk proyek pengairan. Tanah dibeli pada tahun 1937. Pada tahun yang sama tanah Batuceper juga dibeli untuk pembukaan saluran Cisadane. Hal yang sama juga dilakukan untuk pembukaan waduk Cipanas dan Darma di Ciwaringin Cirebon.⁶²

⁵⁹ Verslag West Java 1927, hal. 150

⁶⁰ Gemeenteraad; 15 Juli 1927; No. 036/15/17

⁶¹ Verslag West Java 1929, hal. 218

⁶² Verslag Wets Jawa, 1938 hal. 130

Sedimentasi dan penyaluran air di dalam kota pada tahun 1937 – 1939 dilakukan dengan mengadakan perbaikan dan pengerukan sungai. Aliran sungai Ciliwung yang tidak lancar karena terhalang jembatan di Jalan Raden Saleh maka jembatannya ditinggikan. Biaya yang diperlukan f 40.000. Dana tersebut menurut kotapraja masih tinggi. Untuk mendapat harga yang lebih rendah maka dibuka penawaran bagi perusahaan lain agar terjadi persaingan. Dari hasil penawaran yang diajukan, penawaran terendah adalah f 34.940, untuk pembuatan jembatan dan tanggul dengan konstruksi beton.⁶³ Atas dasar penawaran tersebut maka jembatan Raden Saleh ditinggikan atas biaya kotapraja.

Daerah Tanah yang selalu terendam banjir maka pada tahun 1937 direncanakan pemotongan saluran Tanah Abang yang terletak di antara jalan Rijswijk dan Koningsplein Utara diajukan anggaran f 45.000. Usulan kotapraja tersebut oleh Dewan Kota dianggap terlalu besar, untuk itu sesuai dengan usulan yang dimuat dalam *Gemeentebaad* 1938, Nomor 207, anggarannya dipotong sebesar f 10 ribu sehingga biaya untuk saluran itu sebesar f 35 ribu. Biaya tersebut digunakan untuk penebusan tanah dan pemindahan saluran dari atas ke bawah tanah di saluran air yang menghubungkan jalan Tanah Abang – Rijswijk. Karena pembebasan tanah yang belum tuntas, pembangunan saluran ini ditunda sampai tahun berikutnya. Untuk pembangunan ini kotapraja harus melepaskan kepemilikan tanah Dukuh Bluntas. Pelepasan hak kepemilikan tanah tersebut dengan harga minimal, karena untuk kepentingan umum.⁶⁴

Normalisasi saluran di komplek Menteng meliputi tanggul-tanggul di saluran Gondangdia (saluran jalan Gresik) dan saluran jalan Surabaya. Dalam rapatnya tanggal 9 Mei 1938, sesuai dengan usul Dewan Kota yang dimuat di *Gemeentebaad* 1938 Nomor 166, diputuskan untuk memperbaiki tanggul-tanggul dan saluran pembuangan Gondangdia, dari pembuangan air di Sawahlaan sampai jembatan di jalan Gereja Theresia. Dewan Kota dalam rapatnya tanggal 28 Nopember 1938, dana yang

⁶³ Gemeentebblad 1938, No. 262, Stads Gemeente Batavia, Nomor: 9568, Batavia, 26 Juli 1938

⁶⁴ Gemeentebblad 1938, No. 375, Stads Gemeente Batavia, Nomor: 14336, Batavia, 5 Nopember 1938

dibutuhkan untuk pemasangan talud berlapis semen di sepanjang saluran dari jalan Gresik sampai jalan Menteng Dalam, bersambung dengan saluran di dekat kebun binatang Cikini. Saluran pembuangan Gondangdia dan saluran jalan Surabaya dilengkapi dengan tanggul. Perbaikan saluran Gondang dia memerlukan dana f 16.000. Sementara itu untuk pemasangan batu di sepanjang saluran jalan Surabaya diperlukan dana sebesar f 15.000.⁶⁵ Selain itu perbaikan pintu air Jembatan Dua Timur dan Barat pada tahun 1939 juga diadakan perbaikan untuk penampungan air.⁶⁶

Perdebatan dalam pengelolaan air antara Kotapraja dan Propinsi kembali muncul dalam kaitannya dengan pengelolaan Kali Besar. Pihak kotapraja menganggap bahwa pengelolaan Kali Besar menjadi wewenang Propinsi. Perbedaan pendapat ini muncul karena terjadi perubahan dalam tata kelola air. Dalam Peraturan Pembentukan Kotapraja Batavia, pasal 5 Nomor 204 Tahun 1905 bahwa dengan berbagai sifatnya dan tugasnya propinsi dan kotapraja tentang jalan air yang terletak di wilayah kotapraja, dinyatakan bahwa saluran air yang berada di dalam kota dikelola oleh kotapraja. Sementara itu pengaliran air yang berada di luar kota dikelola oleh propinsi. Berdasarkan peraturan Nomor 1925 No. 378 pasal 12 diperbarui dalam Lembaran Negara 1934 No. 550, ditetapkan bahwa pengelolaan dan pengaturan air, sungai, sumber air, kolam sungai, danau, kanal dan saluran yang terletak di wilayahnya dikelola oleh Propinsi, sedangkan dalam pengawasannya dilakukan oleh Gubernur Jenderal.⁶⁷

Perbedaan pendapat ini terkait dengan normalisasi Kali Besar yang berada di kota lama. Setelah Kali Pintu Kecil diuruk, Kali Besar mengalami pengendapan lumpur yang sangat banyak sehingga mengganggu aktifitas di kota lama dan di sekitar *Javanche Bank*. Jika terjadi banjir, air tidak mengalir sehingga menimbulkan bahu tidak sedap. Dalam jawabannya Direktur Pemerintahan tanggal 8 Nopember 1939, setelah mendengar pandangan dari Departemen Perhubungan dan Pengairan yang

⁶⁵ Gemeenteblad 1939, No. 56, Stads gemeente Batavia, Nomor: 2451, Batavia, 17 Pebruari 1939

⁶⁶ Verslag tahun 1939, hal. 158

⁶⁷ Staatsblad Nederlands Hindie tahun 1925; No. 378

mengatakan bahwa pengelolaan Kali Besar menjadi wewenang Kotapraja. Selain itu kotapraja juga diwajibkan membuat tanggul di kanan kiri Kali Besar agar tidak terjadi longsor.⁶⁸ Atas dasar pandangan itulah, akhirnya Pemerintah memutuskan bahwa pengelolaan Kali Besar dilaksanakan oleh kotapraja Batavia.⁶⁹

Hal berbeda, dalam kaitannya dengan penimbunan Kali Pintu Kecil untuk mengurangi pengendapan lumpur, maka Direktur *Javanche Bank* mengeluhkan adanya penimbunan Kali Pintu Kecil yang diputuskan pada tahun 1934, tetapi sampai tahun 1939 tidak segera dikerjakan. Untuk itu Direktur *Javanche Bank* mengirim surat kepada Walikota Batavia agar pengelolaan di sekitar Kali Pintu Kecil diserahkan kepada pihak Pelabuhan atau Kotapraja Batavia. Dalam jawabannya pihak Pelabuhan mengatakan bahwa masalah penimbunan Kali Pintu Kecil diserahkan kepada kotapraja Batavia. Karena perdebatan tidak selesai maka Kotapraja Batavia mengirimkan surat kepada Propinsi Jawa Barat tanggal 24 Pebruari 1938 Nomor 2418. Dalam jawabannya tanggal 16 April 1938, Gubernur Jawa Barat, mengatakan bahwa penimbunan Kali Pintu Kecil di muara Kali Besar tidak tuntas, karena tanah yang tidak rata. Untuk itu Gubernur Jawa Barat menyarankan agar kotapraja mengadakan perubahan anggaran seperlunya agar masalah Sungai Pintu Kecil dapat segera dilanjutkan⁷⁰. Setelah mendapat pandangan berbagai pihak akhirnya masalah pengangkatan sedimentasi di sepanjang Kali Besar dan Kali Pintu Kecil diserahkan kepada kotapraja.

5.3.2 Sungai Angke dan Saluran Mookervaart

Pada tahun 1929, terjadi banjir besar di Batavia yang mengakibatkan kerusakan di sepanjang Sungai Angke. Selain menghanyutkan tanaman juga pohon-pohon besar, akibatnya banyak tanggul yang jebol. Tanggul sebelah kanan Kali Angke jebol sepanjang 20 meter. Untuk memperbaiki tanggul dan meningkatkan debit air,

⁶⁸ Department Van Verkeer en Waterstaat; tanggal 31 Oktober 1931 No. WT 1/21/4.-

⁶⁹ Departement Van Binnelandsch Bestuur tanggal 8 November 1939; No. Dec 81/1/19.- Bijlagen Zeven

⁷⁰ De Gouverneur West Java; tanggal 16 April 1938; No. 0 35/2/2 dalam TZG AG 26617/39

maka sungai harus digali. Selain perbaikan tanggul juga dibuat bendungan dari tanah yang diperkuat dengan beton disisi luarnya. Bendungan ini selama ini telah roboh sebanyak dua kali akibat banjir. Khusus untuk pembuatan bendungan ini, dibuat pondasi dengan beton sampai tanah keras dengan biaya f 31.064.⁷¹

Masalah yang penting adalah perbaikan Mookevaart. Pada saat Van Breen menangani masalah pengairan di Batavia, selain penanggulangan banjir, Van Breen juga berhasil memperbaiki pengairan untuk pertanian sekitar 74.000 bahu. Pembukaan tanah-tanah partikelir Tangerang dilakukan dengan pembongkaran dan pembuatan tanggul di daerah aliran sungai Cisadane. Pembukaan lahan ini membutuhkan biaya f 45.000, termasuk biaya pembebasan lahan. Diduga dalam waktu 75 tahun seluruh daerah pengairan ini bisa ditanami.⁷²

Berdasarkan laporan M.M.C. Posno tentang peresmian pembukaan kompleks Sewan yang ditulis pada majalah *de Ingenieur in Nederlands Indies* 1935 yang dikutip dari laporan kontraktor HBM (*Hollandsche Beton Maatschappij*).⁷³ Menurut laporan tersebut pada tahun 1930 diputuskan untuk membuat sebuah bendung di sebelah hilir gerbang Terusan Mookervart di Sungai Cisadane untuk pengairan. Untuk itu gerbang lama harus ditutup. Tinggi permukaan air di Sungai Cisadane berkisar 6,00 meter pada musim kering dan 10,00 meter pada musim hujan ketika terjadi banjir besar. Pada tahun 1930 karena proyek kanalisasi Mookervart untuk memasok air ke Sungai Angke dengan pasokan 200 meter kubik tidak bisa dilaksanakan maka perlu diadakan normalisasi tanggul-tanggul baru di Sungai Cisadane sebelah hilir. Dasar dari rencana ini adalah agar arus banjir sebesar 1.200 meter kubik perdetik dapat dibagi 1.000 meter kubik perdetik ditampung di sungai Cisadane dan 200 meter kubik perdetik dialirkan ke terusan Mookervart. Penanganan terusan Mookervart sudah berlangsung hampir 3 abad dari 1683 - 1935 tetapi tidak membawa hasil yang maksimal bahkan banjir masih menggenangi daerah-daerah sepanjang saluran Mookervart dan

⁷¹ Verslag West Java, Tahun 1929, hal 206.

⁷² *Ibid.*

⁷³ HBM adalah kontraktor Belanda yang pada tahun 1950-an dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia kemudian menjadi BUMN dengan nama PT. Hutama Karya. (Soehoed, *op. cit.*, hal 29)

kekurangan air untuk memasok Sungai Angke pada musim kemarau. Masalah penanganan Mookervart akhirnya tidak ditangani lebih lanjut.⁷⁴

Pada tahun 1935, perbaikan sungai Cisadane yang menjadi sumber banjir di daerah Pesing dan sekitarnya menjadi prioritas pemerintah. Bahkan proyek pembangunannya harus disubsidi oleh negara. Proyek tersebut adalah sambungan kanal Mookervart dan pembuatan pintu air di Sewan. Untuk pembuatan pintu ini diserahkan kepada kontraktor *NV. Hollandsche Beton Mij*. Proyek meliputi pembongkaran dan pembuatan bendung Sewan. Proyek dimulai 4 September 1935. Karena mengalami kesulitan teknis, proyek Pintu Sewan ini dihentikan. Sebagai gantinya akan dipasang lempengan besi di Mookervart dan di sepanjang tepi jalan. Selain itu juga dibangun pintu air di Pasar Baru di Cisadane. Proyek dikerjakan oleh *NV. Industriele Mij Gebr Van Swaay*.⁷⁵

Dalam kaitannya dengan perbaikan saluran di bagian barat kota Batavia, pemerintah menyetujui untuk pembuatan saluran Tanah Tinggi bagian I. Proyek ini dibiayai oleh Propinsi sebesar f 29.000. Selanjutnya proyek dikerjakan oleh BOW tanpa tender⁷⁶. Karena Tanah Tinggi merupakan tanah-tanah partikelir yang tidak membayar pajak maka pemerintah menetapkan bahwa dalam kaitannya dengan pembayaran buruh, maka dari uang tunggakan pajak dari tahun 1931 – 1934, enam puluh tiga persennya akan dibayarkan kepada buruh, sedangkan empat persen untuk disetorkan pada kas negara, delapan persen untuk kepala desa pemungut pajak dan dua persen kepada tenaga tambahan.⁷⁷

Berdasarkan beberapa surat yang masuk, pemerintah mendapat masukan dari Dewan Perwakilan Propinsi Jawa Barat dan Direktur Perhubungan dan Pengairan maka diputuskan untuk membiayai pembuatan saluran Tanah Tinggi bagian dua, pada aliran Sungai Cisadane untuk mendukung saluran Mookervaart. Adapun dana yang disalurkan sebesar f 56.300. Dana ini termasuk pembebasan tanah. Pembebasan tanah

⁷⁴ *Ibid*, hal 34.

⁷⁵ *Verslag West Java*, 1935, hal 114 - 115

⁷⁶ *Besluit*; No. 20, Tanggal 22 Juni 1935

⁷⁷ *Regentschap Batavia*, tanggal 26 Juli 1935, No. W 2171/8/9

akan dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan pajak dari tanah-tanah tersebut yang belum dibayar.⁷⁸

5.3.3 Sungai Krukut dan Sekitarnya

Pengendapan yang terjadi di Sungai Krukut mengakibatkan kapal-kapal terganggu. Maka pengerukan lumpur menjadi prioritas bagi Sungai Krukut dan saluran *Bacheragrachts*. Untuk itu pendalaman Sungai Krukut, saluran *Bacheragracht* antara jembatan Dua dan Pintu Air Gusti yang sudah diperdalam sejak tahun 1929 diperdalam. Biaya untuk pengerukan sebesar f 40.490.⁷⁹

Hal ini diperkuat lagi ketika Sungai Krukut yang merendam daerah sekitarnya antara tanggal 2 – 3 Pebruari 1926. Padahal curah hujan sebesar 130 milimeter. Kondisi ini menimbulkan pemikiran untuk memperdalam Sungai Krukut. Pendalaman sungai sebenarnya telah dilakukan pada tahun 1924 dengan mengadakan pengerukan lumpur sebanyak 21.800 meter kubik lumpur telah diangkat dan dibuang ke laut dan daerah rendah di sekitarnya terutama rawa-rawa. Proyek sudah menghabiskan dana sebesar f 24.384, tetapi karena proyek ini belum bisa menuntaskan air di sekitar aliran Sungai Krukut, bahkan daerah sekitarnya masih saja terendam banjir maka melalui keputusan Dewan Kota tanggal 17 Juni 1926 No. O/36/10/8 disediakan dana tambahan f 4.816 untuk pengerukan lumpur. Proyek pengerukan Sungai Krukut dimulai dari pertemuan antara Sungai Krukut dan Cidang sampai Toko Tiga.⁸⁰ Pelaksanaan proyek pengerukan dilakukan di pertemuan saluran Cidang sampai Toko Tiga di ibukota Batavia. Dengan keputusan Dewan Propinsi tanggal 17 Juni 1926 nomor O 36/10/8 dari dana f 34.816 yang dikeluarkan dana f 24.384.⁸¹

Pendalaman saluran *Bacheragrachts* mulai dari kanal banjir Krukut sampai Sungai Kali Angke, ibukota Batavia. Proyek ini disahkan melalui keputusan Dewan

⁷⁸ Besluit tanggal 8 Januari 1936, No. 20

⁷⁹ Verslag West Java. Tahun 1929, hal 209.

⁸⁰ Verslag West Java; tahun 1926 hal 121.

⁸¹ *Ibid.*

Propinsi tanggal 1 April 1927 nomor O 36/7/22, mencakup pendalaman kanal *Bacheragrachts* sampai 1 meter untuk kepentingan pelayaran perahu lokal. Proyek dilaksanakan pada bulan Mei sampai Oktober dengan anggaran f 12.960. Untuk mengambil bahan pengerukan digunakan mesin giling kecil.⁸²

Tabel 31: Proyek Pengairan Tahun 1927

| No | Nama Proyek | Dana (f) |
|----|--|----------|
| 1 | Proyek Penelitian dan Perencanaan Tanah | 50.042 |
| 2 | Perawatan dan Pengaliran Westerslokan | 109.964 |
| 3 | Perawatan banjir kanal | 8.510 |
| 4 | Pengerukan di Pintu air Jembatan Dua dan Grogol | 40.800 |
| 5 | Pembuatan Saluran di Oosterslokan Kampung Makasar | 19.200 |
| 6 | Normalisasi saluran Kali Baru di Meester Cornelis | 12.000 |
| 7 | Pengerukan Sungai Krukut dari pertemuan di Cidang sampai Toko Tiga | 34.816 |
| 8 | Pendalaman Bacheragrachts | 12.960 |
| | Jumlah | 288.292 |

Sumber: Diolah dari Verslag West Java 1927

Pada tahun 1931, selain proyek pengairan yang dibantu oleh Propinsi Jawa Barat, proyek-proyek yang ada kaitannya dengan banjir adalah normalisasi aliran di Kali Krukut. Normalisasi yang dilakukan berupa penggalian dan pengerukan kali Krukut dari pertemuan sungai Cidang sampai Toko Tiga yang pernah dikerjakan pada tahun 1927 karena belum selesai dan pengerukan tidak tuntas sehingga harus diulang. Proyek dimulai bulan Pebruari 1931. Proyek ini menghabiskan anggaran f 41.500 tetapi dari anggaran tersebut hanya menghabiskan biaya f 38.500. Dasar pengerjaan proyek ini adalah keputusan C v G ddo 31/1-30 No. O 36/2/6. Tanah-tanah hasil galian digunakan sebagai tanggul penahan aliran sungai. Cabang-cabang sungai Krukut baik berupa sungai dan kanal, untuk kelancaran aliran cabang-cabang sungai dan kanal di aliran sungai Krukut diprioritaskan. Pendalaman sungai Cidang di Kampung Lima sampai Tanah Abang yang mengalirkan airnya ke Sungai Krukut

⁸² Verslag West Java, 1927

diperbaiki kembali pada tahun 1931. Proyek ini menghabiskan dana f 9.900. Saluran penghubung kanal Krukut di saluran *Bacheragrachts* antara Jembatan Dua dan Pintu Air Gusti juga diprioritaskan untuk diperbaiki. Kanal ini pernah diperdalam tahun 1928. Pada tahun 1930, kanal Krukut diperdalam lagi. Pengerjaan proyek didasarkan atas Keputusan C v G ddo 14/11-30 No. O 36/24/19 dengan biaya f 7000. Proyek selesai tahun 1931.⁸³

Meskipun daerah Cidang dan sekitarnya sudah diperbaiki ternyata pada bulan Januari 1933, daerah Cidang dan Kampung Krukut masih kebanjiran. Untuk itu pada tahun 1933 daerah Cidang diperbaiki lagi.⁸⁴ Sementara itu karena terjadi pengendapan di ujung kanal banjir di Karet sampai Jembatan Dua, maka dibuat pintu air menggelontor sampah dari sepanjang sungai ke laut. Daerah kanal banjir sampai kanal Krukut paling banyak menyita perhatian pemerintah, karena banjir rutin selalu terjadi di daerah ini.⁸⁵

Tabel 32: Penggalan dan Pengerukan Saluran Tahun 1931

| Nama Proyek | Surat Perintah Yang digunakan | Anggaran |
|---|---|---|
| Penggalan dan pengerukan Kali Krukut dari Pertemuan antara Kali Cideng sampai Toko Tiga | Besluit: C v G ddo 31/1-30 No. O 36/2/6 | f 41.500 |
| Normalisasi kali Cideng dari Kampung Lima sampai Tanah Abang | Besluit: C v G ddo 14/11-30 No. O 36/24/17 | f 990 |
| Normalisasi Bacherachtsgracht dari Jembatan dua sampai pintu air Gusti | Besluit: C v G ddo 21/11-30, No. O 36/24/19 | f 7.000 tetapi dana yang digunakan hanya f 1000 |

Diolah dari Verslag West Java 1931

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Verslag West Java 1933; hal. 208

⁸⁵ Verslag West Java, 1935, hal. 142

5.3.4 Saluran Sentiong dan Saluran Kalibaru

Bagian timur kotapraja masalah yang penting adalah penataan saluran air di tanah-tanah partikelir dan pengaliran dari *Oosterslokkan* ke saluran Kali Baru Timur yang airnya diambil dari Ciliwung di Katulampa. Bendung Katulampa untuk *Oosterslokkan* dan *Westerslokkan* menjadi tanggungan pemerintah propinsi. Pada tahun 1929 Propinsi Jawa Barat telah mengeluarkan dana sebesar f 27.191 untuk perbaikan *Westerslokkan*, karena terjadi kebocoran saluran, sehingga airnya tidak mengalir ke dalam kota. *Westerslokkan* dan *Oosterslokkan* lebih banyak digunakan sebagai pengairan sawah. Pengaliran air untuk dua selokan dikerjakan antara 15 April sampai 15 September. Dari hasil pengairan ini misalnya di Distrik Kebayoran hasil sawah rata-rata 31 pikul per bahu ditimbang basah, sedangkan hasil maksimal 35 pikul dan terendah 26 pikul per bahu. Gangguan yang ada diantaranya adalah hama tikus, penyakit tanaman dan banjir. Khusus untuk banjir, sungai Ciliwung dialirkan melalui kanal banjir langsung ke laut. Dana tersebut juga digunakan untuk memperbaiki sungai Angke. Perbaikan saluran ini mengalami hambatan karena di sebelah atas bendungan mengalami pengendapan lumpur. Lumpur setebal 3 – 4 meter harus diangkat. Untuk memudahkah pengerjaan, pintu air harus dipindahkan ke tanah yang lebih keras, sehingga digeser sepanjang 30 meter.⁸⁶

Pada tahun 1929, karena kondisi perkampungan yang tidak sehat di daerah sepanjang Kemayoran sampai Sentiong, maka pemerintah mengadakan pembelian tanah-tanah di Kemayoran Timur, Sentiong Barat dan Kramat. Setelah tanah-tanah tersebut dibeli oleh pemerintah, proyek penggalian saluran Sentiong dilanjutkan kembali. Proyek ini terhenti karena dana yang terbatas karena dananya digunakan untuk perbaikan saluran air di bagian timur di Weltevreden.⁸⁷

Saluran Sentiong karena airnya tidak bisa mengalir secara gravitasi, mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk. Untuk memperlancar saluran pada

⁸⁶ Verslag West Java, tahun 1929, hal. 163 - 170

⁸⁷ Verslag West Java tahun 1929, Bagian C tentang Kantor Irigasi Batavia, hal. 158

tahun 1928, dibuat saluran pembuangan air Sentiong. Pembangunan saluran memerlukan dana sebesar f 290 ribu berupa uang dan f 20 ribu berupa bahan bangunan negara, sehingga jumlahnya f 310.000. Karena bahan bangunan tidak terdapat di gudang negara, maka harus dibeli dipasaran sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan pihak pemborong. Dalam pembangunan ini pembiayaan dibebankan pada tahun anggaran 1928 pada pasal 7061 anggaran tahun itu.⁸⁸

Sebelum disetujui oleh pemerintah, proyek saluran Sentiong telah terjadi beberapa rapat yang melibatkan BOW, Pemerintah Pusat dan Dewan Kota. Sebagai proses awal, BOW mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk mengadakan pembuatan saluran pembuangan. Usulan menyangkut empat proyek untuk perbaikan pengairan dan pembuangan di ibukota Batavia. Dalam rencana umum yang dibuat oleh BOW, tercantum rencana yang memuat perbaikan sarana pembuangan air di sebelah utara dan timur ibukota Batavia yaitu normalisasi Sungai Krukut dan Sunter. Kedua proyek ini disetujui oleh pemerintah untuk dikerjakan melalui keputusan 20 Nopember 1919 Nomor 30. Pada awal pengerjaannya disediakan dana sebesar f 172.000. Setelah proyek berjalan, sampai pertengahan 1922 jumlah dana yang diperlukan membengkak sebesar f 595.620,35, karena keuangan negara tidak mencukupi maka proyek dihentikan, sampai tersedianya dana tambahan. Kelanjutan pekerjaan ini baru dapat dilanjutkan setelah pemerintah mengeluarkan surat perintah kepada BOW melalui surat nomor 41006/G, tanggal 29 Desember 1923 untuk melanjutkan pekerjaan dengan batasan hanya proyek yang dianggap perlu saja yang dikerjakan. Adapun proyek yang dianggap perlu berdasarkan surat dari Sekretaris Pemerintah tanggal 30 Nopember 1923 Nomor 2833/II adalah proyek yang ada kaitannya dengan pengaliran air yang tidak lancar, di mana kalau musim hujan mendatangkan banjir sedangkan pada musim kemarau air tidak bisa mengalir sehingga menjadi sarang nyamuk dan mengganggu kesehatan penduduk. Untuk itu masalah proyek yang terhenti beberapa tahun karena masalah pembebasan tanah di Kwitang

⁸⁸Besluit, Nomor: 16, tanggal 2 Nopember 1928

Timur yang dikuasai oleh tuan tanah partikelir harus segera diselesaikan. Sesuai keputusan Dinas Kesehatan tanggal 13 September 1928 No. 24430 proyek dikerjakan meliputi saluran pembuangan ke saluran Sentiong dan pembuatan saluran dari Kramat ke Tanah Tinggi dan beberapa proyek di Kali Baru Timur. Biaya yang diperlukan untuk proyek tersebut f 310.000.⁸⁹

Proyek keempat yang penting adalah penyempurnaan Kali Baru Barat dan Kali Baru Timur. Saluran Kali Baru Barat terutama di daerah Bidara Cina alirannya tidak lancar. Padahal airnya digunakan oleh penduduk di daerah Bidara Cina untuk kebutuhan sehari-hari. Daerah Bidara Cina merupakan kawasan permukiman padat. Tetapi air tidak bisa mengalir dengan lancar karena adanya kebocoran di beberapa tempat. Kebocoran misalnya terjadi di jembatan Yap Djene. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu dibangun tanggul parmenen di sepanjang Kali Baru.⁹⁰

Dinas Kesehatan dalam upayanya menangani masalah ini, mengusulkan kepada Walikota melalui surat tanggal 21 Nopember 1925, Nomor G 10/3/21, diperkuat surat Walikota Meester Cornelis tanggal 18 Juli 1925, nomor GW 1/4/7 yang ditujukan kepada pemerintah. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan saluran Kali Baru di kotapraja Meester Cornelis ada dua yaitu masalah banjir dan kesehatan. Mengenai banjir, terutama sebagai akibat derasnya aliran. Banjir merupakan penyebab utama kerusakan saluran ini, karena banjir juga menggenangi tanah pertanian. Dalam kaitan ini Dinas Kesehatan mengusulkan pembuatan sebuah tanggul di sepanjang Ciliwung yang menyambung dengan pintu masuk air yang diperlukan di daerah hilir. Untuk itu dilakukan pemlesteran, pelebaran dan pendalaman saluran, sehingga debit air dapat dinormalkan. Pemlesteran dikerjakan oleh kotapraja Meester Cornelis yang berlokasi di belakang perumahan perwira dekat lapangan Jenderal Staal. Dinas Kesehatan mengusulkan bahwa pembiayaan proyek ini menjadi tanggungan negara karena untuk kepentingan umum. Sebagian dana ditanggung oleh dinas kesehatan, sedangkan

⁸⁹ Departement der Burgelijke Openbare Werken tanggal 23 Oktober 1928, No. G 10/3/1

⁹⁰ Gemeentebled Meester Cornelis, Nomor 57, 12 Mei 1925, GW 1/3/8

proyek yang kaitannya dengan pembebasan banjir, irigasi, pengairan dan pembuangan air, ditanggung BOW kotapraja Batavia.⁹¹

Proyek selanjutnya adalah perbaikan saluran Kali Baru Timur. Proses pengusulan perbaikan dua saluran ini memerlukan waktu hampir dua tahun. Padahal Walikota Meester Cornelis hanya meminta subsidi kepada Propinsi Jawa Barat sebesar f 30.267 atau sepertiga bagian biaya normalisasi Kali Baru Timur yang ditafsir f 90.800. Selain itu tanah pemerintah yang digunakan untuk memperlancar saluran air di jalan Pedati, Kali Baru, diberikan secara gratis. Proyek dibagi dua, yaitu normalisasi bagian pertama dari penampang 109 sampai 115; jembatan Pondokbambu sampai jalan stasiun lama Senen. Bagian kedua, penampang 76 + 10 – 108; kira-kira KW 31 dari bendungan pengeluaran sampai persilangan jalan kereta api; anggarannya diperkirakan f 12.000, f 71.300 dan f 7.500. Setelah dua tahun menunggu, pemerintah Propinsi Jawa Barat mengusulkan kepada Gubernur Jenderal pada 27 Oktober 1930 mengenai proyek-proyek yang diajukan dalam kaitannya dengan normalisasi Kali Baru Timur.⁹² Selanjutnya dalam suratnya kepada pemerintah Propinsi, Direktur BOW bersedia melaksanakan proyek tersebut jika diserahkan ke kantornya, karena sebenarnya proyek tersebut masuk dalam kewenangan Dinas Kesehatan.⁹³

Sehubungan dengan permohonan dari Dinas Kesehatan dan Kotapraja Mester Cornelis, maka Dewan Kota memberikan beberapa keputusan terkait dengan Kali Baru timur ini. Bagian pertama dari proyek normalisasi penampang 109 sampai 115 disahkan melalui keputusan Dewan Kota tanggal 15 September 1927 nomor C 36/19/17 dengan dana sebesar f 12 ribu, dengan catatan proyek diselesaikan sampai tahun 1927. Selain itu juga perlu diadakan pemlesteran sampai jembatan di jalan stasiun lama. Menanggapi usulan perbaikan Kali Baru Timur, Residen Batavia mengirimkan surat kepada Direktur BOW, bahwa karena proyek itu sifatnya lintas kotapraja maka wewenang untuk memutuskan permohonan diserahkan kepada

⁹¹ Kantor Dinas Kesehatan Rakyat, Nomor: 7509/G, Weltevreden, 10 Desember 1925

⁹² Gemeenteraad; 15 September 1927; No. C 36/19/17

⁹³ Departement der Burgelijke Openbare Werken tanggal 26 November 1930, No. G 12/1/2

Provinsi Jawa Barat.⁹⁴ Proyek ini dianggap penting sehingga Dewan Kota Batavia menyatakan sanggup mengusulkan kepada Dewan Provinsi Jawa Barat untuk menyumbang biaya normalisasi Kali Baru dengan anggaran sebesar f 80.400. Melalui pembagian ini, provinsi menanggung tidak lebih dari dua pertiga biaya atau f 53.600 sedangkan kotapraja menanggung biaya sepertiga atau f 26.800 serta biaya meninggikan tanggul Kali Baru Timur. Hal lain yang harus dipikirkan jika nanti dibuka jalan baru di wilayah ini maka normalisasi dengan saluran tertutup harus disiapkan. Normalisasi Kali Baru Timur menjadi penting karena pada musim hujan airnya bisa mencapai 500 liter perdetik sehingga air meluap ke tanah pertanian dan rumah-rumah penduduk.⁹⁵

Selain Kali Baru, pada tahun 1931, kotapraja Batavia mengeluarkan dana f 13.650 untuk perbaikan saluran Molenvliet, Tangki dan kanal Gunung Sahari. Dalam tahun 1931, kotapraja Batavia telah menghabiskan dana f 68.700 untuk proyek pengaliran dan pengairan, f 44.200 untuk proyek penahan air; jumlah semuanya f 112.900. Masalah lain yang perlu ditangani dalam kaitannya dengan aliran air adalah muara-muara sungai yang mengalami pendangkalan. Akibat gelombang tinggi mengakibatkan kerusakan beberapa muara sungai. Muara sungai mengalami pendangkalan akibat lumpur dari laut dan dari hulu sungai. Untuk mengatasinya harus diadakan pengerukan lumpur di muara sungai. Di Batavia telah dilaksanakan lima proyek pengerukan, di muara sungai. Jumlah anggaran seluruhnya yang dikeluarkan selama tahun laporan adalah f 22.295.⁹⁶

5.4 Pengendalian Banjir Pada Masa Peralihan (1940 – 1960-an)

Pada masa 1940 sampai 1960 dapat dikatakan sangat lambat. Pada masa peralihan ini, pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia, tidak banyak

⁹⁴ Gemeentebld 1927 Nomor 4; halaman 106

⁹⁵ Surat De Directeur Van Binnelandsch Bestuur, tanggal 29 April 1931; No. 81/1/10,-

⁹⁶ Verslag West Java, 1931, hal 215 - 217

melakukan aktifitas yang berkaitan dengan pengelolaan sungai. Pemerintah kolonial setelah tahun 1940 lebih berkonsentrasi menghadapi perang dunia II. Sementara itu pemerintah Indonesia disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan dan pembangunan perumahan. Untuk itu penanganan banjir yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat temporal dan spasial. Sampai tahun 1960-an penanganan banjir belum menjadi fokus yang diprioritaskan oleh pemerintah. Masyarakat bergerak secara gotong royong, dengan sedikit bantuan dari pemerintah. Hal ini seperti yang dilakukan dalam pembangunan Kampung Lima. Penduduk Kampung Lima dan Kebun Sirih harus dipindahkan, karena daerah ini digunakan sebagai daerah resapan banjir. Jembatan di Asam Lama digeser ke tempat yang lebih tinggi letaknya kira-kira 100 meter dari tempat semula. Sungai Cideng yang menembus Kampung Lima dan Kebon Sirih akan dikeruk dan dipindahkan, agar rumah-rumah yang berada disekitarnya bisa terhindar dari bahaya banjir.⁹⁷

Pada tanggal 1 Januari 1950 rombongan Walikota Suwirjo bersama dengan pejabat terkait mengadakan kunjungan ke daerah-daerah yang dilanda banjir terutama di daerah Krukut dan Pondok Dayung. Dalam kunjungan tersebut Walikota menyampaikan bahwa untuk mengurangi banjir di daerah Krukut karena saluran Duri terjadi pendangkalan maka harus diadakan pengerukan Sungai Cideng, Krukut dan perbaikan kanal-kanal. Pemerintah kotapraja menganggarkan 8,50 juta rupiah untuk menangani banjir. Tetapi dari rencana tersebut pemerintah pusat baru menurunkan anggaran 1,9 juta rupiah. Selain itu kotapraja juga akan mengefektifkan siphon di Jembatan Dua. Bendungan Jembatan Dua sudah dibuat sejak tahun 1949 tetapi belum bisa digunakan karena urukan tanah belum diangkat. Bendungan Jembatan Dua dibangun dengan menghabiskan dana f 215.000. Kapasitas bendungan Jembatan Dua adalah 20 – 30 kubik perdetik.

⁹⁷ Indonesia Raja; 27 Juli 1951

Pemerintah Kotapradja telah membuat plan anggaran belandja sebesar 8,50 djuta rupiah untuk memperbaiki kota termasuk soal2 bandjir ini, tetapi jang diberikan oleh Pusat hanya 1,9 djuta rupiah. Dengan belandja 1,9 djuta ini Kotapradja sedang berusaha mengorek kali2 memperbaiki bendungan air jg rusak, memperbesar djalan2 di kota Djakarta jang ternjata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan baru sekarang ini. selain dari usaha pemerintah kota jang besar adalah pembuatan bendungan siphon Duri di Djembatan Dua. Bendungan ini dibuat sedemikian rupa sehingga air jang mengalir dari kanal Duri masuk lebih dulu kedalam tanah dan menimbul keatas lalu dilepaskan kebelakang dan mengalir ke Bandjir Kanal. Kekuatan dari bendungan 20 sampai 30 kubik saban sekon. Bendungan ini telah dibuat sedjak tahun 1949 dan sekarang boleh dikatakan sudah siap, hanya tinggal membuang tanah2 jang ada dipinggir bendungan itu supaja djalan air tidak tertahan. Dengan bendungan ini diharapkan supaja bandjir jang selalu mengantjam daerah Krukut dan sekitarnja dapat tertolong....⁹⁸.

Pada tahun 1952 pembangunan diutamakan untuk perbaikan di bagian dalam kota yang sebagian besar adalah perumahan untuk pegawai dan 14 perkampungan seperti Kramat Pulo, Paseban, Pejompongan dan lain-lain. Dalam tahun 1952 pengeluaran untuk pembangunan sebesar 108 juta sedangkan penerimaan hanya sekitar 52 juta. Untuk menutup kekurangan dana tersebut pemerintah daerah meminta subsidi kepada pemerintah pusat sebesar 52,406.900 juta rupiah. Dalam kondisi keuangan yang sangat terbatas ada beberapa pembangunan yang berkaitan dengan penyaluran air yaitu pembuatan 8 jembatan baru di Asem Lama, Salemba Bluntas, saluran Cideng, Sungai Cideng, Jalan Ketapang, jembatan Sentiong, Gereja Theresia dan tembusan jalan Thamrin.⁹⁹

Banjir yang terjadi di daerah Jakarta terutama disebabkan oleh saluran air yang dangkal dan lama tidak dikeruk. Keterbatasan dana dan kewenangan pekerjaan antara Kementerian Pekerjaan Umum Pusat dan Dinas Pekerjaan Umum Kotapraja rupanya masih menjadi masalah tersendiri dalam penanganan banjir. Kementerian mengatakan bahwa untuk mengatasi dan menjaga bahaya banjir yang diperhatikan adalah memperdalam Sungai Tanah Abang. Untuk itu kepala bagian urusan pamong praja

⁹⁸ Indonesia Raya; 2 Nopember 1950

⁹⁹ Merdeka; 2 Januari 1952

kotapraja Jakarta Raya, Sujoso telah mengajukan rencana-rencana penanganan banjir. Tetapi kementerian menyatakan bahwa pekerjaan yang diajukan kotapraja menjadi kewenangan Direktorat Umum Kotapraja Raya. Sebagai tindak lanjut usulan yang diajukan kepada kementerian akhirnya kotapraja Jakarta Raya melakukan pemesanan dua buah mesin pengeruk lumpur yang akan digunakan untuk mengeruk saluran-saluran air seperti Sungai Krukut, Sungai Cideng dan Sungai Tanah Abang. Mesin-mesin itu mempunyai kapasitas 20 meter kubik sejam.¹⁰⁰

Selain itu usulan yang dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan dana pemerintah diantaranya, pada tahun 1952 dimulai perbaikan irigasi di Kalideres sepanjang 5.500 meter, desa Pegadungan 3.300 meter, desa Benda 2000 meter akan dibangun saluran di desa Kapuk, Cengkareng, Kedung Kaliangke.¹⁰¹ Di desa Kapuk yang terletak 10 kilometer sebelah utara Cengkareng masyarakat secara swadaya menggali saluran sepanjang 2000 meter yang dikerjakan 1000 orang dari 8 desa, terdiri dari pemuda pagar desa 120 orang, anak-anak sekolah dan guru-gurunya.¹⁰² Di Meruya warga secara gotong royong membuat jalan dengan cara diurug. Pada tanggal 15 Nopember 1952 dibuat jalan sepanjang 200 meter, jalan menghubungkan antara Kebon Jeruk dan Meruya Ilir dengan lebar 4 meter, tinggi dari permukaan sawah 1,5 meter. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini dilakukan setengah gotong royong, setengah bayaran, subsidi dari Jawatan Penempatan Tenaga Jakarta Raya sebesar 7.020 rupiah, yang dikerjakan tenaga 150 – 200 orang.¹⁰³ Di Pondok Labu dibangun pintu air dengan biaya 15.000 rupiah sehingga 450 hektar sawah bisa diairi. Masyarakat desa Duri Sukabumi Ilir, Sukabumi Udik, Kebon Jeruk, Irigasi Grogol Ilir mengadakan gotong royong untuk membebaskan banjir di daerahnya.¹⁰⁴

Dalam suasana pembangunan yang masih belum lancar, untuk memperlancar lalu lintas ke kota pemerintah merencanakan menutup Molenvliet. Penutupan

¹⁰⁰ Merdeka; 1 Pebruari 1952

¹⁰¹ Kotapraja No. 3, tahun ke 3, 15 Oktober 1952

¹⁰² Kotapraja No. 5, tahun ke 3, 15 Nopember 1952

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Kotapraja, No. 5 tahun 4; 15 Nopember 1953

Molenvliet pernah disarankan oleh Van Breen pada tahun 1923. Dengan ditutupnya kanal ini, maka jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk akan dibuat menjadi satu. Rencana penutupan dimulai dari lapangan Harmonie sampai di depan Lindeteves. Selain itu adanya dua pasang rel trem kota juga sangat mengganggu lalu lintas sehingga harus dibongkar. Untuk menutup kanal dibutuhkan waktu selama 4 – 5 tahun.¹⁰⁵

Selainnya pembangunan-pembangunan gedung-gedung baik oleh pemerintah maupun yang diusahakan oleh pihak partikelir, dewasa ini oleh Djawatan Pekerdjaan Umum Kotapradja Djakarta Raya sedang diichtiarkan dengan benar-benar untuk melaksanakan sebuah rentjana lama, jaitu rentjana untuk menutup Molenvliet dari lapangan Harmonie sampai didepan Lindeteves Kota. Dengan penutupan Molenvliet ini djalan Gadjah Mada dan djalan Hayam Wuruk akan mendjadi satu djalanan raya...djika penutupan ini sudah mulai didjalankan, penduduk ibukota tidak lagi membutuhkan setengah djam satu djam. Beserta dengan penutupan Molenvliet timbullah beberapa soal antara mana: bagaimana dengan djalanan trem dan bagaimana dengan tempat mandi dan tjutji orang banjak. Sebagaimana diketahui ribuan orang sehari-harinja datang mandi dan mentjutji pakaian disepandjang Molenvliet. Ribuan orang iut berasal dari kampung-kampung jang terletak dibelakang djalan Gadjah Mada dan djalan Hayam Wuruk.¹⁰⁶

Mengenai beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai jalur trem dan terganggunya keperluan sehari-hari masyarakat di sekitar kanal, pemerintah mempunyai beberapa alternatif. Untuk jalur trem karena dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi kota Jakarta maka trem akan dihilangkan. Bahkan untuk seluruh Jakarta trem-trem akan dihilangkan dan diganti dengan bus. Sedangkan kebiasaan penduduk yang mandi cuci di kanal, pemerintah akan menyediakan air ledeng yang masuk ke rumah-rumah. Rencana penutupan Molenvliet yang didukung pula oleh Walikota Sjamsurijal ini ternyata tidak jadi dilaksanakan. Tidak ditemukan alasan

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Merdeka; 7 Pebruari 1953

mengapa kanal ini tidak jadi ditutup. Bahkan pada masa mendatang kanal Molenvliet malah diperbaiki dengan diadakan perbaikan tanggul kanan kiri dengan ditembok.¹⁰⁷

Masyarakat Tanah Abang, karena selalu menjadi langganan banjir, maka masyarakat di Dukuh Pinggir, Kebon Melati bergotong royong menggali selokan air. Gotong royong diikuti sebanyak 800 orang, dengan membersihkan got sepanjang 3 kilometer dan memperbaiki jalan sepanjang 2 kilometer dengan dana 2000 rupiah. Di daerah Krukut saluran dibersihkan sepanjang 220 meter yang dikerjakan 200 orang.¹⁰⁸

Sementara itu rakyat Kebon Sayur, Tanah Abang bergotong royong membuat saluran. Sekitar 700 penduduk membersihkan dan meratakan kampung mereka karena hujan lebat yang terus menerus sehingga kampung Kebon Sayur terendam. Warga membersihkan got dari utara ke selatan dan got yang membujur dari barat ke timur dan 12 selokan kecil-kecil dan 9 gang.¹⁰⁹

Perbaikan saluran air di Kebayoran Lama 1,50 kilometer untuk mengairi sawah 2 hektar dikerjakan 100 orang dengan biaya 1.500 rupiah. Kelurahan Grogol Udik saluran air di Simprug 1,50 kilometer dikerjakan 500 orang dengan biaya 15.000 rupiah. Kelurahan Grogol Ilir diadakan perbaikan jalan dan saluran sepanjang 3 kilometer, dikerjakan 1.500 orang dengan biaya 12.500 rupiah, di kelurahan Senayan diadakan perbaikan saluran air dikerjakan 300 orang, dengan biaya 15.000 rupiah, sedangkan di Pondok Labu dibuat bendungan dan saluran dengan tenaga sebanyak 1.000 orang dengan biaya 75.000 rupiah.¹¹⁰

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Kotapraja 11 – 12 tahun ke 4, 28 Pebruari 1954

¹⁰⁹ Kotapraja No. 3 tahun 5, 30 Nov, 1954

¹¹⁰ Kotapraja No. 11 – 12 tahun ke 6 Juni/Juli 1956

Tabel 33: Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Saluran (Drainage)

| Tahun | Daerah/wilayah | Jumlah Warga | Biaya | Yang dibangun |
|-------|-----------------|--|--------|---|
| 1952 | Kaliders | | - | Perbaikan irigasi di Kalideres panjang 5.500 m |
| | Desa Pegadungan | | | 3.300 m |
| | Desa Benda | | | 2.000 m |
| | Desa Kapuk | 1000 orang dari 8 desa, pagar desa 120 dan anak-anak sekolah | | Saluran di desa Kapuk |
| 1953 | Meruya | 150 – 200 orang | 7.020 | Jalan dari Meruya Ilir ke Kebon Jeruk, lebar 4 meter tinggi 1,5 m |
| | Pondok Labu | | 15.000 | Pembuatan pintu air |
| 1954 | Kebon Melati | 800 | 2000 | Membersihkan got sepanjang 3 km, perbaikan jalan 2 km |
| | Krukut | 200 orang | | Membersihkan saluran 220 m |
| | Kebon Sayur | 700 orang | | Membersihkan 12 selokan kecil dan 9 gang |
| 1956 | Kebayoran Lama | 100 orang | 1500 | Perbaikan saluran di Kebayoran lama panjang 1,5 km |
| | Grogol Udik | 500 orang | 15.000 | Pembuatan saluran di Simprug panjang 1,5 km |
| | Grogol Ilir | 1500 orang | 12.500 | Perbaikan jalan dan saluran sepanjang 3 km |
| | Senayan | 300 orang | 15000 | Perbaikan saluran |
| | Pondok Labu | 1000 orang | 75.000 | Bendungan dan saluran air |

Sumber: *Diolah dari Majalah Kotapraja 1954*

Sementara itu, Kotapraja Jakarta Raya pada tahun 1957 anggaran untuk perbaikan saluran dan pengairan sangat minim. Sebagian besar biaya pemerintah digunakan untuk pembangunan sarana fisik lainnya. Perincian biaya yang dikeluarkan kotapraja adalah untuk membangun dan memperbaiki trotoar 172.800 rupiah, jalan 3.416.000, jembatan 548.000, perbaikan saluran 658.000, perbaikan aliran 106.000,

perbaikan kampung 4.166.300, mendirikan bangunan 1.989.500.¹¹¹ Dari data-data di atas menunjukkan bahwa masalah penanganan banjir di Jakarta belum dianggap penting. Hal ini sangat wajar mengingat pada periode 1940 – 1960, negara masih disibukkan dengan masalah-masalah politik sedangkan pembangunan kota masih berkuat pada masalah permukiman. Masalah banjir mulai ditangani baru pada awal 1960-an. Setelah pembangunan kompleks Gelora Senayan, Hotel Indonesia dan pembangunan Sarinah selesai, pemerintah berusaha mengendalikan banjir yang selalu menggenangi Jalan MH. Thamrin dan Jenderal Sudirman, daerah di sekitar jalan ini harus ditinggikan. Akibatnya Sungai Cideng mencari alur aliran baru, sehingga permukiman penduduk di daerah Jalan Sabang, jalan Medan Merdeka Barat, Kebon Kacang yang letaknya lebih rendah selalu kebanjiran.¹¹²

Setelah banjir tahun 1960, Sumarno didampingi penerbang Heru Atmodjo mengadakan inspeksi dari udara. Dari hasil inspeksi udara tersebut direncanakan untuk melakukan pengerukan sungai Grogol, Cisadane dan pembersihan saluran-saluran air.¹¹³ Setelah ini Fraksi DPRD mendesak Gubernur untuk segera merealisasikan Rencana Pluit. Banjir yang terjadi tahun 1960, menurut Abdullah Salim Ketua DPRD Jakarta Raya, menganggap perlu penanganan banjir secara integral dan berencana. Rencana polder Pluit dan rencana Kali Besar yang kemudian terkenal dengan Rencana Pluit untuk segera dilaksanakan. Biaya untuk rencana ini sekitar 225 juta. Pembangunan Waduk Pluit belum bisa dilaksanakan karena sebagian besar dana digunakan untuk menyambut kemeriahan Asean Games tahun 1962 yang sifatnya tidak nasional saja, tetapi juga internasional.¹¹⁴

Sumarno juga menekankan bahwa untuk membebaskan Jakarta dari banjir tidak cukup dengan pembangunan tambal sulam. Mengingat saluran-saluran di Jakarta sudah hampir 12 – 18 tahun tidak pernah dikeruk. Penataan kawasan pinggir sungai, tempat sampah dan berdirinya permukiman kumuh di sepanjang sungai.

¹¹¹ Kotapraja No. 5 tahun ke 7, 31 Januari 1957

¹¹² AR. Soehoed; *op. cit.*, hal. 63

¹¹³ Merdeka, 15 Feb 1960

¹¹⁴ Merdeka; 17 Pebruari 1960

...saja dapat membuatkan pula bahwa pemetjahan dari soal bandjir, sampah dan gubug-gubug ini tidak bisa selalu hanja dengan tambal sulam sadja. Pada ketika itu diterima usul saja, supaja kita dapat memulai dengan pekerdjaan pengeringan Pluit jang dapat mengeringkan kira-kira 1170 ha dan dapat pula menjediakan tempat perindustrian baru serta perkampungan baru. Muara sungai Angke dan Muara aluran lalu dikeruk jang hingga kini masih sadja diusahakan. Truck-truck sampah dibestel alat-alat pengeruk kanal-kanal untuk kampung-kampung dan tambahan motor kebakaran diusahakan, rentjana-rentjana penertiban pinggir-pinggir sungai dan kanal disusun. Pekerdjaan-pekerdjaan demikian harus diteliti oleh karena menjangkut kepentingan serta keselamatan banjak rakjat dan rakjat jang tidak mampu. Sekarang bagi saja sendiri, jang sehari-hari mendesak, mendorong, berdebat kadang-kadang dengan marah, ingin mempertjepat sesuatu satu kenjataan bahwa usaha2 penertiban jang besar ini sangat lambat djalannja. Mulai dari usaha mengeluarkan beaja sampai usaha2 menjusun tempat perkampungan baru untuk penampungan dan usaha untuk mendatangkan barang-barang dari luar negeri tidak berdjalan setjepat jang kita inginkan, jang kita tjita2kan.¹¹⁵

Pada tahun 1963, masalah banjir juga sudah dirasakan sangat menyusahkan masyarakat. Untuk menanggulangi banjir harus diadakan usaha yang radikal. Menurut Ir. Manuhutu, banjir yang terjadi karena munculnya permukiman yang sangat pesat. Untuk menangani banjir pemerintah sudah menyiapkan *Pluit Plan* yang fungsinya untuk mengumpulkan air terutama dari Cideng dan Krukut kemudian di pompa ke laut. Selain itu juga akan dibangun waduk di sebelah barat Grogol dan selatan kanal banjir. Untuk melihat kondisi sungai dan rencana yang lebih tepat, Walikota Sumarno dan Henk Ngantung bersama dengan Wampa Suprajogi dan para ahli dari Departemen PU mengadakan peninjauan melalui udara. Dari hasil pengamatannya akan disusun rencana jangka panjang dan jangka pendek.

...sebagaimana kita ketahui sudah beratus tahun Djakarta berdjung melawan bandjir. Sampai petjahnja perang dunia kedua, beberapa usaha penting telah dikerdjakan orang untuk 'membebasairkan' Djakarta dimulai dengan

¹¹⁵ Berita Indonesia; 30 Desember 1960

penggalian Kalideres, Banjir kanal, Terusan Sunter dan saluran2 lainnja serta perbaikan2 setempat. Hasilnja untuk waktu2 tersebut dapat dikatakan lumajan. Tetapi sekarang keadaan sudah lain, walaupun terusan2 dan saluran2 jang disebut diatas itu masih ada dan masih bekerdja. Menurut Direktur DPU Ir. Manuhutu salah satu penjebab adalah pembangunan jang begitu pesat...dengan demikian daerah2 jang dulunja ikut berfungsi menghisap air sekarang sudah sedemikian rupa dibangun sehingga lebih banjak air jang harus mengalir kedalam terusan2 dan sungai2 dan terusan serta sungai2 ini jang memang tidak tjukup besar, ternyata tebing2nja djuga mendjadi sasaran pembangunan itu sehingga profilnja menjadi lebih diperketjil lagi.¹¹⁶

Pemikiran-pemikiran yang muncul pada masa peralihan, menjadi dasar dalam penanganan banjir lebih lanjut. Dalam waktu hampir lima puluh tahun dari 1911 – 1960, masalah banjir masih menjadi pekerjaan pemerintah dan belum bisa dikendalikan dengan baik. Pada masa lima puluh tahun pertama ini, penanganan banjir menjadi prioritas utama pada sepuluh tahun pertama yaitu periode 1911 – 1919. Setelah itu terjadi penurunan dalam penanganan banjir. Meskipun demikian hasil-hasil yang telah diperoleh pada masa ini telah digunakan sebagai dasar-dasar pengembangan lebih lanjut. Bahkan pemikiran Ir Van Breen menjadi perencanaan induk penanganan banjir selanjutnya.

5.5 Pengendalian Banjir Dalam Gagasan Herman Van Breen dan WJ. Bloomestein

5.5.1 Gagasan Herman Van Breen

Setelah Herman Van Breen berhasil membangun kanal banjir Kali Malang dan pintu air Matraman dari tahun 1913 sampai selesai 1919, maka pada tanggal 26 November 1917, Walikota Batavia mengirim surat kepada Herman Van Breen untuk membuat suatu perencanaan perbaikan kesehatan di Batavia. Van Breen memulai

¹¹⁶ Mingguan Djaja; 2 Pebruari 1963

karirnya sebagai seorang insinyur klas 2e kemudian ditarik sebagai Insinyur Pengairan di Komisi Pengairan, BOW Batavia. Pada tahun 1919 Herman Van Breen sudah diangkat sebagai anggota *Gemeenteraad* Batavia. Dalam majalah *Indisch Bouwkundig Tijdschrift* pada 15 September 1919, Breen menulis dengan judul “*Kleine Werken te Verbetering Van Den Gezondheidstoestand ter Hoofplaats Batavia*”. Tulisan ini sebagai jawaban terhadap perintah Walikota Batavia. Dalam jawabannya Herman Van Breen dengan rendah hati mengatakan bahwa dirinya tentu tidak bisa membuat secara keseluruhan perencanaan yang bagus mengenai kondisi kesehatan di Batavia, karena hal itu sebenarnya menjadi tugas kotapraja. Untuk itu Van Breen mengatakan bahwa dirinya hanya mampu membuat sebuah pandangan kecil mengenai kondisi kesehatan di Batavia. Sehingga Breen hanya memberikan perencanaan global dari gagasannya dengan tujuan agar persoalan yang dihadapi kota Batavia mendapat perhatian dan bantuan dari semua orang untuk membantu mengarahkannya pada perencanaan yang benar.¹¹⁷

Masalah kesehatan di kota sebetulnya merupakan masalah lama yang selalu terjadi dan tidak mampu diselesaikan dengan baik. Bahkan kota dari dulu merupakan sarang penyakit. Perluasan kota Batavia selalu diikuti pula penyebaran penyakit. Begitu juga di Batavia, orang berkata bahwa Batavia merupakan kota paling tidak sehat di dunia sebuah tempat dimana sejumlah besar penduduk tinggal di gubug-gubug yang didirikan di tanah yang buruk di tengah sampah dan kotoran yang membusuk, tidak memiliki air cuci dan air minum yang bersih, diserbu oleh hewan-hewan yang membawa kuman penyakit di lingkungan yang tidak layak di huni manusia.¹¹⁸

Perbaikan dimulai sejak akhir 1913 yang meliputi proyek pembuangan air dan pengaliran air telah dianggarkan f 2.400.000 dan masih ditambah f. 6.600.000 yang meliputi pengeringan rawa-rawa yang sering digunakan sebagai pembiakan nyamuk malaria. Proyek-proyek ini seluruhnya dapat diselesaikan, berkat kerja keras Van Breen. Selain perkapalan domestik di dalam kota dapat berjalan kembali karena

¹¹⁷ *Indisch Bouwkundig Tijdschrift*; 15 September 1919, hal 305

¹¹⁸ *Ibid*; hal. 306

pengerukan lumpur dilakukan secara menyeluruh di kota Batavia, seperti di perkampungan padat Kwitang, Tanah Nyonya, Jalan Citadel dan Glodok. Banjir sudah dapat dicegah, sehingga daerah tersebut di atas sudah dapat dikeringkan dengan diuruk dan pencemaran aliran air maupun got pembuangan bisa dibersihkan. Untuk proyek ini menghabiskan dana hampir f 3.500.000. Meskipun dana berjuta-juta sudah dikeluarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perbaikan perkampungan padat tidak bisa dilaksanakan semuanya. Untuk itu Van Breen menyarankan agar peraturan pembangunan dan permukiman harus diperketat dan dibuat perencanaan permukiman, kepemilikan tanah, penelitian secara luas terhadap kondisi perkampungan dan cara mengatasinya, percobaan memberikan kredit pembangunan untuk mendorong pendirian rumah-rumah sehat dan rencana transportasi trem dengan membuka jalur trem karena permintaan yang semakin meningkat. Jika perencanaan ini diterapkan maka Batavia akan menjadi kota pertama di kota-kota tropis yang terawat baik, sehingga penduduknya bisa bangga dengan pengairan yang memadai, persediaan air yang baik, tetapi itu masih mimpi masa depan yang harus diperjuangkan. Meskipun demikian Van Breen juga dibuat khawatir jika perencanaan yang diajukan hanya berhenti pada ucapan saja.¹¹⁹

Untuk mewujudkan gagasannya Van Breen membagi proyeknya dalam 4 proyek yaitu: pertama; proyek untuk memperbaiki pembuangan air dan mengatasi kemacetan aliran air, kedua; proyek untuk memperbaiki sarana pengaliran air limbah dan kotoran; ketiga; proyek untuk penyediaan air mandi, minum dan cuci; keempat; proyek lain yang berkaitan dengan proyek di atas untuk kepentingan perumahan. Atas dasar empat proyek tersebut, Van Breen membagi lagi dalam kelompok-kelompok proyek.

Bagian A, kelompok satu; meliputi proyek pembongkaran dan pembersihan tanah-tanah yang tidak digarap (terlantar), kedua; penggalian dan perawatan got-got di perkampungan, agar air bisa mengalir. Dalam kaitan ini perlu betonisasi terhadap

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 307

saluran-saluran kecil. Kelompok II adalah pengeringan tanah yang berupa kubangan atau semacam rawa-rawa.

Bagian B, kelompok 1 menyangkut proyek penyaluran air rumah tangga menuju got pembuangan yang terbuat dari tanah yang terletak di belakang rumah saling sambung menyambung dari rumah satu ke rumah lainnya. Untuk menyambung bisa digunakan bambu atau kayu. Penampungan dan pemadatan tanah, penggalian lobang untuk limbah dapur, kotoran kandang dan sebagainya, tanah yang tersisa dari galian itu kemudian digunakan untuk menimbun tanah-tanah rendah atau memadatkan lobang-lobang yang ada. Untuk mendapatkan air bersih disarankan pengeboran berjarak 10 meter dari tempat pembuangan kotoran. Pembuangan kotoran dengan garis tengah 30 – 40 centimeter, dimana untuk kampung yang rawan banjir perlu diperdalam dan dilebarkan lagi. Selain itu lobang harus ditutup dengan beton cetakan dan diberi lobang kecil.¹²⁰

Bagian C adalah yang berkaitan dengan perawatan penampungan kotoran dengan cara di bawah penampungan harus diberi kerikil. Bagian D adalah pembuatan lobang kotoran yang berfungsi untuk berjongkok dan atas ruang yang diberi atap. Tempat ini dibuat terpisah dari rumah.¹²¹

Van Breen juga mengingatkan bahwa selama 30 tahun dari 1919 sampai 1949 akan terjadi perluasan kota dari 15 kilometer persegi menjadi 23 kilometer persegi hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk. Untuk melaksanakan proyek ini, dibutuhkan juru propaganda yang mempunyai kepedulian dan pengetahuan yang luas terhadap proyek kesehatan ini. Untuk gaji juru propaganda tersebut setahun dibutuhkan dana f 15.000. Untuk melaksanakan proyek tersebut, Van Breen bahkan telah membuat penghitungan selama hampir 30 tahun.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*, hal. 309

Tabel 34: Dana yang dibutuhkan Untuk Proyek Kebersihan Batavia 1919 – 1948

| Tahun | Biaya (f) |
|-------------|-----------|
| 1919 - 1923 | 1.082.100 |
| 1924 - 1928 | 610.600 |
| 1929 - 1933 | 281.700 |
| 1934 - 1938 | 271.800 |
| 1939 - 1943 | 253.400 |
| 1944 - 1949 | 195.500 |

Sumber: Indisch Bouwkundig Tijdschrift; 15 September 1919

Jika melihat perhitungan yang dilakukan oleh Van Breen untuk proyek seluruh Batavia selama 28 tahun menunjukkan bahwa Van Breen mempunyai wawasan yang sangat jauh ke depan. Selain itu jika proyek yang diusulkan di atas dilakukan semua maka proyek hanya membutuhkan dana besar pada lima tahun pertama karena pada lima tahun pertama, dana banyak terserap untuk pembangunan prasarana fisik seperti penggalian saluran dan betonisasi. Setelah akan berkurang karena sifatnya hanya perawatan.

Selanjutnya gagasan Van Breen yang lebih komprehensif dalam penataan air di Batavia dituangkan dalam tulisannya di Majalah *De Ingenieur in Nederlands*, sebanyak 4 artikel pada tahun 1923 No. 23, 26, 27 dan 28. Dalam tulisannya edisi No. 23 dengan judul *Verbetering Van den Waterstaat Van de Hoofdplaats Batavia*, Breen pada waktu itu sudah berkedudukan sebagai Wakil Walikota Batavia. Berisi tinjauan Van Breen tentang kondisi pengairan di Batavia diawali sejak tahun 1610 sampai awal abad 20. Dalam tulisannya, Van Breen juga memaparkan beberapa kajian tentang terhadap kondisi pengairan di Batavia. Misalnya dalam kaitannya dengan pemerintahan Van Imhoff sistem pengairan di Batavia pada pertengahan abad XVIII sangat buruk hal berlanjut sampai abad XIX. Awal usaha untuk memperbaiki pengairan di Batavia dimulai ketika Direktur *Waterstaat* Ir. Homan Van der Heide yang mendorong kepada pemerintah untuk menyetujui rencana melaksanakan proyek besar bagi perbaikan pengaliran air untuk ibukota Batavia. Untuk mengerjakan proyek

besar tersebut Van Breen disertai tugas untuk mengadakan persiapan dalam hal ini Van Breen melakukan kerjasama dengan Insinyur tata air Ir. L.J. Polderman, Ir. J.M. Stevenz, Ir. V.L. De Lannoy dan seorang arsitek G.L.A Kaltofen. Proyek yang dipersiapkan pada awalnya adalah untuk menangani masalah pengaliran air permukaan khususnya pengendalian Sungai Ciliwung. Setelah dilakukan penyelidikan secara menyeluruh ternyata proyek pengaliran air permukaan meliputi seluruh Batavia.¹²²

Perencanaan mengenai tata air ini oleh Van Breen dilanjutkan lagi dalam tulisannya di Majalah *De Ingenieur* No. 26 tahun 1923. Berdasarkan peta yang dibuat, Van Breen lebih menitikberatkan pada penataan air di bagian barat kota Batavia. Inti dari gagasannya adalah menyadap aliran air di bagian barat kota dan disalurkan dalam satu aliran besar. Dengan metode Perelear, Breen menghitung debit banjir sehingga diperoleh angka-angka banjir di beberapa lokasi:

- a. Cisadane dan Kali Angke di sekitar Pesing debitnya 650 meter persegi
- b. Cisadane, Kali Angke, Kali Grogol, Kali Krukut dan Ciliwung di sekitar Pesing 900 meter persegi
- c. Kali Angke, Kali Grogol, Kali Krukut dan Ciliwung di sekitar Pesing 575 meter persegi
- d. Kali Grogol, Kali Krukut dan Ciliwung di sekitar Pekembangan 375 meter persegi
- e. Kali Krukut dan Ciliwung di sekitar Karet 330 meter persegi
- f. Ciliwung dan Kali Sunter di sekitar Kelapa Gading 345 m³/det.¹²³

Penghitungan ini menjadi dasar Van Breen dalam menentukan perencanaan pembuangan air ke laut. Untuk pembuangan air ke laut Breen menyarankan air banjir tidak dialirkan melalui beberapa alur, tetapi harus ditangkap lebih dahulu dalam satu atau alur besar atau kanal. Hal ini berkaitan dengan kondisi topografi Batavia. Breen

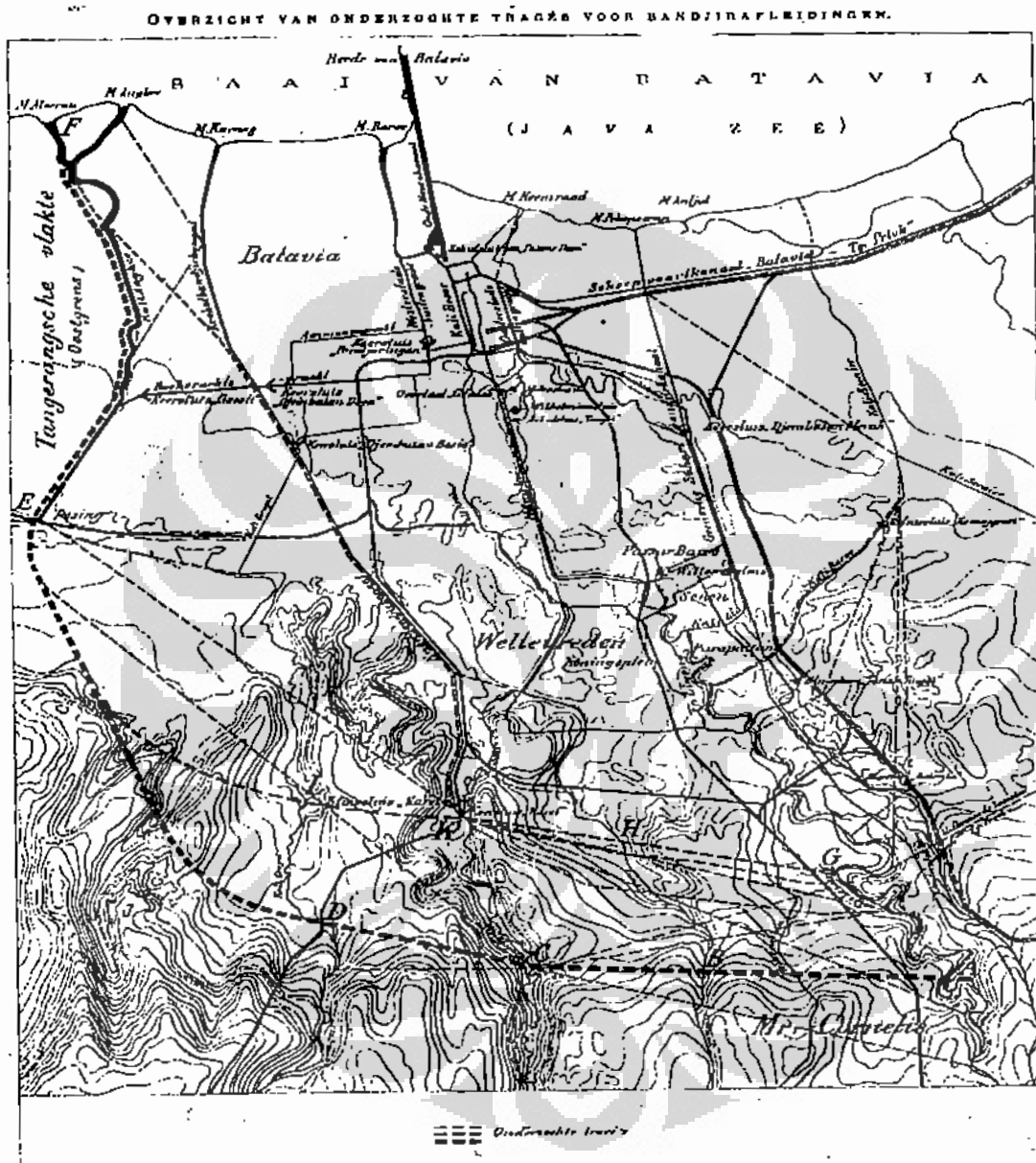
¹²² Prof. Ir. H Van Breen; *Verbetering Van den Waterstaat Van de Hoofdplaats Batavia; Eerste Gedeelte*; dalam *De Ingenieur*; No. 25, tahun 1923.

¹²³ *Ibid.*

sampai pada gagasan bahwa perlu dibuat satu terusan banjir dari Kali Ciliwung ke arah barat kemudian membujur ke utara sebagai perlindungan kota Batavia terhadap banjir dari selatan. Berdasarkan peta yang ada, Breen memberikan 3 alternatif. Pertama adalah alur A,B,C,D,E,F. Berdasarkan peta ini diperkirakan dari Sungai Ciliwung di Cawang ke barat memotong Sungai Krukut ke Senayan, memotong Sungai Grogol sampai Pesing bergabung dengan Sungai Angke terus ke laut. Alternatif kedua; adalah alur G,H,K,L,E,F yaitu saluran dimulai dari Kali Ciliwung di Manggarai ke barat memotong Sungai Cideng, Sungai Krukut, melewati sebelah selatan pintu air Karet, memotong Sungai Grogol setelah itu masuk Pesing bergabung dengan Sungai Angke menuju laut. Alternatif ketiga adalah alur K,L,E,F. Pada alur ini pemotongan lebih ke arah dalam kota dan kanal yang dibuat lebih pendek, yang merupakan gabungan dengan bendungan kanal banjir dan kanal Krukut yang dibuat pada abad XIX. Dari bendungan ini, air dari pintu air Karet ke arah utara melalui kanal Krukut terus ke barat bertemu dengan Sungai Angke di Pesing dialirkan ke laut.¹²⁴

¹²⁴ Prof. Ir. H Van Breen; *Verbetering Van den Waterstaat Van de Hoofdplaats Batavia; Tweede Gedeelte*; dalam *De Ingenieur*; No. 26, tahun 1923, hal. 520.

Gambar 43:
Peta Rencana Van Breen dengan Tiga Trace Penanggulangan Banjir



Sumber: *De Ingenieur in Nederlands No. 26, tahun 1923*

Untuk mengatasi adanya pengendapan Van Breen menetapkan bentuk profil untuk menjamin kecepatan arus. Misalnya di Karet muka air maksimum + 6,00 meter,

di Matraman permukaan air maksimum + 8,50 meter. Van Breen juga mengusulkan untuk menutup saluran Prapatan, Kali Lio dan saluran Molenvliet. Saluran Prapatan kemudian memang ditutup dengan sendirinya Kali Lio sudah tidak ada aliran dari Ciliwung. Dalam hubungannya dengan pengeringan beberapa rawa yakni Rawa Menteng di lembah Sungai Cideng, rawa-rawa Kampung Lima dan di Tanah Tinggi yang sebagian besar adalah daerah rendah. Van Breen memberikan saran karena daerah-daerah rendah dimana kalau hujan turun daerah tersebut tergenang air, maka pengeringan lahan di daerah tersebut lebih baik dengan sistem pompa. Karena dengan sistem pompa, air dapat dibuang dalam waktu 8 jam untuk mencegah berkembangnya nyamuk malaria.¹²⁵ Sistem pembuangan dengan menggunakan pompa ini kemudian di kenal sebagai sistem *polder*. *Polder* adalah lahan basah yang dilingkungi dengan tanggul rendah kemudian airnya melalui parit-parit dipompa ke luar sampai lahan cukup kering. Tanpa diuruk lahan ini dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan peternakan. Agar muka air tetap berada di bawah permukaan tanah maka dilakukan pemompaan secara terus menerus. Jika akan dibangun, maka sebagian lahan polder diuruk dengan pasir sampai padat dan stabil. Reklamasi di Belanda menggunakan cara ini.¹²⁶

Daerah yang diuruk adalah lahan rendah agar dapat digunakan untuk membuang air. Cara-cara lain dianggap lebih mahal. Daerah yang perlu segera diuruk adalah daerah rawa sekitar kota bawah (*bovenstaad*) dan wilayah pelabuhan Tanjung Priok, semua saluran dan terusan di kota bawah kecuali *Groningengracht* yang dianggap perlu dipertahankan untuk perluasan daerah perdagangan ke arah barat laut. Selain itu yang diuruk adalah aliran sungai Ciliwung dari Noorwijk ke utara (Saluran Molenvliet) dan Terusan Gunung Sahari. Daerah rawa di bagian kota barat yang merupakan bekas galian pabrik bata antara terusan Krukut dan Terusan Molenvliet di

¹²⁵ *Ibid.*, 524.

¹²⁶ AR Soehoed, (2004) *op. cit.*; hal. 58

sebelah selatan dari saluran *Bacherachtgracht* serta daerah Rawa Menteng di Kampung Lima dan rawa-rawa di Tanah Tinggi juga disarankan untuk diuruk.¹²⁷

Untuk mengamankan daerah Menteng dan Gondangdia, Van Breen juga membuat sistem pengaliran di daerah Gondangdia. Arus pembuangan diarahkan ke saluran pembuangan Gondangdia. Air penggelontoran yang masuk dari pintu air Manggarai ke *Wester hoofdaanvoerleiding* (saluran Surabaya) menyusur pada sisi timur daerah Menteng dengan berbagai titik-titik pengambilan air penggelontoran yang airnya dicurahkan ke saluran Gondangdia kemudian dialirkan ke Sungai Cideng. *Wester hoofdaanvoerleiding* kemudian berbelok ke arah Kali Cideng dengan nama saluran Kampung Lima.¹²⁸

Setelah berhasil menyelesaikan perencanaan pengaliran air permukaan, Van Breen merasa yakin bahwa Batavia akan mengalami perbaikan kesehatan. Untuk mewujudkan Batavia yang sehat maka Van Breen merencanakan sebuah perbaikan sistem pengaliran air rumah tangga yang merupakan sumber penyakit. Perencanaan tersebut dituangkan dalam tulisannya di Majalah *De Ingenieur in Nederlands* No. 28 tahun 1923. Dalam tulisan ini ada dua masalah yang disampaikan yaitu masalah pengeringan lahan basah dan pengaliran air rumah tangga, beserta biaya yang diperlukan. Masalah pembuangan air bekas cuci dan mandi agar tidak terjadi genangan, maka air rumah tangga dilengkapi dengan saluran dengan kapasitas 1 liter perdetik. Untuk mendukung kegiatan ini maka setiap rumah penduduk, tanah yang harus dikosongkan sebagai tanah terbuka adalah 200 – 1.000 meter persegi agar air kotor tidak meresap ke dalam air minum. Pembuangan dengan sistem saluran terbuka akan lebih irit dibandingkan dengan saluran tertutup.¹²⁹

Masalah kedua yang disarankan adalah masalah pengeringan lahan yang sebagian besar masih berupa rawa-rawa. Pengeringan lahan merupakan proyek dengan

¹²⁷ Prof. Ir. H Van Breen; *Verbetering Van den Waterstaat Van de Hoofdplaats Batavia; Derde Gedeelte*; dalam *De Ingenieur*; No. 27, tahun 1923, hal. 537.

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 545

¹²⁹ Prof. Ir. H Van Breen; *Verbetering Van den Waterstaat Van de Hoofdplaats Batavia; Vierde Gedeelte*; dalam *De Ingenieur in Nederlands Indie*; No. 28, 1923, hal 562 - 568

biaya kotapraja. Pengeringan air tanah dilakukan dengan cara menaikkan tanah hasil pengurukan sejauh tidak diperlukan oleh pelabuhan, jalan kereta api dan perusahaan pemerintah lainnya. Untuk memperoleh tanah urukan, kotapraja mencari tanah dengan harga murah selanjutnya disempurnakan secara sederhana dan bisa diberikan tanpa ganti rugi. Dengan cara ini dalam waktu 75 tahun seluruh daerah pengairan cukup tinggi dan bisa ditanami. Dengan memperhitungkan upah pekerja dan harga materi dimana pemerintah pusat bertugas memperbaiki aliran air permukaan diperlukan dana sebesar f 10.200.000. Pembuangan air di perkampungan yang menyangkut pembuangan air rumah tangga dan limbah sebesar f 2.300.000. Total biaya yang ditanggung f 12.500.000, sedangkan biaya yang ditanggung oleh kotapraja yang menyangkut pekerjaan pengeringan lahan f 9.000.000, pengaliran air limbah rumah tangga di perkampungan sebesar f 4.000.000 dan pembuatan saluran-saluran di kota f 1.000.000 total f 14.000.000. Pada akhir tulisannya Van Breen mengatakan bahwa proyek yang diusulkan harus segera dikerjakan, karena pada saat Van Breen menulis artikel, proyek-proyek pengairan sebagian besar dihentikan, dan seolah penduduk Batavia sudah puas dengan kondisi pembangunan yang ada.¹³⁰

Jika disimak dari perencanaan Van Breen jauh lebih maju dibandingkan dengan kota pada masa itu. Ketika H Van Breen menyusun rencana itu, kota Batavia masih terkonsentrasi di daerah Menteng dan Weltevreden, tetapi Van Breen sudah membuat perencanaan yang jauh lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa gagasannya jauh kedepan. Tetapi jika perencanaan pengaliran banjir masa sekarang masih menggunakan dasar-dasar pemikiran Van Breen tentu sudah tidak mampu lagi mengatasi banjir. Untuk itu diperlukan inovasi dan modifikasi yang sesuai dengan kondisi sekarang.

¹³⁰ *Ibid.*

5.5.2 Gagasan WJ. Blommestein

WJ. Blommestein lahir di Indonesia dan meraih gelar Insinyur dan Doktornya di *Technische Hoogeschool* di Bandung. Perhatiannya terhadap tata air di pulau Jawa sudah dimulai sejak muda. Untuk menangani tata air di Pulau Jawa dan Jakarta, beliau mengeluarkan gagasannya yang dimuat di majalah *de Ingenieur in Nederlands Indies* No. 4 dan 5 tahun 1949 dengan judul "*Een Federal Welvaartsplan voor het Westelijk Gedeelte van Java*". Dalam tulisannya tersebut, ia mengatakan bahwa 'dalam kurun waktu antara dua kali perang dunia (1914 – 1918 dan 1941 – 1945) produksi beras di wilayah Asia Tenggara meningkat hanya sepuluh persen sedangkan jumlah penduduk pada waktu yang sama meningkat diatas dua puluh persen.¹³¹ Pada waktu Bloommestein menyampaikan gagasan pada pertemuan insinyur *Koninklijk Instituut van Ingenieurs* di Batavia pada tanggal 18 Desember 1949 pikirannya masih tertuju pada Pulau Jawa Bagian Barat. Inti dari gagasan Blommestein adalah perlunya dua waduk besar di Kali Citarum, untuk pengairan di Pulau Jawa bagian Barat dengan luas 517.240 hektar.¹³²

Khusus penanganan banjir di Jakarta, Blommestein merujuk pada rencana Van Breen. Beliau menegaskan bahwa pengendalian banjir yang terutama ditujukan ke Sungai Ciliwung, Sungai Cideng dan Sungai Sunter. Untuk itu pasokan air dari Waduk Jatiluhur akan membawa perbaikan dalam penataan air di Jakarta. Namun pembangunan Waduk Jatiluhur akan memerlukan waktu kurang lebih enam tahun, sehingga masih memerlukan waktu yang lama. Untuk itu dari Jatinegara akan dibuat terusan sambungan ke Tanjung Priok. Terusan ini akan melintasi wilayah kota (lama) kemudian bersambung dengan terusan Mookervaart ke Tangerang dan Kali Ciujung. Saluran ini dapat dilayari oleh rakit dan perahu dengan ukuran maksimal 20 x 3,5 meter dengan kedalaman 1,25 meter. Untuk memasok air ke Jakarta dari Waduk

¹³¹ *De Ingenieur*, 1949, No. 4 dan 5.

¹³² *Ibid.*,

Jatiluhur (direncanakan 1950) maka saluran *Western Tarum Hoofdkanaal* (Saluran Induk Tarum Barat) disambung ke Ciliwung sedikit di selatan Manggarai dan dipompa ke pusat penjernihan air Pejompongan. Saluran Induk Tarum Barat dialirkan terus ke Sungai Ciujung untuk keperluan pengairan.¹³³

Dalam rencana Blommestein, disinggung juga peranan terusan barat-timur dari Cisadane ke Ciliwung pada elevasi diatas 100,00 meter kemudian menyambung ke Sungai Cikeas, Sungai Cileungsi, Sungai Cikarang, Sungai Cipamangkis, Sungai Ciomas dan Sungai Cibeet. Gagasan ini dapat membantu mengurangi air yang masuk Jakarta. Tetapi karena semakin meluasnya daerah permukiman di Jakarta bagian selatan, hal ini tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu harus ada modifikasi dari saluran ini di ketinggian 75,00 meter atau lebih rendah asal saja air tetap dapat memasuki Waduk Pangkalan di Sungai Cibeet yang merupakan anak sungai Citarum yang direncanakan berkapasitas 800 juta meter kubik. Rencana Blommestein mempunyai jangkauan yang lebih luas dibandingkan rencana Van Breen. Keduanya menampilkan perlunya suatu terusan *transversal* sebagai syarat utama bagi pengendalian banjir pada tanah datar aluvial di pantai utara Jakarta yang tidak hanya menangkis banjir pada satu sungai dengan pengalihan sebagian arus banjir ke sungai lain.¹³⁴

Oleh karena kebutuhan air Batavia, maka Blommestein pada tahun 1949 mengusulkan:

1. Membangun suatu tanggul laut sepanjang pantai Teluk Jakarta dari Muara Karang sampai Tanjung Priok, hingga terbentuk polder-polder dari daerah rawa, payau dan tambak sepanjang daerah pantai.
2. membangun waduk-waduk penampungan dan pengumpulan air, untuk dapat dimanfaatkan oleh tambak-tambak ikan yang pernah dibeli oleh Jawatan Kesehatan pada masa sebelumnya.
3. memperdalam saluran-saluran yang ada di wilayah tersebut pada sub b di atas dan pembuatan pintu-pintu pengatur tinggi muka air agar terbentuk kompleks-kompleks polder dengan tinggi permukaan air yang berbeda-beda.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ AR. Soehoed; *op. cit.*, hal. 55- 61

4. membangun sarana pompa pembuang air merangkap pusat pembangkit tenaga listrik hidro di Sewan di Cisadane dengan alur listrik tegangan tinggi ke sarana pompa Ancol.
5. membangun sarana pompa pembuang air Ancol dekat pada syphon Terusan Gunung Sahari.
6. pengalihan dan penyelesaian saluran Sentiong dan saluran Duri.
7. pembangunan pintu air untuk kapal antara lautan dan terusan Ancol dan antara kompleks polder satu sama lain.
8. pembangunan pintu-pintu air di Cengkareng dengan suatu saluran sambungan ke Pintu Air Karet.
9. pembangunan pusat penjernihan air dekat Pintu Air Karet, sementara dengan kapasitas 1 meter kubik perdetik untuk kemudian ditingkatkan.¹³⁵

Selain itu Blommestein menunjuk pula kepada kemungkinan peningkatan arus pada terusan Mookervart dengan kapasitas 8 meter kubik perdetik untuk mengamankan pelayaran perahu dan memasok air dari Sungai Cisadane ke Sungai Angke. Sebagian dari air ini dapat dimanfaatkan pula sebagai air baku minum.¹³⁶

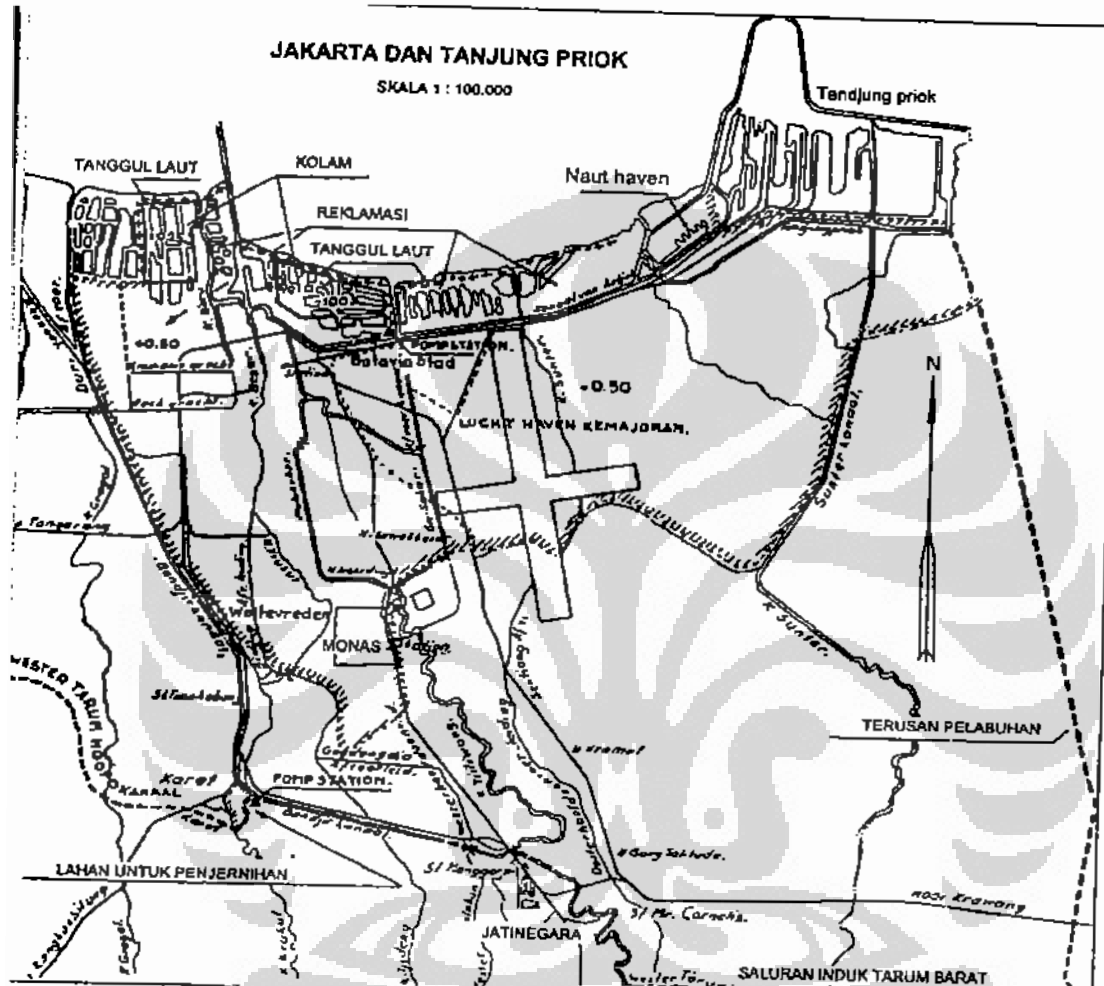
Berdasarkan gagasan Blommestein, ada beberapa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya adalah pembangunan pintu air untuk kapal antara lautan dan terusan Ancol dan antara kompleks polder satu sama lain, pembangunan pintu-pintu air di Cengkareng dengan suatu saluran sambungan ke Pintu Air Karet dan pembangunan pusat penjernihan air dekat Pintu Air Karet, sementara dengan kapasitas satu meter kubik perdetik.¹³⁷

¹³⁵ *De Ingenieur*, 1949, No. 4 dan 5,

¹³⁶ A.R. Soehoed; *op. cit.*, hal. 56

¹³⁷ *Ibid.*

Gambar 44: Peta Rencana WJ. Blommestein Tentang Pengairan di Jakarta



Sumber: *De Ingenieur in Ned. Indie* 1949

Pemikiran Blommestein ini pada akhirnya hanya berhenti pada gagasan saja, karena setelah itu terjadi perubahan politik di Indonesia. Pemikiran Blommestein pada saat ini masih relevan untuk dikaji mengingat masalah air di Pulau Jawa saat ini sudah mengalami krisis karena pada musim hujan selalu terjadi banjir dan pada musim kemarau kekurangan air.

Bab VI
Pengendalian Banjir Tahun 1965 – 1985:
Dari KOPRO Banjir Ke PBJR

6.1 Komando Pencegahan Proyek Banjir (Kopro Banjir)

Pada Januari 1960, banjir membenamkan Grogol, daerah perumahan baru dan tempat tinggal para anggota parlemen. Di perumahan ini, air mencapai setinggi pinggang dan kampung-kampung di sekitarnya mencapai atap rumah. Karena selalu dilanda banjir maka pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencegahan banjir. Kesadaran tentang pentingnya pengendalian banjir ini mulai dirintis sejak tahun 1965. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183, tahun 1965 tanggal 22 Juni 1965 pemerintah menyatakan bahwa semua pekerjaan yang berkaitan dengan pencegahan banjir dan bagian-bagiannya dianggap sebagai badan vital. Adapun penetapan badan vital didasarkan pada Penetapan Presiden No. 7 tahun 1963 tentang pencegahan pemogokan dan/atas penutupan (*lock out*) di perusahaan-perusahaan jawatan dan badan-badan vital¹. Jadi karena sudah ditetapkan sebagai badan vital, maka jika pengendalian banjir tidak dilakukan dengan baik maka akan dikenakan hukuman satu tahun. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani banjir.

Pertimbangan pemerintah menetapkan proyek banjir sebagai badan vital karena Proyek Pencegahan Banjir dirasakan sangat penting mengingat setiap musim

¹ Lembaran Negara RI No. 67, 1963 tanggal 22 Mei 1963; Tentang Pemogokan, Penutupan di Perusahaan-perusahaan Djawatan-djawatan, Badan-badan Vital. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan atau penutupan (*lock out*) di perusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan yang vital... Pasal 2; Barang siapa melakukan atau turut melakukan pemogokan atau penutupan (*lock out*) di perusahaan, djawatan atau badan yang dengan Keputusan Presiden dinyatakan vital, dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah. Pasal 3; dihukum dengan hukuman yang sama seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 Penetapan ini, barang siapa memberi kesempatan atau memantjing, mengadjak, mengandjurkan, menghasut, menjuruh, memerintahkan atau memaksa dilakukannya pemogokan atau penutupan (*lock out*) di perusahaan, djawatan atau badan yang dengan keputusan Presiden dinyatakan vital.

hujan daerah Jakarta selalu dilanda banjir, selain itu proyek juga menyangkut prestise Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia.

pasal 1 bahwa Proyek Pentjegahan bandjir di Djakarta Raya penting dalam rangka menanggulangi/meniadakan bandjir² dimusim hudjan jang selalu melanda daerah kota Djakarta dan jang menjebakkan pemusnahan modal dan investasi serta merugikan kesehatan rakjat;

Pasal 2 bahwa tudjuan proyek tsb menjangkut djuga prestise Ibukota Republik Indonesia dan kepentingan martabat Negara dan bangsa Indonesia;

Pasal 3 bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum chususnja untuk mentjegah gangguan terhadap kelantjaran pelaksanaan pekerdjaan Proyek Pentjegahan bandjir Djakarta Raya, perlu diadakannja tindakan pentjegahan adanja pemogokan/penutupan (*lock out*)

Pasal 4 bahwa tindakan pentjegahan adanja pemogokan/penutupan (*lock out*) itu terpaksa ditempuh dan untuk itu perlu proyek tsb dinjatakan vital sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 1963².

Keputusan Keputusan Presiden ini untuk memperkuat kedudukan Komando Proyek Pencegahan Banjir (Kopro Banjir) yang sudah dibentuk oleh pemerintah pada bulan Pebruari 1965³. Adapun tugas Kopro Banjir adalah mengadakan usaha-usaha untuk mencegah, mengendalikan banjir di Jakarta dan mengadakan berbagai tindakan perbaikan pengaliran dan saluran, pembuatan tanggul-tanggul dan lain-lain dalam rangka pencegahan dan pengendalian banjir. Tenaga kerja yang terlibat dalam Kopro Banjir terdiri dari: Pemerintah Pusat (DPU) Pemerintah Daerah (DKI Jakarta), ABRI (Zeni AD dan AKRI), tenaga teknis tingkat sarjana 11 orang, tenaga teknis tingkat *bachelor* (sarjana muda) 23 orang, tenaga teknis lainnya 21 orang, tenaga non teknis tingkat sarjana 2 orang, tenaga non teknis tingkat *bachelor* 2 orang, tenaga non teknis

² Keputusan Presiden RI, No. 183/1965 tanggal 22 Juni 1965

³ Keputusan Presiden RI, No. 29/1965 tanggal 11 Pebruari 1965

lainnya 150 orang, angkatan bersenjata: perwira 14 orang, bintara 13 orang dan tamtama 8 orang.⁴

Kopro Banjir dalam melaksanakan pekerjaannya dibagi dalam proyek hilir dan proyek hulu. Proyek hilir mencakup normalisasi sungai Cideng dan Krukut. Sungai ini perlu dinormalisasi untuk mengamankan pengalirannya di daerah kota sehingga airnya dapat dimasukkan ke waduk Pluit. Selain itu proyek hilir yang berjangka pendek antara lain pengerukan Sungai Kali Angke, Pesanggrahan, Grogol dan pembuatan saluran Muara Karang. Hal yang penting juga adalah penataan sungai dengan mengadakan ruang terbuka di tepi sungai selebar lebih 6 meter agar saluran air berjalan lancar⁵. Ruang terbuka ini merupakan jalur hijau. Selain itu juga dilakukan perbaikan tanggul dan profil banjir kanal, pengerukan dan perawatan saluran pembuangan air di Jakarta Tengah seperti saluran jalan Surabaya, jalan Madura, Pejambon, pengerukan Ciliwung di Pasar Ikan, saluran Kalibata (daerah Tebet), daerah Sentiong (daerah Kemayoran), Cempaka Putih, dan Sunter.⁶

Sementara itu, proyek hulu mencakup pembuatan waduk antara lain waduk Tebet, waduk Melati dan waduk Surabaya. Pembuatan waduk Tebet, didasarkan pemikiran bahwa daerah Tebet merupakan daerah perkampungan baru yang belum dipikirkan sistem pembuangan airnya. Selain itu pintu air (*duikker*) Manggarai yang panjangnya hanya 80 meter kapasitasnya terlalu kecil dan sukar direhabilitasi, hal ini memperlambat aliran air Ciliwung, sehingga mengakibatkan banjir di Tebet. Di daerah Tebet prioritas yang dilakukan adalah normalisasi saluran Tebet Timur dan pembuatan waduk di saluran Tebet Barat. Jadi kalau musim hujan air dari saluran Tebet Timur akan dialirkan terus sampai keluar di pintu air Manggarai, sedang air dari saluran Tebet Barat ditampung di waduk Tebet. Selain itu Kopro banjir juga merencanakan waduk Surabaya. Khusus waduk Surabaya ini tidak pernah terwujud.

⁴ Laporan Tim Kopro Banjir: *Komando Projek Pentjegahan Bandjir Djakarta Raya*; Djakarta: Ditjen Pengairan Dasar DPU, tahun 1965/1966.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Waduk Melati, bertujuan untuk mengurangi beban sungai Cideng dan Krukut. Waduk direncanakan dengan luas 6 – 8 hektar dengan kedalaman 1 – 1,5 meter, selain itu pembuatan penyaluran sungai Cideng ke waduk dan pembuatan pintu air di sebelah hilir pertemuan sungai Cideng dengan saluran Gresik. Untuk itu perlu pembuatan saluran pembuang dari waduk, dan pemasangan pompa sebanyak 4 buah dengan kapasitas setengah meter kubik perdetik. Keuntungan dari waduk Melati adalah mengurangi debit kali Cideng dan memperkecil daerah pengaliran sungai Cideng. Dengan adanya waduk ini, debit Sungai Cideng dapat dikurangi dan dapat digunakan untuk penggelontoran pada musim kemarau.⁷

Untuk menghilangkan banjir yang disebabkan pengaruh sungai Cideng di sebelah hulu banjir kanal Kali Malang dan mengurangi banjir di jalan Thamrin maka dibuat waduk Setiabudhi. Dengan cara membuang air dari sungai Cideng hulu langsung dialirkan ke saluran banjir. Selain itu juga berfungsi sebagai pembuangan air lokal di sekitar aliran sungai Cideng hulu. Air dari kedua waduk kemudian dialirkan ke saluran banjir dengan cara dipompa. Proyek Setiabudhi meliputi pembuatan waduk dua buah dengan luas dua hektar dan tiga hektar, dilengkapi dengan pembuatan gedung pompa tiga buah berkapasitas dua meter kubik perdetik.⁸ Dengan demikian daerah Setiabudhi (Dukuh Atas) dan Jalan Thamrin terhindar banjir.

Masalah pembebasan tanah menjadi pekerjaan yang sulit dipecahkan oleh Kopro Banjir, sehingga target tahun 1966 tidak terpenuhi misalnya pembebasan Pluit hanya berhasil 40 hektar, ini sekitar 80%, pembebasan sepanjang Cideng dan Krukut 5 hektar, Waduk Melati tiga hektar, Setiabudhi 10 hektar sekitar 65%.⁹ Untuk tahap awal Kopro Banjir berhasil melakukan pembuatan Waduk Pluit, Jelambar, Setiabudhi, Pesanggrahan, Sunter, Melati dan beberapa pembuangan air di Tebet yang selalu kebanjiran dan pembuangan Saluran Sentiong.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Laporan Tim Kopro Banjir: *Komando Proyek Pentjegahan Bandjir Djakarta Raya*, Djakarta: Ditjen Pengairan Dasar DPU, tahun 1965/1966.

¹⁰ *Mingguan Djaja*; 13 Agustus 1966

Untuk jangka panjang, Kopro Banjir berhasil melakukan survey dan perencanaan tata air yang meliputi bagian A, yaitu perencanaan drainase daerah barat meliputi Jelambar, Grogol, Tomang, Slipi, Gelora Bung Karno, Kebayoran Baru dan Kebayoran Lama. Perencanaan dilakukan oleh PN. Indah Karya Bandung. Sedangkan sebelah timur meliputi perencanaan Cempaka Putih, Sunter Barat, Rawamangun, Sunter Timur, Pulo Mas, untuk daerah ini baru berhasil menyusun prinsip perbaikan muka air tanah. Sedangkan Survey dan Perencanaan Bagian B ialah perencanaan *master drainage* seluruh Jakarta. Team survey dan Perencanaan berhasil menyusun suatu Pola Induk Tata Pengairan Jakarta Raya, yang dibuat dalam sebuah buku yang terdiri dari 9 jilid yang memuat sistem pengendalian dan pemanfaatan banjir di Jakarta untuk masa 20 tahun yang akan datang.¹¹

Sampai tahun 1966, dalam melaksanakan programnya Kopro Banjir tidak berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Kopro Banjir hanya mampu menyelesaikan sekitar 20 % dari rencana seluruhnya untuk mengatasi banjir karena keterbatasan anggaran.

Tabel 35: Hubungan antara Pembiayaan dan Hasil Pekerjaan yang dilakukan Kopro Banjir

| Tahun | Biaya yang dibutuhkan | Realisasi Pembiayaan | | Prosentase hasil pekerjaan | Sisa Pekerjaan |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | % | Rp | | |
| 1965 | 20.000.000.000 | 60% | 12.000.000.000 | 20% | 80% |
| 1966 | 23.260.000.000 | 90% | 20.400.000.000 | 13% | 70% |
| 1967 | 165.000.000 | 16% | 25.000.000 | | |
| | | | | | |

Sumber: *Kopro Banjir 1965/1966*

¹¹ Laporan Tim Kopro Banjir: *Komando Proyek Pentjegahan Bandjir Djakarta Raya*; Djakarta: Ditjen Pengairan Dasar DPU, tahun 1965/1966

Selain kesulitan dana, hal yang dirasakan memberatkan Kopro Banjir Jakarta Raya selama melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana pengendalian banjir belum ada yang diserahkan kepada pemerintah DKI. Karena dana pemeliharaan pemerintah DKI sangat terbatas. Hal ini menghambat pihak proyek karena Kopro Banjir harus menanggung biaya pemeliharaan yang berkisar sekitar 30 – 40% dari total dana proyek. Misalnya untuk pemeliharaan sungai Cideng dan sungai Krukut yang merupakan saluran drainase utama untuk melindungi Monas, Menteng, Kebon Kacang yang mengalir ke Polder Pluit setiap tahun harus dikeruk. Karena penduduk di sepanjang sungai menumpuk sampah di pinggir sungai sehingga akan longsor ke sungai. Selain itu saluran atau sungai yang digunakan sebagai jamban (kakus). Pembangunan rumah yang menjorok ke propil basah sangat menghambat aliran air secara gravitasi karena kemiringan sungai yang sangat kecil. Untuk pengerukan diperlukan alat berat *floating crane* dan truk pengangkut sampah. Lahan yang sempit mengakibatkan pekerjaan tidak bisa dilakukan secara tuntas, walaupun dapat dilakukan biasanya pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bongkar pasang jamban dan rumah-rumah penduduk. Di tempat-tempat yang sempit, pengerukan dilakukan dengan tenaga manusia. Dengan tenaga manusia maka kedalaman pengerukan hanya mencapai setengah meter. Selain itu untuk menghindari kemacetan lalu lintas, pengangkutan ke tempat pembuangan akhir harus dilakukan pada malam hari.¹² Sehingga hasilnya tidak maksimal.

Setelah banjir tahun 1970-an, Kopro Banjir diubah namanya menjadi Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum, cq. Direktorat Jenderal Pengairan. Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 154/KPTS/1972 tanggal 25 Mei 1972.¹³ Berdasarkan keputusan tersebut maka diangkat suatu *task force* khusus oleh Departemen PUTL dengan tugas membantu Pemerintah Daerah DKI untuk mencari

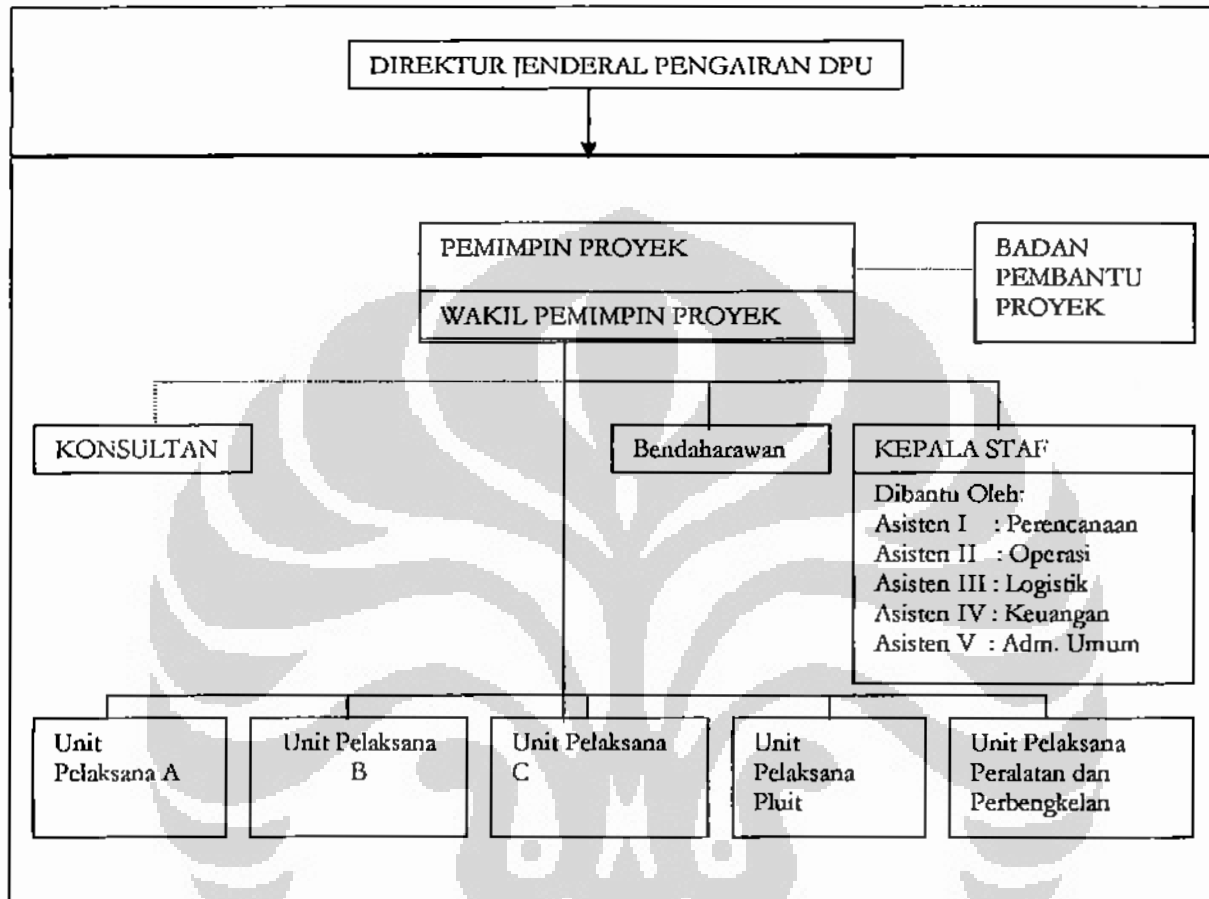
¹²Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya, *Aspek-aspek Pokok dan Masalah-masalah Lingkup Proyek Pengendalian Banjir Jakarta*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengairan, tt, hal 34-35

¹³ Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya; *Penjelasan Singkat Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya*; Jakarta, DPU, tanpa tahun, hal. 2.

solusi masalah tata air dalam rangka Rencana Pembangunan Wilayah Jakarta untuk masa waktu 1985 – 2000. *Task force* ini diberi nama Proyek Pengendali Banjir Jakarta Raya (PBJR) dengan tanggung jawab meliputi wilayah DKI Jaya. Dengan adanya PBJR maka Kopro Banjir dilebur kedalam PBJR. Wilayah kerja PBJR sesuai dengan SK Direktur Jenderal Pengairan No. 105/KPTS/1985 tanggal 3 April 1985 diperluas meliputi wilayah Jabotabek. Tujuan proyek adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan sejalan dengan usaha pengendalian banjir dan perlindungan sumber daya air untuk kegiatan ekonomi, permukiman dan produksi di wilayah kerja proyek. Adapun tugas pokoknya adalah menyusun pola induk pengendalian dan perlindungan sumber daya air untuk pengamanan, perlindungan dan pengembangan daerah-daerah pusat kegiatan ekonomi dan permukiman, melaksanakan kegiatan survey, investigasi, studi kelayakan dan disain dalam rangka pembangunan bangunan-bangunan pengairan berdasarkan pola induk yang sudah disusun, menyusun pola eksploitasi jaringan dan sistem sungai pada wilayah kerja proyek. Adapun wilayah kerjanya meliputi 185.000 hektar yang merupakan 16 wilayah aliran sungai yaitu sungai Cidurian, Cimanceuri, Cicarag, Cisadane, Kali Angke, Pesanggrahan, Sekretaris, Grogol, Krukut, Ciliwung, Cipinang, Sunter, Buaran, Cakung, Bekasi dan Cikarang.¹⁴

¹⁴ Penjelasan Singkat Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya (I), Departemen Pekerjaan Umum, Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya, No. Agenda 95/95, hal 3.

Tabel 36:
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PBJR



Sumber: Keput. Dirjen Pengairan No. 155/KPTS/Ditjen Air/1977 jo 14/KPTS/Ditjen Air/1978

PBJR juga mengadakan penataan terhadap danau-danau dan keberadaan hutan lindung yang ada di Jakarta. Misalnya Danau Sunter luasnya 42 hektar, pada masa pemerintahan Belanda difungsikan sebagai penampungan air limbah di sekitarnya. Kondisi daerah ini berubah setelah pembangunan perumahan dan kompleks Podomoro. Bertambahnya kompleks perumahan telah mengubah daerah tangkapan air hujan. Selain itu drainase limbah rumah tangga masuk ke danau mempercepat pendangkalan danau. Setelah itu fungsinya ditingkatkan menjadi daerah hutan kota, ekosistem

perairan, pengendali banjir, dan pengendali intrusi air laut. Danau Sunter merupakan daerah DAS Kali Baru. Danau Sunter kedalamannya 1,2 meter sampai 7,4 meter atau rata-rata 4,3 meter, dengan kedalaman lumpur setengah meter. Di danau ini terdapat pintu air pengendali banjir.¹⁵ Kawasan danau PT Jiep Pulo Gadung awalnya merupakan danau alami. Danau PT Jiep masuk dalam DAS Sungai Sunter. Danau ini mampu menampung 235 juta meter kubik. Daerah ini sekarang dikuasai oleh PT Jiep.¹⁶

Wilayah Rawa Teratai, digunakan sebagai hutan kota dan daerah resapan air. Situ Rawa Dongkal terletak di Cibubur, pada masa Belanda bernama Rawa Pondok Kelapa, kemudian sejak 1975 diubah namanya menjadi Situ Rawa Dongkal, dengan luas 17,9 hektar daya tampung air 643 juta meter kubik, merupakan situ alami yang dirubah fungsinya menjadi waduk penampungan.¹⁷

Kondisi rawa-rawa di Jakarta yang semakin berkurang juga dirasakan oleh Ali Sadikin. Sewaktu menjadi Gubernur pernah mengatakan kalau dulu masih banyak rawa dan sawah yang dihuni kodok yang bergembira bila terjadi genangan air, maka sekarang ini yang terjadi adalah sebaliknya. Sawah dan rawa itu sudah berubah menjadi daerah permukiman yang dibangun tanpa memperhitungkan sistem drainase yang baik.¹⁸

PBJR adalah proyek sektoral nasional berdasarkan asas dekonsentrasi, berada dibawah naungan Direktorat Sungai, DPU. PBJR pada 23 Maret 1992 diubah namanya menjadi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (PWSCC) yang sekarang kantornya berada di Jalan Tarum Barat Jakarta Timur.¹⁹

¹⁵ Pemda DKI; *Laporan Akhir Penyusunan Desain Hutan Kota DKI Jakarta*, naskah stensilan; 1996, hal 13.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Sinar Harapan*; 7 April 1984

¹⁹ Brief Description Flood Alleviation-Works in DKI Jakarta (2) ; Departemen PU; tanpa tahun, hal. 2; AR. Sohocd, *Membenahi Tata Air Jabotabek: Seratus Tahun Banjir Kanaal Hingga Ciliwung Floodway*, Jakarta: Djembatan, 2004, hal 78.

6.2 Rencana Induk Pengendalian Banjir: Wacana dan Realisasi

6.2.1 Rencana Induk Pengendalian Banjir 1965 - 1985

Dalam kaitannya dengan banjir, pemerintah DKI pada tahun 1965 mengeluarkan Rencana Induk Tata Ruang Kota Jakarta 1965 – 1985. Menurut rencana tata ruang kota itu dalam penanganan banjir di wilayah Jakarta dapat dikerjakan dengan: pertama, melakukan penataan *macrotsel* tata pengairan dengan mengadakan perbaikan saluran-saluran air dan bangunan air primer, kedua perbaikan *microtsel* tata pengairan dengan melaksanakan perbaikan saluran air di pinggir-pinggir jalan yang mengalirkan air hujan dari jalan-jalan dan halaman rumah ke saluran-saluran primer. Kedua sistem tersebut akan dilaksanakan secara simultan, karena jika dikerjakan secara terpisah-pisah hasilnya tidak akan maksimal.²⁰

Untuk itu dalam jangka panjang, direncanakan pengendalian banjir dari hulu sungai, memperbesar kapasitas pengaliran air dari sungai dan saluran air yang ada, pembuatan waduk penampungan air lokal, penambahan air penggelontor dan air minum dan pembentukan suatu badan yang mengurus tata pengairan di daerah Jakarta. Khusus untuk pengendalian banjir dari hulu sungai Cisadane dilakukan dengan pembuatan waduk di Parung Badak, perbaikan pintu Sewan dan perbaikan saluran Mookervart Tangerang. Sementara itu penanganan Ciliwung dengan cara memperbaiki kanal banjir Kali Malang, penerusan saluran banjir dari Karet ke Pesing, perbaikan pintu air Manggarai, pintu air saluran Gunung Sahari dan pembuatan saluran ke Cakung. Untuk mengendalikan Sungai Grogol dan Sungai Krukut dikendalikan dengan pembuatan saluran banjir di sebelah saluran Kemayoran, daerah Setu ke Pesing melalui Pesanggrahan. Usaha selanjutnya adalah memperbesar kapasitas pengaliran air sungai-sungai dan saluran-saluran air yang ada. Hal ini dilakukan dengan perluasan profil-profil dan saluran air di Sungai Angke,

²⁰ Pemda DKI; *Rencana Induk Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1965 – 1985*; Jakarta: Pemda DKI, tahun 1967, hal 6 – 7. Rencana Induk daerah Khusus Ibukota Jakarta 1965 – 1985 disahkan DPRGR tahun 1967; No. 9/DPRGR/P/1967.

Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Cideng, Ciliwung, Sentiong, Cipinang, Sunter dan kanal banjir Kali Malang.²¹

Masalah sedimentasi merupakan masalah yang penting dalam rangka pengaliran air secara gravitasi. Untuk itu dalam rencana 1965 – 1985 ditekankan perlunya pengerukan muara-muara sungai dan saluran di muara Aluran, muara Karang, muara Pekapuran, muara Sunter, pengerukan pelabuhan Tanjung Priok, Pasar Ikan, pembuatan saluran dari sungai Sentiong ke Sungai Sunter dan pengurukan daerah-daerah yang rendah.²²

Berdasarkan rencana induk tersebut maka jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan jangkauan kerja Kopro Banjir, karena mencakup pencegahan banjir di wilayah luar Jakarta. Jadi berdasarkan rencana induk ini, tekanannya tidak pada batasan administratif tetapi mengarah pada wilayah aliran sungai.

Untuk menanggulangi hujan lokal di wilayah DKI, perlu juga dibuat waduk-waduk penampungan dengan cara merubah jaringan saluran agar yang dapat mengalirkan air hujan dengan lancar. Untuk itu perlu saluran pembuangan dengan ukuran penampung yang luas dan dengan kemiringan yang cukup besar. Air dari saluran selanjutnya ditampung di waduk kecil dialirkan ke sungai atau ke laut dengan cara mekanis. Untuk itu daerah Jakarta dibagi dalam beberapa wilayah Jelambar, Grogol, Pluit, Jalan Thamrin, Stadion Senayan, Setiabudhi, Gunung Sahari, Lapangan Banteng, Ancol, Lapangan Terbang Kemayoran, Sunter, Pulo Mas, Jatinegara, Tebet dan Kemayoran. Di daerah-daerah ini jika perlu dibuat tempat penampungan dalam bentuk waduk dan pompa-pompa air.²³

Selain masalah banjir, hal lain yang penting untuk dilakukan adalah air penggolontoran pada musim kemarau dan persediaan air minum. Sumber air dari waduk Jatiluhur kemungkinan tidak mencukupi. Untuk itu perlu dicari sumber air lainnya dengan membuat saluran air minum dari instalasi penjernihan air di waduk

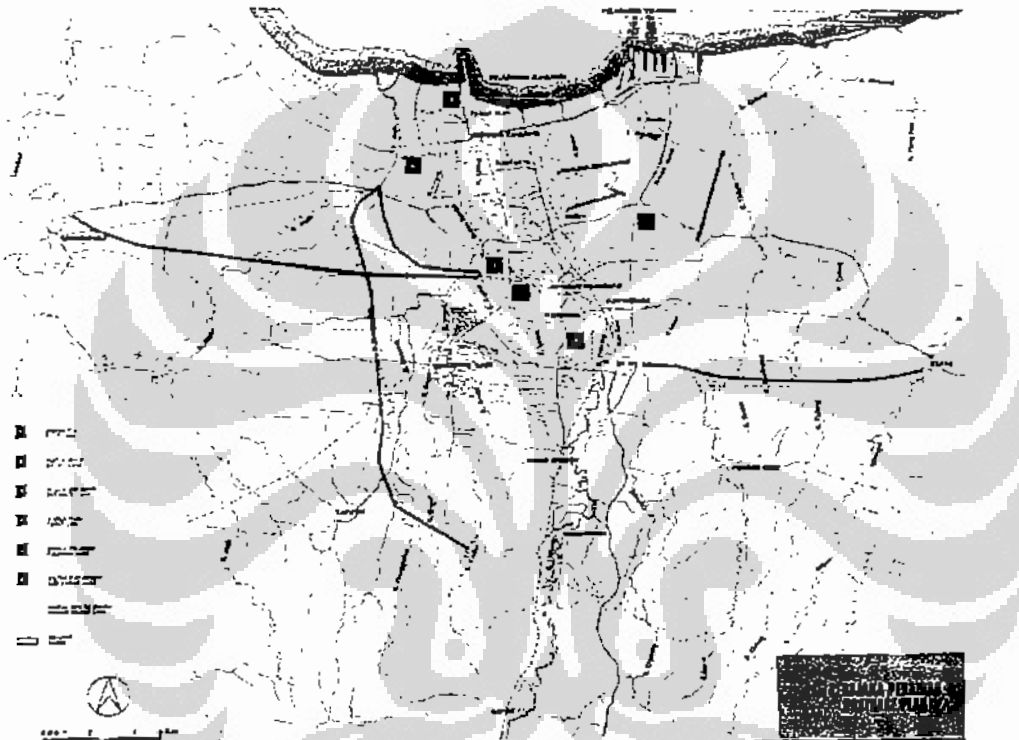
²¹ Rentjana Induk Djakarta 1965 – 1985; Pemerintah Daerah Khusus Djakarta Dinas Tata Kota, 1966, hal. 58

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

Parung Badak. Pembuatan saluran air dari waduk Parung Badak ke Ciliwung dan pembuatan saluran dari pintu air Sewan ke pintu air Karet untuk penjernihan Pejompongan.²⁴

Gambar 45: Peta Rencana Induk Sistem Pengairan Jakarta 1965 - 1985



Sumber: Pemda DKI; Rencana Induk Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1965 – 1985; Jakarta: Pemda DKI, tahun 1967

Berdasarkan pada rencana tersebut, maka penataan drainase harus didukung oleh adanya 6 waduk di dalam kota dan satu waduk di luar yaitu Waduk Parung Bodoh. Rencana ini sejalan dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Kopro Banjir.

²⁴ *Ibid.*

6.2.2 Rencana Induk 1973: Sistem Tapal Kuda dan Waduk Depok

Tercapainya stabilitas politik dan keamanan serta terkendalinya tingkat inflasi, memungkinkan bagi pemerintah Indonesia untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Pembukaan kembali ekonomi Indonesia bagi Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN serta dukungan negara-negara donor yang tergabung dalam IGGI (*Inter Governmental Group for Indonesia*) yang diketuai oleh pemerintah Belanda dan dilanjutkan dengan CGI (*Consultative Group on Indonesia*) yang diketuai oleh Bank Dunia²⁵. IGGI pada awalnya merupakan hasil perundingan antara negara maju yang sebagian besar dari negara-negara Barat seperti Belanda, Perancis, Amerika Serikat dan Jepang. Pertemuan pertama IGGI dilaksanakan di Amsterdam 23 – 24 Pebruari 1967 yang membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat-syarat lunak. Melalui pertemuan selanjutnya Indonesia mendapat bantuan kredit luar negeri tahun 1967 sebesar 120 juta dollar Amerika, tahun 1968 sebesar 325 juta dollar, untuk 1969 sebesar 500 juta dollar. Selain itu, karena Indonesia menjadi anggota badan ekonomi internasional, *International Bank for Reconstruction Monetary Fund* (IMF) dan *Asean Development Bank* (ADB), maka mendapat bantuan kredit lunak dan tenaga ahli dari negara kreditor²⁶. Dalam konteks inilah Belanda memberi bantuan kepada Indonesia.

Kerjasama antara pemerintah Belanda dan Indonesia tidak hanya terbatas dalam hal ekonomi. Dalam kaitannya dengan banjir, Belanda juga menjadi konsultan bagi penanggulangan banjir juga. Selama 5 tahun, pada tahap I, dimulai 1 April 1969, dengan anggaran 200 juta rupiah dan 100.000 dollar USA, pada tahun kedua dianggarkan 260 juta rupiah. Pada tahun 1970, atas bantuan hibah dari Belanda dialokasikan 1 juta dollar untuk pengendalian banjir di Jakarta. Dalam kerjasama tersebut misi dari Belanda beranggotakan H. Vlugter, ahli masalah sedimentasi, R

²⁵ Muhammad Hisyam (ed); *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal. 240

²⁶ Anhar Gonggong dkk; *Sejarah Nasional Indonesia VII: Lahir dan Berkembangnya Orde Baru*, Jakarta: Depdikbud, 1993, hal 172 -173.

Glazener, supervisor dan proyek Manajer, E Both ahli mekanika, JH Kop insinyur sanitasi dan drainase perkotaan, L. Visser ahli hidrologi. Sementara itu misi dari Jakarta adalah Soepardi Poerwana, Hally Dezar, Soeprapto, MAE Rogahang, Soenarto.²⁷ Untuk penelitian rencana pembangunan kanal barat, tim ahli dari Indonesia antara lain Suyono Sosrodarsono, M. Attamimi, R Redha sedangkan dari Belanda terdiri dari R Glazener berlaku sebagai ketua tim dan JF. Versnel, seorang sosiolog yang mempelajari keadaan sosial ekonomi kota-kota besar di Indonesia. Team juga mengadakan pertemuan dan peninjauan ke beberapa wilayah di Indonesia antara lain Bandung dan Surabaya.²⁸

Kerjasama dengan Belanda dalam kaitannya dengan penanggulangan banjir dimulai ketika Jakarta pada 10 Pebruari 1970 dilanda banjir, bahkan sampai di melanda Istana Negara. Pada tanggal 4 – 23 Mei 1970 telah terjadi diskusi dan kunjungan utusan Belanda yang dilakukan oleh Both, Kop dan Visser dan Proyek PBJR. Setelah mengadakan diskusi pada tanggal 4 Mei 1970, tim mengadakan penelitian ke Waduk Melati, Waduk Setiabudhi, Kali Opak, Waduk Pluit, Pasar Ikan, Syphon Gunung Sahari, Jembatan Merah, Tomang Barat, Kali Sekretaris, Waduk Grogol, Terusan Ancol, dan sungai-sungai yang ada di Jakarta. Berdasarkan penelitian awal tersebut maka ada dua penyebab banjir yang selalu melanda Jakarta, yaitu sistem drainase kota yang sangat terbatas, khususnya kanal, selokan, gorong-gorong yang kecil dan pengaliran yang lambat karena tumpukan sampah. Kanal, muara sungai dan selokan seolah menjadi tempat pembuangan sampah. Untuk tindak lanjutnya tim merekomendasikan beberapa hal yang harus dikerjakan sebagai proyek jangka pendek yaitu:

1. Perlunya tempat pembuangan sampah yang bersifat jangka panjang dan melarang pembuangan sampah di kanal dan selokan dan memberi hukuman bagi yang melanggar. Dalam kaitannya dengan sungai dan kanal tim merekomendasikan untuk membersihkan dan memperbarui profil-profil sungai

²⁷ Nedeco-Grontmij-Ilaco; Djakarta Flood Control Preliminary Survey and Recommendations: No Agenda 87/75; Djakarta; June 1970, hal. 8.1

²⁸ *Ibid.*,

yang sudah usang yang panjangnya sekitar 90 kilometer. Selain itu masalah pengerukan sungai, pelebaran badan sungai dan selokan diantaranya Muara Ancol, Pasar Ikan, Karang, Kali Baru (Saluran Prapatan)

2. Syphon di kanal Gunung Sahari dan kanal Ancol dibuka dan dibersihkan
3. Pintu air Gedung Panjang dari Kali Opak ke Pasar Ikan ditata dengan diperdalam dan diperlebar, berdekatan dengan pintu air baru di Waduk Pluit juga harus dibersihkan.
4. Kali Baru (Saluran Prapatan) yang berasal dari daerah Pasar Senen ke Kali Sentiong (Kali Baru Timur) di perbaiki karena terlalu kecil.
5. Pembangunan stasiun pompa air dengan kapasitas 1 m³/detik di banjir kanal dekat dengan Jembatan Dua untuk disalurkan ke Terusan Angke dan saluran Bandengan.
6. Normalisasi dan perluasan Kali Krukut dari by pass Gatot Subroto ke banjir kanal. Pembangunan 2 jembatan di atas jalan jenderal Sudirman, dan Jenderal Gatot Subroto.
7. Penggalian Sungai Sekretaris ke Sungai Kali Angke. Pembangunan pemasok air di Kali Sekretaris dekat Waduk Tomang Barat dan penyabangan pengaliran di Kali Angke atau Kali Grogol
8. Staff Proyek Pengendalian Banjir Jaya yang siap untuk program jangka panjang.²⁹

Selain itu Nedeco juga merekomendasikan program lainnya yang meliputi:

1. Program jangka panjang sistem drainase dan skema kontrol banjir dari Jakarta secara luas
2. Perlunya staf Proyek PBJR yaitu, 3 insinyur sipil, 5 ahli teknisi, 5 ahli gambar, 5 sopir, selain itu juga 3 tenaga ahli asing, 1 orang insinyur sipil ahli hidrologi dan hidraulika untuk 24 bulan, 1 insinyur sipil drainase kota, 24 bulan, 1 sipil ahli sanitasi selama 3 bulan. Setelah insinyur sipil memperlajari selama 2 tahun, merencanakan dan mendesain untuk jangka panjang dan jangka pendek.
3. Penelitian kemungkinan perluasan banjir kanal dari Karet ke Kali Angke.
4. Penelitian kemungkinan pembuatan kanal baru dari Ciliwung ke Kali Sunter terus ke Pelabuhan Tanjung Priok
5. Perlu pembuatan sistem drainase dan rencana pembangunan Jakarta dengan design yang standard.

²⁹ *Ibid*, hal. 1.4

Untuk optimalisasi proyek jangka panjang dan jangka pendek diperlukan dana 1 juta dollar yang digunakan untuk:

| | |
|--|-----------------------------|
| Pembelian alat-alat yang berhubungan dengan crash program | US 844,000 |
| Pembelian alat mekanika dan mesin untuk pompa air Jembatan | US 40.000 |
| Dua | |
| Pembelian peralatan untuk program jangka panjang | US 5.000 |
| Pembuatan Perpustakaan teknik | US 1.000 |
| Dana konsultasi ahli selama 2 tahun | US 110.000 |
| Jumlah | US 1.000.000. ³⁰ |

Berdasarkan rekomendasi tersebut, pada bulan Pebruari 1972, PBJR mempresentasikan beberapa alternatif sistem drainase dan perluasan kontrol banjir Jakarta di depan pejabat DKI. Setelah itu pada bulan April 1973 Gubernur DKI memutuskan alternatif yang telah ditawarkan oleh PBJR. Selanjutnya pada bulan Desember rencana induk dipublikasikan kepada masyarakat. Dalam rencana tersebut untuk mengendalikan banjir di Jakarta Departemen PU pada tahun 1973 mengeluarkan rencana induk pengendalian Banjir Jakarta Raya bekerja sama dengan *Netherlands Engineering Consultants* (Nedeco). Rencana induk meliputi kegiatan makro dan mikro jangka pendek menengah dan panjang. Direncanakan menghabiskan dana 450 milyar rupiah.³¹

Rencana induk 1973 yang penting adalah rencana perluasan banjir kanal barat (*extension of western banjir canal*). Perluasan dimulai dari pintu air Karet banjir kanal Kali Malang kemudian berbelok ke utara, sekitar 300 meter sebelah selatan pintu air Karet, saluran akan disambung lebih ke barat memotong sungai Grogol, ke utara melintasi sungai Sekretaris bergabung dengan sungai Angke di daerah Pesing, panjang kanal sekitar 8 kilometer, dengan lebar 100 meter. Sungai Kali Angke akan dilebarkan lurus sampai laut sepanjang 6 kilometer dengan lebar 150 meter.

³⁰ *Ibid*, hal. 1.6

³¹ Suara Karya; 23 November 1982

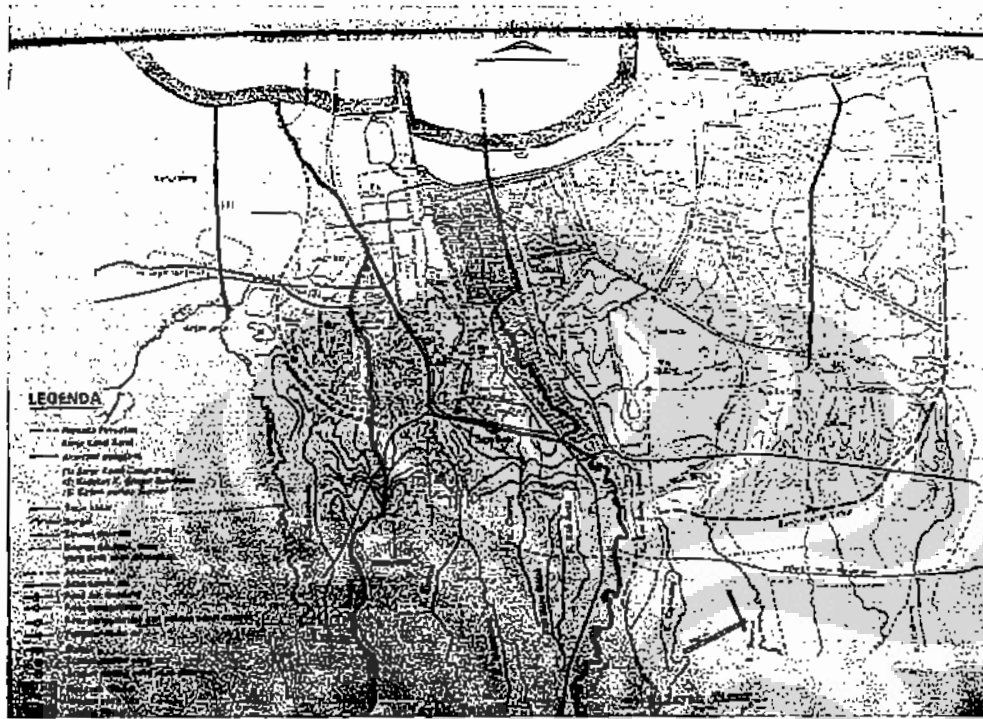
Perluasan kanal akan menampung banjir dari sungai Grogol dan sungai Sekretaris dan daerah barat banjir kanal yang rendah. Sehingga daerah permukiman padat dan pembangunan *real estate* yang banyak terdapat di daerah Jakarta Barat dapat dilindungi oleh kanal barat yang baru. Selain itu jika kanal ini jadi maka daerah rendah antara kanal lama dan kanal baru dari pintu air Karet sampai laut seluas 3.240 hektar akan terlindungi.³²

Pembangunan Karang Drain antara kanal lama (kanal Krukut) dan kanal barat akan mengambil-alih ekses banjir dari daerah Thamrin dan Menteng. Selain perluasan kanal barat juga akan dibangun dua polder dengan sistem pompa yaitu Tomang Barat dan Grogol. Selama diskusi antara kedua negara disediakan dana sekitar 40 milyar gulden. Dana itu akan disediakan oleh Pemerintah Belanda³³. Rencana ini sebenarnya sudah direncanakan oleh van Breen dalam rencana tahun 1923. Jadi kalau proyek ini akan dikerjakan tahun 1979 proyek sudah terlambat 56 tahun. Hal ini tentu sudah terlambat karena jumlah penduduk Jakarta bertambah. Jadi walaupun dibangun kanal ini sudah tidak besar manfaatnya, karena ketika van Breen merencanakan proyek itu, di daerah tersebut masih termasuk luar kota. Pada tahun 1979 wilayah yang akan dibangun kanal sudah menjadi permukiman padat dan dekat dengan pusat kota.

³² Indonesia: Preparations for The Execution of The Western Banjir Canal Extension in Jakarta; Report of an appraisal mission, February 1978, hal. 2.

³³ *Ibid.*

Gambar 46:
Peta Rencana Induk Pengendalian Banjir dan Drainase di DKI Jakarta 1973



Sumber: *Penjelasan Singkat Mengenai Penanganan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir DKI*

Proyek dimulai 1 April 1979. Proyek dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok I dari laut kilometer 14,1 sampai kilometer 5,8 di Kebun Jeruk. Menurut perhitungan, proyek tahap ini membutuhkan dana untuk penggalian tanah sekitar 1.112.600 meter kubik dengan biaya 1.113.000.000 rupiah, pembuatan pintu air Kebun Jeruk dengan biaya 450.000.000 rupiah; *inlet* dan *outlet* 150.000.000 rupiah, jembatan 4 buah dengan biaya 2.350.000.000 rupiah selain itu untuk jalan inspeksi sepanjang 5,5 kilometer (lebar 10 meter dan 20 meter) dan sepanjang 2,8 kilometer dengan lebar kanan kiri 4 meter kali 4 meter dengan biaya 970.000.000 rupiah. Total untuk jumlah proyek I adalah 5.033.000.000 rupiah. Proyek kelompok II dari kilometer 6 sampai kilometer 10, biaya yang dibutuhkan 3.044.000.000 rupiah dengan perincian untuk

biaya penggalian tanah sebanyak 2.166.000 meter kubik dengan biaya 2.116.000.000 rupiah; *inlet* 2 buah dan *outlet* 2 buah dengan biaya 540.000.000 rupiah, jembatan dengan biaya 300.000.000 rupiah, jalan inspeksi 4 kilometer dengan lebar 4 meter kali 4 meter dengan biaya 88.000.000 rupiah. Kelompok III dari kilometer 4,2 sampai kilometer 6 dibutuhkan biaya 2.551.000.000 rupiah dengan rincian biaya penggalian tanah sebanyak 486.750 meter kubik dengan biaya 486.000.000 rupiah, jembatan Slipi dan jembatan kereta api seluas 2.610 meter persegi dengan biaya 1.315.000.000 rupiah, *inlet* dan *outlet* masing-masing 1 buah dengan biaya 400.000.000 rupiah; pembangunan pintu air Karet 150.000.000 rupiah dan jalan inspeksi sepanjang 1,8 kilometer dengan lebar 10 meter kali 10 meter, dengan biaya 200.000.000 rupiah. Jadi total pengerjaan konstruksi dibutuhkan dana sebesar 10.628.000.000 rupiah. Selain itu, biaya paling besar adalah pembebasan tanah penduduk yang akan digunakan untuk kanal sebesar 8 milyar rupiah. Jadi total biaya perluasan banjir kanal barat termasuk biaya konsultan, jumlah seluruhnya adalah 14 milyar rupiah.³⁴

Adapun *design kanal* barat ada dua seksi, untuk seksi satu diperkirakan dari kilometer 8,2, lebar dasar 17 meter dengan tanggul di kanan kiri dengan ketebalan 1 meter banding 1,5 meter. Seksi kedua dari kilometer 14,1 dengan lebar dasar kanal 28,00 meter dan tanggul satu meter banding dua meter.³⁵

Masalah yang dirasakan berat adalah masalah pemindahan penduduk, jumlah penduduk yang jumlahnya sekitar 18.000 orang. Untuk itu pengambilalihan tanah dilakukan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Presiden dengan nama Panitia Negara. Dalam pengambilalihan tanah ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan yaitu kompensasi. Dalam kompensasi ini dibedakan atas pemilik tanah dan penyewa. Apabila tanah dikuasai oleh penyewa maka ganti rugi akan dibagi dua, 50 persen untuk pemilik dan 50 persen untuk penyewa. Untuk menghindari permainan harga tanah maka daerah yang akan dilewati kanal ditetapkan sebagai daerah tertutup,

³⁴ Appendix II; Estimated Project Cost; dalam Indonesia Preparations for The Execution of The Western Banjir Canal Extension in Jakarta; Report of an appraisal mission, February 1978

³⁵ Indonesia Preparations for The Execution of The Western Banjir Canal Extension in Jakarta; Report of an Appraisal Mission February 1978, hal. 17

karena pemilik tanah meminta ganti rugi yang tinggi. Di antaranya di daerah Kecamatan Duren Sawit beberapa rumah hanya akan dijual dengan harga tiga milyar rupiah. Selain itu proyek juga akan melewati kompleks perumahan pegawai pemerintah seperti kompleks DPU di Petamburan, kompleks Hankam Grogol, di kompleks ini merupakan tempat persilangan kanal dengan Sungai Grogol. Selain itu juga dilakukan pembebasan pada permukiman di Kompleks Perikanan di Pejompongan, perkampungan di sepanjang rencana kanal, sepanjang Sungai Kali Angke yang merupakan daerah permukiman padat, terutama di daerah Pesing sampai ke laut.³⁶

Berdasarkan rencana induk 1973 maka dalam penanganan banjir makro diperlukan kanal banjir yang berada di luar Jakarta untuk menampung air yang masuk ke sungai yang ada. Kanal tersebut hampir menyerupai setengah bola yang melingkari kota Jakarta. Untuk itu selain kanal barat juga perlu dibangun kanal timur.³⁷ Banjir kanal timur tersebut akan memotong aliran sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Cakung, Tarum Barat dan Cilincing.³⁸ Adapun sungai yang disalurkan ke kanal banjir timur melintasi sungai Sunter, sungai Buaran, sungai Jatikramat, sungai Cakung. Dengan kanal ini akan melindungi wilayah Jakarta seluas 16.500 hektar.³⁹ Kanal timur akan dibangun pada pelita IV tetapi dengan beberapa penyempurnaan teknis, yaitu memotong dua sungai yaitu Cipinang dan Sunter kemudian masuk ke Sungai Buaran dan saluran Cakung. Rencana induk ini didasarkan atas penelitian menyangkut data curah hujan 100 tahun di Jakarta dan sekitarnya, kondisi pasang surut air laut, kondisi ketinggian Jakarta serta rencana induk kota Jakarta 1965 – 1985.⁴⁰

Dalam rencana induk pengendalian banjir DKI Jakarta, selain pembuatan banjir kanal timur dan perluasan banjir kanal barat adalah mengefektifkan sungai lama

³⁶ *Ibid.*, hal. 12-13.

³⁷ Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya; *Flood Alleviation Works in DKI Jakarta: Brief Description*; Jakarta: Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya; tanpa tahun, hal. 29.

³⁸ *Sinar Harapan*; 7 April 1983

³⁹ AR Soehod; *op. cit.*, hal 90.

⁴⁰ Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya; *Studi Kelayakan Studi Dampak Lingkungan Untuk Waduk Depok: Final Report*; Jakarta: Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya, tanpa tahun, hal. 1-2.

sebagai *main drain* (aliran utama). Dengan adanya kanal-kanal baru maka sungai lama atau sungai asli akan difungsikan sebagai aliran utama air yang berasal dari dalam kota saja, karena air dari luar Jakarta sudah ditampung oleh kanal lama. Dengan demikian muka air dapat diturunkan dan jaringan drainase sekitarnya dapat mengalir secara gravitasi. Meskipun muka air pada sungai-sungai dapat diturunkan, namun pada saat hujan periode 25 tahun masih akan meluap di daerah dekat pantai, oleh karena itu, di daerah ini masih diperlukan penanggulangan. Dengan adanya tanggul di kanan kiri sungai maupun kanal maka daerah rendah sepanjang pantai tidak dapat mengalirkan airnya secara gravitasi ke sungai di sekitarnya. Daerah-daerah ini adalah daerah tertutup karena merupakan daerah *polder*. Drainase di daerah *polder* ini harus dilakukan dengan menampung air di dalam waduk dan selanjutnya di pompa ke luar *polder* kemudian dialirkan ke laut.⁴¹

Selain *polder* di daerah pantai, untuk mengendalikan aliran air yang berasal dari luar kota Jakarta maka perlu dibangun waduk penampungan di daerah Selatan Jakarta. Untuk itu pemerintah merencanakan membangun waduk di Depok. Waduk Depok diharapkan bisa dikerjakan dalam pelita IV (tahun 1984 - 1989). Lokasi waduk di Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas Depok, Desa Mekarjaya Sukmajaya, Bogor luas seluruhnya 300 ha. Pembebasan menurut rencana dimulai 1984. Bendungan yang terletak di Ciliwung di desa Kemirimuka akan menggenangi kawasan meliputi 2,50 kilometer persegi pada daerah aliran kali Ciliwung di hulu. Adapun perincian data teknis waduk, luas daerah pengaliran 240 kilometer persegi, dengan luas genangan dan elevasi dengan perencanaan/ perhitungan untuk banjir periode 1000 tahun yakni 2,50 kilometer persegi dengan elevasi 77,34 muka waduk normal 1,66 kilometer persegi elevasi + 74,25 kapasitas waduk pada banjir 1.000 tahun, 20,2 juta meter kubik dengan muka air normal 14 juta meter kubik dan muka air terendah (mati) 0,30 juta meter kubik. Tipe bendungan dengan urukan tanah non homogen, lebar puncak 10 meter dan panjang puncak 860 meter. Proyek ini selain

⁴¹ A Brief Description on The Problems of Flood Control in Jakarta: Cakung Drain; Directorate General of Water Resources Development, tanpa tahun, hal. 8.

untuk pengendalian banjir di daerah Jakarta, juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi kota Jakarta dan Depok dan penggelontoran limbah kota Jakarta di musim kemarau. Menurut rencana proyek ini selesai 1991.⁴²

Untuk merealisasikan proyek ini, melalui Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: KU 03.04.02-Aa. 28/47, tanggal 10 Oktober 1984, kerjasama antara Proyek PBJR dengan Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan UI untuk menyusun Analisis Dampak Lingkungan. Sebagai penanggung jawab adalah Mohammad Soerjani dan ketua Tim Ny. Indreswari Guritno⁴³. Berdasarkan kajian tersebut biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun Waduk Depok dari tahap mobilisasi sampai selesainya fasilitas dan perlengkapan lainnya, tidak termasuk biaya pembebasan tanah, biaya pemindahan penduduk, biaya ganti rugi rumah, tanaman dan sebagainya, berdasarkan indeks harga bulan Mei 1983, setelah memperhitungkan kenaikan harga BBM dan devaluasi rupiah maka biaya yang diperlukan 25,32 milyar rupiah. Jika waduk Depok selesai maka Kota Depok akan terbagi dua karena adanya daerah genangan air seluas kurang lebih 192 hektar pada elevasi 74,25 meter. Daerah yang tergenang meliputi 7 desa dari 4 kecamatan yaitu Desa Mekarjaya, Kalimulya, Sukmajaya, Desa Depok, Desa Kemiri Muka, desa-desa di Ratujaya dan Pondok Terong.⁴⁴

Masalah yang harus diperhitungkan dalam kaitannya dengan waduk Depok adalah *overtopping*. Mengingat daerah hilir adalah kota Jakarta, maka tinggi jagaan yang diperlukan dengan kriteria sebagai berikut: pada kondisi banjir 1 dalam 1000 tahun, tinggi jagaan harus diperhitungkan kenaikan muka air waduk karena angin, tinggi dan rayapan gelombang karena angin sangat kuat dan gempa sehingga perlu disediakan cadangan minimum 1,00 meter, sehingga tinggi jagaan yang diperlukan 2,70 meter atau elevasi puncak 80,02 meter. Untuk menambah keamanan waduk terhadap erosi, puncak bendungan dilindungi dengan beton aspal yang sekaligus

⁴² Sinar Harapan; 10 April 1984

⁴³ Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya; *Studi Kelayakan Studi Dampak Lingkungan Untuk Waduk Depok: Final Report*; *op. cit.*, hal. 2 – 5.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 24

berfungsi sebagai perkerasan jalan lalu lintas yang melalui puncak bendungan. Untuk mengamankan bangunan karena *overtopping*, dimana *outlet* tidak mampu melakukannya dengan aman, maka dibuat berbagai macam *outlet* sesuai kelas banjir.⁴⁵

Berdasarkan rencana induk 1973 baik kanal tapal kuda maupun waduk Depok tidak jadi dilaksanakan dengan alasan biaya yang sangat besar. Khusus kanal barat sebagai gantinya pemerintah membuat Cengkareng Drain di barat dan di timur untuk sementara dibuat Cakung Drain. Sedangkan waduk Depok belum ada rencana pengganti. Menurut perhitungan jika masalah banjir di Jakarta dapat ditanggulangi maka kerugian akibat banjir 100 tahunan yang berkisar antara 99.600 juta – 595.200 juta rupiah dapat ditanggulangi.⁴⁶

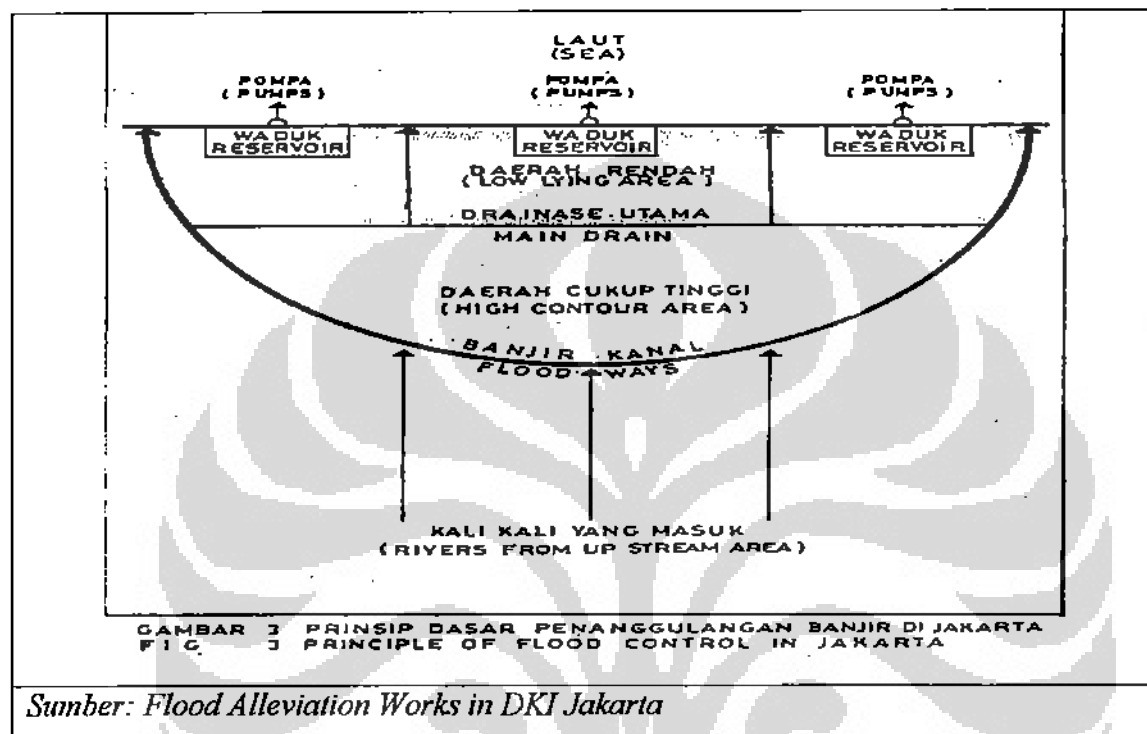
Gubernur DKI Jakarta mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan *main drain* dan proyek banjir kanal timur untuk menanggulangi genangan air yang melanda wilayah Jakarta Timur. Selain itu Ali Sadikin juga menginstruksikan kepada dua walikota Jakarta Barat dan Pusat untuk selambat-lambatnya 10 Pebruari 1977 membersihkan pinggiran Kali Cideng dan banjir kanal dari bangunan liar. Untuk mengurangi banjir di daerah timur, sebelum dibuatnya kanal timur sangat dilematis, karena apabila daerah Pulogadung dan Pulo Mas yang diselamatkan dari banjir maka *by pas* yang terkena banjir, tetapi jika yang diselamatkan jalan utama *by pass* maka Pulo Gadung dan Pulo Mas yang tergenang. Untuk menanggulangi itu maka perlu dibangun kanal timur dan *main drain*.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 41

⁴⁶ Suara Karya; 23 Nopember 1982

⁴⁷ Sinar Harapan; 26 Januari 1977

Gambar 47: Skema Prinsip Pengendalian Banjir Jakarta



Sumber: Flood Alleviation Works in DKI Jakarta

Berdasarkan prinsip ini maka air dari luar kota Jakarta di daerah yang cukup tinggi alirannya, air ditangkap oleh kanal luar kota yang melingkari kota Jakarta. Sehingga air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan. Prinsip ini sebenarnya hampir sama dengan yang digagas oleh van Breen pada tahun 1923. Sementara itu di daerah yang dekat laut karena kondisi lebih rendah dari laut, pembuangan menggunakan sistem pompa.

6.2.3 Rencana SOGREAH Perancis dan JICA Jepang

Masalah pengendalian banjir di Jakarta, rupanya tidak pernah berhenti dan selalu bergulir terus dengan berbagai macam penelitian. Pada tahun 1978, PBJR mengadakan kerjasama dengan konsultan Perancis COB *Consulting Engineers Paris* Perancis dan SOGREAH *Consulting Engineers Grenoble* Perancis. Kerjasama diawali dengan pertemuan 14 Pebruari 1978. Dalam kerjasama ini akhirnya tersusun sebuah rencana dengan nama "*Cisadane Jakarta Cibeet: Water Resources Development Study*". Konsultan Perancis ini sebelumnya pernah terlibat dalam perencanaan Waduk Jatiluhur pada tahun 1950 – 1960-an. Inti dari gagasan konsultan Perancis ini adalah dibangunnya beberapa waduk penampungan di beberapa sungai yang ada di sekitar Jakarta. Konsultan mengingatkan bahwa masalah sumber air harus menjadi prioritas dalam pengendalian banjir ini. Dengan sistem waduk maka air yang masuk dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Adapun sungai-sungai yang alirannya dibendung untuk waduk adalah sungai Cibeet, Cipamangkis, Cileungsi, Ciliwung, Cisadane, Cianten dan Cidurian. Waduk berjumlah 9 buah dengan kapasitas seluruhnya mencapai 3.000 hektar kubik.

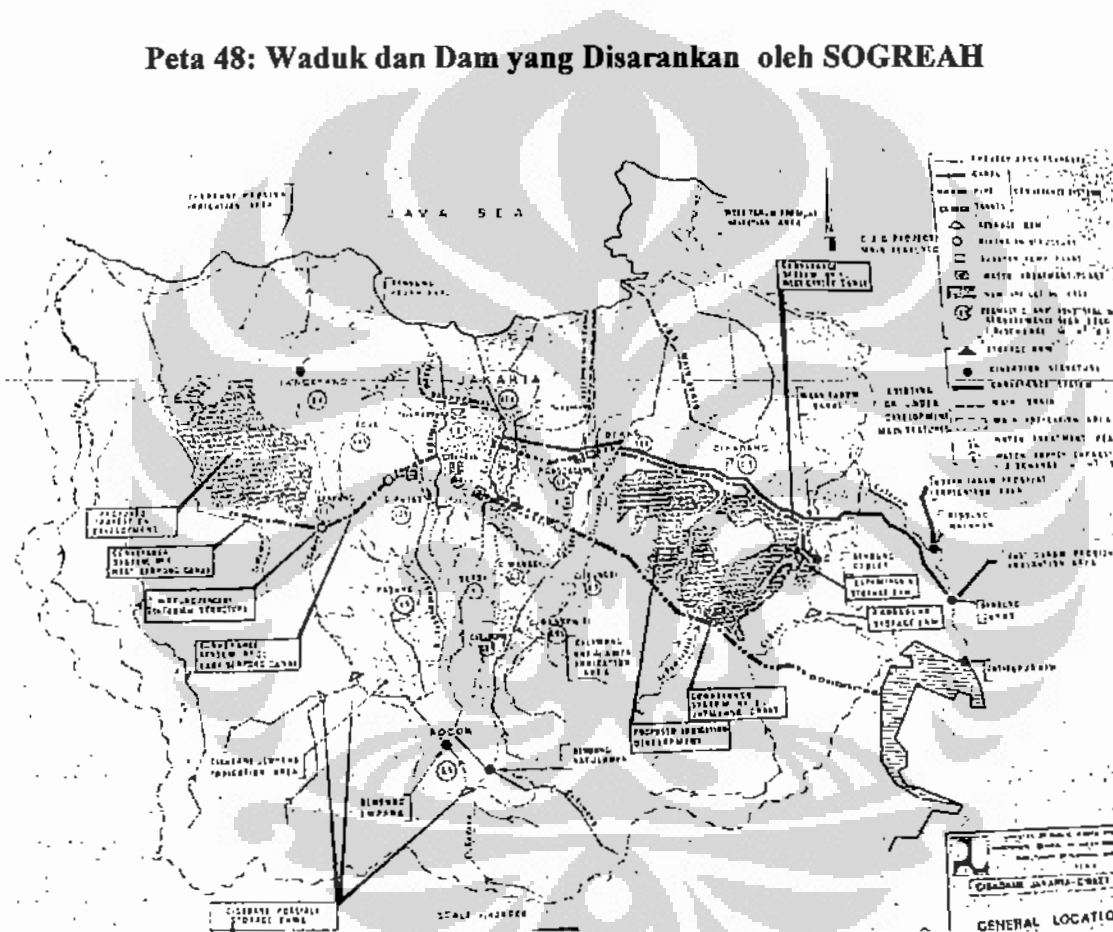
Tabel 37: Waduk dan Kapasitas Airnya

| Nama Sungai | Lokasi Waduk | Kapasitas Maksimal Waduk (hm ³) | Luas Waduk (km ²) |
|-------------|--------------|---|-------------------------------|
| Cibeet | Pangkalan | 900 | 68 |
| Cipamangkis | Pasiranji | 210 | 36 |
| Cileungsi | Cibinong | 50 | 7 |
| Ciliwung | Depok | 15 | 3,1 |
| Cisadane | Cicangkap | 85 | 13 |
| Cisadane | Parungbadak | 950 | 45 |
| Cisadane | Genteng | 80 | 20 |
| Cianten | Sodong | 750 | 30 |
| Cidurian | Tanjung | 260 | 27 |

Sumber: Cisadane-Jakarta-Cibeet: Water Resources Development Study, 1978

Hasil perencanaan yang juga dilengkapi dengan peta-peta dasar kerjasama dengan Perancis ini rupanya tidak pernah dilaksanakan. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengapa rencana ini tidak ditindaklanjuti, kemungkinan besar masalah dana dan relokasi penduduk yang menjadi hambatannya.

Peta 48: Waduk dan Dam yang Disarankan oleh SOGREAH



Sumber: Cisadane-Jakarta-Cibeet: Water Resources Development Study, 1978

Pada tahun 1987 dilakukan lagi studi yang lebih merupakan percekayasaan Terusan Banjir Timur dengan judul laporan: *East Jakarta Flood Control Projects*. Studi ini dilakukan oleh konsultan Jepang bekerja sama dengan konsultan Indonesia yang dibiayai oleh JICA (*Japan International Cooperation Agency*) yang biasa

memberi pinjaman lunak antara lain bagi studi-studi dan perencanaan proyek-proyek prasarana di negara-negara berkembang. Pada tahun 1995 JICA kembali membiayai studi yang menyangkut seluruh tata air wilayah Jabotabek berdasarkan kontrak antara DPU dengan Jepang. Tugas ini selesai pada tahun 1997. Ini merupakan studi yang pertama meninjau wilayah di luar kota Jakarta yang berpengaruh pada pembentukan yang disebut sebagai ‘banjir kiriman’ ke Jakarta. Luas wilayah studi mencapai 6.070 kilometer persegi.⁴⁸

Selama periode 1965 – 1985, dari berbagai studi yang dilakukan ternyata mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya. Bahkan dari berbagai studi banyak yang tidak direalisasikan karena terbatasnya dana pemerintah. Dari berbagai studi sebenarnya, jika dilaksanakan semuanya kemungkinan besar banjir sudah dapat dikendalikan. Rupanya studi-studi yang dilakukan hanya berakhir pada studi dan rencana saja dan tidak dapat direalisasikan. Akhirnya masalah banjir masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah pada masa-masa mendatang.

6.3 Pengendalian Banjir Makro Sistem

6.3.1 Saluran Cengkareng (Cengkareng Drain)

Menurut “Rencana Induk Pengendalian Banjir dan Drainase Kota Jakarta” tahun 1973, untuk melindungi wilayah barat Jakarta, dari luapan air dari Sungai Angke, Pesanggrahan, Mookervaart, Grogol dan Sekretaris diajukan usulan untuk memperluas cakupan pengamanan banjir dengan membangun perluasan kanal banjir dari Pejompongan, ke arah laut melalui Slipi, Tomang Barat, Tanjung Duren, Pesing Kedoya dan Angke Hilir. Rencana pembangunan perluasan Banjir Kanal Barat (*Extension of Western Banjir Canal*) tidak jadi dilaksanakan. Rencana tersebut gagal karena biaya pembebasan tanah yang sangat tinggi. Pada tahun 1977 untuk pembebasan tanah ditaksir sekitar 25 milyar rupiah. Biaya itu belum termasuk

⁴⁸ AR. Soehoed; *op. cit*, hal. 80.

relokasi beberapa bangunan milik pemerintah seperti kompleks Lembaga Administrasi Negara, kompleks Hankam serta masalah sosial lainnya.⁴⁹

Pada tahun 1979 terjadi banjir besar di Jakarta, untuk itu pemerintah Pusat dan DKI mencari pemecahan untuk mengurangi genangan pada masa datang sekaligus mengganti perluasan banjir kanal barat dengan jaringan pengendali banjir lainnya. Untuk itu pada tahun 1979, Menteri Purnomosidi menggariskan perlunya alternatif untuk menanggulangi banjir. Sebuah panitia yang terdiri dari perwakilan pusat dan Pemda DKI sepakat untuk membangun Cengkareng Drain. Pencetus gagasan Cengkareng Drain ini adalah sebuah tim yang terdiri dari 5 orang insinyur yang dibentuk oleh Purnomosidi.⁵⁰ Saluran Cengkareng merupakan satu dari tiga subsistem pengendalian banjir di wilayah Jakarta Barat. Dua subsistem lainnya adalah sodetan Grogol sampai ke sungai Angke di Pesing serta pembangunan enam pompa masing-masing berkapasitas 6,7 meter kubik perdetik di Jalan Siantar Jakarta Pusat.⁵¹

Cengkareng drain diperkirakan dengan biaya 11 milyar rupiah, sementara itu Cakung drain 9 milyar rupiah. Cengkareng drain memotong kali Mookervart, Pesanggrahan, dan sungai Angke yang semuanya bermuara di sungai Angke Besar. Cengkareng drain direncanakan untuk menampung debit air periode 100 tahun, dengan panjang 8 kilometer dan lebar yang dibutuhkan 100 meter. Lebar sungai adalah 50 – 60 meter dengan kedalaman rata-rata 5 – 6,5 meter⁵². Adapun pekerjaan teknis yang harus dilakukan adalah penggalian tanah, pembuatan tanggul, jalan inspeksi, pembuatan pintu-pintu air, jembatan kereta api dan jalan raya⁵³. Sedangkan Cakung drain memotong sungai Cakung dan Buaran. Proyek ini direncanakan selesai 1983.⁵⁴

⁴⁹ Pengendalian Banjir Jakarta Pusat dengan memakai Instalasi Pompa Kali Cideng, *Laporan Proyek Pengendalian Banjir Jaya*, tanpa tahun, hal. 2

⁵⁰ Kompas; 24 Januari 1983

⁵¹ Brief Description Flood Alleviation Works in DKI Jakarta (2); DPU, tanpa tahun, hal. 12.

⁵² Kompas; 18 Juli 1983

⁵³ A Brief Description On The Problems of Flood Control in Jakarta: Cakung Drain; Directorate General of Water Resources Development, tanpa tahun, hal. 19.

⁵⁴ Antara; 4 Januari 1983

Saluran Cengkareng merupakan satu dari tiga subsistem pengendalian banjir di wilayah Jakarta Barat. Dua subsistem lainnya adalah sodetan Grogol sampai ke Kali Angke di Pesing serta pembangunan enam pompa masing-masing berkapasitas 6,7 meter kubik perdetik di Jalan Siantar Jakarta Pusat.⁵⁵ Luas tanah untuk Cengkareng drain seluruhnya 80 hektar dimulai dari kelurahan Kembangan sampai kelurahan Kapuk Muara di Jakarta Utara. Tanah seluas 80 hektar terletak di Jakarta Barat 38 hektar dan 42 hektar di Jakarta Utara. Warga yang akan digusur meliputi 453 kepala keluarga. Menurut perhitungan, tanah yang dikeruk sekitar 320 juta meter kubik.⁵⁶ Proyek diperkirakan selesai tahun 1984. Setelah mengadakan pengkajian mendalam atas rencana pembangunan saluran ini, maka masalah yang sangat penting adalah masalah penggusuran warga yang terkena proyek. Untuk itu Gubernur mengeluarkan SK. No. 592 tahun 1979 yang mengatur masalah ganti rugi tanah. Tanah yang bersertifikat mendapat ganti rugi 7500 rupiah permeter persegi sedangkan tanah tidak ada setifikat 4.500 rupiah permeter persegi, bangunan permanen 15.000 rupiah permeter persegi dan semi permanen antara 7.500 – 10.000 rupiah permeter persegi.⁵⁷

Saluran Cengkareng yang mulai dibangun sejak 1980 sampai bulan Januari 1983 kondisinya masih belum selesai. Pemerintah mengalami hambatan karena rumitnya masalah pembebasan tanah penduduk. Keadaan fisik proyek masih terpenggal-penggal, sebagian saluran masih berupa parit dalam yang berisi air. Saluran yang dianggap sempurna hanya nampak dari Kapuk sampai ke laut sepanjang 2 kilometer, sehingga di sekitar muara yang menyambung ke laut, sehingga air laut masuk ke saluran. Hal ini dimanfaatkan oleh warga untuk mencari ikan dan kepiting. Dalam sehari mereka bisa memperoleh 3 - 4 kilogram udang dan kepiting. Hal ini tidak akan terjadi kalau saluran Cengkareng drain sudah dialiri air. Seperti yang disampaikan oleh Sainun, pada hari Minggu atau libur sepanjang sisi Cengkareng drain dipenuhi penjaring ikan. Bahkan tidak hanya siang hari tetapi juga malam hari.

⁵⁵ Kompas; 24 Januari 1983

⁵⁶ Kompas; 24 Januari 1983

⁵⁷ Suara Karya; 29 Oktober 1982

Pada hari Minggu atau libur sepanjang sisi Cengkareng drain dipenuhi penjarang. Bahkan tidak hanya siang hari tetapi juga malam hari. Para pencari ikan ini pindah ke saluran Cengkareng karena rawa-rawa yang sudah habis. Semua rawa sudah diuruk dijadikan perumahan.⁵⁸

Masalah pembebasan tanah menjadi rumit karena terjadi perbedaan harga antara kehendak penduduk dan pemerintah. Pemerintah menggunakan harga acuan tahun 1979, sehingga tanah-tanah yang belum dibebaskan pada tahun tersebut sudah mengalami kenaikan harga. Sampai tahun 1982, dari 453 kepala keluarga, yang sudah berhasil dibebaskan baru 406 kepala keluarga, sedangkan sisanya belum berhasil dibebaskan. Warga menuntut harga gusuran dinaikkan sesuai pasaran saat itu yaitu permeter persegi 20.000 – 25.000 rupiah. Bahkan warga menuntut penggantian lahan disamakan dengan harga tanah di Cawang yang dipergunakan untuk pembangunan *interchange* Cawang. Untuk pembangunan *interchange* Cawang, warga mendapat ganti rugi 25.000 rupiah permeter persegi untuk tanah dan bangunan permanen 25.000 rupiah permeter persegi⁵⁹. Perbedaan harga inilah yang mengakibatkan pembangunan, khususnya masalah ganti rugi tanah menjadi terkatung-katung. Selain itu warga merasa diperlakukan tidak adil, karena tanah hasil kerukan, oleh developer juga dijual kepada warga yang tidak terkena gusuran. Harga jual tanah kerukan permeter kubik 2000 rupiah.⁶⁰

Masalah pembebasan tanah yang belum tuntas, maka pihak proyek mengadakan intimidasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap warga. Bentuk intimidasi tersebut di antaranya dengan mengadakan pengerukan di sekitar rumah warga yang belum bersedia menerima ganti rugi, bahkan pemutusan aliran listrik. Lima belas warga kelurahan Kapuk dan Kedaung, Kaliangke Cengkareng mengadu ke Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH) karena belum mendapat ganti rugi atas tanah warga yang terkena gusuran untuk Proyek Cengkareng Drain. Mereka menemui Hakim Simamora.

⁵⁸ Kompas; 15 November 1983

⁵⁹ Sinar Harapan; 16 Desember 1982

⁶⁰ Suara Karya; 29 Oktober 1982

Suminta (50 th) melaporkan bahwa ia didatangi tiga petugas yang memerintahkan pembongkaran rumahnya sampai batas waktu Senin yang akan datang, ia belum mendapat ganti rugi, padahal tanahnya bersertifikat. Sedangkan Nainggolan (49 th) juga mengalami hal yang sama. Ia mempunyai tanah 1000 m bersertifikat. Ia menjelaskan listrik rumahnya sudah diputus, sehingga anak-anaknya tidak belajar. Hal ini meresahkan warga di sekitar Kapuk. Karena meskipun ganti rugi belum beres, tetapi pengerukan tanah dilakukan terus menerus sehingga dapat mengakibatkan tanah longsor, untuk itu mereka mendatangi LPPH untuk minta perlindungan hukum.⁶¹

Warga merasa mendapat dukungan dari LPPH, maka mereka bersikeras tidak bersedia pindah. Untuk mendapatkan dukungan, warga juga menemui Wakil Gubernur DKI Piek Mulyadi, DPR RI, Walikota Jakarta Barat dan LPPH. Selain itu warga juga menemui anggota DPR dari Karya Pembangunan Efendy Yusuf. Dalam pertemuan tersebut, Effendy Yusuf meminta agar warga bersabar karena ia akan menghubungi pihak Pemda. Merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak, Menteri PU Purnomo Hajisarosa meninjau langsung ke lokasi proyek. Menteri mengadakan pertemuan dengan warga. Dari hasil pertemuan dengan warga, akhirnya dari 46 kepala keluarga yang belum bersedia menerima ganti rugi tinggal 45 orang.⁶² Dalam kesempatan tersebut Menteri PU memerintahkan secara lisan kepada proyek bahwa tidak akan ada kenaikan harga ganti rugi dan memerintahkan kepada pihak proyek jika dalam waktu satu bulan sejak bulan Desember tidak dikosongkan maka harus dibuldozer. Berdasarkan kedua perintah tersebut maka warga diberi batas waktu 31 Desember 1982 untuk pindah dan 2 Januari 1983 akan diadakan pembongkaran seluruh bangunan yang masih menghalangi jalur Cengkareng drain.⁶³ Dalam kunjungan tersebut, karena Menteri melihat ada penduduk yang menggunakan jasa pengacara yang dianggap menghambat pembangunan, hal ini membuat Menteri PU marah dan menyebutnya sebagai 'pengacara gombal'. Ucapan Menteri ini akhirnya membuat

⁶¹ Suara Karya; 29 Oktober 1982

⁶² Sinar Harapan; 16 Desember 1982

⁶³ Sinar Harapan; 22 Desember 1983

marah para pengacara yang tergabung dalam Peradin dan LPPH. Untuk mengklarifikasi ucapan Menteri tersebut, perwakilan Peradin Yan Apul menemui Menteri PU untuk menanyakan maksud ucapan menteri tersebut. Dalam pertemuan tersebut menteri menegaskan lagi bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada semua pengacara. Ucapan gombal diartikan sebagai tindakan tidak wajar dari seseorang. Menurut Menteri dalam pembebasan tanah proyek tersebut memang ada dua orang pengacara yang bertindak tidak wajar yang dinilai telah menghambat pelaksanaan proyek dan merugikan rakyat banyak. Setelah mendapat penjelasan tersebut Yan Apul merasa puas, dan Peradin tidak bisa memberikan sanksi kepada anggota Peradin yang dianggap nakal karena belum ada UU Pengacara.

Pada permulaan pembicaraannya David mengatakan akan membicarakan Cengkareng drain, tapi tidak bermaksud mengangkatnya menjadi polemik, terutama menyangkut ucapan menteri PU Purnomosidi Hajisarosa tentang 'pengacara gombal'...ketika menteri meninjau proyek tersebut, menteri langsung bertemu orang-orang yang pembebasan tanahnya belum selesai dan menteri berbicara agak keras terhadap mereka, diantaranya ada yang memakai pengacara. Dari ucapan menteri terlontar kritikan dan ketidaksenangan terhadap oknum pengacara yang dinilai menteri telah menghambat pelaksanaan proyek pengendalian banjir tersebut...ucapan gombal diartikan sebagai tindakan tidak wajar dari seseorang. Menurut menteri dalam pembebasan tanah proyek tersebut memang ada dua orang pengacara yang bertindak tidak wajar yang dinilai telah menghambat pelaksanaan proyek dan merugikan rakyat banyak.⁶⁴

Selain menggunakan pengacara, melalui Fraksi Karya Pembangunan yang diwakili David Napitupulu dan ketua LPPH Albert Hasibuan SH menegaskan bahwa dalam masalah ini FKP melalui LPPH ingin mencari titik temu antara keinginan penduduk dan kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Dengan harapan penduduk yang tanahnya terkena proyek dengan ikhlas mau menyerahkan tanahnya untuk saluran air Cengkareng. Dalam kaitan ini LPPH yang memiliki kuasa hukum untuk urusan ganti rugi tanah penduduk yang jumlahnya 40 kepala keluarga, menginginkan

⁶⁴ Berita Buana; 29 Desember 1982

penduduk yang kebanyakan masyarakat tidak mampu memperoleh ganti rugi yang wajar. LPPH berusaha mencarikan tanah pengganti bagi 40 kepala keluarga yang terkena gusuran dan LPPH tidak bermaksud mencari keuntungan dengan mencari selisih harga tanah. Fraksi Karya Pembangunan selain memperhatikan masalah warga Cengkareng juga ikut membantu perjuangan Sengkon dalam mencari keadilan. Sengkon dihukum di Cipinang selama 6 tahun dalam kasus menuntut ganti rugi. Akhirnya Sengkon dinyatakan tidak bersalah dan ia minta ganti rugi.⁶⁵

Setelah mendapat ultimatum dari Menteri Purnomosidi, Walikota Jakarta Barat Eddy Ruchyat mengadakan pertemuan dengan warga yang belum menerima ganti rugi di gedung SD 05 pagi Pedongkelan Cengkareng. Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah pejabat militer di antaranya Dandim 0503 Letkol Harris Sudarno, Danres 703 Letkol Moelyadi serta pimpinan Proyek Ir. Martsanto. Sedangkan warga yang terkena proyek sebanyak 47 kepala keluarga. Dalam kesempatan tersebut Walikota memperingatkan warga kelurahan Kedaung Kali Angke yang belum menerima ganti rugi tanah dan bangunan untuk pembangunan memberi batas waktu sampai 2 Januari 1983, kalau sampai batas waktu tersebut warga masih bertahan maka rumah-rumah tersebut akan dibongkar paksa. Walikota mengatakan terpaksa melaksanakan hal ini karena pihak Walikota diberi batas waktu untuk menyelesaikan Cengkareng drain sampai 15 Januari 1983 oleh Menteri PU. Menurut Walikota, Cengkareng Drain dibangun karena banjir besar 1979 telah mengakibatkan 21 orang meninggal.⁶⁶ Walikota mengatakan bahaya kalau tidak mau menerima ganti rugi sesuai Surat Keputusan Gubernur apapun yang akan terjadi walikota tetap melaksanakan tugas ini⁶⁷. Ini bentuk dari intimidasi kepada warga agar segera menerima ganti rugi dan meninggalkan tempat atau rumahnya.

Pernyataan yang agak berbeda namun masih berisi intimidasi disampaikan oleh Dandim 0503 Jakarta Barat Letkol Harris Sudarno dan Dandim 703 Letkol Moelyadi yang mengatakan pertemuan antara pimpinan dan warga dalam rangka musyawarah.

⁶⁵ Suara Karya; 29 Desember 1982

⁶⁶ Suara Karya; 21 Desember 1982

⁶⁷ Suara Karya; 21 Desember 1982

Menurut kedua pejabat tersebut tidak mungkin dari sebanyak 453 kepala keluarga yang sudah bersedia menerima ganti rugi dan pindah sudah 406 kepala keluarga yang bersedia pindah. Hal ini menunjukkan mayoritas warga sudah menyadari bahwa Cengkren drain memang untuk kepentingan umum. Letkol Moelyadi juga mengingatkan bahwa 'menjelang Natal, perlu diciptakan suasana damai di bumi dan damai di hati. Untuk itu perlu kesadaran dan rela menerima kebijaksanaan pemerintah karena berarti ikut menyelamatkan masyarakat luas'. Sementara itu dari perwakilan warga yang diwakili Ny Tamarina Manik dalam pertemuan tersebut mengemukakan tidak ada maksud membangkang terhadap kebijaksanaan Pemda DKI dalam masalah ganti rugi. Pada hakekatnya ia mendukung program pemerintah di bidang pembangunan. Pada umumnya warga yang belum mau menerima ganti rugi atas pembebasan tanah dan bangunan itu sebenarnya hanya menghendaki ganti rugi yang wajar.⁶⁸ Warga menuntut ganti rugi sesuai harga tanah di daerah ini sebesar 20.000 sampai 25.000 rupiah permeter persegi.⁶⁹ Menanggapi hal ini Ketua DPRD DKI, R Soedarsono mengatakan bahwa seharusnya warga tidak bersikeras menuntut ganti rugi karena tidak proporsional karena proyek ini adalah untuk kepentingan umum.⁷⁰

Dalam bulan Desember di Jakarta masalah ganti rugi tanah minimal terdapat dua kasus. Kasus pertama adalah Cengkren drain dimana warga menuntut biaya ganti rugi yang wajar. Warga menuntut 20.000 - 25.000 rupiah permeter persegi sementara menurut Surat Keputusan Gubernur No. 05095/VII/1982 nilai yang diperoleh hanya sebesar 5.289,50 rupiah permeter persegi. Selain itu masyarakat Palmerah Jakarta Barat menyatakan kecewa karena ganti rugi 50 ribu untuk segala sesuatunya. Mereka diinstruksikan untuk meninggalkan tanah karena akan digunakan untuk pembangunan jalan layang Jakarta Merak. Pengosongan dilakukan lurah dengan memberikan uang 50.000 rupiah kepada warga sebagai ganti rugi, dan jika tidak pindah akan menerima resiko lain.⁷¹ Suatu bentuk tekanan bagi warga. Meskipun

⁶⁸ Suara Karya; 21 Desember 1982

⁶⁹ Suara Karya; 21 Desember 1982

⁷⁰ *Jurnal Ekuin*; 22 Desember 1982.

⁷¹ *Jurnal Ekuin*; 22 Desember 1982

warga mengadakan protes, maka sesuai dengan keputusan Gubernur masalah ganti rugi masih tetap tidak ada kenaikan.

Sesuai dengan batas akhir pembongkaran yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI tanggal 2 Januari 1983, kenyataannya sampai 5 Januari 1983, masih terdapat 26 kepala keluarga yang belum bersedia pindah dan belum bersedia menerima ganti rugi. Yang belum menerima ganti rugi di kelurahan Kedaung Kali Angke 22 kepala keluarga, 2 kepala keluarga di kelurahan Kembangan, Kebon Jeruk, 2 kepala keluarga di Kelurahan Kapuk, Cengkareng. Luas areal seluruhnya diperkirakan 1,5 hektar. Selain itu tentang pengurusan sekolah dasar yang siswanya sebanyak 860 bangunannya ditangani oleh pemda DKI. Menurut perjanjian seharusnya dalam bulan Januari 1983, sekolah sebanyak 2 buah, harus sudah dibangun, tetapi belum satupun siap, sehingga harus menunggu 3 bulan.⁷²

Pada bulan Januari 1983 Menteri Purnomosidi akan mengadakan kunjungan ke Cengkareng drain. Tetapi sampai menjelang kunjungan masih ada 4 kepala keluarga dengan luas tanah 0,7 hektar yang belum pindah. Mereka itu adalah Ny. Tamara Manik dan Nainggolan dan dua kepala keluarga. Setelah diadakan pembicaraan, mereka bersedia pindah dengan menerima ganti rugi sedikit lebih tinggi dari warga yang lain. Adapun perhitungannya untuk tanah garapan diganti 7500 rupiah permeter persegi, bangunan permanen diganti 15.000 rupiah permeter persegi dan bangunan semi permanen 12.000 rupiah permeter persegi. Dengan menyerahnya empat kepala keluarga tersebut maka air sudah bisa dialirkan. Secara keseluruhan rata-rata ganti rugi di Proyek Cengkareng drain 5.400 rupiah permeter persegi. Dalam kesempatan tersebut Menteri menyampaikan ucapan atas kesadaran keempat pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk kelancaran penyelesaian pembangunan proyek saluran Cengkareng. Menteri mengingatkan bahwa untuk kepentingan rakyat banyak agar setiap warga tidak menuntut perlakuan istimewa, karena hal itu akan merugikan warga sendiri.⁷³

⁷² Berita Buana; 6 Januari 1983

⁷³ Kompas; 13 Januari 1983

Masalah pembebasan tanah yang dapat diselesaikan, maka tembusnya Cengkareng drain yang memotong jalan raya Daan Mogot di Jakarta Barat dan pembangunan jalan baru sepanjang 100 meter pengganti jalan Daan Mogot yang terpotong merupakan hadiah tahun baru 1983. Menteri PU Purnomosidi Hadjisarosa, Jumat malam pukul 00.00 wib meresmikan proyek Cengkareng drain dengan dimeriahkan suara sirena, petasan, klakson kendaraan yang melalui jalan baru tersebut. Upacara peresmian diakhiri dengan peninjauan Menteri ke saluran pembuangan air ke laut yang pembangunannya dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor golongan ekonomi lemah. Cengkareng drain keseluruhan akan menampung air dari Mokervaart, kali Pesanggrahan, Sekretaris dan banjir kanal yang debit airnya 600 meter kubik.⁷⁴

Selesaiannya pembangunan Cengkareng drain bukan berarti tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Sebagai contoh warga RT 011/RW 10 Kelurahan Kapuk ketika hujan 16 Maret 1984 justru kebanjiran. Begitu juga warga di Tanjung Duren, Slipi, perumahan Green Ville pada waktu hujan 16 Mei 1980 juga kebanjiran. Hal ini disebabkan tidak ada gorong-gorong dan saluran pembuangan ke saluran Cengkareng. Selain itu tanggul dan jalan inspeksi yang dibangun sepanjang saluran tanpa dilengkapi gorong-gorong pembuangan air. Menurut warga bernama Sanif berpuluh-puluh tahun warga tidak pernah kebanjiran, setelah dibangunnya Cengkareng drain justru kebanjiran. Ini merupakan masalah baru yang harus ditangani pemerintah.⁷⁵

Semula penduduk di kawasan Jakarta Barat merasa sudah lega dengan selesaiannya Cengkareng drain.... tetapi harapan itu pupus manakala banjir muncul banyak penduduk bertanya apa fungsi saluran Cengkareng. menanggapi banjir yang terjadi pihak Kopro banjir hal ini disebabkan hujan salah musim. Selain itu dikarena tanggul di kali Sekretaris jebol untuk mengatasinya harus dilakukan penyedotan air. Selain itu karena adanya pasang air laut dan Teluk Gong tidak berjalan lancar karena tersumbat sampah.⁷⁶

⁷⁴ Antara; 2 Januari 1983

⁷⁵ Sinar Harapan; 10 April 1984

⁷⁶ Sinar Harapan; 17 Mei 1984

Banjir juga disebabkan karena kondisi rawa-rawa yang sudah hilang. Menurut warga yang berprofesi sebagai pencari ikan Sayudi yang biasa menjala di rawa dekat kompleks Perumahan Departemen Agama Kali Mati. Saat ini rawa tersebut sudah hilang karena diuruk dan dibangun sekolah dasar dan dijadikan perumahan.⁷⁷

6.3.2 Saluran Cakung (Cakung Drain)

Dalam setiap pembangunan sistem drainage maka prosedur standar yang harus dilakukan oleh proyek minimal meliputi penelitian tentang wilayah tangkapan (*catchment area*), situasi saat diadakan penelitian dan topografi yang diperoleh berdasarkan peta yang ada sebelumnya, misalnya ketika pembangunan Cakung drain peta yang dibuat dalam rangka pembangunan waduk Jatiluhur tahun 1961 juga digunakan sebagai acuan. Begitu juga jumlah penduduk dan penelitian tentang ketinggian suatu daerah. Setelah itu baru dirumuskan suatu standard teknis dari pembangunan yang akan dilaksanakan, misalnya *design canal*, pengaliran, teknis lainnya.⁷⁸

Cakung drain merupakan salah satu sistem drainase di daerah Jakarta Timur yang tercantum dalam Pola Induk Drainase Jakarta yang disusun oleh konsultan Nedeco dan Proyek Pengendali Banjir Jakarta Raya tahun 1973. Saluran ini diharapkan mampu menampung aliran seluas 4.180 hektar setelah rencana banjir kanal timur selesai dibangun. Untuk menanggulangi debit air yang semakin bertambah karena pengembangan kota ke timur, maka saluran Cakung harus dilengkapi dengan tanggul yang kedap air yang stabil untuk debit rencana 100 tahun (Q_{100}), selain itu ketinggian jembatan juga disesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas air pada masa mendatang.⁷⁹ Saluran induk drainase Cakung berfungsi sebagai saluran banjir untuk

⁷⁷ Kompas; 15 November 1983

⁷⁸ A Brief Description on The Problems of Flood Control in DKI Jakarta: Cakung Drain; Directorate General of Water Resources Development, tanpa tahun, hal. 10.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 13

mengalirkan air Sungai Cakung dan Sungai Kali Buaran yang pada musim hujan selalu menggenangi daerah kawasan Pulogadung, Cakung dan sekitarnya. Disamping fungsi drainase Cakung drain juga merupakan batas antara dua rencana polder yaitu polder Sunter Timur dan Polder Marunda.⁸⁰

Selain Cakung Drain, sistem drainage di Jakarta bagian timur yang direncanakan terhubung dengan kanal banjir timur yang akan dibangun adalah *Polder Marunda*, saluran Sunter Barat. Sistem pengaliran ini merupakan sistem drainage Jakarta bagian timur. Drainage ini direncanakan oleh Proyek Pengendalian Banjir Jaya (PBJR) bekerja sama dengan NEDECO pada tahun 1975. Design drainage makro di Jakarta bagian timur (*eastern main drain*) dipusatkan melalui Cakung drain. Saluran Cakung dapat mengalirkan air secara gravitasi ke laut. Untuk mendukung kelancaran kanal timur maka dilengkapi dengan tiga saluran yaitu saluran Sunter Barat, terusan Sunter drain dan Cakung drain. Banjir kanal timur sangat penting sebagai sistem drainase mikro maupun makro. Khususnya untuk melindungi Kawasan Pulogadung diperlukan kanal dari Pulogadung weir yang mengalir ke Cakung drain.⁸¹

Cakung drain sepanjang 10,50 kilometer dimulai dari jalan Jakarta Bekasi sampai ke laut. Pembangunan dimulai tahun 1979/1980 dan secara keseluruhan direncanakan selesai selama 3 tahun. Menurut perhitungan Juni 1978, pembangunan saluran Cakung tidak termasuk pembebasan tanah menghabiskan 4,50 milyar rupiah. Saluran ini akan membebaskan banjir di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara meliputi kawasan industri Pulogadung, Klender, Sari Suka, Semper dan Cilincing. Direncanakan bahwa *design* Cakung drain adalah untuk menanggulangi banjir 100 tahun dengan debit 203 meter kubik perdetik. Konstruksi saluran terdiri dari dasar saluran 17 meter, lebar permukaan 43 meter, termasuk jalan inspeksi serta saluran kecil di sepanjang Cakung Drain selebar 70 meter. Cakung drain menampung air yang

⁸⁰ Brief Description Flood Alleviation Works in DKI Jakarta (2); DPU, tanpa tahun, hal. 13

⁸¹ Final Report Phase II, Jakarta Drainage and Flood Control Project: Explanatory note on the Design of a Drainage System for the Catchment area of The Cakung Drain; Annex I; Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya-Nedeco-Jakarta Drainage and Flood Control Project; December 1975, hal. 3

berasal dari kawasan sekitarnya seluas 4.180 hektar. Apabila Cakung drain selesai maka akan berfungsi sebagai penampung air dari daerah sekelilingnya.⁸²

Untuk menanggulangi keresahan pemilik tanah yang akan dilalui Cakung drain di daerah Cilincing, maka sejak tahun 1979, Walikota Jakarta Utara mengimbau agar warga segera mendaftarkan kepemilikan tanahnya. Untuk mengurus kepemilikan warga mendaftarkan kepada lurah dan camat. Hal ini harus dilakukan mengingat selama ini di daerah Jakarta Utara banyak terjadi penyerobotan tanah, terutama tanah yang tidak dihuni. Selain itu karena adanya isu bahwa Cakung drain akan menggusur masjid, Walikota mengatakan bahwa saluran tidak akan menerjang masjid kuno Al Alam di kelurahan Cilincing sebab saluran terletak di sebelah barat masjid⁸³. Berbeda dengan di Cilincing, di kelurahan Marunda yang dilalui Cakung Drain, sudah dipenuhi oleh bangunan liar dan digunakan untuk pangkalan pasir.⁸⁴

Untuk melengkapi sarana transportasi dengan dibangunnya Cakung drain maka diperlukan proyek jembatan layang. Jembatan layang terletak di kelurahan Cilincing. Sebanyak 88 kepala keluarga harus digusur untuk membangun jembatan di kelurahan Cilincing. Pembangunan dilaksanakan 9 Juni 1982. Untuk menentukan harga ganti rugi dilakukan musyawarah antara pemerintah dan warga. Berdasarkan musyawarah harga ganti rugi ditentukan sebagai berikut:

....sebanyak 88 kk warga Kelurahan Cilincing yang terkena proyek itu, dalam musyawarah yang diadakan Kamis lalu dengan team pembebasan tanah Oprit Cakung Drain, telah sepakat melepaskan tanah mereka, demi kepentingan proyek nasional tersebut. Lokasi tanah sebelah barat Cakung Drain, tanah darat hak milik sertipikat mendapat ganti rugi Rp 2.600/m², tanah hak milik sawah Rp 2.500/m², tanah garapan Rp 650/m². untuk sebelah timur Cakung Drain, tanah darat hak milik memperoleh ganti rugi Rp 2.200/m², tanah hak milik sertifikat sawah Rp 2.100/m² dan tanah garapan Rp 500/m². bangunan permanen mendapat ganti rugi Rp. 25.000/m², semi permanen Rp 21.000/m², biasa Rp 15.000/m² dan bangunan darurat Rp 7500/m². Khusus untuk bangunan yang memiliki IMB ditambah 20% dari harga ganti rugi tersebut.

⁸² Merdeka; 1 Pebruari 1979

⁸³ Warta Berita; 4 Pebruari 1979

⁸⁴ Kompas; 18 Juli 1983

Teras tanpa atap Rp 7500/m², pagar besi Rp 5000/m² lari, pagar tembok bata Rp 4200/ m² lari, pagar kawat dolken Rp 3.500/m² lari dan jaro (pagar bambu) Rp 350/m² lari...penggantian untuk tanam-tanaman ialah Rp 6.665/pohon, untuk tanaman keras menghasilkan, dan Rp 1650/pohon untuk tanaman keras yang tidak menghasilkan. Tanaman pisang Rp 850/rumpun, kangkung Rp 100/m², bambu sekitar Rp 2.500 – Rp 6.000 untuk 25 batang sampai 50 batang.⁸⁵

Martsanto mengatakan dengan selesainya Cengkareng drain maka banjir kanal barat yang menurut rencana melewati TPU Jati Petamburan, Bunderan Slipi tidak perlu lagi, karena kalau sodetan ini selesai banjir di bagian barat sudah dapat dikendalikan. Khusus di bagian timur dengan selesainya Cakung drain bisa menampung sungai Buaran dan Sungai Cakung. Khusus mengenai Kali Sunter masih belum dapat ditangani karena padatnya permukiman. Untuk menanggulangi banjir di bagian timur harus segera dibangun kanal banjir timur.⁸⁶

Selesainya sistem mikro penanggulangan banjir di dalam kota, maka diperlukan penanganan makro luar kota untuk mengendalikan debit air kiriman yang masuk Jakarta. Pada tahun 1983, Martsanto mengatakan bahwa pemerintah sudah memikirkan untuk menghidupkan kembali danau-danau kecil yang jumlahnya ratusan berada di luar kota Jakarta dan pembangunan waduk di Depok. Selain itu kondisi sungai yang dipenuhi oleh enceng gondok yang menghambat laju air. Enceng gondok terdapat di siphon Teluk Gong, sungai Grogol, sungai Sentiong dan sungai Sunter. Waduk Pluit direncanakan untuk mengurangi beban banjir di Thamrin dan Sabang, tetapi karena jaraknya yang terlalu jauh sehingga dampaknya tidak begitu kelihatan. Untuk itu perlu dibangun pompa air dari jalan Siantar.⁸⁷

⁸⁵ Suara Karya; 5 Juni 1982

⁸⁶ Sinar Harapan 3 Oktober 1983

⁸⁷ Jakarta Post 4 Oktober 1983

6.3.3 Saluran Sungai Grogol dan Sungai Sekretaris

Untuk mengurangi luas genangan banjir di Jakarta Barat, selain Cengkareng drain, maka perlu didukung dengan pembuatan saluran sungai Grogol dan sungai Sekretaris. Saluran dimulai dari sungai Grogol menuju ke barat memotong sungai Sekretaris dan berakhir di sungai Angke. Secara teknis sodetan akan menampung debit sungai Grogol dan sungai Sekretaris untuk debit periode 25 tahun. Adapun panjang saluran 3 kilometer dengan lebar saluran dari sungai Grogol sampai sungai Sekretaris 42 meter. Sementara itu saluran sungai Sekretaris sampai sungai Angke selebar 56 meter. Pekerjaan yang dilaksanakan terkait dengan proyek ini meliputi penggalian tanah, pembuatan tanggul, pembuatan jalan inspeksi, pintu air, jembatan kereta api, jalan raya, dan penguatan konstruksi talud⁸⁸. Dengan adanya saluran Sungai Grogol dan Sekretaris maka air akan mengalir ke Sungai Angke, sehingga daya tampung Sungai Grogol akan bertambah untuk menampung air dari kanal banjir. Sementara itu sungai Angke daya tampungnya akan berkurang karena sebagian airnya disalurkan ke Cengkareng Drain.⁸⁹ Saluran sungai Grogol dimaksudkan untuk mengalirkan sebagian air sungai Grogol melalui sungai Angke terus ke Cengkareng Drain. Sehingga apabila terjadi luapan air di musim hujan air sungai Grogol tidak langsung mengalir ke kanal banjir. Jadi saluran ini untuk mengurangi jumlah air yang masuk ke kanal banjir karena kanal banjir sudah menampung air dari sungai Cideng. Jadi tiga subsistem pengendalian banjir di wilayah barat adalah Cengkareng Drain, Pompa Siantar dan Saluran Grogol. Sistem ini dimaksudkan sebagai pengganti rencana kanal barat. Saluran sungai Grogol akan mengikuti saluran Mookervaart setelah menembus sungai Angke, untuk mengatur air yang masuk ke Mookervart akan dibangun pintu air.⁹⁰

Saluran sungai Grogol dan sungai Sekretaris dimulai dari Tanjung Duren sampai sungai Angke (Pesing) panjangnya 3 kilometer. Konstruksi saluran dari beton.

⁸⁸ A Brief Description on The Problems of Flood Control in Jakarta: Cakung Drain; Directorate General of Water Resources Development, tanpa tahun, hal. 19

⁸⁹ Kompas; 18 Juli 1983

⁹⁰ Kompas; 5 November 1983

Selama ini aliran sungai Grogol yang mengalir ke muara melalui Siphon Teluk Gong ke Muara Karang tidak mampu mengalirkan air sungai itu, karena kapasitasnya hanya mampu mengalirkan 60 meter kubik perdetik. Saluran akan mengalirkan sebagian besar volume air sungai Grogol ke sungai Angke. Sungai Grogol sendiri dalam keadaan bersih mampu mengalirkan 76 meter kubik perdetik.⁹¹

Pembangunan saluran sungai Grogol akan menggusur 351 pemilik tanah di empat kelurahan yakni Kelurahan Jelambar, Tanjung Duren, Kedoya dan Kelurahan Duri Kepa. Luas tanah yang diperlukan seluas 11,7984 hektar. Besarnya ganti rugi tanah darat hak milik bersertifikat 40.000 rupiah permeter persegi tanpa sertifikat 36.000 rupiah permeter persegi, sawah tanpa sertipikat 32.000 rupiah permeter persegi, bangunan permanen 25.000 rupiah permeter persegi, bangunan darurat 7.500 permeter persegi, sumur batu 12,500 rupiah per buah, sumur pompa 8.350 rupiah per buah, kebun kangkung 100 rupiah permeter persegi, tanaman keras menghasilkan 6.650 rupiah perbatang, listrik, air, telepon diganti 100%. Bangunan dan usaha yang ada izin ditambah 20%. Berdasarkan hitungan jumlah dana untuk ganti rugi tanah sebesar 3 milyar rupiah berasal dari pinjaman luar negeri.⁹²

Sebelum dilakukan pengusuran diadakan pertemuan antara warga dengan aparat pemerintah. Dalam pertemuan antara warga dan pemerintah, warga memahami rencana pembuatan saluran. Dalam pertemuan tersebut, warga menyadari pentingnya pembangunan saluran Grogol dan sama sekali tidak menolak. Tetapi warga minta pemerintah bijaksana dalam menentukan harga tanah.

Safri warga kelurahan Tanjung Duren kebetulan menjadi RT 05 meminta pemerintah agar membantu mencarikan perumahan Perumnas sebagai tempat tinggal jangan hanya kami diminta bijaksana, tetapi pemerintah juga harus bijaksana. Himbauan itu dijawab oleh Martsanto dan wakil camat Grogol Bahruddin, agar masalah itu disampaikan kepada walikota Jakarta Barat. Pertemuan hari ini hanya menyangkut soal penjelasan pembayaran ganti rugi. Safri nampak mengalah ketika Camat mengingatkan bahwa Safri seorang ketua

⁹¹ Kompas; 16 November 1983

⁹² Kompas; 16 November 1983

RT. Mengenai perbedaan pengukuran, warga diminta mencocokkannya tidak ada masalah.⁹³

Pembayaran ganti rugi dilakukan di Kecamatan Grogol. Besarnya ganti rugi didasarkan pada harga yang ditetapkan oleh penaksir harga tanah.

Berdasarkan rapat pihak Proyek Pengendali Banjir dengan pihak Walikota Jakarta Barat, pengerjaan saluran Sungai Grogol ke Sungai Sekretaris akan dimulai tanggal 1 Oktober 1984. Setelah rapat tersebut kepada warga yang sudah mendapat ganti rugi segera membongkar bangunannya, karena pemerintah akan segera memulai pekerjaan dengan menempatkan alat-alat berat. Sampai September 1984, penduduk yang belum menerima ganti rugi tinggal 5 % dari 351 kepala keluarga.⁹⁴

Proyek Saluran dari Sungai Grogol ke Sungai Sekretaris pembebasan tanahnya berjalan lancar, bahkan bulan Agustus 1984 tinggal tiga pemilik tanah yang belum berhasil dibebaskan⁹⁵. Sejak 18 Desember 1984, meskipun belum tuntas saluran sungai Grogol ke Angke sudah mulai digunakan. Sodetan dengan panjang 2,7 kilometer dan lebar pada bagian bawah 10 meter dan bagian atas 25 meter berkapasitas tampung air 50 meter kubik perdetik. Lebih cepat dari rencana semula yang ditargetkan untuk penyelesaian tahap I pada Januari 1985. Untuk pembangunan tahap awal dibiayai dari pemerintah pusat sedangkan lainnya berasal dari bantuan Jepang. Selama ini pengaruh luapan Sungai Grogol dan Sungai Sekretaris menyebabkan banjir di sekitar bunderan Grogol, Tanjung Duren, perumahan Green Ville, Tomang dan Slipi. Dengan adanya saluran ini daerah tersebut bisa terhindar dari banjir. Tanpa saluran Grogol ke Sekretaris, air hujan tidak bisa ditampung siphon Teluk Gong. Alasan pembuatan saluran ini karena dengan selesainya Cengkareng drain, yang memotong aliran sungai Angke, Mookervart dan Pesanggrahan sehingga

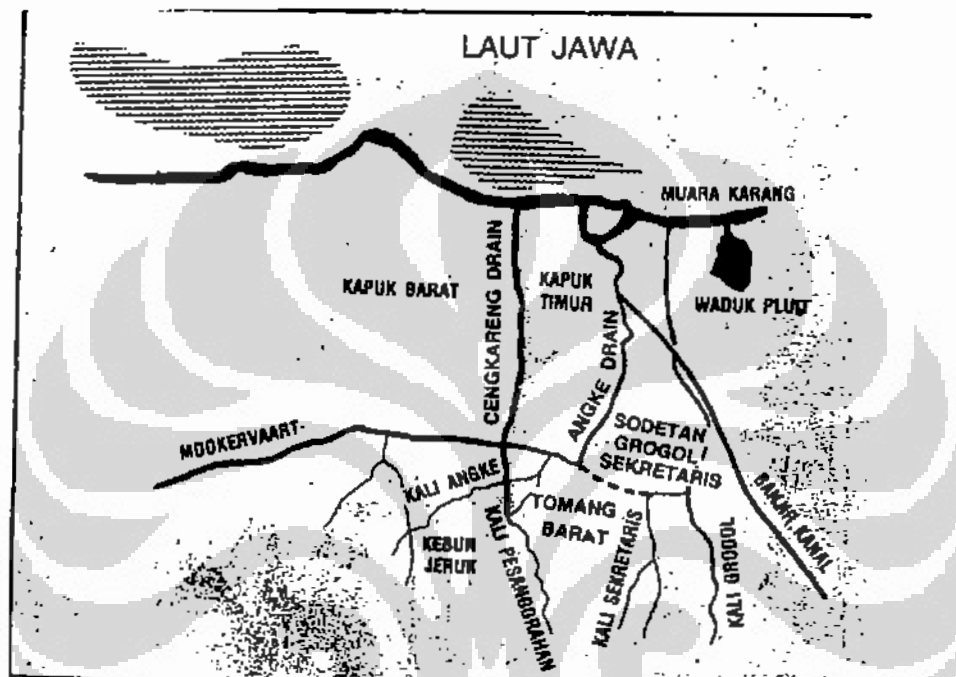
⁹³ Kompas; 16 November 1983

⁹⁴ Sinar Harapan; 27 September 1984

⁹⁵ Sinar Harapan 22 Agustus 1984

sungai Angke di muara menjadi kering dengan dibuat saluran ini akan terisi air dari saluran yang baru.⁹⁶

Gambar 49: Pemotongan Sungai Grogol – Sekretaris ke Sungai Angke



Sumber: Kompas; 3 Januari 1983

6.3.4 Saluran Karang (Karang Drain)

Pada tahun 1975, telah direncanakan untuk membebaskan daerah-daerah rendah di Jakarta Pusat dengan sistem makro drainage yang disebut sebagai Karang Drain yang akan dihubungkan dengan Muara Karang dan menghubungkan dengan Muara Angke. Berdasarkan *Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta*,

⁹⁶ Sinar Harapan; 17 Desember 1984

Karang drain akan dibangun setelah banjir kanal barat selesai⁹⁷. Dalam kaitannya dengan Karang drain ini, banjir kanal barat sangat penting keberadaannya, karena akan menyambung dengan Karang drain dan Cideng drain dengan daerah tangkapan banjir seluas 3.240 hektar, yang meliputi wilayah Jati Baru, Menteng, dan Kebun Kacang.⁹⁸

Selain itu untuk melindungi kawasan Menteng dan Kebon Kacang perlu diperbaiki saluran Cideng, Gresik dan Krukut drain. Untuk pengaturan debit air di daerah ini, diatur melalui Waduk Melati. Pada musim hujan ketika air di Melati mencapai di atas 2,25 meter maka pintu air Waduk Melati maka pintu air dibuka untuk disalurkan ke Karang drain, sedangkan ketinggian air normal yang dapat menggunakan pompa adalah 1,20 meter.

Daerah barat dari Jalan Letjen S. Parman dan selatan dari Jalan Daan Mogot disebut daerah Tomang Barat. Wilayah seluas 170 hektar ini merupakan daerah rendah sehingga perlu sistem drainage dengan sistem pompa. Karena wilayah ini berbatasan dengan sungai Sekretaris. Wilayah yang rendah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai daerah *polder* yang dapat dipompakan ke sungai Sekretaris. Kapasitas pompa adalah 3 meter kubik perdetik. Polder Tomang Barat dengan luas 6 hektar akan menampung air 129 ribu meter kubik, dengan periode 25 tahun.⁹⁹

Selain itu pada tahun itu juga direncanakan untuk membuat *drainage* Grogol Polder. Berdasarkan rencana induk, Grogol *polder* akan dibangun untuk menghubungkan Grogol drain dan Karang drain. Areal ini terletak antara Kali Grogol dan Jalan Kyai Tapa. Wilayahnya seluas 80 hektar, sebagian adalah daerah rendah dengan ketinggian 0,40 meter. Dengan demikian daerah ini dapat digunakan sebagai daerah polder, dengan kapasitas 1 meter kubik perdetik. Waduk dengan luas sekitar 2 hektar akan menampung air 83 ribu meter kubik untuk periode 25 tahun.¹⁰⁰

⁹⁷ Final Report Phase II, Jakarta Drainage and Flood Control Central Jakarta; Explanatory note on the Design of The Karang Drainage System (Including The Tomang Barat and Grogol Polders); Annex VII; Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya – NEDECO; Jakarta Drainage and Flood Control Project; January 1975; hal. 2.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 2.

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 9.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 12.

6.3.5 Polder Pluit

Daerah utara yang berbatasan dengan laut sangat rendah bahkan sebagian berada di bawah air laut. Pada waktu banjir, air tidak bisa mengalir ke laut sehingga harus dibuang dengan menggunakan pompa. Agar air dapat di pompa maka air harus dikumpulkan di waduk penampungan. Karena itu muncul gagasan untuk menjadikan kawasan Pluit sebagai daerah Polder. Hal ini bukan hal yang baru, karena menurut rencana Van Breen tahun 1923, daerah utara yang berbatasan dengan laut sudah ditetapkan juga sebagai daerah polder. Hanya pada waktu itu karena penduduk masih sedikit bentuknya masih merupakan rawa-rawa alami yang dipertahankan saja, boleh dibangun sarana waduk. Pada awalnya daerah Pluit adalah daerah rawa dan berlumpur yang dihuni penduduk yang masih relatif longgar. Bahkan sampai tahun 1970-an, kalau orang menyebut Pluit, maka akan terbayang sebidang tanah yang luas penuh lumpur dan selalu digenangi air. Daerah ini baru dihuni beberapa orang saja. Namun sejak tahun 1976 daerah tersebut telah diubah menjadi kawasan perumahan dan perindustrian.

Daerah yang terletak di belahan utara ibukota Jakarta itu baru didiami oleh beberapa gelintir manusia saja dengan tempat2 tinggal tanpa memenuhi persyaratan kesehatan. Namun kini daerah Pluit bukan lagi merupakan daerah rawa yang jauh dari persyaratan kesehatan, tapi seolah2 sudah disunglap menjadi daerah permukiman yang modern lengkap dengan tempat2 rekreasi dan lokasi perindustrian.¹⁰¹

Kawasan Pluit sebenarnya telah ditetapkan sebagai kawasan tertutup sejak tahun 1966. Melalui keputusan Peperda Jakarta Raya dan Sekitarnya No. 387/1960 telah dikuasai tanah-tanah di beberapa bagian barat Jakarta. Penguasaan tanah ini diumumkan oleh juru bicara Peperda Eddy Djadjang Djajaatmadja.

¹⁰¹ Media Jaya; 15 April 1976

...telah dikuasai tanah² untuk negara di beberapa bagian barat daerah Djakarta Raya untuk keperluan rentjana Polder Pluit dan pengerdjaan² pengerukan kali² yang mengalir melalui bagian barat dari kota Djakarta. Batas² dari tanah² yang dikuasai itu adalah:

- a. luasnja + HA dimulai dengan batas sebelah:
 - utara: garis pantai dari muara Sungai Karang hingga menjambung dengan batas utara bagian yang telah dikuasai; timur/selatan: mengikuti sebagian batas barat daerah yang telah dikuasai hingga S. Karang; Barat: Sungai Karang hingga garis pantai pada batas Utara.
- b. luasnja 75 HA dimulai dengan batas sebelah: utara/timur: titik pertemuan Kali Angke dengan terusan Bandjir mengikuti terusan bandjir ke selatan hingga persilangan terusan ini dengan Kali Grogol, Kali Grogol hingga djalan Telukgong
 - selatan: djalan Telukgong lurus hingga Kali Angke; Barat Kali Angke hingga titik pada permulaan batas utara/timur.¹⁰²

Rencana Pluit sebenarnya telah lama direncanakan. Tetapi pelaksanaannya belum bisa dimulai karena kesulitan anggaran. Setelah banjir besar melanda Jakarta 1960. Proyek Pluit pada awalnya sepenuhnya dikerjakan oleh Kopro Banjir. Proyek Pluit ini juga dilengkapi dengan pembangunan tanggul laut, waduk, gedung pompa, saluran Gang Opek, jalan-jalan masuk, jembatan dan galian beberapa saluran kecil.

Proyek Otorita Pluit meliputi proyek yang luasnya 1.274,88 hektar terdiri dari pengembangan Pluit Baru 810 hektar, yang akan dikembangkan untuk perumahan 296,5 hektar, industri 368,5 hektar, waduk 145 hektar. Kampung Gusti dan Jelambar 50 hektar untuk perumahan. Muara Karang untuk perumahan 148,144 hektar, bangunan umum dan sosial 6,405 hektar, pembangkit listrik 27,584 hektar, taman dan jalur hijau 9,910 hektar, penghijauan sepanjang kali 24,590 hektar. Teluk Gong 79,88 hektar, Muara Angke 281 hektar dan perkampungan nelayan 54 hektar. Selain itu juga pembangunan rumah di Teluk Gong sebanyak 63 buah dan di Jembatan Dua sebanyak 60 rumah.¹⁰³ Di samping jalur-jalur di kiri kanan jalan baru, di sekeliling danau buatan

¹⁰² Berita Indonesia; 23 Nopember 1960

¹⁰³ Media Jaya, 15 April 1976; hal 4

Pluit yang luasnya kira-kira 100 hektar, dibebaskan tanah 450 hektar.¹⁰⁴ Setelah berjalan beberapa tahun ternyata pembangunan tanggul laut sepanjang 2,2 kilometer hanya ditutup dengan lapisan aspal yang hanya selesai enam puluh persen. Gedung Pompa selesai sembilan puluh lima persen, mesin pompa beserta perlengkapannya selesai 3 buah dari rencana 4 buah kapasitas pompa 4 meter kubik perdetik.

Dalam pembangunan kawasan Pluit, pemindahan penduduk meliputi lahan seluas 40 hektar di Gang Opak, Angka, Jelakeng, dan Muara Baru. Mereka ditampung di Jembatan Dua, Teluk Gong, Tiang Bendera dan Jalan Latumeten sedangkan lainnya ditampung di Tomang Barat. Tomang Barat dengan luas 280 hektar direncanakan untuk menampung 5.000 kepala keluarga. Tetapi sampai akhir tahun 1966 baru dibebaskan 130 hektar, sedangkan yang sudah siap bangun 100 hektar penduduk yang dapat menampung sebanyak 2.800 kepala keluarga. Dalam pemindahan penduduk, dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang disebut Panca Tunggal, yang terdiri dari Departemen Dalam Negeri, Angkatan Kepolisian, Angkatan Bersenjata, DPU dan Pemerintah Jakarta, sedangkan Kopro Banjir hanya menyediakan lahan untuk dibangun. Pembangunannya diserahkan kepada penduduk.

Pada tahun 1971, ketika Proyek Pluit dilanjutkan masih terjadi kekurangan lahan, untuk itu tanah seluas 51 hektar di Kampung Gusti Jelambar, Pejagalan sebagai peremajaan pembangunan perumahan Otorita Pluit, penduduk di daerah tersebut dipindah ke Teluk Gong. Daerah Tomang Barat menurut keputusan Gubernur ditetapkan sebagai daerah tertutup, bahwa setiap orang yang berasal dari daerah lain tidak diperbolehkan datang menetap di kompleks tanah tersebut, kecuali untuk kepentingan proyek banjir.¹⁰⁵

Dalam kaitannya dengan Waduk Pluit, Kopro Banjir juga menyelesaikan pembuatan jembatan. Misalnya jembatan Angke merupakan jembatan beton dengan lebar 13,5 meter dan panjang 16,5 meter. Pelaksana PT Marwa Contractors dengan perencana PT Surjotomo penasehat Prof. Dr. Hwan Hay Kie. Biaya pembangunan

¹⁰⁴ Pemda DKI; *loc. cit.*,

¹⁰⁵ Keputusan Menteri Kepala Daerah No N.7/2/17/1966, tanggal 2 Maret 1966

jembatan 310.000 rupiah. Pembangunan dilaksanakan bulan September 1965 sampai 6 Juli 1966. Jembatan kedua adalah jembatan Gedung Panjang, lebar 12 meter dan panjang 33 meter dengan biaya 165.000 rupiah, selesai dalam waktu 7 bulan. Dengan selesainya jembatan tersebut, maka hubungan lalu lintas dari kota ke pantai dan Waduk Pluit dapat diatasi kemacetannya. Jembatan yang ketiga adalah jembatan kayu yang jaraknya sekitar dua kilo meter dari Jembatan Angke. Dalam waktu 4 bulan, jembatan kayu yang lebarnya 5 meter dan panjangnya 27,5 meter, diselesaikan oleh CV. Angka Tujuh dengan biaya 10.000. Selain itu Zeni AD yang merupakan salah satu unsur dari Kopro Banjir telah membuat jembatan darurat. Serah terima jembatan dilakukan oleh Ir Sujono Sosrodarsono selaku Komandan Kopro Banjir kepada pemerintah DKI Ir. Prajogo yang disaksikan oleh karyawan Kopro Banjir CZI Darmawan dari Korps Zeni AD.

Rentjana utama Kopro Bandjir untuk membuat djembatan2 tersebut, ialah guna memperlantjar arus air kali Angke diwaktu hudjan datang dan kemudian menampungnja diwaduk Pluit, sebuah waduk utama disebelah Utara Djakarta jang penting sekali artinja guna mentjegah bentjana bandjir didaerah perkotaan. Diwaktu airnja sudah berlebih2an pompa2 air akan bekerdja guna menjedot air jang berlebih itu ke laut Djawa...djembatan jang ada sebelumnja sudah tidak memenuhi sjarat, ada jang terlalu rendah konstruksinja tidak tahan terhadap lalu lintas berat, dan amat sempit sehingga mudah menghambat djalannja arus air menudju waduk Pluit...sedianja ketiga buah djembatan jang baru selesai dibuat itu akan lebih tjepat dapat dimanfaatkan djika tidak menemui rintangan2 seperti kematjetan2 keuangan, kenaikan2 harga dan situasi tempat pekerdjaan jang padat oleh lalu lintas umum, meskipun untuk itu telah dibangun sebuah djembatan darurat jang dipasang oleh Zeni AD salah satu unsur dalam Kopro Banjir.¹⁰⁶

Pembangunan kawasan Pluit mengalami percepatan setelah tahun 1976. karena pada masa sebelum itu mengalami banyak hambatan dan tidak selesai seluruhnya. Khusus mengenai pembangunan waduk Pluit, dasar pembangunan yang dipakai adalah dalam kondisi normal, air masuk dari kota melalui Kali Opak dialirkan ke waduk

¹⁰⁶Mingguan Djaja, No. 238 Tahun V, 13 Agustus 1966

dengan kapasitas 16 meter kubik. Sistem polder di Pluit ini pada awalnya ditetapkan seluas 800 hektar kemudian ditingkatkan menjadi 2.400 hektar. Rencana induk untuk pekerjaan Pluit meliputi dua tahap. Tahap pertama; pembangunan waduk Pluit 80 hektar dengan kapasitas 2,5 juta meter kubik. Dalam tahap pertama ini meliputi pekerjaan penggalian, pengeluaran melalui pintu air di Pasar Ikan, pembangunan stasiun pompa air 4 buah dan pekerjaan mekanik lainnya. Tahap kedua; pembangunan pintu penutup waduk, *ring canal* sepanjang 1.700 meter, gedung panjang kanal dan pemindah (*shifted*) Kali Opak, pintu air, *syphon spillway*, tiga jembatan dan dam Ancol. Pembangunan dua tahap tersebut termasuk biaya konsultan dan penelitian adalah 38.000.000 gulden dengan dana pinjaman dari Belanda. Sedangkan biaya pembebasan tanah dari GOI sebesar 3.000.000 gulden atau 1 milyar rupiah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan gabungan dari PT Sac Nusantara dan Broekhoeven Overseas BV. Kontrak kerjasama pertama kali ditandatangani 1 Juli 1977 dan kontrak kedua 14 Juli 1978 pekerjaan selesai tahun 1980.¹⁰⁷

Waduk Pluit di Jakarta Utara diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 29 Agustus 1981. Waduk tersebut dilengkapi dengan sistem polder untuk mengendalikan genangan air di daerah Krukut/Cideng sampai Jatibaru, Taman Sari, Mangga Besar, Kali Beton dan lain-lain. Biaya pembangunan berasal dari APBN 950 juta untuk pembebasan tanah dan biaya konstruksi bantuan Belanda sebesar 40,4 juta gulden. Selain pembangunan waduk Pluit, pada tahun 1981 Kopro Banjir DKI juga melakukan pengerukan sejumlah sungai antara lain sungai Ciliwung, Cideng, Krukut, Grogol, Kaliduri, Setiabudhi. Selain itu juga dibangun tiga gedung pompa baru di daerah Setiabudhi, pengerukan waduk Grogol, pembersihan aliran sungai Mampang.¹⁰⁸ Kopro Banjir mempunyai tugas untuk menangani banjir secara makro, sedangkan yang mikro seperti riol dan lain-lain ditangani oleh Pemda DKI. Kopro Banjir dalam operasinya membagi Jakarta dalam tiga wilayah. Bagian barat sebelah barat banjir kanal, tengah sebelah timur banjir kanal sampai jalan *by pass* dan timur di sebelah timur *by pass*.

¹⁰⁷ Brief Description on Jakarta Drainage and Flood Control; Departement of Public Work, No. agenda 93/95; tanpa tahun, hal 5

¹⁰⁸ Sinar Harapan; 30 Desember 1981

Sarana yang ada dibagian tengah adalah waduk Pluit yang dikembangkan untuk mengamankan 700.000 penduduk.¹⁰⁹

6.3.6 Sodetan dan Instalasi Pompa Sungai Cideng

Sungai Cideng sangat vital untuk mengendalikan air di tengah kota yang berdekatan dengan kawasan Monumen Nasional. Untuk itu dengan sodetan dan instalasi pompa sungai Cideng dapat menghilangkan banjir dengan angka keamanan banjir 25 tahun untuk daerah inti kota seperti jalan utama Thamrin, Medan Merdeka, Sabang, Kebun Sirih, Wahid Hasyim, Menteng, Tanah Abang, Istana Negara, Monas dan sekitarnya. Daerah ini luasnya sekitar 750 hektar. Dengan adanya sistem drainase ini diharapkan air hujan lokal dapat ditampung dan dialirkan pada saluran-saluran drainase setempat dan terkumpul di saluran Cideng setelah itu dibuang ke kanal banjir di sebelah hilir pintu air Karet melalui instalasi pompa Sungai Cideng yang mempunyai kapasitas 40 meter kubik perdetik. Di samping itu dengan adanya pompanisasi Cideng, dapat membebaskan banjir di kawasan tersebut sehingga meringankan beban pompa Pluit. Sebelum dibangun pompa Cideng, seluruh air hujan di kawasan pelayanan pompa Cideng dialirkan ke Waduk Pluit yang kemudian di pompa ke laut. Dengan adanya pompa sungai Cideng maka luas kawasan pelayanan waduk dan pompa Pluit yang semula 2.500 hektar dikurangi 750 hektar. Sehingga pelayanan dari pompa Pluit dan Cideng meningkat menjadi banjir 25 tahun. Perencanaan Instalasi Pompa Cideng dilaksanakan oleh konsultan Nikken-Wiratman-Nippon Koei dari Agustus 1985 sampai September 1986 yang dibiayai seluruhnya dari bantuan OECF/Jepang dengan total pembiayaan 50 milyar rupiah yang terdiri dari 2 paket pekerjaan normalisasi saluran Cideng, pembuatan pintu air Cideng dan

¹⁰⁹ Sinar Harapan; 11 November 1982

penyesuaian jembatan. Tahap kedua adalah pembuatan instalasi pompa, pembuatan kolam dan pelengkap lainnya.¹¹⁰

Untuk menanggulangi banjir di Jalan Thamrin dan sekitarnya maka pemerintah juga membangun pompa air di jalan Siantar. Pompa ini berfungsi untuk memompa air dari kali Cideng ke banjir kanal. Kapasitas pompa 40 meter kubik perdetik. Dengan pompa ini diharapkan banjir yang melintas di sungai Cideng dapat dikurangi. Bangunan yang terkena proyek sebanyak 134 buah yang dihuni 350 jiwa, dengan luas 10.628 meter persegi. Proyek ini terlaksana atas kerjasama antara DPU, Pemda DKI dan bantuan Jepang. Sebelum diadakan penggusuran diadakan rapat antara warga RW 04 dan 06 dihadiri kepala Agraria, Lalu Imran, Camat Gambir Suparlan, Pemimpin Proyek Banjir DKI Martsanto. Adapun besarnya ganti rugi didasarkan pada SK Gubernur No. 01948/III/1984, untuk tanah hak milik sertifikat 186.000 rupiah permeter persegi, tanah sertifikat 122.000 rupiah permeter persegi, tanah hak guna bangunan sertifikat 108.000 rupiah permeter persegi, tanah hak guna bangunan belum sertifikat 92.200 rupiah permeter persegi tanah hak pakai bersertifikat 81.000 rupiah permeter persegi dan tanah garapan mendapat ganti rugi 25% dari nilai ganti rugi tanah hak milik sertifikat. Bangunan permanen konstruksi berat 190.000 rupiah permeter persegi, bangunan permanen ringan 130.000 rupiah permeter persegi, semi permanen 90.000 rupiah permeter persegi, bangunan darurat 25.000 rupiah permeter persegi, telepon 200.000 per nomor, pagar besi 5.000 permeter, pagar dolken 3.500, pagar tembok 4.500.¹¹¹ Pelaksanaan ganti rugi tanggal 23 Agustus 1984, warga yang sudah menerima ganti rugi dalam 15 hari harus sudah membongkar rumahnya.¹¹²

Proyek pompa di jalan Pematang Siantar dilengkapi dengan 6 pompa yang masing-masing berkapasitas 6,7 meter kubik perdetik. Proyek ini mendapat bantuan dana hasil IGGI (OECF) Jepang) sebesar Rp 13,2 milyar khusus untuk biaya konstruksi, sedang biaya pembebasan tanah seluas 1,95 hektar bernilai sekitar 1

¹¹⁰ Proyek Pengendalian Banjir; Pengendalian Banjir Jakarta Pusat dengan memakai Instalasi Pompa Kali Cideng, Jakarta: DPU, tt, hal 3.

¹¹¹ Suara Karya; 16 April 1984

¹¹² Sinar Harapan; 4 September 1984

milyard rupiah dari Pemerintah Pusat. Sarana pompa Siantar ini akan mengatasi genangan di Jalan Thamrin, Monas dan Jalan Sabang. Untuk mengurangi genangan di daerah Monas, perlu dilengkapi dengan *koker* (riol berukuran besar) dari pertigaan jalan Thamrin, Merdeka Selatan dan Sabang menembus ke kali Cideng, sejajar dengan jalan Budi Kemuliaan agar genangan cepat dialirkan ke kali Cideng dan masuk ke Waduk Pluit.¹¹³

6.4 Pengendalian Banjir Mikro Sistem

6.4.1 Pengelolaan Sampah

Sampai tahun 1979, masalah keterbatasan dana selalu menjadi alasan untuk menangani banjir. Untuk itu titik berat pengendalian banjir juga ditekankan kepada partisipasi masyarakat. Di antaranya dengan mengadakan seruan kepada warga kota agar turut menjaga kebersihan lingkungan. Seruan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan dinas kesehatan melalui media cetak dan televisi. Hal ini disebabkan kebiasaan warga Jakarta untuk membuang sampah ke sungai masih tinggi. Berdasarkan data Proyek Pengendali banjir tiap tahun sampah yang diangkat tidak kurang 400.000 meter kubik.¹¹⁴

Masalah kebersihan kota sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 1972. Peraturan ini mengatur tentang ketertiban umum yang isinya melarang setiap orang membuang sampah dan berjualan di sembarang tempat. Bagi warga yang melanggar aturan ini dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000 dan atau hukuman badan selama 6 bulan. Pada tahun 1981, kepedulian terhadap kebersihan kota dan sampah ini juga dilakukan oleh Sekjen DPP Organda (Organisasi Angkutan Darat). Dalam pertemuannya pada tanggal 17 Mei 1981, Sekjen DPP Organda melontarkan gagasan bahwa setiap penumpang bis mulai 1 Juni 1981 dikenakan biaya tambahan Rp 10, untuk mendapatkan kantong plastik yang diperoleh di setiap terminal bis antar

¹¹³ Sinar Harapan; 10 April 1984

¹¹⁴ Merdeka; 3 Januari 1979

kota. Maksud penggunaan kantong plastik adalah agar penumpang tidak membuang sampah di sembarang tempat. Gagasan ini disambut baik oleh DPRD DKI dan Pemda DKI. Tetapi DPRD mengingatkan bahwa setiap pungutan harus diatur berdasarkan peraturan Gubernur. Untuk itu Gubernur tidak bisa memaksa untuk mematuhi seruan Organda kecuali hanya mengimbau. Sehingga gagasan DPP Organda tidak dapat direalisasikan. Selain itu dalam tahun ini juga muncul Gerakan Memasyarakatkan Kebersihan, Keindahan, Keteduhan Lingkungan Hidup (GMK3LH) yang diketuai oleh Ny. Tjokropranolo. Gerakan ini terdiri dari 50 orang yang sebagian besar adalah pejabat DKI Jakarta. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah memberikan bantuan jaket kepada petugas Dinas Kebersihan, DPU dan Dinas Pertamanan.¹¹⁵

Untuk menangani sampah-sampah yang terdapat di permukiman padat terutama sampah-sampah yang dihasilkan dari penghuni liar di pinggir sungai. Gubernur Suprpto mengintruksikan agar sampah-sampah dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian dikumpulkan dan diangkut ke penampungan sampah di Cakung dan Kapuk Muara.

Untuk penanggulangan sampah di tempat permukiman padat perlu ada kantong plastik. Cara pembagian kantong tempat sampah itu bisa dikoordinir misalnya RT/RW. Sedangkan untuk pengangkutannya sampai ke tempat penampungan sampah sementara bisa juga dilakukan oleh tenaga-tenaga tuna karya...untuk penanggulangan sampah di permukiman padat, Pemda DKI kalau perlu beli rumah kecil di pinggir jalan untuk dijadikan tempat sampah. Mengenai sampah-sampah yang ditimbulkan oleh penghuni liar di pinggir-pinggir kali juga perlu pemecahan tersendiri.¹¹⁶

Sampah di DKI pada tahun 1982 setiap hari 17.500 meter kubik sedangkan yang bisa diangkut oleh Dinas Kebersihan hanya 13.400 meter kubik perhari, sehingga

¹¹⁵ Sinar Harapan; 30 Desember 1981

¹¹⁶ Suara Karya; 21 Oktober 1982

sisanya sekitar 1.000 meter kubik sebagian terbuang ke sungai yang mengalir ke dalam kota.¹¹⁷ Pembuangan sampah ke sungai sangat menghambat aliran sungai.

Pembuangan sampah pada awalnya di daerah Cakung Cilincing. Karena sudah penuh pembuangan sampah di daerah Cacing sejak Desember 1982, ditutup dan sebagai gantinya sebagian akan dibuang ke Kapuk untuk pembuangan Jakarta Barat dan Utara. Pembuangan sampah ke Kapuk, digunakan sebagai reklamasi pantai di Muara Angke, karena ombaknya kecil dan daerahnya sudah berkembang. Daerah reklamasi akan digunakan sebagai penghijauan dan permukiman. Agar tidak terbawa arus maka akan dilindungi dengan tanggul. Pada tahun 1979, di Muara Angke telah dilakukan reklamasi pantai seluas 15 hektar dengan biaya 75 juta rupiah yang dipimpin oleh Sumaryo. Setelah 5 tahun sebagian besar sudah berhasil menjadi hutan bakau setinggi 3 meter sampai 5 meter. Sistem reklamasi yang digunakan pada tahun 1979 adalah dengan menggunakan terucuk bambu yang diperkuat dengan karung pasir. Lumpur dan erosi sungai Angke disemprotkan ke tengah terucuk dan menjadi pasir landai dan hasilnya ditumbuhi pohon bakau.¹¹⁸

Berdasarkan pengalaman itu maka Muara Sungai Angke dapat diperluas menjadi 50 hektar untuk pembuangan sampah dan reklamasi pantai. Sampah di Jakarta pada tahun 1984 setiap hari diperkirakan 70.000 meter kubik yang bisa diangkut 13.000 meter kubik sedangkan yang masuk sungai sekitar 1.000 meter kubik. Untuk itu diperlukan kesadaran untuk tidak membuang sampah di sungai.¹¹⁹ Kerusakan sarana pengairan disebabkan sampah yang memenuhi sungai, berdirinya gubug-gubug liar dan tindakan masyarakat yang selalu menggali tanggul sungai. Untuk menanggulangi sampah masuk ke waduk-waduk penampungan maka di sungai-sungai yang ada maka dipasang saringan seperti di siphon Teluk Gong dipasang saringan satu buah, di waduk Pluit dua buah saringan dan di Gunung Sahari satu buah saringan.¹²⁰

¹¹⁷ Antara; 25 November 1984

¹¹⁸ Kompas; 4 Jan 1983

¹¹⁹ Merdeka; 26 Nopember 1984

¹²⁰ Sinar Harapan; 10 November 1983

Untuk menangani sampah dipermukiman padat, pemerintah DKI menyalurkan kantong plastik ke RT/RW yang dapat digunakan sebagai tempat sampah, agar sampah dapat dikelola dan tidak berceceran. Selain itu muncul gagasan untuk membuat tempat-tempat sampah di pinggir jalan. Setelah terkumpul sampah-sampah tersebut diambil oleh kendaraan pengangkut sampah. Gagasan Gubernur Suprpto ini muncul sekitar tahun 1982. Selain itu DKI juga mengadakan kerjasama dengan organisasi-organisasi pemuda seperti Pemuda Pancasila (PP). Dalam peringatan PP ke 23 tahun 1982, PP yang dipimpin oleh Yapto SS mengadakan aksi kebersihan di lima wilayah DKI.¹²¹

6.4.2 Mengusur Permukiman Warga di Bantaran Sungai

Keberlangsungan hidup sebuah kota didukung oleh adanya masyarakat dan budaya pendukungnya. Untuk itu, kebudayaan masyarakatlah yang menjadi jiwa dan karakter kota itu, sedangkan aspek fisiknya akan menjadi raganya. Oleh karena itu membangun kota pada dasarnya membangun jiwa masyarakatnya. Apabila jiwa masyarakat rapuh maka kota itu lambat laun akan rapuh pula. Untuk itu pembangunan fisik kota harus diikuti pembangunan masyarakatnya. Contohnya keruntuhan peradaban Romawi. Ketika warga Romawi menyaksikan para bangsawan dan para penguasa melakukan keserakahan, seperti memungut pajak yang tinggi, menguasai tanah-tanah luas dan vila-vila yang nyaman di luar kota, hidup dalam kemewahan dan kepemimpinan yang lemah. Sementara rakyat hidup dalam kemelaratan dan tinggal di tempat-tempat yang kumuh atau tenggelam dalam perbuatan yang buruk dan mati dalam kesengsaraan di tengah kemewahan. Akhirnya Kerajaan Romawi hancur karena tidak ada pemimpin yang bijaksana dan beradab.¹²²

Masalah banjir di Jakarta sangat terkait dengan perilaku masyarakatnya. Banjir yang selalu melanda Jakarta bisa saja menghilangkan segala peradaban di kota jika tidak ada penanganan secara menyeluruh terhadap kota Jakarta. Banjir yang terjadi

¹²¹ Suara Karya; 21 Oktober 1982

¹²² Paulus Hariyono; *op. cit.*, hal 89

sering disebabkan oleh adanya aliran air yang tidak lancar, karena terhambat oleh sampah atau bangunan lainnya. Pembangunan di daerah Depok sampai Bogor telah berakibat pada rusaknya DAS Ciliwung. Daerah ini tadinya dapat menyerap air hujan, setelah pembangunan permukiman, daya serapnya tinggal sekitar 20% dari curah hujan yang ada, sisanya menjadi aliran sungai. Untuk memperlebar aliran sungai, Gubernur Ali Sadikin mengeluarkan keputusannya pada tanggal 16 Pebruari 1976 yang mengatur masalah ketertiban bantaran sungai. Dalam keputusan tersebut berisi pembersihan terhadap bangunan yang berada di wilayah bantaran sungai. Untuk itu bangunan yang ada harus dibersihkan. Satu di antara wilayah tersebut adalah kawasan bantaran sungai di tepi kiri dan kanan sungai Ciliwung - Kanal Banjir dan dari pintu air Manggarai sampai pintu air Kapitol wilayah Jakarta Pusat dan Pintu Air Manggarai sampai dengan Jembatan Haji Ling di wilayah Jakarta Kota dan Jakarta Barat.¹²³ Di wilayah ini yang panjangnya 2,4 kilometer, pada tahun 1976 diadakan penggusuran bangunan yang jumlahnya diperkirakan 37.500 kepala keluarga digusur.¹²⁴

Ali Sadikin juga mengintruksikan kepada Walikota Jakarta Barat dan Jakarta Pusat untuk selambat-lambatnya pada 10 Pebruari 1977 membersihkan pinggiran sungai Cideng dan banjir kanal dari bangunan liar. Namun karena normalisasi sungai kurang sempurna sehingga air masih merembes ke perkampungan. Untuk mengatasi banjir di Jakarta Pusat maka ada dua cara pengendaliannya: pertama sistem Cideng yakni dengan elektrifikasi pintu air Opak di sungai Opak agar arus air lebih baik di bagian sungai Cideng dan Krukut. Sebelumnya untuk membuka dan menutup pintu air sungai Opak hanya bisa dilakukan dengan tangan, namun karena banyaknya bangunan di sepanjang sungai sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar. Bangunan mulai dari Ketapang ke Utara sampai ke Pluit harus dibongkar untuk mengalirkan air. Selain itu sistem Sentiong juga harus dilakukan pelurusan sampai ke Ancol. Hal ini untuk mempercepat surutnya air di Tanah Tinggi.

¹²³ Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. D.IV-1247/b/5/1976 tanggal 16 Pebruari 1976

¹²⁴ Kompas; 26 Nopember 1984

Bangunan² mulai dari Jalan Ketapang ke Utara sampai ke Pluit itu oleh Gubernur diinstruksikan untuk segera dibongkar untuk menghindarkan terganggunya aliran air. Seperti diketahui bangunan liar itu berupa gudang kayu, bengkel dan perumahan. Kedua sistem Sentiong yakni dikendalikan dengan cara pendekatan/pelurusan aliran air langsung ke Ancol. Hal ini merupakan bantuan yang cukup berarti dalam usaha mempercepat surutnya air di daerah Tanah Tinggi yang sering tergenang air. Sodetan yang terdapt di Bendungan jago ini bukan menjadi penyebab dari tergenangnya lapangan Kemayoran...tetapi karena meluapnya Kali Mati yang ada di daerah Kemayoran itu dan bermuara di AIP Gunung Sahari...¹²⁵

Menurut rencana induk Jakarta 1965 – 1985 memerlukan penghijauan sekitar 40% dari luas Jakarta. Jadi dari luas Jakarta 660 kilometer persegi, harus ada sekitar 264 kilometer persegi yang dijadikan jalur hijau. Problem yang timbul adalah bagaimana mempertahankan tempat yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hijau seperti Condet agar dimasa mendatang tetap terhindar dari penggarapan yang tidak terkontrol. Sejak tahun 1969 penyusutan areal pertanian menyusut 2,7% setiap tahun. Untuk menjaga agar areal pertanian tetap ada maka harus diusahakan setiap jengkal tanah untuk tanaman produktif.¹²⁶

Edardono Hardjaprabawa ketua Komisi C DPRD DKI, setelah meninjau kegiatan penanggulangan banjir mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta terbentur pada masalah sosial, sedangkan masalah teknis sudah bisa tertangani semua. Masalah sosial tersebut adalah banyaknya bangunan di sepanjang bantaran sungai. Pemanfaatan bantaran sungai untuk permukiman sangat merugikan para penghuni sendiri karena setiap musim hujan selalu kebanjiran, selain itu tanggul-tanggul makin lama makin terkikis sehingga fungsinya terus menurun. Daerah yang paling padat dengan permukiman liar adalah sepanjang Pejompongan Tanah Abang Bongkaran, Jatibaru – Grogol hingga Pluit. Ribuan rumah berdiri disepanjang sungai ini.¹²⁷

Setelah hampir sepuluh tahun, daerah-daerah yang pernah digusur telah dipenuhi oleh penghuni liar lagi. Masalah yang penting dalam kaitannya dengan aliran

¹²⁵ Sinar Harapan; 26 Januari 1977

¹²⁶ Kompas; 8 September 1981

¹²⁷ Suara Karya; 15 Oktober 1982

sungai adalah cepatnya aliran air. Ketika aliran air terganggu oleh sampah dan propil bangunan maka akan mengganggu arus sungai. Untuk itu bantara kali harus dibersihkan. Untuk itu pemerintah DKI melalui Perda Nomor 3/1972 berusaha menertibkan bangunan liar yang ada di Jakarta. Berdasarkan peraturan tersebut pada tahun 1976 pernah dilakukan penggusuran, tetapi setelah sepuluh tahun ternyata bangunan yang pernah digusur pada tahun 1976, sudah dipenuhi oleh bangunan liar lagi. Pada tahun 1982 masalah gubug-gubug liar yang berdiri di sepanjang bantaran sungai dan sampah yang menumpuk di sungai juga menjadi hambatan dalam menangani banjir. Untuk itu pemerintah mengimbau agar pemerintah daerah DKI mempercepat penertiban gubug liar.

Gubernur DKI Jakarta R. Soeprpto beberapa waktu lalu ketika membicarakan masalah banjir di Ibukota juga sudah menginstruksikan kepada seluruh walikota supaya membersihkan sepanjang aliran kali dari bangunan liar. Usaha penertiban serupa pernah dilakukan tahun 1976. beberapa tahun kemudian diulangi lagi, sehingga aliran Kali Ciliwung maupun kali lainnya cukup baik. Namun karena kurangnya pengawasan dan tidak berlanjutnya penertiban daerah itu, kini penuh kembali. Padahal biaya penertiban jutaan rupiah... Kali Krukut yang oleh Proyek Pengendali Banjir DKI pada bagian sepanjang Kali dekat Pondok Karya telah dibersihkan dari lumpur. Tampaknya tak banyak membantu, karena keadaan kali itu pada daerah Karet sampai Setiabudhi semakin padat dengan tumpukan sampah dan lumpur. Beberapa tahun lalu pernah dikeruk, tapi tanpa perawatan rutin dan ketat akhirnya pengerukan menjadi mubazir... di Kali Ciliwung Kota sampai kemarin masih terlihat onggokan enceng gondok dan batang kayu. Sehingga mempersempit sungai. Ini terlihat di dekat jembatan Pejambon, Jakarta Pusat.¹²⁸

Kondisi aliran sungai yang dangkal akibat sedimentasi dan sempitnya aliran karena munculnya bangunan liar di bantaran sungai, arus sungai sangat mengganggu. Selain itu masalah perawatan sungai yang tidak rutin dilakukan ternyata tidak efektif untuk pembangunan drainase. Penduduk beranggapan bahwa karena banjir hanya berlangsung sekali setahun sehingga mereka masih mempunyai waktu 11 bulan tidak

¹²⁸ Kompas; 9 Desember 1982

kebanjiran. Untuk itu mereka secara sadar mendirikan bangunan di bantaran sungai. Padahal tindakannya itu sangat membahayakan orang lain karena air tidak bisa mengalir dengan lancar sehingga menimbulkan banjir di tempat lain.

Di sepanjang aliran Cipinang dekat kompleks polisi Cipinang tidak jauh berbeda kondisi sungai lainnya, lumpur batang kayu tampak mendangkalkan aliran. Jika terjadi banjir diperkirakan air akan meluap lebih luas. Tahun lalu di lokasi ini air menggenangi kompleks perumahan sampai setinggi 1,5 m... seorang penghuni sebuah rumah mengatakan rumahnya baru sebulan rampung. Kalau kebanjiran kan hanya setahun sekali, ujanya ambil tersenyum... dari beberapa keterangan penduduk setempat bangunan itu tanpa memiliki ijin mendirikan bangunan. Hal ini dibiarkan Pemda DKI Jakarta.¹²⁹

Untuk itu mulai 29 Desember 1982 berlangsung penertiban gubug liar di Jakarta. Penggusuran dikelompokkan dalam beberapa wilayah. Untuk tahap pertama dilakukan di wilayah Jakarta Pusat. Di sepanjang kanal banjir terdapat sekitar 500 gubug liar yang dihuni 507 kepala keluarga dengan jumlah penghuni 1.700 jiwa yang meliputi tiga kelurahan Kebon Kacang, Kampung Bali dan Kebon Melati. Pembongkaran di daerah ini akan dilakukan selama 4 hari.

Munculnya penghuni liar di sepanjang sungai ini juga mendapat sorotan dari DPRD DKI. Menurut Ketua Komisi C DPRD DKI Edardono, munculnya penghuni liar karena pengawasan yang sangat lemah dan tidak rutin. Sebagai contoh bantaran sungai sepanjang Teluk Gong sampai muara karena pengawasan ketat, penghuni liar tidak muncul lagi sejak ditertibkan tahun 1976, tetapi bantaran sungai sepanjang Pejompongan Tanah Abang Bongkaran, Jatibaru, Grogol hingga Pluit, ribuan rumah liar berdiri di daerah tersebut, bahkan sebagian rumah permanen.¹³⁰

Untuk menangani saluran dengan mengadakan normalisasi pada tahun 1981/1982 pemerintah menganggarkan 1,9 milyar rupiah. Dana tersebut diperuntukkan untuk normalisasi saluran sepanjang 22.000 meter yang meliputi penurapan saluran penghubung dan pembuangan sepanjang 10.000 meter dan

¹²⁹ Kompas; 9 Desember 1982

¹³⁰ Suara Karya; 15 Oktober 1982

eksploitasi saluran irigasi sebagai sarana penunjang pertanian yang dimasukkan dalam Program Inpres Dati I seluas 14.206 hektar.¹³¹

Penggusuran tanggal 4 Januari 1983, di daerah sepanjang kanal Tanah Abang menggusur 100 bangunan liar di sekitar jembatan Tinggi dan Bongkaran Tanah Abang¹³². Menurut catatan di sepanjang kanal banjir terdapat sekitar 500 gubug liar yang dihuni 507 kepala keluarga dengan jumlah penghuni 1700 jiwa yang meliputi tiga kelurahan Kebon Kacang, Kampung Bali dan Kebon Melati.¹³³ Untuk memudahkan penggusuran Pemda Jakarta menyediakan satu tim kesehatan, mobil pemadam kebakaran, mobil derek, 74 kendaraan petugas, serta 30 truk untuk mengangkut para penghuni. Rumah-rumah yang telah dibongkar puing-puing kayu dibakar agar tidak dapat digunakan kembali sebagai sarana gubug-gubug liar. Di daerah ini, penghuninya sebagian besar adalah para tuna karya/wisma. Setelah digusur biasanya untuk sementara menyingkir, setelah aman mereka akan kembali lagi.¹³⁴

Penertiban dari pintu air Karet sampai jembatan Hajiling dipimpin langsung oleh Walikota Jakarta Pusat Suminto. Melihat penertiban yang dilakukan pemerintah, hal ini menimbulkan sikap pesimis dari warga. Mereka mengatakan bahwa penertiban hanyalah pekerjaan yang sia-sia, karena dilakukan tidak konsisten.

Seorang warga yang menonton pembersihan gubug liar berkomentar, tindakan itu hanya merupakan operasi tambal sulam sebab selama ini penertiban juga dilakukan tetapi tidak konsisten, karena pada awalnya petugas sengaja membiarkan pembongkaran dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Karena tidak mendapat kemajuan, maka sekitar pukul 14.00 setelah mengamati penghuni banyak juga tidak beranjak dari tempatnya petugas langsung membongkar dan membakar bangunan yang sudah dirobohkan dan yang masih berdiri.¹³⁵

Pada waktu penertiban berlangsung Kepala Kandeppenko Jakpus M. Panjaitan melalui pengeras suara berkali-kali minta kepada warga agar mendaftar ke petugas di

¹³¹ Pelita; 4 Pebruari 1982

¹³² Suara Karya; 6 Januari 1983

¹³³ Suara Karya; 6 Januari 1983

¹³⁴ Berita Buana; 14 April 1983

¹³⁵ *Ibid.*

bawah jembatan untuk ditransmigrasikan atau dipulangkan.¹³⁶ Bagi yang pulang kampung pemerintah menyediakan tiket sampai tujuannya dan uang saku. Sedangkan yang bertransmigrasi dapat mendaftarkan kepada petugas yang berada di lokasi pengurusan. Bagi yang mendaftarkan diri untuk transmigrasi pemerintah menjanjikan untuk dididik selama satu bulan di Semper Bekasi, kemudian diberangkatkan ke Sumatera Selatan atau Kalimantan Timur. Di daerah yang baru setiap kepala keluarga akan mendapat 2 hektar tanah, sebuah rumah 34 meter persegi, bahan kebutuhan pokok untuk hidup selama satu tahun dan diberi bibit pertanian. Dari hasil penerangan tersebut tercatat 21 orang kepala keluarga bersedia ditransmigrasikan dan 50 orang minta pulang kampung. Sehari sebelumnya sebanyak 18 kepala keluarga mendaftarkan diri ikut transmigrasi.¹³⁷

Penghuni yang tinggal di bantaran kali tidak semua pengemis atau pemungut puntung rokok. Ada juga yang berjualan kopi, nasi atau tukang pijat. Ny Sri misalnya perempuan asal Jember yang bekerja sebagai tukang pijat tidak mau ditransmigrasikan. Karena Ny. Sri merasa trauma dengan kejadian yang dialami orang tuanya yang tidak sukses ikut program transmigrasi.

Nyonya ini berkata mau dipulangkan tapi barangnya berupa mesin jahit merk Standard dan tape rekorder serta pakaiannya 15 pasang harus juga diangkut, jika tidak dia tidak mau dipulangkan. Ditanya tentang transmigrasi Nyonya Sri mengatakan ayahnya dulu pernah bertransmigrasi ke daerah Deli tetapi kemudian pulang karena tidak enak di sana. Cerita ayahnya inilah yang membuatnya takut bertransmigrasi. Ny. Sri pergi ke Jakarta karena kesal ditinggal suaminya yang kawin dengan wanita lain. Daripada pusing di kampung lebih baik di Jakarta.¹³⁸

Pengurusan dilanjutkan pada tanggal 12 Januari 1983. Dalam pengurusan tanggal 12 Januari 1983 petugas yang berjumlah sekitar 400 orang telah melakukan pengurusan di daerah pintu air Karet Bendungan Hilir. Sekitar 118 kepala keluarga

¹³⁶ Kompas; 8 Januari 1983

¹³⁷ Suara karya; 6 Januari 1983

¹³⁸ Kompas; 26 Januari 1983

dengan 400 jiwa lebih telah ditertibkan secara paksa. Diantara mereka yang digusur sebagian besar masih tertarik untuk tinggal di Jakarta, karena untuk pulang ke kampung atau transmigrasi tidak mungkin. Seperti yang dituturkan seorang ibu yang mempunyai 4 orang anak “biar bagaimanapun sulitnya, ia akan tetap tinggal di Jakarta”. Di daerah ini, pemerintah memberikan dua pilihan bagi warga yang terkena gusuran. Pertama ditransmigrasikan atau pulang ke kampung asalnya.¹³⁹

Penertiban yang dilakukan selama sembilan hari, tim penertiban gabungan Jakarta Pusat selesai menggusur seluruh bangunan atau gubug liar di bantaran sungai Kanal Banjir Kali Malang dan sungai Krukut. Selama operasi itu sebanyak 1.397 gubug dibongkar petugas. Tim Gabungan membongkar 102 gubug di bawah jembatan sungai Krukut di Jalan Kebon Jati sampai pasar tekstil Tanah Abang. Sungai di daerah ini hampir tidak berfungsi karena dipenuhi oleh sampah dan gubug liar. Penertiban selanjutnya adalah di jalan Lontar dan penertiban di sepanjang rel kereta api Tanah Abang. Selanjutnya sungai Krukut dari pintu air Karet sampai ujung jalan Jatibaru (perempatan Abdul Muis) akan diturap secara bertahap. Berdasarkan laporan setelah diadakan penertiban di Jakarta Pusat dari 879 kepala keluarga yang digusur, penduduk yang bersedia ditransmigrasikan 72 kepala keluarga mencakup 256 jiwa, dipulangkan ke kampungnya 40 kepala keluarga, sisanya tidak menyatakan pendapat. Sebagian besar warga masih tetap tinggal di Jakarta. Terbukti jembatan Krukut masih tersisa perabotan rumah berupa panci, tas, dan sepatu. Tetapi alat-alat itu oleh petugas ketertiban dihancurkan semuanya.¹⁴⁰

¹³⁹ Berita Buana; 13 Januari 1983

¹⁴⁰ Kompas; 15 Januari 1983

Gambar 50: Suasana Penggusuran Warga di Jakarta Pusat



Sumber: Berita Buana; 14 April 1983

Di daerah Jakarta Barat penggusuran dimulai pada bulan Mei 1983. Bangunan yang digusur adalah bangunan yang terletak 10 meter dari bantaran sungai, meliputi kelurahan Angke, Jembatan Dua di kecamatan Tambora dan Grogol Petamburan. Sebanyak 1.150 bangunan liar yang terletak di sepanjang pinggir kanal banjir mulai dari Jembatan Besi sampai Jembatan Dua di wilayah Jakarta Barat. Dari hasil evaluasi, di sepanjang sungai terdapat 1.087 kepala keluarga. Mereka berdomisili di kelurahan Jelambar sebanyak 599 kepala keluarga, Kelurahan Angke sebanyak 514 kepala keluarga, dan Jembatan Besi sebanyak 14 kepala keluarga. Walikota Jakarta Barat H. Eddy Ruchiyat Soheh SH merujuk pada Perda No. 3 tahun 1972 dan Surat Wakil Gubernur DKI tanggal 11 Januari 1983, maka mengeluarkan perintah pembongkaran. Untuk persiapan pindah-pindah, warga diberi waktu 7 x 24 jam untuk membongkar rumahnya sendiri.¹⁴¹

Penertiban bangunan dalam rangka pengamanan kali yang ada di wilayah Jakarta Barat direncanakan setelah banjir kanal akan dilanjutkan dengan kali

¹⁴¹ Sinar Harapan 27 April 1983

Cisadane¹⁴². Operasi penertiban terhadap 1150 gubug liar di sepanjang banjir kanal Jakarta Barat mulai dilaksanakan Rabu siang. Tim gabungan terdiri dari Kamtib Jakbar, Kores 703, Kodim 0503, P2K, Camat Tambora, Lurah Jelambar dan Lurah Tambora yang beranggotakan 253 personil. Jumlah penduduk yang tergusur sekitar 5000 orang. Menurut walikota, warga yang digusur tidak disediakan penampungan dan tanpa ganti rugi, karena sudah diberi peringatan dalam waktu lama. Sebagai gantinya warga diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri ke kantor kelurahan Jelambar dan Tambora, apabila mereka bersedia bertransmigrasi atau mau pulang kampung. Bagi yang mau pulang kampung diberi fasilitas angkutan dengan syarat hanya membawa barang jinjingan maksimal 2 koper. Dalam kenyataannya tidak ada warga yang bersedia transmigrasi dan sekitar 10 kepala keluarga yang bersedia pulang kampung.¹⁴³

Dalam menyikapi penertiban, warga merasa lurah tidak mensosialisasikan adanya penertiban di sepanjang kanal banjir. Untuk itu S. Ukon seorang ketua RT mendaulat lurah Jelambar, A Arnali, karena lurah tidak pernah mengajak musyawarah dalam rencana penertiban. Pak Jenggot (57) minta agar pembongkaran rumahnya ditunda, karena Pak Jenggot merasa tinggal sudah sejak tahun 1960-an, namun secara tiba-tiba tanpa diajak berunding dulu harus pergi. Pak Jenggot merasa bingung kemana harus pindah selain itu juga tidak mempunyai uang. Warga tidak keberatan digusur, namun mereka minta kebijaksanaan dari DPRD DKI dan Gubernur. Warga selama ini merasa sudah dipungut uang 1.000 rupiah yang dilakukan oleh 3 orang yang mengaku dari kelurahan Jelambar. Motifnya mereka mengatasmakan uang zakat infaq dan sadaqoh yang dikaitkan dengan masalah pembongkaran. Selain itu ada petugas Kopro Banjir dan pertamanan yang selalu kasak kusuk dengan masyarakat setempat. Ketiga orang tersebut mengatakan kepada warga bila setiap kepala keluarga menyetor uang Rp 1.000 maka pihaknya dapat berusaha menunda pembongkaran

¹⁴² Sinar Harapan 27 April 1983

¹⁴³ Sinar Harapan; 29 Mei 1983

hingga setelah lebaran. Kenyataannya pembongkaran tetap dilakukan¹⁴⁴. Menanggapi desakan warga ini, Lurah Arnali mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas. Bagi warga yang merasa dipungut oleh oknum kelurahan dipersilakan datang ke kelurahan dengan menunjuk stafnya. Ternyata warga tidak ada yang berani datang ke kelurahan. Praktek pungutan liar mengatasnamakan petugas kelurahan sudah lazim di Jakarta, biasanya mereka membayar kepada petugas secara sembunyi-sembunyi sehingga ketika diminta membuktikan selalu tidak berhasil atau warga merasa takut dengan petugas kelurahan, karena jika mereka berani melaporkan petugas kelurahan, urusan tidak menjadi mudah tetapi mungkin warga akan mengalami kesulitan lainnya, mulai dari masalah sulit urus KTP dan surat-surat lainnya.

Gambar 51: Suasana Penertiban di Daerah Tanah Abang



Sumber: Kompas; 6 Januari 1983

¹⁴⁴ Berita Buana; 25 Mei 1983

Sebagian besar warga yang digusur adalah buruh, sehingga ketika diadakan pembongkaran dilakukan kepala keluarga tidak ada karena sedang bekerja. ...'kasihan dong pak, suami saya belum pulang kerja, anak-anakpun belum pulang sekolah. Kemana nanti anak-anak morat-marit melihat rumah sudah berantakan pinta ibu tersebut.¹⁴⁵

Di Jakarta Timur pengusuran dimulai dari kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Pondok Bambu, Cipinang Muara, Cipinang Melayu dan di sungai Tarum di daerah Bekasi perbatasan dengan Pondok Kelapa. Pemerintah memutuskan jika sampai tanggal 22 Maret penduduk tidak membongkar bangunannya, maka pemerintah akan membongkar secara paksa dan tanpa ganti rugi.¹⁴⁶

Di daerah Duren Sawit, beberapa penghuni bangunan liar di jalan Kali Malang, sejak hari Sabtu dan Minggu sudah ada yang secara sadar membongkar rumahnya sendiri yang memang di bangun di atas tanah negara. Warga yang secara sadar membongkar rumahnya sendiri adalah yang mendapat surat pemberitahuan bahwa akan ada pengusuran, sebagian warga menerima surat pada tanggal 16 April 1983. Sementara itu penghuni lain merasa tidak perlu membongkar sendiri rumahnya, misalnya Tanus Situmorang. Tanus S yang mempunyai 4 anak yang berprofesi sebagai penjual bensin, baru dua tahun tinggal di daerah garapan tersebut. Situmorang sebagai warga RT 02/RW 07 Duren Sawit, karena ia mempunyai KTP di alamat tersebut, sehingga bukan warga liar, untuk itu ia menyerahkan pembongkaran kepada Team Gabungan DKI.¹⁴⁷

Pasar liar di pinggir jalan kali Malang sekitar pasar Ciplak daerah Halim Jakarta Timur yang pada bulan Maret terkena gusuran, pada bulan April sudah mulai penuh lagi oleh pedagang. Kondisi ini telah menimbulkan kasak kusuk karena adanya orang yang 'membacking' para pedagang.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Sinar Harapan; 29 Mei 1983

¹⁴⁶ Sinar Harapan; 21 Maret 1983

¹⁴⁷ Sinar Harapan; 22 Maret 1983

¹⁴⁸ Berita Buana; 23 April 1983

Untuk menghadapi bongkaran rumahnya, penduduk membuat kesepakatan untuk tidak membongkar rumahnya sendiri. Sementara itu petugas memberi peringatan terakhir dalam waktu 24 jam pemilik bangunan harus membongkar sendiri rumahnya. Jika tidak maka petugas gabungan akan membongkar paksa bangunan. Karena tidak ada tanda-tanda mau membongkar petugas gabungan pada tanggal 20 Maret memulai pembongkaran dimulai dari *by pas* menuju arah Bekasi. Sampai hari ketiga pembongkaran sudah mencapai Cipinang Pondok Bambu depan Universitas Borobudur. Dalam menghadapi pembongkaran, penduduk melakukan berbagai cara, salah satunya disebutkan bernama DS, untuk menarik perhatian, mereka mengibarkan bendera merah putih di atap rumahnya. Tetapi petugas tetap membongkar, hal yang unik dilakukan para petugas ketika akan menurunkan bendera. Puluhan petugas diperintahkan untuk berbaris dan seorang kepala barisan menyatakan “hormat bendera sang saka merah putih dan dua orang berjalan tegap maju ke arah bendera lalu menurunkan bendera lengkap dengan tonggakanya. Bendera kemudian dilipat rapi dan dibawa ke kantor walikota.¹⁴⁹

Pembongkaran bangunan liar untuk daerah Jakarta Timur yang jatuh pada hari Sabtu, dimulai dari bangunan liar yang berada di atas tanggul kali Tarum Barat kecamatan Jatinegara. Bangunan-bangunan yang berada di sepanjang jalan Kali Malang sebagian besar untuk warung, toko buah, bengkel dan lain sebagainya. Bangunan yang dibongkar berderet padat sebagian sudah dialiri oleh listrik. Penghuni yang masih berada di dalam rumah dipaksa untuk keluar karena bangunan akan dirubuhkan. Pimpinan Operasi Sumarso berkali-kali melalui pengeras suara menyerukan agar warga tidak melakukan perlawanan terhadap petugas. Selain itu pimpinan pengurusan juga mengingatkan kepada petugas lapangan agar tidak terpancing oleh tindakan-tindakan masyarakat.

Masyarakat selain melakukan perlawanan dengan cara memasang bendera di setiap rumah yang akan dibongkar, beberapa warga yang tidak menerima

¹⁴⁹ Sinar Harapan; 24 Maret 1983

pembongkaran memasang tulisan bapak Kamtib tunggu jawaban Gubernur, perlakuanlah kami dengan nilai P4, insan Golkar. Pak kami bukan membandel, namun keadaanlah yang memaksa disertai simbol pohon beringin; kasihanilah kami Gubernur kemanakah kami berlindung.¹⁵⁰

Pembongkaran melibatkan kepolisian, Jaksa ABRI dan palang merah remaja. Menurut Kepala Humas Pemda DKI Jakarta Drs. Ramona Ginting, setelah rumah-rumah yang berada di sepanjang jalan Kali Malang akan dijadikan jalur hijau dengan berbagai jenis tanaman pelindung.¹⁵¹

Gambar 52: Pengibaran Bendera oleh Warga Agar Rumahnya tidak Digusur



Sumber: Sinar Harapan 28 Maret 1983

Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah Kali Malang, sebetulnya telah mengeluarkan uang untuk membeli tanah. Seperti yang dilakukan oleh 20 kepala keluarga yang menempati tanah milik Dinas Pengairan. M Harianja (48) dengan 9 anaknya sudah menempati lokasi tersebut 3 tahun yang lalu. Kami membeli tanah ini

¹⁵⁰ Sinar Harapan; 25 Maret 1983

¹⁵¹ Antara; 25 Maret 1983

tahun 1980 dengan harga 500.000.¹⁵² Penduduk biasanya membeli tanah kepada petugas dari kelurahan, walaupun bukan petugas kelurahan biasanya pihak kelurahan mengetahui praktek jual beli yang dilakukan. Dengan penggusuran ini warga yang telah membeli tanah merasa tertipu. Seperti yang alami seorang ibu yang membeli dari Rn T. Pemilik tanah pada waktu itu meminta agar tanahnya dibeli karena tanah tersebut masih lama digunakan untuk proyek pengairan. Sambil berkata: “lihat saja itu rumah bagus kalau mau digusur tidak mungkin mereka membangun rumah bagus. Atas rayuan itulah ibu itu membeli tanah tersebut pada bulan Januari 1983”.¹⁵³

Penduduk yang terkena gusuran sebagian besar mencari tempat untuk berteduh dengan menempati rumah kosong yang terletak di Perumnas II dan III Bekasi. Sebanyak 8 kepala keluarga sekitar jam 02.00 malam masuk ke Perumnas II, dan sebagian masuk ke Perumnas III. Menurut keterangan, penduduk penyerobot datang secara bergerombol. Perumnas II yang serobot adalah rumah nomor 305, 307, 306, 045, 042, 083, 176 dan 046. Setelah pihak perumnas mengetahui adanya penyerobotan melaporkan kepada Kores setempat. Pihak Kores ternyata tidak bisa mengusir karena mereka korban gusuran Kali Malang yang belum mendapat tempat baru. Karena kasihan pihak Kores memberi waktu 4 hari tinggal di Perumnas, setelah itu mereka harus pindah.¹⁵⁴ Setelah 4 hari, ternyata penyerobot belum juga pindah, sehingga mereka dipindah secara paksa dan dikembalikan kepada keluarganya. Mereka diantar dengan truk yang disediakan oleh Perumnas dan dikawal secara khusus oleh Pemda Bekasi. Masih ada tiga kepala keluarga yang belum menemukan keluarganya, untuk itu mereka dititipkan pada Dinas Sosial Bulakkapal Bekasi.¹⁵⁵ Mereka tinggal di penampungan hanya beberapa hari, karena setelah itu mereka pergi.

Sampai tanggal 27 Maret 1983, hari ketiga pembongkaran terjadi insiden antara petugas dengan warga. Dikatakan, Simanjutak pada hari Sabtu sedang membantu saudaranya membongkar rumahnya. Setelah roboh Simanjutak dengan

¹⁵² Sinar Harapan; 25 Maret 1983

¹⁵³ Sinar Harapan; 29 Maret 1983

¹⁵⁴ Sinar Harapan; 29 Maret 1983 dan Berita Buana 30 Maret 1983

¹⁵⁵ Sinar Harapan; 7 April 1983

keluarganya akan mengambil sendiri bahan-bahan bangunan seperti kusen, seng agar dapat dipergunakan lagi. Simanjutak minta tolong kepada petugas agar rumah yang sudah roboh jangan dirusak lagi terutama sengnya. Tetapi petugas tidak menghiraukan pemilik bangunan, bahkan makin ganas melubangi seng yang sudah rata dengan tanah hingga bolong-bolong dan tidak dapat dipergunakan lagi. Pemilik rumah jadi penasaran dan terjadi bentrok hingga Simanjutak berlumuran darah dipukul petugas.¹⁵⁶

Hampir bersamaan dengan penggusuran di kali Tarum Barat, jalan inspeksi Tarum Barat dari jembatan pasar Ciplak sampai pertigaan Pondok Bambu sepanjang 2,8 kilometer diperlebar jadi 3,5 meter ke kanan dan kiri jalan. Pelebaran dimulai 12 Pebruari 1983 dan harus selesai 11 Juni 1983 pelebaran ke utara 2,25 meter dan ke selatan (ke sungai) 1,25 meter biaya yang dibutuhkan sesuai kontrak 157,7 juta rupiah.¹⁵⁷

Pembongkaran di sepanjang Saluran Tarum Barat Kali Malang dilakukan dari *by pas* Kalimalang sampai Bekasi. Di Bekasi sendiri dilakukan penggusuran sebanyak 250 rumah dan bangunan. Korban penggusuran di saluran Tarum Barat Kalimalang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah pengontrak. Mereka ini biasanya tinggal di daerah tersebut untuk melangsungkan usahanya. Ini seperti yang dialami oleh T. Marbun yang menyewa di sekitar rumah di daerah Pondok Kelapa dengan sewa kontrak 15.000 sampai dengan 25.000 perbulan. T Marbun seorang tukang tambal ban dengan 4 anak pindah ke perkampungan Pondok Kelapa dengan menyewa 20.000 perbulan kontrakan dengan satu kamar lantai tanah. Marbun baru tinggal 6 bulan di Pondok Kelapa.¹⁵⁸

Kelompok kedua yang tinggal diatas tanah garapan. Contohnya Harianja dengan 7 anak terpaksa bertahan disamping reruntuhan bangunan rumahnya. Lain ceritanya dengan seorang guru SMP yang mempunyai 3 anak dan sudah tinggal di Kali Malang selama 3 tahun, di atas tanah garapan. Ia mulai tinggal di tanah garapan

¹⁵⁶ Sinar Harapan; 28 Maret 1983

¹⁵⁷ Sinar Harapan; 9 Maret 1983

¹⁵⁸ Sinar Harapan; 7 April 1983

tersebut karena setiap bulan dikejar-kejar uang kontrakan. Atas saran temannya ia membeli anah garapan seharga 500.000 rupiah. Rumah dibangun pertama dengan satu kamar, setelah punya uang ditambah dengan satu kamar lagi. Tetapi baru selesai dibangun rumah tersebut dibongkar, menurutnya kerugian yang diderita sekitar 2 juta rupiah. Setelah rumahnya dibongkar, untuk sementara ia menempati rumah kosong di belakang rumahnya. Ketika ditanya mengapa setelah ada pemberitahuan dari petugas tidak membeli rumah. Ia mengatakan bahwa penghasilan seorang guru SMP paling 60 ribuan, tidak cukup. Untuk persiapan kelahiran anaknya saja tidak punya tabungan.¹⁵⁹

Kelompok ketiga adalah orang yang tertipu karena merasa tanah yang dibeli adalah tanah resmi. Dalam kelompok ini mereka mendapat sertifikat dan mempunyai IMB. Hal yang menarik di daerah Bekasi, tanah-tanah yang digusur ada beberapa yang sudah bersertifikat dan mempunyai IMB. Berdasarkan sertifikat, ada sekitar lima sertifikat. Padahal tanah tersebut diklaim sebagai milik Seksi Pengairan. Untuk tanah yang sudah bersertifikat penggusurannya ditangguhkan sampai ada keputusan antara kantor Agraria Bekasi dan pihak Seksi Pengairan. Karena yang mengeluarkan sertifikat adalah Agraria Bekasi.¹⁶⁰

Mengenai banyaknya rumah liar hal ini dapat dilihat dari pertambahan jumlah tenaga kerja yang terus bertambah dan tidak tertampung. Pada tahun 1975 dari 39.188 yang sudah ditempatkan baru 5.588 orang, sedangkan tahun 1976 hanya terserap 3.091 dari 6019 tenaga kerja. Mereka tidak bisa terserap menjadi pegawai karena keterbatasan kemampuan dan ketrampilan sehingga menjadi penganggur.¹⁶¹

Petugas di lapangan karena sudah bertugas beberapa hari mulai tidak sabar. Ketika terjadi pembongkaran tanggal 27 Maret 1983, hari ketiga pembongkaran terjadi insiden antara petugas dengan warga. Seorang warga ditemukan luka dan berdarah.

Dikatakan Simanjutak hari Sabtu sedang membantu saudaranya membongkar rumahnya. Setelah roboh Simanjutak dengan keluarganya akan mengambil sendiri bahan-bahan bangunan seperti kusen, seng agar dapat dipergunakan

¹⁵⁹ Sinar Harapan; 28 Maret 1983

¹⁶⁰ Pelita; 8 April 1983

¹⁶¹ Suara Karya 24 Pebruari 1977

lagi. Simanjuntak minta tolong kepada petugas agar rumah yang sudah roboh jangan dirusak lagi terutama sengnya. Tetapi petugas tidak menghiraukan pemilik bangunan bahkan makin ganas melubangi seng yang sudah rata dengan tanah hingga bolong-bolong dan tidak dapat dipergunakan lagi. Pemilik rumah jadi penasaran dan terjadi bentrok hingga Simanjuntak berlumuran darah dipukul petugas.¹⁶²

Pengusuran di Jakarta tidak hanya murni masalah penanggulangan banjir, tetapi juga ada kaitannya dengan peristiwa politik. Pada bulan Maret 1983 akan diadakan Sidang Umum MPR. Untuk itu diperlukan kondisi tertib di ibukota Jakarta. Pada bulan Oktober 1982, dilakukan penertiban pedagang kaki lima, penutupan lokalisasi wanita tuna susila di Kebun Sayur, Jakarta Pusat dan penertiban permukiman liar di sepanjang sungai daerah Pondok Karya, Kali Malang Manggarai.¹⁶³

Periode 1965 – 1985 dapat dikatakan sebagai tahun-tahun perjuangan untuk mengendalikan banjir di Jakarta oleh Pemerintah. Dengan kerja keras yang telah dilakukan ternyata belum berhasil menghilangkan banjir, bahkan kecenderungan banjir semakin meluas. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan. Misalnya ketika Ali Sadikin menyelesaikan masa tugasnya tahun 1976/1977, maka ada tiga agenda yang belum diselesaikan yaitu masalah perumahan, banjir dan tenaga kerja.

Sampai masa akhir jabatannya, Ali Sadikin dianggap tidak berhasil menyelesaikan tiga masalah besar di Jakarta. Yaitu masalah perumahan, masalah banjir dan serta tenaga kerja. Dalam pidato pengantar RAPBD 1976/1977 tanggal 5 April 1976 bahwa masalah banjir merupakan masalah besar yang dihadapi Jakarta. Dalam banjir 1976 kerugian negara 3,78 milyar dan melanda wilayah 11,390 ha.¹⁶⁴

Selain Ali Sadikin, banjir juga membuat frustrasi para pejabat di Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh Sutami yang merasa tidak yakin mampu menangani banjir secara tuntas, bahkan dia membandingkan dengan negara-negara lain yang maju seperti

¹⁶² Sinar Harapan; 28 Maret 1983

¹⁶³ Merdeka; 22 Oktober 1982

¹⁶⁴ Suara Karya 24 Pebruari 1977

Jepang dan Amerika yang juga kebanjiran. Sementara itu Ali Sadikin tidak mau menipu rakyat Jakarta dengan menjanjikan akan membebaskan rakyat dari banjir.

Ir. Sutami (almarhum) pada tahun 1977 mengungkapkan kita jangan mempunyai ilusi (mimpi) untuk bisa mengatasi banjir di ibukota. Sebab katanya di Jepang, Australia dan Amerika pun masih sering terjadi banjir. Sekalipun biaya Rp 50 milyar tersedia dan pekerjaan sarana pengendalian banjir (periode 25 tahun sekali) diselesaikan untuk sistem makro tetap masih ada banjir. Mungkin yang akan terjadi banjir periode 30 tahun sekali atau lebih...Gubernur Ali Sadikin di tahun yang sama juga pernah mengungkapkan secara realitas saya tidak mau menipu rakyat Jakarta dengan menjanjikan kota ini akan bebas banjir, selama biaya tidak memungkinkan.¹⁶⁵

Dengan mengacu pada dua orang tokoh yang selama ini banyak terlibat dalam penataan kota Jakarta, maka sampai tahun 1985, banjir tetap menjadi pekerjaan yang rumit. Dan ternyata banjir dari tahun ke tahun semakin luas dan semakin tidak terkendali, akhirnya penduduk Jakarta hanya bersikap menunggu datangnya banjir setiap tahun dan hanya melakukan beberapa upaya pencegahan yang tidak besar pengaruhnya terhadap banjir.

Penanggulangan banjir makro (*macro stelsel*) selama 3 pembangunan lima tahun (pelita) biaya yang dikeluarkan mencapai 46 milyar rupiah dengan perincian pelita I, 2 milyar rupiah, Pelita II, 12 milyar rupiah, pelita III, 32 milyar rupiah, bantuan Belanda sebesar 41 juta gulden dan biaya konsultan dari Belanda 2,5 juta gulden. Pekerjaan makro yang sudah diselesaikan adalah Waduk Pluit di Jakarta Utara dikerjakan sejak 1977 selesai tahun 1981 dengan biaya 903 juta rupiah ditambah bantuan Belanda 41 juta gulden. Saluran Cengkareng dengan biaya 13 milyar rupiah. Saluran Cakung di Jakarta Timur dengan biaya 5,6 milyar rupiah. Selain itu untuk meningkatkan daya tampung juga dibuat jalan inspeksi di sisi banjir kanal dan sungai Ciliwung sepanjang 22,4 kilometer dengan mengadakan pengerukan, penurapan dan pembersihan gubug liar dengan biaya 2,5 milyar rupiah. Elektrifikasi dan mekanisasi

¹⁶⁵ Sinar Harapan; 7 April 1984

sejumlah pintu air antara lain Karet, Manggarai, Pekapuran, Kali Item dan Pulo Gadung. Selain itu di muara Pasar Ikan dipasang pintu otomatis yang bisa menutup dan membuka pada saat air pasang dan surut, agar jika pasang air laut tidak membanjiri daerah sekitarnya. Pembuatan saringan sampah yang digerakkan tenaga listrik di pintu air Pekapuran, Waduk Grogol dan Setiabudhi. Pembuatan sodetan Pasar Ikan di Penjaringan yang berfungsi membelokkan aliran kali Kalibesar ke Waduk Pluit. Dengan sodetan Pasar Ikan sehingga air Kali Besar tidak lagi dipengaruhi pasang surutnya air laut tetapi bisa dikendalikan dari Waduk Pluit. Pintu air di Jembatan Dua diganti, pintu air Pulo Gadung yang semula 3 menjadi 4 buah.¹⁶⁶ Jika dilihat dari jumlah dana yang dihabiskan DKI Jakarta masih jauh dengan biaya penanggulangan banjir di Osaka Jepang yang biayanya mencapai 43 milyar Yen pertahun, padahal jumlah penduduknya hampir sama dengan Jakarta yaitu 6 – 7 juta orang. Untuk Jakarta biaya paling besar adalah untuk ganti rugi tanah penduduk.

...tahun 1983 boleh jadi merupakan 'tahun keberhasilan' dari Proyek Pengendali Banjir DKI Jaya. Upaya mereka selama 5 tahun terakhir sejak 1978 telah membuahkan hasil yang maksimal: mengalihkan genangan-genangan air di Jakarta dengan perencanaan yang tepat guna. Proyek2 pengendali banjir yang dibantu oleh kampanye kebersihan sedikit banyak telah berhasil menanggulangi 'bahaya rutin' yang selalu mengancam Jakarta setiap musim penghujan tiba. Tapi berapa biaya yang telah dikeluarkan selama 3 pelita ini? Ir. Martsanto DS, Kepala Proyek Pengendali Banjir DKI Jaya menyebut nilai Rp 46 milyar. Itupun dengan perincian Pelita I Rp 2 milyar, Pelita II Rp 12 milyar, dan Pelita III Rp 32 milyar. Belum lagi bantuan dari luar negeri senilai 41 juta gulden ditambah 2,5 juta gulden untuk teknik konstruksi.¹⁶⁷

Meskipun diliputi perasaan pesimis terhadap hasil yang akan dicapai dalam penanggulangan banjir di Jakarta sesuai rencana induk 1965 – 1985 tetapi secara umum antara tahun 1970 – 1985 merupakan tahun keberhasilan dalam pembangunan sarana fisik di Jakarta. Masalah pembebasan tanah yang rumit, sebagian besar berhasil dilaksanakan.

¹⁶⁶ Sinar Harapan; 9 April 1984.

¹⁶⁷ Sinar Harapan; 8 Januari 1984

Martsanto mengatakan bahwa tidak yakin akan selesai masalah banjir bersamaan dengan masa masterplan DKI 1965 – 1985. Masalah kenaikan jumlah penduduk sangat mempengaruhi lambatnya penanganan soal banjir. Kalau dana cukup sesuai dengan perkiraan 1973, banjir di Jakarta akan tertangani selama 20 -25 tahun. Tetapi jumlah penduduk yang melampaui target. Meskipun dana dari pemerintah cukup besar tetapi jumlah pos pengeluaran paling besar adalah masalah ganti rugi. Tahun 1983 untuk dana ganti rugi tanah penduduk mencapai 5 milyar dari 8 milyar dana yang disediakan.¹⁶⁸

Sebagai jawaban atas ketidakmampuan dalam menangani banjir, Martsanto sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan banjir mengatakan bahwa dirinya tidak yakin akan mampu menyelesaikan masalah banjir bersamaan dengan rencana induk DKI 1965 – 1985. Hal yang paling berat adalah masalah kenaikan jumlah penduduk. Selama ini meskipun dana dari pemerintah cukup besar tetapi jumlah pos pengeluaran paling besar adalah masalah ganti rugi tanah. Tahun 1983, khusus untuk dana ganti rugi tanah penduduk mencapai 5 milyar rupiah dari 8 milyar rupiah dana yang disediakan.¹⁶⁹

Tabel 38: Perbandingan Pembiayaan Proyek Makro dan Mikro

| No | Proyek Makro | Proyek Mikro | Biaya |
|----|-----------------------------------|--|----------------|
| 1 | Pembangunan Waduk Pluit | | 903.000.000 |
| 2 | Bantuan Belanda Untuk waduk Pluit | | F 41.000.000 |
| 3 | Saluran Cengkareng | | 13.000.000.000 |
| 4 | Saluran Cakung | | 5.600.000.000 |
| 5 | | Pengerukan, penurapan dan penggusuran kanal banjir Kali Malang | 2.500.000.000 |

Sumber: *Diolah dari Koran-koran 1983*

¹⁶⁸ Kompas; 15 November 1983

¹⁶⁹ Kompas; 15 November 1983

Jumlah itu masih sangat jauh dengan rencana tahun 1973 yang memerlukan dana sebesar 450 milyar rupiah baik untuk proyek makro maupun mikro. Proyek-proyek tersebut terbagi dalam proyek pelita I sampai III yaitu pembangunan saluran pembuangan sepanjang 365.075 meter, saluran penghubung (kali kecil) 283.519 meter dan riol (got) 2.230.311 meter. Sampai pelita III baru 46 milyar rupiah untuk makro. Padahal target pembiayaan penanggulangan banjir tahun 1973 sebesar 450 milyar, dengan perincian biaya pekerjaan makro seperti pembuatan dua banjir kanal (barat dan timur), waduk-waduk, rumah-rumah pompa sebesar 207,5 milyar rupiah dan pekerjaan mikro seperti drainase dan sanitasi/riolering diperkirakan mencapai 242 milyar rupiah.¹⁷⁰ Jika mengacu pada perencanaan tersebut, menurut perhitungan baru 5 – 8 tahun lagi Jakarta akan terbebas dari banjir jika dapat dikerjakan pada Pelita IV.¹⁷¹

**Tabel 39: Rencana Induk dan Target yang Dicapai Dalam Pelita I, II, dan III
Proyek Pengendalian Banjir Jaya**

| Uraian Pekerjaan | Rencana Induk 1965 – 1985 | Realisasi Pelita I 1969 – 1974 | Realisasi Pelita II 1974 - 1979 | Realisasi Pelita III 1979 – 1984 |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Waduk: | | | | |
| a. Perawatan | 3 buah | - | 3 buah | 8 buah |
| b. Baru | 7 buah | 2 buah | - | - |
| Sungai: | | | | |
| a. Perawatan | 107 km | 17 km | 19 km | 140 km |
| b. Baru | 202 km | 15 km | 4 km | 22 km |
| Gedung Pompa | | | | |
| a. Perawatan | 2 buah | - | - | - |
| b. Baru | 9 buah | 2 buah | 2 buah | - |
| Bangunan Air | | | | |
| a. Perawatan | 9 buah | - | - | - |
| b. Baru | 68 buah | 7 buah | 5 buah | 20 buah |
| Prasarana | | | | |
| a. Jln. Inspeksi | 110 km | 2 km | 17 km | 30 km |
| b. Jembatan: | | | | |
| Perawatan | 2 buah | - | - | - |
| Baru | 29 buah | 3 buah | 4 buah | 10 buah |
| c. Base Camp: | | | | |

¹⁷⁰ Sinar Harapan; 9 April 1984

¹⁷¹ Sinar Harapan; 7 April 1983

| | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| Perawatan Baru | 2 buah 10 buah | - 3 buah | - 2 buah | - - |
| Pembebasan Tanah | 1.680 ha | 105 ha | 120 ha | 270 ha |
| Jumlah Biaya | 80.000.000.000 | 2.645.000.000 | 11.049.000.000 | 45.815.000.000 |

Sumber: *Laporan Sektor Banjir Drainase dan Irigasi*

Dari Rencana Induk 1965 – 1985, sisa pekerjaan yang belum bisa direalisasikan akan dikerjakan dalam Pelita IV dan V diantaranya 5 buah waduk baru, normalisasi sungai sepanjang 161 kilometer, 5 buah unit gedung pompa, 36 buah bangunan air, 72 kilometer jalan inspeksi, 12 buah jembatan, 5 buah unit base camp dan pembebasan tanah seluas 1.185. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pengendalian banjir tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Bahkan jika dilihat dari rencana dan realisasi ternyata hasil sekitar 60 persen saja yang direalisasikan. Meskipun sisa proyek akan direalisasikan pada Pelita selanjutnya, tentu sudah sangat ketinggalan mengingat perkembangan penduduk dan kota pasti sudah melampaui target yang ditetapkan. Apalagi masalah pembebasan tanah masih merupakan pekerjaan yang sangat berat terbukti dari rencana pembebasan tanah seluas 1.680 hektar, masih menyisakan 1.185 hektar yang belum dibebaskan.

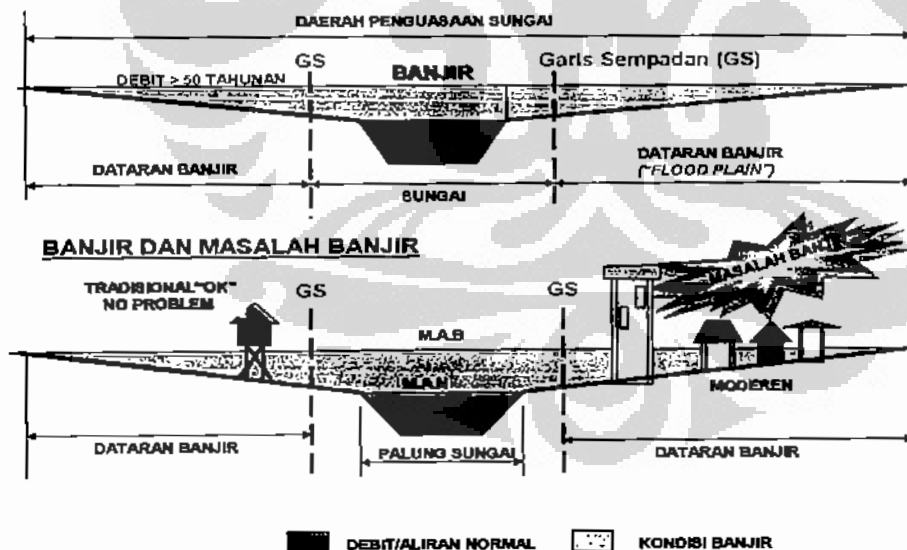
Dengan melihat perbandingan antara rencana dan hasil yang dicapai, menunjukkan bahwa pemerintah masih kesulitan menyelesaikan proyek-proyek yang direncanakan. Alasan utama kegagalan ini adalah masalah dana yang terbatas. Padahal jika proyek yang direncanakan ditunda-tunda pelaksanaannya, tentu tantangannya sudah berubah sehingga perlu direncanakan cara-cara baru, karena jumlah penduduk sudah bertambah, sedimentasi akibat aliran air dari hulu bertambah dan masalah sosial lainnya seperti bertambahnya bangunan yang menutup wilayah kedap air.

Jika mengamati cara-cara yang dilakukan pemerintah pada periode 1965-1985-an upaya untuk pengendalian banjir dilakukan dengan mencari akar penyebab banjir yaitu karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ternyata upaya itu tidak berhasil. Untuk itu perkembangan mutakhir untuk mengatasi banjir dilakukan dengan

mengatasi akar permasalahan dengan dua cara yaitu yang berkaitan dengan kondisi alam ditujukan untuk memperbesar kapasitas alur sungai dan mempercepat aliran sungai yang pada umumnya dilakukan dengan cara *structural measures* atau rekayasa teknis. Seperti pembangunan waduk, tanggul, perbaikan alur sungai, sodetan, rehabilitasi situ dan perbaikan muara. Sedangkan dalam kaitannya dengan kegiatan manusia yang disebut sebagai *non-structural measures*. Termasuk didalamnya adalah penentuan peil banjir sistem pemberitahuan awal banjir, program evakuasi, pengaturan *land use*, pemindahan penduduk dari bantaran sungai dan pemeliharaan sungai¹⁷².

Untuk keberhasilan pengendalian banjir dengan mengandalkan dua cara struktural dan non struktural ini saja tidak cukup. Untuk itu diperlukan cara lain yaitu kompromi dari dua cara ini yaitu dengan mengadakan pembangunan permukiman dengan sistem bangunan yang bersahabat dengan kondisi alam di Jakarta yaitu sistem panggung. Seperti terlihat dari gambar berikut ini.

Gambar 53: Daerah Penguasaan Sungai dan Model Bangunannya



Sumber Siswoko, 2002

¹⁷² Ir. Siswoko, Dipl. HE; Banjir, Masalah Banjir dan Cara Mengatasinya; *Makalah*; Jakarta, 2 April 2002; lihat juga Rudy P. Tambunan; *op. cit.*, hal. 59

Bab VII **Kesimpulan**

Dataran rendah Jakarta merupakan dataran pantai yang sangat datar bahkan sekitar 40% dari wilayah datarannya lebih rendah dari muka laut yang sebagian besar berbentuk rawa pantai. Dataran ini terjadi sebagai hasil proses geomorfologi dari endapan sungai yang berasal dari gunung-gunung api di sebelah selatannya yang berlangsung ribuan tahun. Sungai-sungai yang mengalirkan curah hujan turun melalui lereng-lereng gunung mengikis tanah dari lereng gunung dan mengendapkannya di laut dan berangsur-angsur memperlebar dataran baru di kaki-kaki gunung. Untuk itu, aliran sungai mempunyai peranan besar dalam pembentukan lahan di kota-kota pantai seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya.

Proses percepatan pembentukan lahan juga dipengaruhi oleh iklim yang meliputi perbandingan antara arah angin, kekuatan angin, lamanya angin bertiup dan kekuatan arus sungai. Kekuatan iklim mempengaruhi proses abrasi dan akresi di pantai. Proses sedimentasi lahan yang berlangsung dalam waktu ribuan tahun sehingga terbentuklah dataran lebar yang disebut dataran endapan (dataran aluvial) dengan ketinggian kurang dari tujuh meter dari permukaan laut. Ketinggian tanah semakin ke selatan semakin tinggi, hal ini ditandai dengan adanya tanggul-tanggul sungai yang membujur arah barat timur yang dapat ditelusuri dari toponim seperti Tanah Abang Bukit, Bukit Duri dan lain sebagainya.

Pembentukan lahan di sepanjang pantai yang berasal dari proses sedimentasi mengalami perkembangan lebih cepat sejak Gunung Salak meletus pada tahun 1699. Setiap tahun wilayah baru yang terbentuk dari proses sedimentasi mencapai 15 meter sampai 50 meter.

Proses pembentukan lahan di daerah pantai terkait dengan banjir yang terjadi di suatu kawasan. Besar kecilnya banjir ditentukan oleh curah hujan, waktu hujan dan sebaran. Untuk itu ketika tanah sudah mulai jenuh dengan air hujan maka

kemungkinan menjadi aliran permukaan yang berakibat banjir semakin besar. Hal ini sangat berkaitan dengan iklim. Hujan yang jatuh pada bulan Desember sampai Pebruari lebih besar kemungkinannya menjadi banjir karena tanah sudah jenuh dengan air hujan. Banjir akan menjadi masalah ketika dampaknya buruknya dirasakan oleh penduduk yang menempati suatu kawasan.

Pemanfaatan ruang kota dengan melakukan pembangunan fisik diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk dapat mempengaruhi periode ulang dan perluasan wilayah yang dilanda banjir. Jakarta pada tahun 1883 jumlah penduduknya hanya 110.669 jiwa dengan luas kota sekitar 8 kilometer persegi, pada tahun 1930 luas kota 182 kilometer persegi, jumlah penduduk meningkat menjadi 409.475 jiwa. Pada tahun 1970 wilayah Jakarta mengalami perluasan karena penggabungan dengan daerah di sekitarnya sehingga luasnya 590 kilometer persegi, dengan luas tersebut penduduk Jakarta mencapai 4.473.133 jiwa, sampai tahun 1985 meskipun terjadi perluasan wilayah menjadi 675 kilometer persegi penduduk Jakarta meningkat menjadi 6.164.848 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang cepat, mengakibatkan peningkatan pembangunan kawasan permukiman, perdagangan dan industri semakin cepat pula. Tanah-tanah yang secara topografis tergolong sebagai tidak cocok (*unavailable land*) untuk kawasan terbangun dan ditetapkan sebagai kawasan tanah basah (*wet land*) yang kegunaannya untuk penampungan air sementara pada waktu banjir, sejak tahun 1960-an dibangun untuk berbagai keperluan kota. Bahkan daerah-daerah yang termasuk wilayah satuan Geologi lingkungan 1, 2, dan 3 yang meliputi daerah Marunda, Cilincing, Ancol, Pluit, Cengkareng, dan Tanjung Priok dijadikan tempat permukiman, perindustrian dan jasa perdagangan.

Daerah aliran sungai yang merupakan daerah parkir air (*retention basin*) pada waktu banjir, setelah pembangunan Gelora Senayan tahun 1960-an mulai ditempati, seperti Kawasan Tebet yang merupakan daerah luapan banjir (*flood plain area*) Ciliwung, Kawasan Mampang yang merupakan *flood plain area* Sungai

Krukut dan Pluis (Kebayoran Lama) yang merupakan *flood plain area* Sungai Grogol. Pada masa kolonial *flood plain area* ditetapkan sebagai *retention basin* dinyatakan sebagai daerah pertanian dan kawasan hijau, sehingga pemanfaatan tanah untuk kawasan terbangun hanya diperbolehkan 5 % dari luas tanah yang ada.

Dampak pembangunan fisik kota mengakibatkan daerah kedap air semakin luas sehingga curah hujan yang jatuh tidak bisa diserap ke dalam tanah dan menjadi aliran permukaan (*run off*). Semakin luas daerah kedap air maka semakin luas wilayah yang dilanda banjir. Perkembangan fisik kota yang cepat dengan curah hujan yang konstan setiap bulannya maka sarana drainase Jakarta tidak mampu menampung hujan lokal dan pembuangan air dari permukiman dan kantor-kantor. Selain itu akumulasi dari faktor-faktor penyebab banjir seperti permukiman di bantaran sungai dan kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat telah mempercepat proses sedimentasi dan pendangkalan sungai.

Pada periode 1892 sampai 1950, peristiwa banjir yang terjadi di Jakarta dalam rentang waktu 5 – 10 tahunan. Pada periode 1950 – 1970, banjir terjadi dalam rentang waktu tiga - lima tahunan. Setelah itu antara 1970-an sampai 1985 kecenderungan banjir yang melanda Jakarta semakin pendek, antara satu sampai dua tahun. Sementara itu berdasarkan luas wilayah yang dilanda banjir terjadi pergeseran dan perluasan. Pada 1892 sampai 1932 daerah paling parah dilanda banjir adalah daerah sekitar Glodok, Weltevreden sampai Senen. Setelah dibangun pintu air Matraman dan kanal banjir Kali Malang (1919) banjir yang melanda daerah Weltevreden berkurang tetapi daerah Tanah Abang, Pejambon, Kemayoran, daerah sekitar Kampung Melayu, daerah sekitar Manggarai, Bukit Duri menjadi daerah langganan banjir karena efek dari pintu air Matraman. Di wilayah barat, banjir yang terjadi tidak banyak berubah. Daerah aliran Mookervart, Sungai Grogol, Sungai Krukut dan Sungai Angke masih tetap menjadi langganan banjir. Wilayah banjir mengalami perluasan ke wilayah barat sejak tahun 1960-an ketika daerah Grogol dilanda banjir besar. Sejak tahun 1960-an, intensitas banjir dan

perluasan wilayah yang dilanda banjir mengalami peningkatan. Bahkan pada periode 1970 sampai 1985 banjir telah mengepung wilayah Jakarta, daerah selatan seperti Pondok Pinang, Ciputat, Tulodong Bawah, Bintaro, Pasar Minggu, Kemanggisan, Slipi, Tomang Barat dan lain-lain dilanda banjir.

Dalam kondisi banjir, respon masyarakat Jakarta dapat dikelompokkan: Pertama adalah masyarakat yang terkena musibah banjir. Mereka biasanya direpotkan untuk mencari tempat pengungsian sementara. Mereka ini biasanya tinggal di daerah bantaran sungai atau daerah yang lebih rendah sehingga aktifitas mencari pengungsian dianggap sebagai rutinitas tahunan, “banjir datang mengungsi, setelah surut kembali lagi”. Kedua; adalah masyarakat yang tidak terkena banjir tetapi mempunyai kepedulian terhadap warga yang terkena banjir seperti dilakukan oleh para dermawan yang memberikan bantuan makanan dan obat-obatan kepada penduduk sekitarnya, seperti yang terjadi pada tahun 1918. Sikap kedermawanan ini terus berlangsung dan setiap terjadi banjir, hal ini selalu dilakukan untuk meringankan warga yang terkena musibah. Ketiga; adalah masyarakat yang tidak terkena banjir. Mereka ini tetap menjalankan aktifitas seperti biasa dengan tidak peduli dengan keadaan lingkungannya. Bahkan mereka biasanya memanfaatkan keadaan ini untuk mencari penghasilan tambahan dengan menyewakan jasa mendorong mobil di jalanan atau menarik becak.

Selain masyarakat yang secara spontanitas melakukan reaksi pada waktu musibah datang, maka Pemerintah yang berada dalam struktur yang lebih kuat juga melakukan aktifitas untuk menolong masyarakat dengan mendirikan pos-pos pengungsian dan memberi bantuan. Dalam rangka mengendalikan banjir yang dilakukan pemerintah cenderung mengulang-ulang di antaranya diskusi dan penyusunan perencanaan pengendalian banjir.

Jika masalah banjir yang mengancam Jakarta tidak bisa ditangani secara tuntas maka apabila terjadi siklus 200 tahunan, ada kemungkinan kota akan ditinggalkan penduduknya. Pada tahun 1830 ibukota Hindia Belanda berpindah

dari kota lama Batavia ke Weltevreden mencari tempat yang lebih nyaman karena pada periode 1770 – 1830 telah terjadi kerusakan lingkungan di pusat kota lama Batavia. Jadi pusat kota lama Batavia berusia sekitar 2 abad (1629 – 1830-an). Hal ini mulai terlihat dari kecenderungan penduduk yang memilih tempat tinggal di daerah yang bebas banjir dan ke arah selatan yang lebih tinggi.

Upaya pemerintah dalam mengendalikan banjir selama satu abad dapat dikelompokkan dalam 2 periode yaitu pada masa kolonial dan masa kemerdekaan. Pada masa kolonial puncak pengendalian banjir di Jakarta adalah periode 1913 – 1930. Hasil dari periode ini adalah kanal banjir Kali Malang, pintu air Matraman, Pintu air Karet dan perbaikan drainase di perkampungan. Kelebihan dari periode kolonial, lebih bersifat preventif. Ketika kotapraja memutuskan membangun Menteng dan Gondang Dia, untuk menanggulangi banjir, pemerintah membangun kanal Kali Malang beserta sistem pengairannya. Selain itu antara perencanaan dan pelaksanaan proyek tidak berlarut-larut, misalnya kanal banjir Kali Malang setelah dilakukan penelitian pada tahun 1911, proyek dilaksanakan pada tahun 1913 - 1919, sehingga lahan yang disiapkan belum banyak berubah.

Kelemahan pengendalian banjir pada masa kolonial adalah dana yang terbatas, sehingga tidak mampu menyelesaikan seluruh rencana yang sudah ditetapkan. Anggaran kotapraja pada tahun 1910 – 1915 sebesar f 1.250.795, sedangkan untuk pembangunan kanal dan pintu air selama tahun 1913-1915 menghabiskan dana f 1.140.351. Berdasarkan angka ini maka terlihat bahwa untuk pengendalian banjir di kotapraja tidak bisa hanya mengandalkan anggaran kotapraja, sehingga kotapraja harus mencari bantuan ke pemerintah provinsi West Java. Dalam proses pengajuan dan penurunan dana membutuhkan waktu yang lama karena melalui penilaian dari berbagai instansi.

Tahap kedua pengendalian banjir di Jakarta adalah periode tahun 1965 sampai 1985-an yang berhasil membangun waduk di dalam kota, pembangunan saluran baru seperti Cengkareng drain, Cakung drain dan perbaikan saluran dan

kanal. PBJR juga berhasil mengadakan kerjasama dengan beberapa konsultan luar negeri seperti Nedeco Belanda, SOGREAH Perancis dan JICA Jepang. Kerjasama dengan Nedeco berhasil menyusun Master Plan 1973. Inti dari rencana induk 1973 adalah sistem tapal kuda, yaitu air dari arah hulu ditangkap oleh kanal yang melingkar setengah lingkaran di luar kota. Untuk itu perlu dibuat kanal banjir barat dan kanal banjir timur. Kanal banjir barat sebenarnya sudah digagas oleh van Breen tahun 1923. Jadi kalau dibuat pada tahun 1973 sudah ketinggalan 50 tahun. Kanal banjir barat tidak berhasil dibangun karena terbentur masalah dana dan rumitnya masalah sosial. Sementara itu kanal banjir timur baru diawali sekitar tahun 2006 jadi sekitar 30 tahun kemudian baru dapat direalisasikan. Sementara SOGREAH Perancis dalam perencanaannya menyarankan untuk normalisasi waduk dan situ yang ada di daerah aliran sungai yang masuk Jakarta. Sebelumnya dalam Pelita IV Pemerintah sudah merencanakan pembangunan waduk Depok tetapi tidak terwujud.

Kelemahan pengendalian banjir 1965 – 1985 adalah masalah dana yang terbatas, sehingga hal-hal yang sudah direncanakan harus ditunda. Berdasarkan rencana tahun 1965 – 1985 untuk pengendalian banjir Jakarta dibutuhkan dana 80 milyar rupiah tetapi sampai tahun 1984 hanya tersedia dana 59,3 milyar rupiah. Beberapa proyek pengairan banyak yang tidak berhasil dibangun misalnya pembebasan tanah menurut rencana 1.680 hektar yang berhasil di bebaskan hanya 495 hektar; waduk dari rencana 7 buah berhasil dibangun 2 buah; gedung pompa dari 9 buah hanya berhasil 4 buah. Masalah pembebasan tanah rupanya masih menjadi permasalahan rumit dan rawan konflik sehingga banyak pembebasan tanah yang tertunda.

Secara struktural pelaksanaan pengendalian banjir dari dua periode tersebut terjadi perbedaan. Pada masa kolonial masalah pembangunan sarana pengairan, dari perencanaan sampai pelaksanaan proyek dikerjakan oleh kotapraja dengan bantuan dana dari propinsi.

Pada masa pemerintah Indonesia, pelaksanaan proyek banjir ditangani oleh suatu badan tersendiri, karena dianggap sebagai pekerjaan vital. Sejak tahun 1965 dibentuk Kopro Banjir kemudian diubah menjadi PBJR tahun 1972. Instansi ini secara struktural berada dibawah koordinasi Departemen Pekerjaan Umum, sehingga proyeknya berada di pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah Jakarta tidak mempunyai wewenang untuk menangani proyek-proyek makro. Pemerintah daerah Jakarta disertai proyek-proyek mikro seperti penggusuran warga dan pengerukan sedimentasi. Hal ini diperkuat dengan kesepakatan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Daerah Jakarta pada tahun 1994 tentang Pengendalian Banjir dan Drainase Wilayah DKI Jakarta. Meskipun pemerintah telah membentuk badan khusus yang menangani banjir, setelah berjalan 20 tahun (1965 – 1985) ternyata badan ini gagal mengendalikan banjir di Jakarta.

Selama hampir satu abad untuk mengendalikan banjir ada dua cara yang ditempuh yaitu sistem makro (*structural measures*) dan sistem mikro (*non structural measures*). Dalam sistem makro ada dua hal yang cenderung dipilih yaitu pembangunan kanal dan sistem *polder* (tanah rendah untuk menampung air) dan waduk penampungan. Setelah berlangsung beberapa tahun ternyata sistem kanal, *polder* dan waduk tidak mampu membebaskan Jakarta dari banjir. Terbukti ketika kanal banjir Kali Malang dan pintu air Manggarai selesai dibangun pada tahun 1919, daerah Weltevreden masih dilanda banjir. Bahkan pembangunan pintu air Matraman telah mengakibatkan banjir rutin di daerah sekitar Bukit Duri, Tebet dan Kampung Melayu. Selain itu pada tahun 1980-an ketika pembangunan Cengkareng drain, Cakung drain dan saluran-saluran lainnya selesai, ternyata tidak mampu membebaskan banjir di Jakarta.

Sistem kanal gagal karena topografi Jakarta yang datar sehingga air tidak bisa mengalir secara gravitasi. Sedimentasi lumpur dan sampah juga menyebabkan aliran air tidak lancar. Pengendalian banjir dengan pembangunan kanal atau saluran

hanya mampu mengurangi beban banjir sesaat. Namun apabila ada energi baru yaitu curah hujan yang lebih tinggi dengan periode ulang lebih lama, maka bahaya dan kerugian akan lebih besar karena kapasitas tampung air akan terlewati, sementara itu daerah sekitar sudah berubah menjadi kawasan terbangun, sehingga banjir akan masuk ke wilayah-wilayah di sekitarnya.

Dalam kaitannya dengan sistem *polder*, daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah *polder* ternyata sudah penuh dengan permukiman penduduk, sehingga ketika terjadi banjir, air tidak bisa mengalir ke daerah *polder*. Selain itu waduk-waduk dengan pembuangan sistem pompa sering mengalami gangguan akibat sampah yang menumpuk di pintu-pintu air.

Mencermati kegagalan demi kegagalan dalam pengendalian banjir maka upaya pengendalian banjir yang dilakukan pemerintah harus dilakukan lebih konseptual dengan mengatasi akar penyebabnya yaitu menurunnya infiltrasi air ke dalam tanah yang mengakibatkan meningkatnya aliran permukaan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan. Penggunaan lahan yang paling besar kontribusinya terhadap banjir adalah permukiman dan pertanian. Di daerah permukiman 'penurunan koefisien limpasan' atau mengurangi air hujan yang menjadi aliran permukaan (*run off*) dilakukan dengan membuat pedoman pembangunan rumah dan menerapkannya agar air hujan di setiap rumah dan bangunan tidak dialirkan ke saluran tetapi diserap ke dalam tanah atau ke dalam sumur resapan. Teknik ini akan meringankan beban menekan tingginya debit air di sungai serta menyediakan air tanah pada musim kemarau. Hal ini juga akan menahan penurunan tanah di Jakarta yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Pengendalian banjir dengan pendekatan struktural dan non struktural ternyata tidak cukup. Untuk itu harus ada kompromi dari dua pendekatan ini. Berdasarkan tradisi lisan masyarakat Betawi sebelum mengenal bangunan rumah batu, karena sebagian besar tanahnya masih berupa rawa dan hutan, masyarakatnya

membangun rumah panggung untuk menghindari serbuan binatang buas dan banjir. Untuk itu di daerah bantaran sungai, bangunan rumah panggung atau bangunan amphi dapat menjadi pilihan untuk mengurangi jumlah korban pada waktu banjir.

Dalam penulisan ini saya mencoba menggunakan pendekatan Fernand Braudel yang mengembangkan tiga kerangka waktu bersusun tiga yaitu *histoire structurelle*, *histoire conjuncturelle* dan *histoire evenementielle*. Dari ketiga kerangka waktu tersebut menurut Fernand Braudel, *histoire structurelle* yang menyangkut faktor-faktor geografi perubahannya sangat lambat. Ternyata peranan kota Jakarta sebagai kota besar sejak jaman kolonial dan migrasi penduduk yang berlangsung di tanah datar Jakarta berimplikasi terhadap pemanfaatan lahan. Kota telah berkembang secara acak dan berlangsung kesegala arah. Untuk mendapatkan lahan untuk permukiman, perdagangan, industri maka pembangunan kota dilakukan dengan mengubah elevasi topografi dengan cara pengurugan. Pengurugan yang dilakukan dengan mekanis yang berlangsung dari tahun ke tahun tanpa disadari telah mengubah morfologi rawa dan situ (*submerged land*) yang selama ini berfungsi sebagai parkir air (*retarding*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa campur tangan manusia terhadap alam dengan menggunakan peralatan mekanis mampu mengubah bentang alam dalam waktu singkat. Perubahan bentang alam oleh manusia yang bertentangan dengan kaidah-kaidah lingkungan antara lain tutupan tanah (*land cover*), pola aliran sungai, pada waktunya akan membawa bencana terhadap kawasan. Perubahan secara mekanis juga berlangsung di wilayah lain yaitu di Bogor, Depok, dan Puncak.

Mengacu pada penelitian Fernand Braudel di Laut Tengah pada abad 17 yang mengatakan bahwa faktor geografi berubahnya sangat lambat bahkan bisa mencapai ribuan tahun, ternyata untuk kawasan perkotaan hal itu tidak sepenuhnya cocok. Hal ini dapat dilihat dalam pembangunan Kebayoran, Senayan, Pluit, Ancol, dan kawasan perumahan baru di Jakarta, yang dengan cepat mengubah topografi dan geomorfologi kota. Selain itu pengambilan air tanah dengan alat mekanis juga

mempercepat perubahan topografi kota, karena Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah yang semakin cepat.

Dalam kaitannya dengan tujuan penulisan yaitu mengembangkan *eco history* atau *enviromental history* maka mengacu pada pemikiran Peter Boomgaard bahwa sejarah lingkungan adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, di mana manusia mempengaruhi lingkungan atau sebaliknya. Penggerak utama dalam perubahan ini adalah manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan air untuk melangsungkan hidupnya. Untuk itu manusia harus bersahabat dengan alam termasuk didalamnya adalah air. Hubungan manusia dengan air akan berubah ketika air mengancam kehidupannya. Di darat ancaman dari air diantaranya adalah banjir. Banjir adalah fenomena alam biasa yang terjadi ketika badan sungai tidak mampu menampung air sehingga melimpas ke kanan kiri sungai. Tetapi ketika banjir yang terjadi di suatu kawasan mengakibatkan kerugian baik material dan kerugian jiwa maka manusia berusaha melawan atau melakukan adaptasi terhadap keadaan tersebut. Dalam batas-batas tertentu manusia berusaha mengadaptasi lingkungan sehingga perilaku hidupnya menyesuaikan dengan lingkungan alamnya. Ketika alam bisa ditundukkan maka manusia berusaha mengendalikan dan mengeksploitasi alam. Pembangunan fisik kota yang cenderung mengeksploitasi alam dengan menggunakan peralatan mekanis mengakibatkan berubahnya lingkungan alam seperti topografi dan geomorfologi secara cepat. Sebagai sumbangan terhadap sejarah lingkungan maka penulisan ini berusaha merekonstruksi hubungan timbal balik antara manusia dengan alam yaitu fenomena banjir di Jakarta.

Daftar Pustaka

I. Naskah Arsip

ANRI

- Algemeene Gemeenteblad; 20 Pebruari 1909
 Algemeene Secretarie; AG 26146; tanggal 17 Agustus 1929
 Besluit 21 Oktober 1913; No. 44
 Besluit 22 Agustus 1913, No. 9
 Besluit tanggal 8 Januari 1936, No. 20
 Besluit tanggal 9 Agustus 1901; No. 22
 Besluit van den Dir. Der BOW van 17 October 1922, No. 31270 E
 Besluit van den Directeur der BOW, van 24 Mei 1916 No. 9158/E.
 Besluit van Nederlandsch Indie; 13 April 1911, No. 8
 Besluit, Nomor: 16, Tanggal 2 Nopember 1928
 Besluit; 1 Nopember 1915, No. 1
 Besluit; 10 September 1910; No. 9
 Besluit; 20 Maret 1913 No. 15
 Besluit; 6 September 1913, No. 22
 Besluit; No. 20, Tanggal 22 Juni 1935
 Bijblad Nomor 9639, 3 Desember 1920.
 Bijlagen 4, Gemeente Batavia; No. 794/66 tanggal 1 Pebruari 1913
 BOW; 23 Januari 1912, No. 1201/D
 Brief Gouvernements Secretaris, Nomor: 1334/B, 2 Januari 1931, dalam Bundel BGS
 2 Juni 1931 nomor 1334/B
 Brief Gouvernements Secretaris, tanggal 29 Juni 1918, No. 1693/III B, agenda
 19766/'18
 BT, 21 Oktober 1913, Nomor 44.
 Burgelijke der Werken; tanggal 31 Juli 1901, Nomor 3
 Burgelijke Openbare Werken tanggal 26 Oktober 1915; No. 1/E
 Burgelijke van Openbare Werken; tanggal 14 Maret 1901, No. 4
 Burgelijke van Openbare Werken; tanggal 10 April 1911, No. 1
 De Gouverneur West Java; tanggal 16 April 1938; No. 0 35/2/2 dalam TZG AG
 26617/39
 Departement der Burgelijke Openbare Werken Bijlagen 40.w.o 32 Tickeningen;
 tanggal 8 October 1913 No. 3
 Departement Der Burgelijke Openbare Werken tanggal 12 Nopember 1919; No. 2/C

Departement Der Burgelijke Openbare Werken tanggal 22 Juni 1918; No. 11347/E
 Departement der Burgelijke Openbare Werken tanggal 23 Oktober 1928, No. G 10/3/1
 Departement der Burgelijke Openbare Werken tanggal 26 Nopember 1930, No. G
 12/1/2
 Departement van Binnelandsch Bestuur tanggal 8 November 1939; No. Dec 81/1/19.-
 Bijlagen Zeven
 Department van Verkeer en Waterstaat; tanggal 31 Oktober 1931 No. WT 1/21/4.-
 RV 2498; 27 Jan 1911, dalam Indeks Folio No. 111, tahun 1911.
 Staatsblad van NI tahun 1916 No. 506
 Staatsblad van NI 1917 tahun No. 587
 Staatsblad van NI tahun 1922 No. 216
 Staatsblad van NI tahun 1922 No. 366
 Staatsblad van NI tahun 1925 No. 674
 Staatsblad van NI tahun 1926 No. 367
 Staatsblad van NI tahun 1934 No. 687
 Staatsblad van NI tahun 1870, Nomor 118.
 Staatsblad van NI tahun 1918; Nomor 287.
 Staatsblad van NI tahun No. 31; Bijblad No. 5176, 19 Pebruari 1896
 Staatsblad van NI tahun No. 8, Bijlagen Nomor 5081; 10 September 1895
 Staatsblad van Nederlandse Indie tahun 1903, No. 329
 Staatsblad van Nederlandse Indie tahun 1905, No. 204
 Staatsblad van Nederlandsch Indie 1919; No. 2
 Staatsblad van Nederlandsch Indie 1933; No. 509
 MGS/BGS, 12 Pebruari 1912, Nomor 31

Arsip Departemen Pekerjaan Umum

A Brief Description on The Problems of Flood Control in Jakarta: Cakung Drain; Directorate General of Water Resources Development, tanpa tahun

Appendix II; Estimated Project Cost; dalam Indonesia Preparations for The Execution of The Western Banjir Canal Extension in Jakarta; Report of an appraisal mission, February 1978

Brief Description Flood Alleviation Works in DKI Jakarta (2); DPU, tanpa tahun

Brief Description on Jakarta Drainage and Flood Control; Departement of Public Work, No. agenda 93/95; tanpa tahun

Evaluasi Singkat Mengenai Banjir Wilayah DKI Jakarta Periode Januari 1977

- Final Report Phase II, Jakarta Drainage and Flood Control Central Jakarta;
Explanatory note on the Design of The Karang Drainage System (Including
The Tomang Barat and Grogol Polders); Annex VII; Proyek Pengendalian
Banjir Jakarta Raya – NEDECO; Jakarta Drainage and Flood Control Project;
January 1975
- Final Report Phase II, Jakarta Drainage and Flood Control Project: Explanatory note
on the Design of a Drainage System for the Catchment area of The Cakung
Drain; Annex I; Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya-Nedeco-Jakarta
Drainage and Flood Control Project; December 1975
- Indonesia: Preparations for The Execution of The Western Banjir Canal Extension in
Jakarta; Report of an appraisal mission, February 1978
- Laporan Kali Brasi Bendung Ciliwung Katulampa, UPTD, Balai Pendayagunaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
- Laporan Tim Kopro Banjir: *Komando Proyek Pentjegahan Bandjir Djakarta Raya*;
Djakarta: Ditjen Pengairan Dasar DPU, tahun 1965/1966.
- Nedeco-Grontmij-Ilaco; Djakarta Flood Control Preliminary Survey and
Recomendations: No Agenda 87/75; Djakarta; June 1970
- Proyek Pengendalian Banjir Jakarta; *Aspek-aspek Pokok dan Masalah-masalah
Lingkup Proyek Pengendalian Banjir Jakarta* (Laporan), tt
- Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya; *Djakarta Flood Control Preliminary
Survey and Recomendations*; Jakarta: 1970
- Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya; *Flood Alleviation Works in DKI Jakarta*;
Brief Description; Jakarta: Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya; tanpa
tahun
- Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya; *Penjelasan Singkat Proyek Pengendalian
Banjir Jakarta Raya*; Jakarta, DPU, tanpa tahun
- Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya; *Studi Kelayakan Studi Dampak Lingkungan
Untuk Waduk Depok: Final Report*; Jakarta: Proyek Pengendalian Banjir
Jakarta Raya, tanpa tahun

Proyek Pengendalian Banjir Jakarta; *Pola Induk Penanggulangan Banjir DKI Jakarta*, tt

Proyek Pengendalian Banjir; Pengendalian Banjir Jakarta Pusat dengan memakai Instalasi Pompa Kali Cideng, Jakarta: DPU, tt.

Proyek Perancang Pengembangan Sumber-sumber Air; *Petunjuk Instalasi Penakar Hujan Hellmann*; Jakarta: Direktorat Jenderal Pengairan, DPU; 1975.

Arsip DKI Jakarta

Rencana Induk daerah Khusus Ibukota Jakarta 1965 – 1985 disahkan oleh No. 9/DPRGR/P/1967.

Surat Wedana Gambir kepada Kepala Jawatan Urusan Daerah, Surat No. 1707/41
Team Penyusun Rencana Induk DKI Jakarta 1985 – 2005; *Laporan Sektor Banjir, Drainase dan Irigasi*; II-8; 1981/1982

Notulen Dewan Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raya 1952; No. 1 tahun 1952; DPKS 30 Januari 1952

Notulen Dewan Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raya 1952; No. 7/1952, 18 Juni 1952

Notulen Dewan Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raya 1952; No. 7/1952, 18 Juni 1952

Notulen Rapat DPR-GR 1951

Notulen Rapat DPRS-GR Jakarta, 29 April 1952

Pemda DKI; *Rencana Induk Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1965 – 1985*; Jakarta: Pemda DKI, tahun 1967, hal 6 – 7. Rencana Induk daerah Khusus Ibukota Jakarta 1965 – 1985 disahkan DPRGR tahun 1967; No. 9/DPRGR/P/1967.

Lembaran Kota 1952 No. 5

Lembaran negara RI No 27 tahun 1953, sesuai Undang-undang No. 6 tahun 1953

Lembaran Negara RI, No. 70, 1965

LK 1952, No. 16

Keputusan Gubernur KDH Jakarta No.9957/BS/ tanggal 31 Mei 1961

Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. D.IV-1247/b/5/1976 tanggal 16 Pebruari 1976

Keputusan Menteri Kepala Daerah No N.7/2/17/1966, tanggal 2 Maret 1966

Perpustakaan Nasional RI

- Gemeente Batavia tanggal 28 Pebruari 1918; No. 1150, Bijlagen 881
 Gemeente Batavia tanggal 4 Desember 1911; No. 3963
 Gemeente Batavia; No. 794/66 tanggal 1 Pebruari 1913
 Gemeentebld 1927 Nomor 4
 Gemeentebld 1929 No.428
 Gemeentebld 1931 No.149, Stadsgemeente Batavia, Rancangan keputusan, Batavia, April 1931, No. /G.R, Bagian II)
 Gemeentebld 1931 No.150, Stadsgemeente Batavia, Rancangan keputusan, Batavia, 1931, No. /G.R, Bagian II)
 Gemeentebld 1931 No.151, Stadsgemeente Batavia, Batavia, 16 April 1931, No.4289, Afd: II
 Gemeentebld 1931 No.96, Stadsgemeente Batavia, Batavia, 5 Maret 1931, No.2402)Afd: II
 Gemeentebld 1931, No. 149, Stadsgemeente Batavia No. G/R, Bag II, April 1931.
 Gemeentebld 1931, No. 150, Stadsgemeente Batavia No. G/R, Bag II, 1931.
 Gemeentebld 1932, No.23, Stadsgemeente Batavia, Rancangan Keputusan No. G/R/Bag. II; 1934
 Gemeentebld 1932, No.61, Stadsgemeente Batavia, Rancangan Keputusan No. 1640/Bag. II; Tanggal 1 Maret 1932
 Gemeentebld 1933, No.419, Stadsgemeente Batavia
 Gemeentebld 1934 No. 127, Stadsgemeente Batavia, No.2494, Batavia, 14 April 1934, Afd. II
 Gemeentebld 1934 No.28, Stadsgemeente Batavia, No.312, Afd: II, Batavia, 15 Januari 1934
 Gemeentebld 1934, No.122, Stadsgemeente Batavia, No. 2 4 5 1, Afd II
 Gemeentebld 1934, No.122, Stadsgemeente Batavia, No. 2 4 5 1, Afd II
 Gemeentebld 1934, No.132, Stadsgemeente Batavia, No.2499, Afd:II , 14 April 1934
 Gemeentebld 1934, No.92, Stadsgemeente Batavia, Rancangan Keputusan No. /G.R., Afd: II
 Gemeentebld 1934, No.93, Staadsgemeente Batavia, Rancangan keputusan, Batavia, 1934, No. /G.R, Afd: II
 Gemeentebld 1938 No. 377, Stadsgemeente Batavia, Nomor: 14361, Batavia, 5 Nopember 1938
 Gemeentebld 1938 No.98, Staadsgemeente Batavia, No.3581, Batavia, 23 Maret 1938, Afd: II
 Gemeentebld 1938, No. 262, Stadsgemeente Batavia, Nomor: 9568, Batavia, 26 Juli 1938
 Gemeentebld 1938, No. 375, Stadsgemeente Batavia, Nomor: 14336, Batavia, 5 Nopember 1938

- Gemeentebblad 1938, No. 377, Nomor 14361
 Gemeentebblad 1939 No. 148, Stadsgemeente Batavia, Nomor: 2317, Batavia, 14
 Februari 1939
 Gemeentebblad 1939 No. 56, Stadsgemeente Batavia, Nomor: 2451, Batavia, 17
 Februari 1939
 Gemeentebblad 1939, Nomor 76, Stadsgemeente Batavia, Nomor: 4017, Batavia, 22
 Maret 1939
 Gemeentebblad Meester Cornelis, Nomor 57, 12 Mei 1925, GW 1/3/8
 Gemeenteraad Batavia 14 Oktober 1911; No. 87
 Gemeenteraad van Batavia Gedrukte Stukken Jaar 1911, No. 87
 Gemeenteraad; 15 Juli 1927; No. 036/15/17
 Gemeenteraad; 15 September 1927; No. C 36/19/17
 Gemeenteraad; 30 Desember 1926, No. 036/34/19
 Gewestelijk Bestuur der Residentie Batavia No. 3389/24; tanggal 17 Pebruari 1913;
 Bijlagen 5
 Indisch Bouwkundig Tijdschrift; 15 September 1919
 Lembaran Negara Hindia Belanda tahun 1925; No. 378
 Notulen Bataviasche Landbouw 1908, Batavia; Javasche Boekhandel & Drukkerij,
 1908; Bijlagen A
 Notulen Bataviasche Landbouw Vereeniging, 1914; Batavia; Javasche Boekhandel &
 Drukkerij, 1914
 Notulen Bataviasche Landbouw Vereeniging; 30 Agustus 1915, lampiran Nomor
 1718, 3 Pebruari 1915.
 Onderzoek Naar de Mindere Welvaart Der Inlandshe Bevolking op Java en Madoera
 VII Overzicht van de Uitkomsten Der Gewestelijke Onderzoekingen naar de
 Irrigatie en Daaruit Gemaakte Gevolgtrekkingen; Weltevreden, 1910
 Regentschap Batavia, tanggal 26 Juli 1935, No. W 2171/8/9
 De Directeur van Binnelandsch Bestuur, tanggal 29 April 1931; No. 81/1/10,-
 Verhandelingen No. 37, 1870 – 1941
 Verslag van BOW in Nederlands Indie 1923 Vijde Gedeelte; Bevloeing, Afwatering,
 Landsdrukkerij, Weltevreden 1925.
 Verslag van BOW 1915, Vijde Gedeelte; Bevloeing, Afwatering, Landsdrukkerij,
 Weltevreden 1916.
 Verslag van BOW 1922; Vijde Gedeelte; Bevloeing, Afwatering en Waterkerij;
 Landrukkerij, 1924
 Verslag van BOW 1923; Hoofdstuk III; Bagger bedrijf; Landrukkerij, 1928
 Verslag van BOW over het Jaar 1913; Batavia Landsdrukkerij 1916
 Verslag van BOW over het jaar 1915; Batavia: Uitgevens, mijpapyrus, 1918
 Verslag van BOW over het jaar 1916; Gkolff and Co; 1920
 Verslag van BOW over het jaar 1925; Landsdrukkerij, Weltevreden, 1927
 dan 1926; Hoofdstuk III; Bagger bedrijf; Landrukkerij, 1928
 Verslag West Java 1926
 Verslag West Java 1927

Verslag West Java 1929
 Verslag West Java 1930
 Verslag West Java 1933
 Verslag West Java, 1931
 Verslag West Java, 1935
 Verslag West Java, 1938
 Verslag West Java 1939

II. Sumber Koran

Abadi; 13 Juli 1951
 Antara 24 Januari 1981
 Antara; 14 Agustus 1984
 Antara; 2 Januari 1983
 Antara; 20 Januari 1983
 Antara; 20 September 1984
 Antara; 23 Januari 1983
 Antara; 25 Maret 1983
 Antara; 25 November 1984
 Antara; 27 Maret 1983
 Antara; 3 Januari 1976
 Antara; 30 April 1983
 Antara; 4 Januari 1983
 Antara; 7 Januari 1983
 Antara; 8 November 1983
 Berita Antara; 2 Januari 1976
 Berita Antara; 20 Januari 1976
 Berita Antara; 21 Januari 1976
 Berita Antara; 26 Januari 1976
 Berita Antara; 6 Januari 1976
 Berita Buana; 30 Maret 1983
 Berita Buana, 26 September 1977
 Berita Buana; 10 November 1983
 Berita Buana; 12 Januari 1983
 Berita Buana; 13 Januari 1983
 Berita Buana; 14 April 1983
 Berita Buana; 18 Mei 1984
 Berita Buana; 18 November 1983
 Berita Buana; 23 April 1983
 Berita Buana; 25 Mei 1983

Berita Buana; 29 Desember 1982
 Berita Buana; 6 Januari 1983
 Berita Indonesia; 23 Nopember 1960
 Berita Indonesia; 30 Desember 1960
 Bintang Betawi; 14 Januari 1901
Bintang Hindia (De Maleische Revue); 17 Pebruari 1923, No. 7, tahun II
 Bintang Timoer; 6 Januari 1932
 Bintang Timoer; 8 Januari 1932
 Bintang Timur; 5 Januari 1932.
 Bintang Timur; 9 Januari 1932
 Harian Rakjat; 21 Agustus 1951
 Harian Rakjat; Kamis, 16 Agustus 1951
 Indonesia Raja; 11 Oktober 1950
 Indonesia Raja; 2 Nopember 1950
 Indonesia Raja; 27 Juli 1951
 Indonesia Raya, 18 Juni 1951
 Indonesia Raya, 20 April 1951
 Indonesia Raya, 22 Januari 1954
 Indonesia Raya, 23 April 1951
 Indonesia Raya, 23 Mei 1951
 Indonesia Raya, 29 Maret 1955
 Indonesia Raya, 29 Mei 1951
 Indonesia Raya, 4 Juni 1951
 Indonesia Raya, 8 Juni 1951
 Indonesia Raya; 11 Januari 1954
 Indonesia Raya; 12 Januari 1954
 Indonesia Raya; 14 Januari 1954
 Indonesia Raya; 16 Oktober 1950
 Indonesia Raya; 18 Januari 1954
 Indonesia Raya; 2 Nopember 1950
 Indonesia Raya; 20 Januari 1954
 Indonesia Raya; 21 Januari 1954
 Indonesia Raya; 26 Januari 1954
 Indonesia Raya; 6 Oktober 1950
 Indonesia Raya; 7 Pebruari 1954
 Indonesia Raya; 8 Januari 1954
 Intisari; 2002
 Jurnal Ekuin; 22 Desember 1982
 Jurnal Ekuin; 31 Desember 1981
 Keng Po; 25 Maret 1933
 Kompas, 11 Pebruari 1970
 Kompas; 13 Januari 1983
 Kompas; 15 Januari 1983

Kompas; 15 November 1983
Kompas; 16 November 1983
Kompas; 17 Mei 1984
Kompas; 18 Juli 1983
Kompas; 2 Agustus 2007
Kompas; 2 Pebruari 1976
Kompas; 20 Januari 1977
Kompas; 21 Januari 1976
Kompas; 24 Januari 1981
Kompas; 26 Januari 1983
Kompas; 29 Desember 1981
Kompas; 29 Juni 1965
Kompas; 3 November 1983
Kompas; 3 Pebruari 1976
Kompas; 30 April 1983
Kompas; 4 Januari 1983
Kompas; 5 November 1983
Kompas; 8 Januari 1983
Kompas; 8 September 1981
Kompas; 9 Desember 1982
Merdeka 25; Januari 1960
Merdeka; 30 April 1983
Merdeka; No. 46, tahun 7, 13 Nopember 1954
Merdeka; 4 Maret 1953
Merdeka; 15 Peb 1960
Merdeka; 20 Pebruari 1953
Merdeka; 22 Januari 1979.
Merdeka; 29 Juli 1960
Merdeka; 30 Maret 1953
Merdeka; 4 Maret 1953
Merdeka; 6 Pebruari 1960
Merdeka; 7 Maret 1953
Merdeka; 9 Juni 1955
Merdeka; 19 Pebruari 1960
Merdeka; 1 Pebruari 1952
Merdeka; 1 Pebruari 1979
Merdeka; 1 September 1954
Merdeka; 10 Januari 1984
Merdeka; 10 Pebruari 1960
Merdeka; 11 Januari 1960
Merdeka; 11 Pebruari 1960
Merdeka; 12 Januari 1953
Merdeka; 12 Pebruari 1960

Merdeka; 13 Pebruari 1960
 Merdeka; 17 Pebruari 1960
 Merdeka; 19 Pebruari 1953
 Merdeka; 2 Januari 1952
 Merdeka; 20 Januari 1979
 Merdeka; 22 Oktober 1982
 Merdeka; 23 Januari 1979
 Merdeka; 24 Januari 1952
 Merdeka; 25 Januari 1979
 Merdeka; 25 Juni 1983
 Merdeka; 26 Januari 1952
 Merdeka; 26 Nopember 1984
 Merdeka; 3 Januari 1979
 Merdeka; 3 September 1954
 Merdeka; 31 Januari 1952
 Merdeka; 5 Pebruari 1979
 Merdeka; 7 Pebruari 1953
 Merdeka; 8 Pebruari 1960
 Merdeka; 9 Juni 1955
 Pelita; 14 Januari 1981
 Pelita; 23 Mei 1980
 Pelita; 4 Pebruari 1982
 Pelita; 8 April 1983
 Prisma, No. 5, 1992, LP3ES
 Republika; 15 Februari 2007
 Republika; 19 Nopember 2005
 Republika; 22 Januari 2006
 Sin Po; 27 September 1915; No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po; 7 September 1915; No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po 14 Pebruari 1918; No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po, 14 Januari 1918; No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po, 4 Pebruari 1918, No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po; 14 Pebruari 1918; No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po; 15 Pebruari 1918; No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po; 16 Pebruari 1918; No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po; 18 Pebruari 1918; No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po; 19 Pebruari 1918; No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po; 20 Pebruari 1918; No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po; 21 Pebruari 1918; No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po; 28 Pebruari 1918; No Microfilm 444/PN/M
 Sin Po; 29 Desember 1931
 Sin Po; 2 Januari 1932
 Sin Po; 4 Januari 1932

Sin Po; 6 Januari 1932
 Siang Po, 2 Januari 1932
 Sin Po, 2 Nop 1950
 Sin Po; 20 Nop 1950
 Sin Po, 10 Desember 1956
 Sinar Harapan 22 Agustus 1984
 Sinar Harapan 27 April 1983
 Sinar Harapan 29 Desember 1981
 Sinar Harapan 3 Oktober 1983
 Sinar Harapan 7 Pebruari 1985
 Sinar Harapan; 7 April 1984
 Sinar Harapan; 10 April 1984
 Sinar Harapan; 10 November 1983
 Sinar Harapan; 11 November 1982
 Sinar Harapan; 16 Desember 1982
 Sinar Harapan; 17 Desember 1984
 Sinar Harapan; 17 Mei 1984
 Sinar Harapan; 21 Maret 1983
 Sinar Harapan; 21 Pebruari 1983
 Sinar Harapan; 22 Desember 1983
 Sinar Harapan; 22 Maret 1983
 Sinar Harapan; 22 November 1980
 Sinar Harapan; 24 Maret 1983
 Sinar Harapan; 25 Maret 1983
 Sinar Harapan; 26 Januari 1977
 Sinar Harapan; 27 Januari 1985
 Sinar Harapan; 27 September 1984
 Sinar Harapan; 28 Maret 1983
 Sinar Harapan; 29 Desember 1981
 Sinar Harapan; 29 Maret 1983
 Sinar Harapan; 29 Mei 1983
 Sinar Harapan; 30 Desember 1981
 Sinar Harapan; 4 Januari 1983
 Sinar Harapan; 4 September 1984
 Sinar Harapan; 5 Januari 1976
 Sinar Harapan; 7 April 1983
 Sinar Harapan; 7 April 1984
 Sinar Harapan; 8 Januari 1984
 Sinar Harapan; 9 April 1984.
 Sinar Harapan; 9 Maret 1983
 Starweekly, 21 Mei 1960
 Suara Karya 24 Pebruari 1977
 Suara Karya, 8 Februari 1983

Suara Karya; 11 Januari 1984
 Suara Karya; 12 November 1983
 Suara Karya; 14 Maret 1983
 Suara Karya; 15 Oktober 1982
 Suara Karya; 16 April 1984
 Suara Karya; 17 Januari 1985
 Suara Karya; 21 Desember 1982
 Suara Karya; 21 Oktober 1982
 Suara Karya; 23 November 1982
 Suara Karya; 24 Januari 1983
 Suara Karya; 29 Oktober 1982
 Suara Karya; 3 Pebruari 1976
 Suara Karya; 5 Januari 1976
 Suara Karya; 5 Juni 1982
 Suara Karya; 5 Mei 1980
 Suara Karya; 6 Januari 1983
 Suara Karya; 7 Pebruari 1977
 Suara Karya; 7 Pebruari 1985
 Suara Karya; 8 Pebruari 1985
 Suara Karya; 9 Januari 1984
 Suara Rakyat Republik Indonesia; 20 Januari 1979
 The Jakarta Post; 4 Oktober 1983

III. Majalah

Business News; 18 Januari 1985
De Ingenieur, 1949, No. 4 dan 5,
 Prof. Ir. H van Breen; Verbetering van den Waterstaat van de Hoofdplaats Batavia;
 Eerste Gedeelte; dalam *De Ingeneuer*; No. 25, tahun 1923.
 Prof. Ir. H van Breen; Verbetering van den Waterstaat van de Hoofdplaats Batavia;
 Tweede Gedeelte; dalam *De Ingeneuer*; No. 26, tahun 1923
 Prof. Ir. H van Breen; Verbetering van den Waterstaat van de Hoofdplaats Batavia;
 Derde Gedeelte; dalam *De Ingeneuer*; No. 27, tahun 1923
 Prof. Ir. H van Breen; Verbetering van den Waterstaat van de Hoofdplaats Batavia;
 Vierde Gedeelte; dalam *De Ingenieur in Nederlands Indie*; No. 28, 1923.
 De Orient, No. 2, 9 Januari 1932.
 De Orient, No. 3, 16 Januari 1932
 Kotapraja 11 – 12 tahun ke 4, 28 Pebruari 1954
 Kotapraja 1951, November 1951
 Kotapraja No. 10 – 11, tahun ke 3, 15 Pebruari 1953

Kotapraja No. 11 – 12 tahun ke 6 Juni/Juli 1956
Kotapraja No. 11 – 12, 25 September 1951
Kotapraja No. 11, 1953
Kotapraja No. 3 tahun 5, 30 Nov, 1954
Kotapraja No. 3, tahun ke 3, 15 Oktober 1952
Kotapraja No. 5 tahun ke 2 September 1951
Kotapraja No. 5 tahun ke 7, 31 Januari 1957
Kotapraja No. 9 tahun 4, 15 Januari 1954
Kotapraja tahun 1, No. 1, Juni 1950
Kotapraja, No. 10 -11, tahun ke 3, 15 Pebruari 1953
Kotapraja, No. 5 tahun 4; 15 Nopember 1953
Kotapraja, No. 6, th, 6, 31 Januari 1956
Kotapraja; 30 Januari 1954
Lukisan Mingguan, tahun 1 No. 42 tahun 1949
Lukisan Mingguan, tahun 1, No. 46, 1949
Majalah Merdeka No. 46, th 7, Nopember 1954
Majalah Merdeka, No. 38 th VII, 18 September 1954
Media Jaya, 15 April 1976
Mingguan Djaja, No. 238 Tahun V, 13 Agustus 1966
Mingguan Djaja, No. 55, 9 Pebruari 1963
Mingguan Djaja, th ke 2, No. 51, 12 Januari 1963
Mingguan Djaja, th ke II, No. 57, 23 Pebruari 1963
Mingguan Djaja, Th. Ke II, No. 54, 2 Pebruari 1963
Mingguan Djaja; 13 Agustus 1966
Mingguan Djaja; 2 Pebruari 1963
Natuurkundig Tijdschrift voor Ned Indie, 1920 Jilid LXXIX
Pandji Poestaka; Januari 1932
Tempo; 4 Agustus 2007
Tempo; Edisi 21 – 27 Mei 2007
Warta Berita Antara; No. 235; 22 Agustus 1977
Warta Berita; 19 Januari 1977
Warta Berita; 30 Mei 1977
Warta Berita; 4 Pebruari 1979

IV. Buku

- Abdurrachman, Sukri (ed); *Seni di Ruang Publik: Monumen dan Tata Kota*; Jakarta: LIPI Press; 2007
- Abeyasekere, Susan(ed); *From Batavia to Jakarta: Indonesia's Capital 1930s to 1980s*; Australia: Monash University, 1985
- Alisjahbana, MA, Dr. Ir.; *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*; Surabaya: ITS Press, 2006
- Anhar Gonggong dkk; *Sejarah Nasional Indonesia VII: Lahir dan Berkembangnya Orde Baru*, Jakarta: Depdikbud, 1993
- Blusse, Leonard; *Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan Belanda di Batavia VOC*; Jakarta: Pustaka Perkasa, 1987
- Braudel, Fernand; *The Mediterranean and The Mediterranean World in The Age of Philip II*, Vol. I, Great Britain: William Collins Sons and Cp Ltd, 1972
- Budiaman; *Monografi Daerah Khusus Ibukota Jakarta I*, Jakarta: Depdikbud, tt
- Burke, Peter (terj); *Sejarah dan Teori Sosial*; Jakarta: Yayasan Obor, 2001
- Damais, Soedarmadji J.H. dkk; *Karya Jaya: Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945 – 1966*; Jakarta: Pangeran Jayakarta Offset, 1977
- De Haan, F; *Oud Batavia*; Bandung; 1922
- Dinas Museum dan Sejarah; *Kampung Tua di Jakarta*; Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah DKI, 1993
- Eka Budianta; *Filantropi Seni, Sosialisasi dan Pendidikan Kesenian; Kumpulan Makalah, Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi Buku II, tahun 2003*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2003
- Fakih, Farabi; *Membayangkan Ibukota Jakarta di Bawah Soekarno*; Yogyakarta: Ombak, tahun 2005
- Forestier, Hubert, (terj); *Ribuan Gunung, Ribuan Alat Batu: Prasejarah Song Keplek, Gunung Sewu, Jawa Timur*; Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007

- Ghozally, Fitri R (peny); *Dari Batavia Menuju Jakarta*; Jakarta: MM Corp, 2004
- Hadisutjipto, SZ.; *Sekitar 200 Tahun Sejarah Jakarta*; Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah DKI, 1979
- Hadiwidjojo, MM. Purbo dkk; *Kamus Hidrologi*; Jakarta: Depdikbud, 1987
- Hariyono, Paulus; *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*; Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Heering, Bob; *Mohammad Hoesni Thamrin: Tokoh Betawi, Nasionalis Revolusioner Perintis Kemerdekaan*; Jakarta: Hasta Mitra, 2003
- Heuken SJ, Adolf; *Menteng: Kota Taman Pertama di Indonesia*; Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka; 2001
- Hisyam, Muhammad (ed); *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Hutomo, Malikusworo (ed); *Teluk Jakarta: Sumber daya Sifat-sifat Oseanologis Serta Permasalahannya*; Jakarta: Proyek Penelitian Sumber Daya Ekonomi, Jakarta: LIPI, 1977
- Kantor Sensus dan Statistika DKI Jakarta; *Jakarta Dalam Angka*, Jakarta: 1984
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Republik Indonesia; *Pembangunan Kotabaru Kebajoran*, Djakarta: Kementerian Pengadjaran Umum dan Tenaga RI, 1953
- Kementerian Penerangan; *Republik Indonesia: Kotapradja Djakarta Raya, 7 Tahun Kotapradja*, Jakarta: Deppen, 1952
- Koentjaraningrat; *Pengantar Ilmu Antropologi*; Jakarta: Gramedia; 1989
- Krausse, Gerald Hans; *The Kampungs of Jakarta, Indonesia: a Study of Spasial Patterns in Urban Poverty*; Hawai: Uinversity of Pittsburg; 1975
- Legge, John D; *Sukarno: Biografi Politik*; Jakarta: Sinar Harapan, 2001
- Leirissa, RZ (peny); *Sunda Kelapa Sebagai Bandar Jalur Sutera: Kumpulan Makalah Diskusi*; Jakarta: Depdikbud, 1995
- Leirissa, RZ; Jakarta: *Dari Kumpulan Kampung Menjadi Megapolis; Makalah Temu Tokoh Sejarah dan Purbakala*; Depbudpar, 2002.

- Lohanda, Mona; *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*; Jakarta: Jakarta Masup, 2007
- Loyd, Christoper; *The Structures of History*, Great Britain: TJ Press Ltd, 1993
- Melville, C. Branch; *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasannya*; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Mundardjito; Kota Tua: Masalah Perlidungan, *Makalah* pada Ceramah Ilmiah Progam Studi Arkeologi FIB UI, 25 Maret 2008
- Muntaco, Firman; *Gambang Jakarte*; Jakarta: Masup Jakarta; 2006
- Nas, J.M. Peter, dkk (Peny); *Jakarta Batavia: Esai Kultural*; Jakarta: Batavia, 2007.
- Nas, Peter J.M. (ed); *Urban Symbolism: Studies in Human Society*; Leiden-NewYork-Koln; EJ. Brill, 1993
- Pemda DKI; *Gita Jaya: Catatan H Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966 – 1977*, Jakarta: Pemda DKI, 1977
- Pemda DKI; *Laporan Akhir Penyusunan Desain Hutan Kota DKI Jakarta*, naskah stensilan; 1996,
- Pour, Julius; *Dari Gelora Bung Karno ke Gelora Bung Karno*; Jakarta: tanpa penerbit, 2004
- Reid, Anthony; *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*; Jakarta: LP3ES, 2004
- Republik Indonesia; *Kotapraja Djakarta Raja Kementerian Penerangan, 7 tahun Kotapraja*, Djakarta Raya, 1952
- Sahur, Ahmad dkk; *Migrasi, Kolonisasi, Perubahan Sosial*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988
- Shahab, Yasmin Zaki (ed); *Betawi Dalam Perspektif Kontemporer: Perkembangan Potensi dan Tantangannya*; Jakarta: Lembaga Kebudayaan Betawi; 1977
- Sinulingga, Ir. D, M.Si; *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal*; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005

- Siswoko, Ir. Dipl. HE; Banjir, Masalah Banjir dan Cara Mengatasinya; *Makalah*; Jakarta, 2 April 2002
- Soehoed, AR; *Membenahi Tata Air Jabotabek: Seratus Tahun Bandjir Kanaal Hingga Ciliwung Floodway*; Jakarta: Djambatan, 2004
- Soehoed, AR; *Proyek Pantura: Transformasi dari Ibukota Propinsi ke Ibukota Negara*; Jakarta: Djambatan, 2004
- Sudarmaji, dkk; *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Dalam Rangka Pengendalian Tata Air Berwawasan Lingkungan, dalam Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*; Yogyakarta: Bigraf Publishing Bekerjasama dengan STTL, 2004
- Sudiro, Mutohar; *Profil dan Struktur Fungsi Pekerjaan Umum Dari Masa ke Masa*; Jakarta: DPU; 1986
- Suntana SE, MBA, *Konsep Design Arsitektur Yang Berwawasan Lingkungan di Kawasan Permukiman di Perkotaan, Makalah dalam Seminar Sehari Mencari Identitas Arsitektur Kota Jakarta*, Oktober, 1993
- Surjomihardjo, Abdurrachman; *Beberapa Segi Masyarakat Budaya Jakarta*; Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah DKI, 1973
- Surjomihardjo, Abdurrachman; *Perkembangan Kota Djakarta*; Jakarta: Dinas Museum dan Sedjarah DCI, 1970
- Takashi Inoguri dkk (ed); *Kota dan Lingkungan: Pendekatan baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*; Jakarta; LP3ES, 2003
- Tambunan, Rudi P; *Dampak Perkembangan Fisik Kota Terhadap Pola Tata Air Ekosistem Dataran Rendah Jakarta, Disertasi Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana UI*, Depok, 2005.
- Thee Liang Gie; *Sejarah Pemerintahan Kota Djakarta*, Jakarta: Kotapraja Djakarta Raja, 1958
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Jakarta: Balai Pustaka; 2002
- Verstappen. H.Th; *Jakarta Bay A Geomorphological Study on Shoreline Development*; 'sGravenhage: Drukkerij Trio, 1953

Wertheim, WF; *Indonesian Society in Transition*; The Hague: van Hoeve Publishers LTD, 1969

Yunus, Hadi Sabari; *Struktur Tata Ruang Kota*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2005

Yusuf, Yasin; *Anatomi Banjir Kota Pantai: Perspektif Geografi*; Surakarta: Pustaka Cakra, 2005

Zuhdi, Susanto; *Perspektif Tanah Air dalam Sejarah Indonesia; Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia; 25 Maret 2006*

V. Wawancara

Wawancara dengan AR. Soehoed (Konsultan Proyek-proyek Pengairan Jakarta)

Wawancara dengan Andi Sudirman (Penjaga Pintu air Katulampa)

Wawancara dengan Mak Enoh (umur 75 tahun) Warga Kebayoran yang digusur



Lampiran 1
Panjang dan Luas Saluran Mikro Per Kecamatan di DKI Jakarta

| No | Kecamatan | Kiri | | Kanan | |
|----|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Panjang | Luas | Panjang | Luas |
| 1 | Gambir | 157.488,68 | 103.759,12 | 156.068,70 | 136.332,03 |
| 2 | Kemayoran | 107.938,75 | 68.398,90 | 109.681,80 | 69.087,13 |
| 3 | Menteng | 72.183,40 | 49.543,87 | 72.183,40 | 49.543,87 |
| 4 | Sawah Besar | 76.467,30 | 51.303,88 | 77.300,40 | 51.813,74 |
| 5 | Senen | 69.591,40 | 53.326,94 | 69.535,40 | 53.293,34 |
| 6 | Tanah Abang | 109.651,05 | 72.669,13 | 109.791,80 | 73.046,38 |
| 7 | Cempaka Putih | 78.162,10 | 61.347,08 | 78.102,10 | 61.311,08 |
| | JAKARTA PUSAT | 739.939,38 | 519.728,44 | 740.551,30 | 553.465,69 |
| 1 | Penjaringan | 191.196,00 | 160.040,40 | 190.796,00 | 177.830,40 |
| 2 | Tanjung Priok | 205.211,00 | 129.149,40 | 205.033,00 | 129.162,60 |
| 3 | Koja | 104.907,75 | 60.663,15 | 104.932,80 | 60.174,18 |
| 4 | Cilincing | 134.860,00 | 74.934,35 | 134.120,00 | 75.538,40 |
| 5 | Pademangan | 74.852,10 | 50.806,06 | 75.526,10 | 51.210,46 |
| | JAKARTA UTARA | 711.026,85 | 475.593,36 | 710.407,90 | 493.916,04 |
| 1 | Cipinang Besar Selatan | 71.734,00 | 52.350,90 | 71.657,00 | 52.211,50 |
| 2 | Matraman | 16.352,20 | 13.630,36 | 15.854,60 | 13.362,80 |
| 3 | Kramat Jati | 52.326,00 | 34.100,60 | 46.296,00 | 29.387,60 |
| 4 | Pulo Gadung | 8.883,99 | 5.525,40 | 9.554,00 | 5.793,40 |
| 5 | Pasar Rebo | 45.042,00 | 24.211,70 | 41.511,00 | 22.306,70 |
| 6 | Cakung | 42.135,50 | 25.225,80 | 42.135,50 | 25.225,80 |
| 7 | Duren Sawit | 43.828,00 | 24.463,60 | 43.788,00 | 24.439,60 |
| 8 | Ciracas | 59.925,00 | 39.224,20 | 58.127,50 | 37.963,60 |
| 9 | Cipayung | 1.904,00 | 1.425,10 | 1.404,00 | 925,10 |
| 10 | Makasar | 11.715,00 | 10.875,00 | 10.665,00 | 10.245,00 |
| | JAKARTA TIMUR | 353.872,69 | 231.032,66 | 340.992,60 | 221.861,10 |
| 1 | Kebayoran Baru | 207.836,40 | 156.518,64 | 208.804,90 | 174.594,69 |
| 2 | Kebayoran Lama | 167.397,00 | 211.317,00 | 165.656,50 | 101.810,45 |
| 3 | Pasar Minggu | 78.074,00 | 50.765,00 | 77.670,00 | 51.882,00 |
| 4 | Tebet Barat | 20.961,00 | 13.272,50 | 20.331,00 | 12.546,50 |
| 5 | Tebet Timur | 22.749,00 | 13.044,90 | 19.024,00 | 10.930,50 |
| 6 | Cilandak | 33.111,50 | 19.650,50 | 31.635,00 | 18.305,90 |
| 7 | Pancoran | 79.302,00 | 43.922,80 | 77.575,00 | 42.643,80 |
| 8 | Pesanggrahan | 75.513,20 | 41.707,22 | 75.716,20 | 41.816,72 |
| 9 | Setia Budi | 61.890,00 | 43.961,50 | 61.323,00 | 40.792,10 |
| 10 | Jagakarsa | 20.465,00 | 12.228,80 | 20.325,00 | 13.232,80 |
| | JAKARTA SELATAN | 767.299,10 | 606.388,86 | 758.060,60 | 508.555,46 |
| 1 | Grogol Petamburan | 193.636,25 | 129.101,72 | 193.259,00 | 129.111,34 |
| 2 | Kebon Jeruk | 74.893,00 | 44.474,50 | 74.901,50 | 44.478,70 |
| 3 | Tambora | 82.372,10 | 109.738,44 | 81.042,90 | 63.241,74 |
| 4 | Cengkareng | 111.724,31 | 61.660,22 | 113.804,10 | 62.800,77 |
| 5 | Kalideres | 38.740,00 | 48.828,70 | 34.064,80 | 45.130,58 |
| 6 | Kembangan | 46.650,00 | 25.896,90 | 46.650,00 | 25.896,90 |
| 7 | Pal Merah | 53.440,54 | 32.888,01 | 53.275,20 | 32.807,79 |
| | JAKARTA BARAT | 601.456,20 | 452.588,49 | 596.997,50 | 403.467,82 |
| | SELURUH DKI | 3.173.594,22 | 2.285.331,81 | 3.147.009,90 | 2.181.266,11 |

Lampiran 2
Nama Jalan di Sekitar Menteng yang Berubah

| | | |
|-----|------------------------------|---|
| 1 | Biltonweg | Jln. Belitung |
| 2. | Villalaan | Jln. Cendana |
| 3. | Pasar Tjiplakweg | Jln. Cilacap |
| 4 | Cheribonweg | Jln. Cirebon |
| 5. | Spoorweglaan/van Heutzplein | Jln. Cut Nyak Dien |
| 6. | Oranje Boulevard | Jln. Diponegoro |
| 7. | Soendaweg | Jln. Gereja Teresia |
| 8. | Theresiakerkweg | Jln. H Agus Salim bag. Selatan |
| 9. | Laan Holle | Jln. H Agus Salim bag. Utara |
| 10. | Jawaweg | Jln. HOS. Cokroaminoto |
| 11. | Nassau Boulevard | Jln. Imam Bonjol |
| 12. | Oude Tamarinlanden | Jalan Asem Lama/ Jln. KH. Wachid Hasyim |
| 13. | Djogjaweg | Jln. Ki Mangunsarkoro |
| 14. | Dambrinkweg dan Van Breenweg | Jln. Latuharhary |
| 15. | Molukkenweg | Jln. Maluku |
| 16. | Madoeraweg | Jl. Mohammad Yamin |
| 17. | Oud Gondangdia | Jln. HP. Suroso |
| 18. | Regentsselaan | Jln. Rasamala |
| 19. | Nieuw Tamarindelaan | Jln. Sam Ratulangie |
| 20. | Sumatraweg (Bag. Barat) | Jln. Sunda |
| 21. | Grisseweg | Jln. Sutan Syahrir |
| 22. | Palmenlaan | Jln. Suwiryo |
| 23. | Serangweg | Jln. Syamsurijal |
| 24. | Mampangweg | Jln. Teuku Cik Ditiro |
| 25. | Van Heutsz Boulevard | Jln. Teuku Umar |
| 26. | Burgemeester Bisschopplein | Taman Surapati |
| 27. | Viosveld | Lapangan Persija |
| 28. | Sluisweg | Jalan Tambak |
| 29. | Jalan baru | Jalan Thamrin |
| 30. | Rijswijkstraat | Jalan Majapahit |

| | | |
|-----|-----------------------|--------------------------|
| 31. | Nieuwe Vliegvedlaan | Jalan Angkasa |
| 32. | Jalan Kemayoran | Jalan Garuda |
| 33. | Marinelaan | Jalan Elang |
| 34. | Laan Halkema | Jalan Kakatua |
| 35. | Laan Kadiman | Jalan Kasturi |
| 36. | Laan Cornelis | Jalan Merpati |
| 37. | Gang Struwer | Jalan Bangau |
| 38. | Eyemanlaan | Jalan Kimia |
| 39. | Eyemanpark | Taman Kimia |
| 40. | Boxlaan | Jalan Borobudur |
| 41. | Bontiusweg | Jalan Mendut |
| 42. | Gang Kelingkit | Jalan Kalasan |
| 43. | Landhuisweg | Jalan Tambak Simpang |
| 44. | Matraman Plantsoen | Taman Matraman |
| 45. | Ysfabrieklaan | Jalan Talang |
| 46. | Vander Houtland | Jalan Bonang |
| 47. | Promptweg | Jalan Sibayak |
| 48. | Rivierlaan | Jalan Cilosari |
| 49. | Hevcaweg | Jalan Dempo |
| 50. | Stillelaan | Jalan Ciliman |
| 51. | Alataslaan | Jalan Cimandiri |
| 52. | Vioslaan | Jalan Cisadane |
| 53. | Viosplein Zuid | Jalan Cidurian |
| 54. | Viosplein Noord | Jalan Ciasem |
| 55. | Viosplantsoenweg | Jalan Citandui |
| 56. | Dierentuin laan | Jalan Kebun Binatang I |
| 57. | Zwembadweg | Jalan Kebun Binatang II |
| 58. | Gang Holle Dierentuin | Jalan Kebun Binatang III |
| 59. | Tjikinilaan | Jalan Kebun Binatang IV |
| 60. | Spoorweglaan | Jalan Lengkong |
| 61. | Nieuw Tamarindelaan | Jalan Asam Baru |
| 62. | Engelse Kerkweg | Jalan Gereja Inggris |
| 63. | Drukkerijweg | Jalan Percetakan Negara |
| | | |

(Sumber: Indonesia Raya; 6 Oktober 1950)

Lampiran 3:

Daftar Istilah

Abrasi: Proses pengausan akibat gerakan bahan rombakan di sungai di laut atau oleh angin dan es

Aliran gravitasi: aliran air yang lebih dikuasai oleh pengaruh gravitasi

Alluvium: lempung, lanau pasir, kerikil, kerakal atau bahan rombakan lain yang diendapkan oleh air

Bangunan sungai: adalah bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian, misalnya bendungan, bendung, tanggul, pintu air dan sebagainya.

Banjir kiriman: banjir yang terjadi disebabkan oleh peningkatan debit air sungai yang mengalir dari DAS dan berkurangnya kapasitas saluran atau daya tampung saluran atau sungai di sekitarnya.

Banjir lokal: banjir yang disebabkan oleh tingginya intensitas hujan dan belum tersedianya sarana drainase yang memadai. Banjir lokal lebih bersifat setempat sesuai dengan atau seluas kawasan sebaran hujan lokal.

Banjir rob: banjir yang disebabkan oleh tingginya pasang surut air laut yang melanda daerah di pinggiran laut atau pantai.

Banjir tahunan: luah puncak harian yang tertinggi dalam tahun air atau banjir yang ketinggian atau luahnya disamai atau dilampaui rata-rata sekali setiap tahun.

Banjir: suatu keadaan sungai dimana aliran airnya tidak tertampung oleh palung sungai

Bantaran sungai: adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Yang dimaksud dengan palung sungai adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu.

Bantaran: tanah sempai yang hamper merata di bagian bawah lembah sungai dan hanya dibanjiri apabila aliran sungai melebihi kapasitas angkut alur normal

Basin (cekungan) daerah aliran sungai atau danau

Canal (terusan): alur buatan yang terbuka

Daerah hujan: luas daerah tempat hujan tercurah

Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang telah dibebaskan

Daerah Pengaliran Sungai (DPS) adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah dimana air meresap dan/atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan. DPS sering disamakan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS)/ *Catchment Area/River basin*

Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Daerah retensi: adalah lahan yang ditetapkan untuk menampung air banjir untuk sementara waktu.

Daerah sempadan adalah lahan yang dibatasi oleh garis sempadan dengan kaki tanggul sebelah luar atau antara garis sempadan dan tebing sungai untuk sungai tidak bertanggul.

Dasar sungai: bagian terendah lembah sungai yang dibentuk oleh aliran air dan sepanjang alur itu sebagian besar endapan dan larian bergerak dalam waktu antara banjir.

Dataran alluvium: dataran yang terbentuk dari endapan bahan alluvium yang dikikis dari daerah yang lebih tinggi

Dataran Banjir ("Flood Plain") adalah lahan/dataran di kanan kiri sungai yang sewaktu-waktu bisa tergenang banjir (+/- 50% wilayah DKI Jakarta berada di dataran banjir 13 sungai)

Drain (parit) saluran atau alur kecil yang mengalirkan air dari tanah atau akufer oleh pengaruh gravitasi untuk mengendalikan paras air

Drainage: pembuangan air permukaan atau air tanah dari suatu daerah tertentu oleh pengaruh gravitasi atau pemompaan

"*Flood Damage Management*": pengelolaan banjir sedemikian rupa agar dampak/kerugian yang ditimbulkannya minimal

"*Flood Damage Mitigation*": upaya menekan besarnya bencana akibat banjir

"*Flood Plain Management*": pembudidayaan dataran banjir ("*flood plain*") sedemikian rupa sehingga genangan banjir yang kemungkinan terjadi menimbulkan masalah yang minimal

Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman sungai dihitung 5 meter dari luar kaki tanggul untuk sungai yang bertanggul dan ditetapkan tersendiri untuk sungai yang tidak bertanggul dan bangunan sungai

Gerimis: curah hujan yang agak seragam terdiri dari hanya tetesan air yang halus (bergaris tengah kurang 0,5 mm) dan sangat rapat antara satu dengan lainnya

Hidrology perkotaan: cabang hidrologi yang berhubungan dengan hidrologi daerah kota yang sebagian besar terdiri dari permukaan hampar kedap dan timbunan lahan buatan dengan menitikberatkan kepada aruh pembangunan kota

Holosen: Masa kini era kuartar yang dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu dan ditandai oleh pemanasan iklim dan naiknya permukaan laut.

Hujan: curahan air cair baik dalam bentuk tetesan yang bergaris tengah melebihi 0,5 mm maupun yang lebih kecil dan terhambur luas

Hydrology: ilmu yang berhubungan dengan air di bumi, keterdapatannya, peredarannya dan sebarannya persifatan kimia dan fisiknya, gaya balik dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup.

Kipas alluvium: endapan alluvium suatu sungai yang muncul dari satu jurang ke dataran lepas

Morfologi sungai: ilmu tentang pembentukan dasar sungai dan dataran banjir dan bentuk sungai akibat tindak air.

Palung sungai adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu.

Penanggulangan Banjir (*"Flood Fighting"*): salah satu kegiatan Satkorlak/Satlak Penanggulangan Bencana.

Pengendalian Banjir (*"Flood Control"*) upaya struktur untuk debit banjir sampai tingkat tertentu yang layak, dan bukan untuk debit banjir yang terbesar.

Pleistosen: era kuartar yang berlangsung dari 1,8 juta tahun sampai 10.000 tahun yang lalu. Periode yang panjang ini dibagi menjadi tiga bagian (bawah, tengah dan atas)

Polder: tanah rendah yang diperoleh dari laut atau badan air lain dengan membangun tanggul.

Rawa: Tanah rendah yang digenangi air yang biasanya terletak di daerah pantai dan banyak terdapat tumbuhan air.

Reservoir (waduk) badan air alam atau buatan yang digunakan untuk menyimpan, mengatur dan mengendalikan sumber daya air

Retarding basin: cekungan yang mengurangi puncak aliran banjir suatu sungai melalui penyimpanan sementara

Sediment (endapan) bahan kepingan yang diangkut oleh air dari tempat asalnya ke tempat pengendapan. Di alur air, endapan adalah bahan *alluvium* yang dibawa secara mengampai atau sebagai beban dasar.

Sclokan: jalan air yang dangkal di pinggir jalan raya untuk saluran permukaan

Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai